



RKPD

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

**TAHUN
2024**





BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/ M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 29);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 88);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

21. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
- (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2024 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 3

Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024.

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pasal 5

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut:
 - Bab I : PENDAHULUAN
 - Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - Bab III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - Bab IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VII : PENUTUP

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 4 Juli 2023

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
pada tanggal 4 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023 NOMOR 614

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN..... I-2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I-4
 1.1.1 Hubungan dengan RKP Nasional I-4
 1.1.2 Hubungan dengan RKPD Provinsi Lampung..... I-5
 1.1.3 Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026..... I-5
 1.1.4 Hubungan dengan Renja OPD I-5
 1.1.5 Hubungan dengan RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039..... I-5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN..... I-5
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... II-1
2.1 KONDISI UMUM DAN KONDISI DAERAH..... II-1
 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-14
 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum..... II-22
 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-71
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI
DENGAN TAHUN 2022 DAN REALISASI RPJMD II-74
 2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten
Pesawaran Tahun 2022..... II-74
 2.2.2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Pesawaran
Tahun 2022..... II-81
 2.2.3 Kemajuan Pencapaian Target RPJMD II-336
 2.2.4 Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026..... II-337
 2.2.5 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... II-342
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH..... II-344
 2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah II-345
 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah II-346

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH III-1
 3.1.1 Kondisi dan Arahkan Perekonomian Nasional III-1
 3.1.2 Kondisi dan Arahkan Perekonomian Provinsi Lampung III-2
 3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Pesawaran III-4
 3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 III-9
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH..... III-13
 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-14
 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-25
 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-36

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN DAERAH IV-1
 4.1.1 Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Pesawaran IV-2
4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 IV-6
 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024 IV-6
 4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024.... IV-8
 4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun
2023 IV-8
4.3 SASARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KABUPATEN PESAWARAN IV-19

4.4 SASARAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
KABUPATEN PESAWARAN IV-21

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

5.1 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN BERDASARKAN
PRIORITAS KABUPATEN TAHUN 2024 V-1

5.2 RENCANA PAGU INDIKATIF BELANJA..... V-15

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

6.1 SASARAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 VI-1

6.2 SASARAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024..... VI-2

6.3 INOVASI DAERAH..... VI-18

6.3.1 Inovasi Benar Berkah Berkat Bapak Siji..... VI-18

6.3.2 Inovasi TABIK PUN..... VI-22

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Pesawaran menurut Kecamatan..... II-1

Tabel 2.2 Kemiringan Lereng menurut Kecamatan II-2

Tabel 2.3 Kondisi Klimatologi Tahun 2022 II-3

Tabel 2.4 Formasi Jenis Batuan di Kabupaten Pesawaran..... II-4

Tabel 2.5 Karakteristik Penggunaan Lahan..... II-6

Tabel 2.6 Risiko Bencana Alam II-7

Tabel 2.7 Jumlah, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2022..... II-13

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran Tahun 2018-2022..... II-13

Tabel 2.9 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022 II-14

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2018-2022..... II-15

Tabel 2.11 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2018-2022 (dalam Miliar)..... II-16

Tabel 2.12 Struktur Komposisi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2018-2022..... II-17

Tabel 2.13 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran Tahun 2018-2022 (dalam Miliar)..... II-17

Tabel 2.14 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2018-2022 II-18

Tabel 2.15 Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022..... II-21

Tabel 2.16 Kondisi Pembangunan Gender Tahun 2017-2022 II-22

Tabel 2.17 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata Tahun 2017-2021.... II-23

Tabel 2.18 Sekolah Kondisi Bangunan Baik Tahun 2016-2020..... II-23

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun
2017-2021 II-23

Tabel 2.20 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun
2017-2021 II-24

Tabel 2.21 Jumlah PKBM Kabupaten Pesawaran Tahun 2020..... II-25

Tabel 2.22 Jumlah Putus Sekolah di Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2020... II-25

Tabel 2.23 Capaian SPM Pendidikan. II-25

Tabel 2.24 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2018-2022..... II-30

Tabel 2.25 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022 II-30

Tabel 2.26 Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022..... II-30

Tabel 2.27 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun
2017-2022..... II-32

Tabel 2.28 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun
2017-2022..... II-32

Tabel 2.29 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Tahun 2018-2022 II-32

Tabel 2.30 Angka Kejadian Malaria dan Tingkat Kematian Tahun 2017-2022 II-33

Tabel 2.31 Angka Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2017-2022..... II-34

Tabel 2.32 Cakupan Pelayanan dan Penanganan Penyakit TBC BTA Tahun
2017-2022..... II-34

Tabel 2.33 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Tahun 2017-2022 II-36

Tabel 2.34 Persentase Penduduk Usia 15-24 yang Mengetahui Komprehensif
tentang HIV/AIDS Tahun 2017-2022..... II-37

Tabel 2.35 Jumlah Kasus Stunting per Kecamatan Tahun 2020-2022 II-39

Tabel 2.36 Capaian SPM Kesehatan II-39

Tabel 2.37 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun
2018-2022 II-42

Tabel 2.38 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk per 10.000 jiwa
Tahun 2018-2022 II-42

Tabel 2.39 Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam
Kondisi Baik Tahun 2018-2022 II-43

Tabel 2.40 Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pesawaran II-43

Tabel 2.41 Persentase Bangunan yang Memiliki IMB Tahun 2016-2020 II-43

Tabel 2.42 Capaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-43

Tabel 2.43 Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2016-2020 II-46

Tabel 2.44 Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021 II-46

Tabel 2.45 Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2019-2021 II-47

Tabel 2.46 Capaian SPM Perumahan II-47

Tabel 2.47 Lahan Bersertifikat Tahun 2017-2022 II-47

Tabel 2.48 Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2017-2022 II-48

Tabel 2.49 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017-2022 II-49

Tabel 2.50 Capaian SPM Sosial II-49

Tabel 2.51 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2022 II-50

Tabel 2.52 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2018-2022 II-52

Tabel 2.53 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017-2021 II-52

Tabel 2.54 Kinerja Persampahan Tahun 2016-2022 II-53

Tabel 2.55 Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan
Tahun 2016-2022 II-53

Tabel 2.56 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2018-2022 II-55

Tabel 2.57 Status Kemandirian dan Kemajuan Desa di Kabupaten Pesawaran
Tahun 2018-2022 II-55

Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2018-2022 II-57

Tabel 2.59 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022 II-58

Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun
2018-2022 II-59

Tabel 2.61 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2018-2022 II-59

Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017-2021 II-60

Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun
2016-2022 II-60

Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022 II-61

Tabel 2.65 Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2018-2022 II-62

Tabel 2.66 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022 II-62

Tabel 2.67 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2022 II-63

Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2022 II-63

Tabel 2.69 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022 II-64

Tabel 2.70 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun
2018-2022 II-65

Tabel 2.71 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2022 II-66

Tabel 2.72 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2022 II-66

Tabel 2.73 Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB II-66

Tabel 2.74 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2016-2020 II-67

Tabel 2.75 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2017-2021 II-67

Tabel 2.76 Inovasi Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran II-68

Tabel 2.77 Indikator Urusan Keuangan Tahun 2017-2022 II-70

Tabel 2.78 Indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Tahun 2017-2022 II-71

Tabel 2.79 Indikator Urusan Pengawasan Tahun 2017-2021 II-71

Tabel 2.80 Target dan Realisasi Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2022 II-75

Tabel 2.81 Target dan Realisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 ... II-75

Tabel 2.82 Target dan Realisasi Capaian Pendapatan Transfer Tahun 2022 II-76

Tabel 2.83 Target dan Realisasi Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 II-77

Tabel 2.84 Target dan Realisasi Capaian Belanja Daerah Tahun 2022 II-79

Tabel 2.85 Target dan Realisasi Capaian Pembiayaan Daerah Tahun 2022 II-81

Tabel 2.86 Kategori Pencapaian Kinerja II-82

Tabel 2.87 Rekapitulasi Tabel T-C.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Pesawaran II-83

Tabel 2.88 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 II-335

Tabel 2.89 Kemajuan Pencapaian Target Jangka Menengah Sampai Dengan Tahun 2022 II-336

Tabel 2.90 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 II-338

Tabel 2.91 Pencapaian Indikator Sasaran Strategis II-342

Tabel 2.92 Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020 II-343

Tabel 3.1 Pertumbuhan PDRB Rill Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 III-5

Tabel 3.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah) III-7

Tabel 3.3 Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022 III-8

Tabel 3.4 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2018-2022 III-9

Tabel 3.5 Pertumbuhan Sektoral PDRB Riil Tahun 2018-2022 III-10

Tabel 3.6 Perkembangan ICOR Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2019 III-11

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Makro Tahun 2024 III-13

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025 (Rupiah) III-23

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025 (Rupiah) III-35

Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025 (Rupiah) III-40

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 IV-1

Tabel 4.2 Sasaran Makro RKP 2024 IV-7

Tabel 4.3 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 IV-8

Tabel 4.4 Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran IV-9

Tabel 4.5 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 IV-10

Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan Nasional beserta Pagu per Prioritas IV-17

Tabel 4.7 Target capaian SPM Bidang Trantibumlinmas untuk Tahun 2024 IV-20

Tabel 4.8 Target TPB yang menjadi urusan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 .IV-22

Tabel 4.9 Gambaran Kesesuaian Pencapaian Target Indikator Makro IV-23

Tabel 4.10 Gambaran Kesesuaian Arah Kebijakan RPJMD dengan Sasaran dan Prioritas RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 IV-24

Tabel 4.11 Konsistensi Target Program antara RPJMD dan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 IV-27

Tabel 4.12 Gambaran Kesesuaian Pokok Pikiran DPRD dengan Sasaran dan Prioritas dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pesawaran IV-45

Tabel 5.1 Konsistensi Jumlah Dan Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD Tahun 2024 V-2

Tabel 5.2 Interkoneksi Pendekatan Prioritas, Sasaran Pembangunan Tahun 2024 V-5

Tabel 5.3 Pagu Indikatif Fungsi Pendidikan V-15

Tabel 5.4 Pagu Indikatif Fungsi Kesehatan V-16

Tabel 5.5 Pagu Indikatif Fungsi Infrastruktur V-17

Tabel 5.6 Rencana Pagu Indikatif Belanja Per Perangkat Daerah Tahun 2024 V-19

Tabel 5.7 Rekapitulasi Daftar Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 V-21

Tabel 5.8 Rekapitulasi Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Tahun 2024 V-29

Tabel 5.9 Rekapitulasi Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung SPM Tahun 2024 V-37

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 VI-1

Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Kunci pada Tahun 2024 VI-2

Tabel 6.3 Anggaran untuk Program Inovasi BERKAH BENAR BERKAT BAPAK SIJI VI-20

Tabel 6.5 Tabel Data UMKM dan IKM Kabupaten Pesawaran VI-33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Pesawaran II-2

Gambar 2.2 Peta Kelerengan II-3

Gambar 2.3 Peta Jenis Batuan..... II-5

Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai II-5

Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan II-6

Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Alam II-7

Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya II-8

Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 .. II-9

Gambar 2.9 Peta Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Daerah..... II-10

Gambar 2.10 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 II-15

Gambar 2.11 Grafik Perkembangan PDRB ADHK Perkapita Tahun 2018-2022
(dalam Juta) II-18

Gambar 2.12 Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2022 II-19

Gambar 2.13 Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022..... II-19

Gambar 2.14 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022 II-20

Gambar 2.15 Grafik Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Tahun 2018-2022 II-20

Gambar 2.16 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022 II-21

Gambar 2.17 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia
Sekolah Tahun 2017-2021 II-22

Gambar 2.18 Grafik Angka Kelulusan Tahun 2017-2021 II-24

Gambar 2.19 Grafik Angka Melanjutkan Tahun 2017-2021 II-24

Gambar 2.20 Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2018-2022 II-29

Gambar 2.21 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun
2018-2022 II-31

Gambar 2.22 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2017-2022..... II-31

Gambar 2.23 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Tahun 2018-2022 II-32

Gambar 2.24 Jumlah Kasus Malaria di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021..... II-33

Gambar 2.25 Distribusi Kasus Tuberculosis Berdasarkan Wilayah Kerja
Puskesmas di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 II-35

Gambar 2.26 Cakupan Cure Rate dan Success Rate (SR) Penderita Kasus TBC
di Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 II-35

Gambar 2.27 Persentase Keberhasilan Pengobatan Kasus TB (Success Rate)
Berdasarkan Puskesmas di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021..... II-36

Gambar 2.28 Distribusi Kasus HIV Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 II-37

Gambar 2.29 Grafik Perkembangan Persentase Prevalensi Stunting Tahun
2020-2022 II-38

Gambar 2.30 Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2016-2020 II-45

Gambar 2.31 Grafik Rumah Bersanitasi Tahun 2016-2020 II-46

Gambar 2.32 Grafik Rasio Penduduk Ber-KTP Tahun 2017-2022..... II-54

Gambar 2.33 Grafik Rasio Bayi Ber-Akte Kelahiran Tahun 2016-2022 II-54

Gambar 2.34 Grafik Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2018-2022 II-54

Gambar 2.35 Grafik Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2016-2020 II-58

Gambar 2.36 Grafik Produktivitas Pertanian Padi dan Bahan Pangan Utama
Tahun 2016-2020 II-64

Gambar 2.37 Grafik Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB
Tahun 2018-2022 II-64

Gambar 2.38 Grafik Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun
2018-2022 II-65

Gambar 2.39 Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2022 II-72

Gambar 2.40 Grafik Persentase Capaian Angka Kriminalitas yang Tertangani
Tahun 2018-2022 II-72

Gambar 2.41 Grafik Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2022..... II-73

Gambar 2.42 Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dan
RPJMD Tahun 2021-2026 II-81

Gambar 2.43 Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD dan APBD Tahun 2022 . II-82

Gambar 2.44 Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan RKPD dan APBD Tahun
2022..... II-82

Gambar 3.1 Struktur PDRB Rill Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2022 III-4

Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 III-6

Gambar 3.3 Grafik Perkembangan PDRB Riil per Kapita Tahun 2018-2022
(dalam Juta Rupiah)..... III-6

Gambar 3.4 Grafik Laju Inflasi Di Kabupaten Pesawaran, 2017-2021 III-8

Gambar 4.1 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran .. IV-3

Gambar 4.2 Rencana Tahapan Pengembangan Kawasan Industri Tegineneng IV-3

Gambar 4.3 Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Teluk Pandan IV-4

Gambar 4.4 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran..... IV-5

Gambar 4.5 Peta Rencana Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Pesawaran IV-6

Gambar 4.6 17 Goals SDG’s..... IV-21

Gambar 6.1 Proses Bisnis Inovasi Berkah Benar Berkat Bapak Siji dalam
kerangka Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
Pesawaran VI-20

Gambar 6.2 Penguatan pemodalan BUMDes melalui Desa Wisata (DEWI)
dan Desa Digital (DEDI)..... VI-21

Gambar 6.3 Target dan Capaian Kemiskinan Kabupaten Pesawaran RPJMD
2021-2026 VI-23

Gambar 6.4 Proses Bisnis Inovasi TABIK PUN..... VI-26

Gambar 6.5 Dokumentasi Kegiatan Training..... VI-29

Gambar 6.6 Dokumentasi Kegiatan Bantuan Modal..... VI-29

Gambar 6.7 Dokumentasi Kegiatan Insentif..... VI-30

Gambar 6.8 Dokumentasi Kegiatan Kolaborasi VI-30

Gambar 6.9 Dokumentasi Kegiatan Pusat Perbelanjaan VI-31

Gambar 6.10 Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi VI-31

Gambar 6.11 Dokumentasi Output Produk UMKM, IKM, dan Kolaborasi
Perguruan Tinggi dan Retail Swasta..... VI-32

Gambar 6.12 Grafik Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2016-2022..... VI-33

Gambar 6.13 Proses Bisnis Inovasi INDIRA..... VI-34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan nasional. Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 mencakup pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*), dan atas-bawah (*top-down*) dengan deskripsi sebagai berikut:

- Proses perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pesawaran dalam penyusunan RKPD Tahun 2024.
- Untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif; substansi RKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah diperkaya pula dengan informasi berupa saran/masukan yang dihimpun dari kelompok akademisi, asosiasi profesi, pelaku dunia usaha, kalangan pers, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya; yang dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024. Dengan demikian, produk perencanaan yang akan dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan telah pula memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan *good governance*.
- Penyusunan RKPD merupakan kesatuan rangkaian dari proses pendekatan perencanaan pembangunan secara bawah-atas (*bottom-up*), dimulai dari Musrenbang Desa dan Kecamatan, Musrenbang Kabupaten Pesawaran, hingga Musrenbang Provinsi Lampung serta Musrenbang Nasional, bertujuan untuk menyerap aspirasi dan penyampaian usulan kegiatan pembangunan pada masing-masing lingkup pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang.
- Dalam hal proses pendekatan perencanaan secara atas-bawah (*top-down*), penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 juga dipaduserasikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung serta prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan memperhatikan peraturan maupun kebijakan nasional lainnya.

Penyusunan RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana:

1. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan prakiraan maju, berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

- serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 4. Secara faktual, RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 bahwa RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berpedoman pada RPJPD Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan memperhatikan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 disusun dengan mencermati capaian pembangunan pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan. Disisi yang lain, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian target pembangunan Provinsi Lampung dan pembangunan nasional. Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, yang meliputi Pemerataan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dan berkualitas; Peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif; Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul dan berdaya saing; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas dan berkinerja tinggi; serta Mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Presiden Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor XX);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor XXXX);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
 23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor XX);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 29);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 88); dan
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; RPJMD Provinsi Lampung 2020-2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024; serta berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya Dokumen RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 akan menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Pesawaran.

1.1.1 Hubungan dengan RKP Nasional

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 mengacu berbagai substansi dalam RKP nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran. Meskipun RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesawaran, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan.

Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kabupaten Pesawaran.

1.1.2 Hubungan dengan RKPD Provinsi Lampung

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 juga harus mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Lampung. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Wilayah Kabupaten Pesawaran yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Lampung, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota/kabupaten lain di sekitar wilayah Kabupaten Pesawaran.

1.1.3 Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026 yang mengakomodir Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020. Program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD diuraikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Selain untuk menjabarkan, melalui RKPD dapat diketahui hasil-hasil capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian 5 (lima) tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam RPJMD.

1.1.4 Hubungan dengan Renja OPD

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Renja OPD tahun 2024. Meskipun RKPD menjadi pedoman penyusunan Renja OPD, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan. RKPD Kabupaten Pesawaran dan Renja OPD ini harus bersesuaian.

1.1.5 Hubungan dengan RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 mengacu kepada RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga Tahun 2024 perlu diakomodir dalam RKPD Tahun 2024. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pesawaran.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara substansi, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 memuat deskripsi tentang gambaran umum daerah, capaian sasaran pembangunan sebelumnya, arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Seluruh uraian dalam RKPD tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran yang disinergikan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RKP Tahun 2024, serta RKPD Provinsi Lampung.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

- 1) Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
- 3) Memberikan arah dan pedoman kepada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan tugas dan

- fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
- 4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.
 - 5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi tahapan dan mekanisme antara perencanaan dan penganggaran, dimana RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menyusun Kebijakan Umum (KUA) APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 yang diusulkan oleh Bupati Pesawaran untuk disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Pesawaran sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.
 - 6) Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Menjelaskan tentang Latar Belakang Penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.
- 1.2 Dasar Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.
- 1.3 Hubungan antar Dokumen
Menjelaskan tentang hubungan RKPD tahun 2024 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran.
- 1.4 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Memberikan gambaran penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WILAYAH

2. 1 Kondisi Umum dan Kondisi Daerah.
Menjelaskan tentang Kondisi Umum dan Kondisi Daerah yang melingkupi data capaian pembangunan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.
2. 2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD.
Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran sampai dengan tahun 2022 serta persandingan pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.
2. 3 Permasalahan Pembangunan Daerah.
Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3. 1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Menjelaskan tinjauan pembangunan ekonomi Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran hingga tahun 2023, serta arah kebijakan, tantangan dan proyeksi pembangunan ekonomi tahun 2023 dan tahun 2024.
3. 2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan

pembangunan tahun 2024.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan Tinjauan RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RKPD Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 Serta Tujuan dan Sasaran, strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

4. 2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang Prioritas dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

4. 3 Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Pesawaran

Menjelaskan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

4. 4 Sasaran Pencapaian SPM Kabupaten Pesawaran

Menjelaskan Pencapaian SPM Kabupaten Pesawaran

4. 5 Sasaran Pencapaian SDG's Kabupaten Pesawaran

Menjelaskan Sasaran Pencapaian SDG's Kabupaten Pesawaran

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2024, indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas Daerah dan Nasional.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang pelaksanaan RKPD Tahun 2024.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada kedudukan 104,92^o-105,34^o Bujur Timur (BT) dan 5,12^o-5,84^o Lintang Selatan (LS). Luas Kabupaten Pesawaran secara keseluruhan adalah 1.288,08 km² termasuk 36 pulau yang ada disekitarnya. Secara terperinci batas-batas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Bangunrejo, Bumi Ratu Nuban, dan Trimurjo (Kabupaten Lampung Tengah).
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, Kecamatan Kelumbayan, dan Cukuh Balak (Kabupaten Tanggamus).
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Gadingrejo, dan Adiluwih (Kabupaten Pringsewu).
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan), Kecamatan Kemiling, dan Teluk Betung Barat (Kota Bandar Lampung).

Pada awal terbentuknya Kabupaten Pesawaran hanya terdiri dari tujuh Kecamatan dan seiring kebutuhan peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sampai saat ini Kabupaten Pesawaran telah berkembang menjadi sebelas kecamatan. Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada tabel berikut.

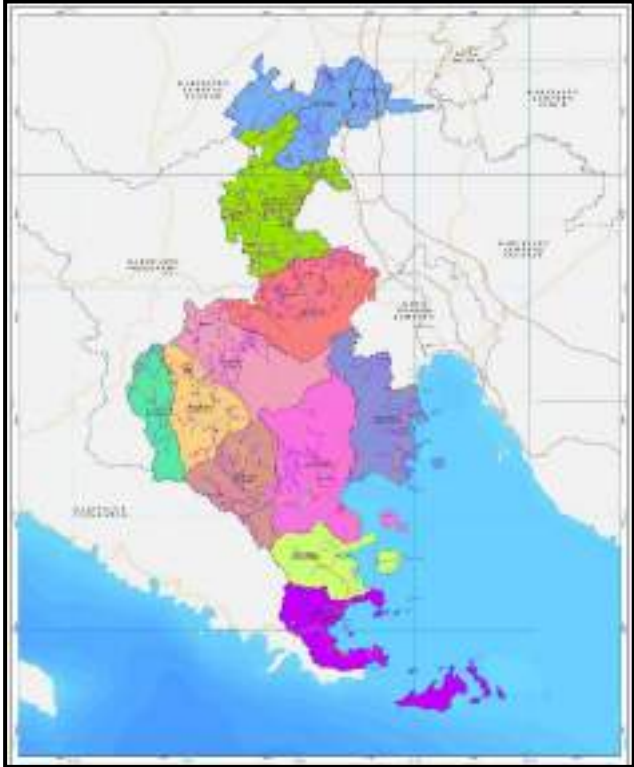
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Pesawaran menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Punduh Pedada	94,67	7,41
2	Marga Punduh	78,35	6,13
3	Padang Cermin	172,78	13,52
4	Teluk Pandan	118,77	9,29
5	Way Ratai	96,92	7,58
6	Kedondong	88,04	6,89
7	Way Khilau	62,20	4,87
8	Way Lima	128,00	10,01
9	Gedong Tataan	146,51	11,46
10	Negeri Katon	150,05	11,74
11	Tegineneng	141,90	11,10
Jumlah		1.288,08	

Sumber: Kepmedagri 100.1.1-6117 Tahun 2022

Kecamatan Padang Cermin merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Pesawaran dengan luas 172,78 km² atau persentase sebesar 13,51%, sedangkan Kecamatan Way Khilau memiliki luas wilayah terkecil seluas 62,20 km² dengan persentase 4,87% dari Luas Kabupaten Pesawaran yaitu 1.288,08 km² yang terdistribusi menjadi 148 desa. Kondisi wilayah Kabupaten Pesawaran juga terbentuk oleh pulau besar dan kecil sejumlah 36 pulau. Tiga pulau terbesar yaitu pulau Legundi, Pahawang dan Kelagian. Kabupaten Pesawaran juga memiliki beberapa gunung dengan puncak tertinggi berada di Gunung Way Ratai dan Pesawaran yang memiliki ketinggian 1.681 m dari permukaan laut.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Pesawaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

b. Topografi

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pesawaran berdasarkan kemiringan lerengnya dapat dibedakan menjadi 5 kelas yaitu <8%, 8-15%, 15-25%, 25-45% dan >40%. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode interpolasi dapat diketahui sebagian wilayah merupakan wilayah berbukit terjal yang hampir tersebar di seluruh bagian wilayah. Sedangkan wilayah yang memiliki kondisi lahan yang cukup datar berada di wilayah bagian utara. Kelerengan tanah menurut kecamatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Kemiringan Lereng menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Kelas Lereng (Ha)					Jumlah (Ha)
		<8%	8-15%	15-25%	25-45%	>45%	
1	Punduh Pedada	2.033,25	1.211,62	1.750,67	2.935,67	1.535,43	9.466,64
2	Marga Punduh	2.140,07	891,91	1.450,63	2.742,13	610,55	7.835,29
3	Padang Cermin	4.129,66	2.641,90	2.992,18	5.782,23	1.732,50	17.278,47
4	Teluk Pandan	2.485,77	1.510,72	2.024,37	4.325,64	1.530,71	11.877,21
5	Way Ratai	1.802,86	2.066,14	2.003,93	2.971,50	847,85	9.692,28
6	Kedondong	3.418,22	1.376,63	1.345,06	2.363,15	300,59	8.803,65
7	Way Khilau	2.519,39	505,50	797,55	1.815,74	581,84	6.220,02
8	Way Lima	5.184,28	2.259,09	1.466,93	2.305,05	1.584,38	12.799,73
9	Gedong Tataan	9.745,76	1.741,54	1.193,98	1.389,16	580,81	14.651,25
10	Negeri Katon	14.565,02	293,81	95,62	44,38	6,55	15.005,38
11	Tegineneng	13.755,01	317,77	81,80	24,35	11,42	14.190,35
Jumlah							127.960,27

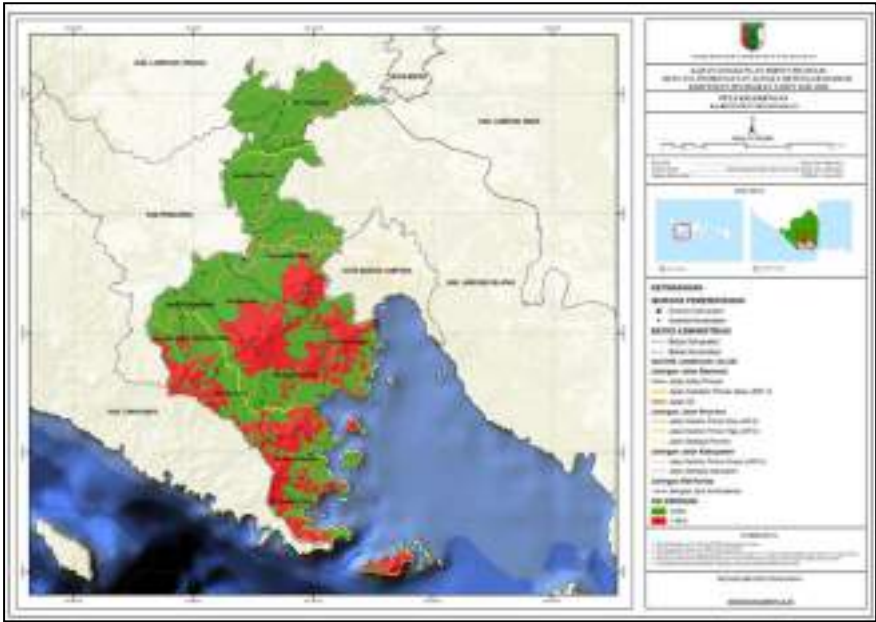
Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui luas wilayah terbesar dengan kemiringan <8% seluas 14.565,02 ha berada di wilayah Kecamatan Negeri Katon, selanjutnya wilayah terbesar dengan kemiringan 8-15% seluas 2.641,90 ha, wilayah terbesar dengan kemiringan 15-25% seluas 2.992,18 ha, wilayah terbesar dengan kemiringan 25-45% seluas 5.782,23 ha, dan wilayah terbesar dengan kemiringan >45% seluas 1.732,50 ha berada di wilayah Kecamatan Padang Cermin. Adapun pengelompokkan luas wilayah berdasarkan kemiringan lereng di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

- a. Kemiringan lereng <8% : 61.779,29 ha (48,33%)

- b. Kemiringan lereng 8-15% : 14.816,63 ha (11,59%)
- c. Kemiringan lereng 15-25% : 15.202,72 ha (11,89%)
- d. Kemiringan lereng 25-45% : 26.699,00 ha (20,88%)
- e. Kemiringan lereng >45% : 9.322,63 ha (7,29%)

Gambar 2.2 Peta Kelerengan



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

c. **Klimatologi**

Kabupaten Pesawaran memiliki iklim tropis, suhu tertinggi mencapai 37,0°C pada bulan November dan terendah mencapai 20,8°C pada bulan Juli. Adapun curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember mencapai 254,8 mm dan terendah pada bulan Juni mencapai 85,2 mm dengan rata-rata kelembaban udara antara 74,86 sampai 85,88%. Berdasarkan data curah hujan pada tabel berikut, kondisi iklim mikro sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Pesawaran namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Kondisi Klimatologi Tahun 2022

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Suhu Rata-rata (°C)	Kelembaban (%)
1	Januari	186,10	23	28,23	78,58
2	Februari	208,50	21	28,41	77,62
3	Maret	201,80	21	28,87	76,71
4	April	206,00	15	29,52	73,39
5	Mei	179,10	20	28,87	78,94
6	Juni	85,20	22	27,93	79,82
7	Juli	139,00	15	28,49	77,86
8	Agustus	99,10	19	28,35	78,58
9	September	154,50	22	28,57	76,93
10	Oktober	183,90	18	28,63	76,16
11	November	201,10	25	28,61	76,71
12	Desember	254,80	23	27,83	79,94

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

d. **Geologi**

Secara geologi, wilayah Kabupaten Pesawaran terdapat beberapa Formasi yang berasal dari masa Tersier dan Kuarter. Formasi Qhv (Batuan Gunung Api kuarter muda) merupakan formasi terluas dan mendominasi di wilayah Kecamatan Gedongtatan dan Way Lima. Di Kecamatan Padang Cermin, formasi ini terutama terdapat di bagian tengah, utara, dan sebagian timur. Formasi Tov/Qvt (Batuan Gunung Api Kuarter tua) mendominasi wilayah Kecamatan Punduh Pedada. Formasi ini juga terdapat di

wilayah Kecamatan Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin di bagian barat dan selatan. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Formasi Qt (Endapan Fluvial) terdapat di timur wilayah Kecamatan Padang Cermin dan timur wilayah Kecamatan Punduh Pedada. Sementara formasi lainnya tersebar di Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Tegineneng dan Punduh Pedada. Untuk kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Pesawaran berkisar antara 30 – 100 cm. Kondisi ini dasarnya sangat berpengaruh pada kegiatan pertanian baik lahan basah, lahan kering dan tanaman keras, karena kegiatan pertanian memerlukan kedalaman efektif tanah lebih besar dari 30 cm. Oleh sebab itu, khusus untuk tanaman pangan lahan basah dipersyaratkan pada kedalaman lebih dari 60 cm, sedangkan tanaman pangan lahan kering dan tanaman tahunan/keras cukup sesuai untuk kedalaman efektif tanah lebih dari 30 cm, dan untuk kedalaman tanah kurang dari 30 cm dapat dijadikan lahan konservasi. Kedalaman efektif tanah > 90 cm, meliputi daerah-daerah lembah, bantaran sungai dan dataran banjir yang tersebar di Kabupaten Pesawaran. Kedalaman efektif tanah antara 30 – 90 cm, meliputi daerah-daerah yang berada disekitar perbukitan (Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh).

Kedalaman efektif tanah kurang dari 30 cm meliputi sebagian daerah-daerah perbukitan yaitu Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh. Tekstur tanah ikut menunjang bagi pertumbuhan tanaman dimana tanah yang teksturnya sedang sampai halus relatif lebih mudah diolah dengan kandungan unsur hara serta penyuburnya relatif terjaga. Kondisi tekstur tanah sedang sampai halus sangat cocok pembudidayaan tanaman lahan basah dan tanaman lahan kering sedangkan tekstur kasar lebih sesuai untuk tanaman keras/tahunan.

Tabel 2.4 Formasi Jenis Batuan di Kabupaten Pesawaran

No	Formasi Batuan	Luas (Ha)	Persentase
1	Kds	1.064,62	0,83
2	Kgk	157,70	0,12
3	Km	1.570,88	1,23
4	Pzg	1.802,49	1,41
5	Pzgk	1.910,32	1,49
6	Pzgm	723,46	0,57
7	Qa	6.924,63	5,42
8	Qhv	3.218,04	2,52
9	Qhy	50.793,75	39,74
10	Qpt	2.514,92	1,97
11	QTl	26.670,49	20,87
12	Tm	52,87	0,04
13	Tmda	6.011,69	4,70
14	Tmpk	157,73	0,12
15	Tomh	16.886,60	13,21
16	Tpos	848,40	0,66
17	Tpot	6.511,97	5,09
	Jumlah	127.960,27	

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

Gambar 2.3 Peta Jenis Batuan

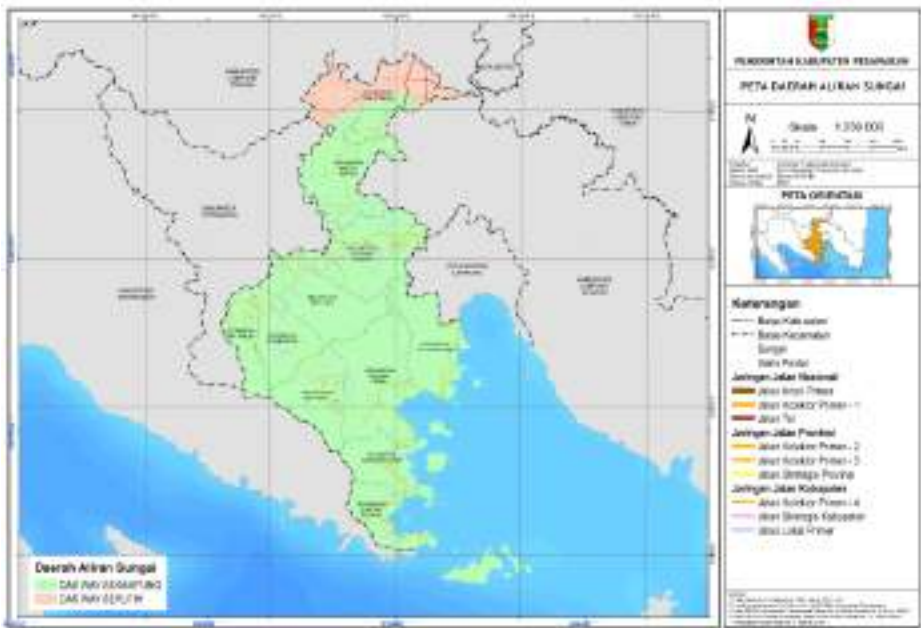


Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

e. Hidrologi

Sungai terpanjang di Kabupaten Pesawaran adalah Way Semah di Kecamatan Gedong Tataan dengan panjang 53 km dan daerah aliran sungai seluas 135 km² dan sungai terpendek adalah sungai Way Kepayang di Kecamatan Kedondong dengan panjang 4 km. Bentuk morfologis, jenis batuan, proses-proses geomorfik serta keadaan tata air yang ada di Kabupaten Pesawaran sangat menentukan pola drainasenya. Daerah pegunungan dan perbukitan yang pada umumnya mempunyai gradient yang cukup besar membentuk pola drainase dendritik, sedang di daerah dimana proses tektonik nyata mempunyai pola drainase rectangular. Daerah vulkan dengan bentuk-bentukan kerucut yang masih utuh membentuk pola radial di daerah puncak dan lereng atas, sedang di lereng tengah dan bawah paralel dan sub-paralel. Kabupaten Pesawaran dilintasi oleh dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Sekampung seluas 1.165,47 km² dan DAS Seputih seluas 113,60 km², sehingga Kabupaten Pesawaran memiliki potensi yang relatif besar, khususnya berupa ketersediaan air permukaan yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pertanian, antara lain dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi, budidaya perikanan air tawar, sarana penyediaan air bersih, dan sumber energi baru terbarukan bagi masyarakat, dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), baik secara konvensional maupun inkonvensional, yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

f. Penggunaan Lahan

Aspek penting lainnya yang perlu diketahui dan digunakan sebagai bahan kajian adalah pola penggunaan lahan. Pola penggunaan lahan pada suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Hal ini sangat diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Pesawaran pada dasarnya masih didominasi oleh hutan, perkebunan, sawah dan semak belukar dengan masing-masing persentase mencapai 45,70%; 27,91%; 9,27%; dan 7,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan perekonomian masyarakat masih berada pada sektor primer pertanian dan perkebunan sehingga masih banyak potensi lahan untuk pengembangan wilayah terbangun yang dapat menggeser sektor perekonomian primer ke sekunder (industrialisasi) untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Adapun karakteristik penggunaan lahan di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Karakteristik Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Belukar	93,64	7,33
2	Hamparan Pasir Pantai	0,01	0,00
3	Hutan Bakau	6,96	0,54
4	Hutan Campuran	584,11	45,70
5	Ladang	21,40	1,67
6	Pelabuhan antar pulau	0,02	0,00
7	Pemukaman Umum	0,14	0,01
8	Perkebunan	356,76	27,91
9	Permukiman	77,81	6,09
10	Rawa	0,01	0,00
11	Sawah	125,04	9,78
12	Sungai	2,62	0,20
13	Tambak Ikan	9,25	0,72
14	Tanah Kosong	0,31	0,02
15	Waduk	0,13	0,01
Jumlah		1.279,60	

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039, diolah dari data CSRT Spot 6 LAPAN

Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

g. Risiko Bencana Alam

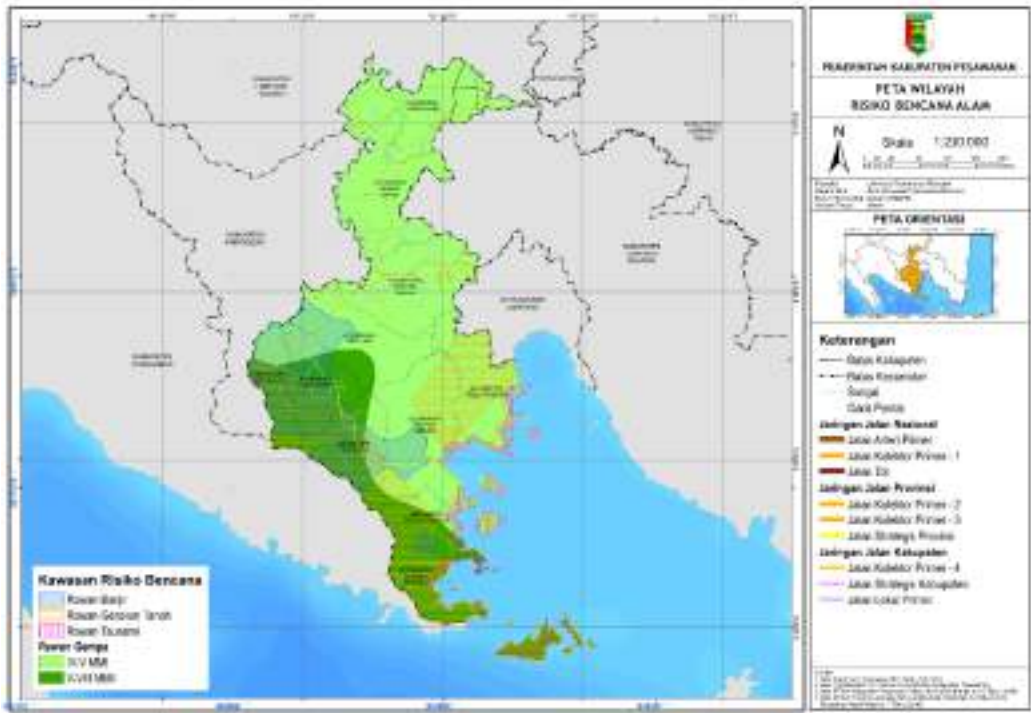
Wilayah Kabupaten Pesawaran memiliki risiko bencana alam berupa rawan banjir, rawan gerakan tanah, rawan tsunami dan rawan gempa bumi. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran merupakan daerah rawan gempa bumi dengan skala MMI yang beragam dari IV hingga VIII. Untuk daerah dengan risiko bencana alam rawan banjir berada pada wilayah barat menuju selatan Kabupaten Pesawaran yakni di Kecamatan Kedondong, Marga Punduh, Padang Cermin, Punduh Pedada, Way Khilau, Way Lima dan Way Ratai. Daerah dengan risiko bencana alam rawan gerakan tanah berada pada wilayah yang juga memiliki risiko bencana alam rawan banjir dan pada wilayah pegunungan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya pada Kecamatan Teluk Pandan, Kedondong, Marga Punduh, Padang Cermin, Punduh Pedada, Way Khilau, dan Way Ratai. Selanjutnya untuk wilayah dengan risiko bencana alam rawan tsunami berada pada daerah pesisir dengan tingkat kerawanan yang tinggi pada Kecamatan Marga Punduh, Padang Cermin, Punduh Pedada, dan Teluk Pandan.

Tabel 2.6 Risiko Bencana Alam

No	Kecamatan	Rawan Banjir	Rawan Gerakan Tanah	Rawan Tsunami	Rawan Gempa Bumi
1	Gedong Tataan	-	-	-	Skala IV-V MMI
2	Kedondong	Ada	Ada	-	Skala V-VIII MMI
3	Marga Punduh	Ada	Ada	Ada	Skala V-VIII MMI
4	Negeri Katon	-	-	-	Skala IV-V MMI
5	Padang Cermin	Ada	Ada	Ada	Skala IV-V MMI
6	Punduh Pedada	Ada	Ada	Ada	Skala IV-V MMI
7	Tegineneng	-	-	-	Skala IV-V MMI
8	Teluk Pandan	-	Ada	Ada	Skala IV-V MMI
9	Way Khilau	Ada	Ada	-	Skala V-VIII MMI
10	Way Lima	Ada	-	-	Skala IV-V MMI
11	Way Ratai	Ada	Ada	-	Skala V-VIII MMI

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Alam



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

h. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian kondisi geografis di atas, maka dapat diketahui potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pesawaran dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang yang telah diatur dalam Perda. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah meliputi

aspek letak wilayah (administratif dan geostrategis), kondisi topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan maupun kondisi geografi lainnya.

Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039. Berdasarkan Perda dimaksud Kawasan Budidaya Kabupaten Pesawaran terdiri atas:

1) Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi yaitu kawasan hutan produksi Register 18 Tangkit Titi Bungur ditetapkan seluas kurang lebih 1.350 hektar berada di Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng.

2) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan. Kawasan tanaman pangan ditetapkan seluas lebih dari sama dengan 13.318 hektar yang tersebar di Kecamatan Kedondong, Punduh Pedada, Marga Punduh, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Way Khilau, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, dan Tegineneng. Kawasan hortikultura ditetapkan seluas kurang lebih 13.849 hektar tersebar di Kecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Marga Punduh, dan Punduh Pedada. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 13.847 hektar yang tersebar pada peruntukkan kawasan tanaman pangan dan hortikultura. Kawasan perkebunan ditetapkan seluas kurang lebih 47.414 hektar tersebar di Kecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Marga Punduh, dan Punduh Pedada.

3) Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budi daya, dan sarana penunjang perikanan. Kawasan perikanan tangkap berada di wilayah perairan Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh dan Punduh Pedada. Kawasan perikanan budi daya ditetapkan seluas kurang lebih 703 hektar yang tersebar di Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh, dan Punduh Pedada. Adapun sarana untuk menunjang kegiatan perikanan berupa pelabuhan perikanan yang terdiri dari pelabuhan perikanan Durian dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di Kecamatan Padang Cermin.

4) Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi terdiri dari kawasan pertambangan mineral dan kawasan panas bumi. Kawasan pertambangan mineral meliputi:

- a) Kawasan pertambangan mineral logam berada di Kecamatan Negeri Katon, Tegineneng, Way Lima, Kedondong, Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh dan Punduh Pedada;
- b) Kawasan pertambangan mineral bukan logam berada di Kecamatan Padang Cermin, Teluk Pandan, Marga Punduh dan Punduh Pedada; dan

- c) Kawasan pertambangan batuan berada di Kecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Way Lima, Kedondong, Padang Cermin, Teluk Pandan, Marga Punduh dan Punduh Pedada.

Adapun kawasan panas bumi sebagai potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berada di Kecamatan Way Ratai, Way Lima, Kedondong dan Padang Cermin.

5) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan industridan sentra industri kecil dan menengah.Kawasan industri ditetapkan seluas kurang lebih 1.341 hektar yang berada di Kecamatan Tegineneng dan Teluk Pandan. Sedangkan sentra industri kecil dan menengah dikembangkan diseluruh kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

6) Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata ditetapkan seluas kurang 2.193 hektar yang meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh, dan Punduh Pedada dengan daya tarik wisata berupa wisata alam pesisir pantai, laut, air terjun, perbukitan, dan wisata buatan.

7) Kawasan Permukiman

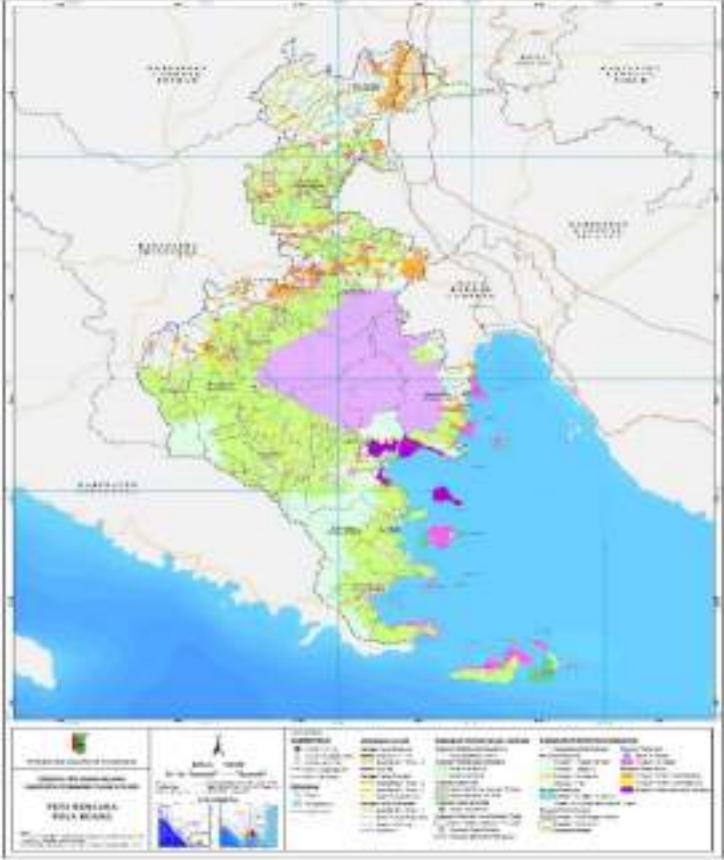
Kawasan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan pemukiman perkotaan ditetapkan seluas lebih kurang 7.758 hektar tersebar di pusat-pusat kegiatan di Kecamatan Gedong Tataan, Tegineneng, Negeri Katon, Padang Cermin, Teluk Pandan, Kedondong, Way Lima, danWay Ratai. Sedangkan untuk kawasan pemukiman perdesaan ditetapkan seluas lebih kurang 3.147 hektar yang tersebar diKecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Marga Punduh, dan Punduh Pedada.

8) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

- a) Kawasan Terpadu Kepentingan Pertahanan dan Keamanan ditetapkan seluas kurang lebih 1.474 hektar berada di Kecamatan Teluk Pandan dan Padang Cermin;
- b) Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir di Kecamatan Padang Cermin;
- c) Kepolisian Resor (Polres)berada di Kecamatan Gedong Tataan;
- d) Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Gedong Tataan;
- e) Kompi Senapan A Batalyon 143 di Kecamatan Gedong Tataan;
- f) Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan; dan
- g) Kepolisian Sektor (Polsek)berada di seluruh kecamatan.

Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

i. **Potensi Unggulan Daerah**

Pembangunan di Kabupaten Pesawaran diarahkan pada Percepatan perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri didorong dalam perspektif kawasan sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif.

Gambar 2.9 Peta Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Daerah



Adapun rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

1) **Pariwisata**

Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Air Terjun, ditetapkan pada Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Sumber Jaya; Desa Ceringin Asri; Desa Poncorejo; Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan Jaya; dan Desa Wates Way Ratai. Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Way Urang; Desa Paya; dan Desa Tambangan.

Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Pantai, Kuliner Dan Ekonomi Kreatif, ditetapkan pada Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Sukajaya Lempasing; Desa Sidodadi; Desa Batumenyan; Desa Hanura; Desa Hurun; Desa Cilimus; Desa Talangmulya; Desa Munca; dan Desa Tanjung Agung. Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Sanggi; Desa Gebang; dan Desa Durian.

Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Bahari Dan Warisan Budaya, ditetapkan pada Kecamatan Punduh Pidada, meliputi Desa Pagar Jaya; Desa Pulau Legundi; dan Desa Sidodadi. Kecamatan Marga Punduh, meliputi Desa Pulau Pahawang; Desa Kekatang; Desa Kampung Baru; Desa Pekon Ampai; Desa Kunyaiyan; Desa Cilimus; dan Desa Tajur. Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Batumenyan.

Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Kerajinan Tangan Tapis, ditetapkan pada: Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Kagungan Ratu; Desa Negeri Katon; Desa Tanjung Rejo; Desa Halangan Ratu; dan Desa Pujo Rahayu.

2) **Pertanian**

Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Padi, ditetapkan pada: Kecamatan Marga Punduh, meliputi Desa Suka Jaya Punduh; Desa Maja; Desa Tajur; Desa Pekon Ampai; Desa Umbul Limus; Desa Kunyaiyan; Desa Kekatang; dan Desa Kampung Baru. Kecamatan Punduh Pidada, meliputi Desa Suka Maju; Desa Bawang; Desa Pagar Jaya; Desa Kota Jawa; Desa Rusaba; Desa Sukajaya Pedada; Desa Baturaja; Desa Banding Agung; dan Desa Bangun Rejo. Kecamatan Way Lima, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Cimanuk; Desa Suka Mandi; Desa Way Harong; Desa Margo Dadi; Desa Tanjung Agung; Desa Kota Dalam; Desa Baturaja; Desa Sindang Garut; Desa Sidodadi; Desa Gedung Dalam; Desa Pekondoh; Desa Pekondoh Gedung; Desa Banjar Negeri; Desa Padang Manis; dan Desa Paguyuban. Kecamatan Way Khilau, meliputi Desa Gunung Sari; Desa Kububatu; Desa Tanjungrejo; Desa Kotajawa; Desa Tanjungkerta; Desa

Sukajaya; Desa Padang cermin; Desa Bayas Jaya; Desa Penengahan; dan Desa Madajaya. Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Mulya Sari; Desa Ponco Rejo; Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan Jaya; Desa Wates Way Ratai; Desa Ceringin Asri; Desa Bunut Seberang; Desa Sumber Jaya; dan Desa Bunut. Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Padang Cermin; Desa Durian; Desa Sanggi; Desa Gayau; Desa Banjaran; Desa Khepong Jaya; Desa Hanau Bekhak; Desa Tambangan; Desa Paya; Desa Way Urang; dan Desa Tri Mulyo. Kecamatan Gedong Tataan, meliputi Desa Kurungan Nyawa; Desa Negeri Sakti; Desa Suka Banjar; Desa Bernung; Desa Taman Sari; Desa Wiyono; Desa Kebagusan; Desa Sukaraja; Desa Bagelen; Desa Gedong Tataan; Desa Bogorejo; Desa Sukadadi; Desa Way Layap; Desa Cipadang; Desa Pampangan; Desa Padang ratu; Desa Karang anyar; dan Desa Kutoarjo. Kecamatan Tegineneng, meliputi Desa Kresno Widodo; Desa Gedung Gumanti; Desa Kejadian; Desa Bumi Agung; Desa Batang Hari Ogan; Desa Rejo Agung; Desa Kota Agung; Desa Negara Ratu Wates; Desa Gunung Sugih Baru; Desa Margo Mulyo; Desa Tri Mulyo; Desa Sinar Jati; Desa Margo Rejo; Desa Gerning; Desa Panca Bakti; dan Desa Sri Wedari. Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Purworejo; Desa Kagungan Ratu; Desa Pujo Rahayu; Desa Kali Rejo; Desa Tanjung Rejo; Desa Negeri Katon; Desa Negara Saka; Desa Pejambon; Desa Halangan Ratu; Desa Tresno Maju; Desa Lumbir Rejo; Desa Rowo Rejo; Desa Sidomulyo; Desa Poncokresno; Desa Trirahayu; Desa Sinar Bandung; Desa Bangun Sari; Desa Karang Rejo; dan Desa Negeri Ulangan Jaya.

Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Pisang; ditetapkan pada Kecamatan Marga Punduh, meliputi Desa Suka Jaya Punduh; Desa Maja; Desa Tajur; Desa Pekon Ampai; Desa Umbul Limus; Desa Kunyaian; Desa Kekatang; dan Desa Kampung Baru. Kecamatan Punduh Pedada, meliputi : Desa Suka Maju; Desa Bawang; Desa Pagar Jaya; Desa Kota Jawa; Desa Rusaba; Desa Sukajaya Pedada; Desa Baturaja; Desa Banding Agung; dan Desa Bangun Rejo. Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Wates Way Ratai; Desa Sumber Jaya; Desa Bunut; Desa Ceringin Asri; Desa Pesawaran Indah; dan Desa Mulya Sari. Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Banjaran; Desa Durian; Desa Sanggi; Desa Padang Cermin; dan Desa Hanau Bekhak. Kawasan Perdesaan Berbasis Cabe; ditetapkan pada Kecamatan Marga Punduh, meliputi Desa Suka Jaya Punduh; Desa Maja; Desa Tajur; Desa Pekon Ampai; Desa Umbul Limus; Desa Kunyaian; Desa Kekatang; dan Desa Kampung Baru. Kecamatan Punduh Pedada, meliputi Desa Suka Maju; Desa Bawang; Desa Pagar Jaya; Desa Kota Jawa; Desa Rusaba; Desa Sukajaya Pedada; Desa Baturaja; Desa Banding Agung; dan Desa Bangun Rejo. Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Poncorejo; Desa Ceringin Asri; Desa Pesawaran Indah; Desa Mulyasari; dan Desa Wates Way Ratai.

Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Jagung ditetapkan pada Kecamatan Tegineneng, meliputi Desa Kresno Widodo; Desa Gedung Gumanti; Desa Kejadian; Desa Bumi Agung; Desa Batang Hari Ogan; Desa Rejo Agung; Desa Kota Agung; Desa Negara Ratu Wates; Desa Margo Mulyo; Desa Tri Mulyo; Desa Sinar Jati; Desa Margo Rejo; Desa Gerning; Desa Panca Bakti; dan Desa Sri Wedari. Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Pujo Rahayu; Desa Tanjung Rejo; Desa Pejambon; Desa Halangan Ratu; Desa Tresno Maju; Desa Lumbir Rejo; Desa Rowo Rejo; Desa Sidomulyo; Desa Poncokresno; Desa Tri Rahayu; Desa Sinar Bandung; dan Desa Bangun Sari.

3) *Peternakan*

Kawasan Perdesaan Pengembangan Ternak Kambing ditetapkan pada Kecamatan Way Ratai, yang meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Mulyasari; Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan Jaya; Desa Wates Way Ratai; Desa Sumber Jaya; Desa Bunut; Desa Bunut Seberang; Desa Caringin Asri. Kecamatan Gedong Tataan, meliputi Desa Kurungan Nyawa; Desa Negeri Sakti; Desa Suka Banjar; Desa Bernung; Desa Taman Sari; Desa Wiyono; Desa Kebagusan; Desa Sukaraja; Desa Bagelen; Desa Gedong Tataan; Desa Bogorejo; Desa Sukadadi; Desa Way Layap; Desa Cipadang; Desa Pampangan; Desa Padang ratu; Desa Karang anyar; Desa Kutoarjo; dan Desa Sungai Langka.

Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Ternak Sapi ditetapkan pada Kecamatan Tegineneng, meliputi Desa Kresno Widodo; Desa Margo Mulyo; Desa Tri Mulyo; Desa

Sinar Jati; Desa Gerning; Desa Panca Bakti; Desa Sri Wedari; dan Desa Margo Rejo. Kecamatan Negeri Katon, yang meliputi : Desa Tanjung Rejo; Desa Negeri Katon; Desa Pejambon; Desa Tresno Maju; Desa Rowo Rejo; Desa Sido Mulyo; Desa Poncokresno; Desa Karang Rejo; Desa Bangun Sari; Desa Tri Rahayu; dan Desa Sinar Bandung.

4) Perkebunan

Kawasan Pengembangan dan Pengolahan Kakao wilayah I ditetapkan pada: Kecamatan Kedondong, meliputi Desa Tempel Rejo; Desa Sinar harapan, Desa Harapan Jaya; Desa Babakan Loa; Desa Kedondong; Desa Pesawaran; Desa Teba Jawa; Desa Sukamaju. Kecamatan Way Khilau meliputi Desa Bayas Jaya; Desa Padang Cermin; Sukajaya, Penengahan; Mada Jaya; Tanjung Rejo; Desa Kubu Batu; Desa Kota Jawa; Desa Tanjung Kerta. Kecamatan Way Lima meliputi Desa Padang Manis; Desa Banjar Negri; Desa Way harong; Desa Gunung Rejo; Desa Cimanuk; dan Desa Margodadi.

Kawasan Pengembangan dan Pengolahan Kakao wilayah II ditetapkan pada Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Banjaran; Desa Sanggi; Desa Padang Cermin; Desa Durian; Desa Way Urang; Kecamatan Way Ratai meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Harapan Jaya; Desa Pesawaran Indah; Desa Sumber Jaya; Desa Bunut Sebrang; Desa Bunut; Desa Paya; Desa Tambangan; Desa Gayau; Desa Wates Way Ratai. Kecamatan Marga Punduh meliputi Desa Penyandingan; Desa Tajur; Desa Umbul limus; Desa Sukajaya Punduh; Pulau Pehawang. Kecamatan Punduh Pidada, meliputi Desa Banding Agung; Desa Kunyaian; Desa Suka Maju; Desa Bawang; Desa Bangun Rejo; Desa Sukarame; dan Desa Batu Raja.

Kawasan Pengembangan dan Pengolahan Kelapa wilayah II ditetapkan pada Kecamatan Punduh Pidada meliputi Pulau Legundi; Desa Kampung Baru; Desa Sukajaya Punduh; Desa Banding Agung.

5) Perikanan

Kawasan Perdesaan Pengembangan Perikanan, ditetapkan pada Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Durian; Desa Sanggi; dan Desa Gayau. Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Gebang; dan Desa Suka Jaya. Kecamatan Marga Punduh; meliputi Desa Tajur; dan Desa Pulau Pahawang. Kecamatan Punduh Pidada meliputi Desa Pulau Legundi; dan Desa Sukarame.

Penetapan kawasan perdesaan berbasis minapolitan, ditetapkan pada Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Padang Cermin; dan Desa Durian. Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Gebang; Desa Hurun; Desa Hanura; dan Desa Sidodadi. Kecamatan Punduh Pidada meliputi Desa Bangunrejo; Desa Sukarame; Desa Kampung Baru; Desa Kekatang; Desa Kota Jawa; dan Desa Rusaba.

6) Industri

Penetapan kawasan perdesaan berbasis home industri ditetapkan pada Kecamatan Gedong Tataan, meliputi Desa Kutoarjo; Desa Bagelen; dan Desa Karang Anyar. Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Kagungan Ratu; Desa Karang Rejo; Desa Purworejo; Desa Pujo Rahayu; dan Desa Kalirejo.

Penetapan kawasan perdesaan berbasis sentra industri kerajinan tapis, ditetapkan pada Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Kagungan Ratu, Desa Negeri Katon; Desa Tanjung Rejo; Desa Halangan Ratu; Desa Negara Saka; Desa Kalirejo; Desa Pejambon; dan Desa Negeri Ulangan Jaya.

j. Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesawaran, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2022 sebanyak 487.150 jiwa yang terdiri dari 250.674 jiwa penduduk laki-laki dan 236.479 jiwa penduduk perempuan. Dilihat dari distribusi antar kecamatan di Tahun 2022, maka ada dua kecamatan yaitu Kecamatan Punduh Pidada dan Marga Punduh tercatat sebagai daerah dengan penduduk di bawah 20 ribu jiwa dan Kecamatan Gedong Tataan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pesawaran dengan jumlah 110.470 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 mencapai 381,12 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 11 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Gedong Tataan dengan kepadatan sebesar 754,04 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Punduh Pidada sebesar 167,10 jiwa/km². Masyarakat Kabupaten Pesawaran merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada antara lain Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Tionghoa, Bugis, dan beberapa suku dari wilayah kepulauan Indonesia lainnya. Adapun jumlah penduduk, distribusi persentase penduduk dan kepadatan penduduk Tahun 2022 menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Jumlah, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah	Persentase	Kepadatan
		(jiwa)	(%)	(jiwa/km ²)
1.	Punduh Pidada	15.820	3,25	167,10
2.	Marga Punduh	15.620	3,21	199,40
3.	Padang Cermin	29.670	6,09	171,70
4.	Teluk Pandan	40.070	8,22	337,36
5.	Way Ratai	35.560	7,30	366,94
6.	Kedondong	38.690	7,94	439,45
7.	Way Khilau	31.570	6,48	507,60
8.	Way Lima	38.530	7,91	301,00
9.	Gedong Tataan	110.470	22,68	754,04
10.	Negeri Katon	72.770	14,94	484,94
11.	Tegineneng	58.380	11,98	411,44
Jumlah		487.150	100,00	381,12

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Peningkatan jumlah penduduk utamanya dipengaruhi oleh migrasi masuk dan tingkat kelahiran. Peningkatan kepadatan penduduk memberikan 2 (dua) dampak sekaligus, bagaikan dua sisi dalam satu mata uang, yaitu dampak negatif dan dampak positif secara bersamaan. Terpusatnya penduduk pada suatu wilayah (*aglomerasi*), akan berdampak pada aktivitas ekonomi dengan intensitas tinggi, di mana dalam perspektif ekonomi timbulnya *aglomerasi* akan menciptakan efisiensi “biaya” dalam proses transformasi sumberdaya-sumberdaya yang ada serta *multiplier effect* berupa peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat sebagai penggerak ekonomi utama.

Di sisi lain, terpusatnya penduduk pada suatu wilayah tertentu, bukan saja akan berimplikasi terhadap masalah kependudukan, seperti permukiman kumuh, peningkatan pelayanan publik, disfungsi tata guna lahan dan akan berimplikasi pula terhadap masalah keamanan, ketertiban, ketenteraman dan masalah sosial lainnya.

Pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, daya dukung lingkungan serta sarana prasarana lainnya. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesawaran dalam beberapa tahun terakhir adalah sebesar rata-rata 2,28% per tahun. Perkembangan penduduk Kabupaten Pesawaran terlihat dari tabel berikut.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Punduh Pidada	13.575	13.619	15.500	15.640	15.820
2.	Marga Punduh	13.698	13.744	15.360	15.500	15.620
3.	Padang Cermin	28.753	29.181	29.200	29.460	29.670
4.	Teluk Pandan	37.447	38.007	39.210	39.560	40.070
5.	Way Ratai	36.201	36.740	35.290	35.600	35.560
6.	Kedondong	34.385	34.573	38.020	38.360	38.690
7.	Way Khilau	27.300	27.448	30.890	31.160	31.570
8.	Way Lima	31.033	31.148	37.400	37.730	38.530
9.	Gedong Tataan	98.593	99.982	107.370	108.320	110.470

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
10.	Negeri Katon	66.374	66.860	71.630	72.270	72.770
11.	Tegineneng	52.883	53.078	57.600	58.110	58.380
Jumlah		440.192	444.380	477.470	481.710	487.150
Pertumbuhan		1,00%	0,95%	7,45%	0,88%	1,12%
Pertumbuhan Rata-rata per Tahun						2,28%

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2019-2023

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi untuk melakukan percepatan pembangunan daerah yang diiringi dengan program-program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dapat juga menjadi beban/masalah jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang mumpuni. Dari aspek rasio jenis kelamin (*sex ratio*), secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dari *sex ratio* yang nilainya lebih dari 100. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 sebesar 106 yang berarti dari tiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 106 penduduk laki-laki. Kecamatan Padang Cermin memiliki nilai *sex ratio* tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu, sebesar 108,5.

Tabel 2.9 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Total	Laki-Laki	Perempuan	
1.	Punduh Pidada	15.820	8.172	7.641	106,2
2.	Marga Punduh	15.620	8.145	7.527	107,7
3.	Padang Cermin	29.670	15.513	14.282	108,5
4.	Teluk Pandan	40.070	20.805	19.201	108,2
5.	Way Ratai	35.560	18.663	17.342	107,5
6.	Kedondong	38.690	19.929	18.860	105,6
7.	Way Khilau	31.570	16.296	15.219	106,6
8.	Way Lima	38.530	19.494	18.660	104,0
9.	Gedong Tataan	110.470	56.051	53.498	105,3
10.	Negeri Katon	72.770	37.613	35.471	106,3
11.	Tegineneng	58.380	29.993	28.778	104,2
Jumlah		487.150	250.674	236.479	106,0

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan indikator makro yang masih relevan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi, variabel lainnya, dan distribusi pendapatan (*distribution of income*) antar golongan masyarakat. Dengan demikian ukuran pertumbuhan ekonomi masih tetap digunakan sebagai tolok ukur terutama oleh negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya jika negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian. Munculnya Berdasarkan tabel dibawah ini pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor lapangan usaha pada Tahun 2022 tertinggi pada sektor jasa lainnya sebesar 28,54% dan terendah pada sektor pertambangan dan penggalian yang berkontraksi hingga -2,84%. Covid-19 pada akhir Tahun 2019 memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran dalam tiga tahun terakhir. Sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi berada pada angka minimal 5% per tahunnya, dimana pada Tahun 2020, tahun pertama Covid-19 menyebabkan perekonomian berkontraksi hingga -1,26%. Seiring dengan berjalannya waktu pada Tahun 2021 aktivitas perekonomian mulai bangkit hingga dapat mencapai angka

pertumbuhan sebesar 2,08% dan terus berkembang mencapai 4,55% pada Tahun 2022.

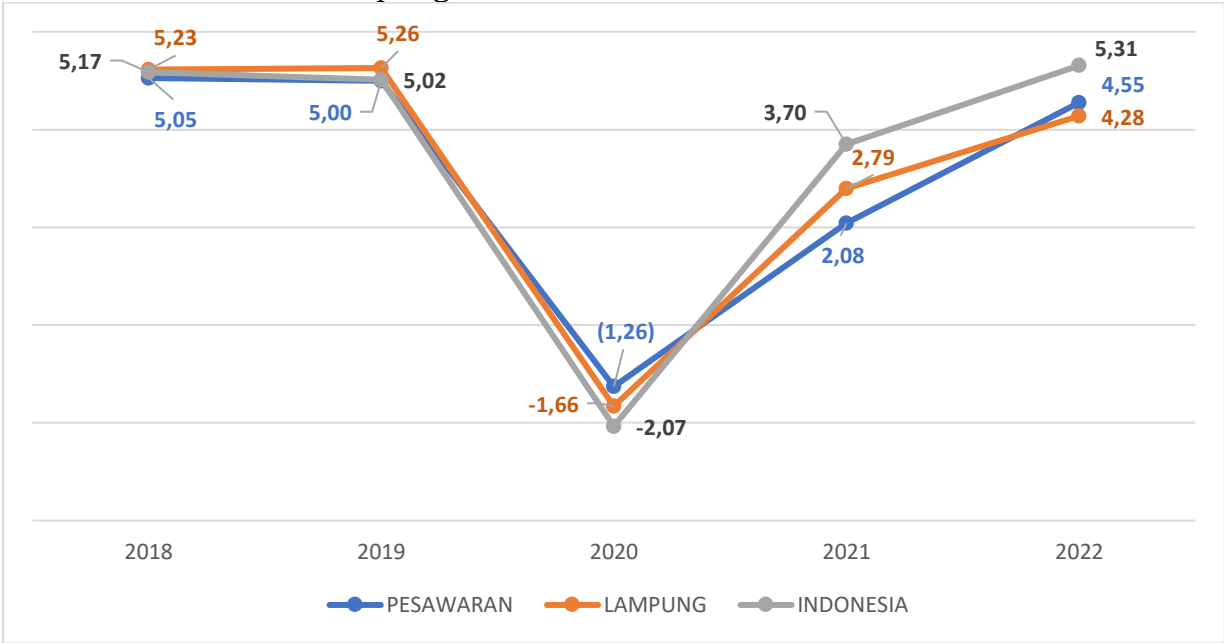
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,19	0,07	-1,27	1,56
2	Pertambangan dan Penggalian	4,23	2,35	-0,03	1,87	-2,84
3	Industri Pengolahan	7,51	5,59	-4,77	6,90	2,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,58	7,62	7,23	4,49	6,18
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,58	6,48	5,18	8,39	1,20
6	Konstruksi	9,96	9,00	-2,18	1,59	7,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran	7,39	8,55	-4,87	5,63	10,52
8	Transportasi dan Pergudangan	6,74	10,46	-4,03	5,25	18,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,53	17,93	-3,81	0,28	14,51
10	Informasi dan Komunikasi	8,96	8,88	9,05	6,67	5,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04	3,59	2,78	0,91	-1,56
12	Real Estate	5,92	6,51	-2,29	1,32	7,59
13	Jasa Perusahaan	2,12	4,16	-2,15	2,04	14,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,06	5,11	3,84	2,45	-1,61
15	Jasa Pendidikan	9,49	10,03	3,85	3,32	2,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,88	7,04	9,26	5,12	0,01
17	Jasa Lainnya	7,96	12,78	-11,57	4,28	28,54
	Kabupaten Pesawaran	5,05	5,00	-1,26	2,08	4,55

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Secara total berdasarkan PDRB harga konstan Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran berfluktuasi, Tahun 2018 sebesar 5,05%, Tahun 2019 sebesar 5,00%, Tahun 2020 menjadi -1,26%, Tahun 2021 menjadi 2,08%, dan Tahun 2022 menjadi 4,55%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2.10 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

b. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi dan kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah

dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (*lapangan usaha*) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha pada tahun 2022 adalah sebesar 18.687,39 miliar rupiah. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang PDRB terbesar yaitu 7.450,97 miliar rupiah. Kategori dengan penyumbang nilai PDRB terbesar kedua di Kabupaten Pesawaran adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran yaitu 2.872,81 miliar rupiah. Sedangkan kategori dengan penyumbang nilai PDRB terbesar ketiga adalah Kategori Industri Pengolahan yaitu 2.641,91 miliar rupiah. Perkembangan PDRB ADHB per sektor lapangan usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (dalam Miliar)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.444,83	6.669,87	6.787,28	6.830,86	7.450,97
2	Pertambangan dan Penggalian	192,21	201,83	220,63	230,05	229,66
3	Industri Pengolahan	2.181,36	2.335,74	2.242,32	2.464,09	2.641,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,36	8,10	8,63	9,34	10,00
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,08	9,71	10,23	11,18	11,43
6	Konstruksi	1.523,01	1.688,65	1.647,12	1.724,52	1.903,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2.017,96	2.277,83	2.211,87	2.369,09	2.872,81
8	Transportasi dan Pergudangan	412,22	457,01	447,42	478,45	636,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	195,06	232,65	224,88	226,18	264,28
10	Informasi dan Komunikasi	489,43	537,87	576,94	599,49	636,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	63,10	66,35	68,23	71,44	75,41
12	Real Estate	311,02	350,49	350,05	354,86	392,90
13	Jasa Perusahaan	9,04	9,57	9,52	9,79	11,59
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	567,01	599,10	629,34	642,44	650,04
15	Jasa Pendidikan	469,70	530,01	550,75	581,03	616,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94,06	101,92	112,29	120,31	123,01
17	Jasa Lainnya	113,15	131,49	114,24	119,86	160,24
	Nilai PDRB Kab. Pesawaran	15.099,60	16.208,19	16.211,74	16.842,98	18.687,39

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Tabel diatas menunjukkan perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran yang mengalami kenaikan setiap tahunnya persektor lapangan usaha dari tahun 2018–2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa masing-masing sektor masih sangat memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan kemajuan daerah Kabupaten Pesawaran. Walaupun tidak dapat menunjukkan unsur pemerataan pendapatan perorang sebagai cerminan kesejahteraan daerah namun demikian ukuran kesejahteraan pada umumnya PDRB menjadi *proxi* yang masih dipakai hingga saat ini.

Tabel 2.12 Struktur Komposisi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Sektor Ekonomi	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42,68	41,15	41,87	40,55	39,87
B	Pertambangan dan Penggalian	1,27	1,25	1,36	1,37	1,23
C	Industri Pengolahan	14,45	14,41	13,83	14,63	14,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06
F	Konstruksi	10,09	10,42	10,16	10,24	10,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran	13,36	14,05	13,64	14,06	15,37
H	Transportasi dan Pergudangan	2,73	2,82	2,76	2,84	3,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,29	1,44	1,39	1,34	1,41
J	Informasi dan Komunikasi	3,24	3,32	3,56	3,57	3,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	0,41	0,42	0,42	0,40
L	Real Estate	2,06	2,16	2,16	2,11	2,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,76	3,70	3,88	3,81	3,48
P	Jasa Pendidikan	3,11	3,27	3,40	3,45	3,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,63	0,69	0,71	0,66
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,75	0,81	0,70	0,71	0,86

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Berdasarkan tabel diatas sektor basis ekonomi yang menunjang perekonomian Kabupaten Pesawaran berturut-turut yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 39,87 persen, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,37 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 14,14 persen.

Berdasarkan Struktur PDRB Atas Harga Berlaku menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Pesawaran (miliar rupiah) Tahun 2022, distribusi terbesar terdapat pada Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga yaitu sebesar 10.816,88 miliar Rupiah, Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu 5.702,62 miliar Rupiah, serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yaitu sebesar 1.103,13 miliar Rupiah. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Pesawaran (miliar rupiah) Tahun 2018–2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (dalam Miliar)

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.659,59	9.349,29	9.325,11	9.780,52	10.816,88
Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH	198,79	220,37	225,11	230,55	243,87
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.074,8	1.125,38	1.119,81	1.141,64	1.103,13
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.706,00	5.167,52	5.029,77	5.324,66	5.702,62
Perubahan Inventori	5,61	2,07	182,34	-245,34	0,48
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	454,82	343,57	329,60	613,02	820,40
Produk Domestik Regional Bruto	15.099,60	16.208,19	16.211,74	16.845,05	18.687,38

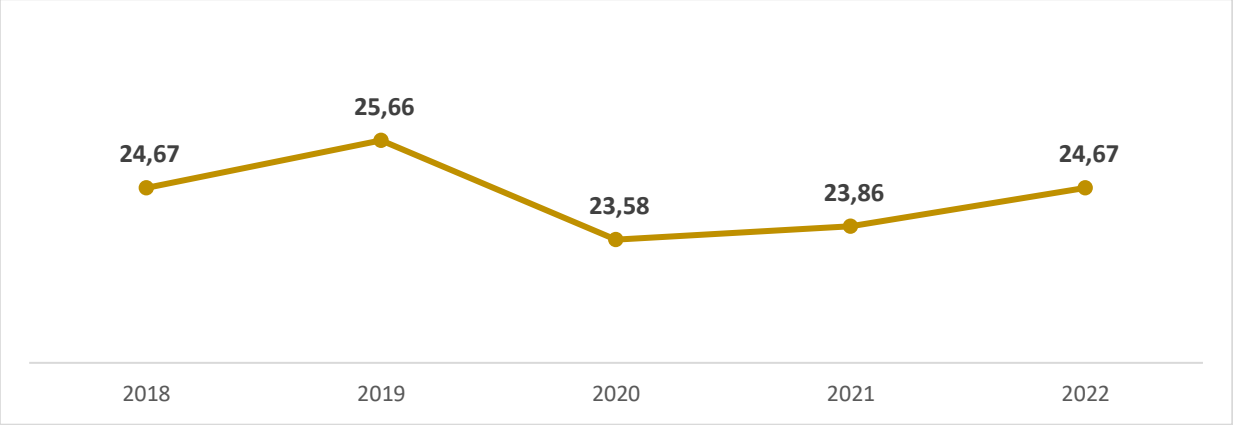
Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

c. PDRB per Kapita

PDRB Per kapita Kabupaten Pesawaran berdasarkan data BPS Tahun 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Pada Tahun 2017 PDRB Per kapita Kabupaten Pesawaran sebesar 23,71 juta per tahun, tahun 2018 sebesar 24,67 juta per tahun, tahun 2019 sebesar 25,66 juta per tahun, dan tahun 2020 menurun

menjadi 23,58 juta per tahun akibat dampak Pandemi Covid-19 serta kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 23,86 juta per tahun, sebagaimana tercantum dalam grafik di bawah.

Gambar 2.11 Grafik Perkembangan PDRB ADHK Perkapita Tahun 2018-2022 (dalam Juta)



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

d. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Dalam kurun waktu Tahun 2018 hingga 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran mengalami tren yang fluktuatif dimana mengalami peningkatan pada Tahun 2021 sebesar 0,35% akibat dampak Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,26% menjadi 13,85% atau sebanyak 63.170 jiwa. Data perkembangan penduduk miskin dari Tahun 2018 hingga 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Per kapita per bulan)	Penduduk Miskin		Indeks Gini
		Jumlah	Persentase (%)	
2018	360.909	70.140	15,97	0,316
2019	372.649	67.360	15,19	0,310
2020	403.444	66.040	14,76	0,288
2021	420.032	68.310	15,11	0,299
2022	452.521	63.170	13,85	0,251

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Selanjutnya indeks Gini di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren fluktuatif, pada Tahun 2018 berada pada 0,316, mengalami penurunan pada angka 0,310 pada tahun 2019 dan kembali menurun pada Tahun 2020 di angka 0,288 poin. Namun mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 0,299 poin dan hingga Tahun 2022 mengalami tren positif yang menurun pada angka 0,251 poin. Hal ini bermakna bahwa terjadi penurunan angka ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pesawaran, lebih lanjut indeks Gini Kabupaten Pesawaran lebih baik dengan capaian Provinsi Lampung (0,313) pada Tahun 2022 dan lebih baik dari capaian nasional (0,381).

e. Indeks Pembangunan Manusia

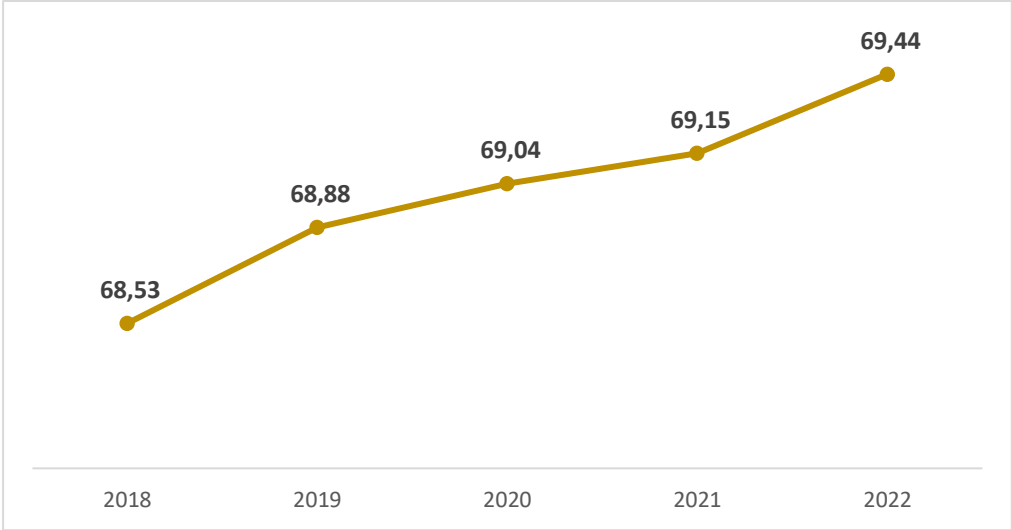
IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini paling tidak ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak Tahun 2010 BPS telah menggunakan metode baru dalam penentuan IPM. Perubahan tersebut mencakup data yang digunakan dan metode perhitungan.

Dengan mengganti angka melek huruf dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara itu dari sisi pendapatan PNB per kapita menggantikan PDB per kapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Pesawaran dari Tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan tren yang baik. Pada Tahun 2018 berada pada angka 68,53 poin dan meningkat menjadi 68,88 di Tahun 2019. Selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2022 berada pada angka 69,44 poin.

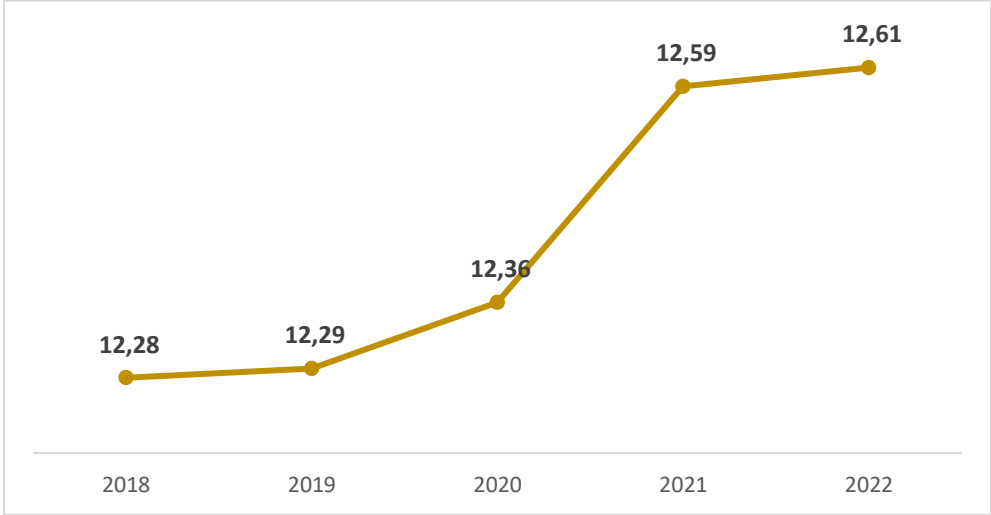
Gambar 2.12 Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Angka harapan lama sekolah menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan lama sekolah pada rentang waktu Tahun 2018-2022 meningkat dari angka 12,28 menjadi 12,61. Harapan lama sekolah di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang paling besar dalam lima tahun terakhir sebesar 0,23 poin. Secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,61 tahun atau setara dengan Diploma I.

Gambar 2.13 Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022

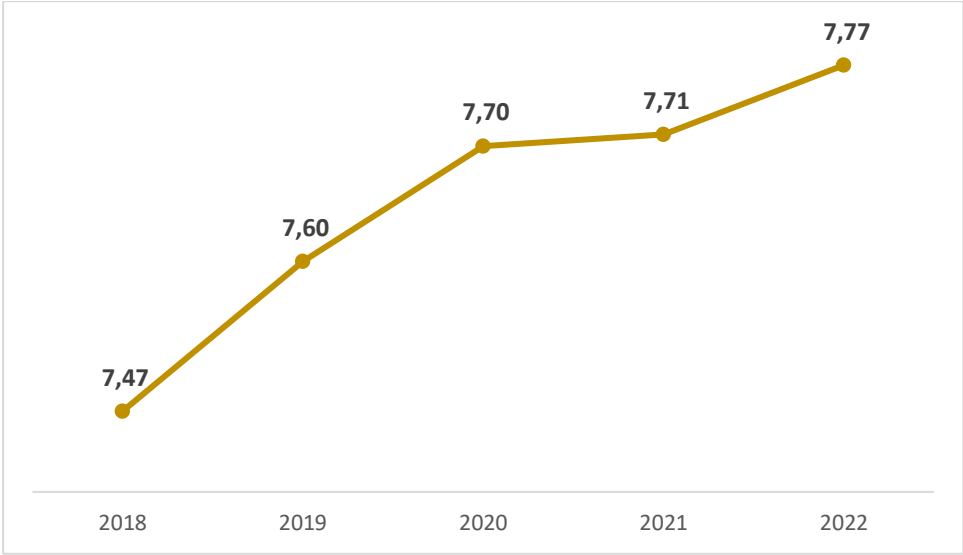


Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Angka rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan dari Tahun 2018 pada angka 7,47 menjadi 7,77 pada Tahun

2022. Rata-rata lama sekolah pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk di Kabupaten Pesawaran yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,77 tahun atau hampir menyelesaikan kelas VIII (Pendidikan menengah pertama kelas 2).

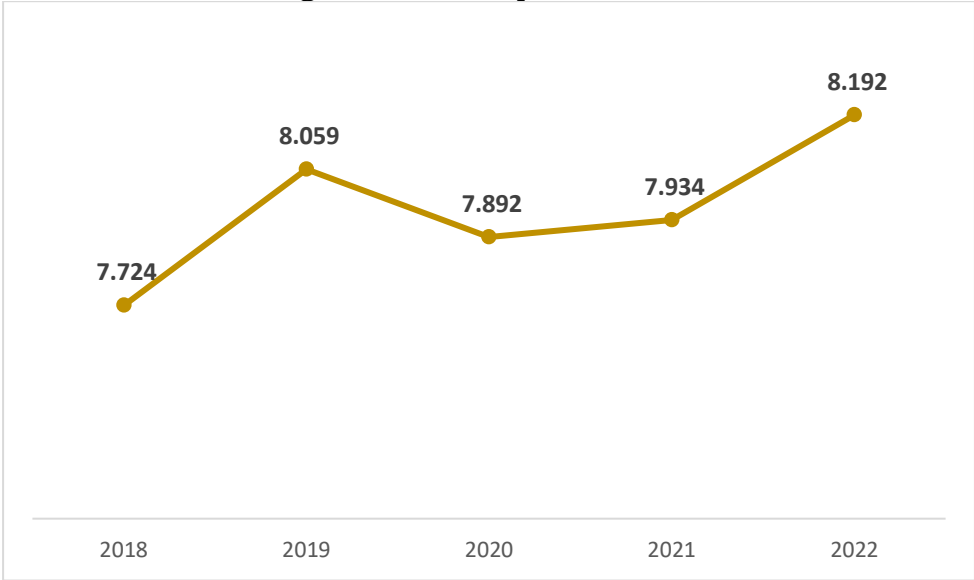
Gambar 2.14 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Daya beli adalah kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan daya beli menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli di Kabupaten Pesawaran pada rentang waktu 2018 sampai 2022 befluktuasi. Pada Tahun 2018 berada pada angka 7.724,00 ribu rupiah/orang/tahun meningkat hingga Tahun 2019 pada angka 8.059,00 ribu rupiah/orang/tahun dan menjadi 7.892,00 ribu rupiah/orang/tahun pada Tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19, kemudian pada Tahun 2021 meningkat kembali menjadi 7.934,00 ribu rupiah/orang/tahun hingga mencapai 8.192,00 ribu rupiah/orang/tahun pada Tahun 2022.

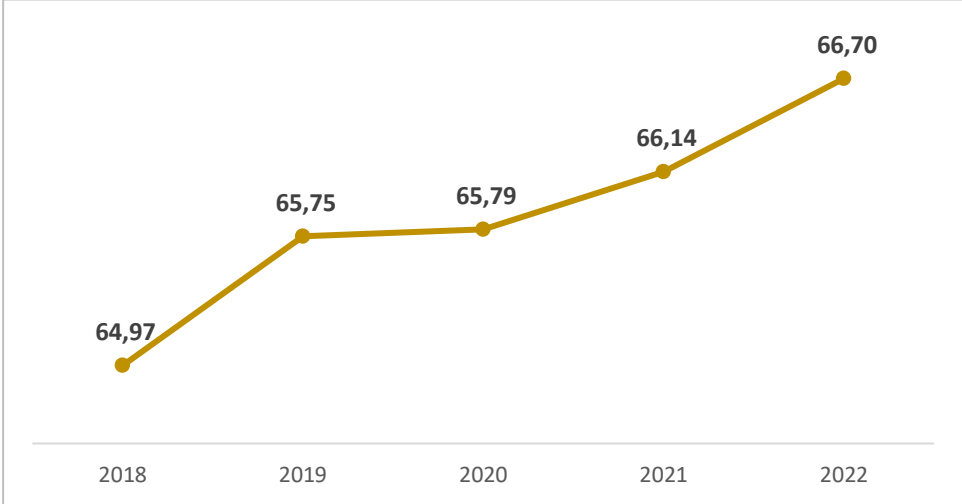
Gambar 2.15 Grafik Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Perkembangan IPM Kabupaten Pesawaran dari Tahun 2018 hingga 2022 setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 tercatat 64,97 poin meningkat menjadi 66,70 poin di Tahun 2022 yang artinya nilai IPM tersebut masih masuk ke dalam kategori sedang.

Gambar 2.16 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

f. Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja pada usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Sedangkan TPT adalah ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan data pada tabel dibawah, TPAK Kabupaten Pesawaran pada lima tahun terakhir mengalami perkembangan menuju tren yang berfluktuatif. Selama kurun waktu tersebut persentase jumlah angkatan kerja yang terserap dalam dunia kerja mengalami perkembangan yang cukup baik, pada tahun 2018 persentase jumlah angkatan kerja yang berkerja sebesar 68,23 persen yang meningkat menjadi 69,49 persen pada Tahun 2020 namun mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 65,42 persen akibat Pandemi Covid-19. Selanjutnya cerminan angka tersebut tidak berpengaruh terhadap *progress* menurunnya tingkat pengangguran dari 4,64 persen pada Tahun 2018 menjadi 4,19 pada Tahun 2021. Namun pada Tahun 2022 tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,06 persen.

Tabel 2.15 Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022

Tahun	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka
2018	68,23	4,64
2019	67,80	4,34
2020	69,49	4,64
2021	65,42	4,19
2022	71,27	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

g. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Indikator yang menjadi pengukuran dalam hal pengarusutamaan gender adalah Indeks Pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG terdiri dari 4 (empat) indikator komposit yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) , Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan.

Pembangunan perempuan dalam suatu pembangunan wilayah yang diukur menggunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sejak Tahun 2017

hingga 2022, IPG Kabupaten Pesawaran mengalami tren peningkatan kecuali pada Tahun 2019 menurun 0,27 dan pada Tahun 2020 kembali meningkat sampai dengan Tahun 2022 yaitu berada pada angka 87,77. Hal tersebut menunjukkan perlunya upaya peningkatan pembangunan SDM perempuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam indikator-indikator pembentuk IPM.

Tabel 2.16 Kondisi Pembangunan Gender Tahun 2017-2022

Indikator Gender	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,25	87,57	87,30	87,20	87,22	87,77
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,51	67,03	72,59	72,21	73,70	73,70

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran 2023

Sedangkan IDG terdiri dari 3 (tiga) indikator komposit yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manager, profesional, teknisi dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Kabupaten Pesawaran selama kurun waktu Tahun 2017-2022 mengalami tren fluktuatif, pada Tahun 2017 berada pada poin 70,51, kemudian mengalami penurunan menjadi 67,03 di Tahun 2018 dan meningkat kembali pada angka tertinggi 72,59 pada Tahun 2019 dan meningkat kembali pada Tahun 2021 di angka 73,70 dan tetap berada pada angka yang sama di Tahun 2022.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Urusan Wajib

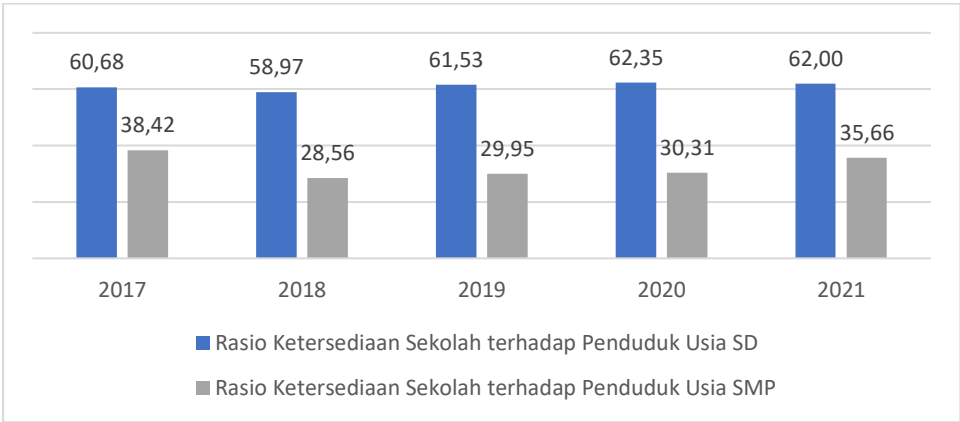
A. Urusan Pendidikan

1) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan penduduk usia pendidikan menengah pertama.

Secara umum, tren rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Pesawaran selama kurun waktu Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah jenjang SD tercatat 60,68 per 10.000 penduduk usia SD dan mengalami peningkatan menjadi 62,00 per 10.000 penduduk usia SD di Tahun 2021. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah pada jenjang SMP di Tahun 2017 tercatat 38,42 per 10.000 penduduk usia SMP kemudian menurun menjadi 35,66 per 10.000 penduduk usia SMP di Tahun 2021. Kondisi demikian bermakna masih kurangnya ketersediaan sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Pesawaran. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.17 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2022

2) Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata

Rasio Guru terhadap murid idealnya 500 orang guru untuk 10.000 murid atau 1 (satu) orang guru untuk 20 murid. Jenjang pendidikan SD di Kabupaten Pesawaran jika dibandingkan dengan angka rasio ideal sudah melampaui. Pada Tahun 2017 rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata jenjang SD sebesar 1 (satu) guru untuk 70 murid, sedangkan pada jenjang SMP di tahun yang sama 1 (satu) guru untuk 12 murid. Hal ini menggambarkan ketersediaan guru di Kabupaten Pesawaran masih belum mencukupi terkhusus untuk guru seklah dasar.

Tabel 2.17 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
SD	1 : 70	1 : 76	1 : 63	1 : 70	1 : 70
SMP	1 : 12	1 : 10	1 : 10	1 : 11	1 : 11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, 2022

3) Sekolah Kondisi Bangunan Baik

Kondisi sekolah dengan bangunan baik di Kabupaten Pesawaran pada jenjang SD dan SMP mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada jenjang SD di Tahun 2016 tercatat 212 bangunan sekolah dalam kondisi baik meningkat pada Tahun 2020 menjadi 278 bangunan sekolah dalam kondisi baik atau sekitar 89,10 persen dari seluruh SD. Sedangkan pada jenjang SMP di Tahun 2016 tercatat 48 bangunan sekolah dalam kondisi baik meningkat pada Tahun 2020 menjadi 63 bangunan dalam kondisi baik atau sekitar 92,65 persen dari seluruh SMP.

Tabel 2.18 Sekolah Kondisi Bangunan Baik Tahun 2016-2020

Tahun	SD			SMP		
	Bangunan Baik	Jumlah Sekolah	Persentase	Bangunan Baik	Jumlah Sekolah	Persentase
2016	212	309	68,61	48	59	81,36
2017	230	309	74,43	51	59	86,44
2018	250	309	80,91	53	61	86,89
2019	270	309	87,38	60	66	90,91
2020	278	312	89,10	63	68	92,65

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2021

4) Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, perkembangan APM di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2017-2021 secara umum mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 APM jenjang SD berada pada angka 98,34% dan meningkat menjadi 99,61% pada Tahun 2021. Sedangkan APM jenjang SMP pada Tahun 2017 berada pada angka 92,75% dan meningkat menjadi 97,87% pada Tahun 2021. Secara umum APM jenjang SD lebih tinggi daripada jenjang SMP sehingga kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat anak usia pada pendidikan menengah yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus dari jenjang SD.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
SD	98,34	98,71	98,65	99,23	99,61
SMP	92,75	92,97	94,74	98,58	97,87

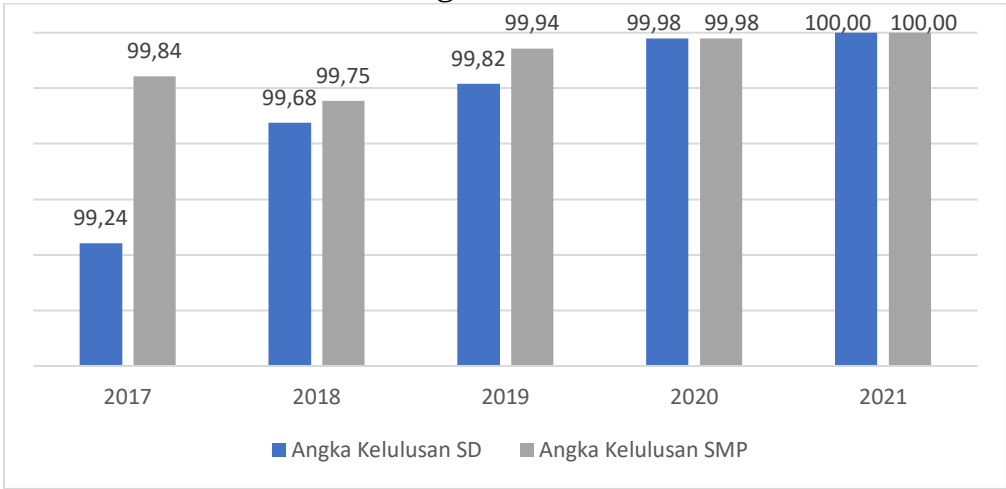
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2022

5) Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Pesawaran selama kurun waktu Tahun 2017-2021 untuk SD selalu mengalami peningkatan namun untuk SMP berfluktuasi pada rentang 2017-2019. Secara umum progress angka kelulusan jenjang SMP lebih tinggi

daripada jenjang SD. Pada akhir periode Tahun 2021 angka kelulusan SD dan SMP telah mencapai 100% dan perlu dipertahankan untuk kedepannya.

Gambar 2.18 Grafik Angka Kelulusan Tahun 2017-2021

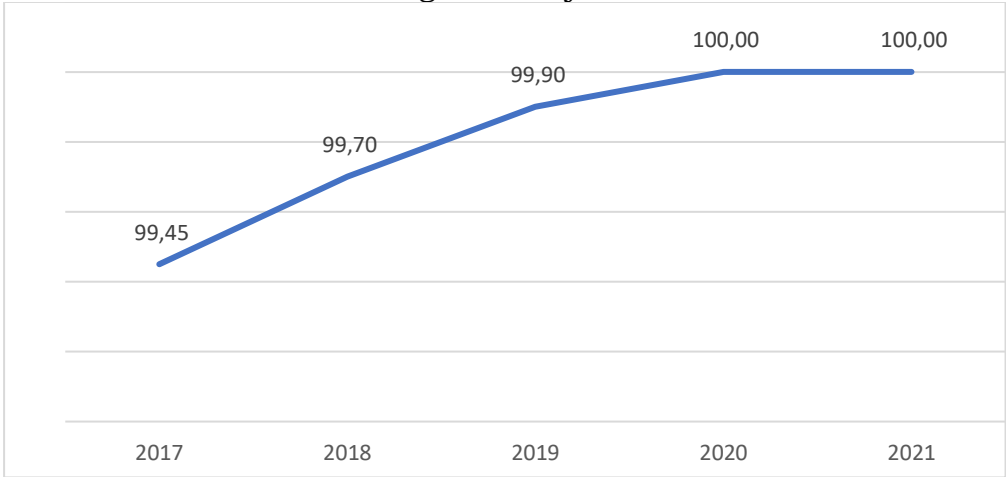


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2021

6) **Angka Melanjutkan**

Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP selama lima tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 tercatat sebesar 99,45% murid SD/MI yang telah lulus melanjutkan ke jenjang SMP, kemudian meningkat menjadi kemudian meningkat menjadi 100% di Tahun 2021. Hal ini menunjukkan minat murid SD/MI di Kabupaten Pesawaran untuk melanjutkan studi ke tingkat selanjutnya semakin tinggi.

Gambar 2.19 Grafik Angka Melanjutkan Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2022

7) **Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Berdasarkan tabel di bawah ini, persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV pada rentang waktu Tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 Guru yang memenuhi Kualifikasi berada pada angka 94,88 persen dan meningkat menjadi 99,00 persen pada Tahun 2021.

Tabel 2.20 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	94,88	96,21	97,87	98,95	99,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2022

8) **Data Jumlah PKBM dan Data Putus Sekolah Kabupaten Pesawaran**

Dalam rangka mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing maka perlu juga dikembangkan jalur pendidikan non formal agar dapat mengakomodir pelajar yang tidak meneruskan pendidikan, sehingga dibutuhkan data putus sekolah dan jumlah PKBM di Kabupaten Pesawaran Tahun

2020, sebagaimana tarcantum pada tabel 2.19 di bawah ini.

Tabel 2.21 Jumlah PKBM Kabupaten Pesawaran Tahun 2020

No.	Nama Lembaga	LKP			PKBM			SKB			PONPES			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
		0	19	19	0	15	15	1	0	1	0	0	0	
1	Kec. Padang Cermin	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
2	Kec. Punduh Pedada	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4
3	Kec. Kedondong	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
4	Kec. Way Lima	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
5	Kec. Gedung Tataan	0	5	5	0	2	2	1	0	1	0	0	0	8
6	Kec. Negeri Katon	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
7	Kec. Tegineneng	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	4
8	Kec. Marga Punduh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kec. Way Khilau	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	6
10	Kec. Teluk Pandan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
11	Kec. Way Ratai	0	3	3										

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2021

Tabel 2.22 Jumlah Putus Sekolah di Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2020

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Kec. Padang Cermin	4
2	Kec. Punduh Pedada	1
3	Kec. Kedondong	21
4	Kec. Way Lima	9
5	Kec. Gedung Tataan	2
6	Kec. Negeri Katon	16
7	Kec. Tegineneng	8
8	Kec. Marga Punduh	2
9	Kec. Way Khilau	1
10	Kec. Teluk Pandan	3
11	Kec. Way Ratai	1
JUMLAH		68

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2021

9) Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Pesawaran

Berikut disajikan kinerja capaian SPM Bidang Pendidikan pada Tahun 2021.

Tabel 2.23 Capaian SPM Pendidikan.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Level	Capaian	Persentase
I.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota	1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	SD	100,00	100,00
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
		2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 28 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang	SD	67,86	82,21
				MI	57,14	
				SD	97,06	
				MI	92,86	
				SMP	78,33	
				MTS	68,89	
				SMP	100,00	
				MTS	95,56	

			dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;			
		3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	40,00	26,67
				MTS	13,33	
				SMP	40,00	
				MTs	13,33	
		4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD	79,74	84,26
				MI	78,57	
				SMP	90,00	
				MTs	82,22	
				SMP	88,33	
				MTS	86,67	
		5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	86,27	72,09
				MI	66,67	
				SD	64,00	
				MI	71,43	
		6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	66,67	70,83
				MTs	75,00	
				SMP	66,67	
				MTs	75,00	
		7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	66,34	66,32
				MI	59,52	
				SD	67,97	
				MI	71,43	
		8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	88,89	81,15
				MTS	75,00	
				SMP	85,71	
				MTs	75,00	
		9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	SMP	77,78	76,39
				MTs	75,00	
		10		SD	98,69	89,23

			Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	MI	79,76	
		11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP	98,33	84,72
				MTs	71,11	
		12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD	100,00	95,83
				MI	91,67	
		13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD		
				MI		
				SMP		
				MTs		
			100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif			
			50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan			
			0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.			
		14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD	100,00	100,00
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
II	Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD	83,23	76,31
				MI	62,34	
				SD	88,24	
				MI	71,43	
		16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran	SMP	88,24	68,11
				MTs	71,43	
				SMP	75,00	
				MTs	37,78	

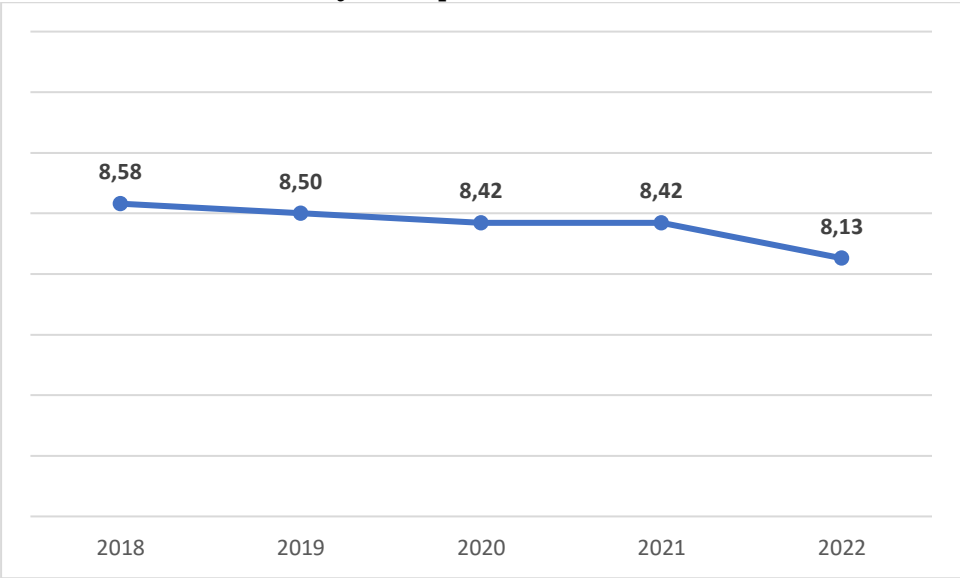
			dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;			
		17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	41,50	47,54
				MI	53,57	
		18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	82,35	71,50
				MI	54,76	
				SMP	86,67	
				MTs	62,22	
		19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan	89,73	88,01
				SD	97,06	
				MI	90,48	
				SMP	91,67	
				MTs	71,11	
		20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar	80,72	96,14
			Kelas I - II : 18 jam per minggu	SD	100,00	
			Kelas III : 24 jam per minggu	MI	100,00	
			Kelas IV – VI : 27 jam per minggu	SMP	100,00	
			Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	MTs	100,00	
		21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD	100,00	100,00
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
		22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD	100,00	100,00
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
		23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	98,62	97,76
				SD	98,69	
				MI	97,62	
				SMP	98,33	

				MTs	95,56	
		24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD	100,00	
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
		25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD	100,00	100,00
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
		26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)	100,00	100,00
				SD	100,00	
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
		PROSENTASE KETERCAPAIAN				

B. Urusan Kesehatan
1) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Berdasarkan Tabel berikut dapat diketahui bahwa rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2018 hingga 2022 cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2018 berada pada poin 8,58 dan menurun sedikit pada Tahun 2019 ke poin 8,50 dan 8,42 pada Tahun 2020. Selanjutnya sampai pada Tahun 2022 berada pada poin 8,13.

Gambar 2.20 Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

2) Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk
Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu pada rentang waktu Tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang menurun. Bertambahnya jumlah penduduk namun tidak diimbangi dengan penambahan penyediaan fasilitas

kesehatan tersebut sehingga dapat berdampak terhadap menimbulkan penurunan tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tabel 2.25 dibawah ini pada Tahun 2018 rasio fasilitas kesehatan berada pada angka perbandingan 1:884 yang kemudian meningkat menjadi 1:978 pada Tahun 2022, sehingga penambahan puskesmas/poliklinik/pustu menjadi keharusan dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Tabel 2.24 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Rasio
2018	440.192	498	1 : 884
2019	444.380	498	1 : 892
2020	477.470	498	1 : 959
2021	481.710	498	1 : 967
2022	487.150	498	1 : 978

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

3) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Sampai dengan Tahun 2018, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Pesawaran yang dihitung berdasarkan *bed to population* sebesar 1:2.651 penduduk dan meningkat menjadi 1:2.934 pada Tahun 2022 (Tabel 2.26). Jika dibandingkan dengan rasio ideal rumah sakit, yakni 1:100.000 penduduk atau dengan berdasarkan *bed to population* sebesar 1:1.000, maka ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Pesawaran masuk dalam kategori belum mencukupi.

Tabel 2.25 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit	Rasio
2018	440.192	166	1 : 2.651
2019	444.380	166	1 : 2.676
2020	477.470	166	1 : 2.876
2021	481.710	166	1 : 2.901
2022	487.150	166	1 : 2.934

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

4) Rasio Tenaga Kesehatan

Berdasarkan Tabel dibawah ini, rasio tenaga kesehatan dan dokter secara umum masih belum ideal terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2018 rasio dokter yaitu 1 dokter melayani 8.465 penduduk yang mana rasio ini semakin bertambah pada Tahun 2022 hingga mencapai 1 dokter untuk 9.192 penduduk. Adapun untuk rasio tenaga kesehatan perkembangannya berfluktuasi dimana pada Tahun 2018, 1 tenaga kesehatan melayani 446 penduduk dan pada akhir periode berada pada rasio 1 berbanding 393. Oleh karena itu perlunya penambahan jumlah dokter dan tenaga medis sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada penduduk dengan harapan dapat mencapai kondisi ideal rasio 1 dokter melayani 1.000 penduduk.

Tabel 2.26 Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

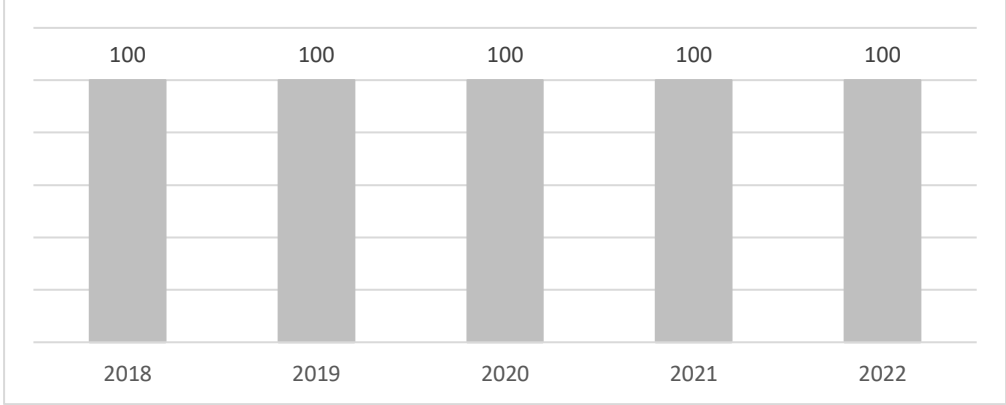
Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Dokter	52	52	52	59	53
Jumlah Tenaga Kesehatan	987	1137	1193	1.193	1.238
Jumlah Penduduk	440.192	444.380	477.470	481.708	487.150
Rasio Dokter per Satuan Penduduk	1 : 8.465	1 : 8.546	1 : 9.182	1 : 8.165	1 : 9.192
Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk	1 : 446	1 : 391	1 : 400	1 : 404	1 : 393

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2021

5) **Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani**

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Pesawaran dari periode Tahun 2018-2022 sudah mencapai 100%, yang artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan sudah tertangani seluruhnya (Gambar berikut). Pencapaian interwujud karena sudah tercukupinya tenaga kebidanan dan dengan demikian capaian tersebut telah melampaui SPM.

Gambar 2.21 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2018-2022

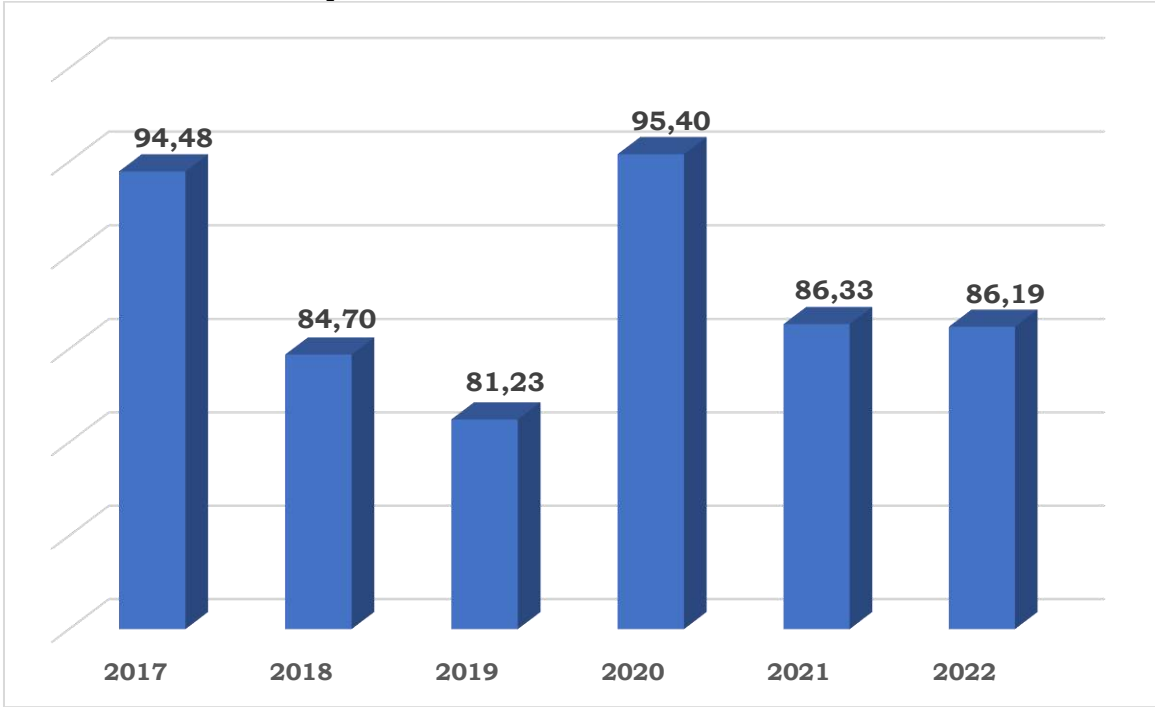


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

6) **Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Pesawaran dari periode Tahun 2017 berfluktuasi. Tercatat pada tahun 2022 telah mencapai 86,19% (Gambar berikut), artinya bahwa proses persalinan sudah seluruhnya ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan sudah melampaui SPM.

Gambar 2.22 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2017-2022

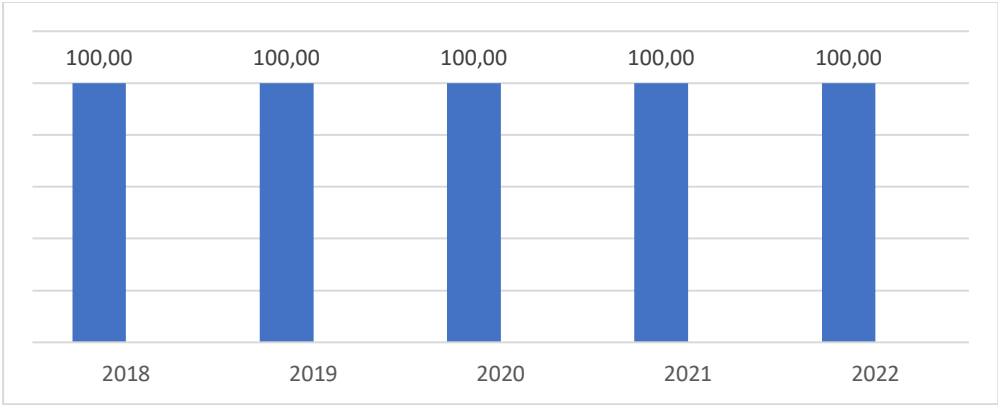


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

7) **Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2018-2022 telah terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal 100%. Oleh karena itu pencapaian ini perlu dipertahankan sehingga seluruh bayi pada setiap desa mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam kurun waktu satu tahun.

Gambar 2.23 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

8) Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Perkembangan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Pesawaran selama periode 2017-2022 sudah mencapai 100% (Tabel 2.28). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus balita gizi buruk di Tahun 2017-2022 telah tertangani seluruhnya dan telah mencapai SPM Kementerian Kesehatan (100%).

Tabel 2.27 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100
Standar Minimal	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, 2023

9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Berdasarkan Tabel 2.29 dibawah ini, perkembangan kasus penyakit DBD berfluktuasi setiap tahunnya, pada Tahun 2017 terdapat 190 kasus dan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan tertinggi menjadi 644 kasus dan menurun ke 372 kasus pada Tahun 2020 dan 2021 dan kembali meningkat menjadi 432 kasus pada Tahun 2022. Hal tersebut disebabkan terjadinya curah hujan yang lebih tinggi pada Tahun 2019 namun dapat ditangani dengan baik dari periode 2017 sampai 2022.

Tabel 2.28 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2017-2022

Indikator	2017	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
Jumlah Kasus	190	209	644	372	372	432

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

10) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Menurut SPM Kementerian Kesehatan, target cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin ditetapkan sebesar 100%. Jika melihat angka pada tabel di bawah maka terlihat bahwa sampai ada Tahun 2022 Kabupaten Pesawaran sudah seluruhnya memberikan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Tabel 2.29 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100
Standar Minimal	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

11) Angka Kejadian Malaria dan Tingkat Kematian

Kasus penyakit malaria dalam rentang waktu Tahun 2017-2022 jumlahnya berfluktuasi dari Tahun awal sebanyak 251 kasus per 100.000 penduduk menjadi 87 kasus per 100.000 pada Tahun 2022. Banyaknya jumlah kasus malaria tersebut masih dapat diimbangi dengan penanganan yang baik oleh pelayanan kesehatan sehingga tidak terdapat kasus kematian akibat kejadian malaria.

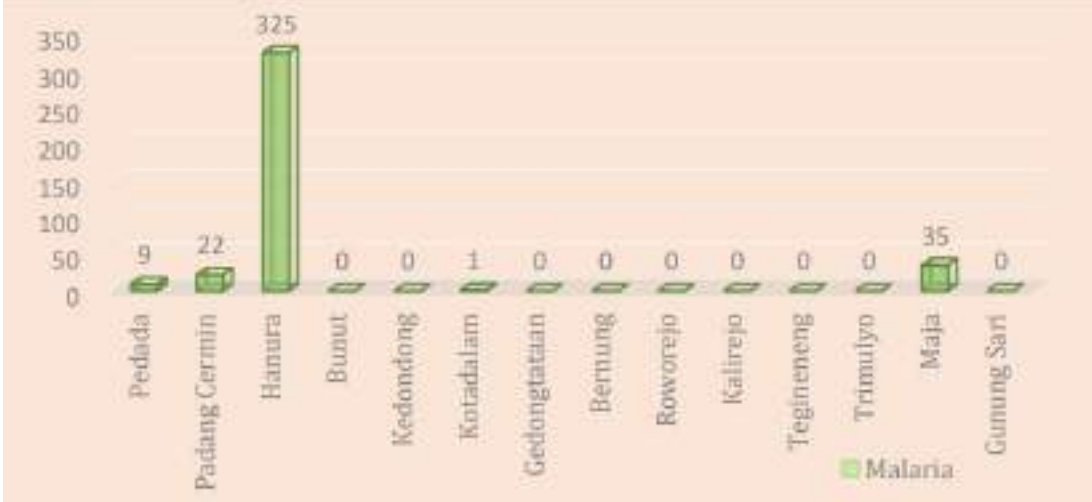
Tabel 2.30 Angka Kejadian Malaria dan Tingkat Kematian Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penderita Malaria	1.096	1.553	876	301	392	427
Penderita Malaria terhadap Jumlah Penduduk per 100.001	251,48	352,80	197,13	63.04	81,38	87,65
Jumlah Kematian Akibat Malaria terhadap Jumlah Penduduk per 1.000	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

Lebih lanjut jumlah kasus malaria berdasarkan wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.24 Jumlah Kasus Malaria di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi kasus penyakit malaria di 5 wilayah kerja puskesmas. Adapun kelima wilayah kerja puskesmas tersebut adalah Puskesmas Pedada dengan 9 kasus, Padang Cermin 22 kasus, Hanura tertinggi dengan jumlah 325 kasus, Kota Dalam dengan 1 kasus, dan Maja dengan 35 kasus. Adapun wilayah kerja Puskesmas Kota Dalam sebenarnya bukan merupakan wilayah endemik malaria. Namun, melihat gambaran wilayah Kota Dalam yang berbatasan langsung dengan wilayah Padang Cermin, maka sangat memungkinkan kejadian kasus tersebut terjadi akibat adanya kunjungan masyarakat dari wilayah non endemik malaria ke wilayah endemik malaria.

12) Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan kesehatan ibu adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu agar mampu melahirkan generasi sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Upaya kesehatan ibu meliputi kegiatan peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu yaitu dengan melihat angka kematian ibu (AKI). AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Upaya pemeliharaan kesehatan pada Ibu dan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Upaya pemeliharaan kesehatan anak ini ditunjukan untuk mempersiapkan generasi

akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya kesehatan anak diharapkan mampu menurunkan angka kematian yang terjadi pada anak. Indikator angka kematian yang berhubungan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Sebagai gambaran Kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pesawaran kurun waktu 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31 Angka Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2017-2022

NO	TAHUN	AKB	AKI	AKABA
1.	2017	1,67	5	1,8
2.	2018	0,99	4	0,99
3.	2019	0,93	5	0,93
4.	2020	0,53	2	0
5.	2021	1,20	3	0
6.	2022	1,11	3	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

13) Cakupan Pelayanan dan Penanganan Penyakit Tuberkulosis Bakteri Tahan Asam (TBC BTA)

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. TBC pada umumnya menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Penularan penyakit TBC terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup udara yang mengandung kuman Mycobacterium Tuberculosis. Kasus penyakit Tuberkulosis BTA dalam rentang waktu Tahun 2017-2022 jumlahnya bertambah dari Tahun awal sebanyak 671 kasus menjadi 483 kasus pada Tahun 2022 dan sempat mengalami lonjakan tinggi pada Tahun 2018 sebanyak 1.173 kasus. Dari sekian banyaknya kasus tersebut perkembangan penanganan kesehatan setiap tahunnya cendeung mengalami peningkatan meskipun belum secara maksimal sehingga diperlukan upaya penanganan lebih lanjut agar seluruh penderita penyakit TBC BTA dapat tertangani dengan baik.

Tabel 2.32 Cakupan Pelayanan dan Penanganan Penyakit TBC BTA Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penderita yang Tertangani	455	490	544	372	250	245
Jumlah Penderita Seluruhnya	671	1.173	719	774	512	483
Cakupan Penanganan	67,81	41,77	75,66	48,06	48,83	50,72

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

Lebih lanjut distribusi jumlah penderita TB Paru BTA+ berdasarkan wilayah kerja Puskesmas adalah sebagai berikut:

Gambar 2.25 Distribusi Kasus Tuberculosis Berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus Tuberkulosis di Kabupaten Pesawaran berjumlah sebanyak 250 kasus. Kasus tertinggi berada di wilayah kerja Puskesmas Kedondong dengan jumlah 69 kasus. Sedangkan, jumlah kasus terendah berasal dari wilayah kerja puskesmas Pedada dan Maja dengan jumlah masing-masing sebanyak 6 kasus.

Pada kasus TBC salah satu indikator yang sangat penting untuk dilihat yaitu angka kesembuhan penderita kasus TBC (Cure Rate). Cure Rate adalah sebutan untuk pasien yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaan apusan dahak ulang (follow up) dengan hasil negatif pada akhir pengobatan dan pada satu pemeriksaaan sebelumnya.

Berikut ini merupakan gambaran cakupan angka Cure Rate dan Succer Rate (SR) penderita kasus TBC di Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021:

Gambar 2.26 Cakupan Cure Rate dan Success Rate (SR) Penderita Kasus TBC di Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021

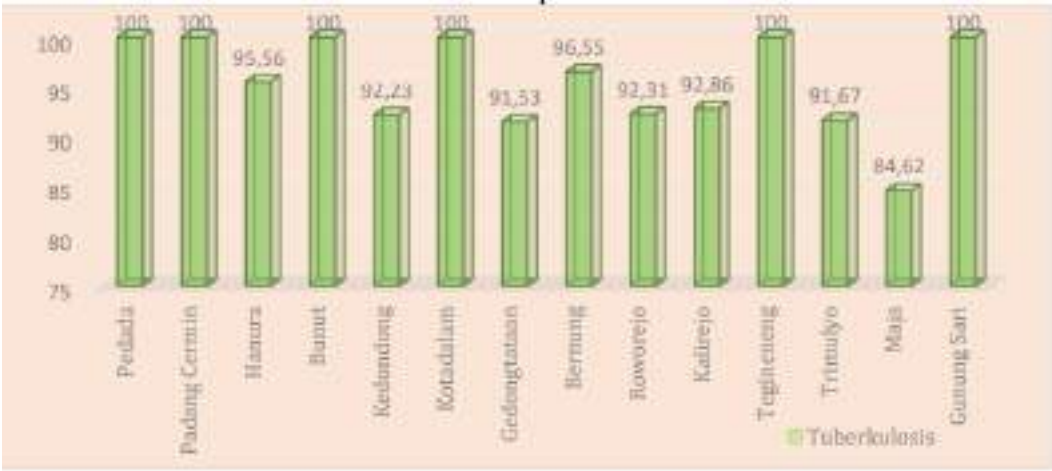


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

Berdasarkan Gambar diatas dapat diketahui bahwa cakupan cure Rate dan Success Rate di Kabupaten Pesawaran Tahun 2015-2021 memiliki nilai yang berfluktuatif. Adapun angka kesembuhan (Cure Rate) di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 adalah 82,1. Angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka Cure Rate sebesar 94,9%. Sedangkan untuk nilai Success Rate di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 mengalami angka

kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 93,2% menjadi 95,12%. Berikut ini rincian jumlah persentase keberhasilan pengobatan Kasus TB berdasarkan wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021:

Gambar 2.27 Persentase Keberhasilan Pengobatan Kasus TB (Success Rate) Berdasarkan Puskesmas di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

Berdasarkan Gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 6 wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Pesawaran memiliki nilai Success Rate sebesar 100% yaitu pada Puskesmas Pedada, Padang Cermin, Bunut, Kota Dalam, Tegineneng, dan Gunung Sari. Sedangkan wilayah kerja Puskesmas dengan nilai Success Rate terendah berasal dari wilayah kerja Puskesmas Maja dengan persentase hanya sebesar 84,62%.

14) **Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi**

Penyakit HIV/AIDS disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh sehingga penderitanya mengalami penurunan ketahanan tubuh. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari individu yang terinfeksi, seperti darah, air susu ibu, air mani dan cairan vagina. Penyakit ini ditularkan melalui proses hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum suntik secara bergantian dan penularan dari ibu keanak dalam kandungan melalui plasenta dan kegiatan menyusui. Individu tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari biasa seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi, makanan atau air. Pada dasarnya kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es yaitu jumlah penderita yang dilaporkan jauh lebih kecil dari pada kenyataan di lapangan. Hal ini terjadi mengingat penderita HIV tidak dapat terdeteksi sejak dini hingga beberapa tahun kemudian. Namun dengan semakin giatnya usaha petugas dalam penemuan kasus HIV/AIDS maka semakin banyak pula kasus yang ditemukan sehingga semakin tinggi pula upaya dalam pengendaliannya. Tren jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Pesawaran pada rentang waktu Tahun 2017-2022 tumbuh dengan lambat dari 12 kasus pada Tahun 2017 kemudian naik menjadi 21 pada Tahun 2019 dan menurun menjadi 18 kasus pada Tahun 2022.

Tabel 2.33 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Tahun 2017-2022

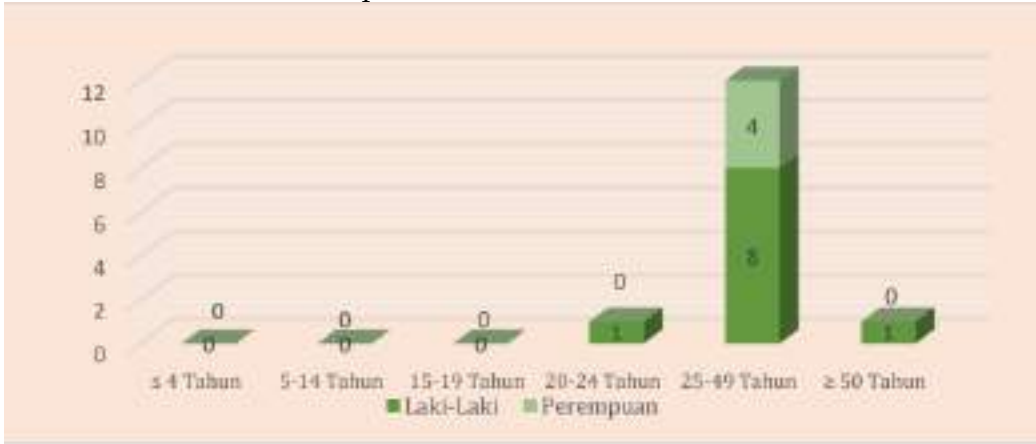
Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pasien HIV/AIDS	12	12	21	9	14	18
Jumlah Penduduk	435.827	440.192	444.380	477.470	481.710	487.153
Prevalensi HIV/AIDS (%)	0,0028	0,0027	0,0047	0,0019	0,0029	0,003695

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

Lebih lanjut jika melihat gambaran jumlah penderita kasus HIV berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa dapat diketahui bahwa jumlah kasus HIV tertinggi terdapat pada

kelompok umur 25-49 tahun dengan jumlah 12 kasus, terdiri dari 8 kasus penderita berjenis kelamin laki-laki dan 4 kasus lainnya diderita orang perempuan.

Gambar 2.28 Distribusi Kasus HIV Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui pelayanan kesehatan telah melakukan upaya untuk mencegah perkembangan penyakit HIV/AIDS melalui sosialisasi, publikasi, dan seminar wawasan terhadap penduduk yang berusia 15-24 tahun. Dari populasi penduduk tersebut persentase yang mengetahui komprehensi tentang HIV/AIDS disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.34 Persentase Penduduk Usia 15-24 yang Mengetahui Komprehensif tentang HIV/AIDS Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi Penduduk usia 15-24 tahun	76,04	77,03	78,50	79,80	80,75	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

15) Percepatan Penanggulangan dan Penurunan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Penyebab stunting antara lain, praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk pelayanan ANC (Ante natal care), Post natal dan pembelajaran dini yang kurang berkualitas, kurangnya akses ke air bersih dan Sanitasi.

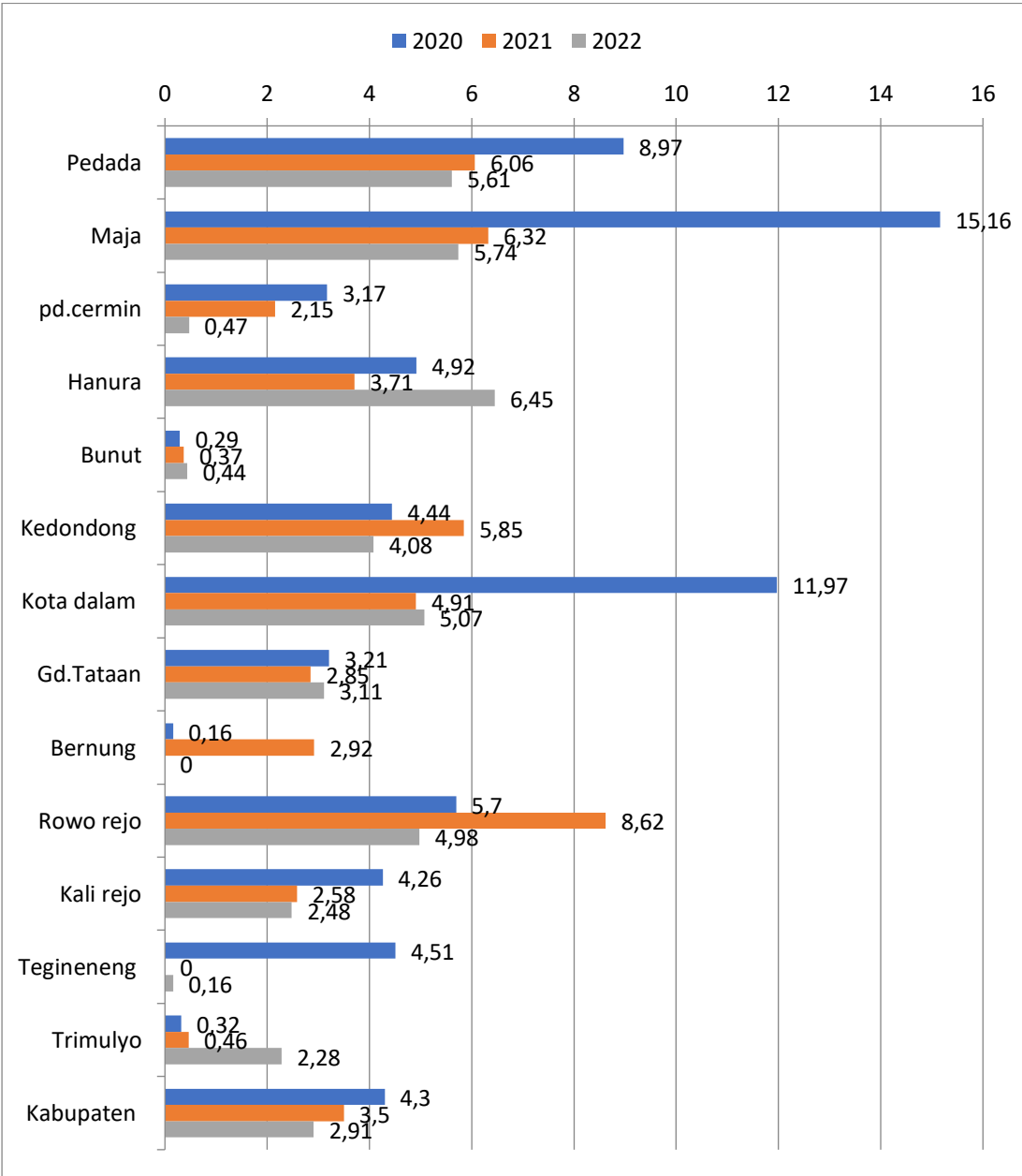
Upaya penurunan stunting dilaksanakan melalui Intervensi Gizi Spesifik seperti intervensi dengan sasaran ibu hamil, intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan serta intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan serta intervensi Gizi Sensitif seperti menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi, melakukan fortifikasi bahan pangan, menyediakan akses kepada pelayanan kesehatan dan KB, JKN, Jampersal, Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua dan PAUD Universal, Pendidikan Gizi masyarakat, edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta Gizi pada Remaja, menyediakan bantuan dan jamsos bagi keluarga miskin serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah membentuk tim percepatan penurunan stunting Tingkat Kabupaten yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor

195/IV.07/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu juga dibentuk TPPS tingkat Kecamatan dan Desa. Saat ini di Kabupaten Pesawaran telah terbentuk 256 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan 768 kader yang terdiri dari bidan, Tim Penggerak PKK dan kader institusi masyarakat pedesaan.

Stunting di Kabupaten Pesawaran terus mengalami penurunan. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan Prevalensi stunting dari tahun ketahun, yaitu Tahun 2017 sebesar 35,20% (Riskesdas); Tahun 2018 : 27,49% (Riskesdas); Tahun 2019: 26,80 (SSGBI) Tahun 2021: 17,60% (SSGI); namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 7,5% menjadi 25,1% (SSGI). Hal ini berbeda dengan hasil penghitungan EPPGBM yang dilakukan oleh Puskesmas, pada pengukuran EPPGBM data hasil pengukuran diinput kedalam aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang di entry oleh petugas gizi puskesmas, dan apabila ada data yang bermasalah gizi dikonfirmasi dan divalidasi oleh petugas puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Gambar 2.29 Grafik Perkembangan Persentase Prevalensi Stunting
Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

Dari grafik terlihat bahwa terjadi Penurunan prevalensi balita stunting sebesar 0,8% dari 4,3 % di Tahun 2020 menjadi 3,5 % di Tahun 2021. Penurunan prevalensi balita stunting di tahun 2021 belum bisa menggambarkan prevalensi stunting yang sesungguhnya, hal ini dikarenakan cakupan balita yang diukur dibandingkan sasaran di tahun 2021 hanya 85,43 % sedangkan untuk tahun 2020 cakupan balita yang

diukur adalah sebesar 98,94 % , yaitu 31.209 balita yang diukur dari 31544 sasaran yang tercatat di ePPGBM. Turunnya cakupan balita yang diukur dari tahun 2020 ke tahun 2021 juga menunjukkan masih rendahnya kualitas status gizi yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pesawaran.

Sebaran prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Pesawaran didapatkan dari data EPPGBM yang telah divalidasi dan telah dianalisis pertahun. Berikut hasil sebaran prevalensi stunting Kabupaten Pesawaran Tahun 2020, 2021 dan 2022.

Tabel 2.35 Jumlah Kasus Stunting per Kecamatan Tahun 2020-2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Pedada	Pedada	99	66	50
2	Marga Punduh	Maja	158	55	38
3	Padang Cermin	Padang Cermin	58	31	5
4	Way Ratai	Bunut	9	9	9
5	Kedondong	Kedondong	194	215	92
6	Way Lima	Kota Dalam	286	101	96
7	Teluk Pandan	Hanura	127	82	126
8	Gedong Tataan	Gedong Tataan	111	83	70
9		Bernung	6	104	0
10	Negeri Katon	Kalirejo	93	52	46
11		Roworejo	118	131	51
12	Tegineneng	Tegineneng	59	0	1
13		Trimulyo	6	8	28
Kabupaten			1.324	937	620

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

16) Capaian SPM Kesehatan

Capaian SPM Bidang Kesehatan, Analisa capaian, dan subkegiatan pendukung serta pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.36 Capaian SPM Kesehatan

NO	SPM	TARGET	CAPAIAN	ALASAN TIDAK TERCAPAI	ANGGARAN		
					SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.860	8.517	Rendahnya pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu sebesar 86,38% dikarenakan masih terdapat ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan ke yankes lain dan tidak tercover puskesmas, permasalahan ini salah satunya disebabkan oleh tempat tinggal yang letaknya jauh dari puskesmas.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	167.959.000	167.959.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.412	8.112	Rendahnya pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu sebesar 86,19 % dikarenakan masih terdapat akseptor yang takut menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang seperti implant dan IUD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	368.700.000	368.700.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.964	8.112	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	72.858.000	72.858.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	57.289	51.915	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	118.602.000	118.602.000
5	Pelayanan Kesehatan Usia	102.370	95.650	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	120.001.000	120.001.000

NO	SPM	TARGET	CAPAIAN	ALASAN TIDAK TERCAPAI	ANGGARAN		
					SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI
	Pendidikan Dasar				Pada Usia Pendidikan Dasar		
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	289.999	93.182	Rendahnya pelayanan kesehatan pada usia produktif yaitu sebesar 32,13 % dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat usia produktif untuk memeriksakan kesehatannya di puskesmas serta kurangnya sosialisasi kegiatan deteksi dini PTM usia produktif (15 sd 59 thn) di masyarakat sampai dengan tingkat desa dan dusun baik oleh tenaga kesehatan maupun oleh aparat desa, selain itu belum adanya media KIE dan kurangnya persediaan BHP gula darah di puskesmas menyebabkan pelayanan kesehatan pada masyarakat usia produktif menjadi tidak maksimal. Permasalahan lainnya adalah kurangnya koordinasi lintas program, lintas sector dan kurangnya perencanaan di tingkat puskesmas untuk mencari sasaran di masyarakat serta kurangnya anggaran untuk melakukan pertemuan dan monev program secara berkala ke puskesmas.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	129.627.000	129.627.000
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	33.516	31.013	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	75.004.000	75.004.000
8	Pelayanan Kesehatan Hipertensi	95.602	40.713	Rendahnya pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu sebesar 42,59% disebabkan oleh kurangnya alat penunjang dan kurangnya sosialisasi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit Hipertensi di masyarakat. Selain itu pelaksanaan Pandu PTM di Puskesmas yang belum maksimal dengan belum menerapkan algoritma Pandu PTM dan penggunaan Carta PTM dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien Hipertensi di FKTP serta belum optimalnya pelaksanaan monev program secara berkala ke puskesmas dikarenakan kendala anggaran.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	20.000.000	20.000.000
9	Pelayanan Kesehatan Diabetes	3.427	3.376	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	239.193.170	239.193.170

NO	SPM	TARGET	CAPAIAN	ALASAN TIDAK TERCAPAI	ANGGARAN		
					SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ	994	749	Rendahnya pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yaitu sebesar 75,35% dikarenakan masih banyak kasus ODGJ yang tidak rutin atau putus minum obat yang disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah gangguan jiwa disertai kurangnya tenaga kesehatan khusus terlatih Kesehatan Jiwa. Kurangnya perhatian dari keluarga ODGJ juga menyebabkan ODGJ tidak memiliki KTP maupun BPJS serta tidak melaporkan kasus ODGJ ke pihak terkait. Permasalahan lainnya adalah kurangnya dukungan aparat desa dalam upaya keluarga mendapatkan pengobatan pasien dengan gangguan jiwa mengakibatkan lambatnya penanganan kasus ODGJ di Kabupaten Pesawaran.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	63.775.000	63.775.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	5.611	4.156	Rendahnya pelayanan kesehatan orang terduga TB yaitu sebesar 74,07 % dikarenakan penemuan pasien terduga tuberkolosis masih belum maksimal karena penjangkauan hanya dilakukan secara masiv dengan menunggu pasien datang ke puskesmas. Kurangnya koordinasi lintas sector serta koordinasi dengan DPPM (klinik, dokter praktek swasta, bidan praktek mandiri) juga menyebabkan pelayanan kesehatan orang terduga TB menjadi belum maksimal.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	562.150.000	562.150.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	9.589	6.079	Rendahnya pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV yaitu sebesar 63,40% dikarenakan pencapaian skrining HIV pada ibu hamil belum maksimal karena masih dilakukan di puskesmas, bukan di bidan desa, serta belum semua pasien TB melakukan skrining HIV.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	49.400.000	49.400.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
C.1. Urusan Pekerjaan Umum

1) Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan yang menjadi kewenangan kabupaten. Hal ini mengindikasikan semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam

kondisi baik di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan setiap tahunnya (Tabel berikut). Pada Tahun 2018 tercatat 566,22 km, kemudian meningkat menjadi 616,98 km di Tahun 2019 hingga mengalami peningkatan menjadi 665,05 km di Tahun 2021. Dengan demikian pada Tahun 2022 sudah terdapat 61,83% jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pesawaran dari total panjang jalan sebesar 918,96 km.

Tabel 2.37 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Seluruhnya	918,96	918,96	918,96	918,96	918,96
Panjang Jalan Kondisi Baik	566,22	616,98	601,35	665,05	568,20
Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik (>40 km per jam)	61,62	67,14	65,44	72,37	61,83

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2021

2) Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk per 10.000 jiwa

Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk adalah rasio panjang jalan per 10.000 jiwa yang menggambarkan bahwa ruas-ruas jalan telah menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang melayani jumlah penduduk di wilayah tertentu. Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 rasio panjang jalan per 10.000 jiwa di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren penurunan. Pada Tahun 2018 tercatat sebesar 20,88 km/10.000 jiwa, dan mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi 18,86 km/10.000 jiwa (Tabel berikut).

Tabel 2.38 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk per 10.000 jiwa Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Seluruhnya	918,96	918,96	918,96	918,96	918,96
Jumlah Penduduk	440.192	444.380	477.470	481.708	487.150
Rasio	0,002088	0,002068	0,001925	0,001908	0,001886

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2022

Jika mengacu pada Lampiran II Permen PU Nomor 14 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk kategori wilayah dengan kepadatan penduduk $100 \leq KP < 500$ jiwa/km² (kepadatan penduduk Kabupaten Pesawaran yakni 381,12 km²), maka SPM rasio ideal panjang jalan per 10.000 jiwa adalah 11 km/10.000 jiwa. Mengacu pada tabel diatas rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran telah memenuhi target SPM yaitu mencapai 0,001886 atau 18,86 km /10.000 jiwa.

3) Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, dengan tiga pilar pengelolaan sumberdaya air yang meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Selama Tahun 2018 hingga 2022 persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2018 tercatat 33,80%, kemudian selama empat tahun meningkat menjadi 67,50% di Tahun 2022. Meskipun secara tren meningkat perlu terus diupayakan agar persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Selain itu rasio jaringan irigasi juga mengalami peningkatan pada Tahun 2020 menjadi 75% dari semula 69,00% di Tahun 2018. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan kuantitas

irigasi di Kabupaten Pesawaran minimal dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk menunjang produktifitas pertanian yang lebih baik.

Tabel 2.39 Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (persen ha)	33,80	38,80	48,80	61,30	67,50
Rasio Jaringan Irigasi (persen panjang)	69,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2022

C.2. Urusan Penataan Ruang

1) Persentase Ruang Terbuka Hijau dari Luas Wilayah Kota

Dalam perspektif tata ruang kota, untuk meminimalkan timbulnya fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain. RTH sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air dan udara bersih bagi masyarakat serta menciptakan estetika kota. Luas RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota yang terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%.

Tabel 2.40 Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pesawaran

No	Nama RTH	Luas (m ²)
1	Taman Jejama Sidototo	10.000
2	Taman Andan Jejama	15.000
3	Tugu Pengantin	2.500
4	Taman Komplek Pemda	50.000
5	Taman Kantor DPRD	1.000
6	Taman RSUD Pesawaran	1.000
7	Taman Tugu Perbatasan	1.000
8	Taman Tugu Juang	1.000
9	Taman Tugu Cokelat	100
10	Taman Desa Negeri Sakti	100
11	Taman Desa Sukaraja	5.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2022

2) Persentase Bangunan yang Memiliki IMB

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang dikeluarkan untuk keperluan rencana pembangunan bangunan baru, rehabilitasi, dan revonasi. IMB dikeluarkan atas dasar kesesuaian pemanfaatan ruang dan pertimbangan terhadap keamanan dan keselamatan penghuni bangunan tersebut. Dalam rentang waktu Tahun 2016 sampai 2020 persentase bangunan yang memiliki IMB di Kabupaten Pesawaran masih rendah. Oleh karena itu perlunya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat perlunya mengurus IMB sebagai dokumen penting dalam pembangunan rumah dan prasyarat untuk mengurus pajak bumi bangunan.

Tabel 2.41 Persentase Bangunan yang Memiliki IMB Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bangunan ber IMB	405	506	618	778	1.187
Jumlah Bangunan	111.398	113.529	115.700	114.145	114.145
Persentase	0,36	0,45	0,53	0,68	1,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2021

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.42 Capaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Ket.
I	Sumber	Prioritas Utama penyediaan Air	1 Tersedianya air baku untuk memenuhi	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar			Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Ket.	
				Indikator	Realisasi			
	Daya Air	untuk kebutuhan masyarakat			kebutuhan pokok minimal sehari hari.			
				2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	72,57 %	2021	Dinas yg membidangi Pekerjaan Umum
II	Jalan	Jaringan	Akses-bilitas	3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	-	-	-
			Mobilitas	4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakuk an perjalanan.	-	-	-
			Kesela-matan	5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	-	-	-
		Ruas	Kondisi Jalan	6	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	72,37 %	2021	Dinas yg membidangi Pekerjaan Umum
			Kecepatan	7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	-	-	-
III	Air minum	Cluster Pelayanan		8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari			
		Sangat buruk				-	-	-
		Buruk				-	-	-
		Sedang				-	-	-
		Baik				-	-	-
		Sangat Baik				-	-	-
IV	Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	Air Limbah Permukiman		9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	-	-	-
		Pengelolaan Sampah		10	Tersedianya system air limbah skala komunitas/kawasan/kota	-	-	-
				11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	-	-	-
		Drainase		13	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	-	-	-
V	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan			14	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan			
VI	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan		15	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	83,94 %	2021	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)		16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota	90,80 %	2021	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
VII	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)		17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	99,87 %	2021	Unit yang melakukan

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	Ket.
			Indikator	Realisasi			
							Pembinaan Jasa konstruksi
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100 %	2021	Unit yang melakukan Pembinaan Jasa konstruksi
VIII	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	19	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	98,64 %	2021	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang
		Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	20	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	52,98 %	2021	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang

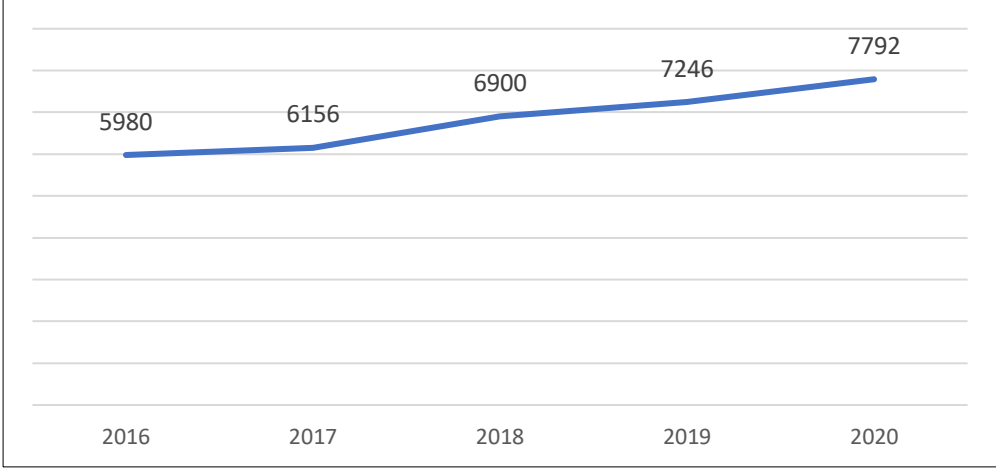
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Berdasarkan Grafik berikut di bawah ini pada Tahun 2016 jumlah sambungan rumah pengguna air bersih mencapai 5980 dan meningkat menjadi 7.792 sambuan rumah pada Tahun 2020.

Gambar 2.30 Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2016-2020

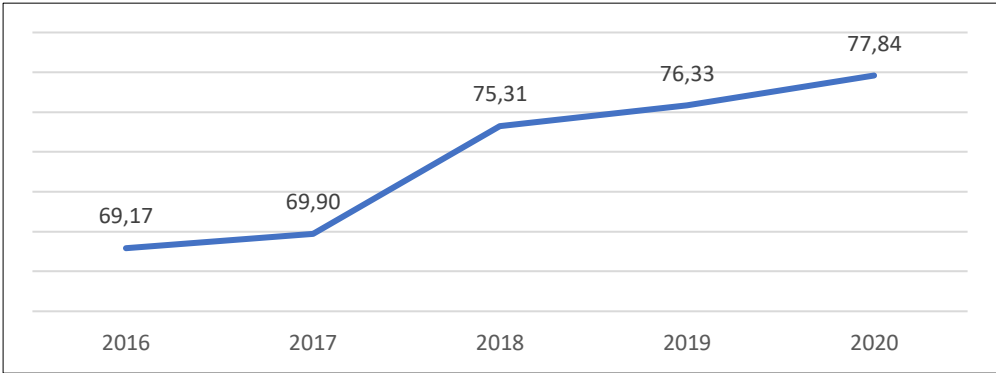


Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 2021

2) Rumah Tangga Bersanitasi

Target Nasional Tahun 2019 menetapkan bahwa pada akhir Tahun 2019 rumah tangga yang memiliki sanitasi mencapai 100%. Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat kita ketahui bahwa rumah tangga yang memiliki sanitasi di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2016-2020 belum mencapai target 100% namun sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik namun belum mencapai target. Padal Tahun 2016 terjadi akses sanitasi pada rumah tanggal berada pada angka 69,17% dan meningkat pada akhir Tahun 2020 menjadi 77,84% rumah tangga yang berakses terhadap sanitasi.

Gambar 2.31 Grafik Rumah Bersanitasi Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2021

3) **Lingkungan Permukiman Kumuh**

Perkembangan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Pesawaran sampai dengan Tahun 2020 sudah mencapai luas 1.064,1 hektar. Upaya penanganan kawasan permukiman kumuh sebagai bentuk pelayanan pemerintah untuk menyehatkan masyarakat agar dapat menurunkan tingkat resiko penyakit dan penyehatan lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan. Namun dari sisi jumlah dan persentase rumah tangga yang tinggal dipermukiman kumuh meningkat cukup besar dari periode 2016 hingga 2020 menjadi 3.966 rumah tangga kumuh atau sekitar 17,47 persen.

Tabel 2.43 Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Penanganan Permukiman Kumuh (ha)	249,79	64,35	199,54	271,58	278,84
Jumlah Rumah Tangga Kumuh	778	789	862	3.169	3.966
Jumlah Keseleruhan Rumah Tangga	16.143	17.937	19.929	22.144	24.144
Proporsi Rumah Tangga Kumuh	4,82	4,4	4,33	14,31	17,47

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pesawaran 2021

4) **Cakupan Rumah Layak Huni**

Cakupan rumah layak huni dihitung berdasarkan ketersediaan rumah layak huni dan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Cakupan ketersediaan rumah layak huni dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara jumlah seluruh rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah, sedangkan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dihitung berdasarkan persentase perbandingan rumah tangga MBR yang menghuni rumah layak terhadap jumlah rumah tangga MBR.

Cakupan rumah layak huni di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2021 tercatat 96,7% sedangkan cakupan MBR yang menguni rumah layak telah mencapai 51,7% perlu ditingkatkan kembali agar MBR juga memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak. Jika dibandingkan dengan SPM Kementerian Perumahan Rakyat tentang rasio rumah layak huni, yakni sebesar 70%, maka capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten Pesawaran telah mencapai target.

Tabel 2.44 Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	96,64	94,51	92,95	95,40	96,7
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	52,55	50,76	49,86	49,86	51,7

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pesawaran 2021

5) **Rumah Tangga Pengguna Listrik**

Berdasarkan data Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2022, pada Tahun 2021 masih terdapat 406 rumah tangga yang belum menggunakan listrik dari PLN. Sebagian

besar rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik PLN di Kecamatan Padang Cermin dan Teluk Pandan dengan jumlah masing-masing 203 dan 74 rumah tangga.

Tabel 2.45 Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Listrik PLN	127.033	129.407	133.764
Listrik Bukan PLN	1.378	902	381
Bukan Pengguna Listrik	1.353	675	406

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2022

6) Capaian SPM Bidang Perumahan

Berikut disajikan data capaian SPM Bidang Perumahan

Tabel 2.46 Capaian SPM Perumahan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai	
1	Rumah layak huni dan terjangkau	a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96,7%	2021
		b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	51,7%	2021
2	Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	c. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	95,36%	2021

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pesawaran 2021

E. Urusan Pertanahan

1) Lahan Bersertifikat

Perkembangan lahan bersertifikat dari Tahun 2017-2022 menunjukkan tren yang baik dari semula Tahun 2017 lahan bersertifikat berjumlah 28.045.421 dan terus meningkat menjadi 38.465.400 pada Tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 23.300.995, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 60.007.707 dan pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 14.537.570. Pencapaian ini perlu ditingkatkan kembali dengan harapan seluruh bidang tanah dapat tersertifikasi sehingga kepemilikan lahan di Kabupaten Pesawaran dapat terdata dengan baik.

Tabel 2.47 Lahan Bersertifikat Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lahan Bersertifikat	28.045.421	38.183.896	38.465.400	23.300.995	60.007.707	14.537.570
Jumlah Bidang Lahan Seluruhnya	1.021.216.221	1.021.216.221	1.021.216.221	1.021.216.221	1.021.216.221	1.021.216.221
Persentase	2,75	3,74	3,77	2,28	5,88	1,42

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran, 2023

2) Kasus Pertanahan

Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah) di Kabupaten Pesawaran sejak 5 (lima) tahun terakhir yang mengemuka adalah dampak dari pembangunan mega proyek Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar dan penyelesaian perbatasan dengan Kabupaten/Kota berbatasan (Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pringsewu) serta sebagian lagi merupakan konflik horisontal (antar pemilik lahan). Sejak tahun 2016-2020 jumlah penyelesaian kasus pertanahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebanyak 17 kasus.

3) Izin Lokasi

Proses penerbitan Izin Lokasi dilaksanakan secara kolektif dengan SKPD terkait, yang *leading* sektornya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya yang mengurus Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan verifikasi dan

evaluasi terhadap izin lokasi di Kabupaten Peswaran yang pelaksanaannya targetnya selalu mencapai 100% dalam kurung lima tahun terakhir dari Tahun 2017 hingga 2021.

F. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dengan mengacu pada Tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa cakupan petugas perlindungan masyarakat pada Tahun 2022 tercatat 26,00%, sehingga indikator ini perlu ditingkatkan untuk mencapai perlindungan masyarakat yang lebih luas. Penegakan Perda Kabupaten Pesawaran selama Tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan angka realisasi 100%. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran perda telah ditindaklanjuti. Selanjutnya indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentrman, keindahan) di Kabupaten Pesawaran selama Tahun 2017-2022 mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran K3 telah diselesaikan. Sementara itu untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten selama Tahun 2017 hingga 2022 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 15,00%. Sementara itu sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2022 waktu tanggap di Kabupaten Pesawaran telah mencapai 100%. Secara numerik penjelasan lebih lanjut mengenai data kinerja urusan ketentrman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.48 Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	25,73	25,73	25,73	25,73	26,00	26,00
Penegakan Perda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentrman, Keindahan) %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%)	100,00	80,00	96,43	100,00	100,00	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Pesawaran 2023

G. Urusan Sosial

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial dan perlindungan Sosial. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Pada tahun 2017 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 16,54% dan terus mengalami peningkatan sampai pada Tahun 2022 menjadi 92,31%. Perkembangan bantuan sosial tersebut perlu ditingkatkan lagi pada periode berikutnya agar dapat meningkatkan kelayakan hidup PMKS di Kabupaten Pesawaran. Sementara itu pada indikator lainnya yaitu persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan korban yang dievakuasi menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap sudah terlayani 100%

dengan baik selama periode Tahun 2017-2022. Pencapaian ini perlu ditingkatkan kedepannya sebagai bentuk tanggap darurat pasca bencana.

Tabel 2.49 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	16,54	51,84	51,81	65,58	65,58	92,31
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial Pesawaran 2023

Capaian SPM Bidang Sosial

Berikut disajikan data capaian SPM pada Bidang Urusan Sosial

Tabel 2.50 Capaian SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai Capaian (%)	
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial a. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kab/kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	2022
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100%	2022
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial	Persentase (%) panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	2022
	a. Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial			
	b. Penyediaan sarana pelayanan luar panti	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	2022
3	Penanggulangan korban bencana	Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	2022
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana kab/kota			
	b. Evakuasi korban bencana	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana	100%	2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai Capaian (%)	
		prasarana tanggap darurat lengkap		
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	80,36%	2022
	a. Penyelenggaraan jaminan sosial			

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, 2023

H. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi sub urusan (1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil); (2) sub urusan penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan izin LPTKS, perlindungan TKI); dan (3) sub urusan hubungan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial). Berdasarkan kewenangan tersebut, dapat diukur realisasi kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Pesawaran yang mencakup indikator-indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.51 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2022

No	Indikator (dalam persen)	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sengketa pengusaha pekerja per tahun	11,67	10,00	10,00	5,00	5,00	0,00
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	14,55	14,55	18,18	31,82	50,00	0,00
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	4,55	4,55	4,55	9,09	10,00	0,00
4	Keselamatan dan perlindungan	20,00	20,00	25,00	55,00	80,00	82,00
5	Besaran pekerja/baruh yang menjadi peserta program Jamsostek	23,48	28,70	29,57	41,74	50,00	52,00
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	14,29	14,29	19,05	33,33	50,00	0,00
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18,18	18,18	23,64	52,73	60,00	80,00
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	23,81	28,57	28,57	42,86	50,00	0,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pesawaran 2023

Indikator angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun menunjukkan tren penurunan, pada Tahun 2017-2022 mengalami penurunan masing-masing dari 11,67% di Tahun 2017 menjadi 0,00% di Tahun 2022. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa sosialisasi kepada pengusaha maupun pekerja tentang pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing telah berhasil mengurangi angka sengketa pengusaha-pekerja. Selanjutnya untuk indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama secara tren mengalami peningkatan, pada Tahun 2017 sebanyak 14,55% yang kemudian meningkat menjadi 50,00 % di Tahun 2021 dan sebaliknya mengalami penurunan drastis menjadi 0,00% di Tahun 2022. Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan mengalami peningkatan selama Tahun 2017-2021. Hal ini disebabkan karena pencari kerja yang telah ditempatkan telah mengembalikan kartu kuning (yang sudah bekerja telah melapor kembali ke Disnaker). Sehingga dalam perspektif kedepan perlu terus dilakukan peningkatan motivasi bekerja, pada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan memberikan motivasi bekerja pada pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan, kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja untuk megalang kembali kartu kuning.

Selanjutnya untuk indikator keselamatan dan perlindungan menunjukkan persentase perusahaan yang telah menerapkan K3 (keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja) masih minim di Kabupaten Pesawaran. Pada Tahun 2022 sudah tercatat 82,00% perusahaan yang menerapkan K3, capaian ini masih sehingga perlu ditingkatkan agar perusahaan yang belum menerapkan K3 dapat segera menerapkan aturan tersebut. Adapun untuk indikator pekerja yang mendapatkan Jamsostek mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017 sebanyak 23,48% pekerja menerima Jamsostek dan meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 52,00%. Peningkatan pekerja yang menerima Jamsostek masih perlu ditingkatkan lagi kedepannya, agar pekerja mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah.

Indikator perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah menunjukkan angka 14,29% pada Tahun 2017 dan meningkat menjadi 50,00% pada Tahun 2020, kemudian terjadi penurunan yang sangat signifikan yang menunjukkan angka 0,00% pada Tahun 2022. Hal ini bermakna bahwa kasus perselisihan buruh dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah daerah dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berupa pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan berbasis kewirausahaan mengalami tren peningkatan pada sepanjang periode Tahun 2017-2022. Pada Tahun 2017 tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan masing-masing berada pada angka 18,18; 5,00; dan 23,81; mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 60,00; 5,00; dan 50,00; dan pada Tahun 2022 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mengalami peningkatan akan tetapi indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan berbasis kewirausahaan mengalami penurunan tajam menjadi masing-masing indikator berada pada angka 80,00; 0,00 dan 0,00. Secara matematis perkembangan tersebut masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi agar tenaga kerja di Kabupaten Pesawaran memiliki kompetensi yang dapat bersaing dalam dunia kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

I. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di dunia kerja pada umumnya dipengaruhi oleh struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Pada Tahun 2018 terdapat 3,71% perempuan yang berpartisipasi di lembaga pemerintah, kemudian menurun menjadi 3,5% di Tahun 2022. Selanjutnya persentase perempuan yang menduduki kursi DPRD juga menurun dari 29,41% ke 26,67%. Sedangkan untuk partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami peningkatan, pada Tahun 2018 sejumlah 34,53% perempuan dan mengalami peningkatan menjadi 44,3% di Tahun 2022. Angka partisipasi tersebut menggambarkan bahwa peluang dan tingkat partisipasi perempuan belum seimbang

antara perempuan dan laki-laki dalam berkarir pada lingkungan pekerjaan, baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta.

Indikator rasio KDRT pada Tahun 2018 masih nol kasus, adapun untuk Tahun 2019-2022 tercatat dibawah 0,01 kasus. Angka tersebut tergolong kecil sehingga mengindikasikan bahwa di Kabupaten Pesawaran tergolong aman terhadap kekerasan rumah tangga. Adapun realisasi indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu telah mencapai angka 100% sepanjang Tahun 2018 hingga 2022. Dalam perspektif kedepan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat desa dan kabupaten perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga diharapkan dapat ditangani secara cepat dan pelaku tindak kekerasan dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022

No	Indikator (dalam persen)	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,71	3,78	3,78	3,5	3,50
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	29,41	32,35	32,35	26,67	26,67
3	Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	34,53	34,19	34,08	44,3	44,3
4	Rasio KDRT	0,00	0,01	0,003	0,007	0,003
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	94,87	94,87	94,87	91	91
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas PPPA serta PPKB Kabupaten Pesawaran, 2022

J. Urusan Pangan

Berdasarkan Tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa realisasi indikator urusan pangan di Kabupaten Pesawaran meliputi ketersediaan pangan utama dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Sejak Tahun 2017 hingga 2021 persentase rasio ketersediaan pangan mengalami peningkatan dari angka 22,32% ke 75,84%. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi Dinas terkait untuk tetap meningkatkan pasokan ketersediaan pangan agar tidak terjadi kelangkaan bahan pangan dimasa depan. Selanjutnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dilakukan untuk memastikan kualitas dan distribusi bahan pangan dapat terjamin dan merata. Adapun persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami peningkatan dengan jumlah sampel yang dilakukan pengawasan adalah 61 sampel bahan pangan.

Tabel 2.53 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017-2021

Indikator (dalam persen)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan pangan utama	22,32	37,54	29,32	34,66	75,84
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	87,50	88,89	90,00	75,00	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pesawaran 2021

K. Urusan Lingkungan Hidup

1) Persampahan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pesawaran pada periode Tahun 2016-2022 masih belum terlaksana secara optimal. Skema pengelolaan ditempuh melalui

penanganan dan pengurangan di sumber sampah. Persentase penanganan sampah sampai akhir Tahun 2022 baru mencapai 10,38% atau $\pm 35.575\text{m}^3$ sampah diangkut ke Tempat Penyimpanan Akhir Sampah (TPAS) dari total timbunan sampah $\pm 70.329 \text{ m}^3$. Sampah terangkut ke TPAS dimaksud terutama berasal dari wilayah perkotaan yang merupakan area pelayanan persampahan. Upaya pengurangan sampah dilakukan melalui pendekatan 3 R (Ruduce, Reuse, Recycle). Dalam perspektif pembangunan target penanganan dan pengurangan sampah di sumber sampah perlu lebih ditingkatkan lagi untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Adapun sebagian besar timbunan sampah yang belum tertangani diharapkan dapat dikelola dan ditangan oleh individu masyarakat sehingga secara bersama-sama Kabupaten Pesawaran dapat mencapai tingkat pencemaran yang rendah.

Tabel 2.54 Kinerja Persampahan Tahun 2016-2022

Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sampah yang dapat ditangani (m ³)	599	680	720	770	828	1.445	7.300
Sampah yang berkurang melalui 3R (m ³)	229	282	304	516	599	24.590	28.275
Jumlah sampah yang tertangani (m ³)	828	962	1.024	1.286	1.427	26.035	35.575
Total timbunan sampah (m ³)	54.392	54.814	58.647	64.670	68.559	71.892	70.329
Rasio	1,52	1,76	1,75	1,99	2,08	2,01	10,38

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Pesawaran 2023

2) **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan**

Realisasi indikator cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di Kabupaten Pesawaran pada periode Tahun 2016-2022 berfluktuasi. Pada Tahun 2016 tercatat 63 kemudian terus meningkat mencapai 111 pada Tahun 2020, kemudian mengalami penurunan tajam pada Tahun 2021 yang tercatat pada angka 46 dan pada Tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang berada pada angka 72. Capaian Tahun 2022 tersebut masih harus terus ditingkatkan mengingat usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan akan meningkat pula seiring dengan peningkatan aktivitas investasi di Kabupaten Pesawaran.

Tabel 2.55 Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Tahun 2016-2022

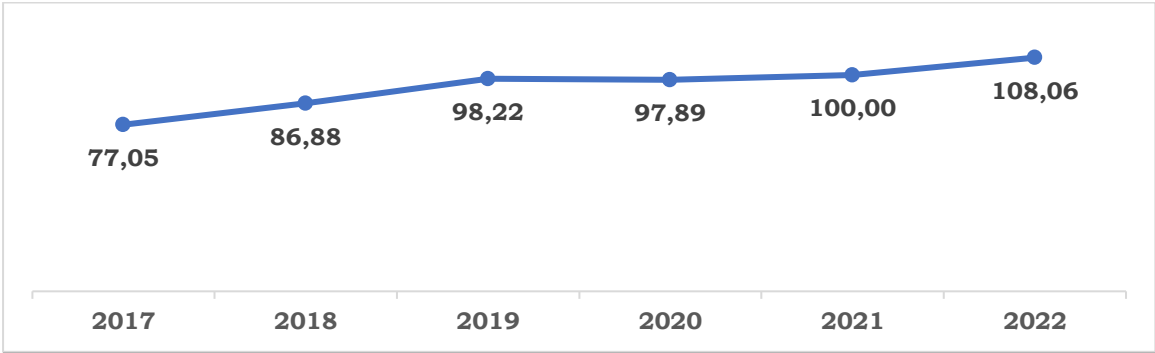
Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	63	73	75	99	111	46	72

Sumber: Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran 2023

L. **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Persentase kepemilikan KTP, berdasarkan Gambar dibawah ini tren rasio penduduk ber-KTP mengalami peningkatan dari Tahun 2017 hingga 2022. Pada Tahun 2017 tercatat 77,05% kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Tahun 2018 dan 2019 hingga mencapai 98,22%. Meskipun sedikit menurun pada Tahun 2020 pada angka 97,89%, kemudian pada tahun 2021 mencapai 100% dan pada Tahun 2022 terus mengalami peningkatan yakni mencapai 108,06%. Pencapaian ini perlu dipertahankan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

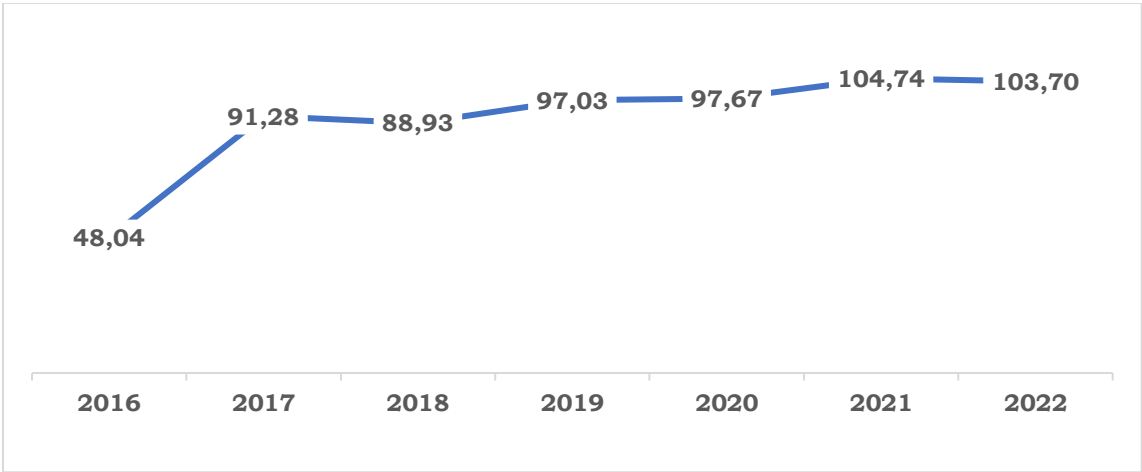
Gambar 2.32 Grafik Rasio Penduduk Ber-KTP Tahun 2017-2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesawaran, 2023

Sedangkan indikator rasio bayi berakte kelahiran secara tren menunjukkan peningkatan, pada Tahun 2016 persentase bayi lahir memiliki akte kelahiran sebesar 48,04%, kemudian pada Tahun 2017 mengalami peningkatan yang berada pada 91,28%, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2018 yaitu sebesar 88,93%, selanjutnya terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2022 persentase rasio bayi ber-akte kelahiran sebesar 103,70% (Gambar berikut).

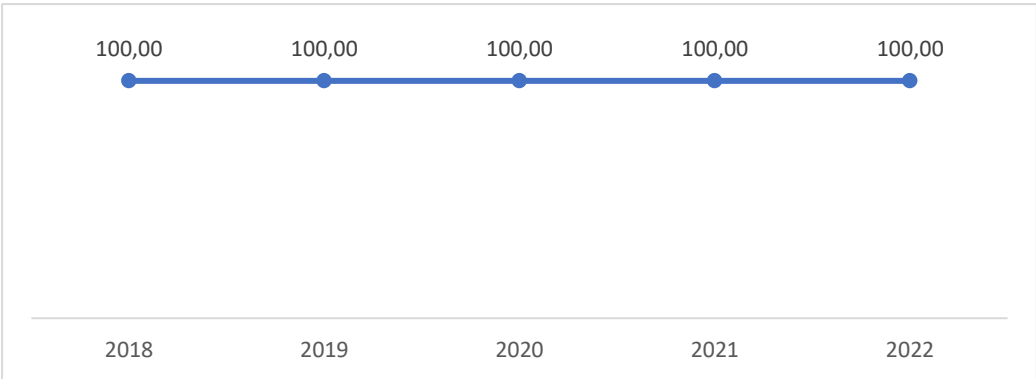
Gambar 2.33 Grafik Rasio Bayi Ber-Akte Kelahiran Tahun 2016-2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesawaran 2023

Pada indikator rasio pasangan berakte nikah (Gambar berikut), Tahun 2018 hingga 2022 sudah tercatat 100% pasangan yang memiliki akte nikah. Pencapaian ini perlu dipertahankan dikemudian hari agar kelengkapan data administrasi pendudukan memiliki kinerja yang baik.

Gambar 2.34 Grafik Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesawaran 2023

Selanjutnya indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan indikator ketersediaan data base kependudukan skala provinsi di Kabupaten Pesawaran telah terpenuhi sejak Tahun 2016. Dalam rangka pemanfaatan pemanfaatan database kependudukan pemerintah daerah, seyogyanya diperlukan pengadaan server (warehouse) pada Disdukcapil yang terintegrasi. Pemanfaatan database kependudukan ini penting kedepannya, misalnya saja dalam penentuan penerima bansos.

M. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara umum pencapaian target dalam merealisasikan indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.56 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	98,61	99,31	100,00	100,00	100,00
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	144	144	144	144	144
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	144	144	144	144	144
4	Rata-rata jumlah LSM aktif	62	73	90	109	142
5	Posyandu aktif	459	457	461	466	464
6	Persentase swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	67,40	96,00	94,86		
7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	337	480	664		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2022

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik dari Tahun 2018 hingga 2022 telah mencapai 100% sehingga diharapkan Pemerintah Desa dapat menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan sangat baik dan menjaga kualitas pelayanan yang dicapai pada Tahun 2022.

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dan PKK dari Tahun 2018-2022 jumlahnya tetap sebanyak 144, sedangkan jumlah LSM aktif selalu mengalami penambahan tiap tahunnya dari sejumlah 62 organisasi pada Tahun 2018 menjadi 142 organisasi pada Tahun 2022.

Untuk capaian target indikator kinerja posyandu aktif sejak Tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2016 tercatat 427 kemudian meningkat menjadi 440 di Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan jumlah balita, maka rasio posyandu per satuan balita pada Tahun 2020 mencapai 1:345 atau dengan kata lain satu posyandu dapat melayani 345 balita, angka tersebut telah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni 1:100. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan signifikan dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020, tercatat Tahun 2016 sebesar 24,60% menjadi 94,86% di Tahun 2020. Adapun indikator pemeliharaan program pasca program pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan angka yang signifikan sejak 2016 hingga 2020 tercatat 123 meningkat menjadi 664.

Tabel 2.57 Status Kemandirian dan Kemajuan Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun 2018-2022

No	Status Desa	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mandiri	1	3	6	7	10
2.	Maju	6	12	12	13	31
3.	Berkembang	83	118	123	123	103
4.	Tertinggal	54	11	3	1	0
5.	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Indeks Desa Membangun (IDM) dicanangkan oleh pemerintah untuk mengukur perkembangan suatu desa dengan menilai aspek pembangunan pada ruang lingkup sosial, ekonomi, dan ekologi serta kebijakan dan pembangunan/pemberdayaan masyarakat guna menghasilkan rekomendasi kebijakan agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan capaian tabel diatas, Pada Tahun 2022 di Kabupaten Pesawaran sudah tidak terdapat Desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal sehingga dapat dikatakan pembangunan desa telah berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan agar

seluruh desa dapat mencapai status maju dan mandiri yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

N. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa secara umum realisasi indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah menunjukkan tren yang baik, secara berurutan penjelasan indikator tersebut dideskripsikan pada paragraf selanjutnya.

Indikator laju pertumbuhan penduduk berfluktuasi selama periode Tahun 2018 sampai 2022 yaitu dari 1,00% ke 1,13% dimana pada Tahun 2020 sempat mengalami peningkatan tertinggi pada angka 7,45%. Selanjutnya dari sisi rata-rata jumlah anak per keluarga jumlahnya menurun dari Tahun 2018 hingga 2022 yang mencapai angka 2,31 anak per keluarga.

Indikator Rasio Akseptor KB per 1.000 Pasangan Usia Subur (PUS) selama Tahun 2018-2022 menunjukkan realisasi yang cenderung stagnan. Selanjutnya dari indikator rasio akseptor KB tersebut diantaranya 71,89% pada Tahun 2018 menggunakan jenis kontrasepsi jangka panjang. Angka tersebut meningkat menjadi 72,68% pada Tahun 2022.

Sementara itu untuk indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun menurun sedikit dari 11,90% pada Tahun 2018 menjadi 11,50% pada Tahun 2022. Secara ideal perempuan sebaiknya menikah sesuai dengan program BKKBN yaitu pendewasaan usia perkawinan (PUP) wanita menikah umur 20 tahun sedangkan untuk laki-laki umur 25 tahun. Pada umur 20 tahun ke atas, organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan. Sedangkan pada usia 35 tahun mulai terjadi proses regeneratif. Selain itu, secara psikologis, pada usia 20 tahun mulai matangnya emosional dan nalar seseorang. Di masyarakat masih ditemui PUS dimana istri berusia kurang dari 20 tahun. Pada tahun 2022 tercatat 11,50%. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup besar perkawinan yang terjadi pada usia dini sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan persentase usia muda menikah minimal 20 tahun. Indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) di Kabupaten Pesawaran juga mengalami progres yang baik dimana selama periode 2018-2022 hanya 13,90% sampai 9,00% yang belum terpenuhi, masih sedikit diatas capaian nasional yang berada pada angka 8,55%. Namun demikian perlu terus diupayakan agar angka indikator ini menurun sehingga semua pasangan usia subur dapat terpenuhi program KB.

Adapun indikator Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB selama Tahun 2018-2020 bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat dari angka 68,73% menjadi angka 70,00% sehingga kedepan perlu terus diupayakan perbaikan kebijakan sebagai upaya untuk menunda kehamilan pada keluarga yang memiliki balita sebagai upaya salah satu aspek pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mematangkan psikologis anak balita.

Selanjutnya indikator Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk telah mencapai target setiap tahunnya, sejak Tahun 2018 hingga 2022 realisasi telah mencapai 100%.

Indikator Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri selama Tahun 2018 mencapai titik tertinggi pada angka 86,04% namun mengalami penurunan ke angka 83,38% pada Tahun 2019-2020 dan meningkat kembali ke angka 85,00% pada Tahun 2022. Untuk realisasi Indikator Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan selama Tahun 2018-2022 telah mencapai realisasi 100% sehingga kedepan perlu dipertahankan.

Indikator Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat masih perlu ditingkatkan dimana pada periode

2018-2022 masih terealisasi 22,00%, sehingga capaian ini perlu ditingkatkan lagi untuk mendukung indikator rasio akseptor KB dan mengurangi persentase cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi. Kemudian indikator Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa telah mencapai realisasi diseluruh desa di Kabupaten Pesawaran.

Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,00	0,95	7,45	0,89	1,13
2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,63	3,60	3,55	2,34	2,31
3	Ratio Akseptor KB	71,89	72,37	72,37	72,38	72,68
4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33,35	33,55	33,75	33,95	34,15
5	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan nikah usia 15 – 49	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00
6	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah 20 tahun	11,90	11,80	11,70	11,60	11,50
7	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	13,90	13,73	13,21	10,70	9,00
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	68,73	68,40	68,61	66,45	70,00
9	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	86,04	83,38	83,38	83,59	85,00
11	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	20,50	20,75	21,00	21,50	22,00
13	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	144	144	144	144	144

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, 2022

O. Urusan Perhubungan

Pada periode Tahun 2018-2022 jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan. Pada Tahun 2018 tercatat 4.536 penumpang, kemudian menurun menjadi 2.232 penumpang di Tahun 2022. Penurunan yang cukup besar ini merupakan implikasi dari bertambahnya kepemilikan kendaraan pribadi sehingga mengurangi penumpang yang menggunakan transpotasi umum. Selanjutnya pada indikator jumlah orang/barang melalui Dermaga per hari mencapai 469 orang/barang pada Tahun 2018 dan meningkat menjadi 500 orang/barang pada Tahun 2022 yang didominasi untuk penyebaran wisatawan ke objek wisata pulau-pulau.

Sementara itu indikator persentase jumlah uji KIR angkutan umum secara tren mengalami peningkatan, pada Tahun 2018 tercatat 85,00% kendaraan yang melakukan uji KIR, kemudian meningkat di Tahun 2022 menjadi 87,00% yang melaksanakan uji KIR . Peningkatan persentase uji KIR tersebut dapat bermakna meningkatnya pengawasan terhadap ketertiban administrasi kendaraan yang wajib KIR. Hal ini didukung oleh indikator persentase kepemilikan KIR angkutan umum nilainya meningkat dari 66,67% pada Tahun 2018 menjadi 100,00% pada Tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya pengawasan secara khusus pada angkutan umum atau menurunnya jumlah angkutan umum di Kabupaten Pesawaran juga terindikasi karena meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi secara berangsur-angsur dari tahun ke tahun serta tersedianya transportasi online.

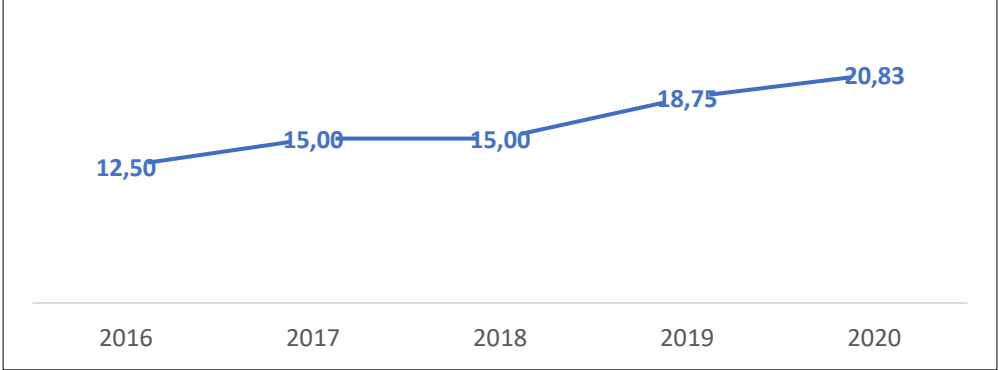
Tabel 2.59 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah arus penumpang angkutan umum	4.536	4.104	3.672	3.650	2.232
Jumlah orang/barang melalui Dermaga per hari	469	480	500		
Persentase uji KIR angkutan umum	85,00	87,00	87,00		
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	66,67	70,02	71,05	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan 2022

Selanjutnya untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas, data pada Gambar 2.21 menunjukkan progres yang tumbuh bertahap. Pada Tahun 2016 sebesar 12,5% namun pada akhir periode Tahun 2020 menjadi 20,83%. Kedepan pemasangan rambu lalu lintas perlu ditargetkan lebih tinggi lagi, karena hal ini terkait dengan keselamatan para pengguna jalan.

Gambar 2.35 Grafik Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Perhubungan 2021

P. Urusan Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan arah pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah, yang menjadi bagian dari *Program Universal Service Obligation* (USO) atau kewajiban pelayanan universal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime*). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah, hal ini ditunjang oleh adanya pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Sepanjang periode Tahun 2018-2022 cakupan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan hanya mencapai 10%, artinya belum seluruh kecamatan mendapatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), sarana prasarana telepon pintar/komputer/desktop/notebook dan ketersediaan akses internet di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan. Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2022 sebesar 60%, dengan demikian masih terdapat sebagian besar rumah tangga yang tidak memiliki akses internet. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	11	11	11	11	11
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2022

Q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Secara umum tren persentase koperasi aktif di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2018-2022 menunjukkan tren peningkatan, pada Tahun 2018 tercatat sebesar 49,54% koperasi aktif, kemudian meningkat menjadi 59,615 pada Tahun 2022. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keaktifan koperasi di Kabupaten Pesawaran masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat bermakna perlunya kebutuhan sumber daya manusia peserta/anggota koperasi yang memahami manajemen koperasi dan upaya meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi.

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerja setempat dan memiliki resistensi terhadap gejolak perekonomian eksternal. Jumlah UMKM yang produktif di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi akibat Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, di awal Tahun 2018 tercatat 1.187 pelaku usaha yang meningkat menjadi 1.371 pada Tahun 2022. Adapun untuk perkembangan IKM yang produktif juga berpola sama dimana pada Tahun 2018 terdapat 491 pelaku usaha dan meningkat menjadi 615 pada Tahun 2022. Lebih lanjut data kinerja koperasi dan UMKM disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.61 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Koperasi aktif	49,54	56,70	58,42	59,61	67,37
Jumlah UMKM yang produktif	1.187	1.259	1.055	1.213	1.371
Jumlah IKM yang produktif	491	509	482	521	615

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2022

R. Urusan Penanaman Modal

Dilihat dari jumlah investor di Kabupaten Pesawaran terdapat peningkatan yang cukup besar sejak Tahun 2017 dengan jumlah investor mencapai 212 naik di Tahun 2020 dengan jumlah investor mencapai 337. Hal tersebut juga didukung dengan pesatnya peningkatan nilai investasi dari 210.874 miliar pada Tahun 2017 menjadi 283.595 miliar pada Tahun 2021 dan memberikan dampak terhadap serapan

tenaga kerja. Sejak Tahun 2017, tenaga kerja yang terserap melalui PMDN maupun PMA sebesar 4.122 dan meningkat menjadi 4.672 tenaga kerja pada Tahun 2021. Namun disisi lain terjadi penurunan terhadap indikator kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN dari 6,43% pada Tahun 2017 yang kemudian menurun pada Tahun 2020 menjadi 2,59%.

Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	212	199	392	337	NA
Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam juta)	210,874	395,784	403,732	414,196	283,595
Daya serap tenaga kerja	4.122	5.531	6.578	4.672	NA
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Jutaan rupiah) (%)	6,43	40,27	2,01	2,59	NA

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2022

S. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Tabel dibawah ini, dapat diketahui indikator kinerja urusan pemuda dan olahraga secara tren menunjukkan realisasi yang positif. Untuk indikator persentase organisasi pemuda yang aktif sudah mencapai 100%. Hal ini bermakna bahwa pemuda di Kabupaten Pesawaran memiliki penambahan tempat untuk berkreasi dan berekspresi sehingga dapat membangun prestasi dalam bidang kepemudaan.

Selanjutnya jumlah wirausaha muda sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2022 mengalami peningkatan. Tercatat pada Tahun 2016 berjumlah 56 pengusaha muda dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 121. Selanjutnya untuk Tahun 2021 hingga 2022 terjadi perubahan penilaian kinerja dari jumlah menjadi rasio yang tercapai 100 persen. Hal ini bermakna bahwa kondisi ekonomi/mekanisme pasar di Kabupaten Pesawaran memberikan kesempatan bagi anak usia muda untuk menjadi wirausahawan.

Cakupan pembinaan olahraga selama Tahun 2016 hingga Tahun 2022 setiap tahunnya rata-rata dibina 20 cabang olahraga dan telah mencapai 100%. Adapun pelatih cabang olahraga yang bersertifikasi masih diangka 56,20%, dalam perpektif kedepan jumlah pelatih yang bersertifikasi perlu terus ditingkatkan terutama pada cabang olahraga populer dan prioritas di Kabupaten Pesawaran.

Lebih lanjut cakupan pembinaan atlet muda pada Tahun 2016 berada pada angka 60,00% dan cenderung stagnan hingga pada Tahun 2021 meningkat menjadi 65,45% dan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan kembali yang berada pada 65,65%. Dalam konteks urusan olahraga, perlu menjadi perhatian bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olahraga ditargetkan adanya peningkatan prestasi dari cabang olahraga atau atlet olahraga. Sehingga dalam perspektif kedepan akan terus diupayakan agar atlet dan cabang olahraga yang telah dibina dapat menghasilkan prestasi untuk memajukan Kabupaten Pesawaran dalam dunia olahraga. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2022

No	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah wirausaha muda	56	68	82	112	121	100,00	100,00
3	Cakupan pembinaan olah raga	72,73	86,36	86,36	90,91	100,00	100,00	100,00

4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	46,67	47,06	47,37	47,62	43,48	56,00	56,20
5	Cakupan pembinaan atlet muda	60,00	60,78	60,77	60,38	60,74	65,45	65,65

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga 2023

T. Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan kabupaten urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota melalui sistem yang terintegrasi. Adapun Buku Kabupaten Pesawaran Dalam Angka selama periode Tahun 2018-2022 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan.

Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Pesawaran yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Pesawaran selama periode 2018-2022 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesawaran. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Selanjutnya untuk indikator perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah telah mencapai 80% pada Tahun 2022. Dalam upaya memenuhi kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mencapai 100% dan perlu dipertahankan kedepannya. Untuk capaian konten informasi dalam menjawab narasi negatif atau *misleading* informasi berkembang cukup baik dari angka 36% pada Tahun 2020 dan terus meningkat hingga dua kali lipatnya pada Tahun 2022 di angka 72%. Adapun untuk capaian informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan regulasi keterbukaan informasi publik pada Tahun 2022 sudah mencapai 48%. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan guna menunjang capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informais publik.

Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Buku "kabupaten Pesawaran dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Presentase (%) perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik	NA	NA	NA	50,00	100,00
Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi	NA	NA	36,00	54,00	72,00
Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukan Informasi Publik	NA	NA	14,00	30,00	48,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

U. Urusan Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan indikator Jumlah Perangkat daerah yang telah menggunakan

sandi dan *security cyber* baik dalam komunikasi Perangkat Daerah maupun dalam pemanfaatan *IT* di Pemerintah Daerah. Berdasarkan Tabel 2.65 dapat diketahui bahwa selama lima tahun hanya terdapat 6 Perangkat Daerah yang setiap tahunnya menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.65 Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2022

V. Urusan Kebudayaan

Berdasarkan Tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa dari Tahun 2018 hingga 2022 terdapat 11 festival seni dan budaya yang diselenggarakan. Dengan adanya penyelenggaraan festival, bukan berarti hanya melestarikan seni dan budaya namun juga dapat memberi nilai tambah ekonomi khususnya terhadap penggiat seni dan budaya, umumnya terhadap aktivitas perekonomian lokal. Pelaksanaan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilakukan pada Tahun 2022 sebanyak 11 lokasi. Lebih lanjut jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dikelola secara terpadu pada Tahun 2022 berjumlah 10 benda, sehingga kedepan masih perlu dilakukan upaya tersebut agar dapat membuka peluang kegiatan festival seni dan budaya yang berdampak pada kegiatan perekonomian. Adapun indikator kinerja urusan kebudayaan disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11	11	11	12	11
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4	5	7	9	10
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	1	2	3	4
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	3	3	3

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021

W. Urusan Perpustakaan

Berdasarkan tren data series empat indikator kinerja urusan perpustakaan pada Tabel berikut ini selama periode Tahun 2016-2022 rata-rata realisasi menunjukkan capaian yang positif. Jumlah perpustakaan pada Tahun 2016 sebanyak 245 yang kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2022 sebanyak 472 perpustakaan. Adapun perkembangan kunjungan perpustakaan per tahun juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Tahun 2016 mencapai 2.720 dan terus meningkat sampai pada Tahun 2019 menjadi sebanyak 3.335 pengunjung dan mengalami penurunan pada angka 1.700 pada Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 dan sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan menjadi sebanyak 4.400 pengunjung. Selanjutnya koleksi judul buku pada Tahun 2022 tersedia 8.180 judul buku. Dalam konteks ini jumlah perpustakaan adalah jumlah perpustakaan yang terdapat di seluruh Kabupaten Pesawaran (mencakup perpustakaan SD-SMP Perpustakaan di Kantor OPD) dan jumlah setiap tahunnya merupakan agregat dari tahun sebelumnya, begitu pula jumlah pengunjung merupakan jumlah pengunjung seluruh perpustakaan di Kabupaten Pesawaran.

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, diarahkan untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan literasi. Serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi. Terutama dukungan untuk perpustakaan desa yang terintegrasi dengan program Smart Village Provinsi Lampung.

Adapun Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat belum tersedia sehingga strategi manajemen perpustakaan mulai dari pengelolaan

sarpras perpustakaan, hingga strategi peningkatan minat baca melalui perpustakaan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam perspektif kedepan perlu terus diupayakan agar pelayanan urusan perpustakaan dapat berkontribusi pada peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Penjelasan lebih lanjut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2022

Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perputakaan	245	278	296	321	339	463	472
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.720	2.809	3.060	3.335	1.700	2.700	4.400
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5.014	5.608	6.027	6.726	6.959	7.241	8.180
Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	0	2	4

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2023

X. Urusan Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan periode Tahun 2016-2022 dapat digambarkan oleh indikator pada Tabel berikut ini. Indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku secara tren menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2016 tercatat sejumlah 13,33% atau 6 dari 45 OPD yang mengelola arsip secara baku, kemudian pada Tahun 2022 meningkat menjadi 33,33% atau 14 dari 43 OPD. Rasio ini perlu ditingkatkan kembali agar setiap OPD memiliki kelengkapan arsip untuk dipergunakan sebagai evaluasi dan mengukur kinerja kualitas OPD. Kemudian untuk indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan mengalami penurunan, pada Tahun 2016 terdapat 23 arsiparis, kemudian pada Tahun 2022 terdapat 22 arsiparis.

Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2022

Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	13,33	17,78	20,00	22,22	22,22	22,22	33,33
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	23	23	27	27	10	36	22

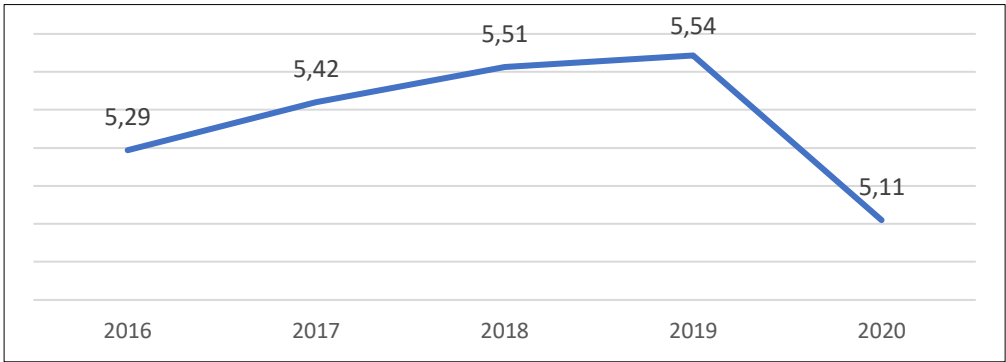
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2023

Pelayanan Urusan Pilihan

A. Urusan Pertanian

Bahan makanan utama penduduk di Kabupaten Pesawaran adalah beras, secara umum, tren produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal mengalami peningkatan sepanjang Tahun 2016-2020. Adapun capaian produksi (panen) sebesar 205.442,00 ton dengan luas lahan 38.809 hektar tercapai di Tahun 2016, mengalami kenaikan sampai Tahun 2019 namun kembali mengalami penurunan panen menjadi 150.540,60 ton dengan luas lahan pertanian 29.460 hektar di Tahun 2020.

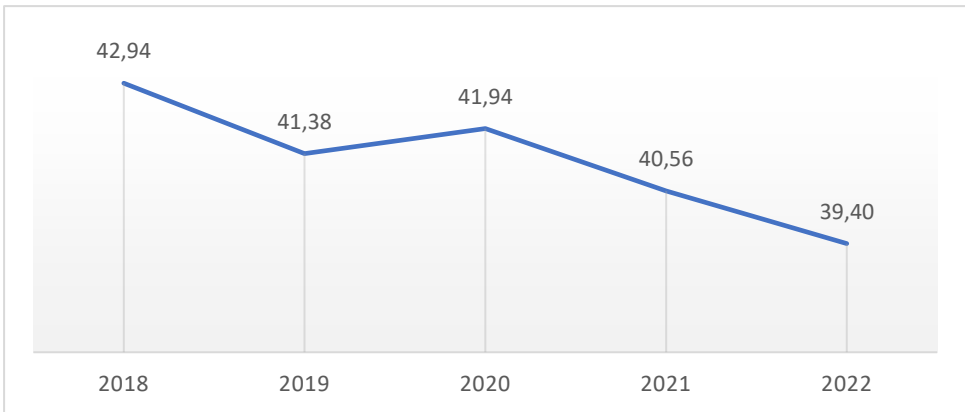
Gambar 2.36 Grafik Produktivitas Pertanian Padi dan Bahan Pangan Utama Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pertanian 2021

Sementara itu, kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan, pada Tahun 2018 tercatat 42,94%, kemudian menurun menjadi 41,38% pada Tahun 2019 dan meningkat ke 41,94% pada Tahun 2020. Selanjutnya proporsi sektor ini terus menurun hingga mencapai 39,40% pada Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya perubahan aktivitas ekonomi yang berdampak pada perubahan guna lahan dari pertanian ke lahan terbangun serta perpindahan mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor lainnya. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.37 Grafik Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

B. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi menjadi katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Adapun daerah tujuan wisata di Kabupaten Pesawaran didominasi oleh objek wisata alam pesisir, informasi mengenai hal ini telah diuraikan pada pembahasan pola ruang kawasan budidaya dalam sub bab kawasan pariwisata.

Hingga saat ini daerah tujuan wisata di Kabupaten Pesawaran masih didominasi wisata berskala lokal dan memiliki daya tarik yang hampir mirip antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya, selain itu juga belum seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas utama penunjang pariwisata yakni warung makan (kuliner) dan penginapan serta akses transportasi yang memadai. Dalam konteks pengembangan pariwisata hal ini dapat bermakna bahwa daerah tujuan wisata tersebut belum mampu berperan optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat.

Tabel 2.69 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022

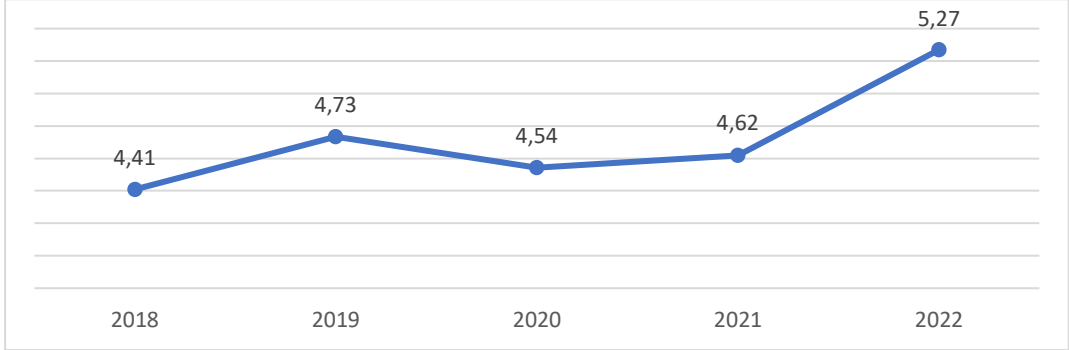
Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kunjungan Wisatawan	1.155.851	1.387.029	873.829	1.135.978	437.978
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	24,49	20,00	-37,00	30,00	-61,44

Sumber: Dinas Pariwisata 2022

Kunjungan wisata pada objek wisata di Kabupaten Pesawaran mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi pada periode Tahun 2018-2022 dengan jumlah kunjungan sebanyak 1.158.851 wisatawan pada Tahun 2018 dan menurun menjadi 437.978 wisatawan pada Tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7,29% per tahun.

Sementara itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami perkembangan yang cukup baik meskipun sempat terkontraksi akibat Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2018 tercatat 4,41%, kemudian meningkat menjadi 4,73% pada Tahun 2019 dan menurun pada angka 4,54% pada Tahun 2020. Selanjutnya pada Tahun 2022 mencapai 5,27%.

Gambar 2.38 Grafik Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

C. **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Produksi perikanan di Kabupaten Pesawaran mengalami penurunan yang cukup besar namun dengan perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2018 tercatat 49.756 ton produksi yang terus menurun hingga Tahun 2022 mencapai 19.667 ton. Dari total produksi perikanan tersebut pada Tahun 2018, 24% berasal dari tangkapan nelayan yang proporsinya berfluktuasi selama periode hingga Tahun 2022 yang mencapai 23,28%, dimana proporsi terbesarnya pada Tahun 2021 sebanyak 36,87%. Hal tersebut sejalan dengan adanya tren perkembangan cakupan bina kelompok nelayan dimana pada awal Tahun 2018 tercakup 28,33% dan menurun menjadi 18,73% pada Tahun 2022.

Selanjutnya, jumlah konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Pesawaran per kapita sudah menunjukkan capaian yang fluktuatif pada Tahun 2018-2022 dimana pada Tahun 2018 sebanyak 27 kg/kapita dan meningkat menjadi 56 kg/kapita pada Tahun 2021 namun menurun sesuai dengan ketersediaan produksi perikanan menjadi 35 kg/kapita. Upaya untuk menyosialisasikan gerakan makan ikan terjadi seiring dengan kampanye GEMARIKAN (Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan) untuk meningkatkan cakupan nutrisi penduduk. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi perikanan (Ton)	49.756	43.921	30.017	31.149	19.667
Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	24,10	28,60	35,53	36,87	23,28
Cakupan bina kelompok nelayan	28,33	28,59	28,59	29,66	18,73
Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	27	42	54	56	35

Sumber: Dinas Perikanan 2022

D. **Urusan Perdagangan**

Sektor perdagangan merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada Tahun 2022 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Pesawaran tercatat 15,37%. Sektor perdagangan ini dijalankan oleh pedagang/usaha formal dan pedagang/usaha

informal, dengan jumlah kelompok pedagang/usaha yang dibina sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2022 sebesar 45,52%.

Tabel 2.71 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2022

Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran	13,06	13,06	13,36	14,05	13,64	14,06	15,37
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	38,72	38,72	38,72	38,72	42,24	43,59	45,52

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2023

E. Urusan Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor perdagangan besar dan eceran pada Tahun 2020 tercatat 13,83%. Dalam konteks ini, industri berdasarkan kapasitas tenaga kerjanya dari yang terkecil dibedakan menjadi industri skala kecil, industri skala menengah dan industri skala besar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan perindustrian untuk kewenangan Kabupaten mencakup industri kecil dan sedang, yang didalamnya terdapat kelompok usaha kecil berupa pengrajin dan industri rumah tangga. Adapun realisasi cakupan bina kelompok pengrajin mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2016 tercatat bina kelompok pengrajin dengan cakupan mencapai 52,99%, kemudian pada Tahun 2022 cakupan pembinaan mencapai 99,60%. Hal ini menunjukkan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mendukung usaha industri kecil menengah sehingga kedepan perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar usaha tersebut dapat mandiri.

Tabel 2.72 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2022

Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan bina kelompok pengrajin	52,99	64,43	80,9	89,71	99,57	99,58	99,60

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2023

Tabel 2.73 Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Industri Pengolahan (%)	13,94	14,01	13,51	14,15	13,83

Sumber: Pesawaran Dalam Angka 2021

Dukungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam rangka mewujudkan pembangunan industri di Kawasan Industri Pesawaran (Kecamatan Tegineneng) dan untuk mendukung kebijakan pembangunan industri pengolahan sesuai janji kerja Gubernur Lampung telah dilaksanakan melalui kebijakan penyusunan *feasibility study* (studi kelayakan) Kawasan Industri Tegineneng pada Tahun 2017, penyusunan Masterplan Kawasan Industri Tegineneng pada Tahun 2018, MoU dengan SDCP Holdings PTY LTD pada Tahun 2019, Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tegineneng Tahun 2022-2042, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Koridor Kawasan Industri Tegineneng – Negeri Katon Tahun 2022-2042, dan peninjauan yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPSTSP Provinsi Lampung terkait rencana Investasi Angel Yeast.Co.Ltd pada Bulan Maret 2023.

F. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi saat ini dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta difasilitasi oleh pemerintah pusat ditujukan bagi kemanfaatan daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan

transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Selama periode Tahun 2016-2020 transmigran swakarsa tercatat sebanyak 13 orang yang sebagian besar merupakan tenaga kerja indonesia di luar negeri.

Tabel 2.74 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Transmigran Swakarsa	5	8	0	0	0

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2021

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2011-2025 telah ada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. RPJMD Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2021-2026 juga sudah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. Selain itu, selama periode Tahun 2017-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019. Secara lebih lengkap, gambaran indikator kinerja urusan perencanaan yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.75 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (persen)	100	100	100	100	100
Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (persen)	100	100	100	100	100
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2022

Berdasarkan Tabel diatas selama Tahun 2018-2022 bahwa penjabaran konsistensi program dalam RPJMD pada dokumen RKPD telah terakomodir 100%, termasuk penjabaran konsistensi program dalam RKPD pada APBD. Selanjutnya untuk tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan pola ruang dan/atau struktur ruang dalam RTRW juga telah mencapai 100%.

B. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait otonomi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan inovasi daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020 mendapatkan capaian indeks inovasi daerah (IID) sebesar 2.454 dengan kriteria sangat inovatif. Pada Tahun 2021 sebesar 48,71 dengan kategori inovatif. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didasarkan pada 97 Indikator yang tersusun menjadi 23 dimensi, 12 pilar dan 4 aspek. Pengukuran IDSD Kabupaten Pesawaran akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Pengukuran IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) didasarkan pada 6 dimensi data perencanaan dan keuangan tahun 2018-2020. Hasil pengukuran IPKD Kabupaten Pesawaran dari tahun 2018-2020 berada dalam kategori tidak ada predikat dengan nilai Tahun 2018 sebesar 39,76 Tahun 2019 sebesar 35,69 dan Tahun 2020 sebesar 52,64. Sedangkan IKKD (Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah sebagai amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 direncanakan akan dilaksanakan Tahun 2022. Dalam Rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 387 dijelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintah daerah mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pada periode Tahun 2018-2022 Inovasi Daerah yang telah diterapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.76 Inovasi Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran

No.	Inovasi	Perangkat Daerah
1	Daily Evaluation System (DES)	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Sistem Informasi Manajemen PAD	Badan Pendapatan Daerah
4	Pembekalan Juru Pungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah
5	Inovasi Andan Jejama (Jurnal Inovasi dan Kelitbangan)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Pengelolaan Data Online	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Sistem Penatausahaan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
9	Sistem Administrasi Terpadu (SIATU)	Bagian Organisasi
10	Fungsi Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran	Bagian Organisasi
11	Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Pesawaran	Bagian Perekonomian
12	Fasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	Bagian Perlengkapan
13	Perhutanan Sosial Masyarakat Pesawaran (PERSAMARAN)	Bagian Sumber Daya Alam
14	Potensi Tambak Garam Desa Pesisir Pesawaran	Bagian Sumber Daya Alam
15	Pelayanan keliling Jemput bola (JEBOL)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Inovasi	Perangkat Daerah
16	Peningkatan Pelayanan Pasien Rujukan dengan Pendampingan Pasien	Dinas Kesehatan
17	Perawat Homecare meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dari rumah ke rumah	Dinas Kesehatan
18	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kader Posyandu	Dinas Kesehatan
19	Kesinambungan Update Data SISDMK untuk ketepatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
20	Peningkatan Capaian Target Program TBC Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal	Dinas Kesehatan
21	Kordinator Mitra UMKM (KOMIT-UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
22	Pembuatan Pelaporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Berbasis Akuntansi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
23	Digitalisasi Produk UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
24	Fasilitasi Pengembangan Pemasaran UMKM dengan Toko Modern	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
25	Peningkatan Kualitas Potensi UMKM Di Kecamatan Dengan Program <i>One Village One Destination</i>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
26	TABIK PUN (Training, Bantuan Modal, Insentif, Kolaborasi, Pusat Perbelanjaan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
27	Pengelolaan <i>Website</i>	Dinas Lingkungan Hidup
28	Sosialisasi <i>Destination Branding</i>	Dinas Pariwisata
29	Siskeudes <i>Online</i>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30	Sipades <i>Online</i>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31	Industri Rumahan (IR) Bagi Perempuan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tanggap Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33	Pembinaan Pemuda Berkarakter dan Berprestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
34	Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
35	Penyelenggaraan Bina Murid	Dinas Pendidikan
36	Pembinaan Sanggar Seni Budaya Daerah	Dinas Pendidikan
37	Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Non Kependidikan	Dinas Pendidikan
38	Pelatihan Pendidikan Berjenjang PTK PAUDNI Tingkat Dasar (Diksar)	Dinas Pendidikan
39	Pembinaan dan Pembentukan Kampung KB Terpadu	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok PIK Remaja dan Lomba PIK Remaja	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
41	Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB melalui TKBK (Tim KB Keliling)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
42	Pengembangan Sistem Informasi Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
43	<i>Integrated Fisheries Clinic Services</i>	Dinas Perikanan
44	Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Dinas Pertanian
45	Pengembangan Desa Mandiri Benih	Dinas Pertanian
46	Pendamping Stimulan Perumahan Swadaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
47	Penyusunan Database Pengembangan Perumahan Komersil dan Subsidi Kabupaten Pesawaran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
48	Air Minum Perdesaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
49	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Budidaya Kambing	Dinas Sosial

No.	Inovasi	Perangkat Daerah
50	Lampung Terang Pesawaran Terang (LARANG PERANG)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
51	Pembuatan Aplikasi <i>Website</i> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
52	Bersama Inspektorat Mencari Solusi (BERISI)	Inspektorat
53	Saber Pungli	Inspektorat
54	Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP)	Inspektorat
55	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
56	Patroli Siaga	Satuan Polisi Pamong Praja

C. **Urusan Keuangan**

Berdasarkan pada tabel di bawah, secara keseluruhan kinerja urusan penunjang keuangan dapat dikatakan baik. Beberapa indikator telah memenuhi target dan sebagian kecil belum tercapai. Namun demikian, pengelolaan keuangan dapat dikatakan telah baik dengan dapat dipertahankannya opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI selama 6 tahun berturut-turut. Begitu juga kinerja pelaksanaan program dan kegiatan juga sangat baik dengan tidak ada satupun program pembangunan daerah yang tidak dilaksanakan (0%) sehingga terdapat keyakinan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah telah mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan yaitu RPJMD. Selanjutnya persentase PAD terhadap APBD berfluktuasi, pada Tahun 2017 berada pada angka 7,42% dan menurun menjadi 6,50% pada Tahun 2022. Fenomena adanya penurunan SILPA dan kebijakan alokasi anggaran serta bagaimana perkembangan kinerja realisasinya akan dibahas lebih lanjut pada Bab III.

Tabel 2.77 Indikator Urusan Keuangan Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase SILPA terhadap APBD	0,98	4,33	0,25	0,97	0,81	0,63
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase PAD terhadap APBD	7,42	4,53	5,13	5,66	6,61	6,50
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2023

D. **Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**

Berdasarkan Tabel berikut ini, dapat diketahui kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Secara umum indikator rata-rata lama pegawai mendapatkan diklat selama periode Tahun 2017-2022 telah sesuai dengan standar, kemudian untuk indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal telah mencapai nilai maksimum, hal ini menggambarkan adanya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan kompetensi ASN. Indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural secara tren mengalami peningkatan selama periode Tahun 2017-2022, hal ini terjadi karena adanya pembagian skala prioritas untuk pelaksanaan diklat struktural. Selanjutnya pada indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural serta pada indikator Jumlah jabatan administrasi terus meningkat menjadi 21,11% dan 179 pada Tahun 2022. Selanjutnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu juga mengalami tren peningkatan meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dari 3.207 menjadi 3.142 orang pegawai.

Tabel 2.78 Indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100,00	100,00	100,00	95,00	100,00	99,90
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	18,38	21,04	21,04	21,04	21,04	21,11
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	39	39	39	39	38	38
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	166	168	169	163	174	179
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu	-	2.631	2.778	2.884	3.207	3.142
Jumlah pemangku jabatan fungsional umum	-	1.044	990	984	102	712

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Pengawasan

Seiring dengan mampu dipertahankannya peroleh predikat opini WTP pada LKPD Kabupaten Pesawaran oleh BPK RI selama 6 tahun terakhir, menunjukkan adanya kualitas kinerja pengawasan, terutama di bidang keuangan. Indeks kapabilitas APIP menunjukkan capaian yang cukup baik yakni pada level 3 (integrated) dari 5 (optimized). Kinerja pengawasan terkait dengan tindak lanjut hasil temuan BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan OPD terkait mencapai peningkatan dari 41,94% ke angka 73,51%. Namun demikian, jika dilihat dari kecenderungan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan penurunan kecuali pada Tahun 2018 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini perlu adanya perhatian terkait dengan penurunan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat berdampak pada kualitas akuntabilitas dalam penyajian LKPD sehingga akan berdampak pada penurunan opini LKPD. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM auditor fungsional serta peningkatan sarana penunjang perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.79 Indikator Urusan Pengawasan Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kapabilitas APIP	1	3	3	3	3	3
Persentase tindak lanjut temuan	41,94	33,63	33,33	59,26	72,96	73,51
Persentase pelanggaran pegawai	0,04	0,21	0,61	0,07	0,00	0,00
Jumlah temuan BPK	22	30	11	0	19	0

Sumber : Inspektorat 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

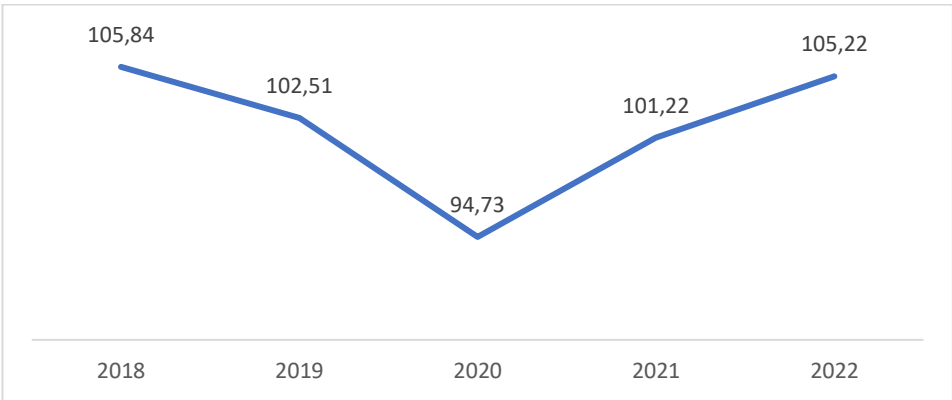
a. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun makna besaran nilai tukar petani yakni:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga

- produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Gambar 2.39 Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2022



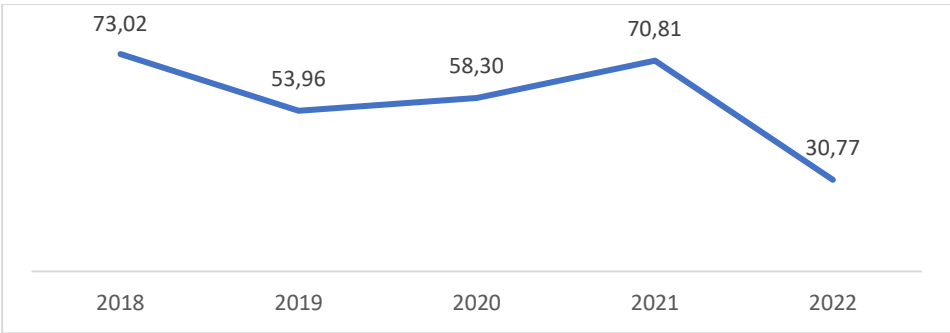
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Mengacu pada gambar di atas dapat diketahui bahwa NTP di Kabupaten Pesawaran yang dicirikan dengan data NTP Provinsi Lampung selama periode Tahun 2018-2022 mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 dan meningkat kembali hingga Tahun 2022 pada angka 105,22.

b. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan indikator yang selalu diupayakan untuk disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, berpotensi terjadi. Capaian angka kriminalitas yang ditangani tercatat selama periode Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2018 berada pada posisi 73,02 persen, menurun ke angka 53,96% pada Tahun 2019, kemudian Tahun 2020 dan 2021 meningkat menjadi 70,81% dan menurun ke angka 30,77% pada akhir periode. Dengan masih adanya jumlah kejahatan, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Gambar 2.40 Grafik Persentase Capaian Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2022

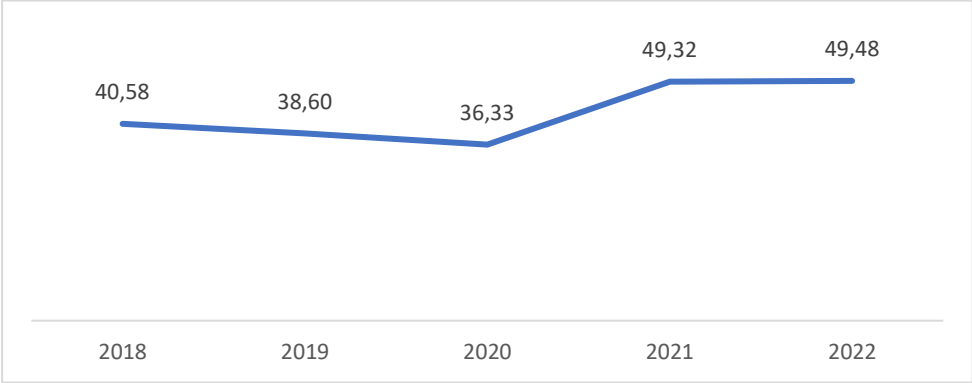
c. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Pada Tahun 2018, angka ketergantungan Kabupaten Pesawaran sebesar 40,58% kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2019 dan 2020 hingga menjadi 36,33%. Namun angka ketergantungan naik kembali pada angka 49,32% di Tahun 2021 dan 49,48% pada Tahun 2022. Artinya pada Tahun 2022, penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung kurang lebih sebanyak 49 penduduk usia non produktif (usia <15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, keahlian, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.41 Grafik Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; BPS Kabupaten Pesawaran 2023

d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri atas tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH bertujuan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Pada Tahun 2020 IKLH Kabupaten Pesawaran menunjukkan angka 61,83 sehingga masuk dalam kategori cukup baik (interval 60-70). Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran harus terus berupaya menggalakkan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

e. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan *good governance* menuju *clean governance*. Langkah awalnya adalah melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundang-undangan, rendahnya produktivitas kerja pegawai, ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya tergambar dalam *machinery of government* (MoG) yakni *interconnected between structural and process*, belum semuanya memiliki *standard operational procedure*(SOP) yang jelas dan terukur, serta penempatan sumber daya manusia aparatur yang belum menerapkan *the right man in the right place*.

Melalui reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni efektivitas, efisiensi, *equity* (rasa adil), dan ekonomis (hemat dan optimal). Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pengukuran penerapan reformasi birokrasi menggunakan nilai indeks

reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2022 masih berada pada angka 54,27 dengan predikat CC (cukup). Oleh karena itu kedepan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan mengupayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berkinerja tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Misi ke-1 pembangunan daerah periode 2021-2026.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 DAN REALISASI RPJMD

Indikator makro pembangunan, memberikan gambaran secara makro terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan stakeholders lainnya. Upaya pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam membangun daerah diarahkan pada pencapaian visi : “PESAWARAN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF” sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 serta “Pesawaran Sejahtera dan Berdaya Saing Menjadi Bumi Wisata 2025” yang merupakan visi jangka panjang Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022

Tujuan pembangunan Kabupaten Pesawaran telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesawaran disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

a. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pesawaran Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah bahwa laporan realisasi anggaran wajib disusun (*mandatory*) oleh pemerintah daerah yang merupakan 1 (satu) dari tujuh laporan keuangan pokok pemerintah daerah yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan - kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

1) Pengelolaan Pendapatan Daerah

• Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Penyusunan dan perumusan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pesawaran harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya, dan kultur masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya akan mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparatur daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mampu memberikan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan serta sarana dan prasarana bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Pesawaran. Disamping itu juga peraturan

daerah diharapkan juga dapat menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan daya beli/kemampuan ekonomi masyarakat (*enabling*).

Kebijakan-kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah senantiasa mempertimbangkan potensi-potensi sumber pendapatan yang ada sehingga kebijakan-kebijakan yang dimaksud akan lebih dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan daerah dan bukan sebaliknya dapat menekan, bahkan memperkecil potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dibidang pendapatan daerah merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan aparatur pemerintah dibidang pendapatan daerah yang profesional baik dari segi kemampuan, keterampilan maupun keahlian. Dengan adanya aparatur pemerintah yang profesional penyelenggaraan pemerintahan yang profesional akan terwujud.

• **Target dan Realisasi Pendapatan**

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.222.541.771.198,16 atau 93,27% dari target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan pemulihan ekonomi masih berkembang dengan lambat pasca pandemi Covid-19. Rincian target realisasi dan capaian pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.80 Target dan Realisasi Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	138.280.225.050,00	81.890.799.534,16	59,22
2	Pendapatan Transfer	1.156.779.789.916,00	1.129.119.682.392,00	97,61
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.668.295.401,00	11.531.289.272,00	73,60
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.310.728.310.367,00	1.222.541.771.198,16	93,27

Sumber : BPKAD Kabupaten Pesawaran, 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp36.831.855.949,24 atau 56,03%, retribusi daerah sebesar Rp3.054.372.585,00 atau 49,01%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.768.545.375,60 atau 43,64% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp40.236.025.624,32 atau 64,63% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.81 Target dan Realisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Daerah	65.740.000.000,00	36.831.855.949,24	56,03
2	Retribusi Daerah	6.232.750.000,00	3.054.372.585,00	49,01
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.052.625.701,00	1.768.545.375,60	43,64
4	Lain-lain PAD Yang Sah	62.254.849.349,00	40.236.025.624,32	64,63
	Jumlah PAD	138.280.225.050,00	81.890.799.534,16	59,22

Sumber : BPKAD Kabupaten Pesawaran, 2023

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
Realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp36.831.855.949,24 atau 56,03%. Pajak Daerah yang masih belum maksimal dalam mencapai target di Tahun 2022 yakni pajak pada sektor pariwisata berupa pajak hotel, pajak hiburan. Selain itu pajak penerangan jalan, pajak air tanah, dan pajak mineral bukan logam serta BPHTB juga belum maksimal.
2. Retribusi Daerah
Realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.054.372.585,00 atau 49,01%. Retribusi daerah yang belum maksimal dalam mencapai target di Tahun 2022 yakni retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pemakaian kekayaan daerah, serta retribusi pelayanan tempat khusus parkir, pelayanan kepelabuhanan, dan pelayanan penyeberangan orang. Lebih lanjut, retribusi persetujuan bangunan gedung dan retribusi izin trayek untuk menyediakan juga masih perlu untuk ditingkatkan kedepannya.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.768.545.375,60 atau hampir 43,64%. Adapun sumber pendapatan pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah berupa dividen atas penyertaan modal pada BUMD yakni Bank Lampung dan BUMD di Kabupaten Pesawaran masih masih perlu ditingkatkan.
4. Lain-lain PAD Yang Sah
Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.236.025.624,32 atau 64,63% dari target. Hal ini dikarenakan beberapa sektor berupa hasil kerja sama daerah, jasa giro, dan penerimaan atas tuntutan yang masih perlu dioptimalkan.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 meliputi realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.048.799.001.683,00 atau 98,25%. Tingginya capaian realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong daerah untuk dapat mengupayakan kebangkitan ekonomi daerah pasca Pandemi Covid-19 sehingga dapat berdampak pada pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya realisasi pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp80.320.680.709,00 atau 89,91% dari target yang telah ditetapkan, merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Lampung. Rincian target, realisasi dan capaian pendapatan transfer Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.82 Target dan Realisasi Capaian Pendapatan Transfer Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.067.447.654.916,00	1.048.799.001.683,00	98,25
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.332.135.000,00	80.320.680.709,00	89,91
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.156.779.789.916,00	1.129.119.682.392,00	97,61

Sumber : BPKAD Kabupaten Pesawaran, 2023

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 meliputi realisasi pendapatan hibah sebesar Rp11.417.430.872,00 atau 77,02% yang bersumber dari pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri. Selanjutnya untuk

sektor lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terealisasi sebesar Rp113.858.400,00 atau 13,47% yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD. Realisasi dan capaian lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.83 Target dan Realisasi Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Hibah	14.823.058.582,00	11.417.430.872,00	77,02
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	845.236.819,00	113.858.400,00	13,47
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.668.295.401,00	11.531.289.272,00	73,60

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesawaran, 2023

• **Permasalahan dan Solusi**

Kabupaten Pesawaran saat ini memiliki 11 (sebelas) Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dimungkinkan menemui permasalahan, adapun permasalahan yang menjadi kendala. Berdasarkan Data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) pada Tahun 2017 diperoleh hasil tunggakan PBB P2 Yang tersebar di 11 Kecamatan 148 Desa. Luas wilayah yang cukup besar dan keterbatasan sumber Pendapatan dan Pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan skala prioritas dan masih rendahnya sumber daya manusia taupun aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran serta kekurangan personil untuk penagihan yang wajib pajaknya berdomisili di luar wilayah Kabupaten Pesawaran. Dalam mengatasi permasalahan diatas strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran pada umumnya dan Bidang Pajak Daerah Lainnya yang mempunyai tugas menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pajak Daerah Lainnya merumuskan kiat-kiat yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pertama koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelolaan PAD terutama pada sektor pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran diharapkan dengan mengintensifkan penagihan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum ditemukan. Kemudaian tahap kedua pengawasan, hal ini diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan dilapangan saja, tetapi pengawasanpun dilakukan dengan pemeriksaan administrative terhadap hasil pemungutan pajak daerah secara khusus, kemudian tahap evaluasi, pada tahap ini evaluasi setiap program kerja dan kegiatan bidang diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidentil tetapi dilakukan berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi lain seperti kecamatan sehingga perkembangan penerimaan PAD akan optimal, serta melakukan peneriban, pembinaan dan sosialisasi pajak daerah kepada para wajib pajak sebagai solusi yang ditempuh.

2) **Pengelolaan Belanja Daerah**

• **Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pesawaran. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*.

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja Kabupaten Pesawaran Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, dan tolok ukur kinerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah dalam upaya pelayanan publik dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk kelancaran pelaksanaan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain itu diprioritaskan juga pada pembangunan ekonomi terkait dengan sektor pertanian, kelautan perikanan dan koperasi, industri, perdagangan.

Dalam mengalokasikan anggaran belanja yang didasarkan pada fungsi ekonomi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan menggunakan prinsip anggaran kinerja bagi seluruh pengguna anggaran dan barang daerah. Anggaran belanja tersebut diarahkan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintahan secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja Perangkat Daerah yang mengisi kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Adapun selanjutnya belanja juga diarahkan untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Anggaran belanja tersebut disusun berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai kebutuhan fiskal sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam rangka pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2024. Belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji pegawai, tunjangan pegawai, dan penghasilan lainnya. Belanja hibah diarahkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan atau kemampuan keuangan.

Kebijakan Belanja berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Keterbatasan anggaran yang setiap tahun senantiasa mengemuka, menuntut adanya

keaktivitas dan inovasi dalam pencarian sumber-sumber pendanaan bagi percepatan pembangunan.

Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Disamping itu juga membiayai penyelenggaraan organisasi perangkat daerah yang bersifat mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kewilayahan, serta organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik sepanjang belum diperoleh kepastian pendanaan dari APBN .

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan Provinsi Lampung.

Arah Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- a. Memenuhi belanja wajib dan mengikat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.
- b. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari DBHCHT, DBH Pajak Rokok untuk pendanaan program prioritas daerah yang sesuai dengan pedoman penggunaan dana tersebut.
- c. Merencanakan alokasi belanja hibah, belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa, belanja tidak terduga, berdasarkan prioritas pembangunan daerah, serta disesuaikan dengan ketersediaan dana dan pemenuhan prioritas kebutuhan belanja urusan wajib.
- d. Melakukan optimalisasi terhadap belanja akibat tidak tercapainya asumsi penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2023.
- e. Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama.
- f. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA yang bersifat terikat, yaitu sisa DAK fisik dan DAK Non Fisik, serta pembayaran retensi kegiatan tahun 2023.

• **Target dan Realisasi Belanja**

Realisasi belanja daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.263.091.522.281,00 atau sebesar 89,92%, dengan rincian belanja sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84 Target dan Realisasi Capaian Belanja Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	921.424.952.513,00	859.904.544.352,00	93,32
1.1	Belanja Pegawai	497.794.258.203,00	486.337.458.781,00	97,70
1.2	Belanja Barang dan Jasa	402.294.772.310,00	356.229.702.809,00	88,55
1.3	Belanja Bunga	1.200.000.000,00	61.216.762,00	5,10
1.4	Belanja Hibah	16.545.267.000,00	14.057.076.000,00	84,96
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.590.655.000,00	3.219.090.000,00	89,65
2	Belanja Modal	252.127.643.119,00	176.775.764.265,00	70,11
2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.590.715.443,00	26.132.310.851,00	94,71
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.505.009.260,00	46.453.623.188,00	90,19
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	164.135.543.809,00	95.432.433.322,00	58,14
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.896.374.607,00	8.757.396.904,00	98,44
3	Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	291.360.000,00	97,12
3.1	Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	291.360.000,00	97,12
4	Belanja Transfer	230.858.519.456,00	226.119.853.664,00	97,95

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4.1	Belanja Bagi Hasil	7.186.075.000,00	2.945.000.000,00	40,98
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	223.672.444.456,00	223.174.853.664,00	99,78
	Jumlah Belanja Daerah	1.404.711.115.088,00	1.263.091.522.281,00	89,92

Sumber : BPKAD Kabupaten Pesawaran, 2023

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah antara lain:

- a. Belanja bunga yang terealisasi menyesuaikan skema kerja sama pinjaman daerah dengan lembaga keuangan perbankan.
- b. Belanja modal aset tetap lainnya sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal aset tetap lainnya BOS yang tidak terealisasi pada Tahun 2022.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan belanja sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan agar penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan tepat waktu, efisien dan efektif.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi terkait dengan Petunjuk Teknis yang ada terkait dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

3) **Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

• **Kebijakan Pembiayaan**

Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya defisit dan surplus anggaran dalam penyusunan APBD. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran atau belanja. Untuk menutupi anggaran yang mengalami defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Ketika terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Adapun pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah dan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.

Kebijakan pembiayaan daerah mencakup dua sumber yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan arah kebijakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa Lebih Pengangggaran Tahun Lalu (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA diupayakan seminimal mungkin dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni maksimal dibawah 6 (enam) persen dari kebutuhan belanja dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara konsisten.
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagai upaya untuk menyeimbangkan struktur anggaran dan dalam rangka upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.
- 3) Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian dan tindak lanjut revitalisasi dan restrukturisasi kinerja serta Pembentukan BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

• **Target dan Realisasi Pembiayaan**

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.696.717.517,81 atau sebesar 52,32% yang bersumber dari SiLPA dan Pinjaman Daerah dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 1.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% untuk penyertaan modal daerah pada BUMD. Adapaun rincian pembiayaan daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.85 Target dan Realisasi Capaian Pembiayaan Daerah Tahun 2022

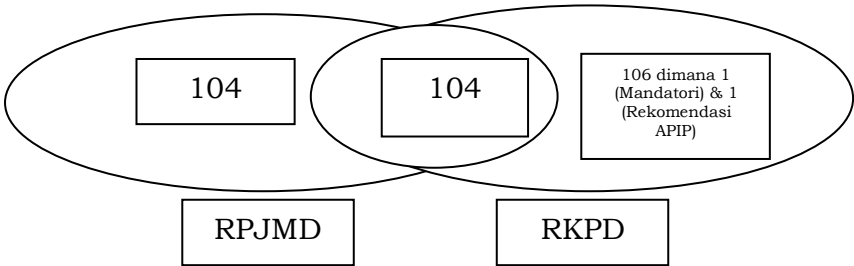
No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penerimaan Pembiayaan	94.982.804.720,60	49.696.717.517,81	52,32
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.982.804.720,60	14.981.874.117,81	99,99
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	80.000.000.000,00	34.714.843.400,00	43,39
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
2.1	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Pesawaran, 2023

2.2.2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022

A. Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dan RPJMD Tahun 2021-2026
Setelah dilakukan perbandingan antara RKPD Tahun 2022 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran 2021-2026, didapati bahwa jumlah Program dalam RPJMD sebanyak 104 Program. Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2022 sebanyak 104 Program dan 1 Program Mandatory sesuai kebijakan Pemerintah Pusat yakni Program Perlindungan Khusus Anak serta 1 Program Rekomendasi APIP sesuai Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 yakni Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Tidak terdapat perbedaan Program dalam RKPD Tahun 2022 yang berbeda dengan Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran 2021-2026. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan Program RKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran 2021-2026 telah mencapai 100 % artinya **tidak terdapat Program RKPD yang menyimpang** dari Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran 2021-2026.

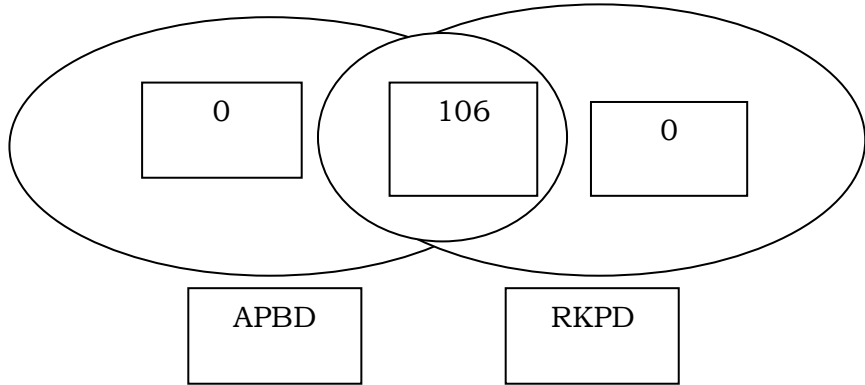
Gambar 2.42 Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dan RPJMD Tahun 2021-2026



B. Kesesuaian Jumlah Program Antara RKPD dan APBD Tahun 2022

Setelah dilakukan perbandingan antara RKPD dan APBD Tahun 2022, didapati bahwa jumlah Program dalam RKPD Tahun 2022 sebanyak 106 Program. Jumlah Program dalam APBD Tahun 2022 sebanyak 106 Program. Tidak terdapat Program dalam APBD Tahun 2022 yang berbeda dengan Program dalam RKPD Tahun 2022. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan Program APBD Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022 sudah mencapai 100%, artinya tidak ada Program APBD yang menyimpang dari Program RKPD.

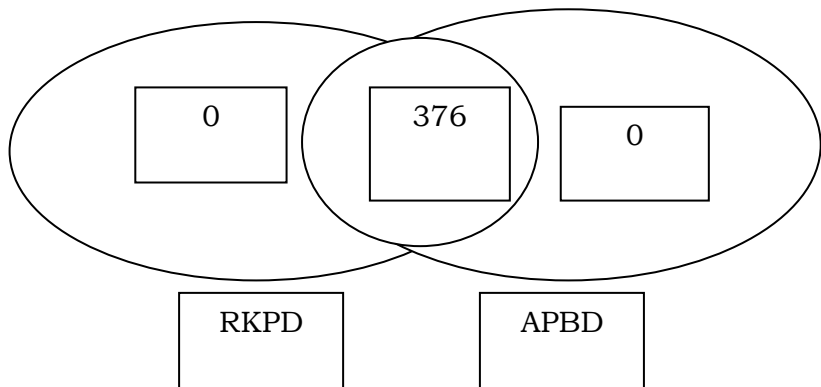
Gambar 2.43 Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD dan APBD Tahun 2022



C. Kesesuaian Jumlah Kegiatan Antara RKPD dan APBD Tahun 2022

Setelah dilakukan perbandingan antara RKPD dengan APBD Tahun 2022, didapat jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 sebanyak 376 Kegiatan, sedangkan jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2022 sebanyak 376 kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselarasan dokumen Perencanaan dan Penganggaran sudah baik.

Gambar 2.44 Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2022



Tingkat capaian kinerja program prioritas RKPD adalah rasio capaian kinerja dan anggaran program prioritas bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. kategori pencapaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.86 Kategori Pencapaian Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil evaluasi Tabel T-C.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Pesawaran didapatkan secara rata-rata Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 baik capaian kinerja program maupun penyerapan dana masuk ke dalam predikat **SANGAT TINGGI (93,64%)**, hal ini dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87 Rekapitulasi Tabel T-C.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Pesawaran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144	Bln	5.412.695.500	108	3.966.081.000	16	27.129.500	16	27.129.500	100	100	124	3993210500	86	74	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72	Bln	100.800.000	60	81.968.000	4	19.129.500	4	19.129.500	100	100	64	101.097.500	89	100	
	1.01.01.2.01.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72	Bln	5.311.895.500	48	3.884.113.000	12	8.000.000	12	8.000.000	100	100	60	3.892.113.000	83	73	
													100,00	100,00			86,11	86,78	
																	T	T	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Tersediaan Jasa Administrasi Keuangan	504	Bln	5.904.983.250	347	4.275.796.700	84	464.596.000	84	463.962.064	100	100	431	4739758764	86	80	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
	1.01.01.2.06.01	Tersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	72	Bln	100.800.000	60	81.968.000	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100	72	91.968.000	100	91	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Bangunan Kantor yang Disediakan																
	1.01.01.2.06.02	Tersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	Bln	5.311.895.500	48	3.884.113.000	12	30.000.000	12	30.000.000	100	100	60	3.914.113.000	83	74	
	1.01.01.2.06.03	Tersediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	72	Bln	163.535.500	48	69.111.500	12	15.400.000	12	15.400.000	100	100	60	84.511.500	83	52	
	1.01.01.2.06.04	Tersediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	Bln	98.639.050	48	70.004.200	12	159.500.000	12	159.500.000	100	100	60	229.504.200	83	17	
	1.01.01.2.06.05	Tersediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	Bln	62.999.000	48	30.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	100	100	60	55.000.000	83	87	
	1.01.01.2.06.06	Tersediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Bln	55.814.200	48	30.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	100	100	60	65.000.000	83	116	
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Bln	111.300.000	47	110.600.000	12	189.696.000	12	189.062.064	100	100	59	299.662.064	82	19	
													100,00	99,95			85,52	65,31	
													ST	ST			T	S	
	1.01.01.2.07	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		72	Bln	100.000.000	48	43.870.000	12	204.438.000	11	196.933.950	92	96	59	240.803.950	82	241	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
	1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72	Bln	100.000.000	48	43.870.000	12	204.438.000	11	196.933.950	92	96	59	240.803.950	82	24	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
												91,67	96,33			81,94	23,50		
												ST	ST			T	SR		
	1.01.01.2.08	Tersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		14 4	Bln	142978000	96	126300000	24	2.196.600.000	21	1.871.245.239	88	85	117	1997545239	81	1.397	Dinas Pendi kan dan kebuda yaan
	1.01.01.2.08.0 2	Tersediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Bln	22.478.000	48	15.600.000	12	73.600.000	11	53.245.239	92	72	59	68.845.239	82	20	
	1.01.01.2.08.0 4	Tersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Bln	120.500.000	48	110.700.000	12	2.123.000.000	10	1.818.000.000	83	86	58	1.928.700.00 0	81	14	
												87,50	78,99			81,25	17,40		
	1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14 4	Bln	176815000	96	133782000	24	518392000	20	451.059.780	83	87	116	584.841.780	81	331	Dinas Pendi kan dan kebuda yaan
	1.01.01.2.09.0 2	Tersediaan Jasa Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	72	Bln	56.315.000	48	35.760.000	12	276.392.000	9	221.401.180	75	80	57	257.161.180	79	39	
	1.01.01.2.09.1 0	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	72	Bln	120.500.000	48	98.022.000	12	242.000.000	11	229.658.600	92	95	59	327.680.600	82	27	

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.	14 = 6 + 12		K	Rp.	16
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								0	-							
													83,33	87,50			40,28	16,43	
													T	T			SR	SR	
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		4993	-	342.393.223.000	2055	69.607.462.000	59503	139.306.534.900	59235	115.998.953.548	90	71	61290	185606415548	104	49	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
	1.01.02.2	Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar		1573		196.130.414.500	700	11.509.640.000	42369	93.335.971.600	42287	78.885.016.181	100	85	42987	90394656181	2.733	46	
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - SD	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	60	lokal	16.987.071.000	40	110.390.000	20	400.230.000	20	399.810.000	100	100	60	510.200.000	100	3	
	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - SD	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	60	Unit	18.187.246.800	40	230.000.000	20	1.341.305.000	20	1.339.272.100	100	100	60	1.569.272.100	100	9	
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah - SD	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	744	Unit	35.293.844.000	320	578.700.000	100	909.000.000	100	908.178.000	100	100	420	1.486.878.000	56	4	
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	240	Unit	21.249.616.200	120	203.970.000	100	9.285.985.000	94	9.025.608.000	94	97	214	9.229.578.000	89	43	
	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas - SD	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	96	lokal	18.608.585.000	40	782.000.000	50	6.379.357.000	46	6.096.643.961	92	96	86	6.878.643.961	90	37	
	1.01.02.2.01.17	Pengelolaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	60	Unit	15.156.564.000	30	238.000.000	40	552.500.000	39	548.489.520	98	99	69	786.489.520	115	5	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	1.01.02.2.01.2 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - SD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	78	Unit	19.338.720.000	30	382.700.000	60	7.960.000.000	0	-	-	-	30	382.700.000	38	2	
	1.01.01.02.2.0 1.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggara kan Proses Belajar dan Ujian	60	Unit	17.860.330.000	20	2.782.090.00 0	30	285.650.000	30	285.650.000	100	100	50	3.067.740.00 0	83	17	
	1.01.01.02.2.0 1.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik	60	Peser ta	15.966.273.700	20	5.670.990.00 0	30	34.000.000	24	28.000.000	80	82	44	5.698.990.00 0	73	36	
	1.01.01.02.2.0 1.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golon gan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60	Peser ta	15.554.626.850	20	190.800.000	20	26.105.940.000	15	20.171.590.000	75	77	35	20.362.390.0 00	58	131	
	1.01.02.2.01.2 8.	Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah SD	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	55	Peser ta	1.927.536.950	20	340.000.000	20	138.304.600	20	138.304.600	100	100	40	478.304.600	73		
	1.01.02.2.01.2 9.	Pengelolaan Danas BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						418 79	39.943.700.000	418 79	39.943.470.000							
													85,32	86,48			79,67	26,11	
													T	T			T	SR	
	1.01.02.2	Pengelolaan Pendidikan sekolah menengah Pertama		13 38		144.821.647.0 00	60 0	57.260.768.0 00	163 79	34.530.338.10 0	162 72	33.810.320.667	99	98	168 72	9107108866 7	1.261	63	Dinas Pendi kan dan kebuda yaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	1.01.02.2.02.1 2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah	60	lokal	16.987.071.000	20	1.230.000.000	20	16.623.517.600	19	15.923.887.367	95	96	39	17.153.887.367	65	101	
	1.01.02.2.02.2 8	Pengelolaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa	60	Unit	18.187.246.800	20	2.300.900.000	60	1.439.299.000	60	1.438.341.800	100	100	80	3.739.241.800	133	21	
	1.01.02.2.02.3 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	74 4	Unit	35.293.844.000	35 0	2.309.090.000	744	53.080.000	641	45.050.000	86	85	991	2.354.140.000	133	7	
	1.01.02.2.02.3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	24 0	Unit	21.249.616.200	12 0	15.400.000.000	240	89.900.000	240	89.900.000	100	100	360	15.489.900.000	150	73	
	1.01.02.2.02.3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	96	lokal	18.608.585.000	30	12.000.998.000	96	40.000.000	96	40.000.000	100	100	126	12.040.998.000	131	65	
	1.01.02.2.02.4 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60	Unit	15.156.564.000	30	13.009.890.000	60	444.735.500	58	439.735.500	97	99	88	13.449.625.500	147	89	
	1.01.02.2.02.4 1.	Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah SMP	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	78	Unit	19.338.720.000	30	11.009.890.000	30	440.206.000	29	433.806.000	97	99	59	11.443.696.000	76	59	
	1.01.02.2.02.4 2.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						151 29	15.399.600.000	151 29	15.399.600.000	100	100	151 29	15.399.600.000			
													96,81 ST	97,25 ST			119,30 ST	59,10 R	
	1.01.02.2.	Pengelolaan Pendidikan anak usia Dini (PAUD)		18 72		1.241.161.500	61 0	738.989.000	610	10.265.225.200	91	714.585.000	15	7	701	1453574000	37	117	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
	1.01.02.2.03.0 3.	Rehabilitasi Sedang,Berat Gedung,Ruang Kelas,Ruang Guru PAUD	Terpenuhinya Rehab gedung	50	Unit	536.000.000	30	231.000.000	30	651.693.000	29	635.931.500	97	98	59	866.931.500	118	162	
	1.01.02.2.03.1 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	30 0	Unit	200.000.000	12 0	122.000.000	120	1.868.400.000	120	1.863.265.000	100	100	240	1.985.265.000	80	89	

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	1.01.02.2.03.1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terpenuhi Penyelenggaraa n Proses Belajar PAUD	12 00	peser ta	405.161.500	23 7	340.989.000	237	7.695.775.200	180	465.163.200	76	6	417	806.152.200	35	18	
	1.01.02.2.03.1 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidik PAUD	Terpenuhi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidik PAUD	32 2	peser ta	100.000.000	22 3	45.000.000	223	49.357.000	223	49.357.000	100	100	446	94.357.000	139	94	
													93	76			93	91	
												-	ST	T			ST	ST	
	1.01.02.2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keset araan		21 0		200.000.000	14 5	98.065.000	145	1.175.000.000		-	-	-	145	98.065.000	69	49	Dinas Pendi kan dan kebuda yaan
	1.01.02.2.04.1 2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetar aan	Terselenggara Penyelenggaraa n Proses Belajar Nonformal/Kes etaraan	21 0	Kec	200.000.000	14 5	98.065.000	145	1.175.000.000	120	289.900.000	83	25	265	387.965.000	126	19	
													83 T	25 SR			126 ST	19 SR	
	1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		80		600.000.000	20	120.000.000	16	100.000.000	16	100.000.000	400	400	36	220.000.000	180	147	Dinas Pendi kan dan kebuda yaan
	1.01.05.2.01.0 1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggara n oleh Masyarakat	20	Dok	125.000.000	5	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	100	100	9	50.000.000	45	40	
	1.01.05.2.01.0 2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	20	Dok	175.000.000	5	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	100	100	9	70.000.000	45	40	

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																
	1.01.05.2.01.0 3	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20	Dok	125.000.000	5	25.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	100	100	9	45.000.000	45	36	
	1.01.05.2.01.0 4	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20	Dok	175.000.000	5	35.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	100	100	9	55.000.000	45	31	
													100	100,00			45,00	36,86	
													ST	ST			SR	SR	
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		63 6		437.549.200	34 6	628.450.000	6	592.869.200	0	-	-	200	346	628.450.000	109	32	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
	2.22.02.2.02	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah	36	oran g	211.260.000	30 8	366.580.000	3	366.580.000	0	-	16,00	100,00	308	366.580.000	71,11	17,80	
		Perlindungan , Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Perlindungan , Pengembangan, Pemanfaatan Obyek	60 0	sang grar	226.289.200	38	261.870.000	3	226.289.200	0	-	100,00	99,57	38	261.870.000	37,60	14,40	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Pemajuan Tradisi Budaya																
Rata-rata capaian kinerja (%)													58,00	99,79			54,36	16,10	
Predikat kinerja													R	ST			R	SR	
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		24 00		370.127.079	39 5	994.914.385	100 0	884.000.000	960	878.430.000	175	164	135 5	1873344385	147	100	Dinas Pendi kan dan kebuda yaan
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggara Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	12 00	oran g	220.127.079	20	914.324.385	500	442.000.000	480	439.265.000	75,00	66,51	500	1.353.589.38 5	72,22	43,20	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	12 00	sang rar	150.000.000	37 5	80.590.000	500	442.000.000	480	439.165.000	100,00	97,96	855	519.755.000	75,00	56,93	
Rata-rata capaian kinerja (%)													87,50	82,24			73,61	50,06	
Predikat kinerja													T	T			S	R	
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		70 0		398.410.000	48 0	207.270.000	12	474.809.500	12	474.809.500	220	300	492	682.079.500	166	253	Dinas Pendi kan dan kebuda yaan
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budya Peringkat Kabupaten/kota	Penetapan Cagar Budya Peringkat Kabupaten/kot a	70	WBT B	103.410.000	60	58.200.000	4	36.300.000	4	36.300.000	20,00	100,00	64	94.500.000	53,67	59,58	
	2.22.05.2.01.0 1	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	60 0	peser ta	100.000.000	40 0	58.200.000	4	36.300.000	4	36.300.000	100,00	100,00	404	94.500.000	56,33	96,96	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	30	peser ta	195.000.000	20	90.870.000	4	402.209.500	4	402.209.500	100,00	100,00	24	493.079.500	56,33	96,96	
	2.22.05.2.02.0 1																		
Rata-rata capaian kinerja (%)													73,33	100,00			55,44	48,48	
Predikat kinerja													S	ST			R	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										190.165.122.90 0		154.887.429.248							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)													93,15	85,77			62,33	45,02	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)												ST	T			ST	SR	

No	Kode		Urusan/Bidang Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab		
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4		5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
1			Urusan Pemerintah an Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					88.865.529,86		90.827.224											
1	0	2.	Urusan Pemerintah an Bidang Kesehatan					88.865.529,86		90.827.224											
1	0	2.	0	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten /Kota	100	Persen	238.575.842,5 8	1 1 0	30.446.208,03	12 1	44.881.307	12 1	29.596.763,81	100,00	65,94	23 1	60.042.972	231	25,17	Dinkes
1	0	2.	0	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	150.000,00	3	12.650,00	3	25.000	3	25.000,00	100,00	100,00	6	37.650	6	25,10	
1.	0	2.	0	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	60.000	1	9.875	1	10.000	1	10.000	100,00	100,00	2	19.875,00	33,33	33,13	
1.	0	2.	0	1.	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	12	Dokumen	90.000	2	2.775	2	15.000	2	15.000	100,00	100,00	4	17.775,00	33,33	19,75	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	100,00			33,33	26,44			
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR			
1	0	2.	0	1.	Administra si Keuangan	100	persen	1.605.840,00	1 4	286.790,00	14	267.640	14	231.640,00	100,00	86,55	28	518.430	28	32,28	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perangkat Daerah																
1.	02.	01.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Pengelola Keuangan Dinas Kesehatan	72	bulan		1.515.840	12		252.640	216.640	100,00	85,75	24	488.430	33,33	32,22	
1.	02.	01.	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	12	laporan		90.000	2		15.000	15.000	100,00	100,00	4	30.000	33,33	33,33	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	92,88			33,33	32,78	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
1.	02.	01.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum pada Dinas Kesehatan	100	persen		1.254.000	59		139.315,60	195.515	100,00	100,00	118	334.831	118	26,70	
1.	02.	01.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Sekretariat Dinas Kesehatan	72	bulan		120.000	12		20.975	20.975	100,00	100,00	24	40.975	33,33	34,15	
1.	02.	01.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	72	bulan		120.000	12		25.000	25.000	100,00	100,00	24	45.000	33,33	37,50	
1.	02.	01.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian dan Buku Perundang-Undangan	72	bulan		216.000	12		36.000	36.000	100,00	100,00	24	47.000	33,33	21,76	
1.	02.	01.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Rapat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	66	bulan		390.000	11		45.540	45.540	100,00	100,00	22	110.540	33,33	28,34	
1.	02.	01.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Kepala Dinas, Sekretaris dan Sub Bagian Sekretariat Dinas Kesehatan	72	bulan		408.000	12		68.000	68.000	100,00	100,00	24	91.316	33,33	22,38	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			33,33	28,83	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
1	0	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang pada Dinas Kesehatan	100	persen	169.590	5	13.350	2	28.085	2	28.085,00	100,00	100,00	7	41.435	7	24,43	
0	1.	0	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Sofa Ruangan Kepala Dinas Kesehatan	5	unit	89.490	0	-	1	14.915	1	14.915	100,00	100,00	1	14.915	20,00	16,67	
0	1.	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Personal Computer (PC), peralatan Printer, AC, Wireless dan Awning parkir Dinas Kesehatan	30	unit	80.100	5	13.350	1	13.170	1	13.170	100,00	100,00	6	26.520	20,00	33,11	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			20,00	24,89	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
1	0	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	100	persen	216.000	1	31.671	12	48.000	12	41.588,60	100,00	86,64	24	73.260	24	33,92	
1.	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya jasa listrik pada Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi	72	bulan	216.000	12	31.671	12	48.000	12	41.589	100,00	86,64	24	73.260	33,33	33,92	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	86,64			33,33	33,92	
Predikat kinerja														ST	T			SR	SR	
1	0	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah pada Dinas Kesehatan	100	persen	1.552.466	5	124.440	7	258.744	7	256.713,00	100,00	99,21	12	381.153	12	24,55	
1.	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas Kesehatan	30	unit	1.477.466	5	124.440	5	246.244	5	244.213	100,00	99,18	10	368.653	33,33	24,95	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16				
			Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
1.	02.	01.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Kesehatan	12	unit	75.000	0	-	2	12.500	2	12.500	100,00	100,00	2	12.500	16,67	16,67
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	99,59			25,00	20,81	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
1.	02.	01.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	persen	233.627.947	12	29.837.991	24	44.058.322,4	24	28.818.222,21	100,00	65,41	36	58.656.213	36	25,11
1.	02.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (13 Puskesmas)	72	bulan	179.027.947	12	29.837.991	12	25.524.148,323	12	12.754.676	100,00	49,97	24	42.592.667	33,33	23,79
				Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan JKN di RSUD	72	bulan	54.600.000	0	-	12	18.534.174	12	16.063.546	100,00	86,67	12	16.063.546	16,67	29,42
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	68,32			25,00	26,61	
Predikat kinerja													ST	S			SR	SR	
1.	02.	02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	Persen	599.928.081	482	50.749.701	220	37.816.877	0	29.025.977,109	-	76,75	482	79.775.678	482	13,30
1.	02.	02.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan	100	persen	297.230.923	165	8.150.663	181	6.438.478	175	6.113.223,04	96,69	94,95	340	14.263.886	340	4,80

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	kesehatan secara optimal															
1.	02.	02.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) LB3 Cold Storage	2	Unit		100.000.000	1	373.975	0	-	-	-	1	373.975	50,00	0,37	
				Jumlah Pembangunan Rumah sakit tipe D beserta sarana dan prasarana pendukungnya	2	unit		100.000.000	0	-			-	-	0	-	-	-	
1.	02.	02.	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	26	paket		37.843.299	1	2.223.956	7	672.203	7	670.932	8	2.894.888	30,77	7,65	
				Jumlah Peralatan Kantor rumah sakit	16	paket		1.274.162	0	-	1	-	0	-	0	-	-	-	
				Jumlah Ketersediaan Tempat pembuangan sampah (TPS) LB3 Cold Storage, instalasi jaringan air PDAM, pembangunan ruang bedah sentral	5	Unit		9.654.500	0	-	1	-	1	-	1	-	20,00	-	
1.	02.	2.	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pembangunan peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	2	unit		10.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	
1.	02.	02.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi bangunan rumah sakit (gedung rawat inap)	5	unit		4.450.000	1	52.063	1	99.100	1	97.273	2	149.336	40,00	3,36	
				Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit	21	kali		285.000	0	-	5	-	4	-	4	-	19,05	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			K
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
				Jumlah pemeliharaan Instalasi Listrik Rumah Sakit	72	bulan	145.000		12	-	12	-	12	9.568	100,00	-	24	9.568	33,33	6,60	
				Jumlah Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	48	kali	120.000		0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	
				Jumlah Pemeliharaan perlengkapan rumah sakit	72	bulan	775.000		0	-	12	-	12	-	100,00	-	12	-	16,67	-	
1.	02.	02.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah pemeliharaan puskesmas	6	pkm	630.000		0	-	2	-	0	-	-	-	0	-	-	-	
1.	02.	02.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Pustu	4	pustu	400.000		1	1.902.420	0	-	0	-	-	-	1	1.902.420	25,00	475,61	
1.	02.	02.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan pusling rawat inap dan rawat jalan	9	unit	2.854.135		3	150.840	0	-	0	-	-	-	3	150.840	33,33	5,28	
				Jumlah Pengadaaan Ambulance	6	unit	3.022.025		0	-	1	605.000	1	605.000	100,00	100,00	1	605.000	16,67	20,02	
1.	02.	02.	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan alat kesehatan dipuskesmas dan jaringannya	9	paket	11.112.080		4	269.811	4	381.007	4	339.264	100,00	89,04	8	609.075	88,89	5,48	
				Jumlah monitoring evaluasi pertemuan aspak	6	kali	381.306		0	-	1	-	1	-	100,00	-	1	-	16,67	-	
1.	02.	02.	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin dipuskesmas dan jaringannya	600	item	23.657.021		100	1.800.158	100	2.906.015	100	2.738.441	100,00	94,23	200	4.538.599	33,33	19,18	
				jumlah distribusi obat dan logistik	72	bulan	915.765		12	-	4	-	2	-	50,00	-	14	-	19,44	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab						
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.			K	Rp. (000)		K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16						
1.	0	0	0	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai di Puskesmas (DAK dan APBD)	180	item	6.939.986		30	1.377.440		30	1.775.153		30	1.652.744		100,00	93,10	60	3.030.184		33,33	43,66	
Rata-rata capaian kinerja (%)														83,33	95,72			79,41	97,87							
Predikat kinerja														T	ST			T	ST							
1.	0	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	persen	302.204.854		315	42.564.038		0,00	31.337.995		0	22.872.350,07		#DIV/0!	72,99	0	65.436.388		-	21,65	
1.	0	0	0	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Pertemuan Peningkatan Pelayanan kesehatan pada ibu hamil	6	kali	46.240		1	6.100		1	10.000		1	10.000		100,00	100,00	2	16.100		33,33	34,82	
1.	0	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran	6	RTK	13.100.645		1	1.906.407		3	339.450		2	52.250		66,67	15,39	3	1.958.657		50,00	14,95	
1.	0	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pertemuan dalam rangka validasi data pelayanan kesehatan (deteksi dini penyakit tidk menular) pada usia produktif berbasis web	22	kali	56.100		1	6.100		4	10.000		4	10.000		100,00	100,00	5	16.100		22,73	28,70	
1.	0	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Pertemuan peningkatan pengetahuan kader lansia diwilayah kabupaten pesawaran	6	Kali	75.000		1	10.000		1	10.000		1	10.000		100,00	100,00	2	20.000		33,33	26,67	
1.	0	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kasus Hipertensi di Masyarakat	88	pkm	340.400		14	17.750		14	20.000		14	20.000		100,00	100,00	28	37.750		31,82	11,09	
1.	0	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengelolaan pelayanan	88	pkm	166.100		14	19.200		14	20.000		14	20.000		100,00	100,00	28	39.200		31,82	23,60	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16				
			Penderita Diabetes Miletus	kesehatan kasus Diabetes Mellitus (DM) di Masyarakat															
1.	0 2.	0 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kasus dan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar terhadap ODGJ	88	pkm	164.000	14	23.700	14	20.000	14	20.000	100,00	100,00	28	43.700	31,82	26,65
1.	0 2.	0 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan pada orang dengan terduga TBC disemua layanan kesehatan	90	Pkm dan RS	170.000	15	20.000	15	20.000	15	20.000	100,00	100,00	30	40.000	33,33	23,53
1.	0 2.	0 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada orang dengan resiko Terinfeksi HIV disemua layanan kesehatan	75	pkm dan RS	200.000	0	-	15	20.000	15	20.000	100,00	100,00	15	20.000	20,00	10,00
1.	0 2.	0 2.	Penggelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	72	bulan	22.260.000	12	5.024.116	12	2.288.000	12	2.286.786	100,00	99,95	24	7.310.901	33,33	32,84
1.	0 2.	0 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Gizi Buruk di tangani	24	blita gizi buruk	149.890.000	1	16.658	5	53.273	5	53.273	100,00	100,00	6	69.931	25,00	0,05
				Jumlah Balita Gizi kurang yang mendapat PMT	420	balita BGM		0	-	35	-	35	-	100,00	-	35	-	8,33	-
				Jumlah Ibu Hamil KEK yang mendapat PMT	300	ibu hamil KEK		0	-	50	-	0	-	-	-	0	-	-	-
1.	0 2.	0 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan	75	pkm	152.628	15	-	15	20.000	15	20.000	100,00	100	30	20.000	40,00	13

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Kerja dan Olahraga	Kesehatan Kerja Dasar																
				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olahraga	75	pkm	152.628	0	-	15	-	15	-	100,00	-	15	-	20,00	-	
				Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah Puskesmas	75	pos	109.650	0	-	5	-	5	-	100,00	-	5	-	6,67	-	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Olahraga bagi anak SD	75	pkm	162.750	0	-	15	-	1	-	6,67	-	1	-	1,33	-	
				Jumlah Calon Jamaah Haji yang diperiksa kebugarannya	750	orang	152.628	0	-	150	-	150	-	100,00	-	150	-	20,00	-	
1.	0 2.	0 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa ODF	70	desa	600.000	33	30.796	10	25.000	10	25.000	100,00	100,00	43	55.796	61,43	9,30	
				jumlah sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	180	lokasi	152.628	0	-	30	-	21	-	70,00		21	-	11,67		
				jumlah pembinaan fasyankes (Rs dan PKM) yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	75	pkm dan RS	122.102	0	-	15	-	15	-	100,00		15	-	20,00		
				jumlah peembinaanTemp at dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	90	lokasi	122.102	0	-	15	-	15	-	100,00		15	-	16,67		
1.	0 2.	0 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri,	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	20	pkm	130.000	0	-	2	-	0	-	-	-	0	-	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			dan Tradisional Lainnya																
1.	02.	02.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah pelayanan pada hari-hari besar dan Pelayanan Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan, PMI	780	posko	1.074.050	12	213.750	130	249.000	130	249.000	100,00	100,00	142	462.750	18,21	43,08
				Jumlah Peserta Sunatan Massal	570	anak	420.000	0	-	100	-	0	-	-	-	0	-	-	-
1.	02.	02.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Jumlah Larvaciding, Pemeriksaan darah Malaria, Pengangkatan lumut dan Penyemprotan Rumah	192	lokasi	1.175.000	40	46.000	32	50.000	32	50.000	100,00	100,00	72	96.000	37,50	8,17
				Jumlah Penyemprotan / Fogging sarang nyamuk	1350	focus	1.000.000	0	-	40	-	40	-	100,00	-	40	-	2,96	-
1.	02.	02.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (dinkes dan pkm gunung sari)	Jumlah pasien BPJS yang dilayani di RSUD , (57.479) jiwa	72	bulan	81.140.000	12	25.472.032	12	16.558.237	12	9.118.070	100,00	55,07	24	34.590.102	33,33	42,63
				jumlah masyarakat yang ditanggung jamkesda	227500	jiwa	135.640.000	0	-	30000	-	52999	-	176,66		52999	-	23,30	-
				jumlah bantuan jasa pelayanan kesehatan peserta tidak mampu yang tidak memiliki JKN	7500	jiwa		0	-	1100	-	1711	-	155,55		1711	-	22,81	
				jumlah bantuan transportasi dan akomodasi pendamping pasien	1950	jiwa		0	-	250	-	56	-	22,40		56	-	2,87	
1.	02.	02.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rumah Sakit	72	kali	809.218	12	6.630.201	12	9.210.267	12	8.946.622	100,00	97,14	24	15.576.823	33,33	1.925

N o	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
				Jumlah pencetakan administrasi dan surat menyurat, list pasien dan labeling rumah sakit	72	kali	537.500	12	-	12	-	12	-	100,00	-	24	-	33,33	-	
				Jumlah pemeliharaan ambulance dan mobil jenazah	72	kali	596.750	12	-	12	-	12	-	100,00	-	24	-	33,33	-	
				Jumlah Obat-Obatan, BMHP dan Bahan Reagen Laboratorium & Radiologi, Obat Hemodialisa	72	kali	793.023.000	12	-	12	-	12	-	100,00	-	24	-	33,33	-	
				Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan Gizi Pasien Rawat Inap serta Petugas Shift Malam RSUD	72	kali	5.131.620	12	-	12	-	12	-	100,00	-	24	-	33,33	-	
				Terpenuhinya SDM dr umum, spesialis dan dokter gigi RSUD	72	kali	22.996.000	12	-	12	-	12	-	100,00	-	24	-	33,33	-	
				Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	72	kali	2.340.000	12	-	12	-	12	-	100,00	-	24	-	33,33	-	
				Jumlah Pelatihan Kesehatan bagi tenaga medis RSUD	34	kali	327.000	0	-	5	-	5	-	-	-	5	-	14,71	-	
				Jumlah Pelatihan Kesehatan bagi tenaga paramedis RSUD	30	kali	327.000	0	-	6	-	6	-	-	-	6	-	20,00	-	
				Jumlah survei kepuasan pasien RSUD	20	kali	368.000	0	-	4	-	4	-	-	-	4	-	20,00	-	
				Jumlah promosi kesehatan kepada pengunjung RSUD	120	kali	368.000	0	-	24	-	0	-	-	-	0	-	-	-	
				Jumlah kegiatan PPI RSUD	5	paket	621.000	0	-	1	-	1	-	-	-	0	-	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1.	0 2.	0 2.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Puskesmas	88	pkm	18.120.000	12	2.801.513	12	2.367.455	12	1.894.037	100,00	80,00	24	4.695.549	27,27	25,91	
1.	0 2.	0 2.	Operasional Pelayanan Puskesmas (Gunung Sari)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Puskesmas	6	pkm	5.065.746	0	-	12	-	12	-	100,00	-	12	-	200,00	-	
1.	0 2.	0 2.	Pelaksanaa n Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Akreditasi di Kabupaten Pesawaran.	10	pkm	1.662.081.708	5	285.998	0	-	0	-	-	-	5	285.998	50,00	0,02	
				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Re-Akreditasi di Kabupaten Pesawaran.	33	pkm	-	0	-	8	-	0	-	-	-	0	-	-	-	
1.	0 2.	0 2.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (KIPI)	88	pkm	170.000	14	13.400	14	21.240	14	21.240	100,00	100,00	28	34.640	31,82	20,38	
1.	0 2.	0 2.	Pelaksanaa n Kewaspadaa n Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kegiatan Pelaksananan Kewaspadaan Dini dan respon Wabah	88	pkm	370.000	14	20.318	14	26.073	14	26.073	100,00	100,00	28	46.391	31,82	12,54	
Rata-rata capaian kinerja (%)														93,65	87,98			31,49	46,90	
Predikat kinerja														ST	T			SR	SR	
1 .	0 2.	0 2.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegras i	Persentase cakupan pengelolaan data dan informasi kesehatan	100	Persen	427.204	2	35.000	3	29.604	3	29.604,00	100,00	100,00	5	64.604	5	15,12	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1.	02.	02.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	jumlah Dokumen Profil Kesehatan Kabupaten Pesawaran	6	Dokumen 302.600	2	35.000	2	23.083	2	23.083	100,00	100,00	4	58.083	66,67	19,19	
1.	02.	02.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Sisten Informasi Puskesmas (SIP)	6	laporan 135.000	0	-	1	6.521	1	6.521	100,00	100,00	1	6.521	16,67	4,83	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	100,00			41,67	12,01	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
1.	02.	02.	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase FKTP sesuai standar	100	Persen 65.100	0	-	36	10.800	36	10.800,00	100	100	36	10.800	36	17	
1.	02.	02.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah pembinaan n di fasyankes (RS, Puskesmas, Klinik, Bidan Praktek mandiri, Dokter Praktek Mandiri, apotek, dan Optik) di Kabupaten Pesawaran	76	Fasyankes 91.080	0	-	36	10.800	36	10.800	100,00	100,00	36	10.800	47,37	11,86	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	100,00			47,37	11,86	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
1.	02.	03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	9	Persen 37.487.411	14	5.844.800	38	6.339.236	38	6.339.236,00	100,00	100,00	52	12.184.036	568	32,50	
1.	02.	03	Pemberian Izin Praktik Tenaga kesehatan Di wilayah Kabupaten /Kota	Persentase Tenaga kesehatan teregistrasi	23	Persen 141.561	0	-	24	16.986	24	16.986,00	100,00	100,00	24	16.986	104	12,00	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			K
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
1.	0	0	Pengendalia n izin Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga kesehatan teregistrasi	140	orang	149.575	0	-	24	16.986	24	16.986	100,00	100,00	24	16.986	17,14	11,36		
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			17,14	11,36		
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR		
1.	0	0	Perencanaa n Kebutuhan dan Pendayaag unaan Sumberday a Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota	Persentase Puskesmas dengan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	100	Persen	37.193.600	1	2	5.824.000	12	6.305.000	12	6.305.000,00	100,00	100,00	24	12.129.000	24	32,61	
1.	0	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM tenaga home care, tenaga kontrak RSUD, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan	72	bulan	37.053.600	12	5.824.000	12	6.305.000	12	6.305.000	100,00	100,00	24	12.129.000	33,33	32,73		
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			33,33	32,73		
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR		
1.	0	0	Pengemban gan mutu dan peningkata n kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten / Kota.	Persentase cakupan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan	100	Persen	152.250	2	20.800	2	17.250	2	17.250,00	100,00	100,00	4	38.050	4	24,99		
1.	0	0	Pengemban gan mutu dan peningkatan kompetensi teknis	jumlah sosialisasi dan penilaian dupak pada jabatan fungsional	12	Semester	160.000	2	20.800	2	17.250	2	17.250	100,00	100,00	4	38.050	33,33	23,78		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota.	kesehatan Keluaran															
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	100,00			33,33	23,78	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
1.	02.	04.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rasio Puskesmas, Poliklinik, puskesmas per satuan penduduk	7	Persen	1.223.410	60	464.660	81	406.876	36	406.876,00	44,44	100,00	96	871.536	1.410	71,24
1.	02.	04.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Persentase PIRT yang memiliki SPP-IRT	100	Persen	996.308	30	441.610	36	406.876	36	406.876,00	100,00	100,00	66	848.486	66	85,16
1.	02.	04.	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikasi produksi pangan, industri rumah tangga dan nomor PIRT	Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi sarana PIRT dan pembinaan ke sarana	174	sarana	903.522	30	441.610	36	406.876	36	406.876	100,00	100,00	66	848.486	37,93	93,91

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga																
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	100,00			37,93	93,91	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
1.	02.	04.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase cakupan tempat pengelolaan makanan dan DAM yang memenuhi syarat kesehatan	100	Persen	125.000	30	23.050	45	-	0	-	-	30	23.050	30	18,44	
1.	02.	04.	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah rumah makan/restoran/depot air minum yang memenuhi syarat kesehatan	390	Sarana	125.000	30	23.050	45	-	45	-	-	75	23.050	19,23	18,44	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-			19,23	18,44			
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR			
1.	02.	05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	88	Persen	9.752.216	13	1.360.161	18	1.382.928	18	1.382.928,00	100,00	100,00	31	2.743.089	35	28,13	
1.	02.	05.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran	100	Persen	960.000	1	22.603	4	24.770	4	24.770,00	100,00	100,00	5	47.373	5	4,93	
1.	02.	05.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lomba desa kesrak PKK-KB Kes, P3KSS Tingkat Provinsi dan Nasional	24	lomba	960.000	1	22.603	4	24.770	4	24.770	100,00	100,00	5	47.373	20,83	4,93	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00			20,83	4,93			
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR			
1.	02.	05.	Pelaksanaan Hidup Sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat	100	Persen	595.000	0	-	2	20.000	2	20.000,00	100,00	100,00	2	20.000	2	3,36	
1.	02.	05.	Penyelenggaran promosi kesehatan dan gerakan hidup	Jumlah pameran pembangunan tingkat Kabupaten Pesawaran	10	Kali	710.000	0	-	2	20.000	2	20.000	100,00	100,00	2	20.000	20,00	2,82	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16									
			bersih dan sehat																	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00			20,00	2,82			
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR			
1	02	05	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat Daerah kabupaten/kota	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat di posyandu	100	Persen	8.197.216	12	1.337.558	12	1.338.158	12	1.338.158,00	100,00	100,00	24	2.675.716	24	32,64	
1.	02	05	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	jumlah transport kader posyandu (2.220)	72	bulan	8.239.058	12	1.337.558	12	1.338.158	12	1.338.158	100,00	100,00	24	2.675.716	33,33	32,48	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00			33,33	32,48			
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										90.827.223,530		66.751.780,918								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														88,26	85,85			30,79	29,31	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														T	T			SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021-2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		2075	41.895.400.200	191	7.718.618.866	225	8.379.080.040	27	7.592.552.739	12	90,61	218	15.311.171.605	10,50	36,55	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021-2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		KABUPATEN / KOTA																
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										100	99,7 3			29,41	34,97	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya rencana strategis SKPD	200	43.850.000	2	8.770.000	12	8.770.000	12	8.700.000	100	99,2 0	14	17.470.000	7,00	39,84	Dinas PU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	42	737.253.000	12	37.450.000	7	147.450.600	7	147.450.600	100	100, 00	19	184.900.600	45,24	25,08	Dinas PU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Neraca Dinas Pekerjaan Umum	50	62.500.000	6	12.500.000	12	12.500.000	12	12.500.000	100	100, 00	18	25.000.000	36,00	40,00	Dinas PU
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										100	93,2 6			27,17	38,30	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	61	25.422.640.000	12	4.905.187.781	12	5.084.528.000	12	4.399.634.900	100	86,5 3	24	9.304.822.681	39,34	36,60	Dinas PU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	280	62.500.000	2	12.500.000	40	12.500.000	40	12.500.000	100	100, 00	42	25.000.000	15,00	40,00	Dinas PU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										75	99,9 8			35,00	40,00	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	60	134.500.000	12	26.900.000	12	26.900.000	9	26.893.850	75	99,9 8	21	53.793.850	35,00	40,00	Dinas PU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah										89	99,9 8			31,62	34,85	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	60	1.620.685.000	12	178.379.500	12	324.137.000	12	324.105.900	100	99,9 9	24	502.485.400	40,00	31,00	Dinas PU
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	60	478.710.000	7	33.742.000	12	95.742.000	12	95.742.000	100	100, 00	19	129.484.000	31,67	27,05	Dinas PU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021-2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	650	170.000.000	12	50.000.000	7	34.000.000	5	33.985.000	71	99,9 6	17	83.985.000	2,62	49,40	Dinas PU
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum	42	213.000.000	12	22.600.000	7	42.600.000	5	42.600.000	71	100, 00	17	65.200.000	40,48	30,61	Dinas PU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelancaran komunikasi dan tugas pegawai	120	884.810.000	40	143.189.998	12	176.962.000	12	176.891.734	100	99,9 6	52	320.081.732	43,33	36,18	Dinas PU
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerinta h Daerah										45	86,4 9			24,80	30,65	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	60	751.132.500	12	30.871.000	12	150.226.500	6	140.450.000	50	93,4 9	18	171.321.000	30,00	22,81	Dinas PU
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	102	406.923.000	12	91.921.000	20	81.384.600	8	64.690.000	40	79,4 9	20	156.611.000	19,61	38,49	Dinas PU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										75	96,3 4			25,69	36,34	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	72	585.000.000	12	77.106.587	12	117.000.000	9	108.841.755	75	93,0 3	21	185.948.342	29,17	31,79	Dinas PU
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	72	7.981.525.000	7	1.673.603.000	12	1.596.305.000	9	1.590.895.000	75	99,6 6	16	3.264.498.000	22,22	40,90	Dinas PU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										75	92,6 0			25,69	37,21	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	72	2.074.121.700	7	360.648.000	12	414.824.340	9	353.422.000	75	85,2 0	16	714.070.000	22,22	34,43	Dinas PU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021-2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	72	266.250.000	12	53.250.000	12	53.250.000	9	53.250.000	75	100,00	21	106.500.000	29,17	40,00	Dinas PU
Rata-rata capaian kinerja (%)												79,80	95,48	1093655115		28,49	36,05	
Predikat kinerja												T	ST			SR	SR	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		30425	92.879.675.495	274	28.766.883.432	2150	18575935099	1745	17.527.719.053	537	649,67	2019	46.294.602.485	107	236	-
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										74	77,67			29	40	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	100	4.975.000.000	7	1.760.802.000	25	995.000.000	16	596.560.625	64	59,96	23	2.357.362.625	23	14	Dinas PU
		Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terlaksananya Rehabilitasi Tanggul Sungai	300	54.378.990.495	5	25.149.402.432	120	10.875.798.099	100	10.374.713.431	83	95,39	105	35.524.115.863	35	65,33	Dinas PU
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pengerukan Sungai	14000	4.191.000.000	260	1.850.889.000	900	838.200.000	900	826.261.000	100	98,58	1160	2.677.150.000	8,29	63,88	Dinas PU
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										73	98,94			10,14	23,36	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Rehabilitasi dan	12000	23.589.685.000			300	4.717.937.000	225	4.585.584.997	75	97,19	225	4.585.584.997	1,88	19,44	Dinas PU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021-2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
				Pengerukan Sungai															
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	25	5.691.000.000	-		5	1.138.200.000	4	1.133.799.000	80	99,61	4	1.133.799.000	16,00	19,92	Dinas PU
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	4000	54.000.000	2	5.790.000	800	10.800.000	500	10.800.000	63	100,00	502	16.590.000	12,55	30,72	Dinas PU
Rata-rata capaian kinerja (%)													73,08	88,31	202	4.629.460.248,50	19,57	31,44	
Predikat kinerja													S	SR			SR		
3	1	01	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		800	4.512.422.500	0	-	200	9.280.564.500	852	7.925.452.850	426	85,40	852	7.925.452.850	27	21	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4000	41.890.400.000	-		800	8.378.080.000	800	7.827.488.350	100	93,43	800	7.827.488.350	20	18,69	Dinas PU
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	800	4.512.422.500	-		200	902.484.500	52	97.964.500	26	10,85	52	97.964.500	7	2	Dinas PU
0													63	52,14	426	3.962.726.425	13	10	
Predikat kinerja													R	R			SR	SR	
5	1	01	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		8000	26.716.337.500	0	-	1600	5.343.267.500	1600	5.343.257.500	100	100,00	1600	5.343.257.500	40	40	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam																

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021-2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Daerah Kabupaten/Kota																
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	4000	725.837.500	-	800	145.167.500	800	145.167.500	100	100,00	800	145.167.500	20,00	20,00	Dinas PU	
			Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlaksananya Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	4000	25.990.500.000	-	800	5.198.100.000	800	5.198.090.000	100	100,00	800	5.198.090.000	20,00	20,00	Dinas PU	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	100,00	800	2.671.628.750,00	20,00	20,00	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
	03	01	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		200	76.681.274.000	12	240.699.350	40	15336254800	40	10.679.237.800	100	69,63	52	10.919.937.150	52	64	
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	pembangunan gedung, pematangan lahan, dan rehabilitasi gedung	100	773.765.000	12	240.699.350	20	154.753.000	20	145.753.000	100	94,18	32	386.452.350	32	50	Dinas PU
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	100	75.907.509.000	-	20	15.181.501.800	20	10.533.484.800	100	69,38	20	10.533.484.800	20	13,88	Dinas PU	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021-2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota																
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	81,7 8	4	909.994.763	26	32	
Predikat kinerja													ST	T			SR	SR	
	0 1	0 1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA A		60	29.508.631.500	17	7.781.439.000	15	5.100.846.30 0	15	5.027.623.560	100	98,5 6	44	14.048.386.01 0	220	123	-
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	20	17.117.942.800	5	6.542.115.550	5	3.423.588.560	5	3.423.588.560	100	100, 00	10	9.965.704.110	50,00	58,22	Dinas PU
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	20	7.390.688.700	12	1.239.323.450	5	1.478.137.740	5	1.404.915.000	100	95,0 5	17	2.644.238.450	85,00	35,78	Dinas PU
			Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	20	5.000.000.000	12	171.904.883	5	199.120.000	5	199.120.000	100	100, 00	17	1.438.443.450	85,00	28,77	Dinas PU
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	98,3 5	44	14.048.386.010	73	41	
Predikat kinerja													ST	ST			S	SR	
6	1	0 1	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN		127 6	223.350.000.000	15	50.501.120.802	33 9	11398178967 9	31 5	63.634.337.333	93	55,8 3	33 0	114.135.458.1 35	25,86	51,10	
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	64	83.000.000.000	-		11	3.540.260.000	11	1.947.573.750	100	55,0 1	11	1.947.573.750	17,19	2,35	Dinas PU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021-2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																
		Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan di Kabupaten Pesawaran	61	9.500.000.000	11	49.893.100.802	11	59.600.317.679	11	41.050.010.183	100	68,88	22	90.943.110.985	36,07	957,30	Dinas PU
		Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan Jalan di Kabupaten Pesawaran	47	2.000.000.000	-	-	5	17.374.724.500	5	17.019.615.500	100	97,96	5	17.019.615.500	10,64	850,98	Dinas PU
		Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan di Kabupaten Pesawaran	61	16.000.000.000	-	-	11	35.740.000	11	35.610.000	100	99,64	11	35.610.000	18,03	0,22	Dinas PU
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan di Kabupaten Pesawaran	50	2.500.000.000	-	-	10	1.528.500.000	10	1.525.375.000	100	99,80	10	1.525.375.000	20,00	61,02	Dinas PU
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Pesawaran	95	6.000.000.000	-	-	20	35.740.000	20	35.540.000	100	99,44	20	35.540.000	21,05	0,59	Dinas PU
		Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan di Kabupaten Pesawaran	175	5.000.000.000	-	-	35	29.358.660.000	35	1.777.841.400	100	6,06	35	1.777.841.400	20,00	35,56	Dinas PU
		Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Pesawaran	86	1.800.000.000	-	-	25	35.740.000	25	35.654.000	100	99,76	25	35.654.000	29,07	1,98	Dinas PU
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Pesawaran	90	3.000.000.000	-	-	35	35.740.000	11	35.590.000	31	99,58	11	35.590.000	12,22	1,19	Dinas PU
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan di Kabupaten Pesawaran	66	900.000.000	-	-	11	35.740.000	11	35.590.000	100	99,58	11	35.590.000	16,67	3,95	Dinas PU
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terlaksananya Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	406	3.650.000.000	4	608.020.000	150	35.740.000	150	35.550.000	100	99,47	154	643.570.000	37,93	17,63	Dinas PU
		Pengawasan Teknis	Terlaksananya Pengawasan	75	90.000.000.000	-	-	15	2.364.887.500	15	100.387.500	100	4,24	15	100.387.500	20,00	0,11	Dinas PU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021-2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan di Kabupaten Pesawaran															
Rata-rata capaian kinerja (%)													94,29	77,45	16	5.435.021.815,95	21,57	161,07	
Predikat kinerja													ST	T			SR	ST	
	011		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		937	2.700.000.000	36	145.634.000	36	481.382.000	36	472.502.424	400	396,36	72	618.136.424	27		
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										100	96,36			1	35,95	
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksana Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2700	800.000.000	12	52.636.500	12	243.880.000	12	235.000.424	100	96,36	24	287.636.924	0,89	35,95	Dinas PU
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi										100	100,00			112,00	21,12	
			Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksana Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha	12	500.000.000	12	13.503.500	12	131.492.000	12	131.492.000	100	100,00	24	144.995.500	200	29,00	Dinas PU
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksana Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	100	1.400.000.000	12	79.494.000	12	106.010.000	12	106.010.000	100	100,00	24	185.504.000	24,00	13,25	Dinas PU
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	98,18	24	103.022.737	56	29	
Predikat kinerja													ST	ST			R	SR	
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG		86	29.146.000.000	11	1.134.515.100	20	1.328.585.000	11	1.208.271.577	150	306,90	12	2.312.536.677	18	24	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan										25	51,15			3	4	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021-2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota																
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen	35	800.000.000	11	1.134.515.100	3	373.695.000		260.698.750	25,00	51,1 5	3	1.395.213.850	3,00	3,95	Dinas PU
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersusunnya Dokumen	35	500.000.000		-	3	805.420.000		798.102.827	25,00	51,1 5	3	798.102.827	3,00	3,95	Dinas PU
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										25,00	51,1 5			3,00	3,95	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksanya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	8	18.564.000.000	0	-	11	119.220.000	11	119.220.000	25,00	51,1 5	3	119.220.000	3,00	3,95	Dinas PU
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										25,00	51,1 5			3,00	3,95	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksanya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	8	9.282.000.000	0	-	3	30.250.000	0	30.250.000	25,00	51,1 5	3		3,00	3,95	Dinas PU
Rata-rata capaian kinerja (%)												25	51,1 5	6	119.220.000	3	4	
Predikat kinerja												SR	R			SR	SR	
				438 59	527.389.741.195	55 6	96.288.910.550	46 25	17780770491 8	46 41	119.410.954.836	213	205, 89	57 8	216.908.938.8 36	59	66	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												-						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												81,68	82,5 4	63 4	329.642.029.95 7	29,07	40	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												T	T			SR	SR	

no	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RPJMDP-RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.043.291.747		4.120.911.949		4.073.512.131							
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				305.380.000		50.480.000		50.343.000							
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dok		62.880.000	2	10.480.000	1	10.437.500	100,00	99,59	3	20.917.500	50,00	33,27	DINAS PRKP
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dok		60.000.000	1	9.989.000	1	9.978.000	100,00	99,78	2	19.967.000	33,33	33,28	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dok		60.000.000	1	9.902.500	1	10.000.000	100,00	100,00	2	19.902.500	33,33	33,17	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	dok		62.500.000	1	12.444.500	1	9.940.000	100,00	99,40	2	22.384.500	8,33	35,82	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	dok		60.000.000	1	9.928.000	1	9.987.500	100,00	99,88	2	19.915.500	33,33	33,19	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

n o	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran P- RPJMDP-RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)		K
2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.567.579.4 56				2.724.941.199		2.712.447.195								
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 3	Org/bln	19.506.528.45 6	1 4	2.762.079.58 1	1 4	2.714.941.199	1 4	2.702.447.195	100,00	99,54	28	5.464.526.776	16,18	28,01		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	61.051.000		1	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00	100,00	1	10.000.000	16,67	16,38		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			170.332.290				-		-								
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 8	paket	170.332.290			0	-	0	-	-	-	0	-	-	-		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.428.841.21 1				193.228.000		193.216.500								
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 0	paket	385.794.200	5 0	68.227.000	4 9	52.000.000	4 9	51.988.500	100,00	99,98	99	120.215.500	27,50	31,16		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 52	paket	338.318.551	1 9 2	56.822.500	1 9 2	46.108.000	1 9 2	46.108.000	100,00	100,00	38 4	102.930.500	33,33	30,42		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-	30 24	dok	426.324.460	6 7 2	92.895.500	4 3 2	54.600.000	4 3 2	54.600.000	100,00	100,00	11 04	147.495.500	36,51	34,60		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

n o	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RPJMDP-RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.	14 = 6 + 12		K	Rp.	16
		Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan																
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6	laporan	179.627.500	1	26.985.000	1	25.000.000	1	25.000.000	100,00	100,00	2	51.985.000	33	28,94	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	laporan	98.776.500	1	7.200.000	1	15.520.000	1	15.520.000	100,00	100,00	2	22.720.000	33	23,00	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			84.726.578				22.026.250		21.998.250							
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	Unit	84.726.578			2	22.026.250	2	21.998.250	100,00	99,87	2	21.998.250	8,33	25,96	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.482.497.206				801.530.200		797.692.669							
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	laporan	256.414.200			2	26.400.000	2	22.562.469	100,00	85,46	2	22.562.469	33,33	8,80	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	laporan	6.226.083.006	1	823.104.623	1	775.130.200	1	775.130.200	100,00	100,00	2	1.598.234.823	33,33	25,67	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.100.085.246				328.706.300		297.814.517							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

no	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RPJMDP-RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	unit	1.920.376.596	4	137.054.398	4	317.206.300	4	286.314.517	100,00	90,26	8	423.368.915	33,33	22,05		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	unit	89.708.650	16	19.500.000	10	11.500.000	10	11.500.000	100,00	100,00	26	31.000.000	21,67	34,56		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya per tahun	600	tahun	90.000.000	600	90.000.000			0	-					-	-		
													100,00 SR	98,46 SR	87,9	8.120.124.733	25,54	25,17		
2		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan pemukiman kumuh							493.950.000		143.949.500,00								
		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diluar kawasan permukiman kumuh	420		3.957.107.000				493.950.000		143.949.500							DINAS PRKP	
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1660	unit/ru mah	3.957.107.000	16	117.340.000	20	493.950.000	20	143.949.500	100,00	29,14	36	261.289.500	2,17	6,60		
													100,00 SR	29,14 SR	36	261.289.500	2,17	6,60		

no	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RPJMDP-RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
3		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau						222.550.000		217.476.800							
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kab/Kota yang terverifikasi		1.262.000.000				200.000.000		198.891.800							
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	dok	600.000.000		1	200.000.000	1	198.891.800	100,00	99,45	1	198.891.800	25,00	33,15	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	3	dok	662.000.000				0	-			0	-	-	-	
		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	150	Orang	248.250.000			-		-							
		Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses	150	orang	248.250.000				0	-			0	-	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

no	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RPJMDP-RPJMD Pearangkt Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Perumahan KPR-FLPP															
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase operasional, rehabilitasi, dan pemeliharaan perumahan bagi korban bencana	200			2.750.000.000		-	0	-			0	-	-	-	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	100	unit/ru mah		2.500.000.000			0	-			0	-	-	-	
		Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1	unit/ru mah		250.000.000			0	-			0	-	-	-	
		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen perencanaan dan pengembangan perumahan	5	dok		2.415.115.000		-		-							
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	4	dok		1.951.015.000	1	448.374.000	0	-			1	448.374.000	25,00	22,98	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4	laporan		464.100.000			0	-			0	-	-	-	
		Kegiatan Penerbitan Sertifikat	Jumlah tersusunnya	5	laporan		610.510.000		22.550.000		18.585.000							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

no	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RPJMDP-RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)															
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	5	laporan	610.510.000		1	22.550.000	1	18.585.000	100,00	82,42	1	18.585.000	20,00	3,04	
												100,00	90,93	1,5	665.850.800	9	7,40	
4		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						5.320.423.500		2.545.581.744								
		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	5	dok/lap oran	1.379.865.000			150.000.000		49.548.400							
		Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	5	dok	915.765.000		1	150.000.000	1	49.548.400	100,00	33,03	1	49.548.400	20,00	5,41	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	4	laporan	464.100.000				0	-			0	-	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

no	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RPJMDP-RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			danPermukiman Kumuh															
		Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	5	dok	1.799.610.000	70	1.191.723.000	-									
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1	dok	150.000.000				0	-			0	-	-	-	
		Sub Kegiatan Penyusunan/Review /Legalisasi/ Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevi ew /Terlegalisasi	1	dok	250.000.000				0	-			0	-	-	-	
		Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2	dok	350.000.000				0	-			0	-	-	-	
		Sub Kegiatan Pembentukan/Pembi naan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	4	laporan	278.460.000				0	-			0	-	-	-	
		Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	4	laporan	348.075.000				0	-			0	-	-	-	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	4	laporan	348.075.000				0	-			0	-	-	-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

n o	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RPJMDP-RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab						
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			K	Rp.				
2		3	4	5			6			7			12 = 8+9+10+11			K	Rp.		K	Rp. (000)		K	Rp.		16
		Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh																						
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Kepemilikan Rumah	30	keluarg a	75.000.000					0	-			0	-	-	-							
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman			32.628.302.510				5.170.423.500		2.496.033.344													
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pem ugaran Permukiman Kumuh	3	dok	464.100.000					0	-			0	-	-	-							
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	330	unit/ru mah	30.344.932.510			60	4.970.423.500	60	2.448.314.944	100,00	49,26	60	2.448.314.944	18,18	8,07							
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh	3	laporan	248.250.000					0	-			0	-	-	-							
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Di pugar	3	ha	1.221.020.000			0,5	200.000.000	0,5	47.718.400	100,00	23,86	0,5	47.718.400	20,00	3,91							
		Sub Kegiatan Pendataan dan	Jumlah Dokumen Data	2	dok	250.000.000					0	-			0	-	-	-							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

n o	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RPJMD Perangkakt Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2		3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	16
		Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Permukiman Kumuh yang Terverifikasi																	
													100,00	35,38	4,39	2.545.581.744	4,16	1,24		
5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	581	persen					36.247.341.884		17.221.398.337								
		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU perumahan			267.084.186.011		29.803.015.550		36.247.341.884		17.221.398.337								
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	562	lokasi	259.802.947.237	11	29.803.015.550	86	36.247.341.884	80	17.221.398.337	93,02	47,51	91	47.024.413.887	16,19	18,10		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4	laporan	232.050.000				0	-				0	-	-	-		
		Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	44	dok	6.701.113.774				0	-				0	-	-	-		
		Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pen gelolaan PSU Perumahan	4	dok	348.075.000				0	-				0	-	-	-		
													93,02	47,51	39	47.024.413.887	4,05	4,53		
													SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													98,60	60,28			9	9,0		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													ST	T			SR	SR		

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
1	105	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		100	%	96.712.583.280	226	13.895.467.954	##	14.111.540.973	817	10.715.835.661	74,61	75,94	7524	24.611.303.615	25,45	25,45	Satpol PP
	105	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	100	%	96.320.000	-	-	6	23.600.000	6	20.030.000	100,00	84,87	2478	20.030.000	20,80	20,80	
	105	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	4	Dok	11.550.000		-	0	-	0	-		0	-	0,00	0,00		
	105	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA Perubahan SKPD	4	Dok	11.550.000		-	0	-	0	-		0	-	0,00	0,00		
	105	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya DPA SKPD	6	Laporan	20.850.000		-	2	17.300.000	2	15.605.000	100,00	90,20	2	15.605.000	74,84	74,84	
	105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya DPA Perubahan SKPD	4	Dok	13.550.000		-	0	-	0	-		0	-	0,00	0,00		
	105	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Laporan	38.820.000		-	4	6.300.000	4	4.425.000	100,00	70,24	4	4.425.000	11,40	11,40	
	105	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran	100	%	17.842.498.280	26	2.547.742.504	26	3.091.095.273	22	3.091.095.273	84,62	100,00	2472	5.638.837.777	31,60	31,60	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
				administrasi perkantoran																
	1	05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	bulan	16.430.155.868	14	2.344.942.504	14	2.892.975.273	10	2.892.975.273	71,43	100,00	24	5.237.917.777	28,57	31,88	
	1	05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	1.412.342.412	12	202.800.000	12	198.120.000	12	198.120.000	100,00	100,00	24	400.920.000	33,33	28,39	
	1	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	1.914.908.000	-	-	1	6.800.000	1	6.800.000	100,00	100,00	1248	6.800.000	0,36	0,36	
	1	05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2480	seperangkat	1.873.500.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	
	1	05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	60	bulan	41.408.000	0	-	1	6.800.000	1	6.800.000	100,00	100,00	1	6.800.000	1,67	16,42	
	1	05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum SKPD	100	%	657.714.300	155	64.306.400	##	78.484.400	765	58.127.900	75,00	74,06	1175	122.434.300	18,62	18,62	
	1	05	Penyediaan Peralatan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	bulan	15.770.000	12	1.695.000	12	2.225.000	12	2.225.000	100,00	100,00	24	3.920.000	33,33	24,86	
	1	05	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan	72	bulan	152.141.000	12	16.076.000	12	21.735.000	12	20.924.000	100,00	96,27	24	37.000.000	33,33	24,32	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Perlengkapn Kantor	dan Perlengkapan Kantor																
	1	05	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	72	bulan	25.633.000	12	2.857.000	12	3.726.000	12	3.726.000	100,00	100,00	24	6.583.000	33,33	25,68	
	1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu PenyediaanBarang Cetak dan Penggandaan	72	bulan	36.397.300	12	6.028.400	12	4.843.400	12	4.843.400	100,00	100,00	24	10.871.800	33,33	29,87	
	1	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan (Koran) dan Peraturan Perundang-undangan	576	eksemplar	46.848.000	96	7.680.000	960	7.680.000	960	7.680.000	100,00	100,00	1056	15.360.000	183,33	32,79	
	1	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	72	bulan	380.925.000	11	29.970.000	12	38.275.000	12	38.275.000	100,00	100,00	23	68.245.000	31,94	17,92	
	1	05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	250.500.000	-	-	0	-	0	-			2184	-	0,00	0,00	
	1	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perangkat Komputer yang tersedia	10	unit	90.500.000	0	-			0	-			1122	-	0,00	0,00	
	1	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan gedung Kantor yang tersedia	1	unit	160.000.000	0	-			0	-			574	-	0,00	0,00	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.(000)		K	Rp.(000)		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	1	05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	72.443.226.400	25	10.920.115.000	26	10.527.680.000	19	8.036.895.000	73,08	76,34	292	18.957.010.000	26,17	26,17	
		105	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	720	buah	72.000.000	0	-			0	-			146	-	0,00	0,00	
		105	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Pembayaran Listrik, Air, dan Komunikasi Kantor	72	bulan	108.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	100,00	100,00	24	36.000.000	33,33	33,33	
		105	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penerimaan Gaji dan Uang Makan (Anggota SATPOL -PP)	3720	pegawai	72.263.226.400	13	10.902.115.000	14	10.509.680.000	13	10.509.680.000	92,86	100,00	26	21.411.795.000	0,70	29,63	
	1	05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	3.507.416.300	20	363.304.050	16	383.881.300	12	288.542.085	75,00	75,16	60	651.846.135	18,58	18,58	
		105	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	94	unit	3.355.566.300	14	359.304.050	12	379.881.300	12	361.355.378	100,00	95,12	26	720.659.428	27,66	21,48	
		105	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34	unit	36.350.000	6	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	100,00	100,00	10	8.000.000	29,41	22,01	
		105	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	4	unit	115.500.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	2			3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
Rata-Rata Capaian Kinerja														84,62	85,07			19,35	19,35	
Predikat Kinerja														T	T			SR	SR	
2	1	05	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		100	%	1.598.550.000	69	116.675.000	109	142.000.000	101	135.444.000	92,66	95,38	24	252.119.000	15,77	15,77	
	1	05	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		100	%	1.352.650.000	51	91.075.000	76	119.150.000	22	112.594.000	28,95	94,50	73	203.669.000	73,00	15,06	
	1	05	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Waktu Pelaksanaan Kegiatan	72	bulan	513.850.000	12	65.300.000	12	49.750.000	12	47.350.000	100,00	95,18	24	112.650.000	33,33	21,92	
	1	05	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	Jumlah Kegiatan Penindakan terhadap Gangguan Trantibum	6	kegiatan	58.400.000	1	2.825.000	1	6.200.000	1	6.200.000	100,00	100,00	2	9.025.000	33,33	15,45	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.(000)		K	Rp.(000)			K	Rp.		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.		13 = 12/7*100	14 = 6 + 12		K	Rp.		15 = 14/5*100	16
			Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																					
	1	05	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Waktu Koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten/Kota	72	bulan	59.400.000	12	6.200.000	12	6.200.000	9	4.380.000	75,00	70,65	21	10.580.000	29,17	17,81					
	1	05	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Wilayah Pembinaan Anggota LINMAS	66	kecamatan	122.500.000	11	8.250.000	11	7.000.000	6	4.664.000	54,55	66,63	17	12.914.000	25,76	10,54					
	1	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Anggota SATPOL-PP	575	peserta	598.500.000	15	8.500.000	40	50.000.000	40	50.000.000	100,00	100,00	55	58.500.000	9,57	9,77					
	1	05	Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/		100	%	245.900.000	18	25.600.000	33	22.850.000	33	22.850.000	100,00	100,00	51	48.450.000	51,00	19,70					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.		
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
			Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																	
	1	05	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Wilayah Sosialisasi	59	kecamatan	103.350.000	4	9.250.000	11	9.100.000	11	9.100.000	100,00	100,00	15	18.350.000	25,42	17,76	
	1	05	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Wilayah Pengawasan atas Kepatuhan Perda/Perkada	66	kecamatan	85.750.000	11	10.250.000	11	7.250.000	11	7.250.000	100,00	100,00	22	17.500.000	33,33	20,41	
	1	05	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Waktu Penanganan atas Pelanggaran Perda	58	kecamatan	56.800.000	3	6.100.000	11	6.500.000	11	6.500.000	100,00	100,00	14	12.600.000	24,14	22,18	
Rata-Rata Capaian Kinerja													64,47	97,25				62,00	17,38	
Predikat Kinerja													R	ST				R	SR	
3	1	05	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		100	%	634.440.000	12	7.170.000	32	85.500.000	32	85.215.000	100,00	99,67	20	92.385.000	14,56	14,56	
	1	05	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,		100	%	402.800.000	-	-	20	51.000.000	20	50.715.000	100,00	99,44	20	50.715.000	20,00	12,59	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
						K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.(000)		K	Rp.	K	Rp.(000)		K	Rp.	
1	2			3	4	5			6			7			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16
				Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																					
		1	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Kebakaran	90	unit	312.800.000	0	-	20	51.000.000	20	50.715.000	100,00	99,44	20	50.715.000	22,22	16,21					
		1	05	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran yang terlatih	45	orang	90.000.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00					
		1	05	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		100	%	231.640.000	12	7.170.000	12	34.500.000	12	34.500.000	100,00	100,00	24	41.670.000	24,00	17,99	Satpol PP				
		1	05	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Waktu Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran dalam Rangka Pemungutan PAD	72	bulan	231.640.000	12	7.170.000	12	34.500.000	12	34.500.000	100,00	100,00	24	41.670.000	33,33	17,99					
Rata-Rata Capaian Kinerja															100,00	99,72			22,00	15,29					
Predikat Kinerja															ST	ST			SR	SR					
															20,00	19,94		24.839.132.660							
Rata-rata capaian kinerja (%)															83,03	94,01			34,45	17,34					
Predikat kinerja															T	ST			SR	SR					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												83,03	94,01					34,45	17,34	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												T	ST					SR	SR	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit P Penan gung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Perkantoran	1215	Bln	3.109.171.303	236	457.275.000	236	512.766.700	236	509.862.985	900,00	889,54	472	967.137.985	351,76	368,23	Dinso
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	60	bln	252.000.000	12	33.600.000	12	20.000.000	12	18.654.415	100,00	93,27	24	52.254.415	40,00	20,74	
		7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	100	org	1.792.304.733	20	293.575.000	20	298.500.000	20	298.500.000	100,00	100,00	40	592.075.000	40,00	33,03	
		10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	165	Item	286.739.000	33	15.000.000	33	54.689.000	33	54.483.000	100,00	99,62	66	69.483.000	40,00	24,23	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan & Penggandaan	65	Item	84.615.000	13	15.000.000	13	15.000.000	13	15.000.000	100,00	100,00	26	30.000.000	40,00	35,45	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Peralatan Komponen Instalasi/ Penerangan	80	Item	81.512.450	16	14.450.000	16	14.450.000	16	14.450.000	100,00	100,00	32	28.900.000	40,00	35,45	
		14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	170	Item	56.410.000	27	10.000.000	27	10.067.700	27	10.067.700	100,00	100,00	54	20.067.700	31,76	35,57	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran dan buku peraturan perundang - undangan	300	koran	38.358.800	60	6.800.000	60	41.800.000	60	41.800.000	100,00	100,00	120	48.600.000	40,00	126,70	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegi atan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab		
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3		4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
		1 7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat dan lembur	200	kotak	101.538.000	40	18.000.000	40	18.000.000	40	18.000.000	100,00	100,00	80	36.000.000	40,0 0	35,45			
		1 8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat- rapat Koordinasi/ Konsultasi	75	kali	415.693.320	15	50.850.000	15	40.260.000	15	38.907.870	100,00	96,64	30	89.757.870	40,0 0	21,59			
														100,00	98,84			39,0 8	40,91			
														Predikat kinerja		ST	ST			SR	SR	
2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	104	Bln	1.444.762.15 5	19	161.161.000	19	246.702.300	19	245.721.260	300,00	299,58	38	406.882.260	113, 33	100,86			
		2 3	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops	54	unit	1.373.732.15 5	9	148.466.000	9	234.081.300	9	233.100.260	100,00	99,58	18	381.566.260	33,3 3	27,78			
		2 6	Pemeliharaan/Re habilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	5	kali	44.780.000	1	7.445.000	1	7.371.000	1	7.371.000	100,00	100,00	2	14.816.000	40,0 0	33,09			
		2 8	Pemeliharaan/reh abilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	45	unit	26.250.000	9	5.250.000	9	5.250.000	9	5.250.000	100,00	100,00	18	10.500.000	40,0 0	40,00			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	99,86			37,7 8	33,62	
														Predikat kinerja		ST	ST			SR	SR	
3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	450	Bln	191.000.000	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-			
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Batik	450	stell	191.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			0,00	0,00	
														Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegi atan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab					
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			K	Rp.			
1	2		3	4	5			6			7			12 = 8+9+10+11		K	Rp.		K	Rp. (000)		K	Rp.		16
4	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas	20	Bln	58.608.960	0	-	4	19.600.000	4	19.600.000	100,00	100,00	4	19.600.000	20,0 0	33,44						
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dok	58.608.960	0	-	4	19.600.000	4	19.600.000	100,00	100,00	4	19.600.000	20,0 0	33,44						
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			20,0 0	33,44						
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR						
5	1		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakata n dan potensi lokal	1015		5.334.775.03 1	20 0	861.250.000	200	836.591.000	20 0	835.871.000	400,00	398,90	400	1.697.121.000	145, 70	121,80						
		1	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kelompok usaha peningkatan kesejahteraan sosial (KUPKS) Perdesaan di Kabupaten Pesawaran	19	Kelomp ok	374.625.250	2	71.800.000	3	65.250.000	3	64.530.000	100,00	98,90	5	136.330.000	26,3 2	36,39						
		4	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah TKSM/PSM di Kabupaten Pesawaran	275	TKSM/ PSM	746.473.200	55	66.000.000	55	66.000.000	55	66.000.000	100,00	100,00	110	132.000.000	40,0 0	17,68						
		2	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pesawaran	556	org	3.649.576.58 1	11 0	627.750.000	109	610.341.000	10 9	610.341.000	100,00	100,00	219	1.238.091.000	39,3 9	33,92						
		3	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah warga karang taruna peserta lomba desa	165	org	564.100.000	33	95.700.000	33	95.000.000	33	95.000.000	100,00	100,00	66	190.700.000	40,0 0	33,81						
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	99,72			36,4 3	30,45						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegi atan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR			
6	1		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	160		631.920.000	32	1.446.400.000	32	105.000.000	32	105.000.000	200,00	200,00	####	1.551.400.000	80,0 0	501,00	
		0 1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah penanggulangan masalah - masalah yang menyangkut tanggap cepat darurat dan KLB	40	Kejadia n	323.460.000	8	70.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	100,00	100,00	16	130.000.000	40,0 0	40,19	
		0 4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Kejadian bencana alam / bencana sosial dan Buffer Stock	120	Paket	308.460.000	24	1.376.400.000	24	45.000.000	24	45.000.000	100,00	100,00	48	1.421.400.000	40,0 0	460,81	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00			40,0 0	250,50			
Predikat kinerja												ST	ST			SR	ST			
9	1		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Program Rehabilitasi Sosial	1.296		2.218.835.00 0	85	125.375.000	87	163.700.000	87	163.700.000	200	200,00	172	289.075.000	31,4 1	16,83	
		0 1	Penyediaan Permakanaan	Jumlah penerima bantuan bagi penyandang cacat dan eks trauma	1285	org	1.913.580.00 0	85	125.375.000	85	157.450.000	85	157.450.000	100,00	100,00	170	282.825.000	13,2 3	14,78	
		1 2	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kabupaten Pesawaran	11	Puskes os	305.255.000	0	-	2	6.250.000	2	6.250.000	100,00	100,00	2	6.250.000	18,1 8	2,05	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00			15,7 1	8,41			
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR			
1 1	1		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pencapaian Validasi data PMKS versi Kementerian	60	Kali	551.446.500	16	99.579.000	16	70.650.000	16	70.650.000	200	200	32	170.229.000	80,0 0	62,05	
		0 2	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	20	Lapora n	362.216.500	4	64.725.000	4	45.850.000	4	45.850.000	100,00	100,00	8	110.575.000	40,0 0	30,53	
		0 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	60	Lapora n	189.230.000	12	34.854.000	12	24.800.000	12	24.800.000	100,00	100,00	24	59.654.000	40,0 0	31,52	Dinsos

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Target P-RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Kesejahteraan Sosial															
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00			40,00	31,03	
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.955.010.000	1.950.405.245							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)												100,00	99,77			32,71	61,20	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)												ST	ST			SR	R	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun 2021 (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD 2021 s/d 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	1	2	3	4			5		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 5 + 11		14 = 13/4*100		15
1	2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.971	-	4.924.613.000	368	392.516.000	302	852.092.624	697	634	670	1.736.948.724	257	248	Dinas K-UKM Naker
	2.17.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Lkinerja Perangkat Daerah		24		89.000.000	4	17.800.000	4	17.798.000	100,00	99,99	8	35.598.000	33	40	-
	2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan LAKIP. LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja SKPD	24	Dok	89.000.000	4	17.800.000	4	17.798.000	100	100	8	35.598.000	33	40	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		72		2.028.500.000	24	94.550.000	12	388.100.000	100,00	95,66	36	793.800.000	50	39	-
	2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Gaji PTK dan Honorarium Pejabat Penata usahaan Keuangan	72	Bulan	2.028.500.000	24	94.550.000	12	388.100.000	100	96	36	793.800.000	50	39	
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian		190		85.500.000	31	20.400.000	31	20.400.000	100	100	62	40.800.000	33	48	-

		Perangkat Daerah															
	2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan pakaian Khusus 28 stel	190	stel	85.500.000	31	20.400.000	31	20.400.000	100	100	62	40.800.000	33	48	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1362		1.101.756.500	255	53.146.000	209	192638856	97	100	464	385523656	40	42	
	2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300	buah	31.900.000	50	1.332.000	75	4.422.000	100	100	125	8.850.000	42	28	
	2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	72	Bulan	191.722.500	15	7.453.000	12	30.480.500	100	100	27	60.978.500	38	32	
	2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	708	buah	25.346.000	115	820.000	75	4.288.500	100	100	190	8.577.000	27	34	
	2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	66	Bulan	97.320.000	30	5.020.000	20	25.200.000	100	100	50	50.400.000	76	52	
	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	72	Bulan	124.660.000	15	4.031.000	12	30.481.000	100	100	27	60.965.300	38	49	
	2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan terbayarnya biaya langganan koran	72	Bulan	97.320.000	15	9.500.000	12	38.000.000	80	100	27	76.000.000	38	78	
	2.17.01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi kedinasan	72	Bulan	533.488.000	15	24.990.000	3	59.766.856	100	100	18	119.752.856	25	22	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		155		575.000.000	32	83.960.000	17	41.980.000	100	100	49	83.960.000	47	15	-
	2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	119	unit	286.000.000	17	21.000.000	5	10.500.000	100	100	22	21.000.000	18	7	
	2.17.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	36	unit	289.000.000	15	62.960.000	12	31.480.000	100	100	27	62.960.000	75	22	

	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		72		119.400.000		12	8.438.768	100	40	12	29.438.768	17	25	-	
	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Langganan Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	119.400.000		12	8.438.768	100	40	12	29.438.768	17	25		
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		96		925456500	22	122660000	17	182.737.000	100	99	39	367.828.300	38	40	-
	2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Mobil dinas Roda 4 dan Pembayaran Pajak	72	Bulan	899.656.500	15	112.500.000	12	177.577.000	100	99	27	357.508.300	38	40	
	2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	24	unit	25.800.000	7	10.160.000	5	5.160.000	100	100	12	10.320.000	50	40	
	Rata-rata capaian kinerja (%)										100	91			37	35	
	Predikat kinerja										ST	ST			SR	SR	
2	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASI AN	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang dilatih	250	org	2.084.951.225	50	416.420.000	50	396.780.000	100	97	100	805.900.000	40	39	-
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	250	org	2.084.951.225	50	416.420.000	50	396.780.000	100	97	100	805.900.000	40	39	-
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Jumlah Peserta yang Melaksanakan study Banding Pendamping Dana Hibah bagi Koperasi	250	org	2.084.951.225	50	416.420.000	50	396.780.000	100	97	100	805.900.000	40	39	

		Kompetensi SDM Koperasi																
											Rata-rata capaian kinerja (%)	100	97			40	39	
											Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
3	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan Sistem Pendukung Usaha Koperasi terhadap Koperasi	150	koperasi	1.025.728.032	70	200.460.000	50	184.812.000	100	100	120	369.812.000	80	36	-	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi	150	koperasi	1.025.728.032	70	200.460.000	50	184.812.000	100	100	120	369.812.000	80	36	-	
	2.17.06.2.01,01	Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penetapan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapat Pendampingan dan Bantuan, Jumlah Koperasi yang Mendapat Pendampingan untuk Mendapatkan Dana Bantuan dari LPDB	150	koperasi	1.025.728.032	70	200.460.000	50	184.812.000	100	100	120	369.812.000	80	36		
											Rata-rata capaian kinerja (%)	100	100			80	36	
											Predikat kinerja	ST	ST			T	SR	
4	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Kecil	550	UKM	7.562.020.000	150	710.039.500	110	466.058.000	100	99	260	936.058.000	49	28	-	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilaksanakan melalui Pemdataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase Usaha Kecil yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	550	UKM	7.562.020.000	150	710.039.500	110	466.058.000	100	99	260	936.058.000	49	28	-	

	2.17.07.2.01.01	Penadataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Data Profil UMKM	150	UKM	6.037.020.000	50	166.650.000	30	163.285.000	100	99	80	328.285.000	53	5	
	2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan UMKM	150	UKM	395.000.000	50	119.515.000	30	77.515.000	100	98	80	156.515.000	53	40	
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Bantuan Peralatan Pengembangan UMKM	250	UKM	1.130.000.000	50	423.874.500	50	225.258.000	100	100	100	451.258.000	40	40	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	100	99			49	28	
										Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
5	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Jumlah UMKM yang mendapat sapras	50	Expos	2.289.591.600	13	527.550.000	10	410.729.198	100	81	23	919.281.198	46	40	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orintasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran dan Pelatihan	50	Expos	2.289.591.600	13	527.550.000	10	410.729.198	100	81	23	919.281.198	46	40	-
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Event Promosi hasil pelaku usaha kecil dan menengah pada Pesawaran Fair, Lampung Fair dan Jumlah Pameran Lainnya.	50	Expos	2.289.591.600	13	527.550.000	10	410.729.198	100	81	23	919.281.198	46	40	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	100	81			46	40	
										Predikat kinerja	ST	T			SR	SR	
6	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	% Pencari Kerja yang memiliki Kompetensi/ Keahlian	500	-	2.240.000.000	90	374.164.500	90	349.890.000	100	10	180	3.849.890.000	36	172	-
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	500	-	2.240.000.000	90	374.164.500	90	349.890.000	100	10	180	3.849.890.000	36	172	-
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasrkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang memiliki kompetensi atau pelatihan guna mempermudah mendapatkan pekerjaan di Kab. Pesawaran	500		2.240.000.000	90	374.164.500	90	349.890.000	100	10	180	3.849.890.000	36	172	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	100	10			36	172	
										Predikat kinerja	ST	SR			SR	ST	

7	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		172	-	340.000.000	42	-	39	50.710.000	100	85	81	110.710.000	62	33	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota		172	-	340.000.000	42	-	39	50.710.000	100	85	81	110.710.000	62	33	
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi terkait peraturan perusahaan	22		170.000.000	9		9	20.857.000	100	70	18	50.857.000	82	30	
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Monitoring Penyelesaian Konflik antara Perusahaan dan Pekerja	150		170.000.000	33		30	29.853.000	100	100	63	59.853.000	42	35	Dinas K-UKM Naker
Rata-rata capaian kinerja (%)											100	85			62	33	
Predikat kinerja											ST	T			R	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	
											2.711.071.822				1.736.948.724		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											99,94	80			50	55	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											ST	T			SR	R	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah DaerahKabupaten/kota	%	1 0 0					4.652.727,3 0		4.602.408,9 1							
2.14.01 .2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	1 0 0														
2.14.01 .2.01.0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penyusunan Renja	doku men	6	127.500, 00	0	-	1	25.500,00	1	25.500,000	100,0 0	100,0 0	1	25.500	16,6 7	20,0 0	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.01.0 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	lapor an	6	100.000, 00	0	-	1	20.000,00	1	20.000,000	100,0 0	100,0 0	1	20.000	16,6 7	20,0 0	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	1 0 0														
2.14.01 .2.02.0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	oran g	2 4 0	20.699.0 80,00		4.789.888, 02	4 0	3.289.362,40	40	3.285.674,1 12	100,0 0	99,89	4 0	8.075.56 2	16,6 7	39,0 1	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.02.0 3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	doku men	7 2	2.907.80 0,00		692.160,0 0	1 2	581.560,00	12	563.160,000	100,0 0	96,84	1 2	1.255.32 0	16,6 7	43,1 7	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.02.0 7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	lapor an	1 2	125.000, 00		-	2	25.000,00	2	25.000,000	100,0 0	100,0 0	2	25.000	16,6 7	20,0 0	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	1 0 0														
2.14.01 .2.05.0 2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	pake t	2 3 2	100.000, 00	0	-	3 6	20.000,00	36	19.950,000	100,0 0	99,75	3 6	19.950	15,5 2	19,9 5	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	1 0 0														

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2.14.01 .2.06.0 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pake t	7 2	10.000,0 0	1 2	2.000,00	1 2	2.000,00	12	2.000,000	100,0 0	100,0 0	2 4	4.000	33,3 3	40,0 0	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.06.0 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	pake t	7 2	364.975,0 00	1 2	58.795,20	1 2	72.995,00	12	71.995,000	100,0 0	98,63	2 4	130.790	33,3 3	35,8 4	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.06.0 3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	pake t	7 2	32.768,0 0	1 2	4.024,10	1 2	6.553,60	12	5.791,600	100,0 0	88,37	2 4	9.816	33,3 3	29,9 6	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.06.0 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pake t	6 6	250.000,0 00	1 1	65.660,00	1 2	50.000,00	12	50.000,000	100,0 0	100,0 0	2 3	115.660	34,8 5	46,2 6	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.06.0 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	pake t	7 2	47.990,0 0	1 2	22.550,40	1 2	9.598,00	12	8.743,225	100,0 0	91,09	2 4	31.294	33,3 3	65,2 1	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.06.0 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	doku men	7 2 0	150.000,0 00	1 2	10.400,00	1 2	30.000,00	12	30.000,000	100,0 0	100,0 0	2 4	40.400	3,33	26,9 3	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.06.0 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lapor an	1 0 0	540.410,0 00	1 2	113.100,0 0	1 2	84.082,00	12	70.662,000	100,0 0	84,04	2 4	183.762	24,0 0	34,0 0	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	1 0 0														
2.14.01 .2.07.0 5		Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	set	1	10.945,0 0	1	10.945,00	0	-	-	-	-	-	1	10.945	100,0 00	100	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.07.1 0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2 4	25.000,0 0	1 2	5.000,00	1 2	5.000,00	12	5.000,000	100,0 0	100,0 0	2 4	10.000	100,0 00	40,0 0	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	1 0 0														
2.14.01 .2.08.0 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lapor an	7 2	60.000,0 0	1 2	21.966,22	1 2	12.000,00	12	12.000,000	100,0 0	100,0 0	2 4	33.966	33,3 3	56,6 104	Dinas P3AP 2KB
2.14.01 .2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	1 0 0														
2.14.01 .2.09.0 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	unit	1 8 6	2.514.45 7,80	1 2	304.308,0 0	1 2	364.076,30	12	351.932,975	100,0 0	96,66	2 4	656.241	12,9 0	26,0 987	Dinas P3AP 2KB

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
2.14.01 .2.09.0 9		Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1 8	330.000,00	3	75.000,00	3	55.000,00	3	55.000,000	100,0 0	100,0 0	6	130.000	33,3 3	39,3 939	Dinas P3AP 2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,0 0	97,37			31,8 9	39,0 2	
Predikat kinerja													R	R			SR	SR	
2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	persentase cakupan PUS <20 thn yang didampingi	%	7 0														
2.14.02 .2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	1 0 0														
2.14.02 .2.01.0 1		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Kegiatan Rakerda dan Reviu Program KKBPK Dan Terlaksananya Rakernas Program KKBPK yang di ikuti	kegia tan	4	170.000,00	4	170.000,00			-	-	-	-	4	170.000	100,00	100,00	Dinas P3AP 2KB
2.14.02 .2.01.0 5		Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Pembinaan Saka Kencana Pramuka	kegia tan	1	11.000,00	1	11.000,00			-	-	-	-	1	11.000	100,00	100,00	Dinas P3AP 2KB
2.14.02 .2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian penduduk	%	1 0 0														
2.14.02 .2.02.0 2		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan	keca mata n	1 1	29.050,00	1 1	29.050,00			-	-	-	-	1 1	29.050	100,00	100,00	Dinas P3AP 2KB
			Jumlah Pemutahiran Data Kependudukan Keluarga Berencana	keca mata n	1 1														
2.14.02 .2.02.1 3		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Penyusunan Pelaporan Program KKBPK Berdasarkan Teknologi Informasi	keca mata n	1 1	20.000,00	1 1	20.000,00			-	-	-	-	1 1	20.000	100,00	100,00	Dinas P3AP 2KB

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-			100,00	100,00	
Predikat kinerja												SR	SR			ST	ST	
2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase cakupan PUS <20 thn yang didampingi	%	80				7.227.898,00		6.689.644,20							
2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	%	50													
2.14.03.2.01.01		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK NF-BOKB)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	66	11.481,25	0	-		-	-	-	-	0	-	-	-	Dinas P3AP 2KB
2.14.03.2.01.02		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal (DAK NF-BOKB)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	dokumen	6	82.750,00	0	-		-	-	-	-	0	-	-	-	Dinas P3AP 2KB
2.14.03.2.01.04		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK NF-BOKB)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen	6	233.818,40	0	-		-	-	-	-	0	-	-	-	Dinas P3AP 2KB
2.14.03.2.01.06		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (DAK NF-BOKB)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	18	567.996,00	0	-		-	-	-	-	0	-	-	-	Dinas P3AP 2KB
2.14.03.2.01.07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Laporan	66	1.474.605,00	0	-		-	-	-	-	0	-	-	-	Dinas P3AP 2KB

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Penyuluhan KKBPK (DAK NF-BOKB)	Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)																
2.14.03 .2.01.0 8		Pengendalian Program KKBPK (DAK NF-BOKB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Lapo ran	6	132.400, 00	0	-			-	-	-	-	0	-	-	-	Dinas P3AP 2KB
2.14.03 .2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pemberdayaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	%	5 1, 4														
2.14.03 .2.02.0 1		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	orga nisas i	6 6	66.200,0 0	0	-			-	-	-	-	0	-	-	-	Dinas P3AP 2KB
2.14.03 .2.02.0 2		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (DAK Fisik + DAK NON FISIK)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	unit	6 6	24.679.1 47,90	1 1	3.993.246, 00	1 1	4.723.290,00	11	4.188.301,8 98	100,0 0	88,67	2 2	8.181.54 8	33,3 3	33,1 5	Dinas P3AP 2KB
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga	doku men	6														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	doku men	6														
2.14.03 .2.02.0 3		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	lapo ran	6 6	2.304.11 6,00	1 1	94.950,00	1 1	476.000,00	11	475.254,300	100,0 0	99,84	2 2	570.204	33,3 3	24,7 5	Dinas P3AP 2KB
			Jumlah pembinaan program KKBPK bagi PPKBD dan SUBPPKBD	kade r	6 2 8 2		1 0 4 7		1 0 4 7		1.047		100,0 0		2 0 9 4		33,3 3		Dinas P3AP 2KB
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	Lapo ran	1 2				2		2		100,0 0		2		16,6 7		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Kependudukan dan Keluarga Berencana)																
2.14.03 .2.02.0 4		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NF- BOKB & APBD)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	oran g	6 2 8 2	7.651.29 2,00	1 0 4 7	718.520,0 0	1 0 4 7	1.000.000,00	1.047	1.000.000,0 00	100,0 0	100,0 0	2 0 9 4	1.718.52 0	33,3 3	22,4 6	Dinas P3AP 2KB
2.14.03 .2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten dan Kota	%	5 1, 4														
2.14.03 .2.03.0 1		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya (DAK NF- BOKB)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Lapo ran	4 4	29.700,0 0	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	Dinas P3AP 2KB
2.14.03 .2.03.0 3		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAK NF-BOKB & APBD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	oran g	3 4 0 0	2.860.95 8,54	5 5 0	196.184,5 0	1 6 0 0	300.000,00	1.600	300.000,000	100,0 0	100,0 0	2 1 5 0	496.185	63,2 4	17,3 4	Dinas P3AP 2KB
			Jumlah sasaran camping program Bangsa Kencana	Keca mata n	6 6		1 1		1 1		11		100,0 0		2 2				
2.14.03 .2.03.0 6		Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan	keca mata n	4 4	66.200,0 0	0	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	Dinas P3AP 2KB
2.14.03 .2.03.0 8		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya (DAK NF- BOKB)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	lapo ran	6 6	1.583.00 0,00	1 1	271.800,0 0	1 1	300.000,00	11	300.000,000	100,0 0	100,0 0	2 2	571.800	33,3 3	36,1 2	Dinas P3AP 2KB
			Jumlah kegiatan baksos momentum dan baksos di wilayah kepualauan	kegia tan	3 0				5		5		100,0 0		5		16,6 7		
			Jumlah Pelayanan KB di wilayah dan sasaran khusus	peser ta	8 0 0 0				1 6 0 0		1.600		100,0 0		1 6 0 0		20,0 0		
2.14.03 .2.03.1 3		Peningkatan kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang mendapat peningkatan Kesertaan KB Pria	oran g	5 0	66.200,0 0	0	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	Dinas P3AP 2KB

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/ d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/ d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2.14.03 .2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	%	5 1, 4														
2.14.03 .2.04.0 1		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	orga nisas i	6 6	2.499.82 5,00	1 1	219.440,0 0	1 1	292.258,00	11	292.258,000	100,0 0	100,0 0	2 2	511.698	33,3 3	20,4 7	Dinas P3AP 2KB
			Jumlah kegiatan sekolah siaga kependudukan	Keca mata n	6 6		1 1		1 1										
			Jumlah kegiatan studi komperatif ke kelompok UPPKS	kegia tan	6		1		1										
2.14.03 .2.04.0 3		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NF-BOKB & APBD)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	kam pung	1 3 2	1.079.99 5,00	2 2	174.450,0 0	2 2	136.350,00	22	133.830,000	100,0 0	98,15	4 4	308.280	33,3 3	28,5 4	Dinas P3AP 2KB
2.14.03 .2.04.0 4		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Lapo ran	1 3 2	99.300,0 0	0	-			-	-	-	-	0	-	-	-	Dinas P3AP 2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,0 0	98,10			29,1 6	26,1 2	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR, BKL,PIK-R dan pemberdayaan ekonoi keluarga/UPPKA	%	5 2, 3					1.750.982,0 0		1.748.202,0 0							
2.14.04 .2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter,PIK remaja dan BKR yang mendapat pembinaan genre, kelompok BKL yang	%	5 1, 3														

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dan keluarga yang mengakses PPKA															
2.14.04 2.01.0 1		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera(UPPKS) dan Pemberdayaan ekonomi keluarga)	Jumlah terbentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera(UPPKS) dan Pemberdayaan ekonomi keluarga)	kelo mpo k	4 4	284.000, 00				-	-	-	-	0	-	-	-	Dinas P3AP 2KB
2.14.04 2.01.0 2		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	unit	1 3 2	1.999.98 1,81	2 2	110.000,0 0	2 2	161.000,00	22	100,0 0	100,0 0	4 4	271.000	33,3 3	13,5 5	Dinas P3AP 2KB
2.14.04 2.01.0 4		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	lapor an	3 0	5.516.34 5,00	5	665.500,0 0	5	975.042,00	5	100,0 0	99,71	1 0	1.637.76 2	33,3 3	29,6 9	Dinas P3AP 2KB
			Jumlah pembinaan pemanfaatan pekarangan keluarga	kegia tan	6		1		1		1	100,0 0		2		33,3 3		
			Jumlah pembinaan remaja dalam penyalahgunaan narkoba dan napza	keca mata n	6 6		1 1		1 1		11	100,0 0		2 2		33,3 3		
			Jumlah Sasaran Kegiatan pembinaan IMP	keca mata n	6 6		1 1		1 1		11	100,0 0		2 2		33,3 3		
2.14.04 2.01.0 5		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Oran g	6 2 8 2	6.093.18 0,40	0	-		-	-	-	-	0	-	-	-	Dinas P3AP 2KB

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK NF-BOKB)																	
2.14.04 2.01.0 7		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	lapor an	6 6	2.594.04 1,54	1 1	381.000,0 0	1 1	519.940,00	11	519.940,000	100,0 0	100,0 0	2 2	900.940	33,3 3	34,7 3	Dinas P3AP 2KB
			Jumlah kegiatan KIE motivasi dalam hari keluarga nasional (HARGANAS)	kegia tan	1 2				2		2		100,0 0		2		16,6 7		
			Jumlah peserta pembinaan kesling PHBS	oran g	9 0 0				1 5 0		150		100,0 0		1 5 0		16,6 7		
2.14.04 2.01.0 8		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Lapo ran	6 6	481.895, 00	1 1	41.000,00	1 1	95.000,00	11	95.000,000	100,0 0	100,0 0	2 2	136.000	33,3 3	28,2 2	Dinas P3AP 2KB
			Jumlah peserta pola asuh anak dan remaja yang dibina	oran g	3 3 0 0		2 7 5		5 5 0		550		100,0 0		8 2 5		25,0 0		
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,0 0	99,93			24,3 1	15,6 5	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAANG ENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta (Pekerja perempuan di lembaga swasta / Jumlah pekerja perempuan) x 100	%	3 4, 1					340.000,00		329.516,00							
2.14.04 2.01		Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan kabupaten/kota	Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan & penganggaran responsif gender (PPRG)	%	1 0 0														

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2.14.04 .2.01.0 1		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	doku men	6	307.100,00	1	31.600,00	1	40.000,00	1	40.000,000	100,00	100,00	2	71.600	33,33	23,31	Dinas P3AP 2KB
			Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG	kegiatan	6		1		1										
2.14.04 .2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	32,4														
2.14.04 .2.02.0 1		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	doku men	25	1.048.605,00	0	36.605,00	5	175.000,00	5	164.876,000	100,00	94,21	5	201.481	20,00	19,21	Dinas P3AP 2KB
			Jumlah Kegiatan peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini	kegiatan	12		2		2		2		-		4		33,33		
2.14.04 .2.02.0 2		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumenn hasil Sosialisasi Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	doku men	6	167.445,00	6	166.092,00	0	0	-	-	0	-	6	166.092	100,00	99,19	Dinas P3AP 2KB
2.14.04 .2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggota DWP yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan	%	100														
2.14.04 .2.03.0 2		Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Peyedia layanan Pemberdayaan Prempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	360	900.000,00	60	249.835,00	60	125.000,00	60	124.640,000	100,00	99,71	120	374.475	33,33	41,61	Dinas P3AP 2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	97,98			44,00	45,83	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100				524.494,00		274.138,00								
2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Rasio KDRT (Jumlah KDRT/Jumlah Rumah Tangga)	nilai	0														
2.08.03.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	12	852.289,50	2	53.400,00	2	150.450,00	2	131.150,000	100,00	87,17	4	184.550	33,33	21,65	Dinas P3AP 2KB
2.08.03.2.02		Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	%	100														
2.08.03.2.02.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang	60	84.650,00	10	10.000,00	10	10.000,00	10	10.000,000	100,00	100,00	20	20.000	33,33	23,63	Dinas P3AP 2KB
2.08.03.2.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NF)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	180	1.748.615,00	30	71.154,00	12	349.044,00	12	119.070,000	100,00	34,11	42	190.224	23,33	10,88	Dinas P3AP 2KB
2.08.03.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh petugas terlatih	%	100														
2.08.03.2.03.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan	laporan	6	96.200,00	1	13.287,30	1	15.000,00	1	13.918,000	100,00	92,79	2	27.205	33,33	28,28	Dinas P3AP 2KB

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah pelayanan operasional rumah penampungan sementara/rumah perlindungan	bula n	7 2		1 2		1 2		12		100,0 0		2 4		33,3 3		
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,0 0	78,52			31,3 3	21,1 1	
Predikat kinerja													ST	T			SR	SR	
2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada kelompok usaha perempuan dan keluarga TKI	%	8 0					82.506,80		80.526,80							
2.08.04 .2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan subkegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi	%	1 0 0														
2.08.04 .2.01.0 3		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	lapor an	1 8	607.756, 00	2	10.000,00	3	70.006,80	3	68.026,800	100,0 0	97,17	5	78.027	27,7 8	12,8 4	Dinas P3AP 2KB
2.08.04 .2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga TKI	%	1 0 0														
2.08.04 .2.03.0 1		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	layan an	6	72.150,0 0	1	10.000,00	1	12.500,00	1	12.500,000	100,0 0	100,0 0	2	22.500	33,3 3	31,1 9	Dinas P3AP 2KB
			Jumlah peserta pembinaan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia	oran g	2 7 0		5 0		4 5		45		100,0 0		9 5		35,1 9		
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,0 0	98,59			32,1 0	22,0 1	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	%	1 0 0						-		-						
2.08.05 .2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	%	1 0 0														
2.08.05 .2.01.0 1		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	doku men	1	5.700,00	1	5.700,00	0	-	-	-	-	-	1	5.700	100, 00	100, 00	Dinas P3AP 2KB
2.08.05 .2.01.0 2		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	doku men	1	6.600,00	1	6.600,00	0	-	-	-	-	-	1	6.600	100, 00	100, 00	Dinas P3AP 2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-			100, 00	100, 00	
Predikat kinerja													SR	SR			ST	ST	
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan berperan aktif	%	1 0 0				195.221,00		195.163,00								
2.08.06 .2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase satuan pendidikan ramah anak, masjid ramah anak dan puskes ramah anak yang terlatih Konvensi hak anak	%	2 5														
2.08.06 .2.01.0 1		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	orga nisas i	2 4	247.400, 00	4	78.200,00	4	30.000,00	4	30.000,000	100,0 0	100,0 0	8	108.200	33,3 3	43,7 3	Dinas P3AP 2KB
2.08.06 .2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase kelompok PATBM yang aktif di desa	%	1 0 0														

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Kewenangan Kabupaten/Kota																	
2.08.06 .2.02.0 1		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	oran g	2 5 0	553.200, 00	0	-	5 0	107.000,00	50	107.000,000	100,0 0	100,0 0	5 0	107.000	20,0 0	19,3 4	Dinas P3AP 2KB
2.08.06 .2.02.0 3		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	doku men	6	272.021, 00	1	15.000,00	1	58.221,00	1	58.163,000	100,0 0	99,90	2	73.163	33,3 3	26,9 0	Dinas P3AP 2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,0 0	99,97			28,8 9	29,9 9	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan tindak kekerasan anak yang ditangani	%	1 0 0					102.306,00		93.752,85		-					
2.08.07 .2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase pelaksanaan kegiatan pengutan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	1 0 0														
2.08.07 .2.03.0 2		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	doku men	1 8	455.938, 00	3	15.000,00	3	102.306,00	3	93.752,852	100,0 0	91,64	6	108.753	33,3 3	23,8 5	Dinas P3AP 2KB
			Jumlah pelayanan dukungan manajemen DAK NF PPPA	bula n	6 0				1 2										
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,0 0	91,64			33,3 3	23,8 5	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								14.876.13 5,096				14.013.351, 762							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)													100,0 0	95,3			45,5 0	42,3 6	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)													ST	ST			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat daerah tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Peresentase Penerapan Kepatuhan pelayanan Publik	26 74	Rp 17.326.904.430	3 7 9	Rp 2.767.392.232	4 5 9	Rp 2.894.307.405	453	Rp 2.886.438.095	100	99	83 2	Rp 5.653.830.327	25	25	Dinas Ketahanan Pangan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Penencanaan Perangkat Daerah	50	65.200.000	0	Rp -	1 0	Rp 13.040.000	10	Rp 13.040.000	100	100	10	Rp 13.040.000	20	20	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Berupa Renja dan Renja Perubahan Daerah	10	Rp 28.570.000			2	Rp 5.714.000	2	Rp 5.714.000	100	100	2	Rp 5.714.000	20	20	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	5	Rp 5.075.000			1	Rp 1.015.000	1	Rp 1.015.000	100	100	1	Rp 1.015.000	20	20	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Rp 4.915.000			1	Rp 983.000	1	Rp 983.000	100	100	1	Rp 983.000	20	20	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	5	Rp 5.405.000			1	Rp 1.081.000	1	Rp 1.081.000	100	100	1	Rp 1.081.000	20	20	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Rp 6.235.000			1	Rp 1.247.000	1	Rp 1.247.000	100	100	1	Rp 1.247.000	20	20	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa LPPD dan LKPD	10	Rp 10.000.000			2	Rp 2.000.000	2	Rp 2.000.000	100	100	2	Rp 2.000.000	20	20	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa LAKIP dan Laporan Akhir Tahun	10	Rp 5.000.000			2	Rp 1.000.000	2	Rp 1.000.000	100	100	2	Rp 1.000.000	20	20	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Laporan Keuangan, Hasil Kegiatan dan Pertanggungjawaban OPD	20 10	14.288.880.630	3 2 0	Rp 2.373.455.400	3 3 8	Rp 2.383.105.105	338	Rp 2.378.766.855	100	100	65 8	Rp 4.752.222.255	24	24	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat daerah tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	18 48	Rp 13.517.970.630	3 0 8	2.256.695.400	3 0 8	Rp 2.252.995.105	308	Rp 2.250.906.855	100	100	61 6	Rp 4.507.602.255	33	33	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan OPD	72	Rp 722.160.000	1 2	116.760.000	1 2	Rp 120.360.000	12	Rp 118.110.000	100	98	24	Rp 234.870.000	33	33	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	60	Rp 11.250.000			1 2	Rp 2.250.000	12	Rp 2.250.000	100	100	12	Rp 2.250.000	20	20	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	5	Rp 15.000.000			1	Rp 3.000.000	1	Rp 3.000.000	100	100	1	Rp 3.000.000	20	20	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Berupa Laporan Fungsional, Laporan Konsolidasi, Laporan Keuangan Per Semester	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Berupa Laporan Fungsional, Laporan Konsolidasi, Laporan Keuangan Per Semester	20	Rp 10.000.000			4	Rp 2.000.000	4	Rp 2.000.000	100	100	4	Rp 2.000.000	20	20	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp 12.500.000			1	Rp 2.500.000	1	Rp 2.500.000	100	100	1	Rp 2.500.000	20	20	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Laporan Barang Milik Daerah dan Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah	65	Rp 10.445.000	0	Rp -	1 3	Rp 2.089.000	13	Rp 2.089.000	100	100	13	Rp 2.089.000	20	20	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Rp 2.775.000			1	Rp 555.000	1	Rp 555.000	100	100	1	Rp 555.000	20	20	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Tersusunnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	60	Rp 7.670.000			1 2	Rp 1.534.000	12	Rp 1.534.000	100	100	12	Rp 1.534.000	20	20	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18 0	Rp 54.305.000	0	Rp -	3 6	Rp 10.861.000	36	Rp 10.861.000	100	100	36	Rp 10.861.000	20	20	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Layanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	Rp 18.555.000			1 2	Rp 3.711.000	12	Rp 3.711.000	100	100	12	Rp 3.711.000	20	20	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat daerah tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Terlaksananya Koordinasi, Pelayanan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60	Rp 15.000.000			1 2	Rp 3.000.000	12	Rp 3.000.000	100	100	12	Rp 3.000.000	20	20	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60	Rp 20.750.000			1 2	Rp 4.150.000	12	Rp 4.150.000	100	100	12	Rp 4.150.000	20	20	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	17 4	Rp 621.486.000	2 9	Rp 117.220.700	2 9	Rp 103.581.000	29	Rp 103.306.160	100	100	58	Rp 220.526.860	33	37	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya anggaran komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor	6	Rp 32.130.000	1	2.340.000	1	Rp 5.355.000	1	Rp 5.355.000	100	100	2	Rp 7.695.000	33	24	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Sebagai Penunjang Operasional Kantor	6	Rp 46.800.000	1	24.357.500	1	Rp 7.800.000	1	Rp 7.800.000	100	100	2	Rp 32.157.500	33	69	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Untuk Menjaga Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	6	Rp 36.000.000	1	5.019.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 6.000.000	100	100	2	Rp 11.019.000	33	31	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai Kantor	6	Rp 41.760.000	1	6.960.000	1	Rp 6.960.000	1	Rp 6.960.000	100	100	2	Rp 13.920.000	33	33	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Sebagai Media Publikasi dan Fungsi Kearsipan Kantor	6	Rp 50.508.000	1	8.014.200	1	Rp 8.418.000	1	Rp 8.418.000	100	100	2	Rp 16.432.200	33	33	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Terbayarnya Biaya Berlangganan Media Koran	72	Rp 57.600.000	1 2	9.600.000	1 2	Rp 9.600.000	12	Rp 9.600.000	100	100	24	Rp 19.200.000	33	33	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	72	Rp 356.688.000	1 2	60.930.000	1 2	Rp 59.448.000	12	Rp 59.173.160	100	100	24	Rp 120.103.160	33	34	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan SKPD	14 4	Rp 1.224.000.000	2 4	Rp 192.246.132	2 4	Rp 204.000.000	24	Rp 203.033.950	100	95	48	Rp 395.280.082	33	33	
	Penyediaan Jasa, Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Terealisasinya Pembayaran Jasa Langganan Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	72	Rp 54.000.000	1 2	10.246.132	1 2	Rp 9.000.000	12	Rp 8.033.950	100	89	24	Rp 18.280.082	33	34	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Petugas Tenaga Kontrak OPD	72	Rp 1.170.000.000	1 2	182.000.000	1 2	Rp 195.000.000	12	Rp 195.000.000	100	100	24	Rp 377.000.000	33	32	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat daerah tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51	Rp 1.062.587.800	6	Rp 84.470.000	9	Rp 177.631.300	9	Rp 175.341.130	100	99	15	Rp 259.811.130	27	22	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terawatnya Kendaraan Dinas dan terbayarnya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan	36	Rp 1.046.587.800	6	84.470.000	6	Rp 174.431.300	6	Rp 172.141.130	100	99	12	Rp 256.611.130	33	25	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	Rp 16.000.000			3	Rp 3.200.000	3	Rp 3.200.000	100	100	3	Rp 3.200.000	20	20	
	Rata-rata capaian kinerja (%)										100	99			25	25	
	Predikat Kinerja										ST	ST			SR	SR	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		12	Rp 12.739.590.000	2	Rp 349.150.000	2	Rp 1.248.000.000	1	Rp 1.236.489.858	100	99	3	Rp 1.585.639.858	25	12,44	
	Penyediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya infrastruktur lumbung pangan pokok masyarakat	12	Rp 12.739.590.000	2	Rp 349.150.000	2	Rp 1.248.000.000	1	Rp 1.236.489.858	100	99	3	Rp 1.585.639.858	25	12,44	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan j*	Terlaksananya Pembangunan Lumbung Pangan Desa	11	Rp 12.710.200.000	1	320.000.000	1	Rp 1.248.000.000	1	Rp 1.236.489.858	100	99	2	Rp 1.556.489.858	18	12	
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Terlaksananya Pembangunan Lantai Jemur	1	Rp 29.390.000	1	29.150.000	1	Rp -	-	Rp -	-		1	Rp 29.150.000	100	99	
	Rata-rata capaian kinerja (%)										100	99			59	56	
	Predikat Kinerja										ST	ST			R	R	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI		14 7	Rp 4.071.864.900	1 9	Rp 298.570.800	1 9	Rp 3.812.505.700	19	Rp 3.411.700.700	100	96	38	Rp 3.710.271.500	25	91,11	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat daerah tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya Stabilisasi Penyaluran dan Harga Pangan Pokok Sesuai Kebutuhan	66	Rp 2.206.768.800	1 1	Rp 112.421.000	1 1	Rp 205.809.700	11	Rp 205.419.700	100	100	22	Rp 317.840.700	33	18	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Terciptanya kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok	6	Rp 205.818.500	1	22.465.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 14.900.000	100	99	2	Rp 37.365.000	33	18	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tercapainya Target Komsumsi Pangan Masyarakat Pesawaran Per Kapita/Tahun	12	Rp 1.571.275.000	2	44.952.000	2	Rp 149.205.700	2	Rp 148.915.700	100	100	4	Rp 193.867.700	33	12	
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Meningkatnya Pemantauan Harga Pangan Utama Di Pasar	24	Rp 203.489.000	4	20.336.000	4	Rp 19.092.500	4	Rp 19.092.500	100	100	8	Rp 39.428.500	33	19	
	Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan	Terpantaunya Ketersediaan dan Penyerapan Beras/Gabah Sesuai Kebutuhan	24	Rp 226.186.300	4	24.668.000	4	Rp 22.511.500	4	Rp 22.511.500	100	100	8	Rp 47.179.500	33	21	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cadangan Pangan Kabupaten	63	Rp 640.203.600	5	Rp 29.693.600	5	Rp 3.536.696.000	5	Rp 3.165.131.000	100	89	10	Rp 3.194.824.600	16	499	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Beras Kabupaten Pesawaran	63	Rp 640.203.600	5	29.693.600	5	Rp 3.536.696.000	5	Rp 3.165.131.000	100	89	10	Rp 3.194.824.600	16	499	
	Pelaksanaan Pencapaian	Tercapainya Target Komsumsi Pangan	18	Rp 1.224.892.500	3	Rp 156.456.200	3	Rp 70.000.000	3	Rp 41.150.000	100	100	6	Rp 197.606.200	33	16	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat daerah tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Masyarakat Pesawaran Per Kapita/Tahun															
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Terpantaunya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Per Tahun	6	Rp 230.178.500	1	16.456.200	1	Rp 10.000.000	1	Rp 9.900.000	100	99	2	Rp 26.356.200	33	11	
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal)*	Memberdayakan masyarakat dalam penyediaan makanan dari Sumber Daya Lokal	12	Rp 994.714.000	2	140.000.000	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	100	100	4	Rp 200.000.000	33	20	
	Rata-rata capaian kinerja (%)										100	96			28	177	
	Predikat Kinerja										ST	ST			SR	ST	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		6	Rp 527.357.000	1	Rp 98.490.000	1	Rp 45.000.000	1	Rp 45.000.000	100	100	2	Rp 143.490.000	33	27	
	Penanganan kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Terpetaknya daerah rawan pangan di Kabupaten Pesawaran	6	Rp 527.357.000	1	Rp 98.490.000	1	Rp 45.000.000	1	Rp 45.000.000	100	100	2	Rp 143.490.000	33	27	
	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Terpetaknya daerah rawan pangan di Kabupaten Pesawaran	6	Rp 527.357.000	1	98.490.000	1	Rp 45.000.000	1	Rp 45.000.000	100	100	2	Rp 143.490.000	33	27	
	Rata-rata capaian kinerja (%)										100	100			33	27	
	Predikat Kinerja										ST	ST			SR	SR	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		30	Rp 248.678.500	5	Rp 35.000.000	5	Rp 15.000.000	5	Rp 15.000.000	100	100	10	Rp 50.000.000	33	20	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	30	Rp 248.678.500	5	Rp 35.000.000	5	Rp 15.000.000	5	Rp 15.000.000	100	100	10	Rp 50.000.000	33	20	Dinas Ketahanan Pangan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat daerah tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Penggilingan Padi	30	Rp 248.678.500	5	35.000.000	5	Rp 15.000.000	5	Rp 15.000.000	100	100	10	Rp 50.000.000	33	20		
	Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	100,00			33	20		
	Predikat Kinerja										ST	ST			SR	SR		
							486	8.014.813.105	479	7.594.628.653								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM(PROGRAM 1 s/d PROGRAM 5)												100,00	98,88	885	11.143.231.685	36	61	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM(PROGRAM 1 s/d PROGRAM 5)												ST	ST			SR	R	

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penaggu ng Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
	2.10.04.2.01	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa tanah dalam kabupaten/kota	16	837.605.000	11	171.903.000	11	84.000.000	11	82.199.500	100,00	97,86	22	254.102.500	51,16	30,34	
	2.10.042.01.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16	837.605.000	11	171.903.000	11	84.000.000	11	82.199.500	100,00	97,86	22	254.102.500	51,16	30,34	Bidag Pertanian
	2.10.042.01.01.02	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah	43	837.605.000	11	171.903.000	11	84.000.000	11	82.199.500	100,00	97,86	22	254.102.500	51,16	30,34	Bidag Pertanian

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penaggu ng Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
		Pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kabupaten/Kota															
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	97,86	22	254.102.500	51,16	30,34	
Predikat Kinerja												ST	ST			R	SR	
	2.10.05.2.01	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15	978.647.530			127	3.616.730.108		20.000.000	100,00	100,00	2	20.000.000	13,33	2,04	
	2.10.042.01.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15	978.647.530			2	20.000.000	2	20.000.000	100,00	100,00	2	20.000.000	13,33	2,04	
	2.10.042.01.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	15	978.647.530			2	20.000.000	2	20.000.000	100,00	100,00	2	20.000.000	13,33	2,04	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penaggu ng Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
			Kabupaten/Kota															
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00	22	20.000.000	13,33	2,04	
Predikat Kinerja												ST	ST			SR	SR	
	2.11.01.2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	784	27.481.447.795	137	3.392.852.104	127	3.620.810.108	123	2.762.250.187	96,85	76,29	260	6.155.102.291	33,16	22,40	
	2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	74.615.000	-	-	2	20.000.000	2	20.000.000	100,00	100,00	2	20.000.000	20,00	26,80	
	2.11.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	74.615.000	-	-	2	20.000.000	2	20.000.000	100,00	100,00	2	20.000.000	20,00	26,80	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	156	19.461.842.299	26	2.475.415.278	27	2.608.840.108	22	1.991.772.620	81,48	76,35	48	4.467.187.898	30,77	22,95	
	2.05.2.05.01.01.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	18.023.688.889	14	2.324.075.278	14	2.406.440.108	12	1.844.982.620	85,71	76,67	26	4.169.057.898	30,95	23,13	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	1.438.153.410	12	151.340.000	12	197.400.000	9	141.790.000	75,00	71,83	21	293.130.000	29,17	20,38	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan	5	74.615.000	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	100,00	100,00	1	5.000.000	20,00	6,70	Sekretariat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penaggu ng Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
		Keluaran Akhir Tahun SKPD	Keluaran Akhir Tahun SKPD															
1	2.05.2.05.01.0 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%Administrasi Umum Perangkat Daerah	324	784.094.317	62	61.306.700	50	76.738.700	51	76.416.700	102,00	99,58	113	137.723.400	34,88	17,56	
	2.05.2.05.01.0 1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor	12	35.525.500	2	2.873.200	2	5.000.000	3	5.000.000	100,00	100,00	5	7.873.200	41,67	22,16	Sekretari at
	2.05.2.05.01.0 1.02.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	219.693.619	12	22.164.500	12	31.690.000	12	31.370.000	100,00	98,99	24	53.534.500	33,33	24,37	Sekretari at
	2.05.2.05.01.0 1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	72	35.525.500	12	2.897.000	12	5.000.000	12	4.998.000	99,96	99,96	24	7.895.000	33,33	22,22	Sekretari at
	2.05.2.05.01.0 1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	72	41.418.665	12	6.083.000	12	5.018.700	12	5.018.700	100,00	100,00	24	11.101.700	33,33	26,80	Sekretari at
	2.05.2.05.01.0 1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	24	10.000.000	12	1.980.000	0	0	-	-			12	1.980.000	50,00	19,80	Sekretari at
	2.05.2.05.01.0 1.06.09	Sub Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan luar Provinsi lampung	72	441.931.033	12	25.309.000	12	30.030.000	12	30.030.000	100,00	100,00	24	55.339.000	33,33	12,52	Sekretari at
	2.05.2.05.01.0 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150	3.546.865.920	25	485.618.537	24	469.600.000	24	464.636.287	100,00	98,94	49	950.254.824	32,67	26,79	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penaggu ng Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
	2.05.2.05.01.0 1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	122.207.720	12	5.618.537	12	13.600.000	12	8.636.287	100, 00	63,50	24	14.254.824	33, 33	11, 66	Sekretari at
	2.05.2.05.01.0 1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78	3.424.658.200	13	480.000.000	12	456.000.000	12	456.000.000	100, 00	100,0 0	25	936.000.000	32, 05	27, 33	Sekretari at
	2.05.2.05.01.0 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144	3.614.030.259	24	370.511.589	24	445.631.300	24	402.277.496	90,2 7	90,27	48	772.789.085	33, 33	21, 38	
	2.05.2.05.01.0 1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72	3.574.504.759	12	365.511.589	12	441.631.300	12	398.557.746	90,2 5	90,25	24	764.069.335	33, 33	21, 38	Sekretari at
	2.05.2.05.01.0 1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72	39.525.500	12	5.000.000	12	4.000.000	12	3.719.750	92,9 9	92,99	24	8.719.750	33, 33	22, 06	Sekretari at
Rata-rata capaian kinerja (%)												91,6 2	91,62	260	6.155.102.291	33, 16	22, 40	
Predikat Kinerja												ST	ST			SR	SR	
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERINTERGRIT ASNYA RPPLH DALAM RENCANA PEMBANGUNA N KABUPATEN	1	456.540.700	0	-	1	455.640.700	1	133.355.123	29,2 7	29,27	-	-	0,0 0	0,0 0	
	2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	Jumlah Rencana perlindungan dan	1	456.540.700	0	-	1	455.640.700	1	133.355.123	29,2 7	29,27	-	-	0,0 0	0,0 0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penaggu ng Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
		Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/kot a															
	2.11.02.2.01.0 1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kot a yang Disusun	1	456.540.700	0	-	1	455.640.700	1	133.355.123	100, 00	29,27	-	133.355.123	0,0 0	29, 21	B. Penataan & Penataan RPPLH
Rata-rata capaian kinerja (%)												100, 00	29,27	-	-	0,0 0	0,0 0	
Predikat Kinerja												ST	SR	-	-	SR	SR	
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS AIR(IKA)	6	262.050.000	0	-	8	48.500.000	8	29.900.000	61,6 5	61,65	-	-	0,0 0	0,0 0	
	2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	% penurunan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	6	262.050.000	0	-	8	48.500.000	8	29.900.000	61,6 5	61,65	-	-	0,0 0	0,0 0	
	2.11.03.2.01.0 1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkornisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6	262.050.000	0	-	8	30.000.000	8	29.900.000	100, 00	99,67	-	-	0,0 0	0,0 0	B. Pengend alian Pencema ran & Kerusaka n LH
	2.11.03.2.01.0 2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkornisasi dan	Jumlah Dokumen Hasil	4	122.102.000	0	-	1	18.500.000	1	17.631.000	100, 00	95,30	-	-	0,0 0	0,0 0	B. Pengend alian

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penaggu ng Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
		Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan															Pencemaran & Kerusakan LH
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	97,48	-	-	0,00	0,00	
Predikat Kinerja												ST	ST	-	-	SR	SR	
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN (IKTL)	60	1.071.510.250	11	67.987.500	11	108.000.000	11	99.765.700	100,00	92,38	22	167.753.200	36,67	15,66	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	% Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	60	1.071.510.250	11	67.987.500	11	108.000.000	11	99.765.700	100,00	92,38	22	167.753.200	36,67	15,66	
	2.05.2.05.01.01.20.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	60	1.071.510.250	11	67.987.500	11	108.000.000	11	99.765.700	100,00	92,38	22	167.753.200	36,67	15,66	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	92,38	22	167.753.200	36,67	15,66	
Predikat Kinerja												ST	ST	-	-	SR	SR	
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE IZIN PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 YANG DITERBITKAN	161	517.690.000	0	0	31	48.919.000	31	48.119.000	98,36	98,36	-	-	0,00	0,00	
	2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan	Jumlah Rekomendasi TPS Limbah B3	85	212.435.000	0	-	25	36.505.000	25	35.705.000	97,81	97,81	-	-	0,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penaggu ng Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
		Sementara Limbah B3																
	2.11.05.2.01.02	Sub Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan PengumpulanLimbah B3	85	212.435.000	0	-	25	36.505.000	25	35.705.000	100,00	97,81	-	-	0,00	0,00	B. Pengelolaan Sampah LB3 dan Peningkatan Kapasitas
	2.11.05.2.02	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	76	305.255.000	0	-	6	12.414.000	6	12.414.000	100,00	100,00	-	-	0,00	0,00	
	2.11.05.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan	76	305.255.000	0	-	6	12.414.000	6	12.414.000	100,00	100,00	-	-	0,00	0,00	B. Pengelolaan Sampah LB3 dan Peningkatan Kapasitas

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penaggu ng Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
			Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya															
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00	-	-	0,00	0,00	
Predikat Kinerja												ST	ST	-	-	SR	SR	
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG TAAT LINGKUNGAN	270	332.050.000	0	-	60	64.550.000	60	60.238.000	100,00	93,32	60	60.238.000	22,22	18,14	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	270	332.050.000	0	-	60	64.550.000	60	60.238.000	100,00	93,32	60	60.238.000	22,22	18,14	
	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan	270	332.050.000	0	-	60	64.550.000	60	60.238.000	100,00	93,32	60	60.238.000	22,22	18,14	B. Penataan & Penataan RPPLH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penaggu ng Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
		Daerah/Kabupat en/Kota	Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a															
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	93,32	60	60.238.000	22,22	18,14	
Predikat Kinerja												ST	ST			SR	SR	
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH	81	4.909.000.800	11	875.841.000	3	953.772.800	11	950.755.850	366,67	99,68	28	1.826.596.850	34,57	37,21	
	2.11.11.2,01	Pengelolaan Sampah	% Pengelolaan Sampah	81	4.909.000.800	11	875.841.000	14	953.772.800	11	950.755.850	78,57	99,68	25	1.826.596.850	30,86	37,21	
	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis	15	272.050.000	0	-	3	20.340.000	3	20.337.500	100,00	99,99	3	20.337.500	20,00	7,48	B. Pengend alian Pencema ran & Kerusaka n LH
	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	66	4.636.950.800	11	875.841.000	11	933.432.800	11	930.418.350	100,00	99,68	22	1.806.259.350	33,33	38,95	B. Pengend alian Pencema ran & Kerusaka n LH
Rata-rata capaian kinerja (%)												78,57	99,68	25	1.826.596.850	30,86	37,21	
Predikat Kinerja												T	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									9.000.922.716		4.186.583.360							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM(PROGRAM 1 s/d PROGRAM 5)												96,69	89,07	222	3.599.737.300	33,20	23,59	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												ST	T			SR	SR	

N o	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD PD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penangg ung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
2	1 2	3	Program pencatatan sipil		20	pers en	34.295.000	4	20.687.500,00	4	3.785.000	3	3.785.000	100,00	100,00	7	6.620.000	17,50	9,65	
2	1 2	3	pelayanan pencatatan sipil	tersedianya layanan pencatatan sipil	20	dok	34.295.000	4	2.835.000,00	4	3.785.000	3	3.785.000	100,00	100,00	7	6.620.000	35,00	19,30	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			17,50	9,65	
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR	
2	1 2	4	program pengolahan informasi administrasi kependudukan		22 0	pers en	264.475.600	22	1.957.500,00	22	440.238.600	14	227.808.600	46,53	46,53	18	231.723.600	19,58	53,35	Disdukc apil
2	1 2	4	pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	Tersedianya Profil Perkembangan Kependudukan	160	buk u	229.373.600	10	2.465.000,00	10	245.038.600	10	226.908.600	92,60	92,60	20	229.373.600	12,50	100,00	
2	1 2	4	tersedianya layanan administrasi keendudukan	tersedianya layanan administrasi keendudukan	60	dok	35.102.000	12	1.450.000,00	12	195.200.000	4	900.000	0,46	0,46	16	2.350.000	26,67	6,69	
Rata-rata capaian kinerja (%)														46,53	46,53			19,58	53,35	
Predikat kinerja														SR	SR			SR	R	
2	1 2	0 1	Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	22 57	pers en	38.650.599.04 5	31 0	4.298.559.523	27 4	4.220.649.725	-	3977719716	101,78	101,78	53	8.276.279.239	48,58	24,04	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	75	dok	150.000.000					-	-	-	-	0	-	-		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Pelaporan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	60	lap	100.000.000					-	-	-	-	0	-	-		
2	1 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	70	bln	17.069.244.045	12	2.034.907.793, 00	12	2.127.076.788	12	2.125.840.088	99,94	99,94	24	4.160.747.881	34,29	24,38	
2	1 2	0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya dokumen pelaporan	70	bln	12.000.000.000	12	1.157.670.000, 00	12	1.122.160.000	12	1.122.160.000	100,00	100,00	24	2.279.830.000	34,29	19,00	

N o	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD PD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penangg ung Jawab		
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.	13 = 12/7*100	K	Rp.	14 = 6 + 12	K	Rp.	15 = 14/5*100	16
			Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	capaian keuangan OPD (semesteran dan tahunan)																		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	400	stell	220.000.000					-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya ASN yang mengikuti diklat/bimtek dan sosialisasi	100	Org	110.000.000					-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
			Penyedia komponen instakasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan listrik dan penenrangan kantor	60	bln	24.500.000	12	2.610.000,00	12	2.935.000	12	2.935.000	100,00	100,00	24	5.545.000	40,00	22,63			
			penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln	5.301.855.000	12	722.409.468,00	12	482.453.637	12	265.933.500	55,12	55,12	24	988.342.968	40,00	18,64			
			Penyedia peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	60	bln	25.000.000	12		12	3.398.500	12	3.101.000	91,25	91,25	24	3.101.000	40,00	12,40			
			penyedia bahan logistik kantor	Tersedianya makan minum tamu	55	bln	100.000.000	11	2.175.000,00	11	5.700.000	12	5.671.000	99,49	99,49	23	7.846.000	41,82	7,85			
			penyedia barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	bln	40.000.000	12	2.627.500,00	12	7.467.500	12	7.321.500	98,04	98,04	24	9.949.000	40,00	24,87			
			penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	tersedianya bahan acaan	720	eks	90.000.000	14 4	8.400.000,00	14 4	12.480.000	144	12.380.000	99,20	99,20	28 8	20.780.000	40,00	23,09			
			penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	50	kec	750.000.000	11	135.929.000,00	11	155.727.000	11	140.455.963	90,19	90,19	22	276.384.963	44,00	36,85			
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas/operasio nal	5	unit	520.000.000					-	-	-	-	0	-	-	-	-		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	52	bln	500.000.000					-	-	-	-	0	-	-	-	-		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026 (akhir periode RPJMD PD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penangg ung Jawab
						K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2			3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	372.000.000	12	40.393.927,00	12	36.000.000	12	33.767.972	93,80	93,80	24	74.161.899	40,00	19,94	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan kantor	60	bln	18.000.000	12			-	-	-	-	12	-	20,00	-		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya layanan administrasi keuangan dan layanan umum kantor	60	bln	20.000.000	12			-	-	-	-	12	-	20,00	-		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin dan berkala	60	bln	1.100.000.000	12	188.436.835,00	12	252.281.300	12	245.814.693	97,44	97,44	24	434.251.528	40,00	39,48	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya jasa layanan perbaikan peralatan dan mesin	60	bln	40.000.000	12			-	-	-	-	12	-	20,00	-		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung/ bangunan kantor	60	bln	100.000.000	12	3.000.000,00	12	12.970.000	12	12.339.000	95,13	95,13	24	15.339.000	40,00	15,34	
												-	-	-	-	0	-	-	-		
												-	-	-	-		-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)															93,30	93,30			24,29	12,02	
Predikat kinerja															ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												4.664.673.325		4209313316							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)															79,94	79,94			20,46	25,01	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)															T	T			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4452	18.416.074.700	233	2574047467	866	3.271.170.429	866	3.175.419.691	100%	97%	1099	5.749.467.158	25%	31%	DPMD
	2.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi	3432	16.157.234.200	53	2.338.821.667	686	2.851.845.129	686	2.774.609.563	100%	97%	739	5.113.431.230	22%	32%	DPMD
	2.13.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai	1.260	13.535.280.600	18	2.010.115.667	252	2.415.519.529	252	2.342.283.963	100%	97%	270	4.352.399.630	21%	32%	DPMD
	2.13.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan	2.160	2.593.506.000	35	328.706.000	432	432.251.000	432	428.251.000	100%	99%	467	756.957.000	22%	29%	DPMD
	2.13.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	12	28.447.600	-	-	2	4.074.600	2	4.074.600	100%	100%	2	4.074.600	17%	14%	DPMD
Rata-rata capaian kinerja (%)												100%	99%	739	5.113.431.230	20%	25%	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR	
	2.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		504	925.884.000	84	85.100.000	84	160.934.000	84	154.618.078	100%	96%	168	239.718.078	33%	26%	DPMD
	2.13.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik	72	22.500.000	12	1.440.000	12	3.750.000	12	3.750.000	100%	100%	24	5.190.000	33%	23%	DPMD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	2.13.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor tersedia	72	124.140.000	12	22.622.000	12	27.310.000	12	21.010.000	100 %	77%	24	43.632.000	33 %	35%	DPMD
	2.13.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	72	23.616.000	12	2.198.000	12	3.936.000	12	3.936.000	100 %	100%	24	6.134.000	33 %	26%	DPMD
	2.13.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah konsumsi peserta rapat	72	106.920.000	12	12.000.000	12	17.820.000	12	17.820.000	100 %	100%	24	29.820.000	33 %	28%	DPMD
	2.13.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kelengkapan administrasi kesekretariat an	72	97.326.000	12	10.000.000	12	16.221.000	12	16.221.000	100 %	100%	24	26.221.000	33 %	27%	DPMD
	2.13.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	jumlah referensi perundang-undangan	72	201.840.000	12	8.640.000	12	33.640.000	12	33.640.000	100 %	100%	24	42.280.000	33 %	21%	DPMD
	2.13.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	72	349.542.000	12	28.200.000	12	58.257.000	12	58.241.078	100 %	100%	24	86.441.078	33 %	25%	DPMD
Rata-rata capaian kinerja (%)												100 %	97%	168	239.718.078	33 %	26%	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR	
	2.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		72	124.800.000	12	13.648.950	12	24.960.000	12	15.197.550	100 %	61%	24	28.846.500	33 %	23%	DPMD
	2.13.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya langganan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	124.800.000	12	13.648.950	12	24.960.000	12	15.197.550	100 %	61%	24	28.846.500	33 %	23%	DPMD
Rata-rata capaian kinerja (%)												100 %	61%	24	28.846.500	33 %	23%	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR	
	2.13.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		444	1.208.156.500	84	136.476.850	84	233.431.300	84	230.994.500	100 %	99%	168	367.471.350	38 %	30%	DPMD
	2.13.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	jumlah kendaraan	300	962.156.500	60	102.476.850	60	192.431.300	60	189.994.500	100 %	99%	120	292.471.350	40 %	30%	DPMD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara															
	2.13.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan yang terpelihara	72	126.000.000	12	14.000.000	12	21.000.000	12	21.000.000	100 %	100%	24	35.000.000	33 %	28%	DPMD
	2.13.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kantor	72	120.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	100 %	100%	24	40.000.000	33 %	33%	DPMD
Rata-rata capaian kinerja (%)												100 %	100%	168	367.471.350	36 %	31%	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR	
	2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		7377 4	15.953.130.000	76 7	1.377.879.120	14.630	3.011.092.700	1463 0	2.542.855.840	100 %	84%	1539 7	3.920.734.960	21 %	25%	DPMD
	2.13.04.2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		7377 4	15.953.130.000	76 7	1.377.879.120	14.630	3.011.092.700	146 30	2.542.855.840	100 %	84%	153 97	3.920.734.960	21 %	25%	DPMD
	2.13.04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rapat Koordinasi Kepala Desa yang dilaksanakan	15	1.197.950.000	1	82.189.000	3	151.250.000	3	116.340.000	100 %	77%	4	198.529.000	27 %	17%	DPMD
	2.13.04.2.01.03.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan	30	235.000.000	6	15.100.000	6	28.200.000	6	26.400.000	100 %	94%	12	41.500.000	40 %	18%	DPMD
	2.13.04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur desa yang terlatih dalam pengelolaan keuangan desa	720	554.500.000	14 4	200.670.320	144	77.984.000	144	65.224.000	100 %	84%	288	265.894.320	40 %	48%	DPMD
	2.13.04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Kepala Desa serta Aparatur desa yang	496	695.000.000			37	95.000.000	37	78.105.000	100 %	82%	37	78.105.000	7%	11%	DPMD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			mengikuti pelatihan															
	2.13.04.2.01 .08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang Terbina	720	340.000.000	144	26.900.000	144	40.000.000	144	40.000.000	100 %	100%	288	66.900.000	40 %	20%	DPMD
	2.13.04.2.01 .09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Pesawaran	496	2.996.000.000	37	818.686.800	37	800.000.000	37	721.559.800	100 %	90%	74	1.540.246.600	15 %	51%	DPMD
	2.13.04.2.01 .11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang Terbina dan Terdata se Kabupaten Pesawaran dalam Sistem Informasi Profil Desa	5	230.000.000	1	15.930.000	1	24.291.500	1	23.023.500	100 %	95%	2	38.953.500	40 %	17%	DPMD
	2.13.04.2.01 .12.	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Kepala Desa dan Aparatur Desa yang memperoleh tanggungan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Pesawaran	69.120	6.955.680.000			13.824	1.391.016.000	13824	1.078.187.340	100 %	78%	13824	1.078.187.340	20 %	16%	DPMD
	2.13.04.2.01 .13.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Data Inventaris Aset dan Kekayaan Desa se-Kabupaten Pesawaran	720	375.000.000	144	18.000.000	144	39.700.000	144	36.715.000	100 %	92%	288	54.715.000	40 %	15%	DPMD
	2.13.04.2.01 .14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang Terbina	720	570.000.000	144	29.250.000	144	105.000.000	144	105.000.000	100 %	100%	288	134.250.000	40 %	24%	DPMD
	2.13.04.2.01 .16.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan	720	340.000.000	144	13.650.000	144	54.500.000	144	48.500.000	100 %	89%	288	62.150.000	40 %	18%	DPMD

N O	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangk t Daerah Penangg ung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Penyenggelaraan Pemerintahan Desa															
	2.13.04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Lomba Desa yang dilaksanakan baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	12	1.464.000.000	2	157.503.000	2	204.151.200	2	203.801.200	100 %	100%	4	361.304.200	33 %	25%	DPMD
Rata-rata capaian kinerja (%)												100 %	90%	15397	3.920.734.960	32 %	23%	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR	
	2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		1455	2.532.737.000	146	95.562.500	291	334.437.000	147	313.521.000	51%	94%	293	409.083.500	20 %	16%	DPMD
	2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		1455	2.532.737.000	146	95.562.500	291	334.437.000	147	313.521.000	51%	94%	293	409.083.500	20 %	16%	DPMD
	2.13.05.2.01.02.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan terhadap Kader Pembangunan Manusia (KPM)	720	300.000.000			144	20.000.000	144	20.000.000	100 %	100%	144	20.000.000	20 %	7%	DPMD

N O	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangk t Daerah Penangg ung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	2.13.05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pokjanal/ Pokja di Kabupaten Pesawaran yang terbina	720	300.000.000	144	36.700.000	144	-	0	-	0%	0%	144	36.700.000	20%	12%	DPMD
	2.13.05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pembinaan dan Keikutsertaan dalam TTG Tingkat Provinsi dan Nasional	5	345.000.000	1	27.950.000	1	70.000.000	1	49.084.000	100%	70%	2	77.034.000	40%	22%	DPMD
	2.13.05.2.01.07.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kegiatan BBGRM tingkat Kabupaten dan Keikutsertaan Tingkat Provinsi	10	1.587.737.000	1	30.912.500	2	244.437.000	2	244.437.000	100%	100%	3	275.349.500	30%	17%	DPMD
Rata-rata capaian kinerja (%)												100%	90%	293	409.083.500	28%	15%	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR	
	3.32.03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		75	1.006.000.000	0	0	15	116.000.000	15	98.177.760	100%	85%	15	98.177.760	20%	10%	DPMD
	3.32.03.2.1.	Penataan Pesebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		75	1.006.000.000	0	0	15	116.000.000	15	98.177.760	100%	85%	15	98.177.760	20%	10%	DPMD
	3.32.03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah calon peserta transmigrasi	25	264.412.000			5	29.412.000	5	25.812.000	100%	88%	5	25.812.000	20%	10%	DPMD
	3.32.03.2.01.04.	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang	Jumlah peserta transmigrasi	25	449.289.000			5	54.289.000	5	43.911.760	100%	81%	5	43.911.760	20%	10%	DPMD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat t Daerah Penangg ung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(00 0)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Berasal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	yang diberangkatk an															
	3.32.03.2.01 .05.	Penyuluhan Transmigrasi (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Jumlah calon peserta transmigrasi yang mendapat pelatihan	25	292.299.000			5	32.299.000	5	28.454.000	100 %	88%	5	28.454.000	20 %	10%	DPMD
Rata-rata capaian kinerja (%)												100 %	86%	15	98.177.760	20 %	10%	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				37.907.941.70 0		4.047.489.087		6.732.700.129		6.129.974.291				10.177.463.378				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)												85,8 7	89,00			29 %	22%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)												SR	SR			SR	SR	

N o.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	R p.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
1	215	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3396	61.246.048.225	566	3.848.024.376	566	8.625.064.000	259	6.179.626.488	97	96	825	10.027.650.864	33	21	Dishub
	215	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	2172	25.053.976.875	362	3.522.223.996	362	3.531.248.100	157	3.248.060.459	96	94	519	6.770.284.455	33	27	Sekretariat Dinas

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang- gung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
	2	15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2100	17.258.261.155	350	2.470.173.996	350	2.434.048.100	319	2.150.860.459	91	88	669	4.621.034.455	32	27	Sekretariat Dinas
	2	15	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	7.795.715.720	12	1.052.050.000	12	1.097.200.000	12	1.097.200.000	100	100	24	2.149.250.000	33	28	Sekretariat Dinas
	2	15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	216	716.724.120	36	63.936.000	36	100.874.600	18	92.719.600	92	93	54	156.655.600	32	22	Sekretariat Dinas
	2	15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72	273.511.676	12	25.856.000	12	37.791.400	12	37.791.400	100	100	24	63.647.400	33	23	Sekretariat Dinas
	2	15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	143.266.543	12	8.310.000	12	20.220.200	12	19.820.200	100	98	24	28.130.200	33	20	Sekretariat Dinas
	2	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	299.945.901	12	29.770.000	12	42.863.000	9	35.108.000	75	82	21	64.878.000	29	22	Sekretariat Dinas
	2	15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	32.661.860.496	12	9.997.380	12	4.596.960.000	6	4.514.233.335	100	98	18	4.524.230.715	33	14	Sekretariat Dinas
	2	15	Penyediaan Jasa Laporan	72	32.661.860.496	12	9.997.380	12	4.596.960.000	12	4.514.233.335	100	98	24	4.524.230.715	33	14	Sekretariat Dinas

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang- gung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
	2	15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936	2.813.486.734	156	251.867.000	156	395.981.300	78	393.900.000	100	99	234	645.767.000	33	23	Sekretariat Dinas
	2	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	936	2.813.486.734	156	251.867.000	156	395.981.300	156	393.900.000	100	99	312	645.767.000	33	23	Sekretariat Dinas
Rata-rata capaian kinerja (%)												97	96			33	21	
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR	
2	2	15	PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	247	2.414.071.000	24	91.743.000	41	510.000.000	13	513.322.900	100	100	37	605.065.900	53	47	Dishub
	2	15	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta	72	960.000.000	12	2.743.000	12	200.000.000	6	204.673.000	100	100	18	207.416.000	33	22	Bidang LLA
	2	15	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	72	960.000.000	12	2.743.000	12	204.673.000	12	204.673.000	100	100	24	207.416.000	33	22	Bidang LLA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang- gung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
			Jalan, Traffic Light, Warning Light, Water Barel, Stick Cone, Marka Jalan dan Zoss Beserta Perlengkapannya															
2	15	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Presentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1	100.000.000	0	-	0	100.000.000	1	99.999.900	100	100	1	99.999.900	100	100	Bidang LLA
2	15	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	100.000.000	0	-	1	100.000.000	1	99.999.900	100	100	1	99.999.900	100	100	Bidang LLA
2	15	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	174	1.354.071.000	12	89.000.000	29	210000000	6	208.650.000	100	99	18	297.650.000	25	21	Bidang LLA
2	15	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pengamanan Lalu Lintas Pada Hari-Hari Besar (Hari Raya), dan Operasi Rekayasa Pengamanan lalu Lintas	72	838.190.050	12	89.000.000	12	125.500.000	12	125.500.000	100	100	24	214.500.000	33	26	Bidang LLA
2	15	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen	102	515.880.950	0	-	17	84.500.000	17	83.150.000	100	98	17	83.150.000	17	16	Bidang LLA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggu ng Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16	
			dan Rekayasa Lalu Lintas	dan Rekayasa Lalu Lintas															
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	100			53	47		
Predikat kinerja												ST	ST			R	SR		
3	2	15	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase orang/barang melalui dermaga per tahun	78	1.606.204.000	13	201.882.000	13	267.000.000	6	178.734.000	50	48	19	178.734.000	25	16	Dishub
	2	15	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tersedianya Alur Penyeberangan Rakyat	72	1.362.000.000	12	200.000.000	12	227.000.000	6	178.734.000	100	97	18	378.734.000	33	31	Bidang LLA
	2	15	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pos dan Personil Pengendalian Pengawasan Penyeberangan	72	1.362.000.000	12	200.000.000	12	227.000.000	12	220.000.000	100	97	24	420.000.000	33	31	Bidang LLA
	2	15	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Presentase Pelaksanaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6	244.204.000	1	1.882.000	1	40.000.000	0	-	0	0	1	1.882.000	17	1	Bidang LLA
	2	15	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan	6	244.204.000	1	1.882.000	1	40.000.000	0	-	0	0	1	1.882.000	17	1	Bidang LLA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o.	Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penangg ung Jawab
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
				dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal															
Rata-rata capaian kinerja (%)														50,0	48,46			25	16	
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										620	9.402.064.000	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				881	10.811.450.764			
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)														82,27	81,49			37	28	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)														T	T			SR	SR	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang- gung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	2	16	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	24.320.568.542	134	4.457.730.905	134	4.752.268.400	132	4.724.257.798	393	378	266	9.181.988.703	124	135	Diskom info
	2	16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	21.018.619.142	26	3.538.912.154	26	3.647.959.000	24	3.640.412.618	93	100	50	7.179.324.772	35	34	
	2	16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	bula n	17.402.099.142	14	2.948.042.154	14	2.974.299.000	12	2.966.752.618	86	100	26	5.914.794.772	36	34	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	2	16	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	3.616.520.000	12	590.870.000	12	673.660.000	12	673.660.000	100	100	24	1.264.530.000	33	35	
	2	16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum SKPD	100	%	1.599.418.100	72	737.967.443	72	759.958.100	72	752.279.154	100	100	144	1.490.246.597	33	44	
	2	16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	72	bulan	22.775.000	12	4.000.000	12	3.775.000	12	3.775.000	100	100	24	7.775.000	33	34	
	2	16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK Belanja Pakai Habis	72	bulan	174.750.000	12	30.210.000	12	38.149.000	12	38.149.000	100	100	24	68.359.000	33	39	
	2	16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	72	bulan	16.429.700	12	950.000	12	2.429.700	12	2.427.000	100	100	24	3.377.000	33	21	
	2	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	72	bulan	24.996.200	12	3.395.800	12	4.996.200	12	4.995.300	100	100	24	8.391.100	33	34	
	2	16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Keperluan Kantor	72	bulan	60.467.200	12	8.180.600	12	10.608.200	12	10.608.200	100	100	24	18.788.800	33	31	
	2	16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Operasional Kantor PIPPD di Jakarta	72	bulan	1.300.000.000	12	691.231.043	12	700.000.000	12	692.324.654	100	99	24	1.383.555.697	33	106	
	2	16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	222.000.000	12	20.397.603	12	36.000.000	12	28.809.376	100	80	24	49.206.979	22	22	
	2	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	72	bulan	222.000.000	12	20.397.603	12	36.000.000	12	28.809.376	100	80	24	49.206.979	22	22	
	2	16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		100	%	1.480.531.300	24	160.453.705	24	308.351.300	24	302.756.650	100	99	48	463.210.355	33	34	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
			Urusan Pemerintahan Daerah																
	2	16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Operasional / BBM Kendaraan Dinas PP dan PA : roda 4 (3 Unit) roda 2 (2 Unit)	72	bula n	1.225.531.300	12	143.153.705	12	225.531.300	12	220.056.650	100	98	24	363.210.355	33	30
	2	16	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara nya Halaman dan Bangunan Gedung Kantor	72	bula n	255.000.000	12	17.300.000	12	82.820.000	12	82.700.000	100	100	24	100.000.000	33	39
Rata-Rata Capaian Kinerja												98	95			31	34		
Predikat Kinerja												ST	ST			SR	SR		
2	2	16	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Peningkata n Keterbukaa n Informasi Publik	100	%	24.215.020.000	36	3.047.404.000	36	4.026.520.000	36	3.970.661.806	100	88	72	7.018.065.806	33	20
	2	16	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a		100	%	24.215.020.000	36	3.047.404.000	36	4.026.520.000	36	3.970.661.806	100	88	72	7.018.065.806	33	20
	2	16	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	72	bula n	500.000.000	12	-	12	90.000.000	12	57.680.000	100	64	24	57.680.000	33	12
	2	16	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Konten dan Perencanaa n Media Komunikasi Publik	72	bula n	3.015.000.000	12	-	12	551.500.000	12	549.200.000	100	100	24	549.200.000	33	18
	2	16	Layanan Hubungan Media	Layanan Hubungan Media	72	bula n	20.700.020.000	12	3.047.404.000	12	3.385.020.000	12	3.363.781.806	100	99	24	6.411.185.806	33	31
Rata-Rata Capaian Kinerja												100	88			33	20		
Predikat Kinerja												ST	T			SR	SR		
	2	16	Program Aplikasi Informatika	- Meningkatkan nya	100	%	13.053.502.100	84	2.392.802.598	84	2.341.643.100	60	2.299.907.695	160	157	144	4.692.710.293	60	86

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				penerapan SPBE (e-Governmen t)																
	2	16	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100	%	11.721.570.100	24	2.305.546.098	24	2.149.112.100	24	2.108.846.295	100	98	48	4.414.392.393	33	36	
	2	16	Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dab Sub Domain dalam Penelenggara Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksana nya pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penelenggara a Pemerintah Daerah	72	bula n	366.279.650	12	64.161.189	12	61.279.650	12	60.476.937	100	99	24	124.638.126	33	34	
	2	16	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksana nya Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	72	bula n	11.355.290.450	12	2.241.384.909	12	2.087.832.450	12	2.048.369.358	100	98	24	4.289.754.267	33	38	
	2	16	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100	%	1.331.932.000	60	87.256.500	60	192.531.000	36	191.061.400	60	59	96	278.317.900	27	50	
	2	16	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksana nya Koordinasi dan Sinkronisas i Sistem Keamanan Informasi	72	bula n	39.440.000	12	39.436.000	12	-	-	-	-	-	12	39.436.000	17	100	
	2	16	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksana nya Koordinasi dan Sinkronisas i Sistem Keamanan Informasi	72	bula n	47.961.000	12	47.820.500	12	-	-	-	-	-	12	47.820.500	17	100	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				i Data dan Informasi Elektronik																
	2	16	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	72	bula	780.000.000	12	-	12	130.000.000	12	130.000.000	100	100	24	130.000.000	33	17	
	2	16	Pengelolaan Government Chief Information Officer(GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer(GCIO)	72	bula	345.000.000	12	-	12	34.700.000	12	34.025.000	100	98	24	34.025.000	33	10	
	2	16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistemSPBE	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistemSPBE	72	bula	119.531.000	12	-	12	27.831.000	12	27.036.400	100	97	24	27.036.400	33	23	
Rata-Rata Capaian Kinerja														80	79			30	43	
Predikat Kinerja														T	T			SR	SR	
3	2	20	PROGRAM PENYELENGGARA STATISTIK DAERAH	TERLAKSANANYA PENYELENGGARA STATISTIK DAERAH	100	%	958.000.000	36	-	36	138.000.000	36	137.899.800	75	75	72	137.899.800	25	11	
	2	20	Penyelenggara Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/ kota		100	%	958.000.000	36	-	36	138.000.000	36	137.899.800	75	75	72	137.899.800	25	11	
	2	20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	72	bula	250.000.000	12	-	12	45.000.000	12	44.959.900	100	100	24	44.959.900	33	18	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Statistik Sektoral	Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik																
	2	20	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	72	bula n	360.000.000	12	-	12	50.000.000	12	50.000.000	100	100	24	50.000.000	33	14	
	2	20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	72	bula n	348.000.000	12	-	12	43.000.000	12	42.939.900	100	100	24	42.939.900	33	12	
												Rata-Rata Capaian Kinerja		75	75			25	11	
												Predikat Kinerja		S	S			SR	SR	
	2	21	PROGRAM PENYELENGGARA PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	TERLAKSANANYA PENYELENGGARA PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100	%	230.000.000	12	-	12	27.000.000	12	26.870.000	100	100	24	26.870.000	33	12	Diskom info
	2	21	Penyelenggara persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota		100	%	230.000.000	12	-	12	27.000.000	12	26.870.000	100	100	24	26.870.000	33	12	
	2	21	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota berbasis	Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	72	bula n	230.000.000	12	-	12	27.000.000	12	26.870.000	100	100	24	26.870.000	33	12	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten / Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik															
Rata-Rata Capaian Kinerja												100,00	99,52			33	12	
Predikat Kinerja												ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												90,64	87,09			31	24	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												ST	T			SR	SR	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			28.854.619.765		2.962.368.684		3.767.612.819		3.767.612.819				7.140.705.703			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		40	90.000.000			8	45.000.000		45.000.000				45.000.000			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	15	30.000.000			3	35.000.000	3	35.000.000	100,00	100	3	35.000.000	20,00	116,67	DPMPTSP
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	25	60.000.000			5	10.000.000	5	10.000.000	100,00	100	5	10.000.000	20,00	16,67	DPMPTSP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		190	15.919.111.250	30	1.354.634.838	32	2.252.528.491		2.252.528.491				3.607.163.329			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	14.607.873.022	14	1.192.864.838	14	2.074.568.491	14	2.074.568.491	100,00	100	28	3.267.433.329	33,33	22,37	DPMPTSP
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	106	1.311.238.228	16	161.770.000	18	177.960.000	18	177.960.000	100,00	100,00	34	339.730.000	32,08	25,91	DPMPTSP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2928	2.921.044.420	418	225.748.305	80	42.400.000		42.400.000				678.872.505			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung g Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12= 8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
5	Pengadaan Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PDH	440	284.206.240	40	25.350.000	80	42.400.000	80	42.400.000	100,00	100,00	120	67.750.000	27,27	23,84	DPMPTSP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2488	2.636.838.180	378	200.398.305	422	410.724.200		410.724.200				611.122.505			
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Kantor	93	180.524.623	13	12.787.000	16	26.971.000	16	26.971.000	100,00	100,00	29	39.758.000	31,18	22,02	DPMPTSP
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	228	309.512.987	28	26.361.500	40	46.379.500	40	46.379.500	100,00	100,00	68	72.741.000	29,82	23,50	DPMPTSP
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	162	236.760.174	22	17.733.300	28	30.459.200	28	30.459.200	100,00	100,00	50	48.192.500	30,86	20,35	DPMPTSP
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	64	317.930.391	9	45.629.500	11	40.188.500	11	40.188.500	100,00	100,00	20	85.818.000	31,25	26,99	DPMPTSP
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah/Koran Majalah yang tersedia	1179	140.002.000	179	17.900.000	200	20.000.000	200	20.000.000	100	100,00	379	37.900.000	32,15	27,07	DPMPTSP
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan /diikuti	762	1.452.108.005	127	79.987.005	127	246.726.000	127	246.726.000	100,00	100,00	254	326.713.005	33,33	22,50	DPMPTSP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80	3.119.008.559	20	737.567.000	13	403.174.128		403.174.128				1.140.741.128			
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	38	649.993.037	8	225.608.000	6	112.588.200	6	112.588.200	100,00	100,00	14	338.196.200	36,84	52,03	DPMPTSP
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	28	994.863.222	8	338.193.000	5	77.585.928	5	77.585.928	100	100,00	13	415.778.928	46,42857	41,79	DPMPTSP
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan pendukung kegiatan pelayanan	14	1.474.152.300	4	173.766.000	2	213.000.000	2	213.000.000	100	100,00	6	386.766.000	42,85714	26,24	DPMPTSP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		144	2365923853	24	292.538.331	24	308.000.000		308.000.000				600.538.331			
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa kantor (listrik, air, telepon dan tv) yang terbayar	18	443.230.260	3	36.538.331	3	53.000.000	3	53.000.000	100,00	100,00	6	89.538.331	33,33	20,20	DPMPTSP
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Tenaga Kontrak	126	1.922.693.593	21	256.000.000	21	255.000.000	21	255.000.000	100,00	100,00	42	511.000.000	33,33	26,58	DPMPTSP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		68	1.802.693.503	23	151.481.905	10	305.786.000		305.786.000				457.267.905			
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dalam Pemeliharaan, Biaya	18	1.438.932.554	3	122.481.905	3	238.500.000	3	238.500.000	100,00	100,00	6	360.981.905	33,33	25,09	DPMPTSP

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12= 8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Pajak dan Perizinan															
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dalam Pemeliharaan	30	292.899.283	10	14.000.000	5	58.136.000	5	58.136.000	100,00	100,00	15	72.136.000	50,00	24,63	DPMPTSP
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Pemeliharaan	20	70.861.666	10	15.000.000	2	9.150.000	2	9.150.000	100,00	100,00	12	24.150.000	60,00	34,08	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)											100	100			35	32	
Predikat kinerja											ST	ST			SR	SR	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			6.155.556.700		447.288.200		719.309.000		719.309.000							
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		21	1.632.110.500	1	197.412.000	4	107.210.000		107.210.000				304.622.000			
20	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan SK Bupati ttg Perizinan dan Non Perizinan	21	1.632.110.500	1	197.412.000	4	107.210.000	4	107.210.000	100,00	100,00	5	304.622.000	23,81	18,66	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		82	4.523.446.200	2	249.876.200	16	612.099.000		612.099.000				861.975.200			
21	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/Kota.	82	4.523.446.200	2	249.876.200	16	612.099.000	16	612.099.000	100,00	100,00	18	861.975.200	21,95	19,06	
Rata-rata capaian kinerja (%)											100	100			23	19	
Predikat kinerja											ST	ST			SR	SR	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			2.277.295.029		243.985.500		297.056.400		297.056.400							
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		3978	2.277.295.029	318	243.985.500	732	297.056.400		297.056.400				541.041.900			
22	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi dikembangkan dan pemanfaatannya	6	376.668.290	1	36.950.000	1	55.645.000	1	55.645.000	100,00	100,00	2	92.595.000	33,33	24,58	
23	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan	- Jumlah Survey Lapangan Pemenuhan	2510	997.247.236	145	117.100.000	473	125.265.900	473	125.265.900	100,00	100,00	618	242.365.900	24,62	24,30	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12= 8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	Non Perizinan Penanaman Modal	Komitmen - Jumlah Rekom Pertimbangan Teknis Perizinan															
24	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	- Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan - Jumlah Pengaduan Pengaduan yang terselesaikan	36	262.353.725	6	30.304.500	6	38.014.500	6	38.014.500	100,00	100,00	12	68.319.000	33,33	26,04	
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	- Jumlah Pemohon Terlayani - Tersedianya Dokumen Pemohon yang terlayani	1426	641.025.778	166	59.631.000	252	78.131.000	252	78.131.000	100,00	100,00	418	137.762.000	29,31	21,49	
Rata-rata capaian kinerja (%)											100	100			30	24	
Predikat kinerja											ST	ST			SR	SR	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			2.693.040.265		230.883.960		403.295.000		403.295.000							
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1649	2.693.040.265	49	230.883.960	300	403.295.000		403.295.000				634.178.960			
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang mematuhi Ketentuan Penanaman Modal yang dilakukan Pengawasan	114	495.227.825	14	27.510.009	0	0	0	-	0,00	0,00	14	27.510.009	12,28	5,56	
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis mengenai Kemudahan Berusaha, Perizinan OSS dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online	1060	1.358.780.506	10	158.523.951	210	240.940.000	210	240.940.000	100,00	100,00	220	399.463.951	20,75	29,40	
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk 2. Jumlah Buku Data Perizinan	475	839.031.934	25	44.850.000	90	162.355.000	90	162.355.000	100,00	100,00	115	207.205.000	24,21	24,70	
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)											66,67	66,67			19	20	
PREDIKAT KINERJA											S	S			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			39.980.511.759		3.884.526.344		5.187.273.219		5.187.273.219				7.140.705.703				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung g Jawab	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	3	4	5		6		7		12= 8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)											91,67	100,00				27	24	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)											ST	ST				SR	SR	

N O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PD PADA TAHUN (Periode 2021 s/d 2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PD s/d Tahun lalu		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN P-RKPD PD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN P-RKPD PD 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN P-RKPD PD TAHUN 2022 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PD S/D TAHUN 2022 (%)		UNIT PD PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1.	2 19 01	URUSAN WAJIB																
		Kepemudaan dan Olahraga																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.238.713.118	-		*100	2.696.636.457	-	1.449.709.547	53,76		1.449.709.547		8,93		
	2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.650.515.192	-		26	2.292.352.457	18	1.134.696.119	69,23	49,50	18	1.134.696.119		8,31	
	2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	11.397.244.884	-		14	1.923.272.457	9	1.920.453.967	64,29	99,85	9	1.920.453.967	12,86	16,85	Dispora
	2 19 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120	2.253.270.308	-		12	369.080.000	9	369.080.000	75,00	100,00	9	369.080.000	7,50	16,38	Dispora
	2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			355.011.565	-			65.850.000	-	65.500.000	0,00	99,47	-	65.500.000		18,45	
	2 19 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90	355.011.565	-		54	65.850.000	54	65.500.000	100,00	99,47	54	65.500.000	60,00	18,45	Dispora
	2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			690.114.400	-			101.464.000	-	87.641.150		86,38	-	87.641.150		12,70	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PD PADA TAHUN (Periode 2021 s/d 2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PD s/d Tahun lalu		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN P-RKPD PD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN P-RKPD PD 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PD S/D TAHUN 2022 (%)		UNIT PD PENANGG UNG JAWAB
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14= 6 + 12		15 = 14/5x100		16
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
	2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	35	21.865.416	-		7	3.581.500	6	3.576.500	85,7 1	99,86	6	3.576.500	17,1 4	16,36	Dispora
	2.19.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 0	223.754.968	-		40	30.789.500	30	30.789.500	75,0 0	100,0 0	30	30.789.500	15,0 0	13,76	Dispora
	2.19.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40	22.527.819	-		8	3.690.000	8	3.690.000	100, 00	100,0 0	8	3.690.000	20,0 0	16,38	Dispora
	2.19.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40	80.587.320	-		8	13.200.000	7	13.200.000	87,5 0	100,0 0	7	13.200.000	17,5 0	16,38	Dispora
	2.19.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25	67.003.473	-		5	10.975.000	4	10.975.000	80,0 0	100,0 0	4	10.975.000	16,0 0	16,38	Dispora
	2.19.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10	73.261.200	-		12	12.000.000	6	12.000.000	50,0 0	100,0 0	6	12.000.000	60,0 0	16,38	Dispora
	2.19.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	201.114.204	-		15	27.228.000	14	27.101.300	93,3 3	99,53	14	27.101.300	18,6 7	13,48	Dispora
	2.19.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			117.217.920	-			14.200.000	-	13.017.291		91,67	-	13.017.291		11,11	
	2.19.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15	117.217.920	-		3	14.200.000	2	13.017.291	66,6 7	91,67	2	13.017.291	13,3 3	11,11	Dispora
	2.19.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			1.425.854.041	-			222.770.000	-	199.770.000		89,68	-	199.770.000		14,01	

N O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PD PADA TAHUN (Periode 2021 s/d 2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PD s/d Tahun lalu		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN P-RKPD PD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN P-RKPD PD 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PD S/D TAHUN 2022 (%)		UNIT PD PENANGG UNG JAWAB
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14= 6 + 12		15 = 14/5X100		16
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		Pemerintahan Daerah																
	2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25	1.141.966.891	-		5	179.270.000	5	176.152.340	100,00	98,26	5	176.152.340	20,00	15,43	Dispora
	2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	183.153.000	-		1	30.000.000	1	30.000.000	100,00	100,00	1	30.000.000	20,00	16,38	Dispora
	2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25	100.734.150	-		10	13.500.000	8	13.500.000	80,00	100,00	8	13.500.000	32,00	13,40	Dispora
Rata-rata capaian kinerja (%)												40,71	62,20			12,86	9,12	
Predikat Kinerja												SR	R			SR	SR	
2.	2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			6.914.710.743	-			1.119.506.200	-	513.848.800		45,90	-	513.848.800		7,43	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			3.006.914.378	-			479.745.000	-	179.087.600		37,33	-	179.087.600		5,96	Dispora
	2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan KapasitasDaya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan	150	170.856.108	-		100	21.905.800	80	21.905.800	80,00	100,00	80	21.905.800	53,33	12,82	Dispora

N O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PD PADA TAHUN (Periode 2021 s/d 2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PD s/d Tahun lalu		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN P-RKPD PD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN P-RKPD PD 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PD S/D TAHUN 2022 (%)		UNIT PD PENANGG UNG JAWAB
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14= 6 + 12		15 = 14/5X100		16
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		Saing Pemuda Pelopor	KapasitasDaya Saing Pemuda Pelopor															
	2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	50 0	332.933.082		-	200	54.533.600	200	54.533.600	100, 00	100,0 0	200	54.533.600	40,0 0	16,38	Dispora
	2 19 02 2.01 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/KotaPerenca naan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan PengawasanPrasar ana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/KotaPerenca naan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan PengawasanPrasa rana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	50 0	122.102.000		-	5	20.000.000	1	19.990.000	20,0 0	99,95	1	19.990.000	0,20	16,37	Dispora
	2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	50 0	314.610.455		-	200	45.132.400	-	45.132.400	0,00	100,0 0	-	45.132.400	0,00	14,35	
	2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	37 5	2.066.412.733		-	80	338.173.200	30	337.991.200	37,5 0	99,95	30	337.991.200	8,00	16,36	
	2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.907.796.365		-		639.761.200	-	409.761.200		64,05	-	409.761.200		10,49	
	2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi	Jumlah Peningkatan Kapasitas	10 00	3.907.796.365		-	200	639.761.200	200	639.761.200	100, 00	100,0 0	200	639.761.200	20,0 0	16,37	Dispora

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PD PADA TAHUN (Periode 2021 s/d 2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PD s/d Tahun lalu		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN P-RKPD PD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN P-RKPD PD 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PD S/D TAHUN 2022 (%)		UNIT PD PENANGG UNG JAWAB
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14= 6 + 12		15 = 14/5X100		16
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota															
Rata-rata capaian kinerja (%)												56,2 5	116,8 8			20,2 6	18,18	
Predikat Kinerja												R	ST			SR	SR	
3	2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					-		4.025.294.200	-	689.241.950		17,12	-	689.241.950			Dispora
	2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			183.153.000		-		30.000.000	-	27.300.000		91,00	-	27.300.000		14,91	Dispora
	2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	15	183.153.000		-	20	30.000.000	18	30.000.000	90,0 0	100,0 0	18	30.000.000	120,00	16,38	Dispora
	2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.587.051.505		-		576.426.500	-	94.081.500		16,32	-	94.081.500		2,62	
	2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga TingkatKabupaten /Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga TingkatKabupate n/Kota	10	192.310.650		-	4	31.376.500	4	31.376.500	100,00	100,00	4	31.376.500	40,00	16,32	Dispora
	2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	25	3.394.740.855		-	10	545.050.000	10	535.820.000	100,00	98,31	10	535.820.000	40,00	15,78	Dispora
	2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi			35.192.743.332		-		3.315.367.700	-	522.441.950		15,76	-	522.441.950		1,48	

N O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PD PADA TAHUN (Periode 2021 s/d 2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PD s/d Tahun lalu		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN P-RKPD PD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN P-RKPD PD 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD S/D TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PD S/D TAHUN 2022 (%)		UNIT PD PENANGG UNG JAWAB
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14= 6 + 12		15 = 14/5X100		16
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		Tingkat Daerah Provinsi																
	2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	25 0	35.009.596.437		-	100	3.291.483.700	-	3.291.483.70 0	0,00	100,0 0	-	3.291.483.700	0,00	9,40	Dispora
	2 19 03 2.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	20	183.146.895		-	5	23.884.000	5	23.535.450	100, 00	98,54	5	23.535.450	25,0 0	12,85	Dispora
	2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			631.877.850		-		103.500.000	-	103.500.000		100,0 0	-	103.500.000		16,38	
	2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	10	631.877.850		-	4	103.500.000	4	103.500.000	100, 00	100,0 0	4	103.500.000	40,0 0	16,38	Dispora
Rata-rata capaian kinerja (%)												81,6 7	99,00			44,1 7	20,42	
Predikat Kinerja												SR	ST			SR	SR	
Rata-rata capaian kinerja (%)												59,5 4	92,69			25,7 6	15,91	
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									-		2.652.800.297							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.....)												95,0 0	90,50			25,7 6	15,9	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.....)												ST	ST			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	#####	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			22.169.115.396		3.459.439.106		3.611.146.700		3.383.859.391	0		0	6.843.298.497	0,00	30,87	Dinas Perpus Arsip
	2.23.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	113.102.000				30.000.000		29.999.500	100	100	0	59.999.500	20,00	35,59	
	2.23.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	61.051.000			20.000.000	3	20.000.000	100	100	3	20.000.000	20,00	32,76	
	2.23.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Laporan	52.051.000			10.000.000	4	9.999.500	100	100	4	19.999.500	20,00	38,42	
	2.23.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	14.112.793.364		2.287.635.606		2.409.168.000		2.318.358.336	100	94	0	4.605.993.942	34,31	42,76	
	2.23.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109	Orang/Bulan	12.058.183.010	17/14	1.953.853.606	2.062.700.000	23	2.023.070.336	100	98	25	4.085.770.336	22,94	33,88	
	2.23.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pegawai	60	Bulan	1.993.559.354	12	305.240.000	326.540.000	12	275.360.000	100	84	24	580.600.000	40,00	29,12	
	2.23.01.202.03	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	30	Dokumen	61.051.000	6	28.542.000	19.928.000	6	19.928.000	100	100	12	39.856.000	40,00	65,28	
	2.23.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	128.512.355		-		21.050.000		21.050.000	100	100	0	42.100.000	8,28	31,01	
	2.23.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	145	Stell	128.512.355			21.050.000	29	21.050.000	100	100	12	39.856.000	8,28	31,01	
	2.18.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	692.013.239		124.526.000		114.988.000		114.538.585	100	100		239.064.585	40,00	33,36	
	2.23.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	61.051.000	12	10.000.000	10.000.000	12	10.000.000	100	100	24	20.000.000	40,00	32,76	
	2.23.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	112.102.000	12	29.950.000	20.000.000	12	20.000.000	100	100	24	49.950.000	40,00	44,56	
	2.23.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	60	Bulan	61.051.000	12	10.000.000	10.000.000	12	10.000.000	100	100	24	20.000.000	40,00	32,76	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Tangga yang Disediakan																
	2.23.01.20 6.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Bulan	61.051.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100	24	20.000.000	40,0 0	32,7 6	
	2.23.01.20 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Bulan	61.051.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100	24	20.000.000	40,0 0	32,7 6	
	2.23.01.20 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Bulan	96.039.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100	24	20.000.000	40,0 0	20,8 2	
	2.23.01.20 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	239.668.239	12	44.576.000	12	44.988.000	12	43.914.325	100	98	24	88.902.325	40,0 0	37,0 9	
	2.23.01.2. 07	Pengadaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		496.503.055		107.000.000		92.000.000		92.000.000	100	100		199.000.000	40,0 0	265, 33	
	2.23.01.20 7.06	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Tahun	457.882.500	1	90.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	100	100	2	150.000.000	40,0 0	32,7 6	
	2.23.01.20 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60	Bulan	20.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100	24	20.000.000	40,0 0	100, 00	
	2.23.01.20 7.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60	Bulan	18.620.555	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	100	100	24	14.000.000	40,0 0	75,1 9	
	2.23.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		109.891.800		18.000.000		18.000.000		6.000.000	100	33		24.000.000	40,0 0	21,8 4	
	2.23.01.20 8.02	Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	JumlahPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	bulan	109.891.800	12	18.000.000	12	18.000.000	12	6.000.000	100	33	24	24.000.000	40,0 0	21,8 4	
	2.23.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		1.357.660.074		162.260.000		222.381.300		208.966.820	100	94		371.226.820	100, 29	27,3 4	
	2.23.01.20 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	9017 5	Unit/bulan	1.357.660.074	6/1 2	162.260.000	6/ 12	222.381.300	6/ 9	208.966.820	100	94	904 41	431.348.120	100, 29	31,7 7	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penang gung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																
		Pemeliharaan Barang Milik DAerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah				61.051.000		12.000.000		10.000.000		19.000.000	100	100		31.000.000	40,00	50,78	
	2.23.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		60	Bulan	61.051.000	12	12.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	100	100	24	38.000.000	40,00	62,24	
Rata-rata capaian kinerja (%).													100	90			40,36	63,50	
Pedikat kinerja.													ST	ST			SR	S	
	#####	Program Pembinaan Perpustakaan				2.625.193.000		327.962.000		410.000.000		341.626.750		83		669.588.750		25,51	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%		1.282.071.000		156.882.000		210.000.000		166.395.000	100	82		376.395.000	35,63	29,36	
	2.18.02.2.01.02	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	55	Kecamatan	366.306.000	11	51.882.000	11	60.000.000	11	59.895.000	100	100	22	111.777.000	40,00	30,51	
	2.18.02.2.01.08	Pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	4.650	Buku	549.459.000	600	90.000.000	650	90.000.000	650	58.076.800	100	65	1250	148.076.800	26,88	26,95	
	2.18.02.2.01.09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	60	Bulan	366.306.000	12	15.000.000	12	60.000.000	12	48.423.200	100	81	24	63.423.200	40,00	17,31	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah kabupaten/Kota		100%		1.343.122.000		171.080.000		200.000.000		175.231.750	100	88		375.231.750	0,00	27,94	
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	1. Jumlah lomba bercerita; 2. Jumlah lomba pidato bahasa lampung; 3. Pelayanan perpustakaan dengan mobil keliling;	3	Lokus	1.343.122.000	1	171.080.000	1	200.000.000	1	175.231.750	100	88	2	346.311.750	66,67	25,78	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
Rata-rata capaian kinerja (%).												100	85			17,81	28,65		
Pedikat kinerja.												ST	T			SR	SR		
	#####	Program Pengelolaan Arsip			2.472.395.509		420.055.500		283.559.400		232.319.400		82		515.878.800		20,87		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		100%	788.465.200		94.144.000		52.487.000		52.487.000	100	100		146.631.000	30,00	18,60		
	2.24.04.2.01.02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	20	Opd	788.465.200	3	94.144.000	3	52.487.000	3	52.487.000	100	100	6	104.974.000	30,00	13,31	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		100%	317.465.200		130.391.500		52.000.000		51.920.000	50	100		182.311.500	10,76	57,43		
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, pengolahan, preservasi,dan akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	7.000	Arsip	317.465.200	3	130.391.500	1500	52.000.000	750	51.920.000	50	100	753	103.920.000	10,76	32,73	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		100%	1.366.465.109		195.520.000		179.072.400		127.912.400	40	69	0	323.432.400	32,50	20,02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.24.02.2.03.01	Penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7.000	Layanan Arsip	438.047.900	1000	29.000.000	1000	27.000.000	750	18.000.000	75	67	1750	45.000.000	25,00	10,27	
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	180	SDM	928.417.209	36	166.520.000	36	152.072.400	36	109.912.400	5	72	72	276.432.400	40,00	29,77	
Rata-rata capaian kinerja (%).												63,36	89,77			24,42	32,02		
Pedikat kinerja.												S	ST			SR	SR		
Jumlah anggaran dan realisasi seluruh program									4.304.706.100		3.957.805.541				8.028.766.047				
Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh Program												87,78	88,19			27,53	41,39		
Predikat kinerja dari seluruh program												T	T			SR	SR		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD padaTahun (periode 2021/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
1	URUSAN PERIKATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran					3.078.607.683		3.362.279.619,00		3.301.350.421							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1	3.500.000		3.500.000							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	Dok	60.000.000			1	1.500.000	1	1.500.000	100,00	100,00	1	1.500.000	20,00	2,50	Dinas Perikatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	Dok	60.000.000			3	2.000.000	3	2.000.000	100,00	100,00	3	2.000.000	60,00	3,33	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.660.258.785		2.795.468.619		2.749.370.167							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		72	bln	12.704.437.570	12	2.460.548.785	12	2.581.658.619	9	2.535.560.167	75,00	98,21	21	4.996.108.952	29,17	39,33	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		72	bln	1.074.300.000	12	199.710.000	12	201.310.000	12	201.310.000	100,00	100,00	24	401.020.000	33,33	37,33	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5	laporan	60.000.000			1	11.500.000	1	11.500.000	100,00	100,00	1	11.500.000	20,00	19,17	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5	laporan	60.000.000			1	1.000.000	1	1.000.000	100,00	100,00	1	1.000.000	20,00	1,67	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		120	stel	105.000.000									-	-			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				686.720.000		34.831.000		43.831.000		42.048.360							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD padaTahun (periode 2021/ d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		72	bln	133.000.000	12	28.111.000	12	9.111.000	12	9.111.000	100,00	100,00	24	37.222.000	33,33	27,99	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		48	bln	67.000.000				-	-	-			-	-			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		72	bln	44.720.000	12	6.720.000	12	6.720.000	12	6.720.000	100,00	100,00	24	13.440.000	33,33	30,05	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		48	bln	132.000.000				-	-	-			-	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		48	bln	67.000.000				-	-	-			-	-	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60	bln	158.000.000			12	28.000.000	12	26.217.360	100,00	93,63	12	26.217.360	20,00	16,59	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		48	bln	85.000.000									-	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		28	unit	450.000.000									-	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						266.675.688	12	278.000.000		268.676.424							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		72	bln	133.000.000	12	6.675.688	12	18.000.000	12	14.676.424	100,00	81,54	24	21.352.112	33,33	16,05	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		72	bln	1.360.000.000	20	260.000.000	20	260.000.000	20	254.000.000	100,00	97,69	40	514.000.000	55,56	37,79	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah						116.842.210	9	241.480.000		237.755.470							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD padaTahun (periode 2021/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		72	bln	1.122.500.000	3	95.842.210	12	211.480.000	12	207.755.470	100,00	98,24	15	303.597.680	20,83	27,05	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		72	bln	1.360.000.000	12	21.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	100,00	100,00	24	51.000.000	33,33	3,75	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,08	97,64			21,70	13,82	
											Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	
2		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	63,82		289.179.942,50		320.127.000	14	270.000.000		255.214.000		94,52		575.341.000		198,96	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						258.807.000	14	270.000.000		255.214.000							Dinas Perikanan
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		4	buku	760.000.000					-	-			-	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		57	unit	670.083.880	7	83.667.000	14	260.400.000	14	255.214.000	100,00	98,01	21	338.881.000	36,84	50,57	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		9	unit	250.000.000	4	175.140.000			-	-			4	175.140.000	44,44	70,06	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						61.320.000											
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		3000	org	207.691.558	500	61.320.000							500	61.320.000	16,67	29,52	

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD padaTahun (periode 2021/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		10	kub	40.000.000									-	-	0,00	0,00	
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		5	kub	10.000.000									-	-	0,00	0,00	
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																	
		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1	dok	30.000.000									-	-	0,00	0,00	
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		4	Unit	105.000.000									-	-	0,00	0,00	
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		30	Dok	45.000.000									-	-	0,00	0,00	
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal		30	Dok	45.000.000									-	-	0,00	0,00	

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD padaTahun (periode 2021/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penan ggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																	
		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		30	Dok	45.000.000									-	-	0,00	0,00	
		Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		30	Dok	45.000.000									-	-	0,00	0,00	
		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu)																	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD padaTahun (periode 2021/ d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Daerah Kabupaten/Kota																	
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		30	Dok	45.000.000									-	-	0,00	0,00	
		Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		30	Dok	45.000.000									-	-	0,00	0,00	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00	98,01			7,00	10,73	
											Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR	
3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan	84,30		922.914.710,10		627.189.310	1	215.000.000		129.100.000		60,05		756.289.310		81,95	
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						53.650.000		85.000.000					-	53.650.000			Dinas Perikanan
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing													-	-	0,00	0,00	

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD padaTahun (periode 2021/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		6	Dok	449.050.000					-	-			-	-	0,00	0,00	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						10.319.000		15.000.000		15.000.000							
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		24	klompok	760.000.000									-	-	0,00	0,00	
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		130	pembudidaya	138.000.000	30	10.319.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100,00	100,00	130	25.319.000	100,00	18,35	
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									-	-							
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi		4	Dok	78.000.000					-	-			-	-	0,00	0,00	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD padaTahun (periode 2021/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		4	Dok	10.000.000						-			-		0,00	0,00	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						563.220.310		115.000.000		114.100.000							
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5	Dok	138.000.000			1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	100,00	1	20.000.000	20,00	14,49	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		29	paket	1.408.500.000	5	380.484.600	3	80.000.000	3	79.700.000	100,00	99,63	8	460.184.600	27,59	32,67	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		4	paket	143.000.000					-	-			-	-	0,00	0,00	
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		6	Dok	753.000.000	1	182.735.710	1	15.000.000	1	14.400.000	100,00	96,00	2	197.135.710	33,33	26,18	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		115	Pembudidaya	153.112.000					-	-			-	-	0,00	0,00	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		36,36	35,97			16,45	8,34	
											Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
4		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	100		215.346.765,69		40.640.000		130.620.000		89.820.000		68,76		130.460.000		60,58	100	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD padaTahun (periode 2021/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penan ggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil							1	20.000.000		19.700.000							Dinas Perika nan
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		5	dok	85.000.000			1	20.000.000	1	19.700.000	100 ,00	98,50	1	19.700.000	20,00	23,18	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						5.560.000		40.500.000		-							
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		60	Poklahsar	150.000.00 0	10	5.560.000	200	40.500.000					10	5.560.000	16,67	3,71	
		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						35.080.000		70.120.000		70.120.000							
		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		15 00	org	280.080.00 0	250	35.080.000	300	65.000.000	300	65.000.000	100 ,00	100,0 0	550	100.080.000	36,67	35,73	
		Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		8	Kelompok	217.207.02 8			12	5.120.000		5.120.000	0,0 0	100,0 0	-	5.120.000	0,00	2,36	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50, 00	74,63			39,79	14,40	
											Predikat Kinerja		SR	S			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD padaTahun (periode 2021/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang ggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
										Predikat Kinerja								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.977.899.619		3.775.484.421					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)												85,88	85,07			46,46	14,40	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)												T	T			SR	SR	

NO	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD PD pada tahun 2026 (akhir Periode Rensta SKPD) (Anggaran Renstra Untuk 5 tahun)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD Tah s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1				2	3	4		6		12=8+9+10+11		13=12/6*100		14=5+12		15=14/4*100		16
1	3	2	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a Perkantoran		13	22.411.702.020	2	3.499.211.228	2	3.471.226.523	100,0 0	99,20	5	6.817.485.829	38,4 6	30,4 2	DISPAR
	3	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	374.000.000	2	32.700.000	2	32.700.000	100,0 0	100,0 0	5	46.690.000	38,4 6	12,4 8	DISPAR
	3	2	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	dok 65.000.000	2	25.700.000	2	25.700.000	100,0 0	100,0 0	5	35.700.000	38,46	54,92	DISPAR
	3	2	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Tersedianya anggaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	dok 50.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	100,0 0	100,0 0	4	10.990.000	40,00	21,98	DISPAR
	3	2	0	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	12 0	15.844.679.420	24	2.711.610.978	24	2.694.675.370	100,0 0	99,38	48	5.462.695.826	40,0 0	34,4 8	DISPAR
	3	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	60	bulan 14.839.979.420	12	2.542.110.978	12	2.525.175.370	100,0 0	99,33	24	5.128.495.826	40,00	34,56	DISPAR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiat an	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD PD pada tahun 2026 (akhir Periode Rensta SKPD) (Anggaran Renstra Untuk 5 tahun)			Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD Tah s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab						
						K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.				
1	1			2	3	K		Rp.	4	K	Rp.	6	K	Rp.	12=8+9+10+11	K	Rp.	13=12/6*100	K	Rp.	14=5+12	K	Rp.	15=14/4*100	16
		3	2 6 0 1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	bulan	1.004.700.000		12	169.500.000		12	169.500.000		100,0 0	100,0 0		24	334.200.000		40,00	33,26	DISPAR	
		3	2 6 0 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Pelayanan Umum Perangkat Daerah	24 0		861.860.000		48	164.368.950		12	164.368.188		25,00	100,0 0		60	266.377.038		25,0 0	30,9 1	DISPAR	
		3	2 6 0 1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bulan	98.343.200		12	31.651.800		12	31.651.800		100,0 0	100,0 0		24	47.995.000		40,00	48,80	DISPAR	
		3	2 6 0 1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	bulan	165.281.950		12	25.799.300		12	25.799.300		100,0 0	100,0 0		24	56.213.950		40,00	34,01	DISPAR	
		3	2 6 0 1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	60	bulan	37.778.850		12	5.778.850		12	5.778.850		100,0 0	100,0 0		72	10.778.850		120,0 0	28,53	DISPAR	
		3	2 6 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	60	bulan	118.560.000		12	5.455.000		12	5.455.000		100,0 0	100,0 0		24	10.560.000		40,00	8,91	DISPAR	
		3	2 6 0 1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bulan	335.896.000		12	95.684.000		12	95.683.238		100,0 0	100,0 0		24	140.829.238		40,00	41,93	DISPAR	
		3	2 6 0 1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40		1.096.500.000		2	21.500.000		2	21.400.000		100,0 0	99,53		2	21.400.000		5,00	1,95	DISPAR	
		3	2 6 0 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40	Unit	286.500.000		2	21.500.000		2	21.400.000		100,0 0	99,53		2	21.400.000		5,00	7,47	DISPAR	
		3	2 6 0 1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 0		1.996.400.000		24	376.700.000		24	368.737.875		100,0 0	97,89		48	734.737.875		40,0 0	36,8 0	DISPAR	
		3	2 6 0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bulan	282.200.000		12	33.600.000		12	30.637.875		100,0 0	91,18		24	60.637.875		40,00	21,49	DISPAR	
		3	2 6 0 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	bulan	1.685.200.000		12	343.100.000		12	338.100.000		100,0 0	98,54		24	674.100.000		40,00	40,00	DISPAR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiat an	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD PD pada tahun 2026 (akhir Periode Rensta SKPD) (Anggaran Renstra Untuk 5 tahun)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD Tah s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	1				2	3	4		6		12=8+9+10+11		13=12/6*100		14=5+12		15=14/4*100		16	
	3	2	0	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60		2.223.262.600	12	192.331.300	12	189.345.090	100,0 0	98,45	24	285.585.090	40,0 0	12,8 5	DISPAR
	3	2	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	bulan	980.662.600	12	192.331.300	12	189.345.090	100,0 0	98,45	24	285.585.090	40,00	29,12	DISPAR
Rata-rata capaian kinerja (%)														84,62	83,65	17	6.817.485.829	33,7 3	28,3 8	
Predikat Kinerja														T	T	SR	ST	SR	SR	
4	3	2	0	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	15		21.351.144.000	2	371.144.000	1	370.683.830	50,00	99,88	2	678.723.830	13,3 3	3,18	DISPAR
	3	2	0	2	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	15		4.304.844.000	2	204.844.000	2	204.383.830	100,0 0	99,78	3	412.423.830	20,0 0	9,58	DISPAR
	3	2	0	2	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Jumlah Klasifikasi Destinasi Wisata	10	dokum en	1.135.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	100,0 0	100,0 0	1	35.000.000	10,00	3,08	DISPAR
	3	2	0	2	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Junlah Pokdarwis yang Terbina	5	kegiata n	1.219.844.000	1	169.844.000	1	169.383.830	100,0 0	99,73	2	377.423.830	40,00	30,94	DISPAR
	3	2	0	2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	28		8.431.300.000	4	31.300.000	4	31.300.000	100,0 0	100,0 0	4	31.300.000	14,2 9	0,37	DISPAR
	3	2	0	2	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia	28	kawasa n	1.831.300.000	4	31.300.000	4	31.300.000	100,0 0	100,0 0	4	31.300.000	14,29	1,71	DISPAR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	KODE			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD PD pada tahun 2026 (akhir Periode Rensta SKPD) (Anggaran Renstra Untuk 5 tahun)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD Tah s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1			2	3	4		6		12=8+9+10+11		13=12/6*100		14=5+12		15=14/4*100		16
				Kabupaten/ Kota														
	3	2	0	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	60	6.515.000.000	12	115.000.000	6	115.000.000	50,00	100,00	6	215.000.000	10,00	3,30	DISPAR
	3	2	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	60	1.415.000.000	12	115.000.000	12	115.000.000	100,00	100,00	12	215.000.000	20,00	15,19	DISPAR
	3	2	0	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah kabupaten/ Kota	60	2.100.000.000	12	20.000.000	6	20.000.000	50,00	100,00	6	20.000.000	10,00	0,95	DISPAR
	3	2	0	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	60	1.300.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	100,00	100,00	12	20.000.000	20,00	1,54	DISPAR
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	99,95	6	678.723.830	20,86	10,49	
Predikat Kinerja												ST	ST	SR	ST	SR	SR	
5	3	2	0	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	18	5.600.000.000	37	1.675.000.000	37	1.668.300.000	100,00	99,60	74	1.841.775.000	39,78	32,89	DISPAR
	3	2	0	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Srategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Srategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	18	5.600.000.000	37	1.675.000.000	37	1.668.300.000	100,00	99,60	74	1.841.775.000	39,78	32,89	DISPAR
	3	2	0	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah bahan dan sarana promosi pariwisata	60	900.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	100,00	100,00	24	50.000.000	40,00	5,56	DISPAR
	3	2	0	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik	Jumlah penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam even pemasaran pariwisata	60	1.300.000.000	12	1.490.000.000	12	1.483.300.000	100,00	99,55	24	1.521.920.000	40,00	117,07	DISPAR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD PD pada tahun 2026 (akhir Periode Rensta SKPD) (Anggaran Renstra Untuk 5 tahun)				Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD Tah s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab				
							K		Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.								
1	1				2	3				4				6				12=8+9+10+11				K	Rp.	K	Rp.		14=5+12	K	Rp.	15=14/4*100	16
					dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten /Kota																										
		3	2 6	0 3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Jumlah sarana data dan informasi yang dikelola	6	dokum en	200.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	100,0 0	100,0 0	2	172.500.000	33,33	86,25	DISPAR											
		3	2 6	0 3	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen dan implementasi kerjasama dan kemitraan pariwisata	60	bln	3.000.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	100,0 0	100,0 0	24	97.355.000	40,00	3,25	DISPAR											
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,0 0	99,85	19	1.841.775.000	38,3 3	53,0 3								
Predikat Kinerja																		ST	ST	SR	ST	SR	R								
6		3	2 6	0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	10		1.795.970.000	2	294.440.000	2	294.137.125	100,0 0	99,90	2	294.137.125	20,0 0	16,3 8	DISPAR											
		3	2 6	0 4	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang	Jumlah Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang	10		1.195.460.000	2	144.440.000	2	144.437.125	100,0 0	100,0 0	2	144.437.125	20,00	12,08	DISPAR											
		3	2 6	0 4	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	jumlah ruang kreatif	10	ruang	1.195.460.000	2	144.440.000	2	144.437.125	100,0 0	100,0 0	2	144.437.125	20,00	12,08	DISPAR											
		3	2 6	0 4	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10		600.510.000	2	150.000.000	2	149.700.000	100,0 0	99,80	2	149.700.000	20,00	24,93	DISPAR											
		3	2 6	0 4	Pengembangan Pendidikan	Jumlah pelaku sub sektor ekraf yang diberikan Pendidikan	10	pelatih an	1.151.020.000	2	150.000.000	2	149.700.000	100,0 0	99,80	2	149.700.000	20,00	13,01	DISPAR											
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,0 0	99,90	2	294.137.125	20,0 0	12,5 4								
Predikat Kinerja																		ST	ST	SR	ST	SR	SR								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD PD pada tahun 2026 (akhir Periode Rensta SKPD) (Anggaran Renstra Untuk 5 tahun)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD Tah s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1				2	3	4		6		12=8+9+10+11		13=12/6*100		14=5+12		15=14/4*100		16
6	3	2	0	5	PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Persentase Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi	60 0	5.523.780.000	###	522.760.000	13 0	508.660.000	100,0 0	97,30	16 0	1.060.764.000	26,6 7	19,2 0	DISPAR
	3	2	0	5	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	60 0	4.453.780.000	130	522.760.000	13 0	508.660.000	100,0 0	97,30	16 0	1.060.764.000	26,67	23,82	DISPAR
	3	2	0	5	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tersedianya media pengembangan potensi, bakat, kreatifitas generasi muda dalam mempromosikan potensi wisata	45 0	orang	###	450.000.000	10 0	435.900.000	100,0 0	96,87	13 0	808.004.000	28,89	33,67	DISPAR
	3	2	0	5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan pemahaman pengelola wisata tentang pelayanan thd wisatawan dan pengelola usaha wisata	15 0	orang	30	72.760.000	30	72.760.000	100,0 0	100,0 0	30	72.760.000	20,00	16,43	DISPAR
	3	2	0	5	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Pelatihan dan Ujian kompetensi tenaga kerja dibidang pariwisata	30 0	orang	30	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DISPAR
	3	2	0	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah event Ekonomi kreatif yang terlaksana	3	kegiata n	-	801.020.000	0	-	0,00	0,00	0	180.000.000	0,00	22,47	DISPAR
	3	2	0	5	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah event Ekonomi kreatif yang terlaksana	4	kegiata n	1	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DISPAR
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,0 0	98,43	80	1.060.764.000	24,4 4	25,0 5	
Predikat Kinerja													ST	ST	T	ST	SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.362.555.228	17 2	6.313.007.478	90,00	99,18	49	10.692.885.784	27,6 5	20,4 1	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD PD pada tahun 2026 (akhir Periode Rensta SKPD) (Anggaran Renstra Untuk 5 tahun)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD Tah s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	1	2	3	4		6		12=8+9+10+11		13=12/6*100		14=5+12		15=14/4*100		16	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SE;URUH PROGRAM(PROGRAM 1 s/d PROGRAM.....)										100,00	99,53	2	381.888.778,00		25,91	25,28	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM(PROGRAM 1 s/d PROGRAM.....)										ST	ST	SR	ST		SR	SR	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD (periode Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah dengan maksimal			93.031.632.830		11.766.944.844		10.950.454.267		10.829.543.947	99,26	98,90		22.596.488.791	33,63	23,05	
3	27	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku			400.594.471		51.920.000		45.222.800		45.222.800	100,00	100,00		97.142.800	35,42	30,19	
3	27	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	8	Dok	74.841.417	2	9.700.000	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	100,00	3	29.700.000	37,50	39,68	DINAS TPH
3	27	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, LKPD, LPPD, Dokumen SAKIP, Laporan DAK, Laporan Potensi Pertanian, Laporan Evaluasi dan Konsolidasi, serta Laporan SIAP	288	Laporan	325.753.054	48	42.220.000	48	25.222.800	48	25.222.800	100,00	100,00	96	67.442.800	33,33	20,70	DINAS TPH
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	100,00			35,42	30,19		
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR		
3	27	01	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			72.805.747.602		9.169.779.583		8.871.344.667		8.808.451.943	100,00	99,29		17.978.231.526	33,33	25,27	
3	27	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan TPP Pegawai Dinas Pertanian	84	Bln	71.109.239.275	14	8.949.899.583	14	8.662.864.667	14	8.599.971.943	100,00	99,27	28	17.549.871.526	33,33	24,68	DINAS TPH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
						K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
1	2			3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
3	2	7	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72	Bln	1.619.352.227	12	209.880.000	12	198.480.000	12	198.480.000	100,00	100,00	24	408.360.000	33,33	25,22	
3	2	7	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12	Laporan	77.156.100	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	100,00	100,00	4	20.000.000	33,33	25,92	
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	99,29			33,33	25,27	
Predikat kinerja															ST	ST			SR	SR	
3	2	7	01	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			233.011.422		30.200.000		30.200.000		30.200.000	100,00	100,00		60.400.000	33,33	25,92	
3	2	7	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang dan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	72	Bln	233.011.422	12	30.200.000	12	30.200.000	12	30.200.000	100,00	100,00	24	60.400.000	33,33	25,92	DINAS TPH
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	100,00			33,33	25,92	
Predikat kinerja															ST	ST			SR	SR	
3	2	7	01	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			115.734.150		15.000.000		15.000.000		-	100,00	-		15.000.000	33,33	12,96	
3	2	7	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Jabatan dan Kinerja ASN pada Dinas TPH	648	Pegawai	77.156.100	108	10.000.000	108	10.000.000	108	-	100,00	0,00	216	10.000.000	33,33	12,96	DINAS TPH
3	2	7	01	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Evaluasi Kinerja ASN Dinas TPH	648	Pegawai	38.578.050	108	5.000.000	108	5.000.000	108	-	100,00	0,00	216	5.000.000	33,33	12,96	DINAS TPH
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	-			33,33	12,96	
Predikat kinerja															ST	SR			SR	SR	
3	2	7	01	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.209.570.310		415.807.900		353.376.800		351.143.836	100,00	99,37		766.951.736	33,33	24,61	
3	2	7	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	72	Bln	34.951.713	12	4.530.000	12	4.530.000	12	4.530.000	100,00	100,00	24	9.060.000	33,33	25,92	
3	2	7	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	72	Bln	430.450.024	12	55.789.500	12	51.092.500	12	51.092.500	100,00	100,00	24	106.882.000	33,33	24,83	DINAS TPH
3	2	7	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah	72	Bln	115.734.150	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	100,00	100,00	24	30.000.000	33,33	25,92	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab			
						K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.			K	Rp.	
1	2			3	4	5			6			7			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
					Tangga untuk Mendukung Kegiatan Kantor																			
3	2	0	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Jamuian Tamu	72	Bln	640.056.143	1 2	82.956.000	12	39.550.000	12	39.550.000	100,00	100,00	24	122.506.000	33,33	19,1 4				
3	2	0	1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Cetak, Fotocopy dan Penjilidan	72	Bln	355.662.616	1 2	46.096.500	12	48.842.300	12	48.842.300	100,00	100,00	24	94.938.800	33,33	26,6 9				
3	2	0	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Media Cetak	72	Bln	259.244.496	1 2	33.600.000	12	33.600.000	12	33.600.000	100,00	100,00	24	67.200.000	33,33	25,9 2				
3	2	0	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Keikutsertaan Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi	72	Bln	814.861.003	1 2	105.585.900	12	105.762.000	12	103.529.036	100,00	97,89	24	209.114.936	33,33	25,6 6				
3	2	0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Informasi Pembangunan Pertanian Daerah	42	Inform asi	558.610.164	7	72.250.000	7	55.000.000	7	55.000.000	100,00	100,00	14	127.250.000	33,33	22,7 8				
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	99,37			33,33	24, 61				
Predikat kinerja															ST	ST			SR	SR				
3	2	0	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik			13.735.328.9 22		1.768.331.201		1.323.000.000		1.309.943.528	100,00	99,01		3.078.274.72 9	33,33	20, 62				
3	2	0	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Listrik Kantor	72	Bln	277.761.960	1 2	29.131.201	12	36.000.000	12	22.943.528	100,00	63,73	24	52.074.729	33,33	18,7 5	DINAS TPH			
3	2	0	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji THLS, Honorarium Operator Komputer, Sespri, dan Tenaga Supir	78	Bln	13.457.566.96 2	1 3	1.739.200.000	13	1.287.000.000	13	1.287.000.000	100,00	100,00	26	3.026.200.000	33,33	22,4 9				
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	99,01			33,33	20, 62				
Predikat kinerja															ST	ST			SR	SR				
3	2	0	1	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.531.645.95 3		315.906.160	13	312.310.000,0 0		284.581.840	100,00	91,12		600.488.000	33,33	21, 76				
3	2	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Tersedianya Dana Service, BBM, Suku Cadang	72	Bln	1.610.402.119	1 2	201.786.160	12	292.310.000	12	264.581.840	100,00	90,51	24	466.368.000	33,33	28,9 6	DINAS TPH			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
3	2 7	0 1	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	6	Unit	921.243.834	1	114.120.000	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	100,00	2	134.120.000	33,33	14,5 6	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	91,12			33,33	21, 76	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
3	2 7	0 2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tersedianya Sarana Pertanian	10 0	%	4.970.866.61 4		316.578.000		368.605.000		362.540.000		98,35		679.118.000		13, 66	
3	2 7	0 2	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian untuk semua komoditas			3.561.224.66 7		134.250.000	5	140.250.000		134.185.000	100,00	95,68		268.435.000	33,33	7,5 4	
3	2 7	0 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pemeliharaan Tanaman Hortikultura di Hortipark Kab. Pesawaran, Tersedianya Demplot Percontohan Budidaya Jamur Tiram, Tersedianya Demplot Percontohan Kebun Hidroponik Tanaman Hortikultura	30	Kegiat an, Dempl ot	3.561.224.667	5	134.250.000	5	140.250.000	5	134.185.000	100,00	95,68	10	268.435.000	33,33	7,54	DINAS TPH
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	95,68			33,33	7,5 4	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
3	2 7	0 2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1.409.641.94 7		182.328.000		228.355.000		228.355.000	100,00	100,00		410.683.000	16,67	14, 57	
3	2 7	0 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Hortikultura, Pengembangan Padi Bebas Residu	12	Komod itas, Dempl ot	1.409.641.947	2	182.328.000	2	228.355.000	2	228.355.000	100,00	100,00	4	410.683.000	33,33	29,1 3	DINAS TPH
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			16,67	14, 57	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
3	2 7	0 3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian	10 0	%	79.475.722.00 1		10.010.496.250		10.013.314.40 0		9.321.535.135		93,09		19.332.031.38 5		24,3 2	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode			Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD (periode Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2			3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
3	2	0	3	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian		335.780.500		-		50.000.000		50.000.000	100,00	100,00		50.000.000	60,00	57,45	
3	2	0	3	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Penyusunan Perda LP2B	1	Perda	1	50.000.000	0	50.000.000	0	-	-		1	50.000.000	100,00	100,00	DINAS TPH
3	2	0	3	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B yang dikelola untuk pertanian	##	Ha	0	335.780.500	8452	50.000.000	8452	50.000.000	100,00	100,00	8452	50.000.000	20,00	14,89	DINAS TPH
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100			60,00	57,45	
Predikat kinerja														ST	ST			R	R	
3	2	0	3	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian dengan maksimal		79.139.941.501		10.010.496.250		9.963.314.400		9.271.535.135	100,00	93,06		19.282.031.385	27,89	20,24	
3	2	0	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Terlaksananya Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal, Terlaksananya rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK)	118	Lokasi	18	30.479.232.656	16	2.728.568.000	16	2.474.222.500	100,00	90,68	34	6.367.387.500	28,81	20,89	DINAS TPH
3	2	0	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Embung Pertanian (DAK)	29	Lokasi	5	4.920.742.154	0	637.246.500	0	-	-	0,00	5	637.246.500	17,24	12,95	DINAS TPH
3	2	0	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tersedianya Prasarana Transportasi pada Kawasan Pertanian	111	Lokasi	11	18.016.497.158	16	2.241.370.400	16	2.348.466.500	100,00	93,86	27	4.589.836.900	24,32	25,48	DINAS TPH
3	2	0	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Terlaksananya Pembangunan DAM Parit	17	Lokasi	5	4.919.796.992	0	637.149.500	0	-	-	0,00	5	637.149.500	29,41	12,95	DINAS TPH
3	2	0	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Terlaksananya Pembangunan Long Storage	13	Lokasi	5	4.944.247.760	0	640.313.000	0	-	-	0,00	5	640.313.000	38,46	12,95	DINAS TPH
3	2	0	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terlaksananya Pembangunan Pintu Air	12	Lokasi	4	1.854.531.735	0	229.086.850	0	-	-	0,00	4	229.086.850	33,33	12,35	DINAS TPH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD (periode Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
3	2 7	0 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Pertanian, Terlaksananya rehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) (DAK), Terlaksananya revitalisasi Jaringan Irigasi Desa, Terlaksananya Sarana Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan	35 5	Kegiat an, Lokasi	14.004.893.04 6	1 6	1.732.165.000	68	4.732.747.400	68	4.448.846.135	100,00	94,00	84	6.181.011.135	23,66	44,1 3	DINAS TPH
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	92,85			27,89	20, 24	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
3	2 7	0 5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terlaksana Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	5, 90	Ton	2.148.797.38 5		276.352.300		200.000.000		198.000.000		99		474.352.300		22, 08	
3	2 7	0 5	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian untuk semua komoditas			2.148.797.38 5		276.352.300		200.000.000		198.000.000	100,00	99,00		474.352.300	33,33	22, 08	
3	2 7	0 5	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman	12	Subse ktor	2.148.797.385	2	276.352.300	2	200.000.000	2	198.000.000	100,00	99,00	4	474.352.300	33,33	22,0 8	DINAS TPH
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	99,00			33,33	22, 08	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
3	2 7	0 7	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kualitas Program Penyuluhan Pertanian	10 0	%	18.843.016.44 8		2.130.053.500		2.191.707.900		1.983.363.600	90,34	90,49		4.113.417.100	71,14	21,8 3	
3	2 7	0 7	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tercapainya Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian dengan maksimal			18.843.016.4 48		2.130.053.500		2.191.707.900		1.983.363.600	90,34	90,49		4.113.417.10 0	71,14	21, 49	
3	2 7	0 7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terbayarnya BOP Penyuluh, Terlaksananya	76 3	Org. Kali, BPP	6.155.899.439	1 2 8	660.410.000	147	810.574.000	14 1	762.278.000	95,92	94,04	26 9	1.422.688.000	35,26	23,1 1	DINAS TPH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pemberian Penghargaan bagi Penyuluh (IPDMIP), Terlaksananya Rekrutmen Staf Lapangan (IPDMIP), Terselenggaranya Pertemuan Bulanan Penyuluh Pertanian (IPDMIP), Terlaksananya dukungan operasional dalam mendukung terlaksananya konstratani (DAK non fisik), Tersedianya peralatan pendukung manajemen IPDMIP																
3	2	0	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Forum Temu Tani (IPDMIP), Terlaksananya Koordinasi/Konsulta si, Monitoring dan Supervisi Sekolah Lapang (IPDMIP), Terlaksananya Pelatihan bagi Ketua Kelompok menjadi Penyuluh Swadaya (IPDMIP), Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Petani (IPDMIP), Terlaksananya pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Petani, Terlaksananya pendampingan penyusunan RDK/RDKK, Partisipasi Rembug KTNA Nasional dan KTNA EXPO, Terselenggaranya kunjungan ke desa- desa per kecamatan (IPDMIP)	31		3.287.806.596	1 1 4	302.251.000	110	398.380.900	72	294.842.500	65,45	74,01	18 6	597.093.500	58,86	18,1 6	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD (periode Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16						
3	2 7	0 7	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya demonstrasi peralatan pertanian (IPDMIP), Terlaksananya demonstrasi peralatan pertanian lainnya (IPDMIP), Terlaksananya kegiatan lomba-lomba, Terlaksananya pameran hasil produksi pertanian, Terlaksananya pembinaan dan supervisi bagi penyuluh, Terlaksananya penyusunan programa penyuluhan tingkat desa kecamatan dan kabupaten, Tersedianya buku catatan usaha tani (IPDMIP), Terlaksananya dukungan operasional dalam mendukung terlaksananya konstratani (DAK non fisik), Tersedianya peralatan pendukung manajemen IPDMIP	12 57		Unit, Keg, Kali, Pameran, Dok, Buku, BPP	4.748.664.762	6 7 6		564.634.500	461		209.745.000	46 1		209.272.500	100,00	99,77	11 37		773.907.000	90,45	16,3 0	
3	2 7	0 7	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya sekolah lapang bagi petani (IPDMIP)	15		Keg	4.650.645.652	7		602.758.000	8		773.008.000	8		716.970.600	100,00	92,75	15		1.319.728.600	100,00	28,3 8	
Rata-rata capaian kinerja (%)													90,34	90,49			71,14	21,49							
Predikat kinerja													ST	ST			S	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										23.724.081.567		22.694.982.682													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													99,26	95,97			41,41	23,30							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													ST	ST			SR	SR							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIAT AN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PD PADA TAHUN 2021 s/d 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PD s.d RENJA SKPD s/d TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD s.d TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD s.d TAHUN 2022 (%)		UNIT PD PENANGGU NG JAWAB		
				5		6		7		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 X 100%				
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 X 100%		16		
	3			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3		URUSAN WAJIB																	
	3	2 7	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN																	
	3	2 7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.919.720.7 00											
1	3	2 7	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		317.587.302	1	52.020.000	100 %	17.500.000	1	17.500.000				69.520.000		DISBUNAK	
	3	2 7	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	8	dok		59.219.470	2	9.700.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100,0 0	100,0 0	3	19.700.000	0,375	33,27%	
	3	2 7	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	6	dok		258.367.832	1	42.320.000	1	7.500.000	1	7.500.000	100,0 0	100,0 0	2	49.820.000	33,33%	19,28%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,0 0	100,0 0	3			69.520.000	35,42 %	26,27%	
Predikat Kinerja												ST	ST					SR	SR	
2	3	2 7	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		100%		62.271.569.3 70	1	10.199.926.1 88	100 %	987.518.500	1	904.788.250	91,62	91,62	0	11.104.714.4 38	17,83 %	17,83 %	DISBUNAK
	3	2 7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	bulan		60.929.179.98 2	14	9.980.046.188	14	831.327.500	14	765.462.250	100,0 0	92,08	28	10.745.508.43 8	33,33%	17,64%	
	3	2 7	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	bulan		1.281.338.388	12	209.880.000	12	130.232.000	12	120.392.000	100,0 0	92,44	24	330.272.000	33,33%	25,78%	
	3	2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	12	dok		61.051.000	2	10.000.000	2	25.959.000	2	18.934.000	100,0 0	72,94	4	28.934.000	33,33%	47,39%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,0 0	85,82	19			11.104.714.4 38	33,33 %	30,27%	
Predikat Kinerja												ST	ST					SR	SR	
3	3	2 7	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		100%		184.374.020	1	30.200.000	100 %	15.252.000	1	15.252.000	100,0 0	100,0 0		45.452.000	24,65 %	24,65 %	DISBUNAK

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIAT AN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PD PADA TAHUN 2021 s/d 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PD s.d RENJA SKPD s/d TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD s.d TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD s.d TAHUN 2022 (%)		UNIT PD PENANGGU NG JAWAB	
													13 = 12 / 7 X 100%				15 = 14 / 5 X 100%			
	1	2			3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 + 10 + 11		K	Rp	K	Rp		K
	3	2 7	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang dan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	72	bulan	184.374.020	12	30.200.000	12	15.252.000	12	15.252.000	100,0 0	100,0 0	24	45.452.000	33,33% 24,65%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,0 0	100,0 0	24	45.452.000	33,33 %	24,65%		
Predikat Kinerja													ST	ST			SR	SR		
4	3	2 7	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		100%		91.576.500	1	15.000.000	100 %	15.000.000	1	15.000.000	100,0 0	100,0 0		30.000.000	32,76 %	32,76 %	DISBUNAK
	3	2 7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Jabatan dan Kinerja ASN pada OPD Dinas Perkebunan dan Peternakan	648	Pegaw ai	61.051.000	108	10.000.000	108	7.500.000	10 8	7.500.000	100,0 0	100,0 0	216	17.500.000	33,33% 28,66%		
	3	2 7	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Evaluasi Kinerja ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan	648	Pegaw ai	30.525.500	108	5.000.000	108	7.500.000	10 8	7.500.000	100,0 0	100,0 0	216	12.500.000	33,33% 40,95%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,0 0	100,0 0	216	30.000.000	33,33 %	34,81%		
Predikat Kinerja													ST	ST			SR	SR		
5	3	2 7	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100%		2.098.225.18 8	1	343.684.000	100 %	286.908.900	1	208.149.760	72,55	72,55		551.833.760	26,30 %	26,30 %	DISBUNAK
	3	2 7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	72	bulan	27.656.103	12	4.530.000	12	9.096.300	12	9.096.300	100,0 0	100,0 0	24	13.626.300	33,33% 49,27%		
	3	2 7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya kegiatan tulis menulis kantor	72	bulan	340.600.476	12	55.789.500	12	105.998.600	12	105.676.600	100,0 0	99,70		161.466.100	0,00% 47,41%		
	3	2 7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan pembersih	72	bulan	91.576.500	12	15.000.000	12	9.941.000	12	9.941.000	100,0 0	100,0 0		24.941.000	0,00% 27,24%		
	3	2 7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat	72	bulan	506.454.676	12	82.956.000	12	10.398.000	12	4.873.000	100,0 0	46,86		87.829.000	0,00% 17,34%		
	3	2 7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan keperluan kantor	72	bulan	281.423.742	12	46.096.500	12	16.308.000	12	15.757.000	100,0 0	96,62		61.853.500	0,00% 21,98%		
	3	2 7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundangan	72	bulan	205.131.360	12	33.600.000	12	7.200.000	12	7.200.000	100,0 0	100,0 0		40.800.000	0,00% 19,89%		
	3	2 7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Terlaksananya Keikutsertaan Rapat	72	bulan	645.382.331	12	105.712.000	12	127.967.000	12	55.605.860	100,0 0	43,45	24	161.317.860	33,33% 25,00%		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	KODE		URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIAT AN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PD PADA TAHUN 2021 s/d 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PD s.d RENJA SKPD s/d TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD s.d TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD s.d TAHUN 2022 (%)		UNIT PD PENANGGU NG JAWAB	
													13 = 12 / 7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 X 100%			
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 X 100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			dan Konsultasi SKPD	/ Rapat Koordinasi Konsultasi																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,0 0	83,81		551.833.760	9,52%	29,73 %		
Predikat Kinerja													ST	ST			SR	SR		
6	3	2 7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	10.870.130.5 50	1	1.780.500.00 0	100 %	417.570.000	1	404.918.929	96,97	96,97		2.185.418.92 9	20,10 %	20,10 %	DISBUNAK	
	3	2 7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	72	Bulan	219.783.600	12	36.000.000	12	15.000.000	12	6.348.929	100,0 0	42,33	24	42.348.929	33,33%	19,27%	
	3	2 7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan umum	78	Bulan	10.650.346.95 0	13	1.744.500.000	13	402.570.000	12	398.570.000	92,31	99,01	25	2.143.070.000	32,05%	2,52%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													96,15	70,67	25	2.185.418.92 9	32,69 %	10,89 %		
Predikat Kinerja													ST	ST			SR	SR		
7	3	2 7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100%	2.732.642.76 0	1	447.600.000	100 %	179.971.300	1	170.725.000	94,86	94,86		618.325.000	22,63 %	22,63 %	DISBUNAK	
	3	2 7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya BBM dan pelumas kendaraan dinas/operasional	72	Bulan	1.698.438.820	12	278.200.000	12	179.971.300	12	170.725.000	100,0 0	94,86	24	448.925.000	33%	26,43%	
	3	2 7	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	6	Unit	1.034.203.940	1	169.400.000	1	-	0		0,00	0,00	1	169.400.000	16,67%	16,38%	
27													4,76	4,52	7	618.325.000	25,00 %	2,04%		
Predikat Kinerja													ST	ST			SR	SR		
8	3	2 7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya Sarana Pertanian	100	%	1.688.000.00 0	1	298.000.000		419.077.600	1	397.520.900		94,86		695.520.900	41,20 %	41,20	
	3	2 7	KEGIATAN PENGAWASAN PENGUNAAN SARANA PERTANIAN		100%	1.688.000.00 0	1	298.000.000	100 %	419.077.600	1	397.520.900	94,86	94,86		695.520.900	41,20 %	41,20 %	DISBUNAK	
	3	2 7	Pendampingan Penggunaan Sarana	terpeliharanya sarana pendukung pertanian	300	Ha	1.688.000.000	50	298.000.000	50	419.077.600	44	397.520.900	88,00	94,86	94	695.520.900	31,33%	41,20%	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	KODE		URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIAT AN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PD PADA TAHUN 2021 s/d 2026			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PD s.d RENJA SKPD s/d TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD s.d TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD s.d TAHUN 2022 (%)		UNIT PD PENANGGU NG JAWAB
														12 = 8 + 9 + 10 + 11				13 = 12 / 7 X 100%		
1	2	3	4	5			6		7						14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 X 100%		16	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pendukung Pertanian																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														88,00	94,86	94	695.520.900	31,33 %	41,20%	
Predikat Kinerja														ST	ST			SR	SR	
	3	2 7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya Prasarana Pertanian	100	%	3.750.000.000	1	0		1.908.738.00 0	1	1.879.370.00 0		98,46		1.879.370.000	50,12%	50,12	DISBUNAK
9	3	2 7	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian		100%		3.750.000.00 0	1	-	100 %	1.908.738.0 00	1	1.879.370.0 00	98,46	98,46		1.879.370.00 0	50,12 %	50,12 %	DISBUNAK
	3	2 7	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terpeliharanya jalan usaha tani	14	Unit	1.500.000.000	0	-	2	315.000.000	2	314.763.000	100,0 0	99,92	2	314.763.000	14,29%	99,92%	
	3	2 7	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3	Lokasi	2.250.000.000	0	-	2	1.593.738.00 0	2	1.564.607.00 0	100,0 0	98,17	2	1.564.607.000	66,67%	98,17%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														100,0 0	99,05		1.879.370.00 0	40,48 %	124,11 %	
Predikat Kinerja														ST	ST			SR	ST	
	3	2 7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit hewan	100	%	1.618.000.000	1	294600000		435.933.000	1	341.888.000		78,43		1.618.000.000	100,00 %	100	DISBUNAK
10	3	2 7	KEGIATAN PENJAMIN KESEHATAN HEWAN PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR		100%		882.500.000	1	157.500.000	100 %	262.678.000	1	175.133.000	66,67	66,67		332.633.000	37,69 %	37,69 %	DISBUNAK
	3	2 7	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Tertanggulangnya penyakit Hewan dan Zoonosis	600 0	Ekor	882.500.000	100 0	157.500.000	1000	262.678.000	93 5	175.133.000	93,50	66,67	193 5	332.633.000	0,38	37,69%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														80,09	66,67	193 5	332.633.000	23,00 %	87,69%	
Predikat Kinerja														ST	ST			SR	T	
11	3	2 7	KEGIATAN PENGAWASAN		100%		300.000.000	1	50.000.000	100 %	30.000.000	1	23.500.000	78,33	78,33		73.500.000	24,50 %	24,50 %	DISBUNAK

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N O	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIAT AN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PD PADA TAHUN 2021 s/d 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PD s.d RENJA SKPD s/d TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN P- RKPD PD TAHUN 2022 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD s.d TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PD s.d TAHUN 2022 (%)		UNIT PD PENANGGU NG JAWAB	
													13 = 12 / 7 X 100%				15 = 14 / 5 X 100%			
													K	Rp			K	Rp		K
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 X 100%		16	
			PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																	
	3	2 7	Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Tersedianya Daging yang aman dan Layak di konsumsi Masyarakat	24	Keg	300.000.000	4	50.000.000	4	30.000.000	4	23.500.000	100,0 0	78,33		73.500.000	0,25	24,50%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													89,17	78,33		73.500.000	24,50 %	24,50%		
Predikat Kinerja													ST	ST			SR	SR		
12	3	2 7	KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA		100%	435.500.000	1	87.100.000	100 %	143.255.000	1	143.255.000	100,0 0	100,0 0		230.355.000	52,89 %	52,89 %	DISBUNAK	
	3	2 7	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terbayarnya BOP Petugas Paramedik & Petugas IB	96	Orang	435.500.000	16	87.100.000	16	143.255.000	16	143.255.000	100,0 0	100,0 0	32	230.355.000	0,53		52,89%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,0 0	100,0 0	32	230.355.000	52,89 %	52,89%		
Predikat Kinerja													ST	ST			R	R		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program										4.683.469.3 00		1	4.355.112.8 39							
TOTAL RATA-ATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													88,18	81,98			31,24 %	40,76 %		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													ST	ST			SR	SR		

N o	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022 (kosongkan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penangg ung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
1	2		3	4	5			6			7			12=8+9+10+11			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
	3	3 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penerapan Kepatuhan Pelayanan Publik			36.417.138.000			4.784.100.927	100		5.675.456.949			3.780.579.028,00							Dinas Perindag

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022 (kosongkan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.			K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		16
	3	30	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten						2	31.411.000	2	25.309.500,00		80,58 %								
	3	30	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja						2	22.200.000	2	22.200.000,00	100 %	100,00 %								
	3	30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP, LKPJ, dan LPPD						3	9.211.000	3	9.211.000,00	100 %	100,00 %								
	3	30	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten					3.252.533.927	3	3.377.870.249	3	2.557.374.428,00		75,71 %								
	3	30	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	18.397.150.000	13	3.062.573.927	14	3.160.710.249	14	3.160.710.249,00	100 %	100,00 %	27	6.223.284.176	45,00 %	33,83 %				
	3	30	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60	Bulan	750.000.000	12	189.960.000	12	204.960.000	12	204.960.000,00	100 %	100,00 %	24	394.920.000	40,00 %	52,66 %				
	3	30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Semesteran					-	2	12.200.000	2	8.555.000,00	100 %	70,12 %		-	-	-				
	3	30	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten					404.602.000	7	331.680.700	7	282.085.100,00		85,05 %	7	686.687.100	-	-				
	3	30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan	60	Bulan	14.042.000	12	22.300.000	12	2.300.000	12	2.300.000,00	100 %	100,00 %	24	24.600.000	40,00 %	175,19 %				
	3	30	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	305.255.000	12	55.488.000	12	44.785.000	12	44.785.000,00	100 %	100,00 %	24	100.273.000	40,00 %	32,85 %				
	3	30	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60	Bulan	70.276.000	12	21.513.000	12	19.419.700	12	16.560.000,00	100 %	85,27 %	24	38.073.000	40,00 %	54,18 %				
	3	30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan konsumsi makanan minuman rapat	60	Bulan	406.905.000	12	67.410.000	12	48.745.000	12	28.420.000,00	100 %	58,30 %	24	95.830.000	40,00 %	23,55 %				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022 (kosongkan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penangg ung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
1	2		3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
				dan tamu kantor																
	3	30	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bulan	64.647.000	12	45.029.000	12	23.569.000	12	23.569.000,00	100 %	100,0 0%	24	68.598.000	40,00 %	106,1 1%	
	3	30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	60	Bulan	61.723.000	12	12.110.000	12	12.110.000	12	12.110.000,00	100 %	100,0 0%	24	24.220.000	40,00 %	39,24 %	
	3	30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	60	Bulan	903.760.000	12	180.752.000	12	180.752.000	12	179.600.000,00	100 %	99,36 %	24	360.352.000	40,00 %	39,87 %	
	3	30	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten					72.755.000	1	773.965.000	1	743.048.000,00		96,01 %	1	815.803.000	-	-	
	3	30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	20	Unit	366.306.000	60	72.755.000	1	750.000.000	1	743.048.000,00	100 %	99,07 %	61	815.803.000	305,0 0%	222,7 1%	
	3	30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten					662.800.000	2	677.800.000	2	518.600.000,00		76,51 %	2	1.181.400.000	-	-	
	3	30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik dan Internet	60	Bulan	249.088.000	12	40.800.000	12	40.800.000	12	40.800.000,00	100 %	100,0 0%	24	81.600.000	40,00 %	32,76 %	
	3	30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor THLS, Penjaga Malam dan Penjaga Kantor	60	Bulan	3.809.582.000	12	622.000.000	13	637.000.000	13	635.000.000,00	100 %	99,69 %	25	1.257.000.000	41,67 %	33,00 %	
	3	30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten					391.410.000	2	482.730.000	2	397.210.000,00		82,28 %	2	788.620.000	-	-	
	3	30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal	60	Bulan	2.000.000.000	12	384.710.000	12	476.030.000	12	455.110.000,00	100 %	95,61 %	24	839.820.000	40,00 %	41,99 %	
	3	30	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan	35	Unit	40.904.000	7	6.700.000	7	6.700.000	7	6.700.000,00	100 %	100,0 0%	14	13.400.000	40,00 %	32,76 %	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022 (kosongkan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
						K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
1	2			3	4	5			6			7			12=8+9+10+11			K	Rp.	13=12/7*100	14=6+12		K	Rp.	15=14/5*100	16	
				dan Peralatan Gedung Kantor																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100 %	94,55 %					51,98 %	57,54 %		
Predikat Kinerja																		ST	ST					R	R		
	3	30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang di Revitalisasi						1.938.921.760	100	1.717.000.000			1.287.298.363		74,97 %	0	3.226.220.123			-		Dinas Perindag			
	3	30	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terpenuhiya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						1.776.921.760	2	1.341.500.000	2		983.074.363		73,28 %	2	2.759.996.123			-					
	3	30	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat	5	Pasar		5.000.000.000	2	1.569.234.760	1	1.120.000.000	1		1.107.119.700	100 %	98,85 %	3	2.676.354.460	60,00 %	53,53 %						
	3	30	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang Tertata dan Sarana Kebersihan Pasar	5	Pasar		1.000.000.000	1	207.687.000	2	221.500.000	2		212.166.600	100 %	95,79 %	3	419.853.600	60,00 %	41,99 %						
	3	30	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terpenuhiya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						162.000.000	1	375.500.000	1		304.224.000		81,02 %	1	466.224.000	-	-						
	3	30	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terbayarnya Honor THLS, Penjaga Kantor dan Penjaga Malam	60	Bulan		877.500.000	12	162.000.000	13	312.000.000	13		310.844.000	100 %	99,63 %	25	472.844.000	41,67 %	53,89 %						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100 %	98,09 %					53,89 %	49,80 %		
Predikat Kinerja																		ST	ST					R	SR		
	3	30	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal							43	100.000.000			77.377.400		77,38 %	0	77.377.400	-	-		Dinas Perindag				
	3	30	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				1.800.000.000	0	2	84.791.000	2		77.377.400		91,26 %		77.377.400									
	3	30	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Jumlah Laporan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	24	Dok		300.000.000			4	30.000.000	4		29.899.000	100 %	99,66 %	4	29.899.000	16,67 %	9,97%						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022 (kosongkan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
						K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
1	2			3	4	5			6			7			12=8+9+10+11			13=12/7*100	Rp.	K	Rp.		14=6+12	K	Rp.	15=14/5*100	16
				dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota																							
	3	3	0	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah KK Penerima Bantuan	7200	KK	1.500.000.000				12000	54.791.000		12000	54.678.400	100%	93,50%	12000	54.678.400	166,67%	3,65%					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100%	96,58%			91,67%	6,81%				
Predikat Kinerja																		ST	ST			ST	SR				
	3	3	0	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang di Bina						100	964.176.300			295.665.000		30,67%	0	295.665.000	-	-	Dinas Perindag					
	3	3	0	Pelaksanaan Promosi ,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terpenuhihnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri			233.450.000		2	1.104.342.300	2	295.665.000			26,77%	2	529.115.000	-	-							
	3	3	0	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Promosi dan Pameran	15	Event	1.000.000.000	1	143.500.000	5	1.014.342.300	4	481.161.000	80%	47,44%	5	624.661.000	33,33%	62,47%							
	3	3	0	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pemasaran	60	Bulan	450.000.000	12	89.950.000	12	90.000.000	12	89.950.000	100%	99,94%	24	179.900.000	40,00%	39,98%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		90%	73,69%			36,67%	51,22%				
Predikat Kinerja																		T	S			SR	R				
	3	3	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin					100	1.242.955.000			1.032.749.350		83,09%		1.032.749.350			Dinas Perindag						
	3	3	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terpenuhihnya Perencanaan dan Pembangunan Industri			1.041.754.400		2	1.242.955.000	2	1.032.749.350			83,09%		2.074.503.750									
	3	3	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pelaksanaan Operasional Sarana dan Prasarana Industri	60	Bulan	2.500.000.000	12	613.060.400	12	144.000.000	12	143.865.250	100%	99,91%	24	756.925.650	40,00%	30,28%							
	3	3	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku IKM dan Pengrajin	250	KUB	2.000.000.000	51	428.694.000	100	928.327.500	100	927.254.100	100%	99,88%	151	1.355.948.100	60,40%	67,80%							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022 (kosongkan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100 %	99,90 %			50,20 %	49,04 %	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				9.699.588.249		6.473.669.141					SR	SR		
TOTAL RATA-ATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												98 %	92,56 %			56,88 %	42,88 %	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												ST	ST			R	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan															
		KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																
1		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dan Terfasilitasinya Pelaksanaan Apikasi Kab. Pesawaran	78	2.844.667.500	13	250.000.000	13	491.100.000	13	466.818.000	100	95	26	716.818.000	33	25	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Pesawaran
2		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tersusunnya Peta Tematik, Peta Dasar dan Dokumen Penegasan Batas Wilayah	30	8.148.971.933	2	75.000.000	2	182.220.100	2	181.715.400	100	100	4	256.715.400	13	3	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Pesawaran
3		Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya Buku LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kab. Pesawaran dan Pemekaran Desa	25	1.953.240.000	3	382.220.000	3	200.000.000	3	191.029.000	100	96	6	573.249.000	24	29	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Pesawaran

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
			Persiapan dan Kegiatan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100	97	12		24	19	
Predikat Kinerja												ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 2)												100,00	96,76			23,56	19,23	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s/d PROGRAM 2)												ST	ST			SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Administrasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat															
		KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																
1		Sub Koordinator Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Istighozah/Do'a Bersama, Pembinaan Keagamaan Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan Pembinaan Himpunan Majelis Taklim)	7 8	117.336.350.426	1 3	7.186.507.000	2 5	14.922.657.000	24	6.795.997.056	96,00	45,54	37	13.982.504.056	47	12	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran
2		Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	1 2	4.387.867.407	2	318.700.000	2	368.700.000	2	368.700.000	100,0 0	100,0 0	4	687.400.000	33	16	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		K	Rp	14=6+12		K	Rp	16	
			Sosial (Operasional Hibah)																
3		Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3 6	3.288.724.753	6	358.508.600	7	426.243.000	5	401.918.000	71,43	94,29	11	760.426.600	31	23	Bagian Kesejahtera an Rakyat Setdakab. Pesawaran	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												89,14	79,94	17		37	17		
Predikat Kinerja												R	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												7.566.615.056							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 2)												89,14	79,94			37,11	16,90		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s/d PROGRAM 2)												T	T			SR	SR		

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
1	Sekretariat Daerah	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	1	2.914.161.400	100 %	478.261.400	100%	703.261.400	38	657.878.480	3800	93,547	3900%	1.136.139.880	39%	38,00 %	Bagian Hukum
2		KEGIATAN BAGIAN HUKUM	Indeks Reformasi Birokrasi	1	2.914.161.400	100 %	478.261.400	100%	703.261.400	38	657.878.480	3800	93,547	3900%	1.136.139.880	39%	38,00 %	Bagian Hukum
3		Sub Kegiatan 1: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Aparatur Pemerintah yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan pemahaman	4 4	1.713.261.400	44	191.674.400	44	203.261.400	44	202.916.680	100	99,83	88	394.591.080	20%	23,03 %	Bagian Hukum

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
			tentang teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah															
4			Jumlah Aparatur Pemerintah yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan pemahaman tentang teknis Penyusunan Produk Hukum Desa							0		-		0				
5			Jumlah Produk Hukum Daerah yang terbentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku	50		33		333		66		19,82		99				
6		Sub Kegiatan 2: Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Pengkajian Penyelesaian Masalah Hukum Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran	10	1.200.000.000	10	205.287.000	10	345.000.000	0	345.000.000	0	100	10	550.287.000	100 %	45,86 %	0
			Jumlah Kelompok Kadarkum yang terbentuk dalam satu tahun	4		3		3		0		0		3				
		Sub Kegiatan 3: Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan	Jumlah Buku Himpunan Produk Hukum	2	900.000	2	81.300.000	2	155.000.000	2	143.436.000	100	92,54	2	224.736.000	100 %	24,00 %	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
		Informasi Hukum																
7			Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasik an dan di upload melalui website jdih	5 0		33		33		33		100		66				
Rata-rata capaian kinerja (%)												79,95	97,46	38,44	389.871.360,00	55,0 0	23,00	
Predikat Kinerja												T	ST			R	SR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												79,95	97,457	100		55,0 0	23,00	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												T	ST			R	SR	

No	Urusan	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/keg iatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah an	Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik	714	6.933.563.48 6	119	898.641.000	106	350.000.000	10 6	345.194.444	100	98,63	225	1.243.835.44 4	32	17,9	BAGIAN PEREKONO MIAN
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									-						
	4 01 03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan BUMD	12	1.277.699.461	2	165.599.280	2	80.000.000	2	75.971.060	100	94,96	4	241.570.340	33	18,91	
	4 01 03	Sub Kegiatan Pengendalian dan	Jumlah Dokumen Laporan Data	24	2.299.256.101	4	298.000.560	4	152.000.000	4	151.395.384	100	99,60	8	449.395.944	33	19,5	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan			Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2			3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Distribusi Perekonomian	Ketersediaan Bahan Pokok dan Pengendalian Harga Bahan Pokok															
	4	01	03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah BUMDes dan UMKM yang Mendapat Akses Keuangan Daerah	600	1.200.764.953	100	155.628.000	100	118.000.000	100	117.828.000	100	99,85	200	273.456.000	33	22,77	
	0	0	0	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Harga Bahan Pokok Strategis	Jumlah Data Bahan Pokok Strategis	72	1.229.969.771	12	159.413.160		-	0	-		0,00	12	159.413.160	17	12,96	
	0	0	0	Penyusunan Inventarisasi Data, Identifikasi dan Publikasi Bidang Perekonomian	Jumlah Data Bidang Perekonomian	6	925.873.200	1	120.000.000		-	0	-		0,00	1	120.000.000	17	12,96	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	98,14			26,67	17,43	
Predikat Kinerja														SR	R			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																				
										106	350.000.000	106	345.194.444							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)														100,00	98,14			26,67	17,43	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)														SR	R			SR	SR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan	Target RPJMD PD Pada		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022(%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2	3			4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
				Program Perekonomian dan Pembangunan	139	6.000.000.000	21	375.000.000	21	905.000.000	8	867.456.340	38,09	51,39	41	953.204.880	29,49	15,88	
24				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	139	6.000.000.000	21	375.000.000	21	1.125.000.000	8				41	953.204.880	29,49	15,88	
24	01			Fasilitasi Penyusunan	24	2.256.210.000	2	197.280.000	4	423.786.000	4	423.526.000	100,00	100	6	582.536.000	25,00	25,81	Bagian Adbang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (output)/Sub kegiatan	Target RPJMD PD Pada		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022(%)		Unit PD Penanggu ng Jawab	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2			3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
			Program Pembangunan	Penyusunan Program Pembangunan Daerah																
				Jumlah Dokumen Pedoman Satuan Harga Barang Pemerintah (SSH) dan Standar Biaya masukan Pemerintah (SBM)	12	Buku		2												
				Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Biaya (ASB)	12	Buku		2												
2 4	0 2		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	72	Laporan dan Kegiatan		1 2	13	359.090.000		1 3	321.938.340	100	90	2 1	270.730.880	29,16	8,03	Bagian Adbang
				Jumlah Laporan Realisasi Anggaran seta Pengawasan Realisasi Anggaran(TEPRA)	72	Laporan		1 2	12											
				Jumlah Kegiatan pameran expo tingkat provinsi lampung	5	Kegiatan			1											
2 4	0 3		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	42	Buku dan Laporan		7	7	122.124.000		7	121.992.000	100	100	1 4	99.938.000	33,33	26,81	Bagian Adbang
				Jumlah Dokumen RENJA, LAKIP DAN LKPJ Sekretariat Daerah	18	Buku		3	3											
				Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja	24	Laporan		4	4											
Rata rata Capaian Kinerja (%)													100,00	96			29,16	20,22		
Predikat Kinerja													T	S			SR	SR		
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										1.125.000.000										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	96,4 9			29,16	20,22		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (output)/Sub kegiatan	Target RPJMD PD Pada		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022(%)		Unit PD Penanggu ng Jawab
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
2	3	4							12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											T	S			SR	SR	

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegia tan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (Output)	Target RPJMD PD Pada Tahun (periode 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022(%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Reaklisasi AnggaranP- RKPD PD s/d Akhir Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Reaklisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2				3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
	4	0	1	0	Program Perekonomian dan Pembangunan								0	1.009.679.451	75,0	59,74		1.989.679.451	12,0	17,49	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab.Pesawa ran
	4	0	1	0	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		7.561.297.792		980.000.000		1.012.000.000										
	4	0	1	0	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Tender/ Non Tender tepat Waktu, Efisien dan Efektif	6 0	5.845.500.440	12	757.620.000	1 2	715.380.000	1 2	714.614.451	100,00	99,89	1 2	1.472.234.451	20,00	25,19	
	4	0	1	0	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Tesedianya OPD yang melaksanak an Layanan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE)	6 0	1.472.755.637	12	190.880.000	1 2	248.880.000	1 2	247.660.000	100,00	99,51	1 2	438.540.000	20,00	29,78	
	4	0	1	0	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang meningkat kompetensi nya untuk pengadaan Barang dan jasa	6 0	243.041.715	12	31.500.000	1 2	47.740.000	1 2	47.405.000	100,00	99,30	1 2	78.905.000	20,00	32,47	
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	99,57			20,00	29,14	
Predikat Kinerja															ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																					
										980.000.000		1.012.000.000		1.009.679.451							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.....)															100,00	99,57			20,00	29,14	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM....)															ST	ST			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah		Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output Come) Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada Tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
4	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
4	01	01	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Audiensi Kepala Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Agama, Pimpinan/ Anggota dan Media	504	360.547.336	84	63.915.500	84	63.915.500	84	63.915.500	100	100,00	168	127.831.000	33	35,45	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	01	01	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																
4	01	01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan acara dan Upacara Serta Bimbingan Teknis Guna Meningkatkan SDM ASN	9984	8.689.932.592	1631	1.453.718.500	1656	1.454.931.500	1653	1.404.786.500	99,82	96,55	3284	2.858.505.000	33	32,89	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	01	01	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Agenda Harian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9600	6.040.255.878	1590	997.878.000	1600	1.108.257.500	1599	1.108.257.500	99,94	100,00	3189	2.106.135.500	33	34,87	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	01	01	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Teraksananya Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan	9600	1.897.494.196	1585	350.295.500	1600	345.255.500	1599	345.255.500	99,94	100,00	3184	695.551.000	33	36,66	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
												2.922.215.000							
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)													99,92	99,14			33	35	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Kegiatan (Out put)	Target RPJMD PD pada Tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
Predikat Kinerja										ST	ST			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		
TOTAL JUMLAH RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										99,92	99,14			33	35			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM										ST	ST			SR	SR			

Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya penerapan kepatuhan pelayanan publik	1296	157.991.485.285	216	19.629.482.903	216	21.185.160.000	348	20.570.469.036	161	97,10	564	40.199.951.939	43,52	25,44	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	144	9.577.210.927	24	2.026.410.000	24	2.322.840.000	24	2.147.682.000	100	92,46	48	4.174.092.000	33,33	43,58	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya tunjangan PKK,PPTK dan bendahara serta honorarium tim pelaksana kegiatan DIPA DAK	72	8.882.806.027	12	1.937.990.000	12	2.230.440.000	12	2.059.810.000	100	92,35	24	3.997.800.000	33	45	bagian umum setdakab
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya laporan tiap bulan dan akhir tahun	72	694.404.900	12	88.420.000	12	92.400.000	12	87.872.000	100	95,10	24	176.292.000	33,33	25,39	
Rata-rata Capaian Kinerja										100	94			33,33	35,20	
Predikat Kinerja										ST	ST			SR	SR	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	288	28.098.052.671	48	3.486.025.454	48	3.266.807.000	48	3.254.804.935	100	99,63	96	6.740.830.389	33,33	23,99	
Penyediaan peralatan dan	Tersedianya alat tulis kantor	72	4.629.366.000	12	596.944.400	12	600.000.000	12	597.126.100	100	99,52	24	1.194.070.500	33	26	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
perlengkapan kantor	sekertariat dan kantor bupati															
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Adanya pemenuhan kebutuhan makan dan minum kantor serta rumah dinas	72	5.805.996.525	12	772.225.000	12	780.000.000	12	779.044.500	100	99,88	24	1.551.269.500	33	27	
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Barang cetakan keperluan kantor	72	4.166.429.400	12	539.932.600	12	584.600.000	12	584.408.225	100	99,97	24	1.124.340.825	33	27	
Pemeliharaan dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dan konsultasi	72	13.496.260.746	12	1.576.923.454	12	1.302.207.000	12	1.294.226.110	100	99,39	24	2.871.149.564	33	21	
Rata-rata Capaian Kinerja										100	100			33	25	
Predikat Kinerja										ST	ST			SR	SR	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	72	15.067.179.576	12	2.514.975.700	12	2.953.170.000	144	2.928.239.500	1.200	99,16	156	5.443.215.200	216,67	36,13	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Auat Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor KDH / WKDH	72	15.067.179.576	12	2.514.975.700	12	2.953.170.000	12	2.928.239.500	100	99,16	24	5.443.215.200	33,33	36,13	
Rata-rata Capaian Kinerja										100	99			33	36	
Predikat Kinerja										ST	ST			SR	SR	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288	55.842.421.664	48	5.556.975.864	48	6.498.666.200	48	6.198.487.801	100	95,38	96	11.755.463.665	33,33	21,05	
Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	72	555.523.920	12	89.850.000	12	72.000.000	12	71.940.000	100	99,92	24	161.790.000	33	29	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	72	21.820.439.369	12	1.226.231.264	12	1.450.493.200	12	1.199.290.801	100	82,68	24	2.425.522.065	33	11	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya biaya spanduk untuk ucapan, Giant Banner, Komputer dan Printer kantor	72	1.639.567.125	12	241.885.000	12	236.323.000	12	236.097.000	100	99,90	24	477.982.000	33	29	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya biaya untuk gaji thls, keperluan sewa kantor, dan pemeliharaan rumah dinas	72	31.826.891.250	12	3.999.009.600	12	4.739.850.000	12	4.691.160.000	100	98,97	24	8.690.169.600	33,33	27,30	
Rata-rata Capaian Kinerja										100	95			33	24	
Predikat Kinerja										ST	ST			SR	SR	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana gedung kantor dan gedung lainnya	144	9.420.142.561	24	1.362.713.500	24	1.341.520.000	24	1.339.911.877	100	99,88	48	2.702.625.377	33,33	28,69	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	72	5.400.927.000	12	791.318.000	12	700.000.000	12	699.616.377	100	99,95	24	1.490.934.377	33,33	27,61	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terpeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	72	4.019.215.561	12	571.395.500	12	641.520.000	12	640.295.500	100	99,81	24	1.211.691.000	33,33	30,15	
Rata-rata Capaian Kinerja										100	100			33	29	
Predikat Kinerja										ST	ST			SR	SR	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	144	12.341.503.976	24	878.666.318	24	1.267.546.000	24	1.211.564.366	100	95,58	48	2.090.230.684	33,33	16,94	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya jaminan kesehatan untuk Kepala Daerah	72	771.561.000	12	97.313.380	12	200.000.000	12	150.807.706	100	75,40	24	248.121.086	33,33	32,16	
Penyediaan Danan	Tersedianya Perjalanan	72	11.569.942.976	12	781.352.938	12	1.067.546.000	12	1.060.756.660	100	99,36	24	1.842.109.598	33,33	15,92	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dinas Kepala Daerah ke luar daerah															
Rata-rata Capaian Kinerja										100	87			33	24	
Predikat Kinerja										ST	T			SR	SR	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	216	27.644.973.909	36	3.803.716.067	36	3.534.610.800	36	3.489.778.557	100	98,73	72	7.293.494.624	33,33	26,38	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas KDH	72	6.292.234.267	12	836.665.100	12	851.077.800	12	819.516.435	100	96,29	24	1.656.181.535	33,33	26,32	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas WKDH	72	5.117.764.113	12	861.071.600	12	693.406.500	12	684.757.402	100	98,75	24	1.545.829.002	33,33	30,21	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Penerima Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah non Departemen non Departemen / Luar negeri	72	16.234.975.529	12	2.105.979.367	12	1.990.126.500	12	1.985.504.720	100	99,77	24	4.091.484.087	33,33	25,20	
Rata-rata Capaian Kinerja										100	98			33,33	27,24	
Predikat Kinerja										ST	ST			SR	SR	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							21.185.160.000		20.570.469.036							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 7)										100,00	96,21			33	29	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 7)										ST	ST			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																Bagian Perlengkapan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah	24	1.064.118.930		156.656.000	4	206.006.500	4	205.633.553	100,00	99,82	4	362.289.553	16,67	34,05	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terdisdribusi dan tersimpannya BMD dengan baik	5728	305.255.000		49.926.700	1248	148.908.500	1248	148.895.000	100,00	99,99	1248	198.821.700	21,79	65,13	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur	3084	2.616.340.500		416.592.000	761	574.750.000	761	563.950.000	100,00	98,12	761	980.542.000	24,68	37,48	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	tersedianya kendaraan dinas operasional	320	10.704.682.300		4.451.000.000	19	2.203.201.000	19	2.188.651.000	100,00	99,34	19	6.639.651.000	5,94	62,03	
		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeuler	1500	111.418.075		349.744.000	314	1.527.868.750	314	1.493.785.000	100,00	97,77	314	1.843.529.000	20,93	65,90	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	824	314.094.900		480.825.000	154	2.521.468.250	154	2.488.995.450	100,00	98,71	154	2.969.820.450	18,69	6,65	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional	1000	34.009.962.500		4.982.149.807	188	6.219.341.500	188	5.684.368.109	100,00	91,40	188	10.666.517.916	18,80	31,36	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	97,88			18,21	43,23	
Predikat Kinerja												ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								12.774.278.112										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 5)												100,00	97,88			18,21	43,23	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s/d PROGRAM 5)												ST	ST			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
1	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Persentase Penerapan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	100 %	8.360.000.000	100 %	1.121.282.176	100 %	1.150.000.000	0,2853	988.721.000	28,528	85,976	67%	2.110.003.176	67%	25,24 %	Bagian Organisasi
2		KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI	Persentase Peningkatan Penataan Organisasi	100 %	8.360.000.000	100 %	1.121.282.176	100 %	1.150.000.000	0,2853	988.721.000	28,528	85,976	50%	2.110.003.176	50%	25,24 %	Bagian Organisasi
3		Sub Kegiatan 1: Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	45	2.280.000.000	20	309.664.000	5	340.000.000	5	260.657.800	100	76,664	25	570.321.800	56%	25,01 %	Bagian Organisasi
4		Sub Kegiatan 2: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	1.965.000.000	1	204.672.000	1	280.000.000	1	253.393.000	100	90,498	2	458.065.000	33%	23,31 %	Bagian Organisasi
5		Sub Kegiatan 3: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7	845.000.000	2	114.854.000	1	80.000.000	0	79.482.200	1	99,353	2	194.336.200	29%	23,00 %	Bagian Organisasi
6		Sub Kegiatan 4: Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	1.290.000.000	1	178.164.000	1	180.000.000	1	178.850.000	100	99,361	2	357.014.000	33%	27,68 %	Bagian Organisasi
7		Sub Kegiatan 5: Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan	12	1.980.000.000	2	313.928.776	2	270.000.000	2	216.338.000	100	80,125	4	530.266.776	33%	26,78 %	Bagian Organisasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		16
		Kinerja Pemerintah Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah															
Rata-rata capaian kinerja (%)												65,44	89,20	5,17	422.000.755,20	61,38 %	25,16 %	
Predikat Kinerja																		
Rata-rata capaian kinerja (%)												65,44	89,20	6,69	422.000.755,20	61,38 %	25,16 %	
Predikat Kinerja												S	T			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												100,0 0	89,20	100	422.000.755	61,38 %	25,24 %	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												ST	T			SR	SR	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2016 s.d 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2019)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	Program Pemerintah an dan Kesejahteraan Rakyat		100	%	-	304.021.500		452.310.000		452.310.000							
	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah fasilitasi Kerjasama Luar Negeri yang telah ditindaklanjuti dengan OPD Terkait	24	dokumen	513.250.000	4 102.650.000	4 102.650.000	4 102.650.000	4 102.650.000	4 102.650.000	100	100,00	8 205.300.000	33,33 40,00			Bagian Kerjasama Setdakab Pesawaran
	Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi Kerjasama dalam Negeri yang telah ditindaklanjuti dengan OPD Terkait	180	Dokumen	1.006.857.500	30 201.371.500	30 201.371.500	30 201.371.500	30 201.371.500	30 201.371.500	100	100,00	60 402.743.000	33,33 40,00			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2016 s.d 2021)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2019)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggu ng Jawab
			K		Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	Evaluasi Pelaksanaa n Kerjasma	Jumlah laporan Evaluasi Kerjasama berdasarka n Mou/PKS	36	dokum en	741.442.500	6	148.288.500	6	148.288.500	6	148.288.500	100	100,00	12	296.577.000	33,33	40,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	100,00			33,33	40,00	
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									452.310.000		452.310.000	75	100,00					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												100,00	100,00			33,33	40,00	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												ST	ST			SR	SR	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2022 s.d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2022)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggu ng Jawab
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100	%	3.932.185.100	725.335.100	780.000.000	762.473.000			97,75		1.487.808.100		32,70		
	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6	Kegiatan	2.731.863.300	412.253.300	463.922.000	448.482.400	100	96,67	2	860.735.700	33,33	31,51			Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Pesawaran
	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi	6	Dokumen	1.200.321.800	190.121.800	202.040.000	201.392.000	100	99,68	2	391.513.800	33,33	32,62			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun (Periode 2022 s.d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021 s/d 2022)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang- gung Jawab	
				K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
		Pertambahan dan Lingkungan Hidup	Kebijakan Pertambahan dan Lingkungan Hidup																
	4.01.03.2.0403	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	6	Kegiatan	693.150.000	1	122.960.000	1	114.038.000	1	112.598.600	100	98,74	2	235.558.600	33,33	33,98	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	98,36			16,67	32,70		
Predikat kinerja												ST	T			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										780.000.000		762.473.000	100	98,36			33,3	32,7	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												100,00	98,36			33,33	32,70		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												ST	ST			SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang- gung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	402	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecepatan, Ketetapan, dan keakuratan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	bulan	223.521.053.865	34.230.142.175	33.610.816.130	32.521.475.767,00					66.751.617.942				
	402	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%			195.712.000	188.810.000,00									

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab			
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.		K	Rp. (000)		K	Rp.		16
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran	30	doku men	326.269.937	5	36.517.000	5	52.375.000	5	48.707.000	100,00	93,00	10	85.224.000	33,33	26,12	Sekreat riat DPRD Kabup aten Pesawa ran			
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan triwulan dan keikutsertaan pameran pembangunan	30	doku men	762.656.484	5	1.605.000	5	143.337.000	5	140.103.000	100,00	97,74	10	141.708.000	33,33	18,58				
	4	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Adminsitras i Keuangan OPD	1000	%					3.157.337.430		3.103.224.492										
			penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersediany gaji dan tunjangan ASN	198	org	15.769.001.770	33	2.570.163.806	33	2.408.668.430	33	2.400.800.492	100,00	99,67	66	4.970.964.298	33,33	31,52				
			Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Terbayarnya honorarium tim penata usahaan pengelolaan keuangan	696	Og	4.045.889.000	116	514.822.000	116	740.084.000	203	693.839.000	175,00	93,75	319	1.208.661.000	45,83	29,87				
			koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semest eran SKPD	Tersedianya dokumen LKPJ, CALK , LAKIP, LPPD	24	doku men	13.530.000	4	6.330.000	4	6.330.000	4	6.330.000	100,00	100,00	8	12.660.000	33,33	93,57				
			penyusunan pelaporan dan analisa prognosis realisasi anggaran	Tersedianya dokumen prognosis	12	doku men	37.980.000	1	2.255.000	1	2.255.000	1	2.255.000,00	100,00	100,00	2	4.510.000	16,67	11,87				
	4	02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyeleng garaan Adminstras i Perangkat Daerah	1000	%					130.150.000		130.050.000,00										
			pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas DPRD dan unsur Sekretariat DPRD	6	paket	709.800.000	1	57.625.000	1	130.150.000	1	130.050.000	100,00	99,92	2	187.675.000	33,33	26,44				
	4	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyeleng garaan Adminstras	1000	%					4.366.602.200		4.201.570.050										

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab			
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.	13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		K	Rp.	15 = 14/5*100	16
			i Perangkat Daerah																			
			Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor.	Tersedianya instalasi komponen listrik.	7 2	paket	256.136.000,0 0	1 2	37.920.000	12	40.820.000	12	40.820.000	100,00	100,00	24	78.740.000	33,33	30,74			
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas staf sekretariat DPRD dalam upaya peningkatan kinerja alat kelengkapan DPRD Kab. Pesawaran	7 2	paket	524.674.584	1 2	223.001.000	12	64.351.000	12	64.288.500,00	100,00	99,90	24	287.289.500	33,33	54,76			
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas staf sekretariat DPRD dalam upaya peningkatan kinerja alat kelengkapan DPRD Kab. Pesawaran	7 2	paket	687.077.200	1 2	90.742.000	12	262.208.200	12	258.389.400	100,00	98,54	24	349.131.400	33,33	50,81			
			Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya makan minum ketua, rata-rapat .	7 2	paket	1.005.273.494	1 2	154.050.000	12	154.050.000	12	154.050.000	100	100,00	24	308.100.000	33,33	30,65			
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	7 2	paket	285.064.000	1 2	42.232.000	12	42.232.000	12	42.211.700	100,00	99,95	24	84.443.700	33,33	29,62			
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .	1 9 8	doku men	7.646.816.000 ,00	3 3	1.256.748.000	33	1.499.536.000	33	1.482.725.000	100,00	98,88	66	2.739.473.000	33,33	35,83			
			fasilitasi Kunjungan tamu	Tersedianya makan minum tamu	7 2	lapor an	626.460.600,0 0	1 2	96.000.000	12	96.000.000	12	88.000.000	100,00	91,67	24	184.000.000	33,33	29,37			
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 4 4	lapor an	25.480.173.00 0	2 4	2.131.285.000	24	2.207.405.000	24	2.071.085.450	100,00	93,82	48	4.202.370.450	33,33	16,49			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			dalam dan luar daerah															
	402	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%				600.989.000		596.750.000,00							
		Pengadaan Meubeler	Tersedianya Meubeler Kantor	192	unit	527.637.002	23	0	41	114.989.000	41	113.700.000	100,00	-	64	113.700.000	33,33	21,55
		Pengadan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas staf sekretariat DPRD dalam upaya peningkatan kinerja alat kelengkapan DPRD Kab. Pesawaran	410	unit	508.476.578	95	239.105.000	60	486.000.000	60	483.050.000	100,00	-	155	722.155.000	37,80	142,02
	402	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD	100	%				1.986.910.000		1.905.260.453,00							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materiail	72	laporan	43.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	6.600.000	100,00	91,67	24	13.800.000	33,33	31,94
		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik.	72	laporan	1.791.960.000	12	163.100.517	12	321.960.000	12	241.780.453	100,00	75,10	24	404.880.970	33,33	22,59
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan, Sopir dan Keamanan	72	laporan	9.489.900.000	12	1.563.880.000	12	1.657.750.000	12	1.656.880.000	100,00	99,95	24	3.220.760.000	33,33	33,94
	402	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%				1.449.850.000		1.115.649.911,00							
		Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya,pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharaan ya kendaraan Dinas/Operasional,	90	unit	5.882.878.000	15	555.305.823	15	995.250.000	15	663.134.911	100,00	66,63	30	1.218.440.734	33,33	20,71
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharaan ya perlengkapan gedung Kantor Sekretariat	646	unit	1.755.652.000	98	271.900.000	98	292.000.000	96	291.165.000	97,96	99,71	194	563.065.000	30,03	32,07

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
			DPRD dan DPRD.																
		Pemeliharaan /Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Pemeliharaaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	30	unit	719.665.700	5	187.300.000	5	162.600.000	5	161.350.000	100,00	99,23	10	348.650.000	33,33	48,45	
	402	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	%				19.884.934.000		19.582.503.861,00								
		Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD	Tersedianya gaji dan tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD	270	org	130.151.844.000	45	21.670.356.029	45	19.345.074.000	45	19.099.430.199	100,00	98,73	90	40.769.786.228	33,33	31,32	
		penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas DPRD dan unsur Sekretariat DPRD	6	paket	2.803.000.000	1	447.240.000	1	467.500.000	1	448.737.162	100,00	95,99	2	895.977.162	33,33	31,96	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya kegiatan medical chek up Pimpinan, Anggota	270	orang	405.000.000	45		45	72.360.000	19	34.336.500	42,22	47,45	64	34.336.500	23,70	8,48	
	402	Layanan Administrasi DPRD.	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Tugas-tugas DPRD	100	%				1.838.331.500		1.697.657.000,00								
		Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Tersedianya rapat-rapat alat kelengkapan dewan.	900	laporan	4.191.038.515	150	764.563.000	150	659.331.500	114	541.082.000	76,00	82,07	264	1.305.645.000	29,33	31,15	
		Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Tersedianya Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kab. Pesawaran	24	laporan	7.074.000.000	4	1.138.896.000	4	1.179.000.000	4	1.156.575.000	100,00	98,10	8	2.295.471.000	33,33	32,45	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	86			32,74	35,89		
Predikat kinerja												ST	ST						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab			
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.		K	Rp. (000)		K	Rp.		16
4	0	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Layanan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	100	perse n	134.272.262.736		17.491.196.100		22.974.481.500		20.484.683.400										
	4	0	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Perda Prakarsa Yang Disahkan	100	%					2.032.457.500		1.961.640.600										
			Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Perda yang disahkan dan Perda Inisiatif DPRD	6	doku men	8.633.785.771	1	1.325.697.600	1	1.409.069.000	1	1.404.474.600	100,00	99,67	2	2.730.172.200	33,33	31,62		Sek DPRD		
			Pembahasan rancangan peraturan daerah	Disetujui dan disyahkan Ranperda Inisiatif Dewan menjadi Perda.	90	doku men	4.059.563.407	15	648.058.000	15	623.388.500	9	557.166.000	60,00	89,38	24	1.205.224.000	26,67	29,69				
	4	0	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasa n dan Pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan Yang di Sahkan	100	%					373.133.500		274.893.500										
			Pembahasan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS	6	doku men	390.578.611	1	52.996.500	1	58.676.500	1	58.346.500	100,00	99,44	2	111.343.000	33,33	28,51				
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6	doku men	386.479.502	1	52.003.000	1	60.083.000	1	54.753.000	100,00	91,13	2	106.756.000	33,33	27,62				
			Pembahasan APBD	Tersdianya Dokumen APBD	6	doku men	635.732.433	1	83.254.000	1	99.934.000	-	8.164.000	-	8,17	1	91.418.000	16,67	14,38				
			Pembahasan Perubahan APBD	Tersdianya Dokumen Perubahan APBD	6	doku men	600.676.742	1	78.022.000	1	94.562.000	-	94.032.000	-	99,44	1	172.054.000	16,67	28,64				
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tersdianya Dokumen Pertanggung	6	doku men	385.141.748	1	54.198.000	1	59.878.000	1	59.598.000	100,00	99,53	2	113.796.000	33,33	29,55				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			jawaban APBD															
	402	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pembahasan dan Pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan Yang Tepat Waktu	100	%				69.978.000		69.848.000							
		Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	Tersedianya dokumen LKPJ Kepala Daerah	6	dokumen	456.650.624	1	6.298.000	1	69.978.000	1	69.848.000	100,00	99,81	2	76.146.000	33,33	16,67
	402	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis	100	%				4.218.202.000		3.582.058.000							
		Orientasi DPRD	Terlaksananya kegiatan kapasitas DPRD.	24	dokumen	12.638.897.746	4	1.756.109.500	5	3.024.152.000	5	2.421.008.000	100,00	80,06	9	4.177.117.500	37,50	33,05
		Pubikasi dan dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan kehumasan DPRD.	516	dokumen	5.360.456.142	86	564.084.000	86	1.194.050.000	78	1.161.050.000	90,70	97,24	164	1.725.134.000	31,78	32,18
	402	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	%				2.187.891.500		2.120.663.000							
		Kunjungan Kerja dalam daerah	Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD.	48	dokumen	15.600.820.288	8	970.738.000	8	1.770.000.000	8	1.706.875.000	100,00	96,43	16	2.677.613.000	33,33	17,16
		Pelaksanaan reses	Tersekapnya aspirasi Masyarakat	18	dokumen	7.911.909.445	3	406.091.500	3	417.891.500	3	413.788.000	100,00	99,02	6	819.879.500	33,33	10,36
	402	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100	%				14.092.819.000		12.475.580.300							
		Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD.	144	dokumen	77.211.570.276	24	11.493.646.000	24	14.092.819.000	24	12.475.580.300	100,00	88,52	48	23.969.226.300	33,33	31,04

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rata-rata capaian kinerja (%)														80,82	88,30			30,46	25,42	
Predikat kinerja														T	T			SR	SR	
4	0	0	0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Pengetahuan Dasar dan Kompetensi terhadap Aparatur meningkat.	100	perse	2.371.136.200	256	1.412.848.700	-	-	-							
	0	0	0	Pendidikan dan peltihan Formal.	Terfasilitasin ya pelaksanaan Bintek Bagi PNS diligkungan Sekretariat DPRD	186	Oran	2.371.136.200	145	1.412.848.700	-	-	-			145	1.412.848.700	77,96	59,59	Sek DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-			77,96	59,59	
Predikat kinerja																		T	R	
4	0	0	0	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	Cakupan Layanan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	100	perse	1.183.805.850		63.347.500	-	-	-				63.347.500			
				Keikutsertaan pameran pembangunan	Terlaksanan ya Pameran DPRD.	10	kali	491.475.850	6	63.347.500						6	63.347.500	60,00	12,89	
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-			6,00	1,29	
Predikat kinerja																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											56.585.297.630		53.006.159.167,00							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)														90,25	87,39			31,60	30,66	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)														ST	T			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16								
	105	Program Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			13.754.071.000		2.018.676.188		2.538.089.300		2.701.157.886								
	105	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi		100.000.000		-		30.000.000		30.000.000	-	-		30.000.000	-	-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	110.000.000		4	20.000.000	4	20.000.000	100	100	4	20.000.000	20	18	BPBD	
		Koordinasi ddan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Dokumen	100.000.000		4	10.000.000	4	10.000.000	100	100	4	10.000.000	20	10		
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	100			20	14		
Predikat Kinerja												S	S			SR	SR		
	105	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.922.408.000		1.743.301.635		1.748.858.000		1.932.231.291	-	-		3.675.532.926	-	-	BPBD	
		Penyediaan Gaji ddan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72	Bulan	9.947.700.000	12	1.652.101.635	12	1.620.248.000	12	1.791.471.291	100	111	24	3.443.572.926	33		35
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	72	Bulan	899.708.000	12	91.200.000	12	123.610.000	12	135.760.000	100	110	24	226.960.000	33		25
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10	Dokumen	75.000.000		2	5.000.000	2	5.000.000	100	100	2	5.000.000	20	7		
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	107			29	22		
Predikat Kinerja												SR	R			SR	SR		
	105	Administrasi Umum Perangkat Daerah			909.255.000		26.093.000		130.592.000		130.519.200	-	-	-	156.612.200	-	-		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bulan	20.576.000	4	576.000	15	2.000.000	15	2.000.000	100	100	19	2.576.000	32	13	BPBD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300	Item	131.740.000	45	9.078.000	50	20.092.000	50	20.092.000	100	100	95	29.170.000	32	22	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	146	Item	20.000.000	-	-	16	2.000.000	16	2.000.000	100	100	16	2.000.000	11	10	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	60	Bulan	126.989.000	12	1.989.000	12	15.000.000	12	15.000.000	100	100	24	16.989.000	40	13	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	30	Item	71.540.000	6	6.040.000	6	7.500.000	6	7.500.000	100	100	12	13.540.000	40	19	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	Bulan	61.000.000	12	6.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	100	100	24	15.000.000	40	25	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Kali	477.410.000	6	2.410.000	20	75.000.000	20	74.927.200	100	100	26	77.337.200	17	16	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	100			30	17	
Predikat Kinerja													S	S			SR	SR	
	1	05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.597.000.000		249.281.553	-	265.000.000		260.408.095				509.689.648			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	128.000.000	12	17.281.553	12	18.000.000	12	16.408.095	100	91	24	33.689.648	40	26	BPBD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	Bulan	1.469.000.000	12	232.000.000	12	247.000.000	12	244.000.000	100	99	24	476.000.000	33	32	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	95			37	29	
Rata-rata capaian kinerja (%)													SR	SR			SR	SR	
	1	05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			225.408.000		-	-	363.639.300		347.999.300				15.408.000			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45	Unit	2.110.031.300	9	177.537.442	9	328.231.300	9	312.591.300	100	95	18	490.128.742	40	23	BPBD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan	50	Unit	225.000.000	-	-	8	20.000.000	8	20.000.000	100	100	8	20.000.000	16	9	

No	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Peralatan dan Mesin Lainnya															
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Unit	225.408.000	-	-	1	15.408.000	1	15.408.000	100	100	1	15.408.000	20	7
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	98			25	13	
Predikat Kinerja												ST	T			SR	SR	
	105	Program Penanggulangan Bencana				10.822.230.700			1.490.384.700		1.212.388.075							
	105	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				6.006.455.000		58.500.000	-	738.000.000		471.727.750			530.227.750			
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2	Dokumen	475.000.000	-	-	1	200.000.000	1	50.000.000	100	25	1	50.000.000	50	11
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	5	Pelatihan	400.000.000	-	-	25	40.000.000	25	40.000.000	100	100	25	40.000.000	500	10
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	9	Unit	1.150.000.000	-	-	1	100.000.000	1	80.507.750	100	81	1	80.507.750	11	7
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10	Peralatan	400.000.000	-	-	2	50.000.000	2	49.820.000	100	100	2	49.820.000	20	12
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	55	Desa	998.000.000	-	-	11	98.000.000	11	96.500.000	100	98	11	96.500.000	20	10
		Penanganan Pascabencana kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelatihan Jitupasna dan Penyusunan	10	Kegiatan	700.000.000	-	-	2	90.000.000	2	64.900.000	100	72	2	64.900.000	20	9

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
			Renaksi (R3) Pascabencana																
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	7	Rakor	1.133.455.000	1	58.500.000	1	60.000.000	1	20.000.000	100	33	2	78.500.000	29		7
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	10	Kegiatan	750.000.000	-	-	2	100.000.000	2	70.000.000	100	70	2	70.000.000	20		9
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	72			84	9		
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR		
	105	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				4.065.775.700		189.690.200		652.384.700		641.010.325			830.700.525			BPBD	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	90	Orang	1.207.565.000	18	107.565.000	18	200.000.000	18	199.710.000	100	100	36	307.275.000	40		25
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	15	Item	1.012.125.000	3	82.125.200	3	150.000.000	3	150.000.000	100	100	6	232.125.200	40		23
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	60	Bulan	1.846.085.700	-	-	1	302.384.700	1	291.300.325	100	96	1	291.300.325	2		16
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	99			27	21		
Predikat Kinerja												T	S	-		SR	SR		
	105	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				750.000.000	-	-		100.000.000		99.650.000			99.650.000			BPBD	
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	4	Aplikasi	750.000.000	-	-	1	100.000.000	1	99.650.000	100	100	1	99.650.000	25		13

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	100			25	13	
Predikat Kinerja												SR	R			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM :								4.028.474.000		3.913.545.961								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												100,00	96,37			34,63	17,44	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												R	R			SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab pesawaran			20.683.000.678				3.154.014.600		1.608.005.416				1.608.005.416			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	01	Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60	Bulan	14.951.626.090		12	2.536.856.000	12	1.201.934.206	100,00	47,38	3	1.201.934.206	5,00	8,04	
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	52	dokumen	125.826.111		11	44.856.000	11	44.856.000	100,00	100,00	11	44.856.000	21,15	35,65	
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan opd	10	dokumen	3.111.501.000		2	170.640.000	2	83.140.000	100,00	32,42	1	83.140.000	10,00	1,78	
	06	Penyediaan komponen instalasi bangunan kantor listrik/penerangan	Jumlah penyediaan komponen listrik (jenis)	60	Bulan	42.735.700		12	5.150.000	12	5.150.000	100,00	100,00	12	5.150.000	20,00	12,05	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah layanan pengadaan ATK	60	Bulan	91.576.500		12	16.031.800	12	7.720.800	100,00	34,32	3	7.720.800	5,00	8,43	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah layanan penyediaan peralatan rumah tangga	60	Bulan	64.469.856		12	3.589.500	12	1.389.500	100,00	38,72	3	1.389.500	5,00	2,16	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah layanan makan minum	60	Bulan	145.850.839		11	5.000.000	11	3.000.000	100,00	60,00	3	3.000.000	5,00	2,06	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan	60	Bulan		182.062.222	12	3.520.000	12	3.520.000	100,00	100,00	12	3.520.000	20,00	1,93	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Bulan		64.396.595	12	3.840.000	12	3.840.000	100,00	100,00	12	3.840.000	20,00	5,96	
			06	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	jumlah rapat dan koordinasi	60	Bulan		117.854.455	12	17.550.000	12	17.550.000	100,00	100,00	12	17.550.000	20,00	14,89	
			08	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	300	jenis		12.210.200	60	1.350.000	60	650.000	100,00	48,15	20	650.000	6,67	5,32	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan		128.207.100	12	21.000.000	12	5.154.910	100,00	24,55	3	5.154.910	5,00	4,02	
				Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah layanan adm.keu dan layanan umum	60	Bulan		585.000.000	12	117.000.000	12	63.000.000	100,00	53,85	3	63.000.000	5,00	4,61	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kend.dinas oprasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ops	67	Unit		815.480.010	17	173.631.300	12	133.100.000	70,59	10,50	6	133.100.000	8,96	16,32	
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sewa gedung kantor	15	Paket		152.627.500	3	30.000.000	3	30.000.000	100,00	100,00	3	30.000.000	20,00	19,66	
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	250	unit		91.576.500	50	4.000.000	50	4.000.000	100,00	100,00	50	4.000.000	20,00	4,37	
Rata-rata capaian kinerja (%)														98,16	58,37			12,30	8,80	
														ST	ST			S	T	
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							50.000.000		48.500.000				48.500.000			
			01	Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi,wawasan kebangsaan,bela negara dan karakter bangsa	Jumlah sosialisasi	55	Kecamatan		335.780.000	55	50.000.000	55	48.500.000	100,00	97,00	11	48.500.000	20	14,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisa si Capaia n Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penangg ung Jawab
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		20,00	97,00			6,67	4,81	
													Predikat kinerja		ST	ST			ST	ST	
					Program PeningkatanPeran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik						1.069.905.000		730.449.000				730.449.000				
				0' 3	Pelaksanaan monitoring,evaluas i dan pelaporan dibidang pendidikan politik,etika budaya dan politik	Jumlah berkas partai politik penerima bantuan yang di verifikasi	55	Parpol	6.229.809.838		11	1.069.905.000	3	730.449.000	27,27	68,27	3	730.449.000	5,45	11,73	
													9,09	22,76			1,82	3,91			
													Predikat kinerja		ST	ST			ST	ST	
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						2.772.322.000		487.322.000				487.322.000				
				0' 4	Pelaksanaanmonito ring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas,pemberdaya an ormas,evakuasi dan mediasi sengketa ormas	Jumlah bantuan hibah kepada instansi vertikal serta ormas dan LSM di Kab. Pesawaran	160 ormas dan 50 instans i vertikal	ormas dan instans i vertikal	19.415.439.020		3	2.772.322.000	2	487.322.000	67	18	2	487.322.000	67	2,51	Badan Kesatua n Bangsa dan Politik
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		66,67	17,58			44	1,67	
													Predikat Kinerja		ST	ST			T	ST	
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik Sosial							275.600.000		217.000.000				217.000.000			
				0 6	Pelaksanaan koordinasi dibidang	Jumlah laporan terlaksananya forum koordinasi	60	laporan	183.153.000		12	26.700.000	11	25.450.000	100,00	95,32	11	25.450.000	91,67	13,90	Badan Kesatua n

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penang- gung Jawab
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				kewaspadaan dini.kerjasama intelejen,pemantau an orang asing,tenaga kerja asing,kewaspadaan antar negara,fasilitasi bidang kewaspadaan serts penanganan konflik daerah	dan komunikasi pemda dengan ubsur intelejen dan elemen masyarakat (KOMINDA)															Bangsa dan Politik
			0 6	Pelaksanaan monitoring dibidang kewaspadaan dini.kerjasama intelejen,pemantau an orang asing,tenaga kerja asing,kewaspadaan antar negara,fasilitasi bidang kewaspadaan serts penanganan konflik daerah	Jumlah penerima bantuan oprasional bagi aparat keamanan tingkat desa dan kecamatan	880	Orang		3.219.116.059	17 6	248.900.000	60	191.550.000	34,09	76,96	60	191.550.000	34,09	5,95	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														67,05	88,15			31,44	4,96	
											7.321.841.600		3.091.276.416				3.091.276.416			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)														96,00	91,00			20,03	8,80	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)														ST	ST			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Kecamatan Negeri Katon	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD 2021 sampai dengan 2026		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD 2022 s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	7	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.078.800.000		-		215.760.000		215.760.000							
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	60	103.800.000	60	-	12	20.760.000	12	20.760.000	100	100	3	20.760.000	5	20	Kecamatan Negeri Katon
	7	01	Peediaan Jasa Tenaga Administrasi	60	975.000.000	60	-	12	195.000.000	12	195.000.000	100	100	3	195.000.000	5	20	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	100			5	20	
Predikat kinerja												S	S			SR	SR	
	7	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.000.000		-		2.500.000		2.500.000							
			PenyusunanDokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	15.000.000	5	-	1	2.500.000	1	2.500.000	100	100	1	2.500.000	20	17	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	100			20	17	
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR	
	7	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah		211.914.408		-		42.805.000		42.805.000							
	7	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	135	40.100.000	116	-	12	7.200.000	12	7.200.000	100	100	3	7.200.000	2	18	
	7	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	58.300.000	60	-	12	7.950.000	12	7.950.000	100	100	3	7.950.000	5	14	
	7	01	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Kordinasi SKPD	60	18.975.000	60	-	12	10.975.000	12	10.975.000	100	100	3	10.975.000	5	58	
	7	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	21.000.000	60	-	12	4.200.000	12	4.200.000	100	100	3	4.200.000	5	20	
			Penyediaan Instalasi Listrik	60	12.000.000	60	-	12	2.400.000	12	2.400.000	100	100	3	2.400.000	5	20	
	7	01	PenyediaanAlat Tulis Kantor	60	61.539.408	60	-	12	10.080.000	12	10.080.000	100	100	3	10.080.000	5	16	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	100			5	24	
Predikat kinerja												S	T			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Kecamatan Negeri Katon	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD 2021 sampai dengan 2026		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD 2022 s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	7 0 1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			189.000.000		-		32.600.000		32.600.000							
		Penyediaan Jasa Komunikasi (Wifi)	Terbayarnya jasa komunikasi (Wifi)	60	33.000.000	60	-	12	6.600.000	12	6.600.000	100	100	3	6.600.000	5	20	
	7 0 1	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium, cleaning service, penjaga malam	60	156.000.000	60	-	12	26.000.000	12	26.000.000	100	100	3	26.000.000	5	17	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	100			2	18	
Predikat kinerja												S	S			SR	SR	
	7 0 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			321.312.000		-		44.250.000		44.250.000							
	7 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pajak Kendaraan	Terbayarnya bahan bakar dan pelumas	60	321.312.000	60	-	12	44.250.000	12	44.250.000	100	100	3	44.250.000	5	14	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	100			5	14	
Predikat kinerja												T	S			SR	SR	
		PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			222.355.774		-		29.095.000		13.895.000							Kecamatan Negeri Katon
	7 0 1	Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tinggka Kecamatan			106.191.218		-		13.895.000		-							
	7 0 1	Koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.	terlaksananya Musembang tingkat kecamatan	6	106.191.218	5	-	1	13.895.000	1	13.895.000	100	100	1	13.895.000	17	13	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	100			17	13	
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR	
	7 0 1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			116.164.556		-		15.200.000		15.200.001							
	7 0 1	koordinasi/sinergi dengan perangkat	Trlaksananya peringatan	6	116.164.556	5	-	1	15.200.000	1	15.200.001	100	100	-	15.200.001	0	13	Kecamatan Negeri Katon

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Kecamatan Negeri Katon	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD 2021 sampai dengan 2026		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD 2022 s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	hari kemerdekaan RI															
Rata-rata capaian kinerja (%)												100	100			0	13	
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									367.010.000		367.010.001							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)												100	100			7,55	17,03	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)												T	T			SR	SR	

N o	Urusan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra RPJMD pada Tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja Restra RPJMD s/d TAHUN lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun 2022		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra RPJMD s/d Tahun 2022(%)		Unit OPD
				K		Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
1	KEWILAYAHAN	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kot	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%		3.033.542.308		375.434.070		436.811.700									
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12	bln	12.210.200			12	5.190.000	12	5.190.000	100	100	12	5.190.000	100	43	
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan [pengujian dan verifikasi keuangan SKPD	2	dok	34.060.353			2	6.079.000	2	6.079.000	100	100	2	6.079.000	100	18	Kecamatan Teginene ng
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut lengkap	tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapan lainnya	30	orang	30.525.500			30	5.000.000	30	5.000.000	100	100	30	5.000.000	100	16	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	72	bln	105.749.220	12	18.102.000	12	15.102.000	12	15.102.000	100	100	24	33.204.000	33	31	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra RPJMD pada Tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja Restra RPJMD s/d Tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun 2022		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra RPJMD s/d Tahun 2022(%)		Unit OPD
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	12	bln	9.888.168			3	1.391.700	3	1.391.700	100	100	3	1.391.700	25	14	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah tersedianya dana belanja makanan dan minuman	72	bln	95.918.850	12	12.375.000	12	15.750.000	12	15.750.000	100	100	24	28.125.000	33	29	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bln	17.762.250	4	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	100	100	16	5.000.000	133	28	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bln	17.053.240	4	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	100	100	16	4.800.000	133	28	
		penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah tersedianya dana penunjang perjalanan dinas	72	bln	124.372.900	12	8.250.000	12	20.050.000	12	20.050.000	100	100	24	28.300.000	33	23	
		Penyediaan surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	dok	23.427.819	12	900.000	12	3.690.000	12	1.300.000	100	35	24	2.200.000	33	9	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	item	106.576.500	1	15.000.000	12	15.000.000	12	10.218.429	100	68	13	25.218.429	108	24	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa tenaga kontrak 18 orang , kebersihan	90	orang	2.055.761.565	17	265.321.000	18	293.299.000	18	293.299.000	100	100	35	558.620.000	39	27	
		Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	jumlah terpeliharanya kendaraan dinas	12	bln	311.040.620	3	45.336.070	12	46.200.000	12	43.867.815	100	95	15	89.203.885	125	29	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan peralatan dan mesin lainnya	4	unit	89.195.123	1	5.250.000	4	13.750.000	4	13.750.000	100	100	5	19.000.000	125	21	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	93			80	24	
Predikat kinerja													ST	ST			T	SR	
		PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		185.595.040		-		30.400.000									
		koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat kecamatan	6	kegiatan	100.123.640	1		1	16.400.000	1	16.400.000	100	100	2	16.400.000	33	16	Kecamatan Teginene ng

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra RPJMD pada Tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja Restra RPJMD s/d Tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun 2022		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra RPJMD s/d Tahun 2022(%)		Unit OPD
						K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2			3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				daerah dan instansi vertikal lainnya																	
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah rekomendasi perizinan non usaha yang dikeluarkan	50	dok	42.735.700	20		10	7.000.000	10	7.000.000	100	100	30	7.000.000	60	16	
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah pelaksanaan pelayanan pembuatan surat izin usaha UMKM	350	Izin	42.735.700			109	7.000.000	109	7.000.000	100	100	109	7.000.000	31	16	
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	100			41	16	
Predikat kinerja															ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															100,00	96,37			60,83	20,36	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															ST	ST			R	SR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun(2021 S/D Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang- gung Jawab
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2				3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	9.256.791.258	100%	224.520.500	1	251.425.300	100%	250.566.475	100,00	100,00	2	475.086.975	16,67	7,37	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	12.210.200	0	-	1	900.000	1	900.000	100,00	100,00	1	900.000	16,67	7,37	Kec. Way Lima
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan							-		100,00	100,00			33,33	27,15	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun(2021 S/D Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penangg ung Jawab
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2				3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
						Perangkat Daerah															
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	7.394.988.521		-			-								
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	1.482.940.242	12	192.200.000	3	210.480.000	12	210.480.000	100,00	100,00	24	402.680.000	33,33	27,15	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah							-		100,00	94,70			27,16	19,14	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	57.314.525	12	2.890.500	12	6.539.000	12	6.539.000	100,00	100,00	24	9.429.500	33,33	16,45	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72	14.210.200	12	-	12	856.300	12	856.300	100,00	100,00	24	856.300	33,33	6,03	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72	63.945.900	12	2.700.000	12	4.500.000	12	4.500.000	100,00	100,00	24	7.200.000	33,33	11,26	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72	18.052.240	12	1.470.000,00	12	450.000	3	450.000	100,00	100,00	15	1.920.000	20,83	10,64	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	38.946.520	1	7.200.000	12	3.000.000	12	3.000.000	100,00	100,00	13	10.200.000	18,06	26,19	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	26.657.340	1	1.500.000	12	10.000.000	3	10.000.000	100,00	100,00	4	11.500.000	5,56	43,14	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	6.394.590	12	360.000	12	900.000	12	900.000	100,00	100,00	24	1.260.000	33,33	19,70	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	55.869.780	12	4.200.000	12	1.800.000	12	941.175	100,00	52,29	24	6.000.000	33,33	10,74	Kec.Wa y Lima

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun(2021 S/D Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang- gung Jawab	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
1	2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	85.261.200	12	12.000.000	1 2	12.000.000	12	12.000.000	100, 00	100,0 0	24	24.000.000	33, 33	28,15		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100, 00	98,23			25, 72	17,89		
Predikat kinerja																ST	ST			SR	SR		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	474.762.782		52.860.000	0	55.403.000	-	73.323.000	100, 00	85,94	-	126.183.000	30, 42	18,52		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	72	453.447.482	3	51.350.000	1 2	53.970.000	12	38.790.000	100, 00	71,87	15	105.320.000	20, 83	23,23		
						Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Terpeliharanya Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	5	21.315.300	1	1.510.000	1	1.433.000	1	1.433.000	100, 00	100,0 0	2	2.943.000	40, 00	13,81		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100, 00	85,94			30, 42	18,52		
Predikat kinerja																ST	T			SR	SR		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	37.851.620	-	0	0	-	-									
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terbayarnya Jasa Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50	37.851.620	10	-		-	-									
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00	0,00			0,0 0	0,00		
Predikat kinerja																SR	SR	0		SR	SR		
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	156.551.380	-	11.250.000	0	23.800.000	-	16.550.000	69,5 4	69,54	-	35.050.000				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun(2021 S/D Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penangg ung Jawab
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2				3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	98.292.110	1	0	1	16.100.000	1	8.850.000	100, 00	54,97	2	16.100.000	40, 00	16,38	Kecama tan Way Lima
					Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum kec. Way lima	Terlaksannya Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum kec. Way lima	20	47.009.270	-	0	4	7.700.000	3	7.700.000	100, 00	100,0 0	3	7.700.000	15, 00	16,38	
					Fasilitasi Sinnkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinnkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	1	11.250.000	1	11.250.000	0	0									
										-											Kec. Way Lima
Rata-rata capaian kinerja (%)															100, 00	77,48			27, 50	16,38	
Predikat kinerja															ST	T			SR	SR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)															100, 00	87,22			20, 91	13,20	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)															ST	T			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun(2021 S/D Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja P- RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.633.559.178		1.056.792.444		1.177.030.105		1.167.329.918		389,07		2.272.332.049			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.483.447.390		979.408.252		1.013.808.105	-	1.001.237.966	99,29	99,29		1.993.216.357	33,33	27,29	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	6.579.678.670	14	852.208.252	14	886.608.105	14	874.037.966	98,58	98,58	28	1.738.816.357	33,33	26,43	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	903.768.720	12	127.200.000	12	127.200.000	12	127.200.000	100,00	100,00	24	254.400.000	33,33	28,15	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		421.110.895		18.023.392		71.752.000	-	36.112.452	100,00	90,75	-	89.775.392	29,51	21,09	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	14.210.200	12	1.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	100,00	100,00	24	3.000.000	33,33	21,11	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	81.543.194	12	6.739.000	12	13.191.000	12	13.191.000	100,00	100,00	24	19.930.000	33,33	24,44	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72	28.420.400	12	120.000	12	4.000.000	12	4.000.000	100,00	100,00	24	4.120.000	33,33	14,50	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72	95.918.850	12	2.300.000	12	15.750.000	12	15.750.000	100,00	100,00	24	18.050.000	33,33	18,82	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72	23.169.731	12	986.200	12	3.261.000	12	3.261.000	100,00	100,00	24	4.247.200	33,33	18,33	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	72	17.052.240	1	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	100,00	100,00	13	4.800.000	18,06	28,15	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun(2021 S/D Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja P- RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
			Perundang-undangan															
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	85.261.200	1	2.900.000	12	22.150.000	12	22.150.000	100,00	100,00	13	25.050.000	18,06	29,38	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	75.535.080	12	1.578.192	12	9.000.000	12	2.343.080	100,00	26,03	24	10.578.192	33,33	14,00	Kec.Wa y Ratai
Rata-rata capaian kinerja (%)												99,65	95,02			31,42	24,19	
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	583.699.513		50.660.000	-	71.570.000	-	110.079.500	99,03	99,03	-	160.739.500	27,08	20,74	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	72	556.897.738	3	50.410.000	12	66.320.000	12	65.029.500	98,05	98,05	15	116.730.000	20,83	20,96	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	6	26.801.775	1	250.000	1	5.250.000	1	5.250.000	100,00	100,00	2	5.500.000	33,33	20,52	
Rata-rata capaian kinerja (%)												99,03	99,03			27,08	20,74	
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	145.301.380	-	8.700.800	-	19.900.000	-	19.900.000	100,00	100,00	-	28.600.800			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	5	98.292.110	1	8.151.000	1	12.200.000	1	12.200.000	100,00	100,00	2	20.351.000	40,00	20,70	Kecama tan Way Ratai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD PD pada tahun(2021 S/D Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja P- RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang- gung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
		Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum kec. Way Ratai	Terlaksannya Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	20	47.009.270	1	549.800	1	7.700.000	4	7.700.000	100,0 0	100,00	5	8.249.800			
							-											
							-											Kec. Way Ratai
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00			20,00	10,35	
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												99,56	98,02			26,17	18,43	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												ST	ST			SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggu- ng Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA			60.867.232.375		7.401.887.911		8.248.252.777		3.935.291.965							Inspekt or at
	601	Perencanaan dan , Penggangan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	423.075.200	100 %	42.355.600	1	50.719.600		44.635.600				86.991.200		20,56	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab
						K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)		K	Rp.	
1	2			3	4	5			6			7			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	265	OPD	423.075.200	73	42.355.600	73	50.719.600		73	50.599.600		100, 00	99,7 6	146	92.955.200		55,0 9	21,9 7		
				Jumlah Evaluasi SPIP																					
				Jumlah Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah																					
	6	01		Administrasi Keuangan Perangkat daerah		100%		54.169.257.275	100 %	6.925.567.511	1	7.510.742.277			5.712.026.004										
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Inspektorat)	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	51.155.826.275	12	6.548.967.011	12	7.128.141.777		12	7.079.504.701		100, 00	99,3 2	24	13.628.471.712		40,0 0	26,6 4		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD(Inspektor at)	Jumlah Pembayaran Honorarium Pegawai	60	Bulan	3.013.431.000	12	376.600.500	12	382.600.500		12	382.600.500		100, 00	100, 00	24	759.201.000		40,0 0	25,1 9		
	6	01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%		1.733.633.000	100 %	43.864.400	1	175.260.000			50.800.000					94.664.400		0,00	5,46		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah SDM APIP yang mengikuti diklat	75	Orang	1.419.520.000	15	43.864.400	17	144.460.000		16	144.460.000		94,1 2	100, 00	31	188.324.400		41,3 3	13,2 7		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai	240	Orang	314.113.000	48	-	48	30.800.000		48	30.800.000		100, 00	100, 00	96	30.800.000		40,0 0	9,81		
	6	01		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		1.883.370.600	100 %	164.985.000	1	239.355.600			270.206.452										
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	60	bulan	68.725.000	12	6.590.000	12	6.590.000		12	6.590.000		100, 00	100, 00	24	13.180.000		40,0 0	19,1 8		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	60	bulan	306.772.000	12	26.321.000	12	37.361.000	12	37.361.000	100,00	100,00	24	63.682.000	40,00	20,76	
			Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah tangga	60	bulan	69.293.000	12	7.081.500	12	7.081.500	12	7.081.500	100,00	100,00	24	14.163.000	40,00	20,44	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik kantor	60	bulan	270.534.000	12	30.844.500	12	30.844.500	12	30.844.500	100,00	100,00	24	61.689.000	40,00	22,80	
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bulan	276.766.600	12	28.294.000	12	32.902.600	12	32.902.600	100,00	100,00	24	61.196.600	40,00	22,11	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	bulan	212.850.000	12	27.000.000	12	27.000.000	12	27.000.000	100,00	100,00	24	54.000.000	40,00	25,37	
			Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bulan	678.430.000	12	38.854.000	12	97.576.000	12	97.326.852	100,00	99,74	24	136.180.852	40,00	20,07	
	6	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		667.390.000	100%	15.640.000	1	33.750.000		33.600.000							
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Laninnya	60	bulan	667.390.000	12	15.640.000	12	33.750.000	12	33.600.000	100,00	99,56	24	49.240.000	40,00	7,38	
	6	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		288.400.000	100%		1	18.000.000		9.756.690				9.756.690	0,00	3,38	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bulan	288.400.000	12	11.184.864	12	18.000.000	12	12.764.690	100,00	70,91	24	23.949.554	40,00	8,30	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab						
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.							
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16						
	6	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		1.702.106.300		100 %	209.475.400		1	220.425.300		178.705.000										
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeilharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeilharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	60	bulan	1.219.906.300		12	136.475.400		12	199.425.300		12	194.492.400		100, 00	97,5 3	24	330.967.800		40,0 0	27,1 3	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	bulan	112.200.000		12	13.000.000		12	13.000.000		12	13.000.000		100, 00	100, 00	24	26.000.000		40,0 0	23,1 7	
			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60	bulan	370.000.000		12	60.000.000		12	8.000.000		1	8.000.000		8,33	100, 00	13	68.000.000		21,6 7	18,3 8	
Rata-rata capaian kinerja (%)													94,2 6	98,0 5			48,4 4	25,8 1							
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR							
2	6	1	Program Penyelenggaraa n Pengawasan				7.068.975.500			1.319.015.000			1.327.255.000			1.192.745.500									
			Penyelenggaraa n Pengawasan Internal		100%		7.068.975.500		100 %	1.319.015.000		1	1.327.255.000			1.192.745.500									
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah ASN yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	910	lapora n	2.001.908.500		182	350.852.000		18 2	460.431.000		18 2	460.320.504		100, 00	99,9 8	364	811.172.504		40,0 0	40,5 2	
				Jumlah Laporan Pemuktahiran Data Irjen Departemen pada Kementerian dan BPK RI																					

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Laporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)															
				Jumlah Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan															
				Jumlah Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus															
				Jumlah reviu LKPD	75	Lapor an	15		15	74.824.000	15	74.804.000	100, 00	99,9 7	30	167.967.000	40,0 0	99,9 4	
				Jumlah Reviu LAKIP, SSH,BMD,HSPK dan ASB/ SBM															
				Jumlah Reviu PBJ															
				Jumlah Reviu RKA															
				Jumlah Reviu RKPD															
				Jumlah Reviu KUA dan PPAS															
				Jumlah Reviu Renja OPD															
				Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Koperehensif	107 0	Lapor an	214	875.000.000	214	792.000.000	214	792.000.000	100, 00	100, 00	428	1.667.000.000	40,0 0	34,0 3	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100, 00	99,9 8			40,0 0	58,1 6	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
3	6	01	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi				982.617.000			522.248.000		398.342.000							Inspektoral
			Pendampingan dan Asistensi		100%		982.617.000	100 %	1	522.248.000		398.342.000							
				Jumlah pelaksanaan pengelolaan Wistle Blowing System (WBS)	115	Lapor an	23	38.690.000	23	74.500.000	23	74.500.000	100, 00	100, 00	46	113.190.000	40,0 0	99,4 9	
				Jumlah Penanganan Pengaduan Masvarakat															
				Jumlah Tindak Lanjut antar APIP dan APH															

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P- RKPD PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022(%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	
						K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)			K
1	2	3			4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
				Pendampingan, Assistensi, Verifikasi dan Repormasi Birokrasi	Jumlah Tim Satgas Unit Pemberantasan Pungli	239	Lapor an	868.847.000	46	337.349.000	46	447.748.000	46	435.482.000	100, 00	97,2 6	92	772.831.000	38,4 9	88,9 5		
					Jumlah Unit Pengendalian Gratifikasi																	
					Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas																	
					Jumlah Zona Integritas																	
					Jumlah Koordinasi MCP (Monitoring Center Prevention)																	
Rata-rata capaian kinerja (%)															100, 00	98,6 3	69	443.010.500	26,1 6	62,8 1		
Predikat kinerja															ST	ST			SR	R		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													10.097.755.777		5.526.379.465							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)															98,0 9	98,8 9	23	147.670.167	38,2 0	48,9 3		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)															ST	ST			SR	SR		

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100	Persen	32.115.496.707	9	4.192.528.177	100	4.685.258.329	93	4.565.906.205	93	97,45	102,22	8.758.434.382	102,22	27,2717	
2	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	24.459.883.885	11	3.444.146.152	100	3.490.912.704	100	3.468.893.959	100	99,37	111,11	6.913.040.111	111,11	28,26	Bappeda
3	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2232	Org/Bl n	23.440.263.575	372	3.313.584.952	372	3.341.876.704	372	3.319.857.959	100	99,34	744	6.633.442.911	33,33	28,30	
4	01	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	6	Dok	474.901.600	1	130.561.200	1	141.586.000	1	141.586.000	100	100,00	2	272.147.200	33,33	57,31	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)		K
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
5	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	Dok	544.718.710	0	0	4	7.450.000	4	7.450.000	100	100,00	4	7.450.000	20,00	1,37	
6	01	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	61.051.000	0	0	100	10.000.000	100	8.495.000	100	84,95	100,00	8.495.000	100,00	13,91	
7	01	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	Lap	61.051.000	0	0	3	10.000.000	3	8.495.000	100	84,95	3	8.495.000	20,00	13,91	
8	01	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	675.527.472	0	0	100	146.528.200	100	163.677.200	100	74,59	100,00	163.677.200	100,00	24,23	
9	01	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15	Paket	317.461.000	0	0	3	126.528.200	3	113.128.200	100	89,41	3	113.128.200	20,00	35,64	
10	01	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dok	313.035.872	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	100	100,00	1	10.000.000	20,00	3,19	
11	01	01	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60	Dok	45.030.600	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100,00	12	10.000.000	20,00	22,21	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55	Orang	445.159.472	0	0	11	72.916.000	11	30.549.000	100	41,90					
12	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	2.034.196.946	16	171.228.342	100	252.880.100	11	30.549.000	94	93,67	27,22	201.777.342	27,22	9,92	
13	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	75.826.500	1	3.150.000	1	6.000.000	1	6.000.000	100	100,00	2	9.150.000	33,33	12,07	
14	01	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	158.449.633	1	26.822.000	1	29.045.500	1	29.045.500	100	100,00	2	55.867.500	33,33	35,26	
15	01	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	125.095.415	1	8.586.500	1	11.657.600	1	11.657.600	100	100,00	2	20.244.100	33,33	16,18	
16	01	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	256.510.460	1	13.525.000	1	17.575.000	1	17.575.000	100	100,00	2	31.100.000	33,33	12,12	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
17	01	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	419.573.795	1	24.666.000	1	20.199.000	1	20.199.000	100	100,00	2	44.865.000	33,33	10,69	
18	01	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Dok	491.202.425	1	32.190.000	1	49.600.000	1	45.345.000	100	91,42	2	77.535.000	33,33	15,78	
19	01	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347	Lap	507.538.719	47	62.288.842	58	118.803.000	33	76.361.492	57	64,28	80	138.650.334	23,09	27,32	
20	01	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	1.218.211.702	6	112.276.200	100	151.811.000	79	110.287.500	79	72,65	84,82	222.563.700	19,46	18,27	
20	01	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56	Unit	510.946.600	7	112.276.200	7,00	91.925.000	4	50806500	57	55,27	11	163.082.700	19,64	31,92	
21	01	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	280	Unit	1.218.211.702	0	0	54	59.886.000	54	59481000	100	99,32	54	59.481.000	19,29	4,88	
22	01	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.873.250.225	17	300.661.233	100	318.565.000	100	303.943.864	100	95,41	116,67	604.605.097	33,33	32,28	
23	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Lap	939.497.675	1	41.845.233	1	54.000.000	1	46.578.864	100	86,26	2	88.424.097	33,33	9,41	
24	01	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Lap	933.752.550	12	258.816.000	12	264.565.000	12	257.365.000	100	97,28	24	516.181.000	33,33	55,28	
25	01	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.793.375.478	14	164.216.250	100	314.561.325	100	304.425.090	100	95,95	113,70	468.641.340	24,81	26,13	
26	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	945.961.188	5	76.796.250	5	213.550.000	5	209.828.140	100	98,26	10	286.624.390	33,33	30,30	
27	01	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206	Unit	155.730.050	16	12.690.000	0	0	0	0	0	0,00	16	12.690.000	7,77	8,15	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
28	01	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	691.684.240	1	74.730.000	1	101.011.325	1	94596950	100	93,65	2	169.326.950	33,33	24,48	
Rata-rata capaian kinerja (%)														96	88,08			59,42	21,86	
Predikat kinerja														ST	T			SR	SR	
31	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	Persen	11.447.970.908	36	1.962.306.647	100	1.589.655.000	100	1.349.784.302	100	84,91	136,03	3.312.090.949	136,03	28,93	
32	01	02	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	Persen	4.859.471.327	16	969.057.745	100	675.740.500	100	655.862.484	100	97,97	115,87	1.624.920.229	115,87	33,44	Bappeda
32	01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	7	Dok	2.625.000.000	1	334.613.000	0	0	0	0	0	0,00	1	334.613.000	14,29	12,75	
33	01	02	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12	Berita Acara	3.552.409.703	2	462.769.900	2	494.079.000	2	474329000	100	96,00	4	937.098.900	33,33	26,38	
34	01	02	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	12	Dok	1.307.061.624	2	171.674.845	2	181.661.500	2	181533484	100	99,93	4	353.208.329	33,33	27,02	
35	01	02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	3.589.802.981	76	545.038.990	100	498.238.000	100	387.786.468	100	80,21	175,55	932.825.458	175,55	25,99	
36	01	02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	61	Masukan	1.497.532.313	1	210.545.790	2	211.630.000	2	203.159.988	100	96,00	3	413.705.778	4,92	27,63	
36	01	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	12	Org	192.500.167	25	174.790.000	0	0	0	0	0	0,00	25	174.790.000	208,33	90,80	
37	01	02	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	6	Buku	1.899.770.501	1	159.703.200	1	286.608.000	1	184.626.480	100	64,42	2	344.329.680	33,33	18,12	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
38	01	02	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	2.998.696.600	17	448.209.912	100	415.676.500	100	73,56	116,67	754.345.262	116,67	25,16			
39	01	02	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	54	Lap	1.585.370.807	9	277.853.200	9	210.540.500	9	79,94	18	446.157.410	33,33	28,14			
40	01	02	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24	Lap	1.413.325.794	4	170.356.712	4	205.136.000	4	67,19	8	308.187.852	33,33	21,81			
Rata-rata capaian kinerja (%)														100	83,91			33,33	28,19	
Predikat kinerja														ST	T			SR	SR	
43	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100	Persen	19.964.673.610	20	2.594.969.461	100	2.474.855.000	94	98,91	113,23	5.042.802.525	113,23	25,26			
44	01	03	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	6.538.047.431	19	600.654.459	100	965.317.900	95	92,02	113,54	1.497.659.884	32,54	22,91	Bappeda		
45	01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39	Dok	703.075.065	19	30.000.000	4	110.248.000	4	75,46	23	113.198.000	58,97	16,10			
46	01	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	25	Perangkat Daerah	77.112.128	5	10.996.148	4	10.829.000	4	100,00	9	21.825.148	36,00	28,30			
47	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24	Lap	54.398.649	1	7.948.300	4	7.009.600	4	100,00	5	14.957.900	20,83	27,50			
48	01	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	18	Lap	2.619.463.805	4	10.000.000	3	427.259.800	3	97,21	7	425.328.700	38,89	16,24			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
49	01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29	Dok	1.096.115.741	2	280.922.800	2	128.208.000	2	127.003.064	100	99,06	4	407.925.864	13,79	37,22	
50	01	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	25	Perangkat Daerah	90.306.872	5	11.500.000	4	12.720.000	4	9.450.000	100	74,29	9	20.950.000	36,00	23,20	
51	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	24	Perangkat Daerah	100.323.873	4	10.248.900	4	14.328.000	4	14.306.000	100	99,85	8	24.554.900	33,33	24,48	
52	01	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	40	Lap	1.797.251.299	5	239.038.311	7	254.715.500	4	229.881.061	57	90,25	9	468.919.372	22,50	26,09	
53	01	03	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Persen	5.337.402.978	17	705.489.290	100	757.389.900	95	640.230.710	92	89,58	111,67	1.345.720.000	36,55	25,21	Bappeda
54	01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36	Dok	730.873.822	6	111.546.700	6	101.092.500	6	100.931.500	100	99,84	12	212.478.200	33,33	29,07	
55	01	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	Perangkat Daerah	366.267.664	5	26.353.450	5	55.898.800	3	55.798.800	60	99,82	8	82.152.250	26,67	22,43	
56	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	24	Perangkat Daerah	1.029.885.635	4	133.960.000	4	147.399.000	3	47.233.000	75	32,04	7	181.193.000	29,17	17,59	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
57	01	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6	Lap	1.334.782.520	1	174.319.100	1	188.200.000	1	181.890.000	100	96,65	2	356.209.100	33,33	26,69	
58	01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36	Dok	693.439.274	6	145.349.500	6	89.387.000	6	79.102.600	100	88,49	12	224.452.100	33,33	32,37	
59	01	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	30	Perangkat Daerah	262.839.856	5	30.264.700	5	38.463.900	5	38.438.900	100	99,94	10	68.703.600	33,33	26,14	
60	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	24	Perangkat Daerah	330.602.334	4	30.705.050	4	49.083.100	4	49.023.100	100	99,88	8	79.728.150	33,33	24,12	
61	01	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6	Lap	588.711.875	1	52.990.790	1	87.865.600	1	87.812.810	100	99,94	2	140.803.600	33,33	23,92	
62	01	03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persen	8.089.223.200	23	1.288.825.712	100	752.147.200	91	910.596.929	100	81,27	114,48	2.199.422.641	32,10	27,19	Bappeda
63	01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16	Dok	2.647.060.600	6	388.512.600	2	370.000.000	2	342.067.293	100	92,45	8	730.579.893	50,00	27,60	
64	01	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	35	Perangkat Daerah	265.086.138	5	111.785.600	6	23.846.600	6	23.834.600	100	99,95	11	135.620.200	31,43	51,16	
65	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam	9	Perangkat Daerah	625.694.007	4	8.184.100	1	100.958.200	1	100.148.912	100	99,20	5	108.333.012	55,56	17,31	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur																
66	01	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6	Lap	827.160.900	1	384.211.412	1	70.000.000	1	59.851.624	100	85,50	2	444.063.036	33,33	53,69	
66	01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17	Dok	2.173.116.569	11	388.422.000	3	0	3	213017500	100	0,00	14	601.439.500	82,35	27,68	
67	01	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	66	Perangkat Daerah	235.536.086	5	7.710.000	11	37.342.400	11	33.581.000	100	89,93	16	41.291.000	24,24	17,53	
68	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5	Perangkat Daerah	488.408.000	0	0	1	80.000.000	1	79.350.000	100	99,19	1	79.350.000	20,00	16,25	
69	01	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6	Lap	827.160.900	0	0	1	70.000.000	1	58.746.000	100	83,92	1	58.746.000	16,67	7,10	
Rata-rata capaian kinerja (%)													96	88,38			95,51	25,10		
Predikat kinerja													ST	T			SR	SR		
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					8.749.768.329											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)													97,19	93,76			39,99	25,05		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)													ST	ST			SR	SR		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode Rek,	Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4	5		6		7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5		Unsur Penunjan g Urusan Pemerint ahan																
5	0 2	Keuanga n																
5	0 2		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			218.348.845.7 12	10 0	36.395.293.410	10 0	38.084.548.09 2	0	36.857.817.038	-	96,78	10 0	73.253.110.448	33,55	
5	0 2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			861.068.000	10 0	92.305.000	10 0	167.573.000	0	160.054.322	-	95,51	10 0	252.359.322	29,31	
5	0 2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokum en	116.154.000	1	15.000.000	1	58.220.000	1	50.701.322	100,00	87,09	2	65.701.322	33,33	56,56
5	0 2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	6	Dokum en	109.866.000	1	15.000.000	1	15.539.000	1	15.539.000	100,00	100,00	2	30.539.000	33,33	27,80
5	0 2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	6	Dokum en	117.071.000	1	15.000.000	1	16.719.000	1	16.719.000	100,00	100,00	2	31.719.000	33,33	27,09
5	0 2		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	6	Dokum en	86.173.000	1	6.605.000	1	13.033.000	1	13.033.000	100,00	100,00	2	19.638.000	33,33	22,79

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode Rek,	Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4	5			6		7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
502		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	81.954.000	1	5.500.000	1	12.523.000	1	12.523.000	100,00	100,00	2	18.023.000	33,33	21,99	
502		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35	Dokumen	236.968.000	5	20.000.000	6	35.539.000	6	35.539.000	100,00	100,00	11	55.539.000	31,43	23,44	
502		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dokumen	112.882.000	2	15.200.000	2	16.000.000	2	16.000.000	100,00	100,00	4	31.200.000	33,33	27,64	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	98,16			33,06	29,62	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
502		Administrasi Keuangan Parangkat Daerah	% Administrasi Keuangan Parangkat Daerah			201.321.774.212	100	34.219.475.110	100	35.565.480.892	0	34.448.289.593	-	96,86	100	68.667.764.703		34,11	
502		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2366	Orang	196.678.002.212	266	33.534.987.110	420	34.857.076.892	420	33.740.385.593	100,00	96,80	686	67.275.372.703	28,99	34,21	BPKAD
502		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	228	Orang	780.930.000	38	99.600.000	38	111.600.000	38	111.100.000	100,00	99,55	76	210.700.000	33,33	26,98	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode Rek,		Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%				
1	2	3	4	5			6		7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16			
5	02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	222	Orang	3.668.163.000	37	557.488.000	37	569.404.000	37	569.404.000	100,00	100,00	74	1.126.892.000	33,33	30,72			
5	02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Dokum en	107.997.000	1	15.200.000	1	15.200.000	1	15.200.000	100,00	100,00	2	30.400.000	33,33	28,15			
5	02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6	Dokum en	86.682.000	1	12.200.000	1	12.200.000	1	12.200.000	100,00	100,00	2	24.400.000	33,33	28,15			
														100,00	99,27			32,47	29,64			
														Predikat kinerja		ST	ST			SR	SR	
5	02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			392.557.000	100	55.250.000	100	55.250.000	0	55.250.000	-	100,00	100	110.500.000	28,15				
5	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	420	Stel	392.557.000	70	55.250.000	70	55.250.000	70	55.250.000	100,00	100,00	140	110.500.000	33,33	28,15	BPKAD		
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100	100,00			33,33	28,15	
														Predikat kinerja		ST	ST			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode Rek,	Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun 1 (2021 s/d tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%		
1	2	3	4	5		6		7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
502		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.954.071.500	100	1.257.513.300	100	1.333.484.200	0	1.259.405.043	-	94,44	100	2.516.918.343		28,11	
502		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2760	Unit	403.571.000	460	74.592.000	460	53.886.000	460	53.886.000	100,00	100,00	920	128.478.000	33,33	31,84	BPKAD
502		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	300	Item	2.436.937.000	50	338.865.000	50	401.301.000	50	401.051.000	100,00	99,94	100	739.916.000	33,33	30,36	
502		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	300	Item	791.130.500	50	108.895.000	50	111.748.500	50	111.748.500	100,00	100,00	100	220.643.500	33,33	27,89	
502		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1800	Kotak	1.148.591.200	300	161.657.100	300	140.427.100	300	129.064.100	100,00	91,91	600	290.721.200	33,33	25,31	
502		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3000	Eksemplar	1.137.762.800	500	163.106.200	500	159.646.600	500	159.526.600	100,00	99,92	1000	322.632.800	33,33	28,36	
502		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2832	Eksemplar	648.782.000	472	79.970.000	472	94.120.000	472	94.120.000	100,00	100,00	944	174.090.000	33,33	26,83	
502		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1800	Kotak	427.573.000	300	35.320.000	300	51.380.000	300	48.690.000	100,00	94,76	600	84.010.000	33,33	19,65	
502		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	600	Kali	1.959.724.000	100	295.108.000	100	320.975.000	100	261.318.843	100,00	81,41	200	556.426.843	33,33	28,39	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode Rek,	Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penang gung Jawab		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%			
1	2	3	4	5		6		7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12 /7*100		14 = 6 + 12		15 = 14 /5*100		16		
			dan Konsultasi SKPD																	
Rata-rata capaian kinerja (%)												88,89	85,33			29,63	24,29			
Predikat kinerja												T	T			SR	SR			
5	02		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah			4.101.512.000	100	494.560.000	100	561.960.000	0	561.960.000	-	100,00	100	1.056.520.000	25,76		
5	02		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43 20	Lembar	28.137.000	720	3.960.000	720	3.960.000	720	3.960.000	100,00	100,00	14 40	7.920.000	33,33	28,15	BPKAD
5	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 0	Mbps	258.992.000	100	9.600.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100,00	100,00	20 0	21.600.000	33,33	8,34	
5	02		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 7	Orang	3.814.383.000	37	481.000.000	42	546.000.000	42	546.000.000	100,00	100,00	79	1.027.000.000	31,98	26,92	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00			32,88	21,14			
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR			
5	02		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah			2.717.863.000	100	276.190.000	100	400.800.000	0	372.858.080	-	93,03	100	649.048.080	23,88		
5	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54	Unit	1.897.445.000	9	136.490.000	9	289.300.000	9	261.378.080	100,00	90,35	18	397.868.080	33,33	20,97	BPKAD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode Rek,		Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1		2	3	4	5			6		7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5	02		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	Unit	678.316.000	12	119.700.000	12	91.500.000	12	91.480.000	100,00	99,98	24	211.180.000	33,33	31,13	
5	02		Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	Unit	142.102.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	100,00	2	40.000.000	33,33	28,15	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	96,78			33,33	26,75	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
5	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			1.720.232.746.609	100	234.529.922.100	100	239.310.542.356	0	232.560.219.967	-	97,18	100	467.090.142.067		27,15	
5	02		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	% Meningkatnya Penyusunan APBD tepat waktu sesuai dengan Sistem dan Prosedur Mekanisme dan Tahapan Penyusunan APBD			22.793.660.800	100	3.184.589.200	100	3.618.439.400	0	3.177.006.691	-	87,80	100	6.361.595.891		27,91	
5	02		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	18	Dokumen	1.906.185.400	3	268.284.000	3	258.284.000	3	258.254.000	100,00	99,99	6	526.538.000	33,33	27,62	BPKAD
5	02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	18	Dokumen	1.468.482.000	3	206.680.000	3	216.680.000	3	192.795.000	100,00	88,98	6	399.475.000	33,33	27,20	
5	02		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	261	Dokumen	811.849.200	46	116.290.600	43	113.930.600	43	76.446.000	100,00	67,10	89	192.736.600	34,10	23,74	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode Rek,	Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4	5			6		7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5	0 2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	26 1	Dokum en	777.425.400	46	101.143.000	43	106.573.400	43	62.714.400	100,00	58,85	89	163.857.400	34,10	21,08	
5	0 2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	26 1	Dokum en	851.862.400	46	108.724.200	43	121.724.200	43	121.665.000	100,00	99,95	89	230.389.200	34,10	27,05	
5	0 2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	26 1	Dokum en	809.240.000	46	101.195.000	43	111.776.000	43	106.328.000	100,00	95,13	89	207.523.000	34,10	25,64	
5	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	18	Dokum en	9.176.803.000	3	1.246.616.500	3	1.713.866.700	3	1.628.129.498	100,00	95,00	6	2.874.745.998	33,33	31,33	
5	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	18	Dokum en	1.831.377.600	3	309.355.000	3	249.303.600	3	197.046.600	100,00	79,04	6	506.401.600	33,33	27,65	
5	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	18	Dokum en	2.153.074.000	3	303.032.000	3	303.032.000	3	184.702.493	100,00	60,95	6	487.734.493	33,33	22,65	
5	0 2	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	13	OPD	686.701.000	13	96.649.000	13	96.649.000	13	75.258.000	100,00	77,87	26	171.907.000	25,00	25,03	
5	0 2	Koordinasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil	43	OPD	922.067.000	43	129.775.500	43	129.775.500	43	86.726.300	100,00	66,83	86	216.501.800	25,00	23,48	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode Rek,	Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4	5			6		7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																
5	02	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	18	Lemba ga	722.013.800	3	101.619.400	1	101.619.400	1	92.017.000	100,00	90,55	4	193.636.400	22,22	26,82	
5	02	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	18	Kegiata n Sosialis asi	676.580.000	3	95.225.000	3	95.225.000	3	94.924.400	100,00	99,68	6	190.149.400	33,33	28,10	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	83,07			31,43	25,95	
Predikat kinerja													ST	T			SR	SR	
5	02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	% Meningkatnya jumlah Laporan OPD dalam Pengelolaan Keuangan yang tepat waktu			8.860.960.000	100	1.413.169.500	100	1.408.929.500	0	1.408.189.650	-	99,95	100	2.821.359.150		31,84	
5	02	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	181	Dokum en	4.481.675.000	1	752.130.000	36	769.890.000	36	769.890.000	100,00	100,00	37	1.522.020.000	20,44	33,96	BPKAD
5	02	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	43	OPD	343.045.000	43	50.000.000	43	78.000.000	43	78.000.000	100,00	100,00	86	128.000.000	25,00	37,31	
5	02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	43	OPD	1.308.861.000	43	184.214.500	43	188.214.500	43	187.846.250	100,00	99,80	86	372.060.750	25,00	28,43	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode Rek,		Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1		2	3	4	5			6		7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5	02		Koordinasi, Fasilitas, asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	43	OPD	760.510.000	43	150.000.000	43	100.000.000	43	99.628.400	100,00	99,63	86	249.628.400	25,00	32,82	
5	02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	43	OPD	1.573.531.000	43	221.465.000	43	217.465.000	43	217.465.000	100,00	100,00	86	438.930.000	25,00	27,89	

Kode Rek,	Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	%	K		Rp.
1	2	3	4	5			6			7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12 /7*100		14 = 6 + 12		15 = 14 /5*100		16
5	02	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang daerah sebagai Optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	181	Dokumen	393.338.000	1	55.360.000	36	55.360.000	36	55.360.000	100,00	100,00	37	110.720.000	20,44	28,15		
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	99,91			23,48	31,43		
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR		
5	02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	% Meningkatnya jumlah OPD dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah			7.559.926.953	100	1.064.014.000	100	1.124.654.000	0	1.124.593.200	-	99,99	100	2.188.607.200	28,95			
5	02	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	43	OPD	485.627.000	43	68.349.000	43	63.969.000	43	63.969.000	100,00	100,00	86	132.318.000	25,00	27,25	BPKAD	
5	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	43	OPD	701.973.000	43	84.363.000	43	132.139.000	43	132.139.000	100,00	100,00	86	216.502.000	25,00	30,84		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode Rek,	Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4	5			6		7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5	0 2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidas i	6	Dokum en	1.053.907.000	1	148.331.000	1	226.931.000	1	226.930.200	100,00	100,00	2	375.261.200	33,33	35,61	
5	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K ota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K ota	6	Perda Perkad a	1.894.948.000	1	281.138.000	1	231.788.000	1	231.728.000	100,00	99,97	2	512.866.000	33,33	27,06	
5	0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Kerugian Daerah	27	OPD	3.423.471.953	27	481.833.000	27	469.827.000	27	469.827.000	100,00	100,00	54	951.660.000	25,00	27,80	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	99,99			28,33	29,71	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
5	0 2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Pengelolaan DBH, Transfer Ke Desa, BTT			1.681.018.198. 856	10 0	228.868.149.40 0	10 0	233.158.519.4 56	0	226.850.430.42 6	-	97,29	10 0	455.718.579.82 6	27,11		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode Rek,	Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4	5			6		7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5	02	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	10	Laporan	12.210.200.000	0	-	2	2.000.000.000	2	439.216.762	100,00	21,96	2	439.216.762	20,00	3,60	BPKAD
5	02	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	18	Alokasi Dana	1.586.997.985.856	3	221.455.344.400	3	223.672.444.456	3	223.174.853.664	100,00	99,78	6	444.630.198.064	33,33	28,02	
5	02	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6	Tahun	34.269.905.000	1	3.744.405.000	1	300.000.000	1	291.360.000	100,00	97,12	2	4.035.765.000	33,33	11,78	
5	02	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	864	Desa	47.540.108.000	144	3.668.400.000	144	7.186.075.000	144	2.945.000.000	100,00	40,98	288	6.613.400.000	33,33	13,91	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	64,96			30,00	14,33	
Predikat kinerja													ST	SR			SR	SR	
5	02	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah			9.530.597.600	100	906.842.900	100	1.362.549.700	0	1.210.161.911	-	88,82	100	2.117.004.811		22,21	
5	02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	% Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi Data,RKBM ,Stok Opname dan sensus Aset Daerah			9.530.597.600	100	906.842.900	100	1.362.549.700	0	1.210.161.911	-	88,82	100	2.117.004.811		22,21	
5	02	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana	43	OPD	837.523.800	43	62.909.000	43	126.879.800	43	111.879.000	100,00	88,18	86	174.788.000	25,00	20,87	BPKAD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode Rek,	Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penang gung Jawab
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4	5			6		7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kebutuhan Barang Milik Daerah																
5	0 2	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	15	Dokum en	261.350.000	10	25.965.500	1	39.197.500	1	39.097.500	100,00	99,74	11	65.063.000	73,33	24,89	
5	0 2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah	12	Aplikas i	1.607.668.400	2	203.274.000	2	230.036.400	2	223.844.611	100,00	97,31	4	427.118.611	33,33	26,57	
5	0 2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	43	OPD	401.211.000	43	52.000.000	43	49.400.000	43	49.399.880	100,00	100,00	86	101.399.880	25,00	25,27	
5	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	85 2	Bidang	2.969.120.600	14 2	180.819.900	14 2	391.329.700	14 2	272.515.620	100,00	69,64	28 4	453.335.520	25,00	15,27	
5	0 2	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6	Dokum en	337.649.500	1	20.965.500	1	62.801.400	1	62.801.400	100,00	100,00	2	83.766.900	33,33	24,81	
5	0 2	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	43	OPD	926.812.500	43	60.350.000	43	153.540.100	43	143.210.100	100,00	93,27	86	203.560.100	25,00	21,96	
5	0 2	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	43	OPD	1.510.991.000	43	212.650.000	43	212.665.000	43	211.025.000	100,00	99,23	86	423.675.000	25,00	28,04	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Kode Rek,		Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Ke giatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penang gung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1	2	3	4	5			6		7a		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
5	0 2		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	43	OPD	678.270.800	43	87.909.000	43	96.699.800	43	96.388.800	100,00	99,68	86	184.297.800	25,00	27,17	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	94,12			32,22	23,87	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN MURNI																				
JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN												278.757.640.1 48	270.628.198.91 6		97,08					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)														98,99	92,87			30,93	25,90	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)														ST	ST			SR	SR	

N o	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD SKPD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD SKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN								11.864.659.11 3									
5 .	0 2.	0 1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatn ya Penunjang Urusan Pemerintah an daerah Kabupaten/ kota	100	Persen	64.109.317.3 86	31 7	7.860.524.663	55 4	8.615.081.613	23 6	3.863.288.9 99	42,60	44,84	55 3	117238136 62	553	18,29	Bapend a
5 .	0 2.	0 1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaa n perencanaa n dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	488.408.680 ,00	0	-	14 0	85.000.000	11 5	84.999.800, 00	82,14	100,0 0	11 5	84.999.800	115	17,40	
5 .	0 2.	0 1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	Dokume n	124.696.750	0	-	5	25.425.000	5	25.425.000	100,00	100,00	5	25.425.000, 00	19,23	20,39	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD SKPD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD SKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5.	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	282	Dokume n	72.827.850	0	-	47	11.929.000	47	11.929.000	100,00	100,00	47	11.929.000, 00	16,67	16,38	
5.	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	282	Dokume n	30.910.230	0	-	47	5.063.000	47	5.063.000	100,00	100,00	47	5.063.000,0 0	16,67	16,38	
5.	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumalh Dokumen DPA- SKPD	5	Dokume n	30.098.200	0	-	1	4.930.000	1	4.930.000	100,00	100,00	1	4.930.000,0 0	20,00	16,38	
5.	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokume n	25.116.600	0	-	1	4.114.000	1	4.114.000	100,00	100,00	1	4.114.000,0 0	20,00	16,38	
5.	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95	laporan	97.919.800	0	-	19	16.039.000	19	16.039.000	100,00	100,00	19	16.039.000, 00	20,00	16,38	
5.	0	0	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	laporan	106.839.250	0	-	20	17.500.000	20	17.499.800	100,00	100,00	20	17.499.800, 00	20,00	16,38	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			18,94	16,95	
Predikat kinerja														SR	R			SR	SR	
5.	0	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administras i keuangan Badan Pendapatan Daerah	100	persen	42.587.630.7 06	14	5.154.373.257	64	5.513.693.000	40	3.804.014.4 72	62,50	68,99	54	8.958.387. 729	54	21,04	
5.	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	bulan	42.181.387.5 50	14	5.154.373.257	12	5.438.605.000	12	4.907.816.7 55	100,00	90,24	26	10.062.190. 012	36,11	23,85	
5.	0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	laporan	138.085.300	0	-	12	22.618.000	12	22.618.000	100,00	100,00	12	22.618.000	20,00	16,38	
5.	0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausha an dan Pengujian/ Verifikasi	60	laporan	82.608.400	0	-	12	13.531.000	12	13.531.000	100,00	100,00	12	13.531.000	20,00	16,38	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD SKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggun- Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
				Keuangan SKPD															
5.	02.	01.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30	laporan	85.419.506	0	-	6	22.538.000	6	22.538.000	100,00	100,00	6	22.538.000	20,00	26,39
5.	02.	01.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan															
5.	02.	01.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	110	laporan	100.129.950	0	-	22	16.401.000	20	16.401.000	90,91	100,00	20	16.401.000	18,18	16,38
Rata-rata capaian kinerja (%)													98,18	98,05			22,86	19,88	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
5.	02.	01.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	persen	177.627.500,00	2	25.000.000	2	22.300.000	1	20.919.000,00	50,00	93,81	3	45.919.000	3	25,85
5.	02.	01.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	177.627.500	2	25.000.000	2	22.300.000	2	22.300.000	100,00	100,00	4	47.300.000	33,33	26,63
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,00	93,81			36,33	52,48	
Predikat kinerja													SR	R			SR	SR	
5.	02.	01.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	903.446.150,00	161	117377000	121	128.745.000	119	127.360.700	98,35	98,92	280	244.737.700	280	27,09
5.	02.	01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	678	Stell	772.997.350	156	81.900.000	116	113.200.000	116	113.200.000	100,00	100,00	272	195.100.000	40,12	25,24
5.	02.	01.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi	30	Laporan	130.448.800	5	35.477.000	5	15.545.000	5	15.545.000	100,00	100,00	10	51.022.000	33,33	39,11

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD SKPD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD SKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
				Kepegawaian																
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			36,73	32,18	
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR	
5.	02.	01.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	5.864.771.500	101	896.934.300	101	850.365.500	75	623.034.570	74,26	73,27	176	1.519.968.870	176	25,92	
5.	02.	01.	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	72	bulan	190.932.300	12	40.705.000	12	37.205.000	12	37.205.000	100,00	100,00	24	77.910.000	33,33	40,81	
5.	02.	01.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Sekretariat Dinas Kesehatan	72	bulan	1.029.336.150	12	212.800.400	12	133.193.900	12	133.193.900	100,00	100,00	24	345.994.300	33,33	33,61	
5.	02.	01.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	72	bulan	164.455.600	12	31.927.900	12	34.396.200	12	34.396.200	100,00	100,00	24	66.324.100	33,33	40,33	
5.	02.	01.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	72	bulan	333.235.750	12	44.440.000	12	47.304.000	12	47.304.000	100,00	100,00	24	91.744.000	33,33	27,53	
5.	02.	01.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	231.452.450	12	50.206.000	12	43.938.400	12	43.938.400	100,00	100,00	24	94.144.400	33,33	40,68	
5.	02.	01.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian dan Buku Perundang-Undangan	72	bulan	375.433.550	12	42.540.000	12	52.840.000	12	52.440.000	100,00	99,24	24	94.980.000	33,33	25,30	
5.	02.	01.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Rapat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	66	bulan	141.005.250	12	19.328.000	12	31.430.000	12	31.430.000	100,00	100,00	24	50.758.000	36,36	36,00	
5.	02.	01.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Kepala Dinas,Sekretaris dan Sub Bagian	72	bulan	1.094.587.950	12	190.312.000	12	135.973.000	12	135.973.000	100,00	100,00	24	326.285.000	33,33	29,81	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD SKPD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD SKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
				Sekretariat Dinas Kesehatan																
5.	02.	01.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD	6	Laporan	110.963.600	1		1	14.210.000	1	14.210.000	100,00	100,00	2	38.420.000	33,33	34,62	
									24.210.000											
5.	02.	01.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem/ Aplikasi	24	Sistem/Aplikasi	2.193.368.900	4	240.465.000	4	319.875.000	4	319.875.000	100,00	100,00	8	560.340.000	33,33	25,55	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	99,92			6,97	6,58	
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR	
5.	02.	01.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang Milik Daerah	100	persen	544.780.500,00	2	208.415.000	1	55.000.000	1	54.278.070,00	100,00	98,69	3	262.693.070	3	48,22	
5.	02.	01.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	7	unit	544.780.500	2	208.415.000	1	55.000.000	1	54.278.070	100,00	98,69	3	262.693.070	42,86	48,22	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	98,69			42,86	48,22	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
5.	02.	01.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	persen	8.263.493.400	24	950.953.296	24	1.179.774.113	18	852.803.528	75,00	72,29	42	1.803.756.824	42	21,83	
5.	02.	01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya jasa listrik pada Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi	72	bulan	216.000,00	12	31.671,30	12	157.250.000	12	157.250.000	100,00	100,00	24	157.281.671	33,33	100,02	
5.	02.	01.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pelayanan Umum Kantor	72	bulan	8.263.277.400	12	950.921.625	12	1.022.524.113	12	972.096.500	100,00	95,07	24	1.923.018.125	33,33	23,27	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	97,53			16,67	50	
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD SKPD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD SKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	02.	01.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100	persen	5.279.158.950	13	507.471.810	101	780.204.000	64	647.806.460,00	63,37	83,03	77	1.155.278.270	77	21,88	
5.	02.	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	72	unit	4.022.634.650	12	444.567.810	12	595.454.000	12	593.530.460	100,00	99,68	24	1.038.098.270	33,33	25,81	
5.	02.	01.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	66	unit	66.000.000	0	-	20	20.000.000	20	19.800.000	100,00	99,00	20	19.800.000	30,30	30,00	
5.	02.	01.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin	526	unit	549.000.000	0	-	67	71.750.000	67	71.750.000	100,00	100,00	67	71.750.000	12,74	13,07	
5.	02.	01.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan	11	unit	641.524.300	1	62.904.000	2	93.000.000	2	92.880.000	100,00	99,87	3	155.784.000	27,27	24,28	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	99,64			25,91	23,29	
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR	
5.	02.	03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Barang	100	Persen	148.058.700,00	5	32.245.000	5	18.969.500	2	15.199.600,00	40,00	80,13	7	47.444.600	7	32,04	
5.	02.	03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	persen	148.058.700	5	32.245.000	5	18.969.500	2	15.199.600,00	40,00	80,13	7	47.444.600	7	32,04	
5.	02.	03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	Laporan	48.578.050	1	15.000.000	1	5.500.000	1	5.500.000	100,00	100,00	2	20.500.000	33,33	42,20	
5.	02.	03.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24	Laporan	99.480.650	4	17.245.000	4	13.469.500	4	13.469.500	100,00	100,00	8	30.714.500	33,33	30,87	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			33,33	36,54	
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR	
5.	02.	04.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli	7	Persen	1.223.410,00	1845	S	1875	3.230.608.000	1383	2.731.812.600	73,76	84,56	3228		47.401	0	Bapenda

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD SKPD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD SKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5.	02.	04.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100	Persen	21.090.935.610	1845	S	1875	3.230.608.000	1383	2.731.812.600	73,76	84,56	3228		3.228	0	
5.	02.	04.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	42	Dokumen	536460550	7	45.000.000	7	80.500.000	7	80.500.000	100,00	100,00	14	125.500.000	33,33	23,39	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajaak Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan an Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	48	Dokumen	4182841850	8	134.550.000	8	657.100.000	8	656.600.000	100,00	99,92	16	791.150.000	33,33	18,91	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24	Kegiatan	536.460.550	4	165.000.000	4	165.000.000	4	165.000.000	100,00	100,00	8	330.000.000	33,33	61,51	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2256	Objek Pajak	1.236.657.000	376	173.602.000	376	174.052.000	376	174.052.000	100,00	100,00	752	347.654.000	33,33	28,11	
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pengolahan, Pemeliharaaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6	Dokumen	1.338.143.200	1	213.239.000	1	184.254.000	1	181.454.000	100,00	98,48	2	394.693.000	33,33	29,50	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD SKPD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD SKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penang gung Jawab
					K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP-2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300	Objek Pajak	4.633.112.160	50	802.209.300	50	749.960.300	50	749.417.500	100,00	99,93	100	1.551.626.800	33,33	33,49	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah	2256	Objek Pajak	1.073.580.650	376	150.540.000	376	151.100.000	376	150.270.000	100,00	99,45	752	300.810.000	33,33	28,02	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	180	Dokumen	908.654.600		186.687.000	30	118.254.000	30	118.254.000	100,00	100,00	30	304.941.000	16,67	33,56	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	114	Laporan	1.080.657.500	19	152.081.000	19	152.096.000	19	152.096.000	100,00	100,00	38	304.177.000	33,33	28,15	
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah	2400	Objek Pajak	1.385.494.500	400	195.000.000	400	195.000.000	400	195.000.000	100,00	100,00	800	390.000.000	33,33	28,15	
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Pajak Daerah	500		1.796.558.450	100	256.291.700	100	252.291.700	100	252.291.700	100,00	100,00	200	508.583.400	40,00	28,31	
5.	02.	04.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3000	Objek Pajak	1.238.446.600	500	224.673.000	500	196.400.000	500	195.590.000	100,00	99,59	1000	420.263.000	33,33	33,93	Bapenda
5.	02.	04.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	JumlahLaporan Pembinaan dan Pengawasan	24	Laporan	1.143.868.000	4	167.052.000	4	154.600.000	4	154.600.000	100,00	100,00	8	321.652.000	33,33	28,12	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD SKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
				Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi															
Rata-rata capaian kinerja (%)													73,76	84,56			2,38	2,01	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										11.864.659.113		3118731152							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													92,19	97,22			24,30	28,81	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													SR	SR			SR	SR	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
4	01	01	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			137.800.000		-		27.560.000		27.560.000							
4	01	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah konsultasi hukum anggota korpri dan tersedianya koordinasi kekecamatan	60	bln	137.800.000		12	27.560.000	12	27.560.000	100,00	100,00	12	27.560.000	20,00	20,00	BKPSDM
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	100,00			20,00	20,00	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
5	03	01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			120.000.000		-		17.214.500		17.214.500							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5	03	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20	lap	120.000.000			4	17.214.500	4	17.214.500	100,00	100,00	4	17.214.500	20,00	14,35	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			10,00	7,17	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
5	03	01	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				15.242.461.405		2.832.221.719		3.035.500.281		3.015.271.875							
5	03	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN	60	bln	14.315.461.405	12	2.663.288.719	12	2.863.092.281	12	2.844.903.875	100,00	99,36	24	5.508.192.594	40,00	38,48	
5	03	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	60	bln	840.000.000	12	168.933.000	12	167.408.000	12	165.368.000	100,00	98,78	24	334.301.000	40,00	39,80	
5	03	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	10	do k	87.000.000			2	5.000.000	2	5.000.000	100,00	100,00	2	5.000.000	20,00	5,75	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	99,38			50,00	42,01	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
5	03	01	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				165.300.000		29.800.000		54.150.000		42.650.000							
5	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN	128	ste l	44.300.000			64	22.150.000	64	22.150.000	100,00	100,00	64	22.150.000	50,00	50,00	
5	03	01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah PNS yang Pensiun	1500	Org	121.000.000	182	29.800.000	200	32.000.000	200	20.500.000	100,00	64,06	382	50.300.000	25,47	41,57	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	82,03			37,73	45,79	
Predikat kinerja														ST	T			SR	SR	
5	03	01	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				1.345.723.000		201.424.600		209.075.500		209.075.050							
5	03	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75	jns	48.000.000	15	10.000.000	15	8.000.000	15	8.000.000	100,00	100,00	30	18.000.000	40,00	37,50	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5	031		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	388	jns	82.695.000	40	25.553.000	40	13.782.500	40	13.782.500	100,00	100,00	80	39.335.500	20,62	47,57	
5	031		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	108	jns	30.000.000	18	14.999.600	18	5.000.000	18	4.999.550	100,00	99,99	36	19.999.150	33,33	66,66	
5	031		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	60	Bl n	195.270.000	12	18.960.000	12	28.000.000	12	28.000.000	100,00	100,00	24	46.960.000	40,00	24,05	
5	031		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	84	jns	124.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000	100,00	100,00	28	20.000.000	33,33	16,13	
5	031		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	Bl n	144.000.000	12	12.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	100,00	100,00	24	36.000.000	40,00	25,00	
5	031		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	187	kal i	721.758.000	20	109.912.000	20	120.293.000	20	120.293.000	100,00	100,00	40	230.205.000	21,39	31,90	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			32,67	35,54	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
5	031		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.834.400.000		470.157.582		498.400.000		497.039.620							
5	031		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bl n	338.400.000	12	55.157.582	12	56.400.000	12	55.039.620	100,00	97,59	24	110.197.202	40,00	32,56	
5	031		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Petugas Tenaga Kontrak	60	Bl n	3.496.000.000	12	415.000.000	12	442.000.000	12	442.000.000	100,00	100,00	24	857.000.000	40,00	24,51	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	98,79			40,00	28,54	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
5	031		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.293.487.800		101.880.000		210.901.300		207.490.000							
5	031		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan	Jumlah Kendaraan	24	Un it	1.104.787.800	4	89.880.000	4	184.131.300	4	182.100.000	100,00	98,90	8	271.980.000	33,33	24,62	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Terpelihara																
5	03	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	89	Unit	68.700.000	9	7.000.000	9	6.770.000	8	5.390.000	88,89	79,62	17	12.390.000	19,10	18,03	
5	03	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	6	pkt	120.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	100,00	2	25.000.000	33,33	20,83	
Rata-rata capaian kinerja (%)														96,30	92,84			28,59	21,16	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																	
5	03	02	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN				5.390.111.200		766.805.412		718.020.200		332.620.100							
5	03	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penyusunan Dokumen Kebutuhan Pegawai	6	Kgt	220.000.000	1	11.560.000	1	25.000.000	1	24.826.000	100,00	99,30	2	36.386.000	33,33	16,54	
5	03	02	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Validasi Data Tenaga Kontrak Jumlah Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS	6	Kgt	3.558.121.200	1	623.190.500	1	593.020.200	1	207.794.100	100,00	35,04	2	830.984.600	33,33	23,35	
5	03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data/Informasi Kepegawaian yang Ter Update	60	Bl n	1.245.890.000	12	114.607.912	12	70.000.000	12	70.000.000	100,00	100,00	24	184.607.912	40,00	14,82	
5	03	02	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	6	do k	320.500.000	1	17.447.000	1	30.000.000	1	30.000.000	100,00	100,00	2	47.447.000	33,33	14,80	
				Jumlah Kartu-kartu yang diterbitkan	769	krt	45.600.000	137		150		138	-	92,00		275	-	35,76	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)														98,40	83,59			35,15	13,90	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
5	03	02	MUTASI DAN PROMOSI ASN				4.109.980.400		660.993.791		658.823.000		635.792.522							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5	0	0	Pengelolaan Mutasi ASN	Tersedianya Dokumen SK Alih Tugas yang diterbitkan	520	Or g	298.566.400	30	16.164.200	35	30.000.000	35	29.781.000	100,00	99,27	65	45.945.200	12,50	15,39	
5	0	0	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala	12000	SK	643.576.000	1953	60.992.854	2000	100.850.000	1980	100.560.500	99,00	99,71	3933	161.553.354	32,78	25,10	
				SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	4500	SK		731		750		645	-	86,00		1376	-	30,58	#DIV/0!	
5	0	0	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Evaluasi Jabatan	36	kgt	3.167.838.000	6	583.836.737	6	527.973.000	6	505.451.022	100,00	95,73	12	1.089.287.759	33,33	34,39	
Rata-rata capaian kinerja (%)														96,25	98,24			11,11	11,46	
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR	
5	0	0	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN				1.564.690.000		62.955.500		306.732.000		293.394.535							
5	0	0	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang profesional dan terampil dalam mengelola aset atau barang daerah	45	Or g	347.800.000		23.528.000	30	35.000.000	27	34.867.000	90,00	99,62	27	58.395.000	60,00	16,79	
5	0	0	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah SK Ijin Belajar yang diterbitkan	720	SK	210.000.000	93	24.797.500	150	35.000.000	140	33.764.000	93,33	96,47	233	58.561.500	32,36	27,89	
5	0	0	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Peserta ASN Mengikuti Diklat	45	Or g	756.890.000	31	7.315.000	4	65.000.000	4	53.032.200	100,00	81,59	35	60.347.200	77,78	7,97	
5	0	0	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan	3000	SK	250.000.000	587	7.315.000	500	171.732.000	449	171.731.335	89,80	100,00	1036	179.046.335	34,53	71,62	
Rata-rata capaian kinerja (%)														93,28	94,42			51,17	31,07	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
5	0	0	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR				1.639.341.000		441.907.000		618.560.000		607.822.010							
5	0	0	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Pembinaan SKP dan Verifikasi Berkas	27600	Or g	541.437.000	4373	380.000.000	4600	435.576.000	4206	435.376.000	91,43	99,95	8579	815.376.000	31,08	150,59	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
					K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
1	2		3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
				Pembayaran TPP																
5	03	02	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Menerima SLKS	1044	Org	185.178.000	53	10.000.000	174	30.863.000	166	26.193.000	95,40	84,87	219	36.193.000	20,98	19,54	
5	03	02	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Peserta Sumpah Janji	1362	Org	182.112.000		11.107.000	227	30.352.000	227	29.012.100	100,00	95,59	227	40.119.100	16,67	22,03	
				Jumlah Peserta Wajib Laporkan LHKPN	594	Org		82		99		95	-	95,96		177	-	29,80		
5	03	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang diberikan Sanksi Pelanggaran	48	Org	730.614.000	7	40.800.000	8	121.769.000	7	117.240.910	87,50	96,28	14	158.040.910	29,17	21,63	
Rata-rata capaian kinerja (%)														94,06	94,17			25,54	42,76	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
5	04	02	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL				12.012.678.000		2.138.075.000		1.861.563.000		1.712.442.521							
5	04	02	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat Pim II, III, IV	900	Org	12.012.678.000	230	2.138.075.000	150	1.861.563.000	18	1.712.442.521	82,67	91,99	248	3.850.517.521	27,56	32,05	
				Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Prajabatan								80								
				Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional								26								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
Rata-rata capaian kinerja (%)												82,67	91,99			27,56	32,05	
Predikat kinerja												T	S			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									8.216.499.781			7.598.372.733						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM/KEGIATAN (KEGIATAN 1 s.d. KEGIATAN 12)												97,03	93,32			30,79	27,62	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM/KEGIATAN (KEGIATAN 1 s.d. KEGIATAN 12)												ST	ST			SR	SR	

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-JMD KPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terfasilitasinya Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	17.064.406.000	143	2.400.315.668	129	2.504.715.428	89	2.346.494.099	377	385	258	4.746.809.767	167	139	Balitbangda
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	60.000.000	0	-		-									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	8.000.000	0	-											
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	8.000.000	0	-											
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	8.000.000	0	-											
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5	Dokumen	8.000.000	0	-											

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran PJMD KPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	8.000.000	0	-											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Laporan	20.000.000	0	-											
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	14.331.160.000	24	2.098.549.668	26	2.099.360.000		1.964.509.171	100	95	50	4.063.058.839	35	26	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Bulan	13.175.380.000	12	1.989.915.668	14	1.943.580.000	14	1.814.729.171	100	93	26	3.804.644.839	36	29	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	Dokumen	1.155.780.000	12	108.634.000	12	155.780.000	12	149.780.000	100	96	24	258.414.000	33	22	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	8.000.000													
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	Laporan	24.000.000													
		Penyusunan Pelaporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	5	Dokumen	8.000.000													

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran PJMD KPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksana Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	24.600.000			-										
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	8.200.000													
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	16.400.000													
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	61.200.000	0												
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92	Paket	61.200.000	0												
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum SKPD	100	%	554.956.000	108	60.016.000	67	144.865.428	54	144.856.928	82	100	162	204.872.928	49	42	
		Penyediaan Peralatan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	58.603.400	1	2.607.000	4	2.620.000	4	2.620.000	100	100	5	5.227.000	31	9	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	64.684.000	12	15.145.000	12	14.684.000	9	14.675.500	75	100	21	29.820.500	35	46	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	18.247.600	12	968.500	4	2.247.600	3	2.247.600	75	100	15	3.216.100	75	18	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55	Paket	93.680.000	11	11.375.000	11	15.679.000	8	15.679.000	73	100	19	27.054.000	35	29	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

N o	Urusan	Program/ Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara PJMD KPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penang gung Jawab				
				K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	K	Rp		K	Rp		K	Rp		12 = 8+9+10+11		K	Rp		K	Rp		16		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	95.679.000	12	4.080.500		12	10.903.400		9	10.903.400		75	100	21	14.983.900		35	16	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Doku men	21.476.000	12	13.680.000		12	13.680.000		12	13.680.000		100	100	24	27.360.000		40	127	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Lapor an	20.000.000		6.080.000															
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lapor an	182.586.000	48	6.080.000		12	85.051.428		9	85.051.428		75	100	57	91.131.428		95	50	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	140.000.000					-												
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Unit	40.000.000																	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	60.000.000																	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SJumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	30.000.000																	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10.000.000																	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100	%	640.000.000		119.800.000		25	128.000.000		25	126.060.000		100	98	25	245.860.000		40	38	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lapor an	120.000.000	12	22.800.000		12	24.000.000		12	23.060.000		100	96	24	45.860.000		40	38	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	65	Lapor an	520.000.000	13	97.000.000		13	104.000.000		13	103.000.000		100	99	26	200.000.000		40	38	

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-JMD KPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Kantor yang Disediakan																
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.252.490.000	11	121.950.000	11	132.490.000	10	111.068.000	95	93	21	233.018.000	43	33	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	1.098.590.000	3	93.070.000	3	98.590.000	3	77.168.000	100	78	6	170.238.000	40	15	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	125.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	100	100	2	50.000.000	40	40	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27	Unit	28.900.000	7	3.880.000	7	8.900.000	6	8.900.000	86	100	13	12.780.000	48	44	
Rata-Rata Capaian Kinerja													94	96			42	35	
Predikat Kinerja													ST	ST			SR	SR	
2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi bidang inovasi yang ditindaklanjuti perangkat daerah	100	%	4.518.295.100	0	39.635.000	1	405.275.394	0	308.143.394	0	76	0	347.778.394	8	8	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	%	1.019.100.000		-	1	19.100.000	0	8.731.500	100	100	0	8.731.500	0	4	
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	4	Laporan	319.100.000			1	19.100.000	1	19.066.020	100	100	1	19.066.020	25	6	

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran PJMD KPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	Laporan	100.000.000													
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	4	Laporan	400.000.000													
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1	Laporan	100.000.000													
		Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	Laporan	100.000.000													
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosisl dan Kependudukan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	%	300.000.000													
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	Dokumen	100.000.000													
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1	Dokumen	100.000.000													
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	Dokumen	100.000.000													

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran PJMD KPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	%	819.100.000			19.100.000			100	100				15	
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	Dokumen	119.100.000		1	19.100.000	1	19.100.000	100	100	1	19.100.000	50	16	
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	Dokumen	100.000.000												
		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Dokumen	100.000.000												
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Dokumen	100.000.000												
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2	Dokumen	200.000.000												
		Penelitian dan Pengembangan Peantaaan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Peantaaan Ruang dan Pertanahan	2	Dokumen	200.000.000												
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	%	2.380.095.100	39.635.000		367.075.394			100	99			20	13	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5	Laporan	1.100.000.000	39.635.000	1	347.980.294	1	347.980.294	100	100	2	387.615.294	40	35	Balitbangda
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4	Laporan	461.000.000										0	-	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan	5	Laporan	819.095.100		1	19.095.100	1	18.894.100	100	99	1	18.894.100	20	2	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran P-RKPD PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran PJMD KPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan															
Rata-Rata Capaian Kinerja												100	100			7	11	
Predikat Kinerja												ST	ST			SR	SR	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																		
					21.582.701.100	143	2.439.950.668	130	2.909.990.822		453.000.322	-	-		2.892.950.990			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																		
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												97,13	98,02			24,19	22,7	

D. Evaluasi Indikator Kerja Utama Pembangunan Daerah

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sebagian besar telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026. IKU Pemerintah Kabupaten Pesawaran merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dalam suatu organisasi pemerintah daerah, yang merupakan miniatur dari organisasi pemerintah pusat di daerah, terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya.

Untuk itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja organisasi. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel memberikan gambaran tentang sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2021-2026, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022.

Tabel 2.88 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesawaran Tahun 2022

Sasaran		Indikator		Satuan	Tahun 2022		Persentase Capaian (%)
					Target	Realisasi	
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih dan melayani	1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	62,50 (B)	62,08 (B)	99,32 (100,00)
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	indeks	1,91	1,95	102,09
		3	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	indeks	66,50	74,84	112,54
		4	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	opini	WTP	WTP	100,00
		5	Indeks kepuasan masyarakat	indeks	3.06	3,15	102,94
2	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	6	Tingkat aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	persen	67,64	64,78	95,77
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	7	Indeks infrastruktur dasar	persen	85,21	89,75	105,32
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan	8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	62,48	64,21	102,76

Sasaran		Indikator		Satuan	Tahun 2022		Persentase Capaian (%)
					Target	Realisasi	
5	Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan yang merata	9	Angka rata-rata lama sekolah	poin	7,9	7,77	98,35
			Angka harapan lama sekolah	poin	12,40	12,61	101,69
6	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	11	Angka harapan hidup	Rasio	69.34	69,44	100,14
7	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	12	Pengeluaran per Kapita (dalam Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Ribu Rupiah	8.899,12	8.192,00	92,05
8	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah	13	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Milyar Rupiah	11,579,76	12.016,34	103,77
9	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	14	Persentase angka kemiskinan	persen	13,98	13,85	100,93
		15	Tingkat pengangguran terbuka	poin	4,84	5,06	95,65
10	Meningkatnya nilai investasi	16	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA))	Juta/Rupiah	287.889,80	314.881,13	109,37
11	Meningkatnya kemandirian desa	17	Persentase Desa Maju dan Mandiri	persen	11,81	27,70	234,54

Pemerintah Kabupaten Pesawaran selaku pengemban amanah masyarakat Pesawaran melaksanakan kewajiban mempertanggung jawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

2.2.3 Kemajuan Pencapaian Target RPJMD

Kemajuan pencapaian target jangka menengah adalah kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap indikator kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, sedangkan Capaian Kinerja jangka menengah adalah tahapan membandingkan antara Realisasi sampai dengan Tahun 2022 dibandingkan target lima tahunan. Capaian kinerja jangka menengah yang merupakan tingkat kemajuan pencapaian target jangka menengah sebagai berikut:

Tabel 2.89 Kemajuan Pencapaian Target Jangka Menengah Sampai Dengan Tahun 2022

Sasaran		Indikator		Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian Tahun 2021 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026 (%)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih dan melayani	1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	62,08 (B)	80,00 (A)	77,60
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,95	3,91	49,87
		3	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	74,84	81,25	92,11

Sasaran		Indikator		Realisasi Tahun 2022	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian Tahun 2021 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026 (%)
		4	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP*	WTP	100,00
		5	Indeks kepuasan masyarakat	3,15	3,70	85,13
2	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	6	Tingkat aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	64,78%	74,00%	87,54
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	7	Indeks infrastruktur dasar	89,75%	91,29%	98,31
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan	8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,21	65,07	98,67
5	Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan yang merata	9	Angka rata-rata lama sekolah	7,77	8,70	89,31
			Angka harapan lama sekolah	12,61	12,56	100,03
6	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	11	Angka harapan hidup	69,44	70,54	98,44
7	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	12	Pengeluaran per Kapita (dalam Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	8.192,00	10.612,36	77,19
8	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah	13	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	12.016,34	14.368,67	83,62
9	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	14	Persentase angka kemiskinan	13,85	10,86	78,41
		15	Tingkat pengangguran terbuka	5,06	3,14	62,05
10	Meningkatnya nilai investasi	16	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA))	314.881,13	348.221,25	90,42
11	Meningkatnya kemandirian desa	17	Persentase Desa Maju dan Mandiri	27,70	45,14	61,36

2.2.4 Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang ditawarkan pada saat proses Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2021, dan selanjutnya menjadi bahan masukan dalam menetapkan struktur perumusan strategis, yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Kebijakan serta implementasi strategis berupa program-program pembangunan daerah, program prioritas Kepala Daerah, indikator program beserta arah kebijakan keuangan daerah.

Evaluasi RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 dilakukan terhadap hasil capaian/pelaksanaan RPJMD yang diukur melalui capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. Tabel IKU sebagaimana lampiran Peraturan Bupati dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.90 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih dan melayani	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	60,04 (B)	62,50 (B)	65,00 (B)	67,50 (B)	70,00 (BB)	80,00 (A)	Hasil evaluasi AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Inspektorat
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks SPBE	1,27	1,91	2,41	2,91	3,41	3,91	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Nilai IPK	2,51/62,75	2,66/66,50	2,81/70,25	2,96/74,00	3,11/77,75	3,25/81,25	Hasil survei persepsi korupsi	Inspektorat
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat
		Indeks kepuasan masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat	3,01	3,06	3,4	3,5	3,6	3,70	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
2	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	Tingkat aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	Persentase jalan mantap, fasilitas pelengkap jalan, dan prasarana dermaga.	66,02%	67,64%	69,22%	70,81%	72,41%	74,00%	Rekap data pembangunan Jalan, pelengkap jalan dan dermaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Indeks infrastruktur dasar	Persentase ketersediaan akses irigasi, akses terhadap air minum, sanitasi	83,86%	85,21%	86,70%	88,19%	89,92%	91,29%	Rekap data pembangunan irigasi, data pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU)							air minum, sanitasi dan PSU	
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLHi = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL): >80 (Sangat Baik); 70-80 (Baik); 60-70 (cukup baik); 50-60 (kurang baik); 40-50 (sangat kurang baik); 30-40 (waspada)	61,83	62,48	63,13	63,77	64,42	65,07	Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
5	Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan yang merata	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur diatas 7 tahun di masa mendatang	12,36	12,40	12,44	12,48	12,52	12,56	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada	69,04	69,34	69,64	69,94	70,24	70,54	Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			perubahan pola mortalitas menurut umur								
7	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	Pengeluaran per Kapita (dalam Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson	8.515,90	8.899,12	9.299,58	9.718,06	10.155,37	10.612,36	Badan Pusat Statistik	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas Sosial
8	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Jumlah Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	11.150,65	11.579,76	12.174,16	12.803,65	13.559,48	14.368,67	Badan Pusat Statistik	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
9	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Persentase angka kemiskinan	Angka kemiskinan	14,76	13,98	13,20	12,42	11,64	10,86	Badan Pusat Statistik	Dinas Sosial
		Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah pengangguran /Jumlah angkatan kerja	4,64	4,34	4,04	3,74	3,44	3,14	Badan Pusat Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
10	Meningkatnya nilai investasi	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA))	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA dalam juta rupiah)	216.218,00	237.839,80	261.623,78	287.786,16	316.564,77	348.221,25	Data investasi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
11	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Jumlah Desa Maju dan Mandiri / Jumlah Desa *100	10,42%	11,81%	15,97%	22,22%	30,56%	45,14%	Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026. Pemerintah kabupaten Pesawaran memiliki 11 (sebelas) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.91Pencapaian Indikator Sasaran Strategis

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran Strategis	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN									
					Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
					Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Misi 1	1	1	5	5	99,74	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Misi 2	1	3	3	3	98,07	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Misi 3	1	3	5	5	98,06	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Misi 4	1	3	3	3	78,12	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Misi 5	1	1	1	1	234,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah			11	17	17	121,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 17 (Tujuh Belas) Indikator Sasaran Strategis, diketahui bahwa 17 indikator sasaran strategis atau 100% Sasaran Strategis bermakna Sangat Tinggi. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tercapai sebesar sebesar 121,70%, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu sebesar 93,61%, dan dikategorikan **Sangat Tinggi**.

2.2.5 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada sidang umum PBB ke-70 pada tanggal 25—27 September 2015, telah disepakati kerangka pembangunan global yang baru yakni *Sustainable Development Goal* (SDGs) yang disepakati oleh 192 negara termasuk Indonesia yang kemudian diadopsi sebagai *platform* pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. SDGs dalam terminologi pembangunan di Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

TPB merupakan tantangan pembangunan di Kabupaten Pesawaran di mana pada tahun pada tahun 2030 cita-cita dari *SDGs* tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus dicapai. Ketujuh belas TPB tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan

- sanitasi bagi semua.
- Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan moderen bagi semua.
 - Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.
 - Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.
 - Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara.
 - Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
 - Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
 - Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
 - Mengkonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
 - Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
 - Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
 - Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Ketujuhbelas tujuan tersebut diuraikan ke dalam 169 target. Untuk memudahkan pemantauan, 17 tujuan dan 169 target TPB dikelompokkan ke dalam 4 pilar, sebagai berikut.

- Pilar pembangunan sosial, meliputi tujuan ke-1, 2, 3, 4, dan 5.
- Pilar pembangunan ekonomi meliputi tujuan ke-7, 8, 9, 10, dan 17.
- Pilar pembangunan lingkungan meliputi tujuan ke-6, 11, 12, 13, 14, dan 15.
- Pilar pembangunan hukum dan tata kelola meliputi tujuan ke-16.

Terdapat 17 tujuan dan 208 target TPB yang menjadi urusan Kabupaten Pesawaran. Hingga tahun 2019, diperoleh capaian TPB di Kabupaten Pesawaran adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.92 Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020

No	TPB	Indikator	Mencapai Target	Belum Mencapai Target	Perlu Pendataan	Perlu Peningkatan	Perlu Penurunan	Tidak Ada Data
1	Tanpa Kemiskinan	27	4	5	1	3	1	13
2	Tanpa Kelaparan	15	1	1	0	4	0	9
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	39	4	2	0	2	2	21
4	Pendidikan Berkualitas	11	2	4	0	1	0	4
5	Kesetaraan Gender	13	0	1	0	1	0	11
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	12	1	4	0	0	0	7
7	Menjamin Akses Energi	1	0	1	0	0	0	0
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	16	1	1	0	1	0	13
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	8	0	1	0	3	0	5
10	Mengurangi Kesenjangan	12	3	0	0	0	0	9
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	10	2	2	2	0	2	2
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	4	0	1	2	0	0	1
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	0	0	2	0	0	1

No	TPB	Indikator	Mencapai Target	Belum Mencapai Target	Perlu Pendataan	Perlu Peningkatan	Perlu Penurunan	Tidak Ada Data
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	3	0	0	0	0	0	2
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	24	2	1	0	1	0	20
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	10	3	0	0	1	0	6
TOTAL		208	23	24	7	17	5	124

Sumber: Tim Penyusun KLHS RPJMD 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 208 indikator TPB di Kabupaten Pesawaran, terdapat 23 indikator yang telah mencapai target, 24 tujuan belum mencapai target, 7 indikator perlu pendataan, 17 indikator perlu peningkatan, 5 indikator perlu penurunan, dan 124 indikator lainnya tidak tersedia data (N/A).

Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan sosial antara lain di Kabupaten Pesawaran adalah; (a) proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, (b) persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, (c) prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, (d) persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, (e) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, (f) kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan, (g) proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, (h) cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (i) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, (j) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat, (k) rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun, (l) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan (m) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.

Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan ekonomi antara lain adalah; (a) rasio penggunaan gas rumah tangga, (b) PDB per kapita, (c) laju pertumbuhan PDB industri manufaktur, dan (d) proporsi individu yang menggunakan internet. Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan lingkungan antara lain adalah; (a) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, (b) proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan, (c) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, (d) proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, (e) persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan, (f) persentase sampah perkotaan yang tertangani, dan (g) jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Selebihnya, selain keberhasilan mencapai target indikator dari masing-masing pilar pembangunan dalam TPB, masih banyaknya indikator yang tersedia datanya untuk dievaluasi (59,6%).

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2022, serta perkembangan diawal Tahun 2023, dimana kondisi diawal Tahun 2023 pasca wabah *pandemic covid-19*. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi perubahan prioritas pembangunan di Kabupaten Pesawaran. Adapun evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan

pembangunan selanjutnya.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisis untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan kajian terhadap dokumen perencanaan Nasional, Provinsi Lampung serta evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005-2025, serta juga memperhatikan berbagai isu-isu internasional, nasional, regional dan Provinsi Lampung yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Pesawaran, beberapa isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bidang Sosial Budaya
Memperhatikan dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa hingga awal Tahun 2023, dimungkinkan akan mempengaruhi sektor sosial budaya, antara lain:
 - a) Tingginya prevalensi gizi buruk/stunting.
 - b) Masih Rendahnya Peningkatan IPM/ Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah.
 - c) Tingkat pengangguran yang mengalami peningkatan.
 - d) Masih rendahnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Bidang Ekonomi
Memperhatikan dampak pandemi Covid-19 yang masih terus terjadi yang dimungkinkan akan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2023 sehingga akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang ada seperti:
 - a) Capaian Target PDRB Sektor Pariwisata (*Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Perdagangan, serta Jasa Lainnya*)
 - b) Belum optimalnya pengembangan potensi obyek wisata unggulan (One Village One Destination)
 - c) Pengendalian inflasi
 - d) Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan Optimalisasi Industri Hilir Pengolahan hasil Pertanian/Pekebunan/Peternakan
 - e) Pengembangan Ekonomi masyarakat berbasis Potensi kawasan perdesaan
 - f) Percepatan Pembangunan Kawasan Industri maupun Kawasan Ekonomi Khusus.
 - g) Optimalisasi tingkat pertumbuhan investasi cenderung melambat.
3. Bidang Infrastruktur
 - a) Masih belum optimalnya Jalan dalam kondisi Mantap.
 - b) Masih belum optimalnya Jembatan dalam kondisi Mantap .
 - c) Belum Optimalnya ketersediaan rumah layak huni.
 - d) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah.
 - e) Pembangunan kawasan strategis .
 - f) Belum optimalnya Desa Siaga Bencana Pesawaran sebagai daerah rawan bencana.
4. Bidang Pemerintahan
 - a) Keterbatasan Kapasitas Fiskal

- b) Belum Optimalnya Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa
- c) Penerapan E-Government masih belum optimal.
- d) Peningkatan Pelayanan Masyarakat

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan, dilakukan melalui pendekatan urusan wajib dan urusan pilihan, sesuai dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

- a) Perlunya inovasi Perangkat Daerah dalam peningkatan komposit IPM sektor Pendidikan.
- b) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
- c) Sarana dan prasarana ekstrakurikuler yang dapat menunjang perkembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial dan kesehatan peserta didik perlu ditingkatkan.
- d) Penerapan PAUD *holistic integrated* yang belum optimal.
- e) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- f) Manajemen pendidikan di setiap jenjang pendidikan perlu ditingkatkan kembali.

2. URUSAN KESEHATAN

- a) Belum terpenuhinya SDM Kesehatan sesuai dengan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 dan maldistribusi SDM.
- b) Perlunya inovasi perangkat daerah dalam peningkatan komposit IPM sektor kesehatan.
- c) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
- d) Akses dan mutu pelayanan kesehatan (peningkatan sarana, prasarana, sumber daya manusia).
- e) Meningkatnya penyakit tidak menular (hipertensi dan diabetes mellitus).
- f) Prevalensi gizi buruk dan optimalisasi penanganan *stunting*.
- g) Tingginya angka penyebaran penyakit endemi baru akibat mutasi penyebab penyakit.
- h) Kurangnya penanganan terhadap penderita *human immunodeficiency* (HIV), *Tuberculosis* (TB), Malaria.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
- b) Masih belum optimalnya jalan dalam kondisi mantap, capaian sampai tahun 2022 sebesar 73,95% dari target RPJMD sebesar 82,41%.
- c) Optimalisasi dan penguatan kelembagaan Komisi Irigasi.
- d) Percepatan dan penyelesaian penetapan Perkada RDTR Gedong Tataan dan RDTR Teluk Pandan.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
- b) Kurangnya cakupan ketersediaan fasum dan fasos pada perumahan layak huni dan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- c) Penataan lingkungan kawasan perumahan.
- d) Meminimalisir angka kejadian embrional kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan.

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- a) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
- b) Kurangnya PPNS penegak perda dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana pemadam kebakaran.
- d) Optimalisasi TRC dalam penanganan bencana daerah.
- e) Belum optimalnya peningkatan kapasitas masyarakat pengurangan risiko bencana di desa rawan bencana.
- f) Masih minimnya rambu-rambu peringatan ancaman bencana.
- g) Penguatan desa tangguh bencana.

6. URUSAN SOSIAL

- a) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
- b) Optimalisasi penurunan tingkat kemiskinan.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (P3KE).
- d) Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin.
- e) Kurang optimalnya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

- a) Pengembangan Ekonomi masyarakat berbasis Potensi kawasan perdesaan.
- b) Terbatasnya kesempatan kerja dan peluang usaha.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- a) Masih rentan permasalahan *trafficking* terhadap perempuan dan anak.
- b) Masih sering timbulnya KDRT dan kekerasan pada perempuan dan anak.
- c) Tingginya Pengaruh negatif dari globalisasi terhadap perilaku anak-anak dan remaja.
- d) Optimalisasi Tim Pendamping Keluarga dalam penanganan dan pelaporan *stunting*.

3. URUSAN PANGAN

- a) Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat.
- b) Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan dan pendataan daerah rawan pangan.
- c) Kurangnya pengetahuan untuk pemanfaatan lahan pekarangan kosong.

4. URUSAN PERTANAHAN

- a) Percepatan penyelesaian penetapan peraturan daerah tentang pertanahan.
- b) Belum optimalnya sertifikasi pertanahan.

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

- a) Peningkatan suhu udara dan penurunan kualitas udara.
- b) Advokasi kesadaran dan kepedulian masyarakat serta pihak swasta terhadap kelestarian lingkungan.
- c) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan.
- d) Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah perkotaan.
- e) Kurangnya jumlah SDM pengelola persampahan.
- f) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a) Tindak lanjut penginputan hasil pencacahan Regsosek.
- b) Masih kurangnya fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c) Kurang terkoordinasi, terintegrasi, terarah dan komperhensif data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d) Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil lebih dioptimalkan.

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a) Penguatan BUMDes/BUMDesMa dalam pengelolaan dan advokasi program Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG).

- b) Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha.
- c) Minimnya penggunaan dan pemanfaatan IPTEK Masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
- d) Kurangnya kemampuan SDM aparatur desa dalam administrasi perencanaan pembangunan dan administrasi pengelolaan keuangan desa.
- e) Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa.
- 8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
 - a) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya keluarga berencana menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS);
 - b) Kurang terkoordinasi, terintegrasi, terarah dan komperhensif data pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 9. URUSAN PERHUBUNGAN**
 - a) Belum maksimalnya PAD sektor perhubungan.
 - b) Belum optimalnya sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah.
 - c) Belum adanya rencana pengembangan trayek dan rute angkutan desa dan angkutan antar kota dalam provinsi.
 - d) Belum optimalnya penyediaan prasarana dan fasilitas transportasi darat dan laut.
 - e) Optimalisasi penyediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
 - f) Belum optimalnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
 - g) Belum optimalnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor.
- 10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
 - a) Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terpadu dalam *Command Center* Kabupaten Pesawaran.
 - b) Persiapan pembentukan *Computer Security Response Team* (CSRT) Kabupaten Pesawaran.
- 11. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
 - a) Belum optimalnya pasar hasil UMKM.
 - b) Belum optimalnya pengembangan sistem pembiayaan dan jaringan bisnis dengan kemitraan pemerintah dan swasta.
 - c) Kurangnya infrastruktur produksi untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UKM.
 - d) Kualitas lembaga dan SDM koperasi belum optimal.
 - e) Masih banyak koperasi yang kurang sehat dalam operasionalnya.
- 12. URUSAN PENANAMAN MODAL**
 - a) Belum optimalnya dukungan regulasi terkait penanaman modal dan investasi.
 - b) Kurang intensifnya promosi potensi dan peluang investasi.
 - c) Rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam melengkapi legalitas bangunan dan usaha.
- 13. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**
 - a) Belum optimalnya pendataan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan.
 - b) Masih rendahnya kreatifitas, inovasi dan jiwa kewirausahaan pemuda.
 - c) Belum optimalnya memasyarakatkan budaya olahraga.
 - d) Kurangnya frekuensi kejuaraan olah raga tingkat Kabupaten.
- 14. URUSAN STATISTIK**
 - a) Belum tersedianya portal Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Pesawaran.
- 15. URUSAN PERSANDIAN**
 - a) Belum efektifnya Sistem Pelaporan Pemerintah Daerah (SP4N Lapor) yang terintegrasi.
 - b) Masih minimnya prasarana dan fasilitas dalam menunjang kegiatan persandian.
- 16. URUSAN KEBUDAYAAN**
 - a) Kurangnya pendokumentasian dan penggalian budaya daerah.
 - b) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda.
 - c) Masih rendahnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri.
- 17. URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
 - a) Kurang melembaganya budaya literasi dalam kehidupan masyarakat.
 - b) Optimalnya SDM arsiparis dan pustakawan.
 - c) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Arsip dan Perpustakaan.

C. URUSAN PILIHAN

1. URUSAN PERTANIAN

- a) Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan optimalisasi industri hilir pengolahan hasil pertanian.
- b) Tingginya angka kejadian alih fungsi lahan (peruntukan dan jenis komoditas).
- c) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- d) Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas pengolahan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- e) Percepatan terbentuknya komisi pengawasan pupuk dan pestisida.
- f) Belum optimalnya penanganan penyakit tanaman dan penyakit ternak.

2. URUSAN PARIWISATA

- a) Belum maksimalnya PAD sektor pariwisata.
- b) Belum tercapainya Target PDRB Sektor Pariwisata (*Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Perdagangan, serta Jasa Lainnya*).
- c) RIPPPDA yang belum selaras dan optimal.
- d) Konservasi terumbu karang belum ada revitalisasi terumbu karang.
- e) Fasum fasos belum memiliki strandar pariwisata (toilet, mushola, dll).
- f) Pokdarwis masih sedikit yang aktif.
- g) Kesadaran masyarakat akan sapta pesona.
- h) Belum ada mekanisme money terkait kinerja internal pariwisata.

3. URUSAN PERIKANAN

- a) Belum maksimalnya PAD sektor perikanan.
- b) Belum optimalnya produksi perikanan air tawar.
- c) Penguatan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan.
- d) Belum optimalnya pengawasan terhadap pencemaran akibat industri perikanan.

4. URUSAN PERDAGANGAN

- a) Pentingnya pengendalian inflasi.
- b) Belum maksimalnya sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional.
- d) Tingginya tingkat pertumbuhan pasar modern dan waralaba.

5. URUSAN PERINDUSTRIAN

- a) Kurang optimalnya pembiayaan dan kemitraan antara industri kecil (*home industry*).
- b) Pertumbuhan sektor industri skala besar masih relatif stagnan, sementara industri kecil dan menengah masih memiliki keterbatasan dalam hal daya saing produk dan pemasaran.

6. URUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

- a) Perlunya peningkatan suplai listrik di daerah pelosok dan pulau-pulau kecil.

7. URUSAN TRANSMIGRASI

- a) Kurangnya kesempatan penduduk sebagai calon peserta transmigrasi.

D. UNSUR PENUNJANG

1. SEKRETARIAT DAERAH

- a) Penguatan kesekretariatan TPID.
- b) Pendampingan OPD dalam penilaian SAKIP dan RB.
- c) Laporan evaluasi pemerintah daerah (LPPD, SPM dan LKPJ) yang tepat waktu.
- d) Updating SSH, SBM dan HSPK.
- e) Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah.
- f) Percepatan perwujudan command center Kabupaten Pesawaran.
- g) Penyelenggaraan rakor forkopimda (*Coffee morning*) secara berkala.
- h) Fasilitas tindak lanjut MoU (kerjasama daerah).
- i) Implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
- j) Percepatan penyelesaian batas wilayah dan batas desa.

2. SEKRETARIAT DPRD

- a) Harmonisasi agenda reses DPRD dalam proses perencanaan pembangunan kabupaten.
- b) Harmonisasi agenda kerja DPRD dalam proses penganggaran (APBD) kabupaten.

- c) Harmonisasi dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda).

3. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a) Penguatan koordinasi komunikasi intelijen daerah (KOMINDA).
- b) Pemahaman yang terbatas terhadap kebhinnekaan menimbulkan ancaman disintegritas kebangsaan.
- c) Munculnya hoax, perilaku menyimpang, ajaran sesat, maupun ancaman terorisme dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d) Terdapat potensi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat karena latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik dan yang bernuansa Sara.
- e) Tingginya angka penyalahgunaan/penguasaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).

4. PENGAWASAN

- a) Penguatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP).
- b) Optimalisasi pelaksanaan review terhadap dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen teknis lainnya.
- c) Penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah desa.
- d) Peningkatan indeks perspektif korupsi dan pendampingan MCP KPK.

5. PERENCANAAN

- a) Harmonisasi agenda kerja perencanaan pembangunan kabupaten.
- b) Percepatan implementasi satu data indonesia (SDI) Kabupaten Pesawaran.
- c) Penguatan peran TKPK dalam penurunan angka kemiskinan.

6. KEUANGAN

- a) KUA-PPAS dan APBD belum sepenuhnya mempedomani RKPD.
- b) Belum optimalnya kerja tim koordinasi dalam penanganan TPTGR.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan dan penataan aset daerah.
- d) Belum tersedianya data proyeksi sumber pendanaan pembangunan daerah dalam SIPD.
- e) Optimalisasi kerjasama implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- f) Belum optimalnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

7. KEPEGAWAIAN

- a) Masih kurangnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.
- b) Masih kurangnya jumlah ASN untuk memenuhi kebutuhan minimal pemerintah daerah.

8. PENELITIAN

- a) Belum adanya road map pengembangan inovasi daerah.
- b) Belum adanya rencana kelitbangan.
- c) Optimalisasi pemanfaatan hasil kelitbangan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan menggambarkan secara umum kondisi dan analisis statistik serta karakteristik perekonomian dan keuangan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024, serta prospek perekonomian Tahun 2024. Didalam bab ini akan dibahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Pesawaran serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah, serta kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 bahwa RKPD Tahun 2024 mengakomodir arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2023 yang diselaraskan terhadap RKP 2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024. Penyelarasan ini dilakukan sebagai upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Dalam implementasinya arah kebijakan ekonomi daerah ini akan menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut kedalam program dan kegiatan.

3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Perekonomian Nasional

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat pada Tahun 2024 dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi perekonomian Kabupaten Pesawaran kedepan. Kerangka perekonomian nasional secara makro dalam Tahun 2024 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Indonesia, masalah yang masih harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, peluang serta tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan perekonomian Indonesia yang diperkirakan dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Pesawaran meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter, fiskal dan neraca pembayaran, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pada RPJMN Tahun 2020–2024, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Sesuai dengan Tema Pembangunan IV RPJMN Tahun 2020-2024 : “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”, dengan arah kebijakan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju dan berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 bahwa Kabupaten Pesawaran tercantum dalam Kawasan

pengembangan industri baru diluar pulau jawa yaitu Kawasan Industri Pesawaran (Tegineneng) yang akan dikembangkan dalam kerangka industrialisasi dengan dimanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, kerja sama regional, serta diversifikasi perekonomian daerah.

Kondisi ekonomi global kedepan diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 2,2% dan 3,1% pada Tahun 2024 dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 4,7 sampai 5,5%. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Salah satu yang akan berdampak besar pada Indonesia adalah perlambatan ekonomi Eropa Timur akibat Perang Russia dan Ukraina. Selain itu, ketidakpastian global juga muncul terkait ketegangan politik di kawasan Laut China Selatan sehingga ketidakpastian tersebut berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah.

Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2024 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada 2023.

Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2024, mencakup:

- 1) Pertumbuhan ekonomi antara 5,3-5,7%.
- 2) Inflasi berkisar antara 3% dengan tingkat deviasi sebesar kurang lebih 1% (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023, dan 2024).
- 3) Tingkat kemiskinan pada kisaran 6,5-7,5%.
- 4) IPM menjadi 73-74.
- 5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,27%.
- 6) Gini rasio pada kisaran 0,374-0,377.
- 7) Tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7%.
- 8) Nilai tukar petani 105-108.
- 9) Nilai tukar nelayan 110.

Memahami kondisi tersebut Tema RKP Tahun 2024 menjadi: *“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”* dengan fokus penekanan RKP Tahun 2024 ialah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Araha Kebijakan Nasional yang menjadi penekanan pada RKP Tahun 2024 yaitu:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 2) Peningkatan kualitas SDM.
- 3) Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*.
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha.
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
- 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim.
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi).
- 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3.1.2 Kondisi dan Arahan Perekonomian Provinsi Lampung

Secara substansial misi terkait dengan pengembangan perekonomian Provinsi Lampung adalah dengan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Selain itu

kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan lingkungan yang berkelanjutan.

Target yang ingin dicapai dengan penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung, antara lain: 1) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi pengangguran; 2) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah; 3) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat; 4) Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil; dan 5) Pemerataan distribusi pendapatan.

Perkembangan kegiatan ekonomi Provinsi Lampung yang dicerminkan dengan PDRB atas dasar harga konstan maupun harga berlaku mengalami pertumbuhan. Nilai PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku pada Tahun 2021 adalah sebesar 371,198 trilyun, meningkat di Tahun 2022 menjadi 414,131 trilyun. Empat lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB Provinsi Lampung adalah sektor pertanian dengan kontribusi 27,90 persen; industri pengolahan dengan kontribusi 18,55 persen; perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 13,20 persen; dan konstruksi dengan kontribusi 9,75 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Lampung selama periode 2018-2022 menunjukkan tren fluktuasi akibat Pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi di pada Tahun 2018 sebesar 5,23 persen, meningkat di Tahun 2019 menjadi 5,26 persen. Pada Tahun 2020 terjadi kontraksi hingga -1,67 persen dan Tahun 2021 mulai meningkat kembali pada angka 2,79 persen dan mulai bergerak bangkit ke angka 4,28 persen pada Tahun 2022..

Perkembangan inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan III Tahun 2021 tercatat terendah pada batas bawah kisaran sasaran $3,0 \pm 1$ persen yaitu sebesar 1,56 persen (yoy) atau melambat dibandingkan Triwulan tahun sebelumnya 2,34 persen (yoy). Rendahnya angka inflasi pada periode ini dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan mobilitas dan sosial masyarakat serta masuknya masa panen pada komoditas strategis. Secara periode tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada Triwulan III Tahun 2021 disumbang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan porsi 1,08 persen dengan nilai inflasi 3,81 persen (yoy).

Pada Tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung sebanyak 1.083,93 ribu jiwa bertambah menjadi sebesar 1.002,41 ribu jiwa pada Tahun 2022 atau menurun sebesar 7,52 persen dari tahun sebelumnya.

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk diperlihatkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini Provinsi Lampung per September 2019 sebesar 0,33 dan terus mengalami penurunan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022 secara berturut-turut yakni 0,320, 0,314 dan 0,313, Indeks Gini Lampung lebih baik dari Nasional yang berada pada angka 0,381.

Tema RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah *“Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Rakyat Lampung Berjaya”*. Berdasarkan tema tersebut, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 3) Pembangunan infrastruktur.
- 4) Reformasi birokrasi.
- 5) Kehidupan masyarakat yang religius, aman, dan berbudaya.
- 6) Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Sasaran indikator makro yang akan dicapai pada Tahun 2024, mencakup:

- 1) Pertumbuhan ekonomi antara 5,0-5,5%.
- 2) Tingkat kemiskinan antara 10,9-10,4%.
- 3) Tingkat Pengangguran terbuka antara 4,0-3,8%.

- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara 70,6-71,1.
- 5) Rasio gini antara 0,293-0,314.
- 6) Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 7,29%.
- 7) Nilai tukar petani antara 105-106.

3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Pesawaran

Identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

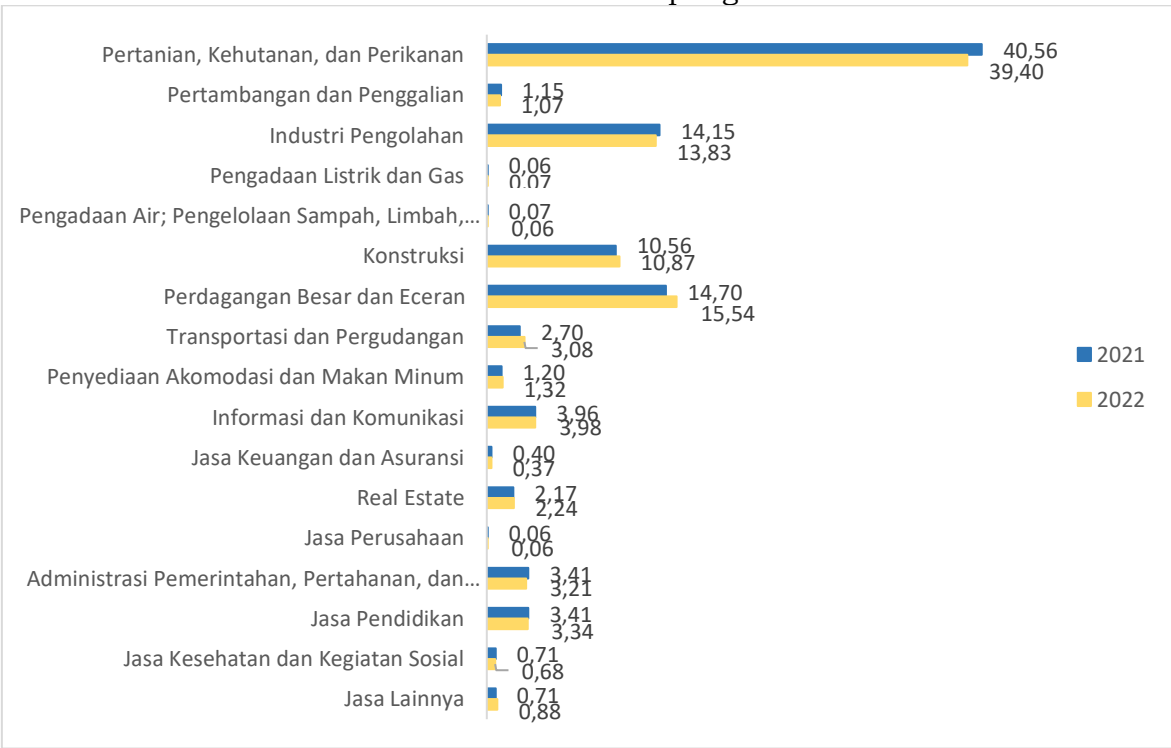
Kerangka ekonomi makro Tahun 2024 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023, masalah-masalah yang akan diselesaikan, tantangan yang akan dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Pesawaran yang Maju, Makmur dan Sejahtera. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan sebagai dampak pasca pandemi Covid-19 di daerah, dilakukan kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi serta arah kebijakan keuangan daerah.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Pesawaran dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Nasional dan Provinsi Lampung. Kemajuan ekonomi Kabupaten Pesawaran dapat diketahui dengan menyandingkan data perekonomian Kabupaten Pesawaran dengan Provinsi Lampung dan Nasional.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Pesawaran yaitu PDRB. PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Dari PDRB dapat diketahui nilai tambah dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi guna penyusunan atau menggariskan kebijakan lebih lanjut.

Gambar 3.1 Struktur PDRB Rill Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

- Catatan :
- A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 - B Pertambanagan dan Penggalian
 - C Industri Pengolahan

- D Pengadaan Listrik dan Gas
- E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- F Konstruksi
- G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- H Transportasi dan Pergudangan
- I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- J Informasi dan Komunikasi
- K Jasa Keuangan dan Asuransi
- L Real Estate
- M, N Jasa Perusahaan
- O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- P Jasa Pendidikan
- Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- R, S, T, U Jasa Lainnya

Seiring dengan terjadinya pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Pesawaran dari sektor primer ke sektor tersier maka untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor tersebut, beberapa upaya yang dilakukan adalah; 1). Peningkatan kualitas SDM; 2). Peningkatan jumlah Wira Usaha Baru (WUB); 3). Membuka lapangan kerja baru; 3). Meningkatkan investasi; 4). Meningkatkan nilai ekspor dan 5). Perbaikan infratraktur.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan indikator makro yang masih relevan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi, variabel lainnya, dan distribusi pendapatan (distribution of income) antar golongan masyarakat. Dengan demikian ukuran pertumbuhan ekonomi masih tetap digunakan sebagai tolok ukur terutama oleh negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya jika negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian. Munculnya Covid-19 pada akhir Tahun 2019 memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan tabel dibawah ini pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor lapangan usaha pada Tahun 2020 tertinggi pada sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,26% dan terendah pada sektor jasa lainnya yang berkontraksi hingga -11,57%, namun pada Tahun 2021 terjadi pergeseran dimana sektor lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yakni pada sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 8,39% dan terendah pada sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontraksi hingga -1,27%. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Pertumbuhan PDRB Rill Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

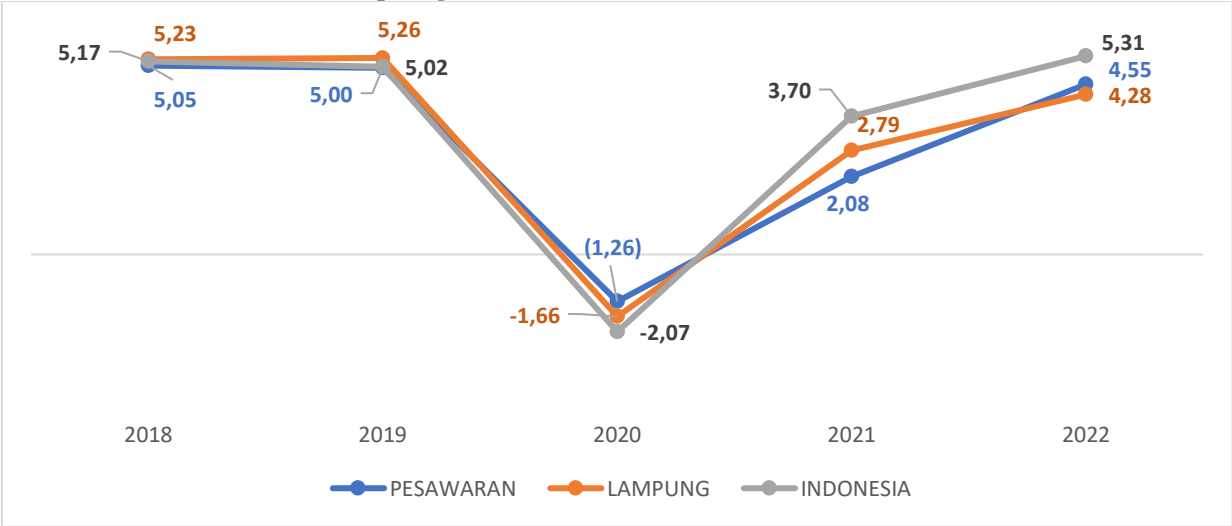
No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,19	0,07	-1,27	1,56
2	Pertambangan dan Penggalian	4,23	2,35	-0,03	1,87	-2,84
3	Industri Pengolahan	7,51	5,59	-4,77	6,90	2,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,58	7,62	7,23	4,49	6,18
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,58	6,48	5,18	8,39	1,20
6	Konstruksi	9,96	9,00	-2,18	1,59	7,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran	7,39	8,55	-4,87	5,63	10,52
8	Transportasi dan Pergudangan	6,74	10,46	-4,03	5,25	18,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,53	17,93	-3,81	0,28	14,51
10	Informasi dan Komunikasi	8,96	8,88	9,05	6,67	5,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04	3,59	2,78	0,91	-1,56
12	Real Estate	5,92	6,51	-2,29	1,32	7,59
13	Jasa Perusahaan	2,12	4,16	-2,15	2,04	14,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,06	5,11	3,84	2,45	-1,61
15	Jasa Pendidikan	9,49	10,03	3,85	3,32	2,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,88	7,04	9,26	5,12	0,01

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
17	Jasa Lainnya	7,96	12,78	-11,57	4,28	28,54
	Kabupaten Pesawaran	5,05	5,00	-1,26	2,08	4,55

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Secara total berdasarkan PDRB harga konstan Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran fluktuatif, Tahun 2018 sebesar 5,05%, Tahun 2019 sebesar 5,00%, Tahun 2020 menjadi -1,26%, dan Tahun 2021 menjadi 2,08% serta meningkat ke 4,55% pada Tahun 2022. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 tersaji pada gambar berikut.

Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



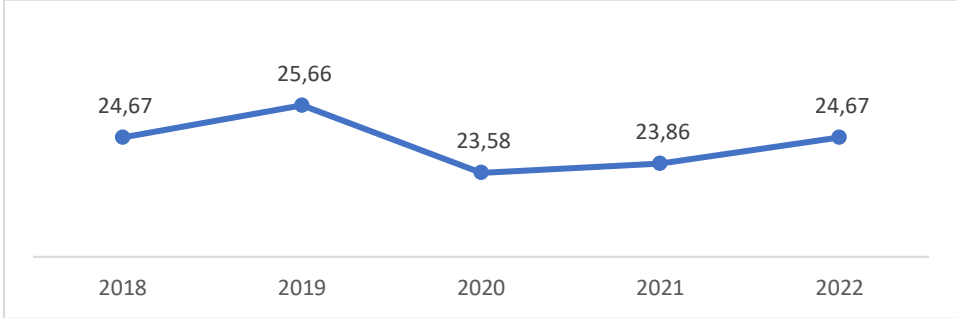
Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

c. PDRB per Kapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan dari meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah Penduduk Pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita.

PDRB Per kapita Kabupaten Pesawaran berdasarkan data BPS Tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Pada Tahun 2018 PDRB Per kapita Kabupaten Pesawaran sebesar sebesar 24,67 juta per tahun, tahun 2019 sebesar 25,66 juta per tahun, tahun 2020 menurun menjadi 23,58 juta per tahun akibat Pandemi Covid-19 dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 23,86 juta per tahun serta peningkatan kembali pada tahun 2022 pada angka 24,67, sebagaimana tercantum dalam grafik di bawah.

Gambar 3.3 Grafik Perkembangan PDRB Riil per Kapita Tahun 2018-2022 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

d. PDRB Menurut Pengeluaran

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Pesawaran akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2018-2022, tidak terlepas dari dua faktor, yaitu

faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal, banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pesawaran periode 2018-2022 berfluktuasi dengan capaian berurut-turut pada kurun waktu tersebut yaitu 5,05 persen, 5,00 persen, -1,26 persen, 2,08 persen, dan 4,55 persen. Perkembangan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Jika dilihat dari permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Pada periode 2018-2022, PDRB Kabupaten Pesawaran atas dasar harga berlaku meningkat cukup pesat, yakni sebesar 15.099,61 miliar Rupiah (2018); 16.208,20 miliar Rupiah (2019); 16.211,74 miliar Rupiah (2020); dan 16.845,05 miliar Rupiah (2021); serta 18.687,38 miliar Rupiah (2022). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Pesawaran pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari dibawah ini.

Tabel 3.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.659,59	9.349,29	9.325,11	9.780,52	10.816,88
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH	198,79	220,37	225,11	230,55	243,87
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.074,8	1.125,38	1.119,81	1.141,64	1.103,13
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.706,00	5.167,52	5.029,77	5.324,66	5.702,62
5	Perubahan Inventori	5,61	2,07	182,34	-245,34	0,48
6	Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	454,82	343,57	329,60	613,02	820,40
	PDRB	15.099,61	16.208,20	16.211,74	16.845,05	18.687,38

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2022

Seiring dengan terjadinya pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Pesawaran dari sektor primer ke sektor tersier maka untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor tersebut, beberapa upaya yang dilakukan adalah; 1). Peningkatan kualitas SDM; 2). Peningkatan jumlah Wira Usaha Baru (WUB); 3). Membuka lapangan kerja baru; 3). Meningkatkan investasi; 4). Meningkatkan nilai ekspor dan 5). Perbaikan infratraktur.

e. Inflasi

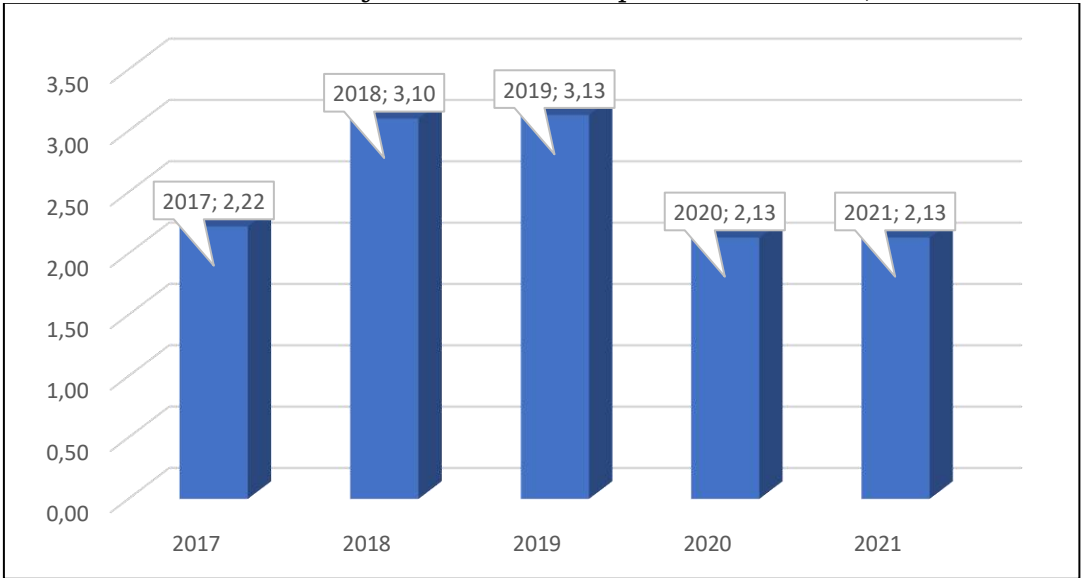
Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat, data inflasi Kabupaten Pesawaran dilihat dari inflasi kota terdekat yakni Kota Bandar Lampung. Laju inflasi di Kabupaten Pesawaran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 tercatat bahwa inflasi di Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 2,22, mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 3,10, selanjutnya tahun 2019 mengalami penurunan pada angka 3,13 dan terus menurun hingga pada angka 2,13 pada Tahun 2020 dan 2021.

Meski demikian, peningkatan Inflasi Kabupaten Pesawaran masih dalam ambang batas target tingkat inflasi yang ditetapkan, yaitu 2 ± 0,5 persen. Disatu sisi, tingkat inflasi yang terkendali dapat menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat, yang juga mendukung stabilitas perekonomian regional khususnya insentif pada sisi suplai produksi (produsen). Disisi yang lain juga dapat mengindikasikan masih lemahnya daya beli masyarakat yang sekaligus mencerminkan lambatnya

pertumbuhan ekonomi regional daerah. Laju Inflasi Di Kabupaten Pesawaran tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tersaji pada gambar dibawah ini..

Upaya strategi efektif yang dilakukan oleh Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pesawaran yaitu; 1). Upaya menjaga keterjangkauan harga; 2). Menjaga ketersediaan pasokanbahan kebutuhan pokok, cadangan pangan pemerintah daerah dan kelembagaan; 3). Mendorong kelancaran distribusimelalui kerja sama perdagangan antardaerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan; serta 4). Melakukan komunikasi efektif dengan perbaikan kualitas dan validitas data.

Gambar 3.4 Grafik Laju Inflasi Di Kabupaten Pesawaran, 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran, 2022

f. Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja pada usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Sedangkan TPT adalah ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan data pada tabel dibawah, TPAK Kabupaten Pesawaran pada lima tahun terakhir mengalami perkembangan menuju tren positif. Selama kurun waktu tersebut persentase jumlah angkatan kerja yang terserap dalam dunia kerja berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2018 persentase jumlah angkatan kerja yang berkerja sebesar 68,23 persen yang menurun menjadi 67,80 persen pada tahun 2019 namun mengalami peningkatan pada Tahun 2020 menjadi 69,49 persen dan menurun akibat Pandemi Covid-19 pada Tahun 2021 ke angka 65,42 persen serta berhasil kembali naik ke angka tertinggi selama lima tahun terakhir pada posisi 71,27 persen di Tahun 2022. Namun cerminan angka fluktuasi tersebut tidak berpengaruh terhadap progress menurunnya tingkat pengangguran dari 4,64 persen pada tahun 2018 menjadi 4,19 pada Tahun 2021 serta pada Tahun 2022 berbanding terhadap TPAK yang meningkat, tetapi tingkat pengangguran yang seharusnya turun juga meningkat menjadi 5,06 persen.

Tabel 3.3 Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022

Tahun	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka
2018	68,23	4,64
2019	67,80	4,34
2020	69,49	4,64
2021	65,42	4,19

Tahun	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka
2022	71,27	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

g. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Dalam kurun waktu Tahun 2018 hingga 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran mengalami tren yang fluktuatif dari 15,97% menjadi 13,85% atau dari 71.140 orang menjadi 63.170 orang. Data perkembangan penduduk miskin dari Tahun 2018 hingga 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Per kapita per bulan)	Penduduk Miskin		Indeks Gini
		Jumlah	Persentase (%)	
2018	360.909	70.140	15,97	0,316
2019	372.649	67.360	15,19	0,310
2020	403.444	66.040	14,76	0,288
2021	420.032	68.310	15,11	0,299
2022	452.521	63.170	13,85	0,251

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Selanjutnya indeks Gini di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren fluktuatif, pada Tahun 2018 berada pada 0,316, mengalami penurunan pada angka 0,310 pada tahun 2019 dan kembali menurun pada Tahun 2020 di angka 0,288 poin. Namun mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 0,299 poin dan hingga Tahun 2022 mengalami tren positif yang menurun pada angka 0,251 poin. Hal ini bermakna bahwa terjadi penurunan angka ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pesawaran, lebih lanjut indeks Gini Kabupaten Pesawaran lebih baik dengan capaian Provinsi Lampung (0,313) pada Tahun 2022 dan lebih baik dari capaian nasional (0,381).

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Pesawaran mencapai titik terendah sejak Tahun 2015 pada 2020, yaitu -1,26% akibat Pandemi Covid-19. Kemudian pada Tahun 2021 mulai tumbuh kembali pada angka 2,08% dan terus meningkat hingga mencapai 4,55% pada Tahun 2022. Namun demikian, sektor pertanian justru mengalami penurunan pertumbuhan seiring dengan sebagian sektor lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan yang secara total PDRB Pesawaran mengalami kenaikan pertumbuhan. Artinya, fluktuasi sektor-sektor ekonomi akan menentukan dinamika perekonomian Kabupaten Pesawaran, terutama pada tiga sektor yang dominan yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran; dan industri pengolahan. Selanjutnya indeks Gini di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren fluktuatif, pada Tahun 2018 berada pada 0,316 dan menurun menjadi 0,251 pada Tahun 2022. Hal ini bermakna bahwa terjadi penurunan angka ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pesawaran, lebih lanjut indeks Gini Kabupaten Pesawaran lebih baik dengan capaian Provinsi Lampung (0,313) pada Tahun 2022 dan lebih baik dari capaian nasional (0,381).

Berdasarkan kondisi tersebut, pada 2024 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5±0,5%. Dengan berbagai kebijakan dan program-kegiatan yang ada serta dampak positif perekonomian provinsi dan nasional yang pertumbuhannya juga mengalami kenaikan maka diperkirakan pada 2024 pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%. Walau tidak mencapai target tapi sudah ada peningkatan yang cukup.

Berdasarkan dinamika perekonomian nasional dan Lampung yang cukup dipengaruhi oleh pandemi covid-19 dan arah kebijakan serta program-kegiatan pembangunan Pesawaran maka pada 2023 pertumbuhan ekonomi Pesawaran juga mengalami penyesuaian.

Mengingat belum adanya perhitungan riil pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 maka perkiraan capaian diatas menjadi dasar untuk menetapkan target 2024. Atas

pertimbangan dimana pertumbuhan ekonomi dan nasional yang masih dalam fase pemulihan pasca pandemi covid-19 maka Pesawaran juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2024 menyesuaikan dengan realitas yang ada sebesar $5 \pm 0,5\%$. Tentu saja hal ini memiliki dasar yaitu arah kebijakan dan program-kegiatan yang akan dijalankan. Potensi sumberdaya dan rencana pembangunan yang disusun serta pengaruh perekonomian Lampung dan nasional target ini akan tercapai. Paling tidak pertumbuhan ekonomi Pesawaran 2024 cukup baik.

b. Pertumbuhan Sektoral

Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar $5 \pm 0,5\%$ pada Tahun 2024 maka akan ditopang pertumbuhan secara sektoral. Sektor basis ekonomi di Kabupaten Pesawaran terdiri dari Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; dan Industri Pengolahan. Seiring dengan munculnya Pandemi Covid-19 pada akhir Tahun 2019 dan penetapan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan perkembangan ekonomi khususnya pada sektor basis yang secara umum mengalami pelambatan. Sektor ekonomi non basis yang menunjukkan pertumbuhan cukup baik yakni Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; dan Transportasi dan Pergudangan. Perlunya penetapan kebijakan strategis pada sektor basis dan sektor non basis yang tumbuh cukup baik menjadi perhatian penting dalam mewujudkan target capaian pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024.

Tabel 3.5 Pertumbuhan Sektoral PDRB Riil Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,19	0,07	-1,27	1,56
2	Pertambangan dan Penggalian	4,23	2,35	-0,03	1,87	-2,84
3	Industri Pengolahan	7,51	5,59	-4,77	6,90	2,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,58	7,62	7,23	4,49	6,18
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,58	6,48	5,18	8,39	1,20
6	Konstruksi	9,96	9,00	-2,18	1,59	7,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran	7,39	8,55	-4,87	5,63	10,52
8	Transportasi dan Pergudangan	6,74	10,46	-4,03	5,25	18,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,53	17,93	-3,81	0,28	14,51
10	Informasi dan Komunikasi	8,96	8,88	9,05	6,67	5,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04	3,59	2,78	0,91	-1,56
12	Real Estate	5,92	6,51	-2,29	1,32	7,59
13	Jasa Perusahaan	2,12	4,16	-2,15	2,04	14,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,06	5,11	3,84	2,45	-1,61
15	Jasa Pendidikan	9,49	10,03	3,85	3,32	2,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,88	7,04	9,26	5,12	0,01
17	Jasa Lainnya	7,96	12,78	-11,57	4,28	28,54
	Kabupaten Pesawaran	5,05	5,00	-1,26	2,08	4,55

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

c. Kebutuhan Investasi

Investasi yang dicerminkan PMTB menunjukkan perkembangan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan 6,52% per tahun selama periode tahun 2015-2019. Namun demikian, dampaknya pada perekonomian cenderung menurun. Hal ini tercermin pada ICOR (*incremental capital output ratio*), yaitu perbandingan antara tambahan kapital dengan tambahan output. Artinya, semakin tinggi ICOR semakin besar kebutuhan kapital untuk menghasilkan output yang sama. Dengan kata lain, semakin tinggi ICOR semakin tidak efisien investasi karena semakin mahal. Pada 2011-2013, ICOR Kabupaten Pesawaran menunjukkan penurunan.

Pada tahun 2011, ICOR Kabupaten Pesawaran sebesar 5,57 dan turun menjadi 4,95 pada 2013. Lalu pada tahun 2014 naik kembali menjadi 5,48 dan terus naik hingga mencapai 6,51 pada 2019. Ini mencerminkan investasi semakin mahal atau semakin tidak efisien. Atau bisa juga dipahami sebagai perubahan pada kegiatan padat modal. Kegiatan padat modal biasanya dicerminkan oleh sektor industri pengolahan. Melihat

perkembangan sektor industri pengolahan yang kontribusinya stabil pada kisaran 13-14%, sepertinya belum mengindikasikan adanya industrialisasi yang padat modal.

Harus ada upaya untuk menekan ICOR sehingga menarik bagi investor karena biaya modal yang tidak semakin mahal. Dengan semakin besar investasi maka akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dengan menciptakan lapangan kerja yang akan menciptakan permintaan barang dan jasa maupun menambah kebutuhan bahan baku yang menciptakan pasar faktor produksi. Perkembangan nilai ICOR Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2019 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.6 Perkembangan ICOR Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2019

No	Tahun	ICOR
1	2016	6,14
2	2017	6,25
3	2018	6,34
4	2019	6,51

d. Kemampuan Mengurangi Kemiskinan

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi bukan sekadar mengejar kenaikan PDRB, yang berarti akan menaikkan permintaan dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan. Tapi dengan naiknya PDRB diharapkan kemiskinan akan berkurang dan pengangguran juga berkurang. Capaian riil terakhir kemampuan menurunkan kemiskinan adalah 5.100 orang pada tahun 2022. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55% maka setiap satu persen pertumbuhan ekonomi akan mampu menurunkan penduduk miskin sebanyak 1.100 orang lebih, kemampuan ini merupakan yang terbesar dibandingkan tahun 2017 dimana satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 551 orang. Penurunan kemampuan menurunkan jumlah penduduk miskin pada 2021 salah satu faktornya adalah pandemi covid-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -1,26% yang berdampak pada peningkatan penduduk miskin menjadi 68.310 jiwa atau sebesar 15,11%. Dengan asumsi pertumbuhan penduduk 1,13% maka agar terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin maka target penduduk miskin harus dibawah 12,42%.

e. Ketenagakerjaan

Kemampuan perekonomian Kabupaten Pesawaran menyerap pekerja adalah 291 orang setiap 1% pertumbuhan ekonomi atau mampu menyediakan lapangan kerja sebanyak 1.459 orang pada tahun 2019. Dengan pengangguran sebanyak 9.607 orang pada 2019 berarti dibutuhkan 6,58 tahun untuk menyerap semua pengangguran, dengan asumsi tidak ada penambahan karena pertambahan angkatan kerja. Artinya, kapasitas perekonomian menyediakan lapangan kerja harus semakin besar agar pengangguran dapat diatasi.

Sedangkan kondisi menunjukkan kapasitas perekonomian semakin menurun dalam menyerap lapangan kerja. Pada 2018, 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 1.380 pekerja. Ada penurunan yang drastis dari tahun 2018 ke 2019. Kondisi terendah pada 2013 di mana 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap 181 pekerja. Selain kapasitas ekonomi, kondisi ini juga menunjukkan bahwa mobilitas penduduk umur bekerja sangat tinggi, yaitu antara sekolah dan mengurus rumah tangga atau bekerja. Pada saat perekonomian membaik banyak yang memilih menjadi menjadi ibu rumah tangga atau sekolah dan sebaliknya.

Peningkatan kapasitas perekonomian menyediakan lapangan kerja tidak harus mengejar setinggi-tingginya pertumbuhan ekonomi, tapi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Pertanian dan jasa adalah sektor yang banyak menyerap lapangan kerja. Pada 2022 yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 115.755 orang dan di sektor jasa sebanyak 89.980 orang.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi penduduk miskin maka persoalan ketenagakerjaan perlu mendapat prioritas. Dengan status bekerja, ada sebanyak 41.327 orang adalah pekerja keluarga/tidak dibayar. Dengan demikian tidak semua yang bekerja mendapat penghasilan. Belum lagi yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau setengah menganggur sehingga pendapatannya pun rendah.

Dengan fokus pada kedua masalah tersebut diharapkan produktivitas pekerja meningkat dan pertumbuhan ekonomi pun meningkat sekaligus menurunkan penduduk miskin. Produktivitas pekerja mencapai Rp 54,9 juta pada 2019, yang meningkat dari Rp 51,87 juta pada 2017 dan Rp 52,65 juta pada 2018.

Sedangkan pengangguran sendiri, lebih difokuskan pada lulusan SMA/SMK yang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai. Harus ada upaya sistematis untuk memberikan tambahan keterampilan (skill) dan penumbuhan jiwa kewirausahaan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau masuk dalam bursa kerja yang tersedia. Kemandirian juga perlu didorong pada pengangguran yang lulusan diploma/sarjana, karena jumlahnya juga cukup banyak. Sebagai lulusan diploma/sarjana sebenarnya sudah cukup bekal untuk masuk atau menciptakan lapangan kerja.

Kebijakan ekonomi daerah di Kabupaten Pesawaran diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya mengurangi kemiskinan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kabupaten Pesawaran yang kompetitif, sehingga dapat terbentuk daya saing daerah yang tangguh dan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh difokuskan pada peningkatan aspek kompetitif dari sektor-sektor unggulan yang meliputi pariwisata dan industri kreatif dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk lokal, tenaga kerja, maupun pemasaran ke luar daerah sehingga mampu bersaing di pasar. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur yang memadai serta adanya kawasan peruntukan industri menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Selain itu masyarakat diharapkan tidak hanya sebagai penonton tetapi juga menjadi bagian dari pelaku pasar.

Untuk Tahun 2024, perekonomian Pesawaran akan kembali pulih sejalan dengan pulihnya perekonomian nasional dan Provinsi Lampung dengan keberhasilan percepatan penanganan pasca pandemi covid-19 melalui berbagai langkah *refocusing* APBD yang diprioritaskan pada upaya peningkatan akses kesehatan masyarakat, jaringan pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi. Meskipun di triwulan awal tahun 2023 beberapa program pembangunan tetap akan berfokus pada pemulihan ekonomi daerah, seiring dengan menguatnya tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha maka Kabupaten Pesawaran akan memberikan ekspektasi positif baik secara regional sumatera maupun nasional sepanjang tahun 2023 hingga 2024.

Memahami kondisi tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, dengan berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN Tahun 2020-2024) dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung (RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2018-2023), serta memperhatikan Kondisi dan Arahana Perekonomian Nasional dan Provinsi Lampung, dilaksanakan untuk mendukung Tema Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yaitu "Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi serta Mengoptimalkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Mandiri" yang diimplementasikan kedalam Prioritas Pembangunan tahun 2024 yaitu:

- 1) Pemerataan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dan berkualitas.
- 2) Peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- 3) Peningkatan kualitas SDM yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul dan berdaya saing.
- 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkinerja tinggi.

- 5) Mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal.

Proyeksi perkembangan indikator ekonomi makro Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Makro Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5 ± 0,5
2	Nilai PDRB ADHB	Miliar	20.035,11
3	Nilai PDRB ADHK	Miliar	12.803,65
4	Inflasi	Persen	2 ± 0,5
5	PDRB ADHB per Kapita	Juta Rupiah per Kapita per Tahun	39,83
6	PDRB ADHK per Kapita	Juta Rupiah per Kapita per Tahun	25,18
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,74
		Orang	9.644
8	Penduduk Miskin	Persen	12,42
		Orang	65.761
9	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,00 - 71,00
	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,74 - 69,94
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,90 - 8,30
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,71 - 12,84
	Pengeluaran per Kapita	Rupiah per Kapita	8.492,00 - 9.718,06
10	Indeks Gini	Poin	0,251
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,41

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran telah memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas, juga berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

- 1) **Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**
Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.
- 2) **Disiplin Anggaran**
Adanya program yang telah disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh

- karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Keadilan Anggaran
Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
 - 4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia telah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, untuk itu maka dapat dirumuskan arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2024 meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran Pajak daerah dan Retribusi daerah :
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Kabupaten Pesawaran serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah akan melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan

- program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- m) Proyeksi pajak daerah untuk Tahun 2024 diasumsikan meningkat sekitar 12,00% dimana peningkatan proyeksi terbesar pada sektor pajak hiburan sebesar 1.261% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp36.720.000,00 menjadi Rp500.000.000,00 dan pajak hotel meningkat sebesar 493% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp134.771.042,60 menjadi Rp800.000.000,00 mengingat akan menggiatnya kembali ekonomi pariwisata dan beroperasinya hotel di kawasan pesisir. Selanjutnya pajak parkir diproyeksikan akan meningkat dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp340.584.343,00 menjadi Rp 600.000.000,00 sebagai dampak positif kegiatan pariwisata dan semakin optimalnya pemungutan jasa parkir. Untuk pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan masing-masing diproyeksikan meningkat sebesar 79,36% dari realisasi Rp278.767.139,00 menjadi Rp500.000.000,00 dan sebesar 83,88% dari realisasi Rp135.956.294,20 menjadi Rp250.000.000,00. Adapun untuk sektor pajak lainnya diproyeksi meningkat kurang dari 10%.
 - n) Proyeksi retribusi daerah pada Tahun 2024 diasumsikan meningkat 27,88% dari angka realisasi Rp3.054.372.585,00 menjadi 3.905.835.000,00. Angka proyeksi tersebut mengalami penurunan dari proyeksi retribusi daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp.6.973.607.500,00 mengingat beberapa sektor retribusi daerah seperti retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi izin trayek, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran serta sektor retribusi lainnya telah dihapus berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; Sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
 - f) Proyeksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk Tahun 2024 diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 13,09% dari angka realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.798.157.126,62 menjadi Rp2.000.000.000,00 pada sektor bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah :
- a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi :
 - (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (3) hasil kerja sama daerah;
 - (4) jasa giro;
 - (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (6) pendapatan bunga;
 - (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan

barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (11) pendapatan denda pajak daerah;
 - (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (14) pendapatan dari pengembalian;
 - (15) pendapatan dari BLUD; dan
 - (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Proyeksi lain-lain PAD yang sah diasumsikan pada Tahun 2024 meningkat 68,60% dari angka realisasi Tahun 2022 sebesar Rp40.509.033.874,30 menjadi Rp67.839.826.845,00. Proyeksi peningkatan terbesar berada pada sektor hasil kerjasama daerah yang akan meningkat 4.071,67% dari angka realisasi Tahun 2022 sebesar Rp119.856.000,00 menjadi Rp5.000.000.000,00 dengan pertimbangan sudah terlaksananya pemanfaatan transaksi platform digital sesuai dengan usulan Dinas Pariwisata. Selanjutnya sektor penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah yang diproyeksi meningkatkan sebesar Rp594,83% dari angka realisasi Tahun 2022 sebesar Rp964.879.358,13 menjadi Rp6.704.258.061,00 dengan pertimbangan terdapatnya potensi TPTGR yang belum diselesaikan. Sektor pendapatan BLUD juga diprediksi akan meningkat sebesar 72,07% dari angka realisasi Tahun 2022 sebesar Rp28.612.910.339,28 menjadi Rp49.233.934.784,00 dengan pertimbangan sesuai usulan unit kerja yang telah menerapkan BLUD. Adapun untuk sektor pendapatan hasil eksekusi atas jaminan juga akan mengalami peningkatan sebesar 62,06% dari angka realisasi Tahun 2022 sebesar 3.086.244.312,47 menjadi Rp5.001.634.000,00 dengan pertimbangan masih terdapatnya pihak ketiga yang tidak melakukan kewajiban sehingga dilakukan eksekusi atas jaminan yang diberikan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Intentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) :

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- d) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

- dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :
DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) :
DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2024.
 - 4) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) :
Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.
 - 5) Penganggaran Dana Desa (DD) :
Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

6) Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil:

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

7) Penganggaran Pendapatan Bantuan Keuangan :

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah akan menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah akan menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah akan menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3) Bonus Produksi Pengusahaan Panas Bumi

Sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

4) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota akan menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2023 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer, diperhitungkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2023 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2023 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;

2. Melakukan sinergi dengan pemerintah desa dalam rangka pemungutan pajak daerah melalui Layanan Mobil Keliling Pajak;
3. Pendayagunaan Aset Daerah;
4. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

Adapun hasil analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025 tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2025 (Rupiah)

Kode Rekening					Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	APBD 2023 (Rp)	Proyeksi APBD 2024 (Rp)	Proyeksi APBD 2025 (Rp)
4					PENDAPATAN DAERAH	1.236.502.482.314,95	1.222.558.571.198,16	1.304.842.516.841,00	1,231,403,589,072,00	1.245.095.039.789,05
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.674.500.723,95	82.092.045.212,16	168.693.322.616,00	115.145.661.845,00	121.198.236.687,25
4	1	1			Pajak Daerah	28.179.870.661,00	36.760.093.377,24	73.522.000.000,00	41.400.000.000,00	43.470.000.000,00
4	1	2			Retribusi Daerah	16.745.519.738,00	3.054.372.585,00	6.973.607.500,00	3.905.835.000,00	4.296.418.500,00
4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.798.157.126,62	1.768.545.375,60	4.457.888.271,00	2.000.000.000,00	2.200.000.000,00
4	1	4			Lain-lain PAD yang Sah	34.950.953.198,33	40.509.033.874,32	83.739.826.845,00	67.839.826.845,00	71.231.818.187,25
4	2				PENDAPATAN TRANSFER	1.082.462.221.860,00	1.128.935.236.714,00	1.134.336.287.406,00	1.115.412.690.408,00	1.119.051.566.282,80
4	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.017.457.193.625,00	1.048.614.556.005,00	1.040.558.769.912,00	1.042.635.172.912,00	1.042.635.172.912,00
4	2	1	1		Dana Perimbangan	860.849.797.625,00	897.709.336.405,00	903.130.174.912,00	905.206.577.912,00	905.206.577.912,00
4	2	1	1	1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	27.606.372.430,00	34.857.954.275,00	19.000.111.912,00	19.000.111.912,00	19.000.111.912,00
4	2	1	1	2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	611.838.446.000,00	609.487.647.000,00	634.676.295.000,00	634.676.295.000,00	634.676.295.000,00
4	2	1	1	3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	95.476.065.575,00	85.688.689.759,00	58.042.740.000,00	60.119.143.000,00	60.119.143.000,00
4	2	1	1	4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	125.928.913.620,00	167.675.045.371,00	191.411.028.000,00	191.411.028.000,00	191.411.028.000,00
4	2	1	2		Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	3		Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	4		Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	5		Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	6		Dana Desa	156.607.396.000,00	150.905.219.600,00	137.428.595.000,00	137.428.595.000,00	137.428.595.000,00
4	2	2			Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.005.028.235,00	80.320.680.709,00	93.777.517.494,00	72.777.517.496,00	76.416.393.370,80
4	2	2	1		Pendapatan Bagi Hasil	65.005.028.235,00	80.320.680.709,00	93.777.517.494,00	72.777.517.496,00	76.416.393.370,80

Kode Rekening					Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	APBD 2023 (Rp)	Proyeksi APBD 2024 (Rp)	Proyeksi APBD 2025 (Rp)
4	2	2	2		Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	72.365.759.731,00	11.531.289.272,00	1.812.906.819,00	845.236.819,00	845.236.819,00
4	3	1			Pendapatan Hibah	16.594.484.477,00	11.417.430.872,00	967.670.000,00	-	
4	3	2			Dana Darurat	0,00	-	-	-	
4	3	3			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	55.771.275.254,00	113.858.400,00	845.236.819,00	845.236.819,00	845.236.819,00

Sumber: Hasil Analisis, 2023 sesuai dengan tabel T-C.20 Permendagri 86 Tahun 2017

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Belanja Operasi
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Bunga;
 - d) Belanja Subsidi;
 - e) Belanja Hibah; dan
 - f) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a) Belanja Tanah;
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c) Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d) Belanja Jalan;
 - e) Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f) Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a) Belanja Bagi Hasil;
 - b) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga diharapkan dapat mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan APBD akan lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsure perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - 9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - 10) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).
 - 11) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.
- b) Belanja Bunga
Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c) Belanja Subsidi
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, perusahaan/lembaga penerima subsidi telah terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tariff yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah akan menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1) Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- 2) **Belanja Bantuan Sosial**
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) **Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah**
 - 1) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa akan diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- f) **Belanja Bantuan Keuangan**
 - 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan akan diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 3) Pemerintah kabupaten/kota akan menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut akan diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut akan diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 3) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

g) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

h) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 4) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun

2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- 8) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 9) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing OPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- 10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- 11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 13) Penganggaran belanja perjalanan dinas akan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya dirasionalkan sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
 - 14) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.
 - 15) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
 - 16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- i) Belanja Modal
- Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah akan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025 tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025 (Rupiah)

Kode Rekening					Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Perda APBD 2023 (Rp)	Proyeksi APBD 2024 (Rp)	Proyeksi APBD 2025 (Rp)
5					BELANJA DAERAH	1.230.497.757.291,40	1.263.091.522.281,00	1.329.442.516.841,00	1.188.603.589.072,00	1.240.095.039.789,05
5	1				BELANJA OPERASI	864.624.390.945,40	859.904.544.352,00	902.943.983.345,00	807.287.600.433,49	842.260.075.760,33
5	1	1			Belanja Pegawai	506.591.834.990,00	486.337.458.781,00	508.852.019.308,00	454.945.083.216,68	474.653.741.802,94
5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	326.556.786.705,40	356.229.702.809,00	371.605.180.037,00	332.237.945.691,15	346.630.813.055,99
5	1	3			Belanja Bunga	0,00	61.216.762,00	6.500.000.000,00	5.811.400.817,33	6.063.156.290,34
5	1	4			Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	5			Belanja Hibah	11.840.534.000,00	14.057.076.000,00	15.755.784.000,00	14.086.642.463,90	14.696.889.364,43
5	1	6			Belanja Bantuan Sosial	19.635.235.250,00	3.219.090.000,00	231.000.000,00	206.528.244,43	215.475.246,63
5	2				BELANJA MODAL	138.736.595.739,00	176.775.764.265,00	201.495.914.677,00	179.620.081.127,69	187.618.000.614,88
5	3				BELANJA TIDAK TERDUGA	3.661.687.700,00	291.360.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.001,00
5	4				BELANJA TRANSFER	223.475.082.907,00	226.119.853.664,00	220.002.618.819,00	196.695.907.510,82	205.216.963.412,85
5	4	1			Belanja Bagi Hasil	3.162.486.908,00	2.945.000.000,00	8.779.678.662,00	7.849.574.115,73	8.189.625.216,41
5	4	2			Belanja Bantuan Keuangan	220.312.595.999,00	223.174.853.664,00	211.222.940.157,00	188.846.333.395,08	197.027.338.196,44

Sumber: Hasil Analisis, 2022 seusai dengan tabel T-C.21 Permendagri 86 Tahun 2017 yang dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 diarahkan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
 - Pelampauan penerimaan PAD;
 - Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - Penghematan belanja;
 - Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
 Selanjutnya, SiLPA dimaksud akan diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2023.
- b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- d) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Pinjaman daerah dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:
 - Persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
 - Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - Kerangka acuan kegiatan;
 - RPJMD;
 - RKPD;
 - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - APBD tahun anggaran berjalan;
 - Rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan;

- Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
 - Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- e) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah akan dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- b) Pemerintah Daerah menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan

- daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- c) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.
 - d) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.
 - e) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
 - f) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- g) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- h) Jumlah pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nol.
- b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah akan memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Secara rinci, data historis realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2021-2025 disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025 (Rupiah)

Kode Rekening					Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Perda APBD 2023 (Rp)	Proyeksi APBD 2024 (Rp)	Proyeksi APBD 2025 (Rp)
6	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.948.919.697,05	49.696.717.517,81	61.800.000.000,00	0,00	0,00
6	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.948.919.697,05	14.981.874.117,81	19.000.000.000,00	-	-
6	1	2			Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
6	1	4			Penerimaan Pinjaman Daerah	-	34.714.843.400,00	42.800.000.000,00	-	-
6	1	5			Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	1	6			Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
6	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	37.200.000.000,00	42.800.000.000,00	1.000.000.000,00
6	2	1			Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	2	2			Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00
6	2	2	1		Penyertaan Modal Daerah BUMN	-	-	-	-	-
6	2	2	2		Penyertaan Modal Daerah BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00
6	2	3			Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	37.200.000.000,00	42.800.000.000,00	-
6	2	4			Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	2	5			Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2022 seusai dengan tabel T-C.22 Permendagri 86 Tahun 2017

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 bahwa RKPD Tahun 2024 bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berpedoman pada RPJPD Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen perencanaan Kabupaten Pesawaran menekankan pada pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan urusan unggulan serta penguatan sektor pertanian dan pariwisata menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Pesawaran.

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil analisa terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026, identifikasi isu strategis, permasalahan strategis di tingkat Provinsi Lampung dan Nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya juga memperhatikan apa yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2024. Disisi yang lain, penyusunan prioritas dan sasaran dalam RKPD Tahun 2024 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian upaya dalam merealisasikan visi dan misi menjadi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, merealisasikan hal yang abstrak menjadi konkret. Visi dan misi bermaksud untuk memberi gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah, secara rinci dituangkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024

Visi: “PESAWARAN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF”				
No	Misi	Tujuan	Indikator Sasaran	Target 2024
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	Predikat Sakip	67,50 (B)
			Indeks SPBE	2,91
			Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	2,96
			Opini BPK-RI	WTP
			Indeks Kepuasan Masyarakat	3,5
2	Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang	Terwujudnya Akses dan Konektivitas antar wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang	Tingkat aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	70,81%
			Indeks infrastruktur dasar	88,19%

Visi: “PESAWARAN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF”				
No	Misi	Tujuan	Indikator Sasaran	Target 2024
	Berkeadilan dan Merata	Berkeadilan dan Merata.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,77
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing	Terwujudnya kualitas dan akses pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang unggul dan berdaya saing	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,90 - 8,30
			Angka Harapan Lama Sekolah	12,71 - 12,48
			Angka harapan hidup	69,74 - 69,94
			Pengeluaran per Kapita (dalam Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	8.492,00 - 9.718,06
4	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan memperkuat Perekonomian Daerah	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	Nilai PDRB	12.803,65
			Persentase angka kemiskinan	12,42
			Tingkat pengangguran terbuka	3,74
			Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	287.786,16
5	Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika	Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	32,22%

4.1.1 Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Pesawaran

Pendekatan spasial dilakukan untuk menentukan lokus pembangunan yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran untuk memaksimalkan hasil pembangunan. Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Kebijakan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi Lampung di Kabupaten Pesawaran, sebagai berikut:

- 1. **Kawasan Strategis Nasional**
Kawasan strategis Nasional berupa kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan Komando Armada RI Kawasan Barat (KOARMABAR).
- 2. **Kawasan Strategis Provinsi**
Kawasan strategis Provinsi meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.
- 3. **Kawasan Strategis Kabupaten**
Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Gambar 4.1 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran



- 1) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi meliputi:
- a. Kawasan Industri Tegineneng
- Kawasan Industri Tegineneng yang merupakan salah satu kawasan industri untuk mendukung Metropolitan Bandar Lampung, lokasinya sangat strategis yaitu di penghujung rencana jalan bebas hambatan (jalan tol) Terbanggi Besar- Pematang Panggang, dimana salah satu pintu keluar tol tersebut berada di Tegineneng. Selain itu juga terdapat dilintasi oleh jalan kereta api yang menghubungkan beberapa kota di Provinsi Lampung.

Gambar 4.2 Rencana Tahapan Pengembangan Kawasan Industri Tegineneng



- b. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduh Pidada
- Kawasan Minapolitan; berbeda dengan kawasan agropolitan, kawasan minapolitan yaitu suatu konsep kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi. Dengan panjang garis pantai ± 160 km yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Selain itu juga terdapat beberapa sungai dan berair sepanjang tahun (antara lain; Sungai danlainnya) dimana sungai-sungai tersebut dapat dikembangkan sebagai areal perikanan darat. Kawasan minapolitan di Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada.
- c. Kawasan Agropolitan Gedong Tataan

Kawasan Agropolitan di Kecamatan Gedongtataan adalah sebagai kawasan terpadu pertanian lahan basah dan lahan kering, yang ditetapkan sebagai lokasi ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Berdasarkan kajian tipologi desa dalam kawasan agropolitan serta penentuan jenis komoditas unggulan, maka daerah pengembangan agribisnis adalah sebagai berikut;

1. Daerah Pengembangan Agribisnis (DPA) sebagai desa penghasil bahan baku berbasis tanaman perkebunan terutama tanaman kakao di Desa Way layap, Sungai Langka, Negeri sakti, Sukadadi, Kurungan Nyawa, Bogorejo, Pampangan, Cipadang, Padang ratu dan Taman Sari.
 2. DPA untuk bahan baku berbasis tanaman pangan dan hortikultura terutama tanaman padi, jagung, pisang, tomat dan jahe, berlokasi di Desa Padang ratu, Karang Anyar, Kutoarjo, Way Layap, Bogorejo dan Taman Sari.
 3. DPA untuk penghasil bahan baku berbasis peternakan terutama kambing, di Desa Sungai Langka, Bernung, Bogorejo dan Kebagusan.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
kawasan strategis pariwisata daerah, meliputi:
1. KSPD Teluk Pandan dan Marina Teluk Ratai;
 2. KSPD Pulau Pahawang dan Pulau-Pulau Sekitarnya;
 3. KSPD Padang Cermin, Way Ratai dan sekitarnya;
 4. KSPD Marga Punduh, Punduh Pidada dan sekitarnya;
 5. KSPD Gedong Tataan, Negeri Katon dan sekitarnya;dan
 6. KSPD Way Lima, Kedondong dan sekitarnya.
- e. Kawasan Perkotaan Gedong Tataan
Kawasan perkotaan Gedongtataan merupakan salah satu kota yang dipromosikan oleh Provinsi Lampung sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional serta fungsi lainnya. Lokasinya yang strategis di lintas Barat Pulau Sumatera menyebabkan Kota Gedongtataan akan berkembang pada masa mendatang.
- f. Kawasan energi panas bumi di Kecamatan Padang Cermin, dan Kecamatan Way Ratai.
- g. Kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Teluk Pandan.

Gambar 4.3 Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Teluk Pandan



- 2) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya
Kawasan strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya meliputi kawasan cagar budaya Bagelen, Kampung Tua Way Lima, Kampung Tua Pekon Ampai dan Pusat Kerajinan Tapis Negeri Katon. Kawasan Bagelen terletak di

Rencana pengembangan desa wisata kabupaten meliputi:

- a. 50 Desa Wisata
- b. 16 Desa Wisata Event
- c. 25 Desa Wisata Unggulan

Gambar 4.5 Peta Rencana Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Pesawaran



4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Prioritas Nasional Tahun 2024, yaitu :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisheury industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :
 - a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia

- berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f) Pengentasan kemiskinan; dan
 - g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :
- a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
 - b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
 - c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :
- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - c) Pembangunan Rendah Karbon.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 - c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola
 - d) keamanan siber;
 - e) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - f) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Adapun, sasaran makro pembangunan nasional Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Makro RKP 2024

No.	Indikator	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,0-5,7 %

No.	Indikator	Target 2024
3	Rasio Gini (Indeks)	0,374-0,377
4	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)	27,27%
5	Nilai Tukar Petani/NTP	105-108
6	Nilai Tukar Nelayan/NTN	110
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73-74
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5 %
9	Inflasi	3%

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Lampung telah pula menetapkan prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 yang bertema “Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Rakyat Lampung Berjaya” dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan;
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 3. Pembangunan infrastruktur;
- 4. Reformasi birokrasi;
- 5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya;
- 6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan bauran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perkonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah dan sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 di arahkan pada:

Tabel 4.3 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Indikator	Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0-5,5
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,9-10,4
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0-3,8
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,6-71,1
5	Rasio Gini	0,293-0,314
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	7,29
7	Nilai Tukar Petani	105-106

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024

A. Dasar Perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berpedoman pada RPJPD Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana

Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 disusun sebagai rangkaian perencanaan yang bersifat *holistik, integratif, tematik, dan spasial*. Holistik integratif diimplementasikan melalui keterkaitan OPD sebagai suatu sistem dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk melaksanakan prioritas pembangunan, termasuk dalam hal Percepatan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 sesuai dengan arahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, menjadi dasar dalam perumusan tema dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024. Adapun skenario dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan antisipasi apabila Covid-19 masih berlanjut hingga 2024 maka yang akan dilakukan adalah memprioritaskan program dan kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 dengan Fokus pemulihan ekonomi; kesehatan; dan *penyediaan jaring pengaman sosial*, serta Program-program mendesak lainnya di daerah, dan dukungan terhadap program strategis nasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- Pertama*, melakukan peningkatan pelayanan sistem pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata akibat dampak pandemi Covid-19.
- Kedua*, melakukan percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata sebagai salah satu fokus pembangunan untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19, serta melakukan pengembangan wilayah ekonomi sesuai tata ruang dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Ketiga*, melakukan peningkatan perekonomian Pesawaran yang kreatif dan berdaya saing pasca pandemi Covid-19.
- Keempat*, melakukan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
- Kelima*, melakukan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa pasca dampak pandemi Covid-19.

Dengan memperhatikan kondisi dan arahan serta rangkaian perencanaan yang bersifat *holistik, integratif, tematik, dan spasial*, maka Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 adalah:

“Penguatan Infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan mandiri”

Tabel 4.4 Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran

TEMA PEMBANGUNAN 2024		
NASIONAL	PROVINSI LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya	Penguatan Infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan mandiri

Arah kebijakan Makro Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, dalam rangka:
Menguatkan infrastruktur pelayanan dasar
a) Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman;

- b) Pemantapan jalan akses pada kawasan prioritas pariwisata dan agribisnis dalam kerangka sistem perhubungan dan transportasi termasuk membentuk Tim Reaksi Cepat (URC) untuk preservasi jalan;
- c) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mengurangi resiko bencana alam dan dampak perubahan iklim serta penanganan dan pengelolaan persampahan;
- d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan penatagunaan tanah untuk kepentingan pembangunan daerah.

Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

- a) Menyediakan sarana dan prasarana produksi dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan;
- b) Meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi daerah;
- c) Meningkatkan perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja;
- d) Pemulihan ekonomi mikro melalui pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Mewujudkan Kemandirian Desa dan Pengentasan Kemiskinan

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata;
- b) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas Pemerintahan Desa;
- c) Meningkatkan kemandirian masyarakat desa;
- d) Mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, ODF, dan ATM (Aids, Tuberkulosis, Malaria)

Tabel 4.5 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5 ± 0,5
2	Nilai PDRB ADHB	Miliar	20.035,11
3	Nilai PDRB ADHK	Miliar	12.803,65
4	Inflasi	Persen	2 ± 0,5
5	PDRB ADHB per Kapita	Juta Rupiah per Kapita per Tahun	39,83
6	PDRB ADHK per Kapita	Juta Rupiah per Kapita per Tahun	25,18
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,74
		Orang	9.644
8	Penduduk Miskin	Persen	12,42
		Orang	65.761
9	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,00 - 71,00
	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,74 - 69,94
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,90 - 8,30
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,71 - 12,84
	Pengeluaran per Kapita	Rupiah per Kapita	8.492,00 - 9.718,06
10	Indeks Gini	Poin	0,251
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,41

B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024

Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 5 (lima) tahunan (2020-2024). Dalam hal ini tentunya prinsip perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam konteks perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan maupun perencanaan pembangunan tahunan pada wilayah provinsi maupun kabupaten yang dalam hal ini adalah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Penentuan prioritas program pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, mengacu pada :

- 1. Arah pembangunan tahap terakhir RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025, yaitu diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program Pembangunan

tahap sebelumnya yang belum terselesaikan dengan penekanan kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian daerah;
 - b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal;
 - c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
 - f. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - g. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur
 - h. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum
 - i. Terwujudnya masyarakat yang religious
 - j. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya
 - k. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.
 - l. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal serta berkelanjutan.
 - m. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dengan kebijakan
 - n. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah
 - o. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 - p. Pembangunan politik lokal
 - q. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian alam
 - r. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran, antara lain :
- a. Bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pemerintahan
 - 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan kecepatan, kemudahan dan transparansi pelayanan administrasi pemerintahan.
 - 2) Pembuatan standar lama maksimal pembuatan dokumen kependudukan
 - 3) Kanalisasi aduan/keluhan warga dan pembuatan standar kecepatan serta ketepatan penanganan keluhan warga
 - 4) Evaluasi dan mekanisme pemberhentian kepala desa yang melanggar aturan dan dinilai tidak dapat melaksanakan amanah pembangunan desa
 - 5) Tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan pada setiap pelaksanaan reses dan juga disampaikan pada musrembangdes dan musrembangcam untuk dapat dilaksanakan oleh pihak eksekutif.
 - 6) Penataan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan keahlian, kecakapan dan profesionalitas kerja (*the right man on the right place*).
 - 7) Pembuatan sistem *e-performance* untuk mengukur kinerja ASN.
 - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada proses pelayanan pembuatan e-KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
 - b. Bidang Pendidikan
 - 1) Peningkatan Daya Dukung Sekolah
Dalam jangka waktu yang terukur melakukan:
 - Rehabilitasi sekolah kurang layak
 - Rehabilitasi sanitasi sekolah (toilet dan air bersih) untuk peningkatan kesehatan siswa
 - Penambahan ruang kelas terutama pada pendidikan menengah
 - Rehabilitasi dan membangun sarana pendukung pendidikan perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga di setiap tingkat pendidikan.
 - 2) Kualitas Pengajar
Secara terukur dan berkelanjutan melakukan:

- Melakukan pemerataan penempatan tenaga kependidikan (ASN) disemua tingkat pendidikan.
 - Peningkatan kompetensi guru/tenaga pendidikan melalui: pelatihan berkala di tingkat lokal dan nasional.
 - Memberikan keterampilan digital teaching dan digital learning.
 - Pengadaan alat-alat ajar seperti: alat peraga, buku ajar, internet sekolah.
 - Fasilitasi beasiswa bagi guru/tenaga pengajar berprestasi.
- 3) Kualitas Siswa
- Secara terukur dan berkelanjutan melakukan:
- Mendorong dan memotivasi putra putri Pesawaran untuk melanjutkan pendidikan tinggi , terutama jurusan eksakta atau jurusan yang masih langka dengan fasilitasi beasiswa ikatan dinas ataupun yang bukan ikatan dinas.
 - Fasilitasi sarana ibadah pada tiap tingkat pendidikan sebagai wujud terintegrasinya pembinaan kerohanian di lembaga pendidikan.
 - Penguatan program ekstrakurikuler berbasis peningkatan keterampilan siswa, seperti tourism hospitality, komputer dan elektronika
- c. Bidang Kesehatan
- 1) Sarana Dan Jaminan Kesehatan
- Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah dalam rangka peningkatan status menjadi tipe B
 - Pelayanan puskesmas 24 jam (yang betul-betul tidak lagi ada keluhan dari masyarakat atau pasien)
 - Pemberian jaminan atau asuransi kesehatan kepada masyarakat Pesawaran minimal keluarga miskin.
 - Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pesawaran.
- 2) Tenaga Kesehatan
- Mengupayakan penambahan jumlah tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, mantri kesehatan). Penambahan dapat dilakukan dengan meminta tambahan alokasi dokter PTT ke Kementerian Kesehatan
 - Beasiswa untuk dokter spesialis, terutama spesialis yang berkaitan dengan risiko kesehatan tertinggi warga Pesawaran (jantung, gigi, penyakit dalam, bedah, ibu dan anak) dan harus ditugaskan kembali ke Kabupaten Pesawaran
 - Peningkatan kompetensi bidan dan tenaga perawat Puskesmas. Hal ini untuk memperkuat fungsi rawat inap di Puskesmas.
- d. Bidang Ekonomi
- 1) Pengembangan Ekonomi Desa
- Mendorong peningkatan nilai tambah produk agrobisnis di tingkatan pedesaan.
 - Mendorong tumbuhnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri dengan menjamin tersedianya infrastruktur sarana infrastruktur yang baik menuju sentra agrobisnis yang dimaksud sebagai contoh sentra kakao di wilayah kedondong dan way khilau
 - Mendorong kolaborasi ekonomi antar desa melalui pengembangan kawasan perdesaan, seperti pasar antar desa, produk unggulan bersama dan badan usaha bersama.
 - Pengembangan sektor wisata berbasis pelibatan masyarakat desa. Mendorong dan merekayasa tumbuhnya industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi di daerah setempat/souvenir bagi wisatawan.
 - Menggandeng stakeholder nasional untuk memberikan dukungan kebijakan dan finansial untuk pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
- 2) Pengembangan Kawasan Industri
- Mengambil manfaat dari terbangunnya jalan tol lintas Sumatera dengan mempersiapkan kawasan industri terpadu di Kabupaten Pesawaran.
 - Melakukan kajian kelayakan sosial, ekonomi dan kultural untuk persiapan kawasan industri di Kabupaten Pesawaran
 - Pemetaan dan peningkatan promosi potensi ekonomi Pesawaran untuk menarik minat investor berkelas nasional dan internasional.

- Menggandeng stakeholder nasional untuk dukungan kebijakan pengembangan kawasan industri terpadu di Kabupaten Pesawaran
 - Kawasan industri tersebut dapat mendorong investasi yang menjadi wadah penampungan tenaga kerja bagi masyarakat tempatan.
 - Pembuatan kebijakan agar 60% tenaga kerja lokal direkrut pada perusahaan yang ada di kabupaten pesawaran.
- e. Bidang Infrastruktur
- Infrastruktur Dasar Dan Pendukung
- 1) Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar (transportasi, listrik, air bersih dan telekomunikasi khususnya di daerah sulit dan sangat sulit atau daerah yang terisolir
 - 2) Pembangunan jalan dan jembatan yang layak yang bisa dilalui oleh kendaraan bermotor kendaraan roda empat penyediaan alat berat pada UPTD
 - 3) Penempatan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada wilayah yang rawan banjir, longsor atau jalan tanah agar cepat dapat diatasi ketika terjadi bencana;
 - 4) Peningkatan akses infrastruktur dan sarana pendukung yang memadai akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk menggali potensi wisata secara maksimal.
 - 5) Perbaikan saluran irigasi dan pembangunan embung untuk kawasan pertanian
- f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- 1) Mendukung penemuan sumber daya alam baru.
 - 2) Mendukung eksplorasi sumber daya alam untuk penambahan penghasilan daerah. Sehingga jika ada pengurangan dana perimbangan dari pemerintah pusat, kabupaten pesawaran ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan Pesawaran.
- g. Agar program/kegiatan perencanaan pembangunan daerah terealisasi dengan optimal, maka pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak mendapat perhatian. Terutama mengenai pajak daerah, perlu pengelolaannya dilakukan oleh aparat pemerintah daerah secara profesional dan rasional.
- h. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, tugas DPRD adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, maka dalam pembangunan Kabupaten Pesawaran diharapkan bisa merata sampai ke pelosok-pelosok desa tetap menjadi perhatian oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- i. Sumber pendapatan daerah dari Dana Perimbangan yang perlu diperjuangkan dengan proaktif yaitu dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Umum, sehingga pembangunan di Kabupaten Pesawaran berhasil guna dan berdaya guna dan juga memperjuangkan dana yang bersumber dari APBN agar dapat diimplementasikan di Kabupaten Pesawaran semaksimal mungkin.
4. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Lampung dan Nasional;
 5. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2022 dan rencana target capaian Tahun 2023;
 6. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Secara substansial dalam konteks perencanaan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Pesawaran indikasi tema pembangunan Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memiliki **unsur-unsur utama** dalam tema tersebut, yaitu :

- (1) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas;
- (2) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif;
- (3) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing;
- (4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi;
- (5) Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Titik Berat Pembangunan berbasis

Kemasyarakatan dan Potensi Lokal.

Program Inovasi Kepala Daerah Periode 2021-2026 memiliki **35 Agenda Kerja** sebagai berikut:

1. Berobat Gratis di Seluruh Fasilitas Kesehatan bagi Seluruh Warga Pesawaran. **
2. Biaya Pendidikan (PAUD-TK, SD dan SMP) Gratis bagi Seluruh Warga Pesawaran. **
3. Penyediaan Dana Pendamping Kesehatan untuk Pasien Khusus. **
4. Peningkatan Program Bina Murid bagi Siswa Tidak Mampu dan Berprestasi.
5. “BERKAT” (Bedah Rumah Layak Sehat).
6. “BERKAH” (Beras Sedekah).
7. Penyediaan Perumahan yang Terjangkau dan Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. **
8. Penyediaan Perumahan bagi ASN, Guru Honor, Tenaga Kesehatan dan THLS (MoU dengan Perumnas). **
9. Peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, Insentif Guru Honor, Tenaga Kesehatan dan THLS.
10. Penambahan Insentif Kadus, RT, Guru Ngaji, Penjaga Makam, Majelis Taklim dan Kader Posyandu.
11. Penambahan Insentif Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Hansip Linmas.
12. Peningkatan Stimulus BUMDes melalui Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GADIS) dari 100 Juta perdesa menjadi 200 Juta perdesa.
13. Pengadaan Ambulance Desa. **
14. Peningkatan Jalan Lingkungan dari Onderlaagh menjadi Hotmix, Rigid dan Rabat Beton.
15. Membentuk Tim Reaksi Cepat (URC) dalam Pemeliharaan Jalan melalui Metode Pemberdayaan Masyarakat (Mandor dan Pekerja Jalan) dan Pemanfaatan IT. **
16. Pengaturan Air Irigasi Terintegrasi melalui Pamantauan Debit Air Menggunakan IT untuk Menjaga dan Mengamankan Jaringan Irigasi agar Selalu Berfungsi dengan Baik. **
17. Perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula dan Pompanisasi.
18. Penanganan Daerah Rawan Bencana melalui Normalisasi Sungai dan Pengendalian Banjir serta Penguatan Desa Tangguh Bencana.
19. Pembangunan Stadion dan Gelanggang Olah Raga (GOR) serta Stadion Mini di Setiap Kecamatan. **
20. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum dan Ruang Publik, Fasilitas Sosial Masyarakat serta Musium Tapis Alquran.
21. Peningkatan Produksi Pabrik Coklat Mini Kakao “KAHUT” dan Peningkatan Produksi Beras melalui kerjasama dengan BUMD PT. Aneka Usaha Laba Jaya.
22. Penambahan Fasilitas Kampung Tapis di Negeri Katon.
23. Pembinaan dan Peningkatan Daya Saing Pengrajin Souvenir Wisata.
24. Pembentukan Pesawaran Mart (P-MART) dan Bantuan Permodalan UMKM. **
25. Pengembangan Hortipark Pesawaran di Negeri Sakti.
26. Pembangunan Pasar di setiap Kecamatan.
27. Pengembangan Wisata Edukasi. **
28. Promosi Desa Digital dan Desa Wisata (“DEDI-DEWI”).
29. Pembangunan Kawasan Industri Pesawaran (KITARAN) di Tegineneng. **
30. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Teluk Pandan. **
31. Penyerapan 35.000 Tenaga Kerja Lokal Warga Kabupaten Pesawaran pada Kawasan Industri Pesawaran (KITARAN) di Tegineneng dengan Penghasilan diatas rata-rata Upah Minimum Regional (UMR). **
32. Penyerapan 10.000 Tenaga Kerja Lokal Warga Kabupaten Pesawaran pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Teluk Pandan dengan Penghasilan diatas rata-rata Upah Minimum Regional (UMR). **
33. “Sate Puan” yakni Satu Desa Satu Kelompok Usaha Perempuan. **
34. Pemberian Hak Pengelolaan Hutan kepada Petani Pengelola Hutan melalui Program Perhutanan Sosial.
35. Menjadikan Pesawaran sebagai Kabupaten Penghasil Garam.

Agenda pembangunan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 terkait dengan prioritas pembangunan diharapkan dapat memberikan *trigger* pertumbuhan ekonomi wilayah.

Prioritas Pembangunan Daerah kabupaten Pesawaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas

Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah, Pengembangan Perumahan dan Permukiman, serta Peningkatan Kesiapan Penanggulangan Bencana, diarahkan dalam rangka pemantapan dan peningkatan daya dukung, kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, dan persampahan), pengembangan kawasan permukiman dan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan daya dukung kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum, serta dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan penanggulangan bencana serta pemanfaatan tata ruang melalui penyesuaian dan pengendalian tata ruang. Fokus dalam Penanganan Dampak Covid-19 dengan melakukan program pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan melalui padat karya.

Prioritas ini akan diampu oleh Urusan:

- a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- c. Pertanahan
- d. Lingkungan Hidup
- e. Perhubungan

2. Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha Yang Kondusif

Percepatan Pembangunan sektor unggulan melalui peningkatan Iklim Investasi dan pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Energi Sumber Daya Mineral dan Destinasi Wisata. dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, serta dalam rangka program pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan Covid-19, seperti penetapan kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan kebijakan yang bersifat stimulus bagi dunia usaha UMKM dan Industri terdampak serta pemberian insentif ekonomi, Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan bagi Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia terdampak, serta penanganan dampak ekonomi lainnya.

Prioritas ini akan diampu oleh Urusan:

- a. Tenaga Kerja
- b. Kelautan dan Perikanan
- c. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- d. Pariwisata
- e. Penanaman Modal
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Pertanian
- i. Transmigrasi

3. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing

Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas sumber daya manusia, melalui akses dan kualitas pendidikan serta perwujudan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum dalam kehidupan sosial yang harmonis, serta pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Penanganan dan penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, ibu dan anak, serta Rencana aksi daerah pangan dan gizi, Fokus dalam Penanganan Dampak Covid-19 dengan melakukan program pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan Covid-19, seperti penyediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pemeriksaan laboratorium, dan penanganan kesehatan lainnya.

Prioritas ini akan diampu oleh Urusan :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Sosial

- d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- f. Perpustakaan
- g. Kepemudaan dan Olahraga

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi

Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Perangkat Daerah guna mewujudkan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah, peningkatan kualitas manajemen keuangan daerah, serta Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan politik lokal. Prioritas ini akan diampu oleh Urusan:

- a. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Kearsipan
- c. Komunikasi dan Informatika
- d. Persandian
- e. Statistik
- f. Pengawasan/Inspektorat
- g. Kewilayahan/Kecamatan
- h. Kepegawaian
- i. Kesatuan Bangsa dan Politik
- j. Keuangan
- k. Pendidikan dan Pelatihan
- l. Penelitian dan Pengembangan
- m. Perencanaan
- n. Sekretariat Daerah
- o. Sekretarian DPRD

5. Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal

Percepatan Perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri diarahkan demi terwujudnya percepatan pembangunan pada sektor unggulan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal, meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta koordinasi dan sinergitas yang lebih baik antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam berbasis Pertanian dan Perikanan guna mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal serta berkelanjutan, serta pemantapan pengembangan dan diversifikasi produk pertanian sejalan dengan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

Fokus dalam Penanganan Dampak Covid-19 dengan melakukan pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan dampak Ekonomi, seperti Pengadaan bahan pangan dan ketahanan pangan, serta Penyediaan Jaring Pengaman Sosial seperti bansos dan hibah individu/masyarakat terdampak atau memiliki resiko sosial seperti pekerja informal/harian, dan keluarga miskin.

Prioritas ini akan diampu oleh Urusan :

- a. Kebudayaan
- b. Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- c. Pangan
- d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan Nasional beserta Pagu per Prioritas

PRIORITAS NASIONAL	PAGU PRIORITAS NASIONAL (Rp)	PRIORITAS PROVINSI	PAGU PRIORITAS PROVINSI (Rp)	PRIORITAS KABUPATEN	PAGU PRIORITAS KABUPATEN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN BERKEADILAN	19.194.005.570,00	MENINGKATKAN INVESTASI DAN NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN	19.194.005.570,00	PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN BERUSAHA YANG KONDUSIF	3.439.869.570,00	1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2) Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				MEWUJUDKAN DESA MANDIRI SEBAGAI TITIK BERAT PEMBANGUNAN BERBASIS KEMASYARAKATAN DAN POTENSI LOKAL	15.754.136.000,00	1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi 2) Dinas Pariwisata 3) Dinas Perikanan 4) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 5) Dinas Perkebunan dan Peternakan 6) Dinas Ketahanan Pangan
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATpoAAN	32.738.998.000,00	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	45.549.270.800,00	PEMERATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKUALITAS	47.862.990.800,00	1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2) Dinas Perhubungan 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 5) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	12.810.272.800,00					
MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	2.313.720.000,00					

PRIORITAS NASIONAL	PAGU PRIORITAS NASIONAL (Rp)	PRIORITAS PROVINSI	PAGU PRIORITAS PROVINSI (Rp)	PRIORITAS KABUPATEN	PAGU PRIORITAS KABUPATEN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	198.578.306.379,00	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	198.127.506.379,00	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT JASMANI DAN ROHANI, CERDAS, UNGGUL DAN BERDAYA SAING	199.168.706.379,00	1) Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja 2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3) Dinas Perkebunan dan Peternakan 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5) Dinas Perpustakaan dan Arsip 6) Dinas Kesehatan 7) Dinas Sosial 8) Dinas PPPA dan PPKB 9) Dinas Pemuda dan Olahraga 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi 11) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	590.400.000,00	KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, AMAN DAN BERBUDAYA	1.041.200.000,00			
MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	922.377.886.323,00	REFORMASI BIROKRASI	922.377.886.323,00	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN LAYANAN PUBLIK YANG BERKINERJA TINGGI	922.377.886.323,00	1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 3) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 4) Dinas Perpustakaan dan Arsip 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6) Inspektorat 7) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8) Badan Pendapatan Daerah 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi 12) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 13) Sekretariat Daerah 14) Sekretariat DPRD 15) Kecamatan
JUMLAH	1.188.603.589.072,00		1.188.603.589.072,00		1.188.603.589.072,00	

4.3 SASARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN PESAWARAN

1. Bidang Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Pendidikan anak usia dini; usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- Pendidikan dasar; usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
- Pendidikan kesetaraan; usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

2. Bidang Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- pelayanan kesehatan ibu hamil;
- pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- pelayanan kesehatan balita;
- pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

3. Bidang Pekerjaan Umum

- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4. Bidang Perumahan Rakyat

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar dengan ketentuan :

- korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pelayanan informasi rawan bencana;
- pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar dengan ketentuan:

- yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan

- peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana,
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
- c. Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan
- f. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Target capaian SPM untuk tahun 2024 sebagaimana telah tercantum pada tabel dibawah ini.

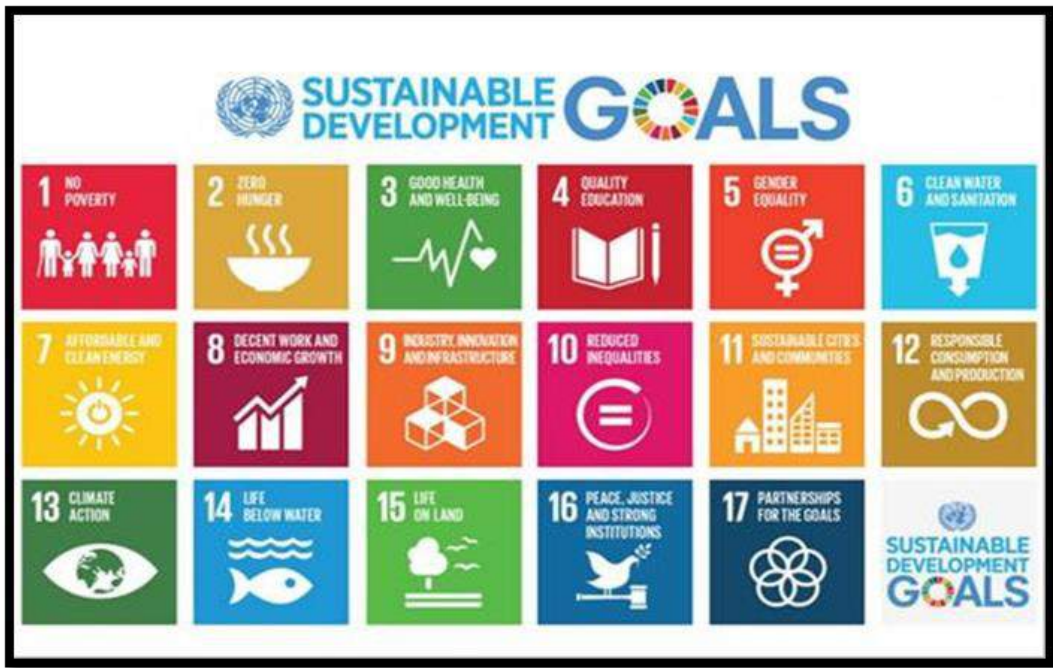
Tabel 4.7 Target capaian SPM Bidang Trantibumlinmas untuk Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan Akibat dari Penegakkan Hukum	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100
4	Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100
5	Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100

**4.4 SASARAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
(SDGS) KABUPATEN PESAWARAN**

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui *platform* agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDGs terdiri dari 17 tujuan pembangunan yang meliputi:

Gambar 4.6 17 Goals SDG's



TPB merupakan tantangan pembangunan di Kabupaten Pesawaran di mana pada tahun pada tahun 2030 cita-cita dari SDGs tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus dicapai. Ketujuh belas TPB tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan moderen bagi semua.
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara.
11. Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Mengkonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi

- desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
 17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Ketujuhbelas tujuan tersebut diuraikan ke dalam 169 target. Untuk memudahkan pemantauan, 17 tujuan dan 169 target TPB dikelompokkan ke dalam 4 pilar, sebagai berikut.

1. Pilar pembangunan sosial, meliputi tujuan ke-1, 2, 3, 4, dan 5.
2. Pilar pembangunan ekonomi meliputi tujuan ke-7, 8, 9, 10, dan 17.
3. Pilar pembangunan lingkungan meliputi tujuan ke-6, 11, 12, 13, 14, dan 15.
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola meliputi tujuan ke-16.

Adapun target TPB yang menjadi urusan Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2024 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8 Target TPB yang menjadi urusan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024

No	TPB	Indikator	Mencapai Target	Belum Mencapai Target	Perlu Pendataan	Perlu Peningkatan	Perlu Penurunan	Tdk Ada Data
1	Tanpa Kemiskinan	27	4	5	1	3	1	13
2	Tanpa Kelaparan	15	1	1	0	4	0	9
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	39	4	2	0	2	2	21
4	Pendidikan Berkualitas	11	2	4	0	1	0	4
5	Kesetaraan Gender	13	0	1	0	1	0	11
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	12	1	4	0	0	0	7
7	Menjamin Akses Energi	1	0	1	0	0	0	0
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	16	1	1	0	1	0	13
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	8	0	1	0	3	0	5
10	Mengurangi Kesenjangan	12	3	0	0	0	0	9
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	10	2	2	2	0	2	2
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	4	0	1	2	0	0	1
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	0	0	2	0	0	1
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	3	0	0	0	0	0	2
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	24	2	1	0	1	0	20
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	10	3	0	0	1	0	6
Total		208	23	24	7	17	5	124

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 208 indikator TPB di Kabupaten Pesawaran, terdapat 23 indikator yang telah mencapai target, 24 tujuan belum mencapai target, 7 indikator perlu pendataan, 17 indikator perlu peningkatan, 5 indikator perlu penurunan, dan 124 indikator lainnya tidak tersedia data (N/A).

Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan sosial antara lain di Kabupaten Pesawaran adalah; (a) proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, (b) persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, (c) prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, (d) persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, (e) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, (f) kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan, (g) proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, (h) cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (i) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, (j) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat, (k) rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun, (l) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan (m) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan ekonomi antara lain adalah; (a) rasio penggunaan gas rumah tangga, (b) PDB per kapita, (c) laju pertumbuhan PDB industri manufaktur, (d) jumlah Desa Mandiri, dan (e) proporsi individu yang menggunakan internet.

Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan lingkungan antara lain adalah; (a) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, (b) proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan, (c) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, (d) proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, (e) persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan, (f) persentase sampah perkotaan yang tertangani, dan (g) jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Selebihnya, selain keberhasilan mencapai target indikator dari masing-masing pilar pembangunan dalam TPB, masih banyaknya indikator yang tersedia datanya untuk dievaluasi (59,6%).

Pendekatan *Holistik Integratif* juga diimplementasikan melalui sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah sebagai satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah, dalam melaksanakan proses pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus melalui DAK Reguler dan DAK Penugasan. DAK Fisik Reguler diajukan dengan melihat permasalahan di daerah, Sedangkan DAK Penugasan diajukan untuk pembangunan yang mendukung prioritas nasional.

Berikut disajikan dalam tabel Gambaran Kesesuaian Pencapaian Target Indikator Makro, Gambaran Kesesuaian Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 dengan Sasaran dan Prioritas RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022, Konsistensi Target Program antara RPJMD dan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022, serta Gambaran kesesuaian pokok pikiran DPRD dengan sasaran dan prioritas pembangunan kabupaten Pesawaran.

Tabel 4.9 Gambaran Kesesuaian Pencapaian Target Indikator Makro

No	Indikator Makro Pembangunan	Target 2024		
		RKP Nasional	RKPD Provinsi Lampung	RKPD Kabupaten Pesawaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7%	5,0-5,5	5 \pm 0,5%
2	Inflasi (%)	3%	-	2 \pm 0,5%
3	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	-	-	39,83
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7%	4,0-3,8	3,74
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5%	10,9-10,4	12,42
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73-74	70,6-71,1	67,00-71,00
7	Indeks Gini	0,374-0,377	0,293-0,314	0,251
8	Nilai Tukar Petani	105-108	105-106	104,41
9	Nilai Tukar Nelayan	110	-	-

No	Indikator Makro Pembangunan	Target 2024		
		RKP Nasional	RKPD Provinsi Lampung	RKPD Kabupaten Pesawaran
9	Penurunan Emisi GRK (%) *menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)	27,27%	7,29%	-

Tabel 4.10 Gambaran Kesesuaian Arah Kebijakan RPJMD dengan Sasaran dan Prioritas RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024

No	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024	Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024
1	Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman	Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas dan fasilitas Wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata
2	Membentuk Tim Reaksi Cepat (URC) dalam Preservasi dan pembangunan jalan akses pada kawasan prioritas pariwisata dan agribisnis dan kemandapan sistem perhubungan dan transportasi	Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas dan fasilitas Wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata
3	Meningkatkan Pengaturan Air Irigasi Terintegrasi melalui Pamantauan Debit Air untuk Menjaga dan Mengamankan Jaringan Irigasi agar Selalu Berfungsi dengan Baik, serta Perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula	Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas dan fasilitas Wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata
4	Menyediakan Gedung Perkantoran, Stadion/Gelanggang Olah Raga (GOR), serta Fasilitas Publik	Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas dan fasilitas Wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata
5	Meningkatkan bedah rumah layak sehat dan lingkungan perumahan serta Perumahan yang terjangkau dan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas dan fasilitas Wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata
6	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan penatagunaan tanah untuk kepentingan pembangunan daerah	Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas	Meningkatnya kesesuaian tata ruang wilayah
7	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mengurangi resiko bencana alam dan dampak perubahan iklim	Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
8	Meningkatkan kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP serta meningkatkan promosi investasi dan kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti, serta menciptakan daya serap tenaga kerja	Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif.	Meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi daerah
9	Menyediakan Pasar di setiap Kecamatan, serta Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kelompok IKM.	Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif.	Meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi daerah
10	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dan kerjasama dengan BUMD PT. Aneka Usaha Laba Jaya.	Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif.	Meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi daerah
11	Memperluas kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja	Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
12	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar dengan upaya meningkatkan fasilitas pendidikan,	Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas,	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan

No	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPД Kabupaten Pesawaran Tahun 2024	Sasaran Pembangunan RKPД Kabupaten Pesawaran Tahun 2024
	pembinaan bagi siswa yang tidak mmpu dan berprestasi dan pembebasan beban biaya peserta didik	Unggul dan Berdaya Saing	pelayanan kesehatan yang merata
13	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing sampai ke tingkat desa dengan menyediakan Pengobatan Gratis di Seluruh Fasilitas Kesehatan bagi Seluruh Warga Pesawaran	Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
14	Meningkatkan upaya penurunan angka kematian ibu dan penurunan prevalensi stunting, serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif.	Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
15	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
16	Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan
17	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui penanganan fakir miskin/lansia	Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan
18	Menyediakan Dana Stimulus untuk Pengembangan BUMDes, dan memberikan sharing Pengadaan Ambulance Desa.	Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	Meningkatnya Kemandirian masyarakat desa
19	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Desa Tangguh Bencana serta ketentraman dan ketertiban umum	Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	Meningkatnya Kemandirian masyarakat desa
20	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	Meningkatnya Kemandirian masyarakat desa
21	Meningkatkan Destinasi Wisata Desa yang dikembangkan dengan promosi wisata yang tercatat pada kalender tahunan event Visit Kemilau Pesawaran	Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat desa
22	Meningkatkan pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat desa
23	Meningkatkan Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dan mewujudkan Pesawaran Mart (P-MART)	Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat desa
24	Meningkatkan sarana produksi dan penyuluhan dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perikanan	Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat desa

No	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024	Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024
		Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	
25	Meningkatkan perencanaan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas Pemerintahan
26	Percepatan penyediaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas Pemerintahan
27	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas Pemerintahan
28	Meningkatkan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi legeslasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
29	Meningkatkan penguatan sistem pengendalian intern, quality assurance dan konsultasi atas pelayanan keperintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
30	Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
31	Menyediakan LKPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
32	Menyediakan dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
33	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Tabel 4.11 Konsistensi Target Program antara RPJMD dan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi	PERENCANAAN	BAPPEDA	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100,00	Persen	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100,00	Persen
		PERENCANAAN	BAPPEDA	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100,00	Persen	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100,00	Persen
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BALITBANGDA	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi bidang inovasi yang ditindaklanjuti perangkat daerah	100,00	Persen	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi bidang inovasi yang ditindaklanjuti perangkat daerah	100,00	Persen
		BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DISKOMINFOT IKSAN	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	67,00	Poin	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	67,00	Poin
		BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DISKOMINFOT IKSAN	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Publik Berbasis SPBE	60,00	Persen	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Publik Berbasis SPBE	60,00	Persen
		BIDANG PERSANDIAN	DISKOMINFOT IKSAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Cakupan Pengamanan Layanan	60,00	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	Cakupan Pengamanan Layanan	60,00	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PENGAMANAN INFORMASI	Informasi Publik Berbasis SPBE			UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Informasi Publik Berbasis SPBE		
		BIDANG STATISTIK	DISKOMINFOT IKSAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data yang Akurat	60,00	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data yang Akurat	60,00	Persen
		BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	55,55	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	55,55	Persen
		KEPEGAWAIAN	BKPSDM	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	74,00	Poin	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	74,00	Poin
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BKPSDM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	24,85	Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	24,85	Persen
		INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung penguatan pengawasan internal)	100,00	Persen	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung penguatan pengawasan internal	100,00	Persen
		INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan	80,00	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan	80,00	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KEUANGAN	BPKAD dan BAPENDA	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	Opini	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	Opini
		KEUANGAN	BPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	-	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	-
		KEUANGAN	BAPENDA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	7,82	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	7,82	Persen
		SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Kabupaten	3,24	Poin	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Kabupaten	3,24	Poin
		SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	100,00	Persen	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	100,00	Persen
		BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan data base kependudukan	Ada	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan data base kependudukan	Ada	Persen
		BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100,00	Persen	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100,00	Persen
		KECAMATAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan	100,00	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan	100,00	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				DAN PELAYANAN PUBLIK	dan Pelayanan Publik			DAN PELAYANAN PUBLIK	dan Pelayanan Publik		
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi konflik yang tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya)	100,00	Persen	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi konflik yang tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya)	100,00	Persen
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik	100,00	Persen	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik	100,00	Persen
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Angka kriminalitas yang tertangani	0,0482	Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Angka kriminalitas yang tertangani	0,0482	Persen
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka konflik yang tertangani	100,00	Persen	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka konflik yang tertangani	100,00	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100,00	Persen	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100,00	Persen
		SELURUH PERANGKAT DAERAH	SELURUH PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100,00	Persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100,00	Persen
2	Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	91,11	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	91,11	Persen
		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	100,00	Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	100,00	Persen
		BIDANG PERHUBUNGAN	DISHUB	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas	21,33	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas	21,33	Persen
		BIDANG PERHUBUNGAN	DISHUB	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase orang/barang melalui dermaga per tahun	100,00	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase orang/barang melalui dermaga per tahun	100,00	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	86,00	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	86,00	Persen
		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83,83	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83,83	Persen
		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	86,00	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	86,00	Persen
		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata	100,00	Persen	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata	100,00	Persen
		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	41,10	Persen	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	41,10	Persen
		BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PRKP	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	1,40	Persen	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	1,40	Persen
		BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PRKP	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Rumah Layak Huni	0,77	Persen	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Rumah Layak Huni	0,77	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PRKP	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	52,91	Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	52,91	Persen
		BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PRKP	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	96,91	Persen	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	96,91	Persen
		BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERTANAHAN dan LH	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	Baik	Indeks	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	Baik	Indeks
		BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERTANAHAN dan LH	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Baik	Indeks	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Baik	Indeks
		BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERTANAHAN dan LH	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	1,08	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	1,08	Persen
		BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERTANAHAN dan LH	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase izin pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan;	100,00	Persen	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase izin pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan;	100,00	Persen
		BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERTANAHAN dan LH	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasi ya RPPLH dalam rencana	Ada	Dok	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasi ya RPPLH dalam rencana	Ada	Dok

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pembangunan Kabupaten				pembangunan Kabupaten		
		BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERTANAHAN dan LH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100,00	Persen	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100,00	Persen
		BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PUPR	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	100,00	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	100,00	Persen
		BIDANG PERTANAHAN	PRKP	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	100,00	Persen	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	100,00	Persen
		BIDANG PERTANAHAN	PRKP	PROGRAM PENYELESAIAN	Persentase sengketa pertanahan	100,00	Persen	PROGRAM PENYELESAIAN	Persentase sengketa pertanahan	100,00	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				SENGKETA TANAH GARAPAN	yang difasilitasi			SENGKETA TANAH GARAPAN	yang difasilitasi		
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing	BIDANG PENDIDIKAN	DISDIKBUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Fasilitas Pendidikan (TK/PAUD, SD, SMP)	97,35	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Fasilitas Pendidikan (TK/PAUD, SD, SMP)	97,35	Persen
		BIDANG PENDIDIKAN	DISDIKBUD	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	100,00	Persen	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	100,00	Persen
		BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN dan ARSIP	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,90	Rasio	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,90	Rasio
		BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu, per satuan penduduk	1,14	Rasio	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu, per satuan penduduk	1,14	Rasio
		BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	Persen	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	Persen
		BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	1,56	Rasio	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	1,56	Rasio

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa siaga aktif	84,90	Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa siaga aktif	84,90	Persen
		BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DISPORA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Cakupan pembinaan olah raga	100,00	Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Cakupan pembinaan olah raga	100,00	Persen
		BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DISPORA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100,00	Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100,00	Persen
		BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPA dan PPKB	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	95,27	Persen	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	95,27	Persen
		BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPA dan PPKB	PROGRAM PENGARUS UTAMAANGENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	35,50	Persen	PROGRAM PENGARUS UTAMAANGENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	35,50	Persen
		BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPA dan PPKB	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	100,00	Persen	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	100,00	Persen
		BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPA dan PPKB	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang	100,00	Persen	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang	100,00	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu				mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		
		BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPA dan PPKB	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (MANDATORY PEMERINTAH PUSAT 2023)	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100,00	Persen	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (MANDATORY PEMERINTAH PUSAT 2023)	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100,00	Persen
		BIDANG SOSIAL	DINSOS	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	69,47	Persen	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	69,47	Persen
		BIDANG SOSIAL	DINSOS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase wahana kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana	100,00	Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase wahana kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana	100,00	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		
		BIDANG SOSIAL	DINSOS	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100,00	Persen	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100,00	Persen
		BIDANG SOSIAL	DINSOS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	0,45	Persen	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	0,45	Persen
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PPKB	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	54,17	Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	54,17	Persen
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PPKB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	100,00	Persen	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	100,00	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk				pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk		
4	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan memperkuat Perekonomian Daerah	BIDANG PERTANIAN	TPH	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5,67	Ton/Ha	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5,67	Ton/Ha
		BIDANG PERTANIAN	DISBUNNAK	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit hewan	100,00	Persen	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit hewan	100,00	Persen
		BIDANG PERTANIAN	TPH dan DISBUNNAK	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	100,00	Persen	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	100,00	Persen
		BIDANG PERTANIAN	TPH dan DISBUNNAK	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	100,00	Persen	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	100,00	Persen
		BIDANG PERTANIAN	TPH dan DISBUNNAK	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan Kemampuan Penyuluhan	100,00	Persen	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan Kemampuan Penyuluhan	100,00	Persen
		BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan	81,03	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan	81,03	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan	100,00	Persen	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan	100,00	Persen
		BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	60,34	Persen	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	60,34	Persen
		BIDANG PERINDUSTRIAN	PERINDAG	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	100,00	Persen	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	100,00	Persen
		BIDANG PERDAGANGAN	PERINDAG	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang di revitalisasi	100,00	Persen	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang di revitalisasi	100,00	Persen
		BIDANG PERDAGANGAN	PERINDAG	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	43,29	Persen	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	43,29	Persen
		BIDANG PERDAGANGAN	PERINDAG	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina	100,00	Persen	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina	100,00	Persen
		BIDANG PARIWISATA	PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	100,00	Persen	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	100,00	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BIDANG PARIWISATA	PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	100,00	Persen	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	100,00	Persen
		BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	KOPERASI UMKM dan TENAGA KERJA	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Kecil.	82,01	Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Kecil.	82,01	Persen
		BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	KOPERASI UMKM dan TENAGA KERJA	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Jumlah UMKM yang mendapat Saprass	100,00	Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Jumlah UMKM yang mendapat Saprass	100,00	Persen
		BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	KOPERASI UMKM dan TENAGA KERJA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi	100,00	Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi	100,00	Persen
		BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	KOPERASI UMKM dan TENAGA KERJA	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	64,56	Persen	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	64,56	Persen
		BIDANG PARIWISATA	PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Kunjungan wisata	57,27	Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Kunjungan wisata	57,27	Persen
		BIDANG PARIWISATA	PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI	Persentase Jumlah Sub Sektor Ekonomi	100,00	Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI	Persentase Jumlah Sub Sektor Ekonomi	100,00	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kreatif yang dikembangkan			PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kreatif yang dikembangkan		
		BIDANG TENAGA KERJA	KOPERASI UMKM dan TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	45,48	Orang	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	45,48	Orang
		BIDANG TENAGA KERJA	KOPERASI UMKM dan TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan	100,00	Persen	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan	100,00	Persen
		BIDANG TRANSMIGRASI	PMD TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran lokal yang terlatih	100,00	Persen	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran lokal yang terlatih	100,00	Persen
		BIDANG PENANAMAN MODAL	PMPTSP	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	100,00	Persen	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP)	100,00	Persen
		BIDANG PENANAMAN MODAL	PMPTSP	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan peningkatan jumlah investor	455	Investor	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan peningkatan jumlah investor	455	Investor
		BIDANG PENANAMAN MODAL	PMPTSP	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kenaikan/Peurunan Nilai Realisasi PMDN (Jutaan rupiah)	3,45	Rupiah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kenaikan/Peurunan Nilai Realisasi PMDN (Jutaan rupiah)	3,45	Rupiah

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PMD TRANSMIGRASI	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Standar	100,00	Persen	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Standar	100,00	Persen
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PMD TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100,00	Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100,00	Persen
		BIDANG KEBUDAYAAN	DISDIKBUD	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11,00	kali	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11,00	kali
		BIDANG KEBUDAYAAN	DISDIKBUD	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100,00	Persen	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100,00	Persen
		BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	SATPOL PP DAMKAR	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100,00	Persen	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100,00	Persen

NO	MISI	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	RPJMD				RKPD			
				PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PERLINDUNGAN MASYARAKAT		PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
		BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATPOL PP DAMKAR	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan PERDA	100,00	Persen	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan PERDA	100,00	Persen
		BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00	Persen	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00	Persen
		BIDANG PANGAN	KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	7,67	Poin	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	7,67	Poin
		BIDANG PANGAN	KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita	60,34	Poin	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita	60,34	Poin
		BIDANG PANGAN	KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penguatan Candang Pangan	10,75	Ton	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penguatan Candang Pangan	10,75	Ton
		BIDANG PANGAN	KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	100,00	Persen	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	100,00	Persen

Tabel 4.12 Gambaran Kesesuaian Pokok Pikiran DPRD dengan Sasaran dan Prioritas dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pesawaran

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penguatan program ekstrakurikuler berbasis peningkatan keterampilan siswa, seperti tourism hospitality, komputer dan elektronika	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	20.000.000,00	DISDIKBUD
2	Memberikan keterampilan digital teaching dan digital learning	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	191.194.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3	Fasilitasi beasiswa bagi guru/tenaga pengajar berprestasi	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Fasilitas Pendidikan (TK/PAUD, SD, SMP)	118.686.336.247,00	DISDIKBUD
4	Peningkatan kompetensi guru/tenaga pendidikan melalui: pelatihan berkala di tingkat lokal dan nasional	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu, per satuan penduduk	406.572.000,00	DINAS KESEHATAN
5	Rehabilitasi sekolah kurang layak	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa siaga aktif	1.436.175.000,00	DINAS KESEHATAN
6	Penambahan ruang kelas terutama pada pendidikan menengah	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	6.409.000.000,00	DINAS KESEHATAN
7	Fasilitasi sarana ibadah pada tiap tingkat pendidikan sebagai wujud terintegrasinya	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien	60.374.136.932,00	DINAS KESEHATAN

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
	pembinaan kerohanian di lembaga pendidikan	Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	masyarakat miskin		
8	Rehabilitasi dan membangun sarana pendukung pendidikan perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga di setiap tingkat pendidikan	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olah raga	390.000.000,00	DISPORA
9	Rehabilitasi sanitasi sekolah (toilet dan air bersih) untuk peningkatan kesehatan siswa	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	680.000.000,00	DISPORA
10	Pengadaan alat-alat ajar seperti: alat peraga, buku ajar, internet sekolah	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	457.794.000,00	PPPA dan PPKB
11	Mendorong dan memotivasi putra putri Pesawaran untuk melanjutkan pendidikan tinggi , terutama jurusan eksakta atau jurusan yang masih langka dengan fasilitasi beasiswa ikatan dinas ataupun yang bukan ikatan dinas	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	6.740.050.000,00	PPPA dan PPKB
12	Melakukan pemerataan penempatan tenaga kependidikan (ASN) disemua tingkat pendidikan	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan Sosial	15.000.000,00	DINSOS

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing			untuk pemenuhan kebutuhan dasar		
13	Mengupayakan penambahan jumlah tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, mantri kesehatan). Penambahan dapat dilakukan dengan meminta tambahan alokasi dokter PTT ke Kementerian Kesehatan	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase wahana kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	230.000.000,00	DINSOS
14	Peningkatan kompetensi bidan dan tenaga perawat Puskesmas. Hal ini untuk memperkuat fungsi rawat inap di Puskesmas.	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	40.000.000,00	DINSOS
15	Pelayanan puskesmas 24 jam (yang betul-betul tidak lagi ada keluhan dari masyarakat atau pasien)	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	200.000.000,00	DINSOS
16	Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah dalam rangka peningkatan status menjadi tipe B	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	123.221.000,00	PPPA dan PPKB
17	Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk peningkatan kualitas	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	385.000.000,00	PPPA dan PPKB

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
	kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pesawaran	Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
18	Pemberian jaminan atau asuransi kesehatan kepada masyarakat Pesawaran minimal keluarga miskin	2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	138.756.800,00	PPPA dan PPKB
		2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	376.204.000,00	PPPA dan PPKB
19	Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar (air bersih khususnya di daerah sulit dan sangat sulit atau daerah yang terisolir)	3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	300.000.000,00	PUPR
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	700.000.000,00	PUPR
20	Penempatan UPTD Dinas Bina Marga pada wilayah yang rawan banjir, longsor atau jalan tanah agar cepat dapat diatasi ketika terjadi bencana	3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	32.340.998.000,00	PUPR

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar (transportasi khususnya di daerah sulit dan sangat sulit atau daerah yang terisolir)	3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas dan fasilitas Wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	32.340.998.000,00	PUPR
22	Pembangunan jalan dan jembatan yang layak yang bisa dilalui oleh kendaraan bermotor kendaraan roda empat penyediaan alat berat pada UPTD	3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	50.000.000,00	PUPR
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	131.000.000,00	DISHUB
23	Melakukan kajian kelayakan sosial, ekonomi dan kultural untuk persiapan kawasan industri di Kabupaten Pesawaran	3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan orang/barang melalui dermaga per tahun	217.000.000,00	DISHUB
24	Perbaikan saluran irigasi dan pembangunan embung untuk kawasan pertanian	3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	500.000.000,00	PUPR
25	Program Pemanfaatan Ruang	3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	500.000.000,00	PUPR
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata	1.000.000.000,00	PUPR
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah		PROGRAM PENATAAN	Persentase luasan permukiman	200.000.000,00	PUPR

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
		secara Berkelanjutan dan Berkualitas		BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	kumuh yang tertangani		
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	500.000.000,00	PRKP
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Rumah Layak Huni	350.000.000,00	PRKP
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	200.000.000,00	PRKP
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	1.850.000.000,00	PRKP
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas	Meningkatnya kesesuaian tata ruang wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	100.000.000,00	PUPR
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	30.000.000,00	PERTANAHAN dan LH
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	50.000.000,00	PERTANAHAN dan LH

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	45.000.000,00	PERTANAHAN dan LH
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	347.340.000,00	PERTANAHAN dan LH
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	1.018.380.000,00	PERTANAHAN dan LH
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase izin pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan;	50.000.000,00	PERTANAHAN dan LH
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten (Ada/Tidak Ada)	180.000.000,00	PERTANAHAN dan LH
		3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin	45.000.000,00	PERTANAHAN dan LH

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
					lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten		
26	Kawasan industri tersebut dapat mendorong investasi yang menjadi wadah penampungan tenaga kerja bagi masyarakat tempatan	4) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif	Meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi daerah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	448.700.000,00	DPMPPTSP
27	Mendukung eksplorasi sumber daya alam untuk penambahan penghasilan daerah. Sehingga jika ada pengurangan dana perimbangan dari pemerintah pusat, kabupaten pesawaran ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan Pesawaran	4) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif	Meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi daerah	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan peningkatan jumlah investor	61.443.270,00	DPMPPTSP
28	Pembuatan kebijakan agar 60% tenaga kerja lokal direkrut pada perusahaan yang ada di kabupaten pesawaran						
29	Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar (listrik khususnya di daerah sulit dan sangat sulit atau daerah yang terisolir)	4) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan peningkatan nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	68.745.000,00	DPMPPTSP
30	Mendorong peningkatan nilai tambah produk agrobisnis di tingkatan pedesaan.	4) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	1.252.955.000,00	PERINDAG

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Menggandeng stakeholder nasional untuk memberikan dukungan kebijakan dan finansial untuk pengembangan ekonomi kawasan perdesaan	4) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang di revitalisasi	162.000.000,00	PERINDAG
32	Menggandeng stakeholder nasional untuk dukungan kebijakan pengembangan kawasan industri terpadu di Kabupaten Pesawaran	4) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	70.500.000,00	PERINDAG
33	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri dengan menjamin tersedianya infrastruktur sarana infrastruktur yang baik menuju sentra agrobisnis yang dimaksud sebagai contoh sentra kakao di wilayah kedondong dan way khilau	4) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina	976.176.300,00	PERINDAG
		4) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	50.000.000,00	KOPERASI, UMKM, dan TENAGA KERJA
		4) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan	50.000.000,00	KOPERASI, UMKM, dan TENAGA KERJA
		4) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran lokal yang terlatih	10.000.000,00	PMD dan TRANSMIGRASI

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Pembuatan standar lama maksimal pembuatan dokumen kependudukan	1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas Pemerintahan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	600.000.000,00	BAPPEDA
35	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada proses pelayanan pembuatan e-KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga	1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	1.157.566.000,00	BAPPEDA
36	Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi khususnya di daerah sulit dan sangat sulit atau daerah yang terisolir)	1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	4.931.940.350,00	DISKOMINFOTIKSAN
37	Pengembalian batas lama antara Kelurahan Sukajaya Lempasing dengan Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung, mohon pihak Provinsi (Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah) untuk segera memfasilitasi batas lahan tersebut	1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan Telekomunikasi	2.278.332.450,00	DISKOMINFOTIKSAN
38	Mengupayakan agar Pesawaran tidak lagi berada dalam zona merah pelayanan publik dalam penilaian Ombudsman	1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan Pengamanan Informasi Daerah	9.638.000,00	DISKOMINFOTIKSAN
39	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dengan	1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Ketersediaan	71.500.000,00	DISKOMINFOTIKSAN

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
	mengedepankan kecepatan, kemudahan dan transparansi pelayanan administrasi pemerintahan	Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		STATISTIK SEKTORAL	Data yang Akurat dan Berkualitas		
40	Mendukung penemuan sumber daya alam baru	1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pegawai yang terlayani administrasi	733.668.000,00	BKPSDM
41	Evaluasi dan mekanisme pemberhentian kepala desa yang melanggar aturan dan dinilai tidak dapat melaksanakan amanah pembangunan desa	1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	870.923.501,00	BKPSDM
42	Kanalisis aduan/keluhan warga dan pembuatan standar kecepatan serta ketepatan penanganan keluhan warga	1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	96.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
43	Tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan pada setiap pelaksanaan reses dan juga disampaikan pada MUSREMBANGDES dan MUSREMBANGCAM untuk dapat dilaksanakan oleh pihak eksekutif	1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi	90.000.000,00	BALITBANGDA
44	Pembuatan sistem E-performance untuk mengukur kinerja ASN	1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	9.955.032.485,00	SEKRETARIAT DPRD
45	Beasiswa untuk dokter spesialis, terutama spesialis yang berkaitan dengan risiko kesehatan tertinggi warga	1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN	Persentase pemenuhan unsur SPIP	670.000.000,00	INSPEKTORAT

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pesawaran (jantung, gigi, penyakit dalam, bedah, ibu dan anak) dan harus ditugaskan kembali ke Kabupaten Pesawaran	Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
46	Penataan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan keahlian, kecakapan dan profesionalitas kerja (the right man on the right place)	1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan	3.080.000.000,00	INSPEKTORAT
		1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK	927.747.700,00	BPKAD & BAPENDA
		1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	259.383.139.695,00	BPKAD
		1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	1.160.921.300,00	BAPENDA
		1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Kabupaten	7.868.643.200,00	SEKRETARIS DAERAH
		1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	1.405.000.000,00	SEKRETARIS DAERAH

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan data base kependudukan	45.000.000,00	DISDUKCAPIL
		1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	15.000.000,00	DISDUKCAPIL
		1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	331.444.300,00	KECAMATAN
		1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi konflik yang tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya)	120.000.000,00	KESBANGPOL
		1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik	1.070.000.000,00	KESBANGPOL
		1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Angka kriminalitas yang tertangani	2.300.000.000,00	KESBANGPOL

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
		1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka konflik yang tertangani	740.200.000,00	KESBANGPOL
		1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	628.273.528.542,00	SELURUH PERANGKAT DAERAH
47	Mendorong kolaborasi ekonomi antar desa melalui pengembangan kawasan perdesaan, seperti pasar antar desa, produk unggulan bersama dan badan usaha bersama	5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	Meningkatnya Kemandirian masyarakat desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Standar	1.472.433.600,00	PMD dan TRANSMIGRASI
48	Pengembangan sektor wisata berbasis pelibatan masyarakat desa. Mendorong dan merekayasa tumbuhnya industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi di daerah setempat/souvenir bagi wisatawan	5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Pembangunan	10.000.000,00	PMD dan TRANSMIGRASI
49	Peningkatan akses infrastruktur dan sarana pendukung yang memadai akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk	5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	40.000.000,00	SATPOL PP DAMKAR

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
	menggali potensi wisata secara maksima			PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
50	Pemetaan dan peningkatan promosi potensi ekonomi Pesawaran untuk menarik minat investor berkelas nasional dan internasional.	5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan PERDA	50.000.000,00	SATPOL PP DAMKAR
51		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	408.000.000,00	BPBD
52		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	2.000.000.000,00	KETAHANAN PANGAN
53		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita	200.000.000,00	KETAHANAN PANGAN
54		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penguatan Candang Pangan	10.000.000,00	KETAHANAN PANGAN
55		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	10.000.000,00	KETAHANAN PANGAN

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kemasyarakatan dan Potensi Lokal			dan pangan olahan		
56		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat desa	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	705.457.000,00	PARIWISATA
57		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Kunjungan wisata	420.760.000,00	PARIWISATA
58		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	200.000.000,00	PARIWISATA
59		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	118.400.000,00	DISDIKBUD
60		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK 61 KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	25.000.000,00	PARIWISATA
61		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	Persentase Usaha Mikro Kecil.	175.000.000,00	KOPERASI, UMKM, dan TENAGA KERJA

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		USAHA MIKRO (UMKM)			
62		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Jumlah UMKM yang mendapat Saprass	163.300.000,00	KOPERASI, UMKM, dan TENAGA KERJA
63		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi	61.050.000,00	KOPERASI, UMKM, dan TENAGA KERJA
64		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	457.770.000,00	KOPERASI, UMKM, dan TENAGA KERJA
65		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	342.000.000,00	DISDIKBUD
66		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	45.000.000,00	DINAS TPH
67		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit hewan	643.235.000,00	DISBUNNAK

No.	Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berupa Daftar Permasalahan Pembangunan Daerah	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024		Program/Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Program	Pagu	Perangkat Daerah
		Prioritas	Sasaran	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8
68		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	7.860.000.000,00	DINAS TPH; DISBUNNAK
69		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	3.419.684.000,00	DINAS TPH; DISBUNNAK
70		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan Kemampuan Penyuluhan	646.500.000,00	DINAS TPH; DISBUNNAK
71		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
72		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan	90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
73		5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	105.000.000,00	DINAS PERIKANAN

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
BERDASARKAN PRIORITAS KABUPATEN TAHUN 2024

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 pada dasarnya merupakan program prioritas yang berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota, RPJMD Provinsi, dan program prioritas nasional dalam RKP; evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Elemen-elemen utama Program Prioritas memuat Kegiatan yang akan dilaksanakan, yang memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 bahwa Kabupaten Pesawaran tercantum dalam Kawasan pengembangan industri baru diluar pulau jawa yaitu Kawasan Industri Pesawaran (Tegineneng) yang akan dikembangkan dalam kerangka industrialisasi dengan dimanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, kerja sama regional, serta diversifikasi perekonomian daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 memuat kewenangan urusan sebagai berikut:

- 1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 - 1.1 Urusan Pendidikan
 - 1.2 Urusan Kesehatan
 - 1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - 1.6 Urusan Sosial
- 2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 - 2.1 Urusan Tenaga Kerja
 - 2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2.3 Urusan Pangan
 - 2.4 Urusan Pertanahan
 - 2.5 Urusan Lingkungan Hidup
 - 2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 2.9 Urusan Perhubungan
 - 2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika
 - 2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 2.12 Urusan Penanaman Modal
- 2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- 2.14 Urusan Statistik
- 2.15 Urusan Persandian
- 2.16 Urusan Kebudayaan
- 2.17 Urusan Perpustakaan
- 2.18 Urusan Kearsipan
- 3 URUSAN PILIHAN
 - 3.1. Urusan Perikanan dan Kelautan
 - 3.2 Urusan Pariwisata
 - 3.3 Urusan Pertanian
 - 3.4 Urusan Perdagangan
 - 3.5 Urusan Perindustrian
 - 3.6 Urusan Ketransmigrasian
- 4 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN*)
 - 4.1 Perencanaan
 - 4.2 Keuangan
 - 4.3 Kepegawaian dan Diklat
 - 4.4 Penelitian dan Pengembangan
 - 4.5 Pengawasan
 - 4.6 Kecamatan
- 5 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN*)
 - 5.1 Sekretariat DPRD
 - 5.2 Sekretariat Daerah
- 6 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*)
 - 6.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 5.1 Konsistensi Jumlah Dan Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD Tahun 2024

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH PROGRAM/ OUTCOME YANG KONSISTEN
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	2	2
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	4	4	4
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pertanian	8	8	8
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	4	4
5	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP dan BPBD	3	3	3
6	Sosial	Dinas Sosial	4	4	4
7	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	2	2
8	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	1
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	5	4
10	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	4	4	4
11	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	2	2
12	Lingkungan Hidup	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	6	6	6

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH PROGRAM/ OUTCOME YANG KONSISTEN
1	2	3	4	5	6
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	2
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Transmigrasi	2	2	2
15	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	2	2
16	Perhubungan	Dinas Perhubungan	2	2	2
17	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2	2	2
18	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	4	4	4
19	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	3	3
20	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2	2	2
21	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	1	1
22	Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	1	1
23	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	2	2
24	Perpustakaan	Dinas Arsipan dan Perpustakaan	1	1	1
25	Kearsipan	Dinas Arsipan dan Perpustakaan	1	1	1
26	Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan	3	3	3
27	Pariwisata	Dinas Pariwisata	4	4	4
28	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan	5	5	5
29	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	3	3
30	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	1
31	Perencanaan	Bappeda	2	2	2
32	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3	3	3
33	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah	1	1	1
34	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah	1	1	1
35	Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1	1	1
36	Inspektorat Daerah	Inspektorat	2	2	2
37	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	1	1	1
38	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	2	2	2
39	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	4
40	Kecamatan	Kecamatan	1	1	1
41	Seluruh Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	1	1	1
JUMLAH			104	105	104

Sumber : SIPD Kabupaten Pesawaran, 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026, terdapat 104 Program Pembangunan Pemerintah Daerah. Namun seiring berkembangnya dinamika kebijakan pemerintah, maka pada Tahun Perencanaan 2024 Pemerintah Kabupaten Pesawaran mendapatkan tugas khusus tambahan dari Pemerintah Pusat

untuk menyelenggarakan Program Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga jumlah Program yang akan dilaksanakan di seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada Tahun Perencanaan 2024 sebanyak 105 Program. Merujuk pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 Pasal 9 ayat (4) yang mengamanatkan bahwa dalam hal nomenklatur program pada RPJMD dan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur program pada RPJMD dan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah menjadi 105 program.

Adapun interkoneksi antara pendekatan prioritas, sasaran pembangunan dan Program Prioritas Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2 Interkoneksi Pendekatan Prioritas, Sasaran Pembangunan Tahun 2024

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD	PERANGKAT DAERAH
1	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN BERKEADILAN	1) PENINGKATAN NILAI TAMBAH, LAPANGAN KERJA, DAN INVESTASI DI SEKTOR RIIL, DAN INDUSTRIALISASI	MENINGKATKAN INVESTASI DAN NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN	PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN BERUSAHA YANG KONDUSIF	1) MENINGKATNYA NILAI INVESTASI 2) MENINGKATNYA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH 3) PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PMPTSP
		2) PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH (UMKM), DAN KOPERASI				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PMPTSP
		3) PENGUATAN PILAR PERTUMBUHAN DAN DAYA SAING EKONOMI				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PMPTSP
		4) PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	KOPERASI, UMKM dan TENAGA KERJA
		5) PENINGKATAN EKSPOR BERNILAI TAMBAH TINGGI DAN PENGUATAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN)				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	KOPERASI, UMKM dan TENAGA KERJA
		6) PENINGKATAN PENGELOLAAN KEMARITIMAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	KOPERASI, UMKM dan TENAGA KERJA
		7) PENINGKATAN KUALITAS/KETAHANAN AIR UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERINDAG
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERINDAG
						PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERINDAG
						PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERINDAG

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD	PERANGKAT DAERAH
				MEWUJUDKAN DESA MANDIRI SEBAGAI TITIK BERAT PEMBANGUNAN BERBASIS KEMASYARAKATAN DAN POTENSI LOKAL		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PMD dan TRANSMIGRASI
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PARIWISATA
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PARIWISATA
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PARIWISATA
						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PARIWISATA
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERIKANAN
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERIKANAN
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PERIKANAN
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS TPH
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DISBUNNAK
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS TPH; DISBUNNAK

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD	PERANGKAT DAERAH
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS TPH; DISBUNNAK
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	KETAHANAN PANGAN
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	KETAHANAN PANGAN
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	KETAHANAN PANGAN
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	KETAHANAN PANGAN
2	MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	PEMERATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKUALITAS	1) MENINGKATNYA AKSESIBILITAS ANTAR WILAYAH DAN SEKTOR STRATEGIS 2) MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PUPR
						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PUPR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DISHUB
3	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	1) INFRASTRUKTUR EKONOMI 2) INFRASTRUKTUR PERKOTAAN 3) INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR 4) TRANSFORMASI DIGITAL				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PUPR
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PUPR
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PUPR

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD	PERANGKAT DAERAH
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PUPR
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PUPR
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PRKP
						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PRKP
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PRKP
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PRKP
						PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFOTIKSAN
						PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFOTIKSAN
4	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	1) PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM 2) PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 3) PEMBANGUNAN RENDAH KARBON 4) PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN DAN MITIGASI BENCANA		MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DPLH
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DPLH
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DPLH
						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DPLH

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD	PERANGKAT DAERAH
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DPLH
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DPLH
						PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DPLH
						PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DPLH
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PUPR
						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
						PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATPOL PP DAMKAR
5	MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	1) PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING 2) PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT JASMANI DAN ROHANI, CERDAS, UNGGUL	1) MENINGKATNYA KUALITAS DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT 2) MENINGKATNYA STANDAR HIDUP	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	KOPERASI, UMKM dan TENAGA KERJA
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	KOPERASI, UMKM dan TENAGA KERJA
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	KOPERASI, UMKM dan TENAGA KERJA

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD	PERANGKAT DAERAH
		3) PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 4) PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL 5) PENGENTASAN KEMISKINAN 6) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENGUATAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN 7) PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN, DAN PEMUDA		DAN BERDAYA SAING	3) LAYAK MASYARAKAT MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN YANG MERATA	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS TPH; DISBUNNAK DISDIKBUD DISDIKBUD DINAS PERPUSTAKAAN dan ARSIP DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINSOS DINSOS DINSOS DINSOS PPPA dan PPKB

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD	PERANGKAT DAERAH
6	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	1) MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA,	KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, AMAN DAN BERBUDAYA			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	PPPA dan PPKB
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DISPORA
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DISPORA
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PPPA dan PPKB
						PROGRAM PENGARUS UTAMAANGENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PPPA dan PPKB
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PPPA dan PPKB
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PPPA dan PPKB
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PPPA dan PPKB
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PMD dan TRANSMIGRASI
						PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DISDIKBUD

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD	PERANGKAT DAERAH
		MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA 2) PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER 3) REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DISDIKBUD
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESBANGPOL
7	MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	1) REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA 2) KONSOLIDASI DEMOKRASI 3) MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL	REFORMASI BIROKRASI	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN LAYANAN PUBLIK YANG BERKINERJA TINGGI	1) MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, BERSIH DAN MELAYANI 2) MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DESA	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA
						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BALITBANG
						PROGRAM PENYELENGGARAAN	DISKOMINFOTIKSAN

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD	PERANGKAT DAERAH
						PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DISKOMINFOTIKSAN
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN dan ARSIP
						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD
						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
						PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	SASARAN PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM RKPD	PERANGKAT DAERAH
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KESBANGPOL
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KESBANGPOL
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESBANGPOL
						PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PMD dan TRANSMIGRASI
						PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP DAMKAR
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SELURUH PERANGKAT DAERAH

Sumber : SIPD Kabupaten Pesawaran, 2023

5.2 RENCANA PAGU INDIKATIF BELANJA

Penyusunan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyediaan Pagu Indikatif yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan total Pagu Belanja Program/Kegiatan Program/Kegiatan sebesar **Rp1.188.603.589.072,00** sebagai berikut:

- 1. Pagu indikatif belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan, uang representasi dan lainnya di-accres sebesar 2,5% dan secara akumulatif sebesar 30% dari total belanja dalam RKPD Tahun Anggaran 2024. Jumlah pagu anggaran untuk gaji dan tunjangan, uang representasi dan lainnya sebesar Rp373.643.542.455,00 atau 31,43% dari total belanja dalam RKPD Tahun Anggaran 2024.
- 2. Pagu indikatif belanja bidang pendidikan minimal sebesar 20%. Jumlah pagu anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp393.061.030.457,00 atau 33,07% dari total belanja daerah dalam RKPD Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.3 Pagu Indikatif Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Pagu (Rp)
1	Belanja pada Dinas Pendidikan	389.860.677.607,00
2	Belanja pada Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.200.352.850,00
	Anggaran Fungsi Pendidikan (1+2)	393.061.030.457,00
	Total Belanja Daerah	1.188.603.589.072,00
	Persentase Rasio Pagu Anggaran Fungsi Pendidikan	33,07%

Sumber : SIPD Kabupaten Pesawaran, 2023

Telah memenuhi pagu indikatif fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Pesawaran.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

- a) Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp389.860.677.607,00, antara lain diuraikan dalam:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp270.693.941.360,00.
 - Program Pengelolaan Pendidikan Sebesar Rp118.686.336.247,00.
 - Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Rp20.000.000,00.
 - Program Pengembangan Kesenian Tradisional Rp118.400.000,00.
 - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Rp342.000.000,00.
- b) Program pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp3.200.352.850,00, antara lain diuraikan dalam:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp2.912.658.450,00.

- Program Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp191.194.400,00.
 - Program Pengelolaan Arsip Rp96.500.000,00.
3. Pagu indikatif belanja bidang kesehatan minimal sebesar 10% dari belanja daerah setelah dikurangi belanja pegawai. Jumlah pagu anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp167.184.329.578,00 atau 20,51% dari total belanja daerah setelah dikurangi Gaji ASN sebesar Rp814.960.046.617,00 dalam RKPD Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.4 Pagu Indikatif Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Pagu (Rp)
1	Belanja pada Dinas Kesehatan	166.855.572.778,00
2	Belanja pada Dinas PPPA & PPKB	328.756.800,00
	Anggaran Fungsi Kesehatan (1+2)	167.184.329.578,00
	Total Belanja Daerah	1.188.603.589.072,00
	Gaji ASN	373.643.542.455,00
	Total Belanja dikurangi Gaji ASN	814.960.046.617,00
	Persentase Rasio Pagu Anggaran Fungsi Kesehatan	20,51%

Sumber : SIPD Kabupaten Pesawaran, 2023

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai ketentuan butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Pesawaran.

Pagu indikatif bidang kesehatan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

- a) Program pada Dinas Kesehatan sebesar Rp166.855.572.778,00, antara lain diuraikan dalam:
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp98.229.688.846,00.
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sebesar Rp60.374.136.932,00.
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sebesar Rp6.409.000.000,00.
 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Sebesar Rp406.572.000,00.
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Sebesar Rp 1.436.175.000,00.
- b) Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp328.756.800,00, antara lain diuraikan dalam:
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga pada Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp138.756.800,00.
 - Program Pemenuhan Hak Anak pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp60.000.000,00.
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana pada Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebesar Rp130.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mengalokasikan anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek pada anak baduta), penurunan *prevalensi kekurangan (under weight)* pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita.

4. Pagu indikatif belanja untuk infrastruktur pelayanan publik dialokasikan Rp178.922.608.300,00 atau sebesar 17,98% dari total dana transfer pemerintah diluar transfer ke daerah bawahan dan desa atau sebesar Rp995.226.672.176,92.

Tabel 5.5 Pagu Indikatif Fungsi Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	Pagu (Rp)
1	Belanja Daerah	1.188.603.589.072,00
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a. belanja bagi hasil	4.530.583.500,00
	• belanja bagi hasil pajak	4.140.000.000,00
	• belanja bagi hasil retribusi	390.583.500,00
	b. bantuan keuangan	188.846.333.395,08
	Jumlah (a+b)	193.376.916.895,08
3.	Selisih (1-2)	995.226.672.176,92
4.	Minimal belanja infrastruktur pelayanan publik (40% x Selisih)	398.090.668.870,77
5.	Belanja infrastruktur pelayanan publik yang dialokasikan	178.922.608.300,00
6.	Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik yang dialokasikan (5/3*100%)	17,98%

Sumber : SIPD Kabupaten Pesawaran, 2023

Belum memenuhi ketentuan 40% dari minimal belanja infrastruktur pelayanan publik, mengingat hal tersebut bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan : “Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027”.

5. Pagu indikatif anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran sebesar Rp14.266.163.674,00 atau 1,20% dari total belanja daerah dalam RKPD Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pesawaran sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah, antara lain tercantum pada:
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota sebesar Rp10.516.163.674,00.
 - b) Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp3.080.000.000,00.
 - c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Rp670.000.000,00.

Program tersebut dianggarkan untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- Kegiatan pengawasan, yaitu:
 - 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBPN, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
 - 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut

- perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
- 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Kepala Daerah, dan evaluasi pelayanan publik;
 - 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
- Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;
6. Pagu indikatif untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp5.745.050.777,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam RKPD Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, antara lain tercantum pada:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar Rp4.140.459.276,00.
 - b) Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp738.668.000,00.
 - c) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp870.923.501,00.
 7. Pagu indikatif belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa dalam RKPD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp4.140.000.000,00 atau 10% dari total Pendapatan Pajak Daerah, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
 8. Pagu indikatif belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa dalam RKPD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp390.583.500,00 atau 10% dari total Pendapatan Retribusi Daerah, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
 9. Pagu indikatif belanja alokasi dana desa (ADD) kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dalam RKPD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp65.367.640.691,20 atau 10% dari total Pendapatan Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), telah memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
 10. Pagu indikatif dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam RKPD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp21.726.236.432,00 atau 97,23% dari total pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp22.333.069.541,00, yang tercantum di Dinas Kesehatan pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,5% dari pendapatan pajak rokok.

- 11. Pagu indikatif dalam rangka penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam RKPD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp14.770.314.530,00 atau 1,24% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan telah memenuhi proporsi 0,99% dari amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
- 12. Pagu indikatif Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24% sebesar Rp2.852.648.613,77 dan Jaminan Kematian (JKM) dengan tarif 0,72% sebesar Rp8.557.945.841,32 yang dikalikan gaji pokok yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- 13. Pagu indikatif dalam rangka penyediaan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp23.040.000.000,00 atau sebanyak 60% dari total Dana Hibah Pilkada sebesar Rp38.400.000.000,00, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan terakomodir dalam RKPD Tahun Anggaran 2024.

Pagu Indikatif Belanja Program/Kegiatan sebesar Rp1.188.603.589.072,00 yang dilaksanakan oleh 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Tabel 5.6 Rencana Pagu Indikatif Belanja Per Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	OPD	PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	389.860.677.607,00
2a	DINAS KESEHATAN	86.323.086.994,00
2b	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	40.162.491.000,00
2c	PUSKESMAS	40.369.994.784,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43.014.705.310,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	7.096.706.120,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	14.641.645.590,00
6	DINAS SOSIAL	3.690.150.344,00
7	DINAS KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	4.244.449.226,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.336.462.890,00
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.342.004.276,00
10	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5.164.068.564,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.051.642.984,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.762.215.198,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	9.182.772.120,00
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	12.143.682.930,00
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.128.755.818,00
16	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.656.046.930,00
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.200.352.850,00
18	DINAS PERIKANAN	3.652.053.772,00

NO	OPD	PAGU
19	DINAS PARIWISATA	5.005.254.770,00
20	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	22.758.995.366,00
21	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	6.081.449.208,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.673.588.050,00
23	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	48.848.400.799,00
24	SEKRETARIAT DPRD	37.501.937.685,00
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.215.131.820,00
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.551.671.330,00
27	KECAMATAN GEDONG TATAAN	1.937.566.008,00
28	KECAMATAN NEGERI KATON	1.707.780.622,00
29	KECAMATAN TEGINENENG	1.769.981.980,00
30	KECAMATAN WAY LIMA	1.639.406.944,00
31	KECAMATAN PADANG CERMIN	1.617.961.384,00
32	KECAMATAN PUNDUH PEDADA	1.432.971.018,00
33	KECAMATAN KEDONDONG	1.698.045.890,00
34	KECAMATAN MARGA PUNDUH	1.562.371.508,00
35	KECAMATAN WAY KHILAU	1.492.818.001,00
36	KECAMATAN TELUK PANDAN	1.565.248.624,00
37	KECAMATAN WAY RATAI	1.393.057.202,00
38	INSPEKTORAT	14.266.163.674,00
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.401.222.600,00
40	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	296.758.504.109,00
41	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.362.801.278,00
42	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.745.050.777,00
43	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.592.243.118,00
JUMLAH		1.188.603.589.072,00

Sumber : SIPD Kabupaten Pesawaran, 2023

Sedangkan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dijabarkan pada Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana dibawah ini.

Tabel 5.7 Rekapitulasi Daftar Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)			PERANGKAT DAERAH
				TARGET	SATUAN	ANGGARAN	
1	BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN > SPM	Persentase Fasilitas Pendidikan (TK/PAUD, SD, SMP)	97,35	Persen	118.686.336.247,00	DISDIKBUD
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	100,00	Persen	20.000.000,00	
2	BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu, per satuan penduduk	1,14	Rasio	406.572.000,00	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	Persen	60.374.136.932,00	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	1,56	Rasio	6.409.000.000,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa siaga aktif	84,90	Persen	1.436.175.000,00	
3	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	91,11	Persen	32.340.998.000,00	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	100,00	Persen	50.000.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	86,00	Persen	500.000.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83,83	Persen	300.000.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	86,00	Persen	700.000.000,00	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata	100,00	Persen	1.000.000.000,00	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	41,10	Persen	200.000.000,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	100,00	Persen	100.000.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)			PERANGKAT DAERAH
				TARGET	SATUAN	ANGGARAN	
4	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	1,40	Persen	500.000.000,00	DINAS PRKP
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Rumah Layak Huni	0,77	Persen	350.000.000,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	52,91	Persen	200.000.000,00	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	96,91	Persen	1.850.000.000,00	
5	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100,00	Persen	40.000.000,00	SATPOL PP DAMKAR
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan PERDA	100,00	Persen	50.000.000,00	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00	Persen	408.000.000,00	BPBD
6	BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	69,47	Persen	15.000.000,00	DINSOS
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase wahana kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100,00	Persen	230.000.000,00	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100,00	Persen	40.000.000,00	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	0,45	Persen	200.000.000,00	
7	BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	45,48	Orang	50.000.000,00	DINAS KOPUMKM DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan	100,00	Persen	50.000.000,00	
8	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan	81,03	Persen	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan	100,00	Persen	90.000.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)			PERANGKAT DAERAH
				TARGET	SATUAN	ANGGARAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	60,34	Persen	105.000.000,00	
9	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Kecil	82,01	Persen	175.000.000,00	DINAS KOPUMKM DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Jumlah UMKM yang mendapat Sapras	100,00	Persen	163.300.000,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi	100,00	Persen	61.050.000,00	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	64,56	Persen	457.770.000,00	
10	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan data base kependudukan	Ada	Persen	45.000.000,00	DISDUKCAPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100,00	Persen	15.000.000,00	
11	BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	55,55	Persen	96.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
12	BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11,00	kali	118.400.000,00	DISDIKBUD
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100,00	Persen	342.000.000,00	
13	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olah raga	100,00	Persen	390.000.000,00	DISPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100,00	Persen	680.000.000,00	
14	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	67,00	Poin	4.931.940.350,00	DISKOMINFOTIKSAN
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Publik Berbasis SPBE	60,00	Persen	2.278.332.450,00	
15	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	52,90 (IKA)	Indeks	45.000.000,00	DPLH

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)			PERANGKAT DAERAH
				TARGET	SATUAN	ANGGARAN	
				88,43 (IKU)			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	36,85	Indeks	347.340.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	1,08	Persen	1.018.380.000,00	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase izin pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan;	100,00	Persen	50.000.000,00	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten	Ada	Dok	180.000.000,00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100,00	Persen	45.000.000,00	
16	BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	7,67	Poin	2.000.000.000,00	KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita	60,34	Poin	200.000.000,00	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penguatan Candang Pangan	10,75	Ton	10.000.000,00	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	100,00	Persen	10.000.000,00	
17	BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	100,00	Persen	705.457.000,00	PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	100,00	Persen	200.000.000,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Kunjungan wisata	57,27	Persen	420.760.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)			PERANGKAT DAERAH
				TARGET	SATUAN	ANGGARAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	100,00	Persen	25.000.000,00	
18	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Standar	100,00	Persen	1.472.433.600,00	PMD TRANS
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100,00	Persen	10.000.000,00	
19	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	95,27	Persen	138.756.800,00	PPPA & PPKB
		PROGRAM PENGARUS UTAMAANGENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	35,50	Persen	385.000.000,00	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	100,00	Persen	123.221.000,00	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100,00	Persen	376.204.000,00	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100,00	Persen	74.596.000,00	
20	BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	100,00	Persen	448.700.000,00	PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan peningkatan jumlah investor	455,00	Investor	61.443.270,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Jutaan rupiah)	3,45	Rupiah	68.745.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)			PERANGKAT DAERAH
				TARGET	SATUAN	ANGGARAN	
21	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	54,17	Persen	457.794.000,00	PPPA & PPKB
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100,00	Persen	6.740.050.000,00	
22	BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang di revitalisasi	100,00	Persen	162.000.000,00	DISPERINDAG
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	43,29	Persen	70.500.000,00	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Dibina	100,00	Persen	976.176.300,00	
23	BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas	21,33	Persen	131.000.000,00	DISHUB
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase orang/barang melalui dermaga per tahun	100,00	Persen	217.000.000,00	
24	BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	100,00	Persen	1.252.955.000,00	DISPERINDAG
25	BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,90	Rasio	191.194.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
26	BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan Pengamanan Layanan Informasi Publik Berbasis SPBE	60,00	Persen	9.638.000,00	DISKOMINFOTIKSAN
27	BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase (Jumlah bidang) pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	100,00	Persen	30.000.000,00	DPLH
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	100,00	Persen	50.000.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)			PERANGKAT DAERAH
				TARGET	SATUAN	ANGGARAN	
28	BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5,67	Ton/Ha	45.000.000,00	DINAS TPH
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit hewan	100,00	Persen	643.235.000,00	DISBUNNAK
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	100,00	Persen	7.860.000.000,00	DINAS TPH dan DISBUNNAK
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	100,00	Persen	3.419.684.000,00	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan Kemampuan Penyuluhan	100,00	Persen	646.500.000,00	
29	BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data yang Akurat	60,00	Persen	71.500.000,00	DISKOMINFOTIKSAN
30	BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran lokal yang terlatih	100,00	Persen	10.000.000,00	PMD TRANS
31	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung penguatan pengawasan internal	100,00	Persen	670.000.000,00	INSPEKTORAT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti berdasarkan aspek pemeriksaan	80,00	Persen	3.080.000.000,00	
32	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	74,00	Poin	738.668.000,00	BKPSDM
33	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi konflik yang tidak menjadi konflik Lingkup (Sosial Politik, ekonomi dan Budaya)	100,00	Persen	120.000.000,00	KESBANGPOL
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik	100,00	Persen	1.070.000.000,00	

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)			PERANGKAT DAERAH
				TARGET	SATUAN	ANGGARAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Angka kriminalitas yang tertangani	0,0482	Persen	2.300.000.000,00	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka konflik yang tertangani	100,00	Persen	740.200.000,00	
34	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	Opini	927.747.700,00	BPKAD
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	-	259.383.139.695,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	7,82	Persen	1.160.921.300,00	BAPENDA
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	24,85	Persen	870.923.501,00	BKPSDM
36	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi bidang inovasi yang ditindaklanjuti perangkat daerah	100,00	Persen	90.000.000,00	BALITBANG
37	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100,00	Persen	600.000.000,00	BAPPEDA
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100,00	Persen	1.157.566.000,00	
38	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Kabupaten	3,24	Poin	7.868.643.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	100,00	Persen	1.405.000.000,00	
39	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100,00	Persen	9.955.032.485,00	SEKRETARIAT DPRD
40	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100,00	Persen	331.444.300,00	KECAMATAN
41	SELURUH PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100,00	Persen	628.273.528.542,00	SELURUH PERANGKAT DAERAH
	JUMLAH					1.188.603.589.072,00	

Tabel 5.8 Rekapitulasi Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Tahun 2024

BIDANG URUSAN	PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	6.953.200.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	222.632.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	330.000.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	47.479.367,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5.000.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.515.300.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	26.141.100.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.091.187.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.621.000.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	896.217.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	856.959.000,00

BIDANG URUSAN	PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	559.905.600,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	391.608.400,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	218.026.800,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	30.000.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	16.712.080,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5.000.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.737.077.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.464.900.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.093.000.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	310.000.000,00

BIDANG URUSAN	PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	149.648.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	125.000.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	10.000.000,00
PENDIDIKAN	PENDIDIKAN KESETARAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1.319.900.000,00
KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.056.313.000,00
KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	748.435.000,00
KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	129.248.000,00
KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.011.716.000,00
KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.044.975.000,00

BIDANG URUSAN	PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.137.956.000,00
KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	936.050.000,00
KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	49.250.000,00
KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	147.935.000,00
KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	245.650.000,00
KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	287.540.000,00
KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	534.667.500,00

BIDANG URUSAN	PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
KESEHATAN	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	475.049.250,00
KESEHATAN	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	33.700.000,00
KESEHATAN	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	776.228.750,00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	350.000.000,00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	350.000.000,00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200.000.000
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000

BIDANG URUSAN	PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100.000.000
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	11.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	20.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00

BIDANG URUSAN	PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
PERLINDUNGAN MASYARAKAT			(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	10.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	220.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	30.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi	10.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	10.000.000,00

BIDANG URUSAN	PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
PERLINDUNGAN MASYARAKAT	EVAKUASI KORBAN BENCANA				
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	108.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	15.000.000,00
SOSIAL	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	160.000.000
SOSIAL	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	40.000.000

BIDANG URUSAN	PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
SOSIAL	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	40.000.000
JUMLAH					118.599.565.747,00

Tabel 5.9 Rekapitulasi Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung SPM Tahun 2024

BIDANG URUSAN	PELAYANAN DASAR YANG DITUNJANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
TENAGA KERJA	PENDIDIKAN	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	25.000.000,00
TENAGA KERJA	PENDIDIKAN	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000,00
PARIWISATA	PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Pengembangan Pendidikan	25.000.000,00
PARIWISATA	PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	420.760.000,00
PERIKANAN	PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	105.000.000,00

BIDANG URUSAN	PELAYANAN DASAR YANG DITUNJANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Kabupaten/Kota		
PERIKANAN	PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KESEHATAN	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	10.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KESEHATAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkornisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	30.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KESEHATAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkornisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas dan Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	15.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KESEHATAN	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	30.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KESEHATAN	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkornisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	20.000.000,00

BIDANG URUSAN	PELAYANAN DASAR YANG DITUNJANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KESEHATAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	30.000.000,00
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KESEHATAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Koordinasi dan Sinkornisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	988.380.000,00
JUMLAH					1.734.140.000,00

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 SASARAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2024

Didalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesawaran diperlukan interkoneksi perencanaan pembangunan, dimana didalam dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026, terdapat sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus selaras dan memiliki interkoneksi dengan sasaran maupun indikator sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pesawaran. Makna selaras dan sejalan bahwa sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah atau IKU Kabupaten didalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 menjadi acuan didalam penyusunan sasaran dan indikator sasaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didalam perhitungan indikator Renstra-PD memuat angka-angka yang memiliki hubungan linier maupun komposit dengan indikator Kabupaten Pesawaran.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesawaran Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA/SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KONDISI/TARGET AKHIR TAHUN 2026
1	Predikat Sakip	Poin	67,50 (B)	80,00 (A)
2	Indeks SPBE	Poin	2,91	3,91
3	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Poin	2,96	3,25
4	Opini BPK-RI	Opini	WTP	WTP
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,50	3,70
6	Tingkat aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	Persentase	70,81%	74,00%
7	Indeks infrastruktur dasar	Persentase	88,19%	91,29%
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	63,77	74,40
9	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Poin	7,90 - 8,30	8,70
10	Angka Harapan Lama Sekolah	Poin	12,71 - 12.48	12,56
11	Angka harapan hidup	Poin	69,74 - 69,94	70,54
12	Pengeluaran per Kapita (dalam Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Ribu Rupiah	8.492,00 - 9.718,06	10.612,36
13	Nilai PDRB	Miliar Rupiah	12.803,65	14.368,67
14	Persentase angka kemiskinan	Persentase	12,42%	10,86%
15	Tingkat pengangguran terbuka	Poin	3,74%	3,14%
16	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	287.786,16	348.221,25
17	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Persentase	32,22%	100,00%

6.2 SASARAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024

Sasaran pembangunan di Kabupaten Pesawaran yang dijabarkan kedalam sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agenda prioritas tahunan pada periode 5 (lima) tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Kabupaten Pesawaran. Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Kunci pada Tahun 2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5 ± 0,5	5 ± 0,5	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
1.2	Laju Inflasi	Persen	2 ± 0,5	2 ± 0,5	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
1.3	PDRB per kapita	Juta Rupiah	28,73	29,89	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
1.4	Indeks gini	Poin	0,290	0,27	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
1.5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Juta Rupiah	16,00	15,5	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
1.6	Indeks ketimpangan wiliamson (Indeks ketimpangan regional)	Poin	0,028	0,02	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
1.7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	87,58	89,14	Dinas Sosial
1.8	Rasio kesenjangan kemiskinan	Poin	2,78	2,62	Dinas Sosial
1.9	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	Persen	2,54	2,44	Dinas Sosial
1.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,00-71,00	73	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
1.11	Angka Harapan Lama Sekolah	Poin	12,71 - 12,48	12,56	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
1.12	Angka rata-rata lama sekolah	Poin	7,90 - 8,30	8,7	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
1.13	Angka usia harapan hidup	Poin	69,74 - 69,94	70,54	Dinas Kesehatan
1.14	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,00	0	Dinas Kesehatan
1.15	Prevalensi balita kurang	Persen	0,96	0,92	Dinas Kesehatan
1.16	Cakupan desa siaga aktif	Persen	84,90	88,33	Dinas Kesehatan
1.17	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	74,85	75,15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
1.18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	71,98	73,48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
1.19	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	3,74	3,14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
1.20	Rasio penduduk yang bekerja	Poin	70,00	72	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
1.21	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persen	6,41	6,45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
1.22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas	Poin	90,00	92	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
1.23	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Poin	17,20	17,4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
1.24	Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	Persen	49,15	45,41	Dinas PPPA & PPKB
1.25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,50	3,7	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
1.26	Presentase PAD terhadap pendapatan	Persen	6,58	7,16	Badan Pendapatan Daerah
1.27	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	7,67	8,17	Dinas Ketahanan Pangan
1.29	Penguatan Candang Pangan	Persen	10,76	11,19	Dinas Ketahanan Pangan
1.30	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	85.575,61	89.032,86	Dinas Ketahanan Pangan
1.31	Kontribusi Sektor Pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	44,48	46,28	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.32	Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) perkebunan terhadap PDRB	Persen	21,47	22,34	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.33	Produksi sektor pertanian	Persen	289.798,22	301.506,07	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	16,34	17	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.35	Produksi sektor perkebunan	Ton	32.176,17	33.476,09	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.36	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	Persen	33,61	34,97	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	Persen	27,05	28,14	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
1.38	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	1,32	1,37	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
1.39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	5,37	5,61	Dinas Pariwisata
1.40	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	45,78	47,63	Dinas Perikanan
1.41	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	15,24	15,86	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
1.42	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	14,90	15,5	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
1.43	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	Persen	1,71	1,78	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
1.44	Pertumbuhan industri	Persen	2.360,67	2.456,04	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
1.45	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	Persen	0,04	0,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
01.01	Pendidikan				
01.01.01	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Poin	77,75	80,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.02	Angka partisipasi kasar SD	Poin	101,32	102,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.03	Angka partisipasi kasar SMP	Poin	100,42	101,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.04	Angka Pendidikan yang di Tamatkan	Poin	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.05	Angka Partisipasi Murni SD	Poin	100,00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.06	Angka Partisipasi Murni SMP	Poin	100,00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
01.01.07	Angka Partisipasi Sekolah	Poin	100,00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.08	Angka Putus Sekolah	Poin	0,1050	0,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.09	Angka Kelulusan SD	Poin	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.10	Angka Kelulusan SMP	Poin	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.11	Angka Melanjutkan (AM)	Poin	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.12	Fasilitas Pendidikan TK/PAUD	Persen	98,14	100,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.13	Fasilitas Pendidikan SD	Persen	91,80	93,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.14	Fasilitas Pendidikan SMP	Persen	95,45	97,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.15	Rasio Ketersediaan sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Poin	65,55	68,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.16	Rasio Ketersediaan sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Poin	31,95	33,24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.17	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Poin	780,67	812,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.18	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Poin	795,89	828,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.19	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Sekolah Dasar	Poin	78,07	81,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.20	Rasio Guru Terhadap Murid Per kelas Rata-rata	Poin	11,18	11,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.21	Proporsi Murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	1,04	1,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.22	Angka melek huruf yang berusia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	Poin	101,44	105,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.23	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak Buta Aksara)	Poin	99,00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.01.24	Guru yang memenuhi Kualifikasi s1/DIV	Poin	1,04	1,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01.02	Kesehatan				
01.02.01	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	Poin	0,73	0,7	Dinas Kesehatan
01.02.02	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Poin	0,27	0,3	Dinas Kesehatan
01.02.03	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Poin	0,73	0,7	Dinas Kesehatan
01.02.04	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Poin	0,73	0,7	Dinas Kesehatan
01.02.05	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Poin	33,88	32,54	Dinas Kesehatan
01.02.06	Rasio Pos Yandu per satuan balita	Poin	8,04	7,72	Dinas Kesehatan
01.02.07	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu, per satuan penduduk	Poin	1,14	1,16	Dinas Kesehatan
01.02.08	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk	Poin	0,36	0,34	Dinas Kesehatan
01.02.09	Rasio Dokter per satuan penduduk	Poin	0,13	0,14	Dinas Kesehatan
01.02.10	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Poin	1,56	1,7	Dinas Kesehatan
01.02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani	Persen	100,00	100	Dinas Kesehatan
01.02.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100,00	100	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
01.02.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100,00	100	Dinas Kesehatan
01.02.14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	0,0054	100	Dinas Kesehatan
01.02.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	Persen	0,95	0,91	Dinas Kesehatan
01.02.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	100,00	100	Dinas Kesehatan
01.02.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Poin	1,44	1,38	Dinas Kesehatan
01.02.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100,00	100	Dinas Kesehatan
01.02.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA	Persen	62,42	64,95	Dinas Kesehatan
01.02.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	Poin	156,17	149,99	Dinas Kesehatan
01.02.21	Tingkat Kematian karena tuberkulosis per 100.000 penduduk	Poin	0,1950	0,19	Dinas Kesehatan
01.02.22	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	61,90	64,4	Dinas Kesehatan
01.02.23	Proporsi kasus Ttuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	100,00	100	Dinas Kesehatan
01.02.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	100	Dinas Kesehatan
01.02.25	Penderita Diare yang ditangani	Persen	100,00	100	Dinas Kesehatan
01.02.26	Angka kejadian malaria	Kasus	49,80	47,83	Dinas Kesehatan
01.02.27	Tingkat Kematian akibat malaria	Poin	0,00	0	Dinas Kesehatan
01.02.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Persen	27,77	28,89	Dinas Kesehatan
01.02.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	100,00	100	Dinas Kesehatan
01.02.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Poin	0,0018	0	Dinas Kesehatan
01.02.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Persen	100,00	100	Dinas Kesehatan
01.02.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komperhensip tentang HIV/AIDS	Persen	84,06	87,46	Dinas Kesehatan
01.02.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100,00	100	Dinas Kesehatan
01.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
01.03.01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	91,11	99,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.02	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Poin	0,2360	0,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.03	Persentase Kawasan pemukiman yang belum dapat di lalui kendaraan roda 4 (empat)	Persen	0,0066	0,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
01.03.04	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	Persen	91,11	99,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.05	Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drenase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	1,34	1,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.06	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	0,2357	0,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.07	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	83,83	88,83	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.03.08	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persen	17,22	16,54	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.03.09	Persentase drenase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	97,80	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.03.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	96,76	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.03.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	63,72	66,3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.03.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	86,00	90	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.03.13	Rasio jaringan Irigasi	Poin	0,83	0,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.14	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	86,00	87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Poin	1,43	1,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.16	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	41,10	45,1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.03.17	Tersedianya Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Poin	0,84	0,87	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
01.03.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Poin	0,1561	0,16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.03.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Poin	0,3237	0,34	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.03.20	Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Poin	2,13	2,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.21	Luasan RTH ndica sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Poin	100,00	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.22	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Poin	0,0212	0,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.23	Ruang ndcia yang berubah peruntukannya	Poin	4,9880	5,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.24	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan cara satelit dan ndica foto udara terhadap luas daratan	Poin	0,88	0,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.25	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100,00	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
01.04.01	Rasio rumah layak huni	Poin	0,77	0,81	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.04.02	Rasio Permukiman layak huni	Poin	1,02	1,06	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.04.03	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	100,00	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.04.04	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	52,91	55,05	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.04.05	Persentase Pemukiman yang tertata	Persen	100,00	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.04.06	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	1,40	2,2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.04.07	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	1,40	2,2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.04.08	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Poin	4,27	4,1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.04.09	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	96,91	99,34	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
01.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
01.05.01	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Persen	33,30	34,65	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01.05.02	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persen	100,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01.05.03	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	100,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01.05.04	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan	Persen	100,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01.05.05	Persentase penegakan PERDA	Persen	100,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01.06	Sosial				
01.06.01	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	Persen	69,47	69,73	Dinas Sosial
01.06.02	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	0,45	0,54	Dinas Sosial
01.06.03	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	69,47	69,73	Dinas Sosial
01.06.04	Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan Sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok ndica ekonomi sejenis lainnya	Persen	0,00	0,00	Dinas Sosial
01.06.05	Persentase panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan Sosial	Persen	0,00	0,00	Dinas Sosial
01.06.06	Persentase wahana kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan ndica	Persen	100,00	100	Dinas Sosial

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
01.06.07	Persentase korban bencana yang menerima bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00	100	Dinas Sosial
01.06.08	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100,00	100	Dinas Sosial
01.06.09	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensi yang telah menerima jaminan Sosial	Persen	100,00	100	Dinas Sosial
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
02.01	Tenaga Kerja				
02.01.01	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	Poin	4,32	4,15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.01.02	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Persen	62,42	64,95	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.01.03	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	12,48	12,99	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.01.04	Keselamatan dan perlindungan	Persen	86,35	89,84	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.01.05	Besaran pekerja/baruh yang menjadi peserta program Jamsosteg	Persen	55,14	57,37	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.01.06	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	57,22	59,53	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.01.07	Besaran pemeriksaan perusahaan	Persen	65,55	68,19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.01.08	Besaran penguji peralatan di perusahaan	Persen	35,37	36,8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.01.09	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	5,72	5,95	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.01.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	45,48	47,32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.01.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	33,29	34,64	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.01.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	Poin	76,04	79,11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
02.02.01	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	10,92	11,37	Dinas PPPA & PPKB
02.02.02	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	31,73	33,01	Dinas PPPA & PPKB
02.02.02	Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	Persen	37,45	38,97	Dinas PPPA & PPKB
02.02.02	Rasio KDRT	Poin	0,00	0	Dinas PPPA & PPKB
02.02.03	Persentase Jumlah tenaga kerja di bawah umur	Persen	0,00	0	Dinas PPPA & PPKB
02.02.02	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	95,20	99,04	Dinas PPPA & PPKB
02.02.04	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	Persen	100,00	100	Dinas PPPA & PPKB

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
	terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				
02.02.02	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	Persen	100,00	100	Dinas PPPA & PPKB
02.02.05	Cakupan layanan rehabilitas ndica yang diberikan oleh petugas rehabilitas ndica terlatih oleh perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100,00	100	Dinas PPPA & PPKB
02.02.02	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100,00	100	Dinas PPPA & PPKB
02.02.06	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100,00	100	Dinas PPPA & PPKB
02.02.02	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100,00	100	Dinas PPPA & PPKB
02.02.07	Cakupan layanan reintegrasi ndica bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100,00	100	Dinas PPPA & PPKB
02.02.02	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Poin	1,05	1,09	Dinas PPPA & PPKB
02.02.08	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Poin	1,06	1,1	Dinas PPPA & PPKB
02.02.02	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Poin	1,22	1,27	Dinas PPPA & PPKB
02.02.09	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Poin	3,33	3,46	Dinas PPPA & PPKB
02.02.02	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Poin	1,05	1,09	Dinas PPPA & PPKB
02.02.10	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di stor non pertanian	Persen	42,66	44,38	Dinas PPPA & PPKB
02.03	Pangan				
02.03.01	Ketersediaan pangan utama	kg/jiwa	301,13	313,29	Dinas Ketahanan Pangan
02.03.02	Ketersediaan energi dan protein perkapita	kcal/kapita/hari	1.758.654,71	1.829.704,36	Dinas Ketahanan Pangan
		gram/kapita/hari	16,65	17,32	Dinas Ketahanan Pangan
02.03.03	Pengawasan dan pembinaan keamana pangan	Persen	81,15	84,43	Dinas Ketahanan Pangan
02.04	Pertanahan				
02.04.01	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	24,97	25,97	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.04.02	Penyelesaian kasus tanah negara	Persen	100,00	100	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.04.03	Penyelesaian izin lokasi	Persen	100,00	100	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05	Lingkungan Hidup				
02.05.01	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Dokumen	Ada	Ada	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.02	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten	Dokumen	Ada	Ada	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
02.05.03	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Ada	Ada	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.04	Hasil pengukuran Indeks kualitas air	Indeks	Baik	53,10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.05	Hasil pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	Baik	88,63	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.06	Hasil pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	10.603,36	42,03	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.07	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang di awasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	83,23	86,59	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.08	Peningkatan Kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten	Persen	0,00	0	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.09	Terfasilitasi Pendampingan pengakuan MHA	Persen	0,00	0	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Persen	0,00	0	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional;	Persen	0,00	0	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.12	Penetapan hak MHA;	Persen	0,00	0	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;	Persen	0,00	0	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.14	Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana;	Persen	0,00	0	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat;	Kali	2	2	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup;	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, , izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten;	Persen	100,00	100	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.18	Timbunan sampah yang ditangani;;	Persen	1,62	1,69	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R;	Persen	1,07	1,12	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.20	Persentase cakupan area pelayanan;	Persen	9,09	9,09	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.21	Persentase jumlah sampah yang ditangani;	Persen	1,07	1,11	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.22	Operasionalisasi TPA / TPST / SPA di Kabupaten;	Unit	2	2	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swastavyang diterbitkan;	Persen	0,00	0	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.05.24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.	Persen	0,00	0	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
02.06.01	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Poin	1,00	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.06.02	Rasio bayi berakte kelahiran	Poin	1,00	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.06.03	Rasio pasangan berakte nikah	Poin	1,00	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.06.04	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.06.05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.06.06	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100,00	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.06.07	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	100,00	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
02.07.01	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	100,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02.07.02	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Poin	1,00	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02.07.03	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Poin	1,00	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02.07.04	Persentase LSM aktif	Persen	100,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02.07.05	Persentase LPM Berprestasi	Persen	100,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02.07.06	Persentase PKK aktif	Persen	100,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02.07.07	Persentase Posyandu aktif	Persen	100,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02.07.08	Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02.07.09	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
02.08.01	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Poin	1,72	1,79	Dinas PPPA & PPKB
02.08.02	Total Fertility Rate (TFR)	Poin	2,47	2,57	Dinas PPPA & PPKB
02.08.03	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persen	90,51	94,17	Dinas PPPA & PPKB
02.08.04	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	59,82	62,24	Dinas PPPA & PPKB
02.08.05	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penuduk	Peraturan	4	4	Dinas PPPA & PPKB
02.08.06	Jumlah sector yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	24	24	Dinas PPPA & PPKB
02.08.07	Jumlah kerja sama penyelenggara Pendidikan Formal, Non Formal dan	Perjanjian	2	2	Dinas PPPA & PPKB

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
	Informal yang melakukan pendidikan kependudukan				
02.08.08	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jiwa	2,40	2,5	Dinas PPPA & PPKB
02.08.09	Ratio Akseptor KB	Poin	75,44	78,49	Dinas PPPA & PPKB
02.08.10	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan nikah usia 15 – 49	Persen	78,03	81,18	Dinas PPPA & PPKB
02.08.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	Persen	39,61	41,21	Dinas PPPA & PPKB
02.08.12	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah 20 tahun	Persen	18,15	17,43	Dinas PPPA & PPKB
02.08.13	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	9,53	9,15	Dinas PPPA & PPKB
02.08.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	30,67	31,91	Dinas PPPA & PPKB
02.08.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	31,52	32,8	Dinas PPPA & PPKB
02.08.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	Persen	88,56	92,14	Dinas PPPA & PPKB
02.08.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	Persen	78,15	81,31	Dinas PPPA & PPKB
02.08.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	Persen	80,84	84,1	Dinas PPPA & PPKB
02.08.19	Pusat Layanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	100,00	100	Dinas PPPA & PPKB
02.08.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	58,78	61,16	Dinas PPPA & PPKB
02.08.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100,00	100	Dinas PPPA & PPKB
02.08.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	Persen	97,35	100	Dinas PPPA & PPKB
02.08.23	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100,00	100	Dinas PPPA & PPKB
02.08.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100,00	100	Dinas PPPA & PPKB
02.08.25	Cakupan faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	84,27	87,68	Dinas PPPA & PPKB
02.08.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	Persen	100,00	100	Dinas PPPA & PPKB

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
02.08.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen	0,00	0	Dinas PPPA & PPKB
02.08.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	54,17	56,03	Dinas PPPA & PPKB
02.08.29	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	72,05	74,96	Dinas PPPA & PPKB
02.08.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	20,00	20	Dinas PPPA & PPKB
02.08.31	Persentase Pembiayaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	0,20	0,2	Dinas PPPA & PPKB
02.09	Perhubungan				
02.09.01	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang/Barang	3.142,43	3.017,99	Dinas Perhubungan
02.09.02	Rasio izin trayek	Poin	0,00	0	Dinas Perhubungan
02.09.03	Persentase uji kir angkutan umum	Persen	100,00	100	Dinas Perhubungan
02.09.04	Jumlah Terminal Bis	Unit	0,00	0	Dinas Perhubungan
02.09.05	Persentase layanan angkutan darat	Persen	2,99	3,11	Dinas Perhubungan
02.09.06	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	100,00	100	Dinas Perhubungan
02.09.07	Pemasangan Rambu-Rambu	Persen	21,33	22,19	Dinas Perhubungan
02.09.08	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Poin	2,80	2,69	Dinas Perhubungan
02.09.09	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang/Barang	3.456,21	3.595,84	Dinas Perhubungan
02.09.10	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	Orang/Barang	0,00	0	Dinas Perhubungan
02.10	Komunikasi dan Informatika				
02.10.01	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	11,00	11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02.10.02	Cakupan layanan Telekomunikasi	Persen	1,45	1,51	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02.10.03	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	94,68	98,5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02.10.04	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	74,91	77,93	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02.10.05	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	30,00	36	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02.11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
02.11.01	Persentase Koperasi aktif	Persen	62,63	65,16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.11.02	Persentase UKM non BPR / LKM aktif	Persen	47,34	49,25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.11.03	Persentase BPR / LKM aktif	Persen	93,90	97,69	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02.11.04	Persentase Usaha Mikro Kecil	Persen	89,47	93,09	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
02.12	Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
02.12.01	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	487	587	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.12.02	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	287.786,16	348.221,25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.12.03	Rasio daya serap tenaga kerja	Poin	17,54	18,25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.12.04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Jutaan rupiah)	Persen	3,45	4,17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
02.13.01	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	100,00	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
02.13.02	Persentase wirausaha muda	Persen	100,00	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
02.13.03	Cakupan pembinaan olah raga	Persen	100,00	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
02.13.04	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	58,47	60,83	Dinas Pemuda dan Olahraga
02.13.05	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	68,31	71,07	Dinas Pemuda dan Olahraga
02.13.06	Jumlah atlet berprestasi	Orang	4	4	Dinas Pemuda dan Olahraga
02.13.07	Jumlah prestasi olah raga	Cabor	4	4	Dinas Pemuda dan Olahraga
02.14	Statistik				
02.14.01	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02.14.02	Buku "kabupaten Pesawaran dalam angka"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02.14.03	Buku "PDRB"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02.15	Persandian				
02.15.01	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	11,11	11,11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02.16	Kebudayaan				
02.16.01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Even	11	11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02.16.02	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100,00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02.16.03	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Objek	5	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02.16.04	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Objek	4	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02.17	Perpustakaan				
02.17.01	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Poin	0,83	0,87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02.17.02	Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Poin	0,54	0,56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02.17.03	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Poin	0,90	0,94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02.17.04	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun	Orang	357,20	371,64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02.17.05	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul Buku	99.046	103.048	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
02.17.06	Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Pustakawan	3	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02.18	Kearsipan				
02.18.01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	55,55	77,77	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02.18.02	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	42,66	44,38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Urusan Pilihan				
03.01	Pariwisata				
03.01.01	Kunjungan wisata	Persen	57,27	59,58	Dinas Pariwisata
03.01.02	Lama kunjungan wisata	Orang	161.262	167.777	Dinas Pariwisata
03.01.03	PAD Sektor wisata	Persen	4,17	5,50	Dinas Pariwisata
03.02	Pertanian / Ketahanan Pangan				
03.02.01	Kontribusi ndica pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	44,41	46,21	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
03.02.02	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	21,91	22,79	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
03.02.03	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	16,31	16,97	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
03.02.04	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	33,32	34,67	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
03.02.05	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	5,67	5,9	Dinas Pertanian
03.02.06	Cakupan bina kelompok tani	Persen	93,24	97,01	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan
03.03	Kehutanan				
03.03.01	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	90,22	93,87	Dinas Pertanahan Lingkungan Hidup
03.03.02	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	84,26	80,93	Dinas Pertanahan Lingkungan Hidup
03.03.03	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Poin	0,88	0,88	Dinas Pertanahan Lingkungan Hidup
03.04	Energi dan Sumber Daya				
03.04.01	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	100,00	100	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
03.04.02	Rasio ketersediaan daya listrik	Poin	0,91	0,94	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
03.04.03	Persentase pertambangan tanpa izin	Persen	15,71	16,34	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
03.05	Perdagangan				
03.05.01	Ekspor Bersih Perdagangan	Juta Rupiah	618.646,81	643.640,14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03.05.02	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	43,29	43,99	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03.06	Perindustrian				
03.06.01	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	81,0	85,0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03.07	Transmigrasi				
03.07.01	Persentase transmigrasi swakarsa.	Persen	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
03.08	Kelautan dan Perikanan				
03.08.01	Produksi perikanan	Persen	81,03	84,3	Dinas Perikanan
03.08.02	Konsumsi ikan	Persen	100,00	100	Dinas Perikanan
03.08.03	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	65,55	68,19	Dinas Perikanan
03.08.04	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	54,07	56,26	Dinas Perikanan
03.08.05	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	61,34	63,82	Dinas Perikanan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
03.08.06	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan ndicator	Poin	0,00	0	Dinas Perikanan
03.08.07	Nilai tukar nelayan	Poin	111,90	116,42	Dinas Perikanan
4	PENUNJANG URUSAN				
04.01	Perencanaan Pembangunan				
04.01.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04.01.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04.01.03	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04.01.04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04.01.05	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04.01.06	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04.01.07	Kesatuan rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
04.02	Keuangan				
04.02.01	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
04.02.02	Persentase SILPA	Persen	0,77	0,8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
04.02.03	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	0,77	0,8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
04.02.04	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	1,00	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
04.02.05	Persentase belanja pendidikan (20 %)	Persen	32,00	33,29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
04.02.06	Persentase belanja kesehatan (10 %)	Persen	15,47	16,09	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
04.02.07	Perbandingan antara belanja langsung (program prioritas) terhadap total belanja	Persen	49,76	51,77	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
04.02.08	Perbandingan antara belanja tidak langsung (wajib dan mengikat) terhadap total belanja	Persen	58,12	60,46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
04.02.09	Bagi hasil kabupaten dan desa	Persen	19,36	20,15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
04.02.10	Penetapan APBD	Ketepatan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
04.03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				
04.03.01	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Tahun)	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04.03.02	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	Persen	100,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
04.03.03	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan ndicator	Persen	24,85	27,39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04.03.04	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	39	39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04.03.05	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	171	171	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04.03.06	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	4.800	4.994	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
04.04	Penelitian dan Pengembangan				
04.04.01	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
04.04.02	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
04.04.03	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SIDA	Persen	20,58	21,41	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
04.04.04	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Penerapan SIDA	Persen	2,08	2,16	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
04.05	Pengawasan				
04.05.01	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	100,00	100	Inspektorat
04.05.02	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,0553	0,06	Inspektorat
04.05.03	Jumlah temuan BPK	Persen	8,64	8,3	Inspektorat
04.06	Sekretariat Dewan				
04.06.01	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
04.06.02	Tersusunnya dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
04.06.03	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
III	ASPEK DAYA SAING				
03.01	Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita	Poin	60,34	64,34	Dinas Ketahanan Pangan
03.02	Nilai Tukar Petani	Poin	104,41	106,57	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan
03.03	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Persen	6,73	7	Dinas Ketahanan Pangan
03.04	Produktifitas total daerah	Poin	6,99	7,27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
03.05	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Poin	3.125,00	4.513,89	Dinas Ketahanan Pangan
03.06	Rasio ekspor + import terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Poin	0,04	0,04	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah
03.07	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Poin	0,00	0	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
03.08	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Poin	0,00	0	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
03.09	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	0,05	0,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
03.10	Rasio Ketergantungan	Poin	34,66	33,28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah sebagaimana tabel di bawah ini.

6.3 INOVASI DAERAH

6.3.1 Inovasi Benar Berkah Berkat Bapak Siji

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu amanat konstitusi dalam upaya mencapai tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemiskinan adalah persoalan pembangunan yang dihadapi di setiap wilayah di dunia. Tingginya angka kemiskinan mengundang perhatian dunia untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pengurangan jumlah penduduk miskin dunia menjadi salah satu kesepakatan global yang dinyatakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals /SDGs) yang harus dicapai secara signifikan pada tahun 2026. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang perlu ditangani dalam proses pembangunan baik dalam tingkat nasional maupun tingkat daerah. Dikarenakan karakteristik kemiskinan bersifat multi dimensi, multi sektor, serta multi periode, maka pemerintah harus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui penurunan tingkat kemiskinan dengan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals /SDGs).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan serta penanganan secara menyeluruh secara Bersama dan mengedepankan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesawaran memerlukan upaya dan langkah taktis yang dilakukan secara bertahap, terencana, menyeluruh, terukur dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerintah Daerah (eksekutif maupun legislatif), dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat miskin itu sendiri.

Kebijakan inovatif yang telah dan terus akan dilaksanakan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah melakukan kerja sama program pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dengan melakukan inovasi pada mekanisme penyaluran zakat masyarakat yang dikelola oleh BAZNAS Pesawaran dengan meluncurkan PROGRAM “BERKAH BENAR BERKAT BAPAK SIJI”. Program ini digagas untuk memberikan percepatan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat terwujudnya “Pesawaran Lebih Maju Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif”.

2. Keterkaitan Inovasi yang Dikembangkan dengan Tema RKPD 2024

Tema RKPD 2024 adalah “Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi serta Mengoptimalkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Mandiri” di Kabupaten Pesawaran sangat erat kaitannya dengan tema RKP tersebut sebagai modal dasar bagi terwujudnya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dalam penanganan pemulihan ekonomi yang berdampak akibat pandemik Covid-19.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Inovasi “Berkah Benar Berkat Bapak Siji” merupakan dukungan terhadap Program Rehabilitasi Sosial dalam penanganan kemiskinan, Adapun ruang lingkup inovasi sebagai berikut:

- 1) “BERKAH” (BERas sedeKAH).
- 2) “BENAR” (BENAh Rumah).
- 3) “BERKAT” (BEdah Rumah layaK sehAT).
- 4) “BAPAK SIJI” (BAntuan PAngan Kaum duaFa SIap saJI).

4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dilaksanakannya inovasi ini adalah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan berkelanjutan. Selanjutnya, sasaran yang diharapkan dengan dilaksanakannya inovasi ini adalah :

- 1) Sasaran Bagi Unit Kerja.
Optimalisasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Program Rehabilitasi sosial yang diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.
- 2) Sasaran Bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial serta mendorong pelaksanaan digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Pesawaran.
- 3) Sasaran Bagi BAZNAS Pesawaran
Mewujudkan pengumpulan zakat daerah yang optimal dan penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;

5. Kebaruan Inovasi yang Dikembangkan

Inovasi BERKAH BENAR BERKAT BAPAK SIJI ini sejalan dengan 35 (Tiga Puluh Lima) Agenda Kerja Bupati Terpilih Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan, peningkatan ekonomi UMKM, dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Adapun hal kebaruan yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendanaan yang digunakan dalam inovasi BERKAH BENAR BERKAT BAPAK SIJI tidak bersumber dari APBD melainkan sumber lain yang dihimpun oleh BAZNAS Pesawaran.
- 2) Pemutakhiran data masyarakat miskin yang mencakup masyarakat miskin yang belum terdata dalam DTKS dan program bantuan sosial pemerintah.
- 3) Proses bisnis pelaksanaan program inovasi BERKAH BENAR BERKAT BAPAK SIJI terintegrasi dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesawaran sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 6.1 Proses Bisnis Inovasi Berkah Benar Berkat Bapak Siji dalam kerangka Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesawaran



B. RENCANA INOVASI

1. Input

Menjelaskan manajemen sumber daya yang digunakan untuk mencapai output dan outcome yang diharapkan dari adanya inovasi ini.

a) Anggaran

Anggaran dari inovasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Anggaran untuk Program Inovasi BERKAH BENAR BERKAT BAPAK SIJI

Penyaluran	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023*
Pendidikan	1.537.722.386,00	267.390.000,00	704.370.500,00	721.979.763,00	740.029.258,00
Kesehatan	72.700.000,00	249.995.000,00	455.029.000,00	466.404.725,00	478.064.844,00
Kemanusiaan	2.036.444.563,00	2.587.621.961,00	3.644.677.843,00	3.735.794.790,00	3.829.189.660,00
Ekonomi	200.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00
Dakwah & Advokasi	14.500.000,00	274.865.000,00	208.625.000,00	213.840.625,00	219.186.641,00
Jumlah	3.861.366.949,00	3.387.871.961,00	5.015.702.343,00	5.141.094.903,00	5.269.622.278,00

*angka proyeksi

b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam inovasi ini terdiri dari:

- a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pesawaran,
- b. Pengurus BAZNAS Pesawaran,
- c. Satuan Tugas (Satgas) “Berkah Benar Berkat Bapak Siji”,
- d. Karang Taruna Kabupaten Pesawaran.

2. Proses

Proses pelaksanaan kegiatan inovasi “Berkah Benar Berkat Bapak Siji” adalah sebagai berikut:

a) Melakukan Pendataan dan Sistem Informasi.

Dengan output kegiatan adalah Tersedianya Data Kemiskinan, Data Indikator Kemiskinan Daerah, Tersedianya Sistem Informasi Kemiskinan; dan tersedianya data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

- b) Membentuk Unit Pengumpul ZIS.
Dengan output kegiatan adalah Terbentuknya unit pengumpul ZIS antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dengan BAZNAS Pesawaran.
- c) Melakukan Pengembangan Kemitraan.
Dengan output kegiatan adalah Terinventarisir UMKM setempat sebagai mitra inovasi “Berkah Benar Berkat Bapak Siji”.
- d) Penyaluran Tepat Sasaran.
Dengan output kegiatan adalah tersalurnya inovasi “Berkah Benar Berkat Bapak Siji” sesuai dengan data dan indikator yang telah ditetapkan.
- e) Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat.
Dengan output kegiatan: penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terhadap inovasi “Berkah Benar Berkat Bapak Siji”.

3. Output yang Dihasilkan

Output inovasi “BERKAH BENAR BERKAT BAPAK SIJI” ini adalah bantuan langsung kepada masyarakat miskin berupa:

- 1) “BERKAH” (BERas sedeKAH), bantuan beras sebanyak Rp.150.000,- per KK.
- 2) “BENAR” (BENAh Rumah), bantuan benah rumah sebesar Rp. 7.000.000,- per unit rumah.
- 3) “BERKAT” (BEDah Rumah layaK sehAT), bantuan bedah rumah sebesar 16.000.000,- per unit rumah.
- 4) “BAPAK SIJI” (BAntuan PAngan Kaum duaFa SIap saJI), bantuan makanan siap saji untuk kaum duaFa sebesar Rp.20.000,-/orang sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan melibatkan UMKM setempat.

4. Outcome yang akan dicapai

Outcome dari inovasi ini adalah menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Pesawaran secara signifikan.

Gambar 6.2 Penguatan pemodalan BUMDes melalui Desa Wisata (DEWI) dan Desa Digital (DEDI)



C. REALISASI RENCANA INOVASI

Realisasi yang telah dilaksanakan atau hasil Inovasi “BERKAH BENAR BERKAT BAPAK SIJI” sebagai berikut:

1. Penyaluran ZIS dari waktu ke waktu

Dalam mengurangi beban pengeluaran fakir miskin inovasi “Berkah Benar Berkat Bapak Siji” telah tersalurkan seperti rincian di bawah ini:

Tahun 2019



Tahun 2020



Tahun 2021



2. Keberlanjutan inovasi

Dalam upaya keberlanjutan inovasi, akan dilakukan antara lain:

- a) Pembentukan Satgas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sampai dengan tingkat desa dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Satgas desa bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.
- b) Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pesawaran.

6.3.2 Inovasi TABIK PUN

A. PENDAHULUAN

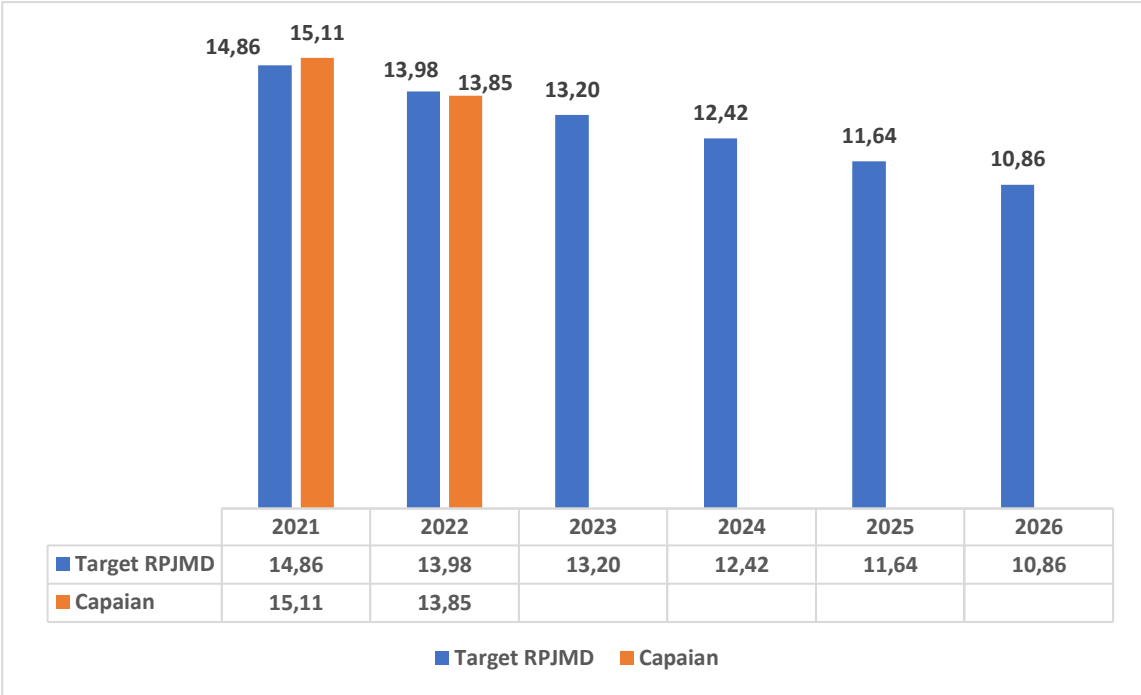
1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan di Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu permasalahan yang menjadi masalah pokok yang dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan. Angka kemiskinan Kabupaten Pesawaran dalam tujuh tahun terakhir selalu di atas rata-rata Provinsi Lampung.

Pada periode RPJMD 2016-2021 dan 2021-2026, penurunan kemiskinan menjadi sasaran strategis pemerintah Kabupaten Pesawaran. Capaian penurunan angka

kemiskinan Kabupaten Pesawaran sudah mengalami tren penurunan dengan besaran penurunan yang rata-rata lebih besar dari Provinsi Lampung dan memenuhi target namun dengan persentase yang masih tinggi sehingga masih menjadi masalah yang harus terselesaikan.

Gambar 6.3 Target dan Capaian Kemiskinan Kabupaten Pesawaran RPJMD 2021-2026



Sumber : RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026

Searah dengan target kemiskinan yang menurun setiap tahun, maka pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesawaran memerlukan upaya dan langkah taktis yang dilakukan secara bertahap, terencana, menyeluruh, terukur dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerintah Daerah (eksekutif maupun legislatif), dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat miskin itu sendiri.

UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian karena beberapa hal yaitu menyerap tenaga kerja yang banyak, menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat, kemudahan dalam adopsi teknologi baru dan inovasi bisnis, sistem birokrasi yang simpel dan karyawan tidak terlalu banyak sehingga mempermudah dalam manajemen bisnis dan fleksibilitas tinggi sehingga mampu bertahan di era bisnis yang dinamis. Kebijakan inovatif yang telah dan terus akan dilaksanakan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah melalui program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan UMKM dan IKM. Program ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku UMKM dan IKM untuk melakukan pendampingan kepada usaha mikro kecil dan menengah, membantu dan mengawasi serta mendukung kegiatan usaha UMKM dan IKM untuk meningkatkan produktivitas setiap pelaku usaha dan hal ini diharapkan akan menciptakan kesejahteraan untuk setiap pelaku usaha. Beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM dan IKM di Kabupaten Pesawaran:

- a. Minimnya modal: permasalahan yang sering diutarakan oleh UMKM dan IKM dari masa ke masa adalah minimnya modal. UMKM dan IKM merupakan usaha yang mayoritas pendirinya adalah dari kalangan ekonomi menengah kebawah dan dengan adanya UMKM dan IKM yang didirikan diharapkan mampu menjadi penopang utama perekonomian keluarga mereka. Oleh karena itu permasalahan modal selalu menjadi *highlight* dalam perkembangan UMKM dan IKM.
- b. Infrastruktur kurang memadai: Kendala selanjutnya dari pengembangan UMKM dan IKM adalah infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur yang paling dibutuhkan UMKM dan IKM saat ini diantaranya adalah lokasi yang memadai, transportasi yang mudah dan lancar serta teknologi dan digitalisasi. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah yaitu NAWACITA dimana pemerintah ingin

- membangun ekonomi negara melalui pinggiran dengan memperkuat perekonomian daerah dan desa sebagai tonggak perekonomian nasional.
- c. Kebijakan makroekonomi yang kurang mendukung: Kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangat berdampak pada sektor-sektor ekonomi masyarakat termasuk UMKM dan IKM. Diantaranya adalah kebijakan terkait pajak yang berdampak pada biaya operasional usaha, kebijakan ekspor-impor yang berdampak pada kelangkaan dan naiknya harga bahan baku hingga kebijakan pengaturan jam aktivitas masyarakat di era pandemi yang sangat berdampak pada UMKM dan IKM. Oleh karena itu kebijakan yang diambil pemerintah harus dievaluasi dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah sudut pandang kepentingan UMKM dan IKM.
 - d. Biaya bahan baku tinggi: kenaikan biaya bahan baku juga merupakan kendala dalam pengembangan UMKM dan IKM. UMKM dan IKM merupakan sektor industri yang mengedepankan keunggulan harga yang relatif murah. Oleh karena itu, jika bahan baku naik maka UMKM dan IKM mengalami dilema, jika harga dinaikkan maka konsumen berkurang dan jika harga tidak dinaikkan maka keuntungan berkurang. Dalam hal ini, peran pemerintah dalam menstabilkan harga bahan baku sangat diperlukan sehingga UMKM dan IKM mampu mendapatkan pendapatan yang stabil bahkan meningkat.
 - e. Permintaan rendah: permasalahan yang kerap dihadapi UMKM dan IKM adalah rendahnya permintaan atau pangsa pasar. Disuatu daerah atau lokasi tertentu, jumlah UMKM dan IKM sangatlah banyak, sehingga menumbuhkan persaingan yang ketat, persaingan tersebut menimbulkan perebutan pangsa pasar. Oleh karena itu UMKM dan IKM perlu melakukan inovasi dan terkadang harus diversifikasi produk agar mampu bersaing dan meningkatkan pangsa pasar.
 - f. Pekerja kurang terampil: keterampilan SDM merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan suatu bisnis. UMKM dan IKM kerap mengalami permasalahan kurangnya kualitas SDM, hal tersebut dikarenakan gaji yang ditawarkan juga terbatas dan tidak adanya seleksi ketat dalam perekrutan karyawan. Oleh karena itu, UMKM dan IKM memerlukan pendampingan dan pelatihan SDM agar mampu mencetak karyawan yang terampil dan menghasilkan produk yang berkualitas.

Untuk mengoptimalkan perkembangan UMKM dan IKM maka pemerintah harus ikut serta dan menciptakan kebijakan yang mendukung kemajuan UMKM dan IKM melalui inovasi penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Industri Kecil Menengah dengan meluncurkan Program **“TABIK PUN” (Training, Bantuan Modal, Insentif, Kolaborasi dan Pusat Perbelanjaan)**. Dengan program ini diharapkan dapat memperkuat program yang telah dilaksanakan demi terwujudnya “Pesawaran Lebih Maju Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif”.

2. Keterkaitan Inovasi yang Dikembangkan dengan Tema RKPD 2024

Tema RKPD 2024 adalah *Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi serta Mengoptimalkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Mandiri*. Inovasi PROGRAM “TABIK PUN” di Kabupaten Pesawaran sangat erat kaitannya dengan tema RKP tersebut terkhusus pada salah satu Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran yakni Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing sebagai modal dasar bagi terwujudnya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan yang dimulai dari perdesaan dengan memanfaatkan potensi dan unggulan yang tersedia di Kabupaten Pesawaran.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Inovasi Tabik Pun dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang terintegrasi sesuai dengan lima karakteristik inovasi yaitu:

- a. Keunggulan relatif
Inovasi Tabik Pun berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama pada pelaku UMKM dan IKM, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, tersedianya sarana dan prasarana penunjang hingga peningkatan tenaga kerja yang terampil.
- b. Kompatibilitas

Konsisten dalam mengatasi permasalahan kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku usaha UMKM dan IKM dengan menyelenggarakan pelatihan (training), pemberian bantuan modal, pemberian insentif, melakukan kolaborasi, dan menciptakan pusat perbelanjaan.

- c. Kerumitan
Pelaku usaha UMKM dan IKM tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan inovasi Tabik Pun, pelaku usaha yang merasa kesulitan akan diberikan pendampingan dan fasilitasi oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja.
- d. Kemampuan diujicobakan
Inovasi telah dilaksanakan sejak Tahun 2020 dan telah menunjukkan hasil yang baik hingga saat ini.
- e. Kemampuan untuk diamati
Hasil inovasi Tabik Pun dapat dipelajari oleh pihak lain sehingga dimungkinkan untuk diterapkan ditempat lain.

4. Tujuan dan Sasaran

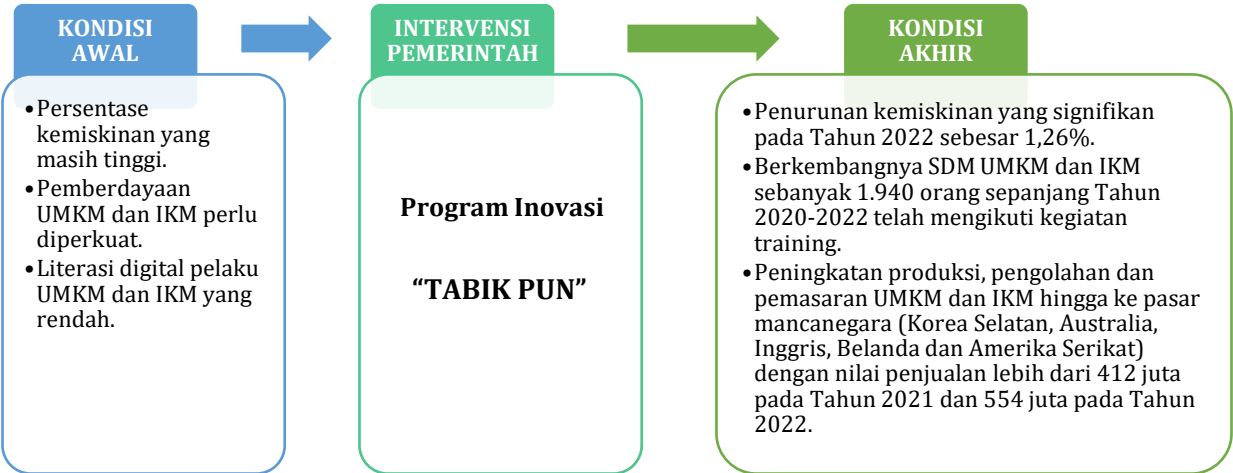
Tujuan dilaksanakannya inovasi ini adalah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan berkelanjutan. Selanjutnya, sasaran yang diharapkan dengan dilaksanakannya inovasi ini adalah :

- a. Sasaran Bagi Pelaku UMKM dan IKM.
 - 1. Meningkatnya pendapatan pelaku UMKM dan IKM.
 - 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi UMKM dan IKM.
 - 3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang.
 - 4. Meningkatnya pemasaran produk UMKM dan IKM ke pasar nasional dan internasional.
 - 5. Meningkatnya tenaga kerja yang terampil.
- b. Sasaran Bagi Unit Kerja.
 - 1. Dinas Koperasi dan UMKM dan Tenaga Kerja dengan sasaran persentase UMKM yang usahanya meningkat dan persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan.
 - 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan sasaran berkembangnya sarana distribusi perdagangan, meningkatnya pemasaran produk dalam negeri dan tumbuhnya sentra dan kawasan industri.
- c. Sasaran Bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran
Meningkatkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pengembangan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah dan industri kecil menengah untuk pengembangan ekonomi daerah yang lebih inklusif dengan peningkatan daya ungkit dari sektor produktif di daerah dengan memprioritaskan pengembangan sektor usaha yang berkaitan erat dengan usaha masyarakat miskin dan rentan yang masih memiliki potensi tumbuh serta punya peluang berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis dalam peningkatan skala usahanya.

5. Kebaruan Inovasi yang Dikembangkan

TABIK PUN merupakan program inovasi pengembangan dari Agenda Kerja dalam rangka Pembentukan Pesawaran Mart (P-Mart) dan Bantuan Pemodal UMKM yang merupakan salah satu dari 35 Agenda Kerja Bupati dan Wakil Bupati yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. Jika dalam Agenda Kerja tersebut hanya berfokus pada bantuan pemodal, maka TABIK PUN hadir dalam ruang lingkup yang lebih luas yakni menyasar pada training (pelatihan), bantuan permodalan, pemberian insentif, kolaborasi antar stakeholder yang meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pusat perbelanjaan melalui pemanfaatan teknologi untuk memperluas pasar domestik hingga mancanegara. Kebaruan TABIK PUN ini telah memberikan dampak dan kontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan pekerja.

Gambar 6.4 Proses Bisnis Inovasi TABIK PUN



Program Inovasi "TABIK PUN"



Tahapan Inovasi

- a. Tahapan pelaksanaan inovasi antara lain:
1. Melakukan pendataan potensi dan pengembangan UMKM dan IKM masyarakat miskin dan rentan yang masih memiliki potensi tumbuh;
 2. Menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah dan industri kecil menengah;
 3. Melakukan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Retail-Retail swasta;
 4. Fasilitasi dan pendampingan usaha dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi.
- b. Tahapan pelaksanaan inovasi sudah berlangsung dari tahun 2020 diantaranya:
1. Melakukan pendataan potensi dan pengembangan UMKM dan IKM yang terdampak Covid-19.
Berdasarkan hasil pendataan UMKM dan IKM, jumlah UMKM dan IKM di Kabupaten Pesawaran sebanyak 7.394 UMKM dan 2.058 IKM. Pada Tahun 2019 UMKM yang produktif sebanyak 1.259 UMKM dan jumlah IKM yang produktif sebanyak 509 IKM. Pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 jumlah UMKM yang produktif berkurang menjadi 1.055 UMKM dan jumlah IKM yang produktif berkurang menjadi 482 IKM.
 2. Melakukan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pengembangan UMKM dan IKM.
Menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Program Kerja bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesawaran antara lain:

- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan UMKM;
 - Program Pengembangan UMKM;
 - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
3. Melakukan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Retail-Retail swasta. Tahapan selanjutnya dalam mengembangkan UMKM dan IKM di Pesawaran adalah dengan melakukan kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah kolaborasi atau kerjasama antara UMKM dan IKM dengan pihak lain (Perguruan Tinggi dan Retail-Retail Swasta) dengan pemerintah sebagai fasilitator. Bekerjasama atau berkolaborasi dilakukan yaitu dengan melakukan pendampingan dan membantu UMKM dan IKM dalam pemasaran dan peningkatan kualitas produk.

Kolaborasi yang pertama adalah kolaborasi atau kerjasama dengan Universitas di Lampung. Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan konsep pendampingan, even atau bazar dan pemasaran. Program pendampingan dilakukan dengan mengirimkan beberapa delegasi dari perguruan tinggi secara kontinu dan berkala untuk mendampingi UMKM dan IKM mulai dari proses produksi, packaging hingga pemasaran dan pasca penjualan. Dari program tersebut akademisi dapat mendapatkan pengalaman sedangkan pelaku UMKM dan IKM memperoleh ilmu dan pengetahuan teoritis dalam berbisnis. Disisi lain akademisi merupakan pihak yang tepat untuk membantu UMKM dan IKM dalam melakukan digitalisasi.

Kolaborasi yang kedua adalah kolaborasi dengan ritel-ritel swasta di Pesawaran. Kerjasama ini sudah dilakukan oleh UMKM dan IKM Pesawaran dan Indomaret dengan pemerintah sebagai fasilitator serta penguatan permodalan finansial dan non finansial secara berkala.

4. Melakukan fasilitasi dan pendampingan usaha dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta desain dan teknologi melalui penyaluran bantuan, pelatihan, dan identifikasi sebaran (Mapping) Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dimana produk yang dihasilkan berupa pemetaan baik berupa hardcopy (Peta) maupun softcopy (aplikasi). Tujuannya agar dapat diketahui sebaran dari koperasi, pelaku UMKM, dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan.

B. RENCANA INOVASI

1. Input

Unsur-unsur yang terkait dengan upaya yang dilakukan agar inovasi dapat menjawab permasalahan dan mencapai tujuan yang diinginkan, meliputi penjelasan manajemen sumber daya yang digunakan untuk mencapai output dan outcome yang diharapkan dari adanya inovasi ini. Berikut input yang dibutuhkan dalam pelaksanaan inovasi TABIK PUN:

- a. Regulasi yang dikeluarkan terkait pelaksanaan inovasi “TABIK PUN” adalah sebagai berikut:
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penguatan Modal Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pesawaran;
 - Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

- Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 103/V.01/HK/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesawaran;
 - Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 232/IV.21/HK/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Pesawaran; dan
 - Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 467/V.01/HK/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Forum Komunikasi CSR) Kabupaten Pesawaran Periode 2022-2024.
- b. Alokasi Anggaran bersumber:
- APBN;
 - APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2022;
 - Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Forum Komunikasi CSR) Kabupaten Pesawaran;
 - Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang terlibat dalam inovasi ini terdiri dari:
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran;
 - Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran;
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran;
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
 - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Pesawaran;
 - Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Pesawaran;
 - Forum Komunikasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Forum Komunikasi CSR) Kabupaten Pesawaran;
 - Pelaku UMKM dan IKM Kabupaten Pesawaran;
 - Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
 - PT. Bank Lampung;
 - PT. Indomarco Prismaatama.
- d. Inisiator dan Penanggung Jawab:
- Bupati Pesawaran;
 - Wakil Bupati Pesawaran.
- e. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi:
- Pengelolaan dan Pengembangan Data Kemiskinan;
 - Pengembangan Indikator Kemiskinan Daerah;
 - Pengembangan Sistem Informasi Kemiskinan;
 - Online Data System (ODS);
 - e-Katalog Lokal/Sektoral Kabupaten Pesawaran;
 - Sistem Informasi Monitoring Kinerja UMKM (SiMoniK).
- f. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam inovasi ini adalah:
- Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran;
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran;
 - Sekretariat TKPKD Kabupaten Pesawaran.

2. Proses

Proses pelaksanaan kegiatan inovasi TABIK PUN (TRAINING, BANTUAN MODAL, INSENTIF, KOLABORASI, PUSAT PERBELANJAAN) adalah sebagai berikut:

a. Training

Dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha UMKM dan IKM serta *stakeholder terkait* sebanyak 1.940 pelaku usaha dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2022 sebesar Rp2.989.498.500,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Gambar 6.5 Dokumentasi Kegiatan Training



b. Bantuan Modal

Disalurkan untuk menunjang kapasitas produksi dan operasional pelaku usaha UMKM dan IKM sebanyak 49.109 pelaku dan 44 kelompok usaha dengan sumber pendanaan APBN dan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2022 sebesar Rp60.568.025.850,00 yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja.

Gambar 6.6 Dokumentasi Kegiatan Bantuan Modal



c. Insentif

Diberikan sebagai bentuk penghargaan dan dukungan pengembangan usaha UMKM dan IKM yang berprestasi sebanyak 118 kelompok usaha dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2022 sebesar Rp1.189.730.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Gambar 6.7 Dokumentasi Kegiatan Insentif

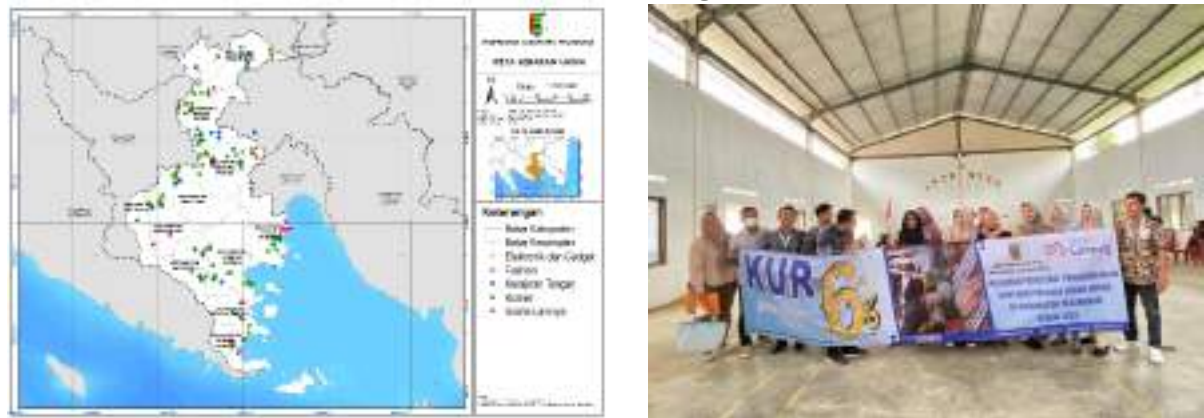


d. Kolaborasi

Sinergi pembangunan usaha UMKM dan IKM dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga jasa keuangan melalui:

- Pengolahan Data Pelaku UMKM Kabupaten Pesawaran dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Debitur dan Calon Debitur Pelaku UMKM. Teridentifikasinya data pelaku UMKM by name by address terintegrasi dengan data kemiskinan, Klaster UMKM dan IKM (berdasarkan wilayah, kriteria usaha, bidang usaha, skala modal serta potensi pendapatan per tahun) dan tersedianya kebutuhan pemberian modal finansial dan non finansial melalui skema penyaluran KUR maupun bantuan fasilitasi dan pendampingan.
- Melakukan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Jasa Keuangan. Terinventarisirnya UMKM dan IKM setempat sebagai mitra inovasi TABIK PUN dan tersedianya pojok UMKM dan IKM sebagai tempat dan wadah konsultasi langsung mengenai pengajuan modal usaha di gerai Lembaga Jasa Keuangan setempat.
- Business Matching dan Kolaborasi bersama Mitra UMKM dan IKM, Lembaga Jasa Keuangan, Universitas dan Perusahaan Marketplace/E-commerce. Tersedianya model bisnis mitra, pengembangan, dan pembangunan UMKM dan IKM berbasis teknologi digital.

Gambar 6.8 Dokumentasi Kegiatan Kolaborasi





e. Pusat Perbelanjaan

Dukungan pemasaran produk UMKM dan IKM untuk meningkatkan nilai omset pasar yang berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha maupun tenaga kerja

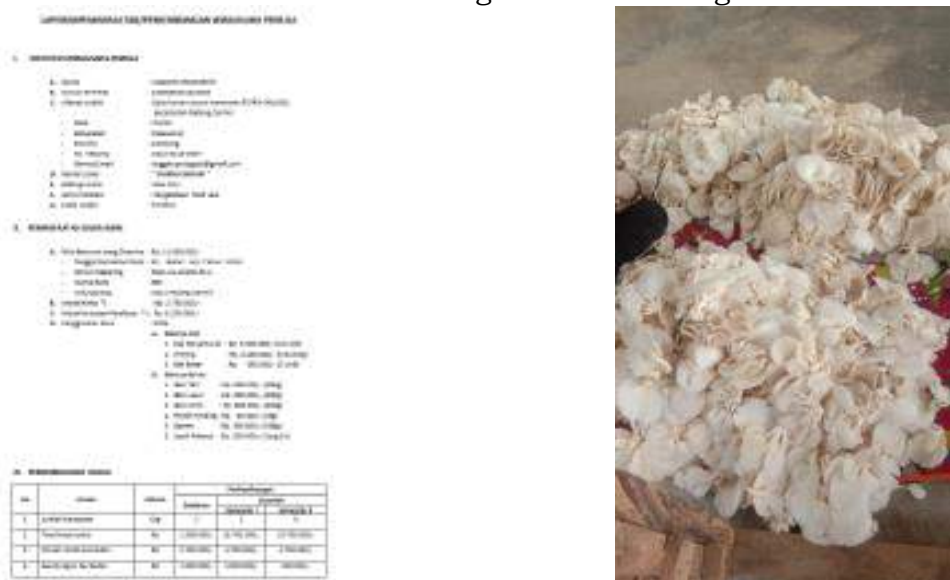
Gambar 6.9 Dokumentasi Kegiatan Pusat Perbelanjaan



f. Monitoring dan Evaluasi

Upaya untuk menjaga ekosistem bisnis UMKM dan IKM berkelanjutan dan sehat pada setiap proses pelaksanaan inovasi TABIK PUN.

Gambar 6.10 Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi





C. REALISASI RENCANA INOVASI

Realisasi yang telah dilaksanakan atau hasil Inovasi “TABIK PUN” sebagai berikut:

1. Produk UMKM Kabupaten Pesawaran

Produk UMKM berupa produk olahan makanan ringan dan minum bubuk yang dalam pembuatannya menggunakan bahan baku dari wilayah Kabupaten Pesawaran sebagai bentuk pemberdayaan sumber daya lokal. Produk-produk UMKM tersebut sebagai berhasil menembus pasar global (Korea Selatan, Australia, dan Inggris) yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki produk usaha lokal yang dapat bersaing dan berpotensi dikembangkan lebih besar dikemudian hari.

2. Produk IKM Kabupaten Pesawaran

Pada Tahun 2022 akan dilaksanakan pelatihan SDM DIGITAL sebanyak 100 orang perwakilan pemuda-pemudi yang terpilih dari 144 perwakilan dari Desa di seluruh Kabupaten Pesawaran. Fokus pelatihan SDM DIGITAL akan diprioritaskan pada kegiatan yang menunjang pengembangan sektor pariwisata.

3. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Retail Swasta

Kolaborasi sebagai upaya percepatan pembangunan UMKM dilakukan dengan melibatkan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dalam mengembangkan Sistem Informasi Monitoring Kerja UMKM, kerjasama waralaba Indomaret untuk pemasaran produk UMKM, dan pelatihan kewirausahaan UMKM yang produktif dan berkualitas bersama PT. Indomarco.

Gambar 6.11 Dokumentasi Output Produk UMKM, IKM, dan Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Retail Swasta



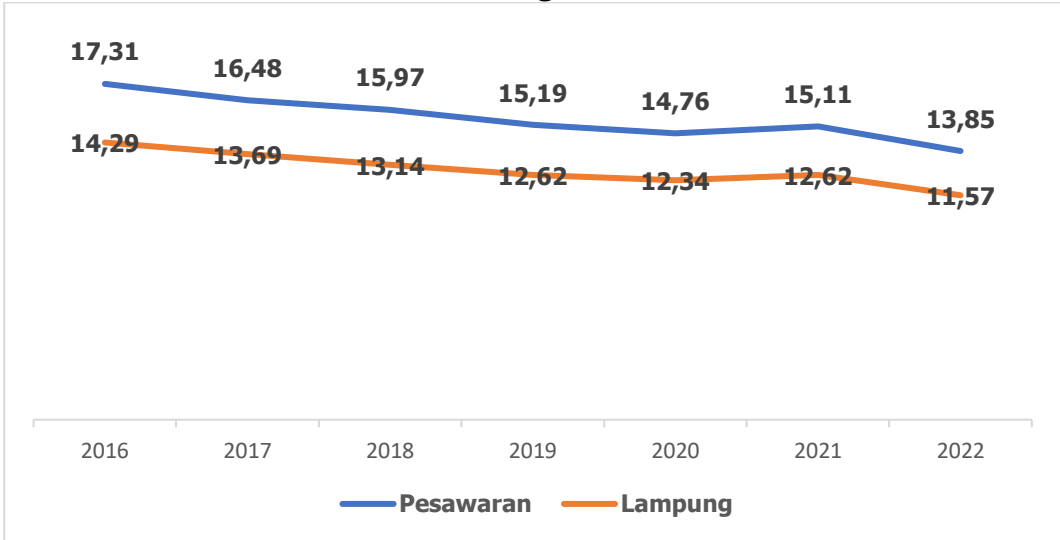


4. Outcome

Outcome dari inovasi ini adalah:

- Menurunnya persentase penduduk miskin dan persentase penurunan penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran yang konsisten dan signifikan pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin Kabupaten Pesawaran berkurang sebesar 1,26 % dari 15,11 % menjadi 13,85 %.

Gambar 6.12 Grafik Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2016-2022



- Penguatan dan pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dengan meningkatnya pelaku UMKM dan IKM produktif. Pasca pandemi Covid-19 Program Inovasi “Tabik Pun” mampu meningkatkan jumlah pelaku UMKM dan IKM Produktif di Kabupaten Pesawaran. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah UMKM yang produktif tahun 2021 sebanyak 1.213 UMKM (16,41%) meningkat pada tahun 2022 sebanyak 1.371 UMKM (18,54%) dari 7.394 UMKM di Kabupaten Pesawaran. Sedangkan IKM yang produktif mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 521 IKM (25,34%) menjadi 615 IKM (29,89%) pada Tahun 2022 dari 2.058 IKM di Kabupaten Pesawaran.

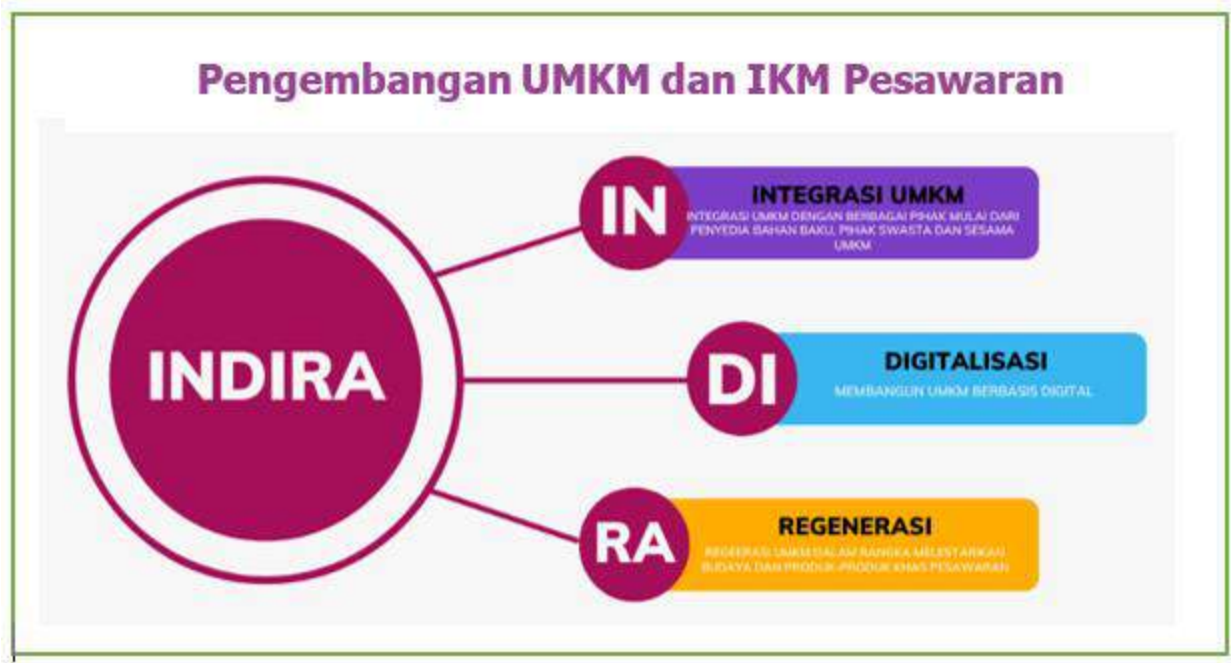
Tabel 6.4 Tabel Data UMKM dan IKM Kabupaten Pesawaran

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah UMKM yang produktif	1.259	1.055	1.213	1.371
2	Jumlah UMKM yang produktif / Jumlah UMKM x 100%	17,03	14,27	16,41	18,54
3	Jumlah IKM yang produktif	509	482	521	615
4	Jumlah IKM Produktif / Jumlah seluruh IKM x 100%	24,75	23,41	25,34	29,89

D. KEBERLANJUTAN INOVASI

Dalam upaya keberlanjutan Inovasi Tabik Pun, akan dilakukan penerapan Program Inovasi Indira.

Gambar 6.13 Proses Bisnis Inovasi INDIRA



1. Integrasi UMKM dan IKM.

Integrasi yang akan dilakukan adalah integrasi dalam beberapa aspek. Pertama dalam aspek produksi. Pemerintah menjadi fasilitator dalam mengintegrasikan UMKM dengan penyedia bahan baku yang tepat dan sesuai dengan kondisi perekonomian. Kedua adalah integrasi antara UMKM dengan pihak swasta dalam penjualan produk. Pada aspek ini pemerintah sebenarnya sudah memfasilitasi UMKM dalam bekerjasama dengan retail swasta.

Kerjasama tersebut masih memiliki permasalahan atau kekurangan yaitu dalam MOU yang masih berpotensi merugikan UMKM dan IKM. Oleh karena itu selanjutnya diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi kerjasama yang sudah berjalan dan memperbaiki MOU kerjasama agar dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Selanjutnya integrasi dilakukan antar sesama UMKM dan IKM di Kabupaten Pesawaran. Integrasi UMKM dan IKM bertujuan untuk meningkatkan branding bersama dan mengembangkan pangsa pasar lebih luas. Salah satu bentuk integrasi antar UMKM dan IKM juga dapat dilakukan dengan mengadakan bazar. Pengembangan UMKM dan IKM dengan melakukan produksi secara selektif, jadi UMKM dan IKM memproduksi produk yang benar-benar mudah laku dan menunda produksi produk yang sulit laku, disisi lain pemerintah juga berinisiasi menggelar bazar-bazar untuk meningkatkan penjualan.

2. Digitalisasi.

Perkembangan teknologi digital semakin pesat, khususnya semenjak pandemi Covid-19. Hal ini juga mendorong perilaku masyarakat untuk berbelanja daring. Tak heran, platform perdagangan elektronik menjadi laris manis sebagai pilihan masyarakat untuk berbelanja dan bertransaksi.

Digitalisasi UMKM dan IKM adalah perubahan dari sistem konvensional ke digital sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional UMKM dan IKM. Digitalisasi UMKM dan IKM membuat pelaku usaha UMKM dan IKM mengubah pengelolaan bisnisnya dari praktik konvensional ke modern. Digitalisasi merupakan inovasi dan terobosan yang dapat meningkatkan pangsa pasar secara luas. Disisi lain digitalisasi juga merupakan keharusan untuk mengimbangi perkembangan zaman dan memenuhi permintaan pasar.

Terdapat dua model digitalisasi yang dapat diimplementasikan di UMKM dan IKM Kabupaten Pesawaran yaitu:

- a. Digitalisasi dalam bentuk platform yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk menampung, mengembangkan dan menjual produk-produk dari UMKM dan IKM di Kabupaten Pesawaran. Implementasinya dapat dilakukan dengan pemerintah mempekerjakan ahli di bidang teknologi dan informasi untuk membuat platform yang menampung semua produk UMKM di Kabupaten Pesawaran yang terdaftar dan terseleksi dengan tepat. Konsep tersebut sangat membantu bagi UMKM dan IKM dalam pemasaran dan pengembangan produk.
- b. Digitalisasi secara mandiri oleh masing-masing UMKM dan IKM. Dalam hal ini pemerintah memberikan fasilitas pembinaan pendampingan dan pemantauan dalam proses digitalisasi. Proses digitalisasi mencakup persiapan produk, packaging produk, pembuatan akun digital, foto produk, penjualan produk, feedback konsumen dan peningkatan traffic pada platform digital. Implementasi tersebut memang lebih rumit akan tetapi dapat dibantu dengan kolaborasi bersama pihak lain seperti Universitas yang dapat mengirimkan mahasiswa atau dosen yang lebih berpengalaman dalam digitalisasi untuk mendampingi UMKM dan IKM, bagi akademisi kerjasama ini dapat dijadikan penelitian maupun program pengabdian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

3. Regenerasi UMKM.

Kebijakan selanjutnya adalah regenerasi UMKM dan IKM. Produk-produk UMKM dan IKM merupakan cerminan budaya bagi suatu daerah. Begitu juga di Kabupaten Pesawaran, UMKM dan IKM di Kabupaten Pesawaran memiliki banyak produk diantaranya produk usaha kuliner, alat mesin pertanian, pakaian jadi, kerajinan, sabun cuci, kosmetik, cairan pembersih lantai, serta madu dan hasil lebah selain madu. Beberapa produk tersebut menjadi bagian dari budaya di Kabupaten Pesawaran yang harus dilestarikan. Salah satu upaya dalam melestarikan budaya yang tercermin dalam produk UMKM dan IKM adalah dengan meregenerasi pelaku UMKM dan IKM.

Regenerasi UMKM dan IKM dilakukan dengan pendidikan keterampilan dan bisnis bagi pemuda di Kabupaten Pesawaran, khususnya bagi putra dan putri pemilik UMKM dan IKM. Kabupaten Pesawaran hendaknya memperhatikan masa depan pemuda pemudi sebagai generasi penerus, salah satunya dengan memberikan fasilitas pendidikan, pendampingan dan pembinaan dalam memproduksi dan memasarkan produk khas Pesawaran.

Para generasi penerus harus dilibatkan sejak dini untuk memahami proses bisnis dan ikut serta dalam mengembangkan UMKM dan IKM. UMKM dan IKM di Kabupaten Pesawaran rata-rata dikelola oleh masyarakat yang sudah tidak tergolong muda, sehingga salah satu kesulitan mereka adalah dalam beradaptasi terhadap teknologi.

Solusi untuk membantu SDM pada UMKM dan IKM di Kabupaten Pesawaran adalah dengan bekerjasama atau berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi untuk mendampingi dan membantu UMKM dan IKM dalam pemasaran dan peningkatan kualitas produk. Usulan tersebut cukup menarik dan sejalan dengan salah satu konsep governance dalam pemerintahan yaitu kolaborasi. Terobosan tersebut juga bisa menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan selanjutnya yaitu peningkatan kualitas produk. Pemerintah dapat menjadi fasilitator yang mengkolaborasikan UMKM dan IKM dengan pihak-pihak swasta yang strategis dan menciptakan kerjasama saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

BAB VII PENUTUP

Bahwa salah satu aspek keberhasilan suatu pembangunan ditentukan oleh keberhasilan dalam menyusun perencanaan serta diikuti dengan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dan didukung oleh peran aktif masyarakat dan kalangan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, untuk bersama-sama masyarakat secara sungguh-sungguh melaksanakan dan saling bersinergi dalam mendukung program-program pembangunan sehingga mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Pesawaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 bahwa RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berpedoman pada RPJPD Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dengan mengakomodir Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, dan memperhatikan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis, tantangan, dan permasalahan pembangunan serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia, RKPD yang disusun telah menetapkan 5 (lima) prioritas daerah rencana pembangunan Tahun 2024. Dalam rangka menjamin terlaksananya program/kegiatan yang direncanakan dan mewujudkan sinergi pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024, perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Berkaitan dengan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan, peran serta dan kontribusi dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan aktif sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. RKPD Tahun 2024 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024.
4. Dalam rangka integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN, dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap perangkat daerah harus menyusun dan membuat RENJA PD, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2024.
5. Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, setiap PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil Renja PD dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda sebagai dasar pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024.
6. BAPPEDA wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap laporan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari Renja PD dan RKPD Kabupaten Pesawaran yang hasilnya disampaikan kepada Bupati.

Pada akhirnya, dokumen ini diharapkan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kami menyadari RKPD Tahun 2024 ini masih perlu koreksi dan penyempurnaan lebih lanjut, sehingga diharapkan dapat bersinergi dengan strategi kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah, baik pada tingkat Pusat maupun Provinsi Lampung.

BUPATI PESAWARAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

DENDI RAMADHONA K.